

POKOK-POKOK KAJIAN
SOSIOLOGI INDUSTRI



DR. HIKMAT

SOSIOLOGI INDUSTRI

ISBN: 978-602-0962-21-6

Penulis

Dr. HIKMAT

Editor

Dr. Agus Taufik.

Desain Sampul

Wida Widiyanti, S.Pd

Setting & Layout Isi

Ivan Panji, S.Pd.

Penerbit

Unpas Press Jalan Lengkong Besar no Bandung

Bekerja Sama Dengan

Yayasan Hikmat Insan Cendikia Divisi Penerbitan

Jalan Raya Cinunuk Perum Permatabiru Blok K.116 Cinunuk

Bandung

Edisi Pertama tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang Mengutip Memperbanyak Sebagian Atau Seluruh

Dari Isi Buku Ini

TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT

Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirrohim

Yang pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur Ke-Khadirat Illahi Robby. Shalawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Junjungan Alam Nabi Muhammad SAW. Serta kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan Risalah-Nya sampai akhir zaman. Amin.

Berawal dari keterbatasan mencari buku referensi sebagai bahan ajar terkait dengan mata kuliah Sosiologi Industri. Dari bahan ajar atau *hand out*, penulis kumpulkan kemudian diperbaiki sesuai dengan kebutuhan hingga akhirnya tersusum dengan baik menjadi buku. Dalam buku ini, dijelaskan mengenai dinamika yang terjadi pada masyarakat industrilisasi, struktur sosial masyarakat industri serta berbagai permasalahan sosial timbul pada masyarakat inudustri. Dengan mempelajari Sosiologi Industri, diharapkan dapat memahami tentang konsep, kedudukan dan peran manusia baik secara individu maupun kelompok dalam situasi kehidupan masyarakat industri. Dipelajari pula hubungan dan pengaruh industri terhadap lingkungan sosial, yang di dalamnya termasuk ekonomi, sistem sosial, hubungan sesama manusia, sejarah pertumbuhan industri, pengaruh timbal balik antara industri dengan keluarga dalam lingkungan sosial serta potensi dan perkembangan industri pada masyarakat.

Keinginan menulis buku ini, sudah cukup lama, terutama sejak penulis masih aktif menjadi wartawan yang banyak meliput terkait dengan masyarakat insdustri, maupun kebijakan-kebijakan industri. Setelah melakukan diskusi kecil (FGD) serta konsultasi dengan beberapa kolumnis, penulis mendapatkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, sehingga buku ini menjadi lebih komprehesip, singkat dan padat. Buku diharapkan menjadi referensi serta menambah khazanah perbendaharaan bagi dunia akademik, khususnya dalam ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan lainnya.

Pribahasa mengatakan “tak ada gading yang tak retak”. Sebagai penulis tentu menyadari, kajian dan sajian buku “Sosiologi Industri” tentu tidak sempurna, namun lebih tidak sempurna jika buku ini tidak ada.

Bandung, 6 Januari 2019

ttd

DR. Hikmat

Daftar Isi (Draft)

Kata Pengantar
Daftar Gambar
Daftar Bagan
Daftar Isi

	Halaman
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Sosiologi Industri.....	4
C. Ruang Lingkup dan Objek Sosiologi Industri.....	7
D. Cakupan Sosiologi Industri	8
E. Manfaat Sosiologi Industri	9
F. Prinsip-prinsip Sosiologi Industri	10
G. Tokoh Sosiologi Industri Gagasan Dan Pemikirannya.....	11
H. Penerapan Ilmu Sosiologi Pada Disiplin Ilmu lainnya	17
Bab II Arah Dan Pengembangan Sosiologi Industri	20
A. Arah Sosiologi Industri.....	20
B. Hubungan Masyarakat Industrial	20
C. Fenomena Industri Kreatif	22
D. Materi dan Pendekatan Sosiologi Industri	23
E. Industri Ramah Lingkungan	24
Bab III Masyarakat Pra-Industri	30
A. Pengertian Masyarakat Pra-Industri	30
B. Pertanian Sebagai Mata Pencaharian Masyarakat Pra-Industri.....	30
C. Pedesaan	31
D. Tradisional	34
E. Proteksi Terhadap Masyarakat Pertanian	36
Bab IV Industri dan Implikasi Sosial	39
A. Rasional	39
B. Stratifikasi Sosial Masyarakat Industri	47
C. Industri dan Politik	50
D. Organisasi Di era Industri	52
E. Industri Dan Implikasinya Terhadap Agama	55
Bab V Masyarakat Modernisasi, Teknologi dan Industrialisasi.....	58
A. Modernisasi	58
B. Teknologi dan Perkembangannya.....	63
C. Tantangan Masa Depan Indonesia	65
D. Hubungan Kausalitas Masyarakat Teknologi, Industrialisasi dan Modernisasi.....	66
Bab VI Sistem Produksi Masyarakat Industrialisasi.....	69

A.	Konsep Produksi Pada Masyarakat Industri.....	69
B.	Karakteristik Produksi Masyarakat Industri.....	77
C.	Sistem Produksi dan Operasi	79
D.	Proses Produksi.....	81
E.	Teori Sistem Produksi Masyarakat Industri	82
Bab VII	Sistem Kerja Masyarakat Industri.....	85
A.	Pengertian Sistem Kerja Masyarakat Industri.....	85
B.	Karakteristik Kerja Masyarakat Industri	86
C.	Perbaikan Sistem Kerja.....	94
D.	Sistem Kerja Lembur dan Dampak Yang Dimbulkannya	98
E.	Sistem Upah dan Kerja Lembur (<i>overtime</i>) dan Dampaknya ..	100
Bab VIII	Perubahan Sosial Masyarakat Industri.....	101
A.	Pengertian Perubahan Sosial Masyarakat Industri.....	102
B.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Sosial.....	111
C.	Proses Perubahan Sosial Masyarakat Industri	118
D.	Fenomena dan Dinamika Masyarakat Industri	125
E.	Industri Dan Masyarakat Yang Akan Datang	128
Bab IX	Masyarakat Buruh Industri.....	131
A.	Pengertian Buruh	131
B.	Masalah Buruh Kontak dan <i>Outsourcing</i>	134
C.	Sejarah Buruh di Dunia dan Indonesia	139
D.	Gerakan dan Solidaritas Buruh	141
E.	Perkembangan Serikat Buruh/Pekerja Di Indonesia	147
F.	Organisasi Serikat Pekerja/Buruh	148
Bab X	Fenomena Konflik Buruh Masyarakat Industri	155
A.	Pengertian Konflik dalam Masyarakat Industri	155
B.	Konflik Buruh Versus Pengusaha dan Pemerintah	155
C.	Penyebab Terjadinya Konflik dalam Industri	159

D. Langkah-Langkah Mengatasi Konflik Industrial	162
Bab XI Pola Hubungan Masyarakat Industri	163
A. Konsep Hubungan Masyarakat Industrial	163
B. Pola Hubungan Industrial (<i>Industrial Relation</i>)	166
C. Ruang Lingkup Hubungan Industrial	168
D. Organisasi Pengusaha	172
E. Peraturan Perusahaan	174
F. Perjanjian Kerja Khusus (PKK)	177
G. Rancangan Sistem Hubungan Industrial di Indonesia	179
Bab XII Industri dan Implikasi Sosial	170
A. Rasionalisasi	170
B. Stratifikasi Sosial dan Perbedaan Status Masyarakat Industri	188
1. Stratifikasi Sosial Masyarakat Industri	188
2. Perbedaan Status Masyarakat Industri	190
C. Industri dan Politik	191
D. Organisasi Di era Industrialisasi	194
E. Agama di Era Industri	196
BAB XIII Stratifikasi Sosial, Konflik dan Mobilitas Sosial Masyarakat Industri	199
A. Individu dan Masyarakat Industri	199
B. Struktur Sosial Masyarakat Industri	200
C. Varian-varian Stratifikasi Sosial Masyarakat Industri	202
D. Konflik Sosial Masyarakat Industri	205
E. Realitas Mobilitas Sosial Masyarakat Industri	212
Bab XIV Dinamika Masyarakat Industri	217
A. Realitas Dinamika Masyarakat Kota	217
B. Dinamika Masyarakat Pedesaan	218
C. Industri, Perubahan Sosial dan Masyarakat Pinggiran	221
D. Masalah Industri Bagi Desa dan Kota	223
Bab XV Masyarakat Pos-Indusri	227
A. Konsep Masyarakat Post-Modern	227
B. Ciri-ciri Masyarakat Post-Indusri	230
C. Perkembangan Masyarakat Post-Indusri di Indonesia	233

	D. Implikasi Masyarakat Post-Industri di Indonesia	234
	E. Masyarakat Post-Industrial Dan Demokratisasi	237
	F. Agama di Era Post-Industri	238
Bab XVI	Industrialisasi dan Masyarakat Indonesia	240
	A. Sebuah Pendekatan	240
	B. Proses Industrialisasi di Indonesia	241
	C. Struktur dan Perubahan Ekonomi Indonesia	241
	D. Masalah Industrialisasi di Indonesia	242
	E. Sumber-sumber Penghematan dan Keuntungan Industri	244
	F. Strategi Pembangunan Sektor Industri	247

Daftar Pustaka
Biografi Penulis
Sinopsis

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan, merupakan awal membahas substansi sosiologi industri, terdiri dari: Latar Belakang, Pengertian Sosiologi Industri, Ruang Lingkup dan Objek Sosiologi Industri, Cakupan Sosiologi Industri, Manfaat Sosiologi Industri, Prinsip-prinsip Sosiologi Industri, Tokoh Sosiologi Industri (Gagasan dan Pemikirannya) serta Penerapan Ilmu Sosiologi pada Disiplin Ilmu lainnya.

A. Latar Belakang

Berawal dari sulitnya menemukan referensi buku yang berjudul sosiologi industri, sekalipun ada, diperoleh dari penjual dan hanya ada beberapa buku lama, maka terlintas dalam pikiran penulis untuk menulis buku Sosiologi industri. Mengingat masih kurangnya perhatian para ahli terhadap kajian sosiologi industri, diharapkan buku ini menjadi khazanah yang akan melengkapi kajian sosiologi industri.

Untuk membicarakan sosiologi industri, sekurang-kurangnya ada dua kosa kata penting yaitu: masyarakat dan industri. Pertama, masyarakat tempat industri, yang mendorong terbentuknya industri dan mereka yang terpengaruh dalam pengertian baik dan buruk oleh industri. *Kedua* adalah kelompok orang yang berada dalam industri dan menjalankan industri tersebut. Kelompok orang ini mengadakan interaksi satu sama lain sehingga dapat kita katakan sebagai masyarakat Industrialisasi yang dianggap menonjol. Kriterianya adalah besarnya dampak industrialisasi yang terjadi terhadap masyarakat. Perkembangan industri (industrialisasi) berpengaruh terhadap kondisi sosiologis masyarakat, dan sebaliknya kondisi sosiologis masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan industri (industrialisasi) dan pengalaman historis tiga negara besar di Eropa pada abad ke-17. Tiga negara besar Eropa antara lain Inggris, Prancis, dan Jerman tampil sebagai Negara industri dengan tingkat perkembangan yang berbeda. Inggris sebagai negara pertama yang mencapai taraf pemerintahan yang demokratis. Revolusi Prancis terjadi karena negara itu tidak demokratis. Di Inggris, perjuangan politik berlangsung dimulai awal abad ke-17 yang melahirkan gerakan revolusi tahun 1640. Adapun dampaknya

adalah hilangnya restriksi lama dengan berpindahnya kekuasaan politik ke genggamannya kaum kapitalis dan berujung yang selanjutnya mereka beraliansi dengan kaum aristokrasi yang lebih progresif. Akibat dari itu, maka perkembangan ekonomi di Inggris maju dengan pesat. Pada abad ke-18, inovasi teknologi mendorong metamorfosis dalam organisasi industri, inovasi ini berpengaruh terhadap penyebaran mesin-mesin dan manufaktur hasil industri pabrik.

Industri manufaktur kapas membuat Inggris sebagai negara maju dalam perkembangan industri. Prancis berbeda dengan Inggris, Revolusi Prancis tahun 1789 merupakan usaha kaum borjuis Prancis untuk menggulingkan tata aristokratik rezim lama dan untuk membentuk sebuah masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan serta kebebasan. Revolusi ini menginstitusionalisasikan perubahan politik dan mengisyaratkan sebuah kelengkapan organisasi masyarakat. Sosiologi mengkaji masyarakat dipandang dari sudut hubungan antarmanusia tersebut di dalam masyarakat. Fokus kajian sosiologi lebih menekankan pada masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti pada kelompok yang sedang banggunya. Oleh karena itu, sosiologi mempelajari perilaku dalam interaksi kelompok serta menganalisis pengaruh kegiatan kelompok terhadap anggotanya. Maka, industri merupakan aplikasi metode-metode yang kompleks dan canggih untuk memproduksi barang dan jasa secara ekonomis. Metode yang kompleks maksudnya adalah menggunakan mesin sebagai alat memperbaiki atau mengembangkan kualitas dan kuantitas produksi. Jadi, manusia dan alat digunakan untuk memenuhi kebutuhan (manusia sebagai makhluk induatri). Industri merupakan konsep yang tidak langsung sosio makna logis, dan sulit menentukan teoretis *orientation* sepanjang garis. Istilah industri telah diambil alih dari bahasa akal sehat, ekonomi, dan sensus *occupations*, tanpa sosiologis cermat. Hal ini terutama digunakan dalam dua cara: sebagai sinonim pabrik; dan sebagai sesuatu yang meliputi setiap kerja skala besar tenaga kerja dan modal.

Studi tentang sosiologi industri lebih menekankan pada perkembangan industri seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini mengingat antara industri dan masyarakat

memiliki hubungan yang erat karena dengan adanya industri akan menimbulkan berbagai perubahan sosial dalam masyarakat. Contoh dengan adanya industri, mata pencaharian hidup masyarakat berubah, dari sektor agraris menjadi sektor industri dengan bekerja sebagai buruh pabrik.

Sosiologi industri mengkaji tentang fenomena industri yang berkaitan pada manusia dengan mengkaitkannya pada mesin-mesin dengan mekanisme kerja pabrik yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas. Maka, secara terperinci sosiologi industri merupakan studi tentang hubungan-hubungan sosial yang arahnya pada sistem integrasi dalam perusahaan serta kegiatan sosial, ekonomi, dengan latar belakang sosial kultural. Kemudian pada tahap perkembangan selanjutnya.

Warga kota sebagian besar merupakan kaum borjuis yang berjiwa bebas dan menjadi tulang punggung perekonomian kota. Di mana pertumbuhan kerajinan sebagai industrinya melalui beberapa tahap antara lain seperti sistem domestik, pada tahap ini dapat disebut sebagai tahap kerajinan rumah. Para pekerja bekerja di rumah masing-masing. Setelah pekerjaan selesai kemudian disetorkan kepada majikannya. Upah yang diperoleh berdasarkan jumlah barang yang telah dikerjakan. Para majikan tidak direpotkan persoalan tempat kerja dan gaji. Manufaktur semakin berkembang dan diperlukan tempat khusus untuk bekerja. Agar majikan dapat mengawasi dengan baik cara mengerjakan dan mutu produksinya. Sebuah manufaktur dengan puluhan tenaga kerja didirikan dan biasanya berada di bagian belakang rumah tidak jauh dari tempat tinggal majikannya.

Berdasarkan uraian di atas, sosiologi industri lebih memusatkan perhatiannya pada tindakan-tindakan manusia yang terbingkai dalam sejumlah aturan-aturan yang dibangun oleh sekumpulan manusia itu sendiri/ tindakan manusia juga terbingkai dalam suatu struktur sosial. Sosiologi memperhatikan aspek dinamis dari tindakan. Individu mempunyai kemungkinan untuk mengelola tindakannya. Dalam perspektif ini membuat sosiologi bersifat ganda. Diantara keduanya keterkaitan yang erat. Perkembangan sosiologi tidak dapat dilepaskan dari pemikiran para tokoh sosiologi klasik yang telah memberikan sumbangan berharga pengamatan mereka terhadap perubahan-perubahan besar di masyarakat, revolusi

industri dan berbagai revolusi sosial politik lainnya di negara eropa. Hal ini menghasilkan beragam cara pandang diantara para sosiolog klasik mengenai perkembangan kapitalisme, rasionalisme serta perubahan struktur sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi baik pada tingkat masyarakat maupun khususnya di dalam organisasi kerja telah memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan sosiologi industri.

Sosiologi Industri mengkaji masalah fenomena industri dengan menitikberatkan kajiannya fokus manusia dan mengaitkannya dengan faktor mesin serta mekanisme kerja pabrik yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas. Sosiologi Industri memiliki cakupan teori yang sangat luas. Ada tiga penyebab luas cakupan tersebut. *Pertama*, cakupan substansi yang dibahas di dalam sosiologi industri cukup luas. *Kedua*, adanya perbedaan tingkat analisis yang menghasilkan keragaman berbagai teori. Ketiga teori yang digunakan dalam sosiologi industri memiliki keragaman sesuai berdasarkan latar belakang pemikirannya. Begitu juga luasnya cakupan sosiologi industri dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu pertama pendekatan non-sosiologis, kedua pendekatan sosiologi dan ketiga pendekatan hubungan industrial. Pendekatan non-sosiologis dipelopori oleh kehadiran teori-teori yang mempunyai basis analisis psikologis.

Teori yang pertama dan paling populer adalah teori manajemen ilmiah atau Taylorisme dan yang kedua adalah teori psikologi-manajerial. Sementara itu, teori-teori yang berbasis pendekatan sosiologis dapat dilihat dari teori Durkheim yang berpengaruh terhadap kategori teori hubungan antara manusia dari Elton Mayo, teori Dunlop. Selain itu, juga teori-teori Max Weber dan Karl Marx, sedangkan teori-teori yang mempunyai pendekatan hubungan industrial, terbagi ke dalam kelompok pemikiran unitaris, pluralis, dan radikal.

B. Pengertian Sosiologi Industri

Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu *Socius* yang berarti kawan, sedangkan *Logos* berarti ilmu pengetahuan. Uraian ini dipublikasikan pertama kali diungkapkan dalam buku berjudul "*Cours De Philosophie Positive*" (Comte, 1798-1857). Pada umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu

pengetahuan tentang masyarakat. Untuk memperkaya tentang pengertian sosiologi, berikut ini akan dijelaskan pengertian sosiologi menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut.

1. Auguste Conte mengemukakan, bahwa sosiologi sebuah studi positif tentang hukum-hukum dasar dari berbagai gejala sosial yang terdiri dari sosiologi statis dan sosiologi dinamis.
2. Emile Durkheim menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial adalah cara bertindak, cara berfikir, dan mampu melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu.
3. Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.
4. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, memandang bahwa sosiologi sebagai ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial yang mencakup perubahan sosial
5. Wiliam F. Ogburn dan Mayer F. Nimkoff. Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial.
6. J. A. A. Von Dorn dan C. J. Lammers. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.
7. Roucek dan warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antarmanusia dalam kelompok.
8. Soerjono Soekanto. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan, bahwa sosiologi adalah salah satu ilmu sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat atau ilmu yang mempelajari terkait manusia yang hidup bermasyarakat. Ada empat pokok untuk membahas sosiologi. Keempat pokok tersebut adalah sebagai berikut.

1. Fakta sosial sebagai cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa serta mengendalikan individu tersebut. Contohnya, sekolah mewajibkan kepada setiap peserta didiknya untuk disiplin serta hormat kepada guru.

Kewajiban tersebut ditetapkan sebagai aturan dan akan mendapatkan sanksi bagi yang melanggarnya. Contoh tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara bertindak, berfikir dan berperasaan yang ada di luar individu bersifat memaksa dan proses mengendalikan setiap individu peserta didik di sekolah.

2. Tindakan sosial sebagai tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Contoh, menanam bunga untuk kesenangan pribadi bukan merupakan tindakan sosial, tetapi menanam bunga untuk diikutsertakan dalam sebuah lomba sehingga mendapat perhatian orang lain, merupakan tindakan sosial.
3. Khayalan sosiologis ada sebagai cara untuk memahami tentang apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada di dalam diri manusia. Menurut Wright Mills, melalui khayalan sosiologi, kita mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup dan hubungan diantara keduanya. Alat untuk melakukan khayalan sosiologis adalah permasalahan dan isu. Isu merupakan hal yang ada di luar jangkauan kehidupan pribadi individu. Misalnya, jika suatu daerah hanya memiliki satu orang yang menganggur, maka pengangguran itu menjadi masalah. Masalah individu ini pemecahannya bisa lewat peningkatan keterampilan pribadi. Jika di kota tersebut ada 10 (sepuluh) juta penduduk yang menganggur dari 16 juta jiwa dari seluruhnya yang ada, maka pengangguran tersebut merupakan isu, yang pemecahan menuntut kajian lebih lanjut.
4. Realitas sosial adalah sesuatu untuk mengungkap tabir yang menjadi suatu realitas yang tidak terduga melalui sosiologi dengan cara mengikuti aturan ilmiah dan melakukan pembuktian secara ilmiah dan objektif dengan pengendalian prasangka pribadi dan pengamatan tabir secara hati-hati.

Selanjutnya adalah industri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Industri diartikan sebagai kegiatan dalam memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Dalam artian luas, industri merupakan setiap kegiatan manusia yang bergerak dalam bidang ekonomi yang memiliki sifat produktif dan

komersial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kesimpulannya, industri adalah kegiatan memproses, mengolah atau mengubah sesuatu agar mempunyai nilai lebih menggunakan peralatan dan sarana produksi untuk tujuan komersil. Industri sebagai kegiatan mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

Istilah industri berasal dari bahasa latin yaitu "*industria*", yang berarti tenaga kerja. Adapun industri secara luar memiliki pengertian bahwa setiap kegiatan manusia yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi yang secara produktif dan komersial sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Schneider (1993) industri merupakan jaringan yang helainya menjangkau hampir setiap aspek masyarakat, kebudayaan, dan kepribadian. Industri juga merupakan sebuah faktor penting dalam membentuk masalah-masalah sosial yang kompleks. Industri sebagai kegiatan untuk menghasilkan barang-barang secara massal, dengan mutu yang bagus untuk kemudian dijual dan diperdagangkan. Beberapa pengertian industri dalam berbagai sumber sebagai berikut:

1. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1984 menjelaskan bahwa Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan bahan jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang-bangun dan perekayasaan industri.
2. Menurut Bambang Utomo, industri adalah semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau mengolah bahan setengah jadi menjadi yang sudah benar-benar jadi, sehingga memiliki kegunaan yang lebih bagi kepentingan manusia.
3. Menurut Hinsa Siahaan menjelaskan bahwa industri adalah bagian dari proses yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan menjadi barang jadi sehingga menjadi barang yang bernilai bagi masyarakat.
4. Menurut Dini Natalia dan Wirasastuti, Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang mendatangkan keuntungan.

5. Menurut Hasibuan, secara micro industri adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang homogen atau barang-barang yang mempunyai sifat yang saling mengganti sangat erat, dari segi pemebentukan pendapatan, yakni cenderung bersifat makro. Industri adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah. Jadi batasan industri yaitu secara makro sebagai kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang sedangkan secara makro dapat membentuk pendapatan.
6. Menurut Kartasapoetra memandang industri sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan industri.
7. Menurut Anto Pracoyo dan Tri Kurnawangsih, Industri adalah kumpulan dari beberapa perusahaan firma yang menghasilkan barang atau jasa yang sejenis yang ada pada sebuah pasar.
8. Menurut Badan Puser Statistik. Industri adalah unit usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berdomisili pada sebuah tempat atau lokasi tertntu dan memiliki catatan administrasi sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, di sini dapat di simpulkan bahwa industri adalah suatu usaha atau kegiatan dalam mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Begitu juga usaha perakitan atau *assembling* dan reparasi merupakan bagian dari industri. Dengan demikian hasil industri tidak sekedar berupa barang atau dalam bentuk jasa yang dapat menghasilkan keuntungan melainkan semua kegiatan yang dapat menghasilkan nilai tambah yang berdampak perubahan pada pola dan sistem yang ada dalam suatu masyarakat. Sosiologi industri sebagai salah satu cabang dalam ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari tentang struktur sosial dan dinamika sosial pada masyarakat industri serta berbagai permasalahan sosial yang ditimbulkannya.

Sosiologi Industri mengkaji masyarakat dari sudut pandang yang berhubungan antarmanusia yang di dalam masyarakat. Terdapat tiga materi utama yang dipelajari dalam sosiologi Industri, yaitu:

- 1) Peranan industri dalam perubahan sosial, hal ini berhubungan dengan dampak dari eksistensi industri dalam kehidupan masyarakat baik dari segi sistem mata pencaharian, urbanisasi, hubungan sosial dan pola pikir masyarakat.
- 2) Aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pokok ekonomi yang meliputi proses: produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan mengubah atau mengolah sesuatu agar mempunyai nilai lebih dari sebelumnya. Kemudian distribusi adalah proses penyaluran atau penyebarluasan produk ke pasar. Sementara itu konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau pemakaian barang hasil produksi.
- 3) Hubungan industri dengan berbagai struktur yang ada dalam masyarakat. Hal ini erat kaitanya dengan stratifikasi sosial masyarakat Industri. Stratifikasi sosial masyarakat industri sendiri ditandai dengan posisi kelas atas yang ditempati oleh para pengusaha atau pemilik modal, kemudian kelas menengah diduduki oleh para pekerja kerah putih (*white collar*) dan kelas terbawah di duduki oleh mereka para pekerja kasar atau buruh.

Sosiologi industri ialah suatu cabang ilmu sosial yang membahas karakter dan arti dunia kerja serta kehidupan manusia yang terlibat di dalamnya. Permasalahan yang berhubungan dengan industri tidak hanya segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan kegiatan kerjanya tapi juga banyak hal lain yang secara tidak langsung akan mempengaruhi aktivitas kerja dalam industri tersebut. Sosiologi industri yang disebut juga sebagai sosiologi organisasi, membahas sikap dan ideologi setiap pimpinan pada suatu tingkat dalam struktur organisasi dan juga membahas apa saja yang dilakukan individu di dalam organisasi. Adanya suatu keterkaitan antara perpindahan kerja dengan kebiasaan di alam bekerja yang dialami oleh orang-orang, yang merupakan suatu landasan utama, baik bagi konflik maupun konsensus dalam suatu organisasi. Sosiologi industri

membahas pula tentang jenis-jenis masyarakat yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, di dalam aktivitas dan eksistensi organisasi. Obyek sosiologi industri adalah masyarakat kerja yang selalu dihubungkan dengan aktivitas industri, yang di dalamnya termasuk hubungan antar manusia dalam rangka melakukan pekerjaan. Pekerjaan pun bervariasi, baik dalam perpindahan kerja atau jabatan maupun tingkat kepuasan, kesempatan maupun monotonitas, resiko maupun upah yang dihadapinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sosiologi industri adalah suatu subyek yang amat penting dan menarik. Kegunaanya sangat jelas, karena dunia industri dan pola-pola ekonomi dan struktur industri akan membentuk masyarakat seperti kita, identitas sosial kita dan gaya hidup kita serta akan membentuk masyarakat di mana kita hidup. Dengan demikian sosiologi industri adalah cabang ilmu sosiologi yang mengkaji hubungan antara fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan kegiatan industri. Pada hakikatnya sosiologi industri lebih menekankan pada perkembangan industri seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini mengingat antara industri dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat, karena adanya industri akan menimbulkan berbagai perubahan sosial dalam masyarakat. Hakikatnya sosiologi industri lebih menekankan pada perkembangan industri seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini mengingat antara industri dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat, karena adanya industri akan menimbulkan berbagai perubahan sosial dalam masyarakat. Misalnya dengan adanya industri, mata pencaharian hidup masyarakat berubah, dari sektor agraris menjadi sektor industri dengan bekerja sebagai buruh pabrik.

Maka dengan mempelajari Sosiologi Industri, diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian konseptual tentang kedudukan dan peranan manusia baik secara individu maupun kelompok dalam situasi kehidupan daerah industri. Dipelajari pula pengaruh industri terhadap lingkungan sosial, di dalamnya termasuk ekonomi, sistem sosial, hubungan sesama manusia. Sejarah pertumbuhan industri, pengaruh timbal balik antara industri dengan keluarga dalam lingkungan sosial serta potensi dan perkembangan industri pada masyarakat.

C. Ruang Lingkup dan Objek Sosiologi Industri

Sebagaimana kita fahami bersama bahwa sosiologi merupakan ilmu sosial yang fokus kajiannya mengenai tingkah laku manusia yang hidup bermasyarakat dengan bidang kajiannya sangat luas, dengan luasnya tersebut sosiologi telah banyak melahirkan kajian-kajian sosiologi khusus yang disandingkan dengan ilmu yang lainnya anatolain: sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, sosiologi kesehatan, sosiologi politik, sosiologi pedsaan, soiologi komunikasi, sosiologi perkotaan sosiologi industri dan sebagainya. Sosiologi industri mengkaji tentang fenomena industri yang menitikberatkan pada faktor manusia yang mengkaitkannya dengan faktor mesin serta mekanisme kerja pabrik yang berorientasi pada efektif dan efesien.

Dalam proses pengkajiannya, sosiologi menggunakan ilmu-ilmu sosial lainnya membentuk kajian multidisipliner. Salah satu yang sering digunakan oleh sosiologi adalah ilmu antropologi. Ilmu antropologi di anggap memiliki pengalaman sebagai metodologi terutama dalam melakukan penelitian yang bersifat kualitatif. Begitu juga ilmu psikologi dapat memberi masukan dalam hal informasi mengenai beberapa kecenderungan yang bersifat individual. Begitu juga ahli sejarah dapat memberi informasi pada sosiolog mengenai proses historis dalam fenomena perubahan sosial. Sosiologi industri yang banyak mengkaji tentang hubungan antara fenome sosial yang terjadi pada masyarakat dengan kegiatan industri.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dan kajian sosiologi industri dapat di lihat dari dua sisi, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal secara internal, analisi tingkah laku manusia dalam hubungan pada sebuah perusahaan atau industri yaitu hubungan kerja dalam industri, organisasi industri, menejemen industri, ledership dalam industri. Secara eksternal analisis kegiatan manusia dengan latar belakang sosial ekonomi dan kultural yang berbeda-beda, yaitu tipologi masyarakat industri. perkembangan masyarakat industri, birokrasi, analisis dampak lingkungan serta adanya CSR. Oleh karena itu, yang menjadi objek sosiologi industri adalah masyarakat kerja yang selalu dihubungkan dengan aktivitas

industri, di dalamnya termasuk hubungan antar manusia dalam rangka melakukan pekerjaan. Pekerjaan pun bervariasi, baik dalam perpindahan kerja atau jabatan maupun tingkat kepuasan, kesempatan maupun monotonitas, resiko maupun upah yang dihadapinya. Buku ini diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian konseptual tentang kedudukan dan peranan manusia baik secara individu maupun kelompok dalam situasi kehidupan daerah industri. Dipelajari pula pengaruh industri terhadap lingkungan sosial, di dalamnya termasuk ekonomi, sistem sosial, hubungan sesama manusia. Sejarah pertumbuhan industri, pengaruh timbal balik antara industri dengan keluarga dalam lingkungan sosial serta potensi dan perkembangan industri pada masyarakat.

Jadi singkatnya objek dan kajian sosiologi industri adalah Sosiologi industri mengkaji hubungan antara fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan kegiatan industri. Beberapa materi yang dipelajari antara lain peranan industri dalam perubahan sosial, aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pokok ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi), serta hubungan industri dengan berbagai struktur yang ada dalam masyarakat. Kajiannya ini menitik beratkan pada fokus manusia dan mengaitkannya dengan faktor mesin serta mekanisme kerja pabrik yang berorientasi pada efektif dan efisiensi.

Secara Internal, Analisis tingkah laku manusia dalam hubungan kerja diperusahaan atau industri.

- a. Hubungan kerja dalam industri
- b. Organisasi industri
- c. Manajemen industri
- d. Leadership dalam industri

Secara Eksternal, Analisis kegiatan manusia dengan latar belakang sosial ekonomi dan kultural yang berbeda-beda.

- a. Tipologi masyarakat industri
- b. Perkembangan masyarakat industri
- c. Birokrasi (kaitan birokrasi dengan industri)
- d. Analisis dampak lingkungan
- e. CSR (*Coorporate Sosial Responsibility*)

D. Cakupan Sosiologi Industri

Teori-teori dalam Sosiologi Industri mempunyai cakupan yang sangat luas. Sekurang-kurangnya ada tiga penyebab luas cakupan tersebut, yaitu: Pertama, cakupan substansi yang dibahas di dalam sosiologi industri cukup luas. Kedua adanya perbedaan tingkat analisis yang menghasilkan keragaman berbagai teori. Ketiga adalah karena teori-teori yang digunakan di dalam sosiologi industri memiliki keragaman berdasarkan asal pemikirannya. Luasnya cakupan sosiologi industri, seluruh teori yang digunakan dalam menganalisis sosiologi industri dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori pendekatan. Yakni: pertama, pendekatan non-sosiologis. Pendekatan non sosiologis ini dengan hadirnya teori-teori yang mempunyai basis analisis psikologi-manajerial. Kedua, adalah teori manajemen ilmiah atau *Taylorisme* dan Psikologi-manajerial. Ketiga pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dapat dilihat dari teori Durkheim yang berpengaruh terhadap kategori teori hubungan antara manusia dari Elton Mayo, teori Dunlop. Selain itu teori Max Weber dan Karl Marx. Ketiga pendekatan hubungan industrial. Pendekatan hubungan industri terbagi ke dalam kelompok pemikiran unitaris, pluralis dan radikal.

Dalam pembahasannya pendekatan sosiologi industri terbagi pada dua pembahasan, yaitu: Pendekatan makro, pendekatan yang berkaitan dengan struktur lembaga-lembaga kemasyarakatan, pola yang sudah mapan dari tingkah lakunya dan hubungan-hubungan serta kepentingannya yang sudah stabil. Antara lain membahas tentang:

- a. Sistem produksi yang dipilih, pola-pola hak pemilihan, kekayaan, pendapatan anggota masyarakat (industri)
- b. Distribusi kekuasaan dan kedudukan dalam rangka mengejar tujuan serta gaya hidup. Karakter hirarki sosialnya, dan kaitannya dengan hirarki dalam organisasi industri dengan berbagai konsekuensinya.
- c. Pengaruh teknologi terhadap masyarakat, bentuk hubungan yang terjadi dalam organisasi industri.
- d. Konflik antar kelompok-kelompok dalam organisasi industri. Dalam sosiologi industri, pendekatan makro ditujukan untuk mempelajari suatu sistem sosial yang terdapat dalam masyarakat industri, dengan menekankan

pada analisis ekonomi dan lembaga-lembaga kemasyarakatannya. •

Pendekatan mikro, membahas tentang berbagai kenyataan dalam kehidupan sehari-hari dan sebenarnya merupakan kritik dari sosiologi makro. Juga membahas tentang berbagai macam interaksi yang membentuk pribadi individu dan pengalaman subjektif dalam dunia kerja seperti:

- a. Pola bentuk kehidupan dunia kerja
- b. Karakter berbagai interaksi antar individu
- c. Permainan dalam organisasi
- d. Keterlibatan, dan sebagainya.

Sosiologi Industri mendefinisikan sebagai studi tentang hubungan sosial dalam industri, definisi akan terlalu eksklusif, untuk itu akan keluar banyak yang relevan dan signifikan dalam bidang studi yang telah diperhitungkan dalam industri dan lingkungan sosial pengaruh hubungan dalam industri.

Dari hal ini dapat diketahui manfaat dari sosiologi industri adalah:

1. Malihat lebih jelas bagaimana hubungan masyarakat dengan industri.
2. Menkaji lebih jelas perkembangan industri.
3. Melihat lebih jelas bagaimana masyarakat mempengaruhi industri dan sebaliknya.

Masyarakat Industri bukanlah masyarakat agraris karena dalam masyarakat industri tertanam disiplin yang tinggi dan kompetitif berbeda dengan masyarakat agraris. Pendekatan sosiologi industri, Pendekatan makro, pendekatan yang berkaitan dengan struktur lembaga-lembaga kemasyarakatan, pola yang sudah mapan dari tingkah lakunya dan hubungan-hubungan serta kepentingannya yang sudah stabil. Antara lain membahas tentang: sistem produksi yang dipilih, pola-pola hak pemilihan, kekayaan, pendapatan anggota masyarakat (industri). Distribusi kekuasaan dan kedudukan dalam rangka mengejar tujuan serta gaya hidup. Karakter hirarki sosialnya, dan kaitannya dengan hirarki dalam organisasi industri dengan berbagai konsekuensinya, Pengaruh teknologi terhadap masyarakat, bentuk hubungan yang terjadi dalam organisasi industri. Konflik antar kelompok-kelompok dalam organisasi industri. Dalam sosiologi industri, pendekatan makro ditujukan untuk mempelajari suatu sistem sosial yang

terdapat dalam masyarakat industri, dengan menekankan pada analisis ekonomi dan lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Pendekatan mikro, membahas tentang berbagai kenyataan dalam kehidupan sehari-hari dan sebenarnya merupakan kritik dari sosiologi makro. Juga membahas tentang berbagai macam interaksi yang membentuk pribadi individu dan pengalaman subjektif dalam dunia kerja seperti: Pola bentuk kehidupan dunia kerja. Karakter berbagai interaksi antar individu. Permainan dalam organisasi, Keterlibatan, dan sebagainya,

E. Manfaat Sosiologi Industri

Sebagaimana telah dijelaskan di atas sosiologi industri itu membahas tentang masyarakat atau manusia dan mengaitkannya dengan faktor mesin serta mekanisme kerja pabrik yang berorientasi pada efisiensi dan efektifitas. Dari hal ini dapat diketahui manfaat dari sosiologi industri adalah:

- 1) Melihat lebih jelas bagaimana hubungan masyarakat dengan industry
- 2) Menkaji lebih jelas perkembangan industri
- 3) Melihat lebih jelas bagaimana masyarakat mempengaruhi industri dan sebaliknya.

Dalam buku sosiologi industri dapat diraih secercah harapan untuk memberi mamfaat dengan mempelajari keterkaitan gejala kemasyarakatan dengan industri. Hubungan industri dengan berbagai subsistem yang ada dalam masyarakat, dan aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pentingnya kita mempelajari sosiologi industri karena perkembangan industri (industrialisasi) berpengaruh terhadap kondisi sosiologis masyarakat. Sebaliknya kondisi sosiologis masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan industri (industrialisasi) hal ini yang perlu kita ingat dalam mempelajari sosiologi industri. Sosiologi Industri Seperti yang telah dijelaskan membahas tentang masyarakat atau manusia dan mengaitkannya dengan faktor mesin serta mekanisme kerja pabrik yang berorientasi pada efisiensi dan efektifitas. Sosiologi Industri didefinisikan sebagai studi tentang hubungan sosial dalam industri. tentu definisi akan menjadi eksklusif, untuk itu akan keluar banyak yang relevan dan

signifikan dalam bidang studi yang telah diperhitungkan dalam industri dan lingkungan sosialnya.

F. Prinsip-prinsip Sosiologi Industri ·

Sosiologi Industri lebih memusatkan perhatian kepada tindakan-tindakan manusia yang terbingkai dalam sejumlah aturan-aturan yang dibangun oleh sekumpulan manusia itu sendiri. Tindakan manusia juga terbingkai di dalam struktur sosial.

Dalam perkembangan selanjutnya sosiologi industri tidak bisa terlepas dari perkiraan para tokoh sosiologi klasik yang banyak memberikan sumbangan pemikiran yang berharga melalui pengamatan mereka terhadap perubahan-perubahan besar pada masyarakat yang tengah mengalami revolusi industri dan berbagai revolusi sosial politik lainnya di negara Eropa yang menghasilkan berapam cara pandang diantara sosiolog klasik mengenai perkembangan kapitalisme, rasionalisme, serta perubahan struktur sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi, baik ditingkat masyarakat maupun di dalam organisasi kerja memberi sumbangan yang berarti bagi pengembangan sosiologi industri. sosiologi memusatkan perhatian kepada tindakan-tindakan manusia yang terbentuk dalam sejumlah aturan-aturan yang dibangun oleh sekumpulan manusia itu sendiri.

Tindakan manusia juga terbentuk dalam sebuah struktur sosial. Tetapi sosiologi juga memperhatikan pada aspek yang bersifat dinamis dan tindakan. Setiap individu mempunyai kemungkinan untuk mengelola tindakannya. Sudut pandang ini membuat sosiologi bersifat standar ganda. Diantara kedua terdapat keterkaitan yang sangat erat.

Sosiologi Industri mengkaji masalah fenomena industri dengan menitik beratkan kajiannya pada fokus manusia dan mengaitkannya dengan faktor mesin serta mekanisme kerja pabrik yang berorientasi pada efisiensi dan efektifitas. Teori-Teori dalam Sosiologi Industri Sosiologi industri mempunyai cakupan teori yang sangat luas. Ada tiga penyebab luas cakupan tersebut. Pertama, cakupan substansi yang dibahas di dalam sosiologi industri cukup luas. Kedua, adanya perbedaan pada tingkat analisi yang menghasilkan keragaman berbagai teori. Ketiga, karena teori-teori yang digunakan dalam

sosiologi industri memiliki keragaman berdasarkan pada asal mula pemikirannya.

Lusnya cakupan teori-teori yang dipakai dalam analisis sosiologi itu sendiri dapat dikelompokkan mejadi tiga katagori, yairu: pendekatan non-sosiologis, pendekatan sosiologis dan pendekatan hubungan industial. Pendekatan non-sosiologis dipelopori oleh kehaadiran teori-teori yang mempunyai basis analisis psikologis. Pertama, yang paling populer adalah teori manajemen ilmiah atau Taylorisme. Kedua adalah psikologi manajerial. Teori-teori yang berbasis pendekatan sosiologis dapat dilihat dari teori Durkheim yang berpengaruh terhdap katagori teori hubungan antara manusia dari Elton Mayo. Sedangkan teori-teori pendekatan hubjngan industrial terbagi ke-dalam kelompok pemikiran unitasis, pluralis dan radikal.

G. Tokoh-tokoh Sosiologi Industri: Gagasan dan Pemikirannya

Sekurang-kurangnya ada tiga orang tokoh sosiologi indusri yang sangat terkenal. Dibawah ini akan uraikan mengenai gagasan dan pemikiran sosiologi industrio, yakni:

1. Karl Marx (1818 – 1883)

Sebnarnya Marx bukanlah seorang sosiolog dan dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang sosiolog. Meskipun karyanya tgerlalu luas untuk dicakup dalam pengertian sosiologi, namun ada satu teori sosiologi yang kemukakan dalam karya Marx (Giurney, 1981). Gagasan Marx dan perubahan sosial radikal yang diprediksikan dan dicoba untuk dikembangkan cukup menakutkan para pemikir konservatif. Pemikiran sosiologi Marx berseberangan dengan pemikiran sosiologi konservatif karena pemikiran Marx idanggap berbau idologis (Worsley, 2002). Bagi Marx, perubahan sosial dipacu dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat terjadi dengan sangat cepat. Sebagai akibatnya, "*means of production*" masyarakat mengalami perubahan yang sangat cepat dan mendasar. Berbeda dengan Weber yang menyatakan bahwa sebelum terjadinya teknologi terlebih dahulu telah terjadi perubahan gagasan baru dalam pola pemikiran masyarakat, dalam pemikiran Marx justru sebaliknya. Menurut Marx, di Benua Asia, cara memproduksi masyarakat yang cukup

berbeda karena pemilik dari *means of production* adalah *local government* (dalam *Asiatic Mode of Production*).

Pendekatan teoritis Marx ini menekankan pada proses konflik, umumnya dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan teori fungsional. Keberadaan subyektif dari masyarakat, menurut Marx, adalah keanggotaan manusia dalam masyarakat, dimana termasuk di dalamnya aparatus teknologi dan budaya yang menunjang masyarakat dan yang memungkinkan masyarakat hidup, serta bermanfaat untuk membedakan pribadi manusia yang memberikan kemanusiaan kepada individu itu. Materialisme Marx dan penekanannya pada sektor ekonomi menyebabkan pemikirannya sejalan dengan pemikiran kelompok ekonomi politik (seperti Adam Smith dan David Richardo). Perbedaan yang menonjol dari teori Marx adalah mengenai landasan filosofisnya. Teoritis Marx sangat dipengaruhi oleh filsafat Hegel yang lebih menganut dialektika ketimbang menurut pada hukum sebab-akibat. Orientasi filsafat Marx sendiri adalah materialisme dialektika yang menekankan pada hubungan dialektika dalam kehidupan materil. Dialektika dari Marx, antara lain, dapat membiasakan kita membayangkan pengaruh timbal-balik secara terus-menerus dari kekuatan sosial. Maka yang sangat diperhatikan oleh Marx adalah masalah penindasan sistem kapitalis yang dilahirkan oleh Revolusi Industri. Secara tegas, Marx ingin mengembangkan teori yang dapat menjelaskan penindasan ini, dan yang dapat membantu meruntuhkan sistem sosial itu sendiri. Perhatian Marx tertuju pada revolusi, yang bertolak belakang dengan perhatian sosiolog konservatif yang menginginkan reformasi dan perubahan secara tertib tanpa merubah sistem yang ada (Ritzer & Goodman, 2003: 31).

Teori Marx merupakan suatu teori yang terutama berhubungan dengan tingkat struktur sosial tentang kenyataan sosial. Teori ini menekankan pada saling ketergantungan yang tinggi antara struktur sosial dan kondisi materil, dimana individu harus menyesuaikan dirinya supaya tetap hidup dan memenuhi pelbagai kebutuhannya. Penekanan Marx pada menyesuaikan diri dengan lingkungan materil serta sumber-sumber yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia, merupakan satu catatan yang penting mengenai realisme praktis dalam analisa teoritisnya. Menurut

Marx, hubungan antara individu dan lingkungan materilnya dijembatani melalui struktur ekonomi masyarakat.

Meskipun pendekatan teori Marx secara keseluruhan dapat diterapkan pada tahap sejarah apapun, namun demikian perhatian utama pendekatan ini adalah tahap masyarakat kapitalis. Pandangan Marx mengenai hubungan antara kegiatan manusia dan produk kegiatannya merupakan suatu elemen penting dalam pendekatan masa kini. Yang ditekankan Marx yaitu bagaimana ideologi dan aspek-aspek lainnya dalam kebudayaan memperkuat struktur sosial dan struktur ekonomi dengan memberikan legitimasi pada kelompok-kelompok yang dominan, merupakan satu proposisi penting yang ditekankan dalam bidang sosiologi pengetahuan pada masa kini. Untuk itu, ideologi-ideologi dikembangkan dan digunakan untuk melindungi atau meningkatkan kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Teori aliansi Marx didasarkan pada kenyataan obyektif yang diciptakan oleh manusia, lalu mengkonfrontasikan manusia yang menciptakannya itu sebagai satu kenyataan yang asing dan membatasi serta mengikat tindakan selanjutnya. Pendekatan-pendekatan sosiologi masa kini yang berhubungan dengan sosiologi humanistik atau sosiologi kritis, banyak mengambil dari teori aliansi Marx dalam usaha mereka untuk menciptakan suatu perspektif sosiologis yang berpusat pada kebutuhan dan kemampuan manusia dan yang dapat digunakan untuk mengkritik struktur sosial yang memperbudak, merendahkan atau mencegah perkembangan manusia (Johnson, 1986: 154-162).

Perubahan sosial menurut Marx, merupakan sebuah struktur atau serangkaian struktur yang membuat batas pemisah antara seorang individu dan proses produksi, dan akhirnya juga memisahkan diri individu itu sendiri (Worsley, 2002). Marx memusatkan perhatian pada kelas sosial, sebagai salah satu dimensi stratifikasi ekonomi. Marx menegaskan pula bahwa dimensi stratifikasi lain juga penting. Marx menyatakan bahwa gagasan tentang stratifikasi sosial harus diperluas sehingga mencakup stratifikasi berdasarkan status dan kekuasaan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Durkheim dan Weber, konsep perubahan sosial dapat muncul dari dua kubu yang saling mencari pengaruh, yaitu kubu materialisme yang

dipelopori oleh Marx dan Durkheim. Dalam proses perubahan sosial, Marx menempatkan kesadaran individu sejajar dengan kesadaran kelas, ideologi dan budaya yang kemudian merupakan medium perantara antara struktur dan individu. Sebab, pada dasarnya, individu itu baik, tetapi masyarakatlah yang membuatnya menjadi jahat. Meskipun Marx dan Weber sama-sama setuju bahwa basis kapitalisme modern adalah produksi masyarakat, akan tetapi Marx mengkhususkan diri dalam kiprahnya, sebab, dinamika sosial adalah faktor penyebab terjadinya konflik total.

Di sisi lain, Weber dan Marx tampaknya setuju untuk menolak idealisme Hegel, yang menyatakan bahwa di dunia ada yang mendominasi, yaitu *national spirit* (*folk spirit*). Durkheim menyatakan bahwa memang ada semangat tertentu dalam kelompok yang mengikat sehingga menjadi unit analisis. Asumsi dasar Marx mengenai saling ketergantungan antara pelbagai institusi dalam masyarakat juga ditekankan dalam fungsionalisme Durkheim. Misalnya, pandangan keduanya mengenai pentingnya hasil tindakan yang tidak dimaksudkan, yang sebenarnya bertentangan dengan hasil yang diharapkan. Sebagai contoh tentang ini, dapat dilihat pula dalam pengaruh-pengaruh yang tidak diharapkan dari investasi kapitalis yang dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan, akan tetapi secara tidak disengaja mempercepat krisis ekonomi (Johnson, 1986: 163).

2. Emile Durkheim (1858-1912)

Gagasan-gagasan yang dikemukakan Durkheim terutama dalam bukunya yang berjudul "*The Rules of Sociological Methods*" (1895) dan "*Suicide*" (1897). Buku tersebut merupakan landasan-landasan dari sosiologi. Hal ini jelas terlihat dalam asumsi-asumsi metodologis yang diterapkan dalam buku-buku tersebut. Keduanya berada dalam konteks pikiran Durkheim sendiri dan dalam kerangka kerja yang pada umumnya adalah mengenai persoalan-persoalan etika sosial. Analisis yang disampaikan Durkheim terutama dalam *Suicide* didasarkan pada karya penulis-penulis seperti itu, akan tetapi juga sebagai titik tolak dari kesimpulan-kesimpulan umum mengenai tata moral dari bermacam bentuk masyarakat yang berbeda-beda. Adapun yang menjadi tema pokok dari *The*

Rules yaitu bersifat subjektif, masalah dari sosiologi yang harus dijelaskan, serta bidang penelitiannya ditentukan dengan batas-batas tertentu. Durkheim berulang kali menekankan di dalam tulisan-tulisannya bahwa sosiologi itu sebagian besar tetap merupakan suatu disiplin filsafat, yang terdiri dari sejumlah generalisasi heterogen yang mencakup segala aspek, serta yang lebih tertumpu pada latar belakang logis dari aturan-aturan *a priori* dari pada studi empiris yang sistematis. Sosiologi, menurut Durkheim dalam *Suicide*, masih dalam taraf membangun dan sistesis-sintesis filsafat. Dalam kajian sosiologi cenderung melakukan gerasalisasi-generalisasi yang briliayan, pada disiplin ini menaruh perhatian pada penelitian tentang manusia dalam masyarakat, namun demikian katagori sosial itu sring digunakan secara tidak mengikat (lihat Giddeons. 1986:107). Untuk mendefinisikan kekhususan dari yang sosial itu, didasarkan oleh penggunaan kriteria *exteriority* dan *constranint*.. Terdapat dua makna yang saling berkaitan, di mana fakta-fakta soaial yang merupakan eksternal bagi individu, yaitu: 1) setiap orang dilahirkan dalam masyarakat yang terus berkembang dan yang telah memiliki suato organisasi atau struktur yang pasti serta mempengaruhi kepribadiannya; (2) fakta-fakta sosial merupakan hal yang berada di luar bagi pribadi seseorang dalam arti bahwa setiap individu manapun, hanyalah merupakan suatu unsur tunggal dari totalitas pola hubungan yang membentuk suatu masyarakat. Penekanan dari tesis Durkheim ini adalah bahwa tidak ada satu teori atau analisis pun yang mulai dari individual, tak akan mampu memahami sifat-sifat spesifik dari fenomena sosial. Kriteria lain yang diterapkan

Durkheim dalam menjelaskan sifat dari fakta-fakta sosial, merupakan kriteria yang empiris, yaitu hadirnya paksaan moral. Kekuatan Durkheim dalam analisisnya terletak pada analisis parameter, yang mengikat perilaku masyarakat dalam fakta sosial. Durkheim menegaskan posisi bahwa fakta sosial bersifat eksternal terhadap individu dan memaksa individu, seperti yang dicontohkannya dalam kode-kode hukum. Menurutnya, pergeseran kontrol eksternal dapat dimengerti dalam hubungannya dengan pengalaman kita secara individual. Banyak dari kita yang cukup lama menerima berbagai harapan normatif sebagai sesuatu yang benar dan

pantas serta menyesuaikan diri dengannya, karena di dalamnya juga terdapat pola-pola kepribadian dasar yang sudah kita kembangkan (bukan sebagai respons terhadap paksaan dari luar). Durkheim merasa bahwa dalam menghadapi masa peralihan ini, perlu dikembangkan satu alternatif lain dari dasar pendidikan moral agama tradisional. Singkatnya, apa yang dibutuhkan adalah suatu ideologi sekuler atau sistem kepercayaan yang memberikan tonggak-tonggak moral dan etika dalam suatu masyarakat sekuler. Perubahan-perubahan dalam tingkat integrasi pada suatu masyarakat secara empiris dinyatakan dalam pelbagai cara. Satu manifestasi utama yang dianalisa Durkheim secara intensif adalah perubahan dalam angka bunuh diri. Perhatian Durkheim terhadap landasan-landasan moral masyarakat merangsang perkembangan perspektif sosiologi klasiknya pada fungsi-fungsi agama, terutama di Timur, yang bersifat sosial. Analisanya mengenai hubungan timbal-balik yang erat antara agama dan masyarakat. Durkheim menunjuk pada bunuh diri yang disebabkan oleh anomi, sebagai bunuh diri *anaomik*. Misalnya, apabila solidaritas organik menurun an tingkat anomi dalam masyarakat naik, maka angka bunuh diri dalam masyarakat kapitalis cenderung naik (Durkheim, 1966).

Dalam menguraikan kondisi-kondisi yang mendorong pertumbuhan pembagian kerja dalam masyarakat, analogi antara masyarakat dan organisme biologis yang digunakan Durkheim sama seperti ketika ia menguraikan tentang fungsi peningkatan pembagian pekerjaan. Berdasarkan pada konsep *moral density*. Gambaran tentang hubungan di antara perkembangan pembagian pekerjaan dan pergeseran corak solidaritas sosial merupakan gambaran tentang apa yang disebut oleh Durkheim sebagai *natural course* dalam perkembangan pembagian pekerjaan dan konsep solidaritas sosial yang dihasilkannya. Dalam hal ini, Durkheim menyadari bahwa penyimpangan yang bersifat kasuistik akan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat modern (Durkheim, 1964: 257-353).

Secara politis, Durkheim adalah seorang liberal, tetapi secara intelektual ia tergolong lebih konservatif. Ketika Marx memandang bahwa masalah dunia modern adalah melekat dalam masyarakat, Durkheim justru tak berpendapat

demikian. Gagasan Durkheim tentang keteraturan dan reformasi menjadi dominan ketika gagasan Marx tentang perlunya revolusi sosial merosot. Durkheim adalah salah satu perintis utama dalam fungsionalisme, yang menekankan konsensus nilai dan keharmonisan dari pada konflik dalam perubahan sosial. Sebagian besar karyanya tercurah pada studi tentang tertib sosial; kekacauan sosial bukan keniscayaan dari kehidupan modern dan dapat dikurangi melalui reformasi sosial. Perhatian Durkheim tertuju pada upaya membuat analisis komparatif mengenai apa yang membuat masyarakat bisa dikatakan berada dalam keadaan primitif atau modern. Dalam kesimpulannya, Menurut Mark, pada masyarakat primitif dipersatukan oleh fakta sosial non material, khususnya kekuatan ikatan moralitas bersama. Atau oleh apa yang disebut sebagai kedadaran kolektif. Namun demikian karena kompleksitas kerja dalam suatu masyarakat moden menimbulkan beberapa patologi.

Dengan kata lain, pembagian kerja bukanlah metode yang memadai dan dapat membantu menyatukan masyarakat. Dalam Kecenderungan sosiologi konservatif Durkheim terlihat ketika ia menganggap revolusi dari Marx tidak diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Menurut Durkheim, berbagai reformasi dapat memperbaiki dan menjaga sistem sosial modern agar tetap berfungsi, dimana kesadaran kolektif masih menonjol, namun ia menganggap bahwa dalam masyarakat modern moralitas bersama dapat diperkuat (Durkheim, 1964). Durkheim berusaha menjelaskan asal-mula keadaan (misalnya, agama) menurut persetujuan kontraktual yang dirembuk antar individu untuk kepentingan pribadi mereka selanjutnya mengenai: (1) perbedaan-perbedaan dalam tipe solidaritas dalam struktur sosial yang berbeda; (2) ancaman-ancaman terhadap solidaritas dan respon masyarakat; serta (3) munculnya penguatan solidaritas melalui ritus-ritus keagamaan (Johnson, 1986: 181).

Salah satu fakta sosial yang dijelaskan Durkheim, mengenai konsep solidaritas sosial. Dalam satu hal atau lain bentuk, solidaritas membawahi semua karya utamanya. Istilah-istilah yang berhubungan erat dengan itu, misalnya integrasi sosial dan kekompakan sosial. Soslidaritas menurut Durkheim menunjuk pada satu kedaan hubungan antara individu dan

kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan ini lebih mendasar dari pada hubungan kontraktual yang dibuat oleh persetujuan rasional, karena hubungan serupa itu mengandaikan sekurang-kurangnya satu tingkat konsesus terhadap prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kontrak tersebut.

3. Max Weber (1864-1920)

Weber mengakui bahwa ilmu-ilmu sosial harus berkaitan dengan fenomena spiritual atau ideal, sebagai ciri-ciri khas dari manusia yang tidak berada dalam jangkauan bidang ilmu-ilmu alam. Akan tetapi, perbedaan yang diperlakukan tentang subyek dan obyek tidak harus melibatkan pengorbanan obyektivitas di dalam ilmu-ilmu sosial, atau perbedaan yang menyertakan intuisi sebagai pengganti untuk analisis sebab-musabab yang dapat ditiru. Menurut Weber, ilmu-ilmu sosial bermula dari suatu perasaan bertanggungjawab atas masalah-masalah praktis, dan kemudian dirangsang oleh rasa keharusan manusia memberi perhatian demi terjadinya perubahan sosial yang diinginkan (Giddens, 1986: 164).

Penggunaan ilmu pengetahuan empiris dan analisis logis dapat memperlihatkan kepada seseorang tentang apa yang dapat dicapainya, atau akibat apa saja yang terjadi selanjutnya, serta membantunya menjelaskan sifat dari ideal-idealnya. Akan tetapi, ilmu pengetahuan itu sendiri sulit untuk menerangkan kepadanya tentang keputusan apa yang harus diambil. Analisis Weber mengenai politik dan tentang logika motivasi politik, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan ini. Perilaku politik dapat diarahkan dalam suatu etika dari maksud-maksud pokok atau dalam suatu etika pertanggungjawaban. Perilaku ini pada akhirnya bersifat keagamaan, atau paling tidak memiliki bersama dengan perilaku keagamaan dengan atribut-atributnya yang luar biasa.

Inti dari pembahasan Weber tentang sifat obyektivitas merupakan usaha untuk menghilangkan kekacauan, yaitu yang menurut Weber seringkali dianggap menutupi pertalian yang logis antara pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan pertimbangan-pertimbangan nilai. Arah tujuan tulisan-tulisan empiris dari Weber sendiri yang tampak dalam *Economy and Society* menyebabkan suatu perubahan tertentu dalam

penitikberatan di dalam pendirian tersebut. Weber tidak melepaskan pendirian fundamentalnya tentang pemisahan logis dan mutlak antara pertimbangan-pertimbangan faktual dan pertimbangan-pertimbangan nilai. Kajian sosiologi lebih berkaitan dengan penemuan, prinsip-prinsip umum dan kosepsi-konsepsi jenis umum yang hubungannya dengan tindakan nilai sosial.

Sedangkan sejarah diarahkan terhadap analisis dan penjelasan sebab-sebab dari berbagai tindakan, struktur-struktur dan tokoh-tokoh yang dari segi budaya memiliki arti penting (Gideons, 1986:168-178). Karya Weber pada dasarnya adalah mengemukakan teori tentang rasionalisasi (Brubaker, 1984). Secara spesifik, berkembangnya brokrasi dalam kapitalisme modern, merupakan sebab-akibat dari rasionalisasi hukum, politik, dan industri. Menurutnya, birokratisasi itu sesungguhnya merupakan wujud dari administrasi yang konkrit dari tindakan yang rasional, yang menembus bidang peradaban Barat, termasuk kedalamnya seni musik dan arsitektur. Kecenderungan totalitas ke arah rasionalisasi di dunia Barat merupakan hasil dari pengaruh perubahan sosial.

Mengenai hubungan Weber dan Marx adalah bahwa ia dipandang lebih banyak bekerja menurut tradisi Marxian ketimbang menentangnya. Karyanya tentang agama (Weber, 1951;1958a;1958b), apabila diinterpretasikan pada sudut pandang ini adalah semata-mata merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa agama bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi gagasan, akan tetapi gagasan itu sendiri yang mempengaruhi struktur sosial. Interpretasi karya Weber pada sisi ini jelas menempatkannya sangat dekat dengan teori Marxian. Contoh yang lebih baik dari pandangan bahwa Weber terlihat dalam proses membalikan teori Marxian adalah dalam bidang teori stratifikasi (Ritzer & Goodman, 2003: 36).

Struktur sosial dalam perspektif Weber, didefinisikan dalam istilah-istilah yang bersifat probabilistik dan bukan sebagai suatu kenyataan empirik yang ada terlepas dari individu-individu. Jadi, misalnya suatu hubungan sosial seluruhnya dan secara eksklusif terjadi karena adanya probabilitas, dimana akan ada suatu arah tindakan sosial dalam suatu pengertian yang dapat dimengerti secara

berarti.dalam sebuah keteraturan sosial yang absah didasarkan pada sebuah kemungkinan bahwa seperangkat hubungan sosial akan diarahkan pada suatu kepercayaan akan validasi keteraturan itu. Realitas akhir yang menjadi dasar satuan-satuan sosial yang lebih besar ini adalah tindakan sosial individu dengan berbagai arti subyektifnya. Karena orientasi subyektif individu mencakup kesadaran akan tindakan yang mungkin dan reaksi-reaksi yang mungkin dari orang lain. Weber juga mengakui pentingnya stratifikasi ekonomi sebagai dasar yang fundamental untuk kelas perubahan. Baginya, kelas sosial terdiri dari semua mereka yang memiliki kesempatan hidup yang sama dalam bidang ekonomi. Menurutnya, kita dapat bicara tentang suatu kelas apabila: (1) sejumlah orang sama-sama memiliki sumber hidup mereka sejauh; (2) komponen ini secara eksklusif tercermin dalam kepentingan ekonomi berupa kepemilikan benda-benda dan kesempatan memperoleh pendapatan yang terlihat dalam; (3) kondisi-kondisi komoditi atau pasar tenaga kerja (Johnson, 1986: 222).

Weber memandang Marx dan para penganut Marxis pada zamannya sebagai determinis ekonomi yang mengemukakan teori-teori berpenyebab tunggal tentang perubahan sosial. Artinya, teori Marxian dilihat oleh Weber sebagai upaya pencarian semua perkembangan historis pada basis ekonomi dan memandang semua struktur kontemporer dibangun di atas landasan ekonomi semata. Salah satu contoh determinisme ekonomi yang mengganggu pikiran Weber adalah pandangan yang mengatakan bahwa ide-ide hanyalah refleksi kepentingan materil (terutama kepentingan ekonomi) dan bahwa kepentingan materi menentukan ideologi (Ritzer & Goodman, 2003: 35).

Weber mencurahkan perhatiannya pada gagasan dan pengaruhnya terhadap ekonomi. Dalam *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (1958), Weber membahas pengaruh gagasan keagamaan terhadap ekonomi. Ia memusatkan perhatian pada Protestanisme terutama sebagai sebuah sistem gagasan, dan pengaruhnya terhadap kemunculan sistem gagasan yang lain, yaitu semangat kapitalisme, dan akhirnya terhadap sistem ekonomi kapitalis. Weber mencurahkan perhatian serupa terhadap agama dunia yang lain, dengan mempelajari bagaimana cara gagasan keagamaan

itu merintangai perkembangan kapitalisme dalam masyarakatnya masing-masing (Weber, 1951; 1958). Berdasarkan karya-karya Weber ini, kesimpulannya adalah bahwa Weber mengembangkan gagasan yang bertentangan dengan gagasan Marx.

Konsep legitimasi keteraturan sosial mendasari analisa Weber mengenai institusi ekonomi, politik, dan agama, serta interpretasinya mengenai perubahan sosial. Stabilitas keteraturan sosial yang absah, menurut Weber, tidak tergantung semata-mata pada kebiasaan saja atau pada kepentingan dari individu yang terlibat. Artinya, uniformitas perilaku tidak diperkuat oleh sanksi eksternal. Justru sebaliknya, hal ini didasarkan pada penerimaan individu akan norma-norma atau peraturan-peraturan yang mendasari keteraturan itu sebagai sesuatu yang dapat diterima atau yang diinginkan (Giddens, 1986).

Otoritas legal rasional tersebut di atas, diwujudkan dalam organisasi birokratis. Analisa Weber yang sangat terkenal mengenai organisasi birokratis berbeda dengan sikap yang umumnya terdapat pada masa kini, yang memusatkan perhatiannya pada birokrasi yang tidak efisien, boros, dan nampaknya tidak rasional lagi. Sebaliknya, dalam membandingkan birokrasi dengan bentuk-bentuk administrasi tradisional kuno yang didasarkan pada keluarga besar dan hubungan pribadi, Weber melihat birokrasi modern sebagai satu bentuk organisasi sosial yang paling efisien, sistematis, dan dapat diramalkan. Walaupun organisasi birokratis yang sebenarnya tidak pernah sepenuhnya mengabaikan timbulnya hubungan-hubungan pribadi, namun stidaknya sebagian besar analisa Weber mengenai birokrasi ini mencakup karakteristik-karakteristik yang istimewa, dan dipandang sebagai tipe yang ideal (Johnson, 1986: 226).

H. Penerapan Ilmu Sosiologi Pada Disiplin Ilmu lainnya

Penerapan suatu ilmu disiplin ilmu akan melekat serta disesuaikan dengan kebutuhan pada suatu pada disiplin ilmu. Suatu disiplin ilmu harus memiliki manfaat terhadap masyarakat manusia, salah satu caranya adalah ilmu-ilmu itu harus bersinergi dengan kehidupan manusia yang hidup bermasyarakat, maka untuk membuka jalan bagaimana agar

suatu ilmu dapat bermanfaat, terlebih dahulu mempelajari ilmu sosiologi.

1. Sosiologi Pendidikan

Sosiologi pendidikan adalah cabang sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Masalah-masalah itu muncul sebagai akibat perubahan zaman, seperti perubahan masyarakat dari pertanian menuju ke masyarakat industri. Perubahan itu menuntut dibuatnya berbagai sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, buku-buku pelajaran, dan fasilitas lainnya. Hal ini mengingat pentingnya pendidikan dalam dunia industri. secara khusus sosiologi pendidikan mencoba mengkaji tentang hubungan antara fenomena masyarakat dengan pendidikan. Kita bisa melihat benang merah dari sebuah proses pendidikan yang bertujuan mengantarkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik. Maka, materi yang di sajikan antara lain peran masyarakat dan lingkungan sosial, peran pendidikan dalam proses perubahan masyarakat serta lingkungan pendidikan itu sendiri sebagai salah satu dari pranata sosial yang ada dalam masyarakat.

2. Sosiologi Agama.

Sosiologi Agama merupakan fenomena yang ada dalam masyarakat berhubungan dengan agama. Sosiologi agama mempelajari beberapa materi meliputi perilaku manusia yang berhubungan dengan keyakinan, perasaan agama sebagai pranata sosial. Agama dalam perubahan masyarakat dan peran agama sebagai agen pengendalian sosial.

3. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum mempelajari hubungan antara fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan hukum. Materi yang dipelajarinya antara lain, tentang perilaku masyarakat yang berhubungan dengan hukum yang ada dalam masyarakat.

4. Sosiologi Keluarga

Sosiologi keluarga membahas tentang fenomena interaksi yang terjadi dalam masyarakat dengan keluarga. Yang di pelajari dalam sosiologi keluarga antara lain; tentang

peran keluarga dalam perubahan sosial dan beberapa bentuk keluarga yang ada dalam masyarakat.

5. Sosiologi Industri

Sosiologi industri sebagai salah satu cabang dari ilmu sosiologi yang lebih menekankan pada perkembangan industri seiring dengan perkembangan masyarakat, hal ini mengingat antara industri dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat. Adanya industri akan menimbulkan berbagai perubahan sosial di dalam masyarakat. Misalnya dengan adanya industri, mata pencaharian hidup masyarakat jadi berubah, dari sektor agraris menjadi sektor industri dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Sosiologi industri mengkaji hubungan antara fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan kegiatan industri. Beberapa materi yang dipelajari antara lain: peran industri dalam perubahan sosial, aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pokok ekonomi serta berhubungan industri dengan berbagai struktur yang ada dalam masyarakat.

6. Sosiologi Pembangunan

Sosiologi pembangunan mengkaji masyarakat dengan segala aktivitasnya di alam pembangunan. Sosiologi menghendaki pembangunan yang dilaksanakan di masyarakat tidak hanya mengejar aspek materil saja, melainkan juga memperhatikan pada masyarakat sekitarnya. Beberapa materi yang dapat dipelajari dalam sosiologi pembangunan antara lain; pengaruh pembangunan dalam perubahan sosial, peran pembangunan dalam kehidupan masyarakat, peran pembangunan dalam perubahan sosial, peran pembangunan dalam kehidupan masyarakat dan peran pembangunan dalam perekonomian masyarakat.

7. Sosiologi Politik

Sosiologi politik mempelajari tentang fenomena politik yang berhubungan dengan variabel sosial dan variabel politik yang saling berkaitan antara struktur sosial dan lembaga politik atau antara masyarakat dan negara. Sosiologi politik bertujuan untuk mengkaji hubungan antara fenomena sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dengan kegiatan-kegiatan politik. Adapun

ruang lingkup kajian sosiologi politik antara lain: tentang perilaku politik, lembaga politik, dan peran politik dalam masyarakat.

8. Sosiologi Pedesaan

Sosiologi pedesaan merupakan ilmu Sosiologi yang mempelajari secara khusus tentang masyarakat pedesaan, pola-pola interaksi sosial yang dilakukannya sesuai dengan lingkungan sekitar tempat tinggal di mana masyarakat itu berada. Materi yang dipelajarinya antara lain: tentang mata pencaharian masyarakat desa, pola hubungan, pola pemikiran, serta sikap dan cara pandang masyarakat pedesaan itu dalam kehidupan sehari-hari.

9. Sosiologi Perkotaan

Sosiologi perkotaan merupakan ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari tentang masyarakat perkotaan dengan segala pola interaksi yang dilakukannya sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Materi yang dipelajari antara lain tentang mata pencaharian hidup, pola hubungan dengan lingkungan sekitarnya dan pola pikir dalam menyikapi suatu permasalahan yang dihadapinya.

10. Sosiologi Kesehatan

Sosiologi kesehatan bertujuan mengkaji cara penerapan berbagai teori sosiologi dalam menganalisis masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Sosiologi kesehatan berusaha mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku sakit, perilaku sehat, peran sehat dan peran sakit pada suatu masyarakat.

BAB II

ARAH DAN PENGEMBANGAN SOSIOLOGI INDUSTRI

Bab dua tentang arah dan pengembangan Sosiologi Industri, yang terdiri dari: Arah Sosiologi Industri, Hubungan Masyarakat Industrial, Fenomena Sosial Industri Kreatif, Materi dan Pendekatan Sosiologi Industri, dan Industri Ramah Lingkungan.

F. Arah Sosiologi Industri

Sosiologi Industri merupakan salah satu cabang dari ilmu sosiologi dan menjadi salah satu mata kuliah yang disajikan dalam struktur kurikulum jurusan sosiologi. Tentu saja sosiologi industri merupakan spesialisasi sosiologi yang membahas tentang fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat industri. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang melakukan proses bertransformasi dari negara agraris menjadi negara industri. Maka, jika kita membicarakan sosiologi industri, sekurang-kurangnya ada dua yang harus dibicarakan, yakni: Pertama adalah masyarakat tempat industri berada, mereka bisa masyarakat yang mendorong terbentuknya industri dan mereka yang terpengaruh dalam pengertian baik dan buruk oleh industri. Kedua adalah kelompok orang yang berada dalam industri dan menjalankan industri tersebut. Kelompok orang ini mengadakan interaksi satu sama lain sehingga dapat kita katakan sebagai masyarakat Industrialisasi yang di anggap menonjo. Kriterianya adalah besarnya dampak industrialisasi yang terjadi, terhadap masyarakat. Perkembangan industri (industrialisasi) berpengaruh terhadap kondisi sosiologis masyarakat, dan sebaliknya kondisi sosiologis masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan industri (industrialisasi) pengalaman historis tiga negara besar di eropa abad 17. Tiga negara besar eropa (inggris, perancis, dan jerman) dalam proses industrialisasinya memiliki perkembangan yang berbeda. Inggris merupakan negara pertama yang mencapai taraf pemerintahan yang demokratis. Revolusi perancis terjadi karena negara itu tidak demokratis.

Di Inggris, perjuangan politik berlangsung mulai awal abad 17. Titik kulminasinya adalah revolusi yang dimulai pada

tahun 1640. Akibat revolusi adalah tergantinya struktur politik lama dengan struktur yang baru, yaitu hilangnya restriksi lama dengan berpindahnya kekuasaan politik ke tangan kaum kapitalis dan borjuis, yang kemudian beraliansi dengan seksi aristokrasi yang lebih progresif. Akibatnya perkembangan ekonomi di Inggris maju dengan pesat. Abad 18, inovasi teknologi mendorong metamorfosis dalam organisasi industri inovasi ini berpengaruh terhadap penyebaran mesin-mesin dan manufaktur hasil industri pabrik. Katakanlah pada industri manufaktur kapas Inggris menjadi negara maju dalam perkembangan industri. Berbeda dengan Perancis, revolusi Perancis yang terjadi pada tahun 1789 merupakan usaha kaum borjuis Perancis untuk menggulingkan kaum aristokrat merupakan rezim yang sudah lama berkuasa dan untuk membentuk suatu masyarakat yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebebasan. Revolusi ini menginstitusionalisasikan perubahan politik dan mengisyaratkan sebuah kelengkapan organisasi masyarakat

Berdasar dari uraian di atas, membicarakan sosiologi industri akan menyangkut berbagai hal, karena hampir semua kehidupan dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung akan terkait dengan masalah industri, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang menuju era industrialisasi. Tentu membahas tentang fenomena masyarakat industri menjadi kajian yang menarik untuk dibicarakan.

G. Hubungan Masyarakat Industrial

Hubungan industrial merupakan sistem hubungan yang terbentuk di antara pelaku proses produksi barang atau jasa yang melibatkan sekelompok orang dalam suatu organisasi kerja. Tujuan dari hubungan industrial adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha. Produktivitas dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Peningkatan produktivitas perusahaan dan kerja tidak bisa dicapai apabila kesejahteraan pekerja tidak diperhatikan atau diberikan harapan tentang kesejahteraan yang lebih baik di masa depan. Demikian juga sebaliknya, kesejahteraan pekerja tidak bisa dipenuhi atau ditingkatkan apabila tidak terjadi peningkatan produktivitas perusahaan dan kerja.

Hubungan industrial dapat dijelaskan dengan pendekatan tertentu dari berbagai pendekatan yang ada. Pendekatan-pendekatan itu, antara lain unitaris (*unitary*), pluralis (*pluralist*), marxist (*radikal*). Sementara itu, J. Dunlop mengemukakan bahwa dalam menganalisa hubungan industrial perlu mempertimbangkan peraturan-peraturan di tempat kerja (*the rules of the workplace*) sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh interaksi para pelaku hubungan industrial sebagai variabel independen. Proses interaksi itu (*variabel independen*), meliputi tiga hal berikut:

- a. Status relatif dari pelaku (*the relative status of the actor*).
- b. Konteks di mana para pelaku berinteraksi (*the context in which the seactors interact*).
- c. Ideologi dari sistem hubungan industrial (*the ideology of the industrial relation system*).

Perselisihan industrial biasanya diawali dengan tuntutan pekerja, baik secara lisan maupun tulisan. Perselisihan timbul ketika usulan atau tuntutan pekerja tidak segera ditanggapi oleh pihak pengusaha, tidak segera dilakukan perundingan atau karena kesepakatan antara manajemen dan pekerja tentang jenis tuntutan atau nilai tuntutan belum tercapai. Perselisihan industrial dapat diartikan sebagai perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja menyangkut masalah hak, kepentingan, dan keputusan kerja serta perselisihan antarserikat pekerja di satu perusahaan. Hubungan industrial pada awal kemerdekaan di mana masih diwarnai oleh orientasi politik. Pada masa ini seluruh tenaga dan pikiran dicurahkan untuk mempertahankan kemerdekaan sehingga polarisasi dalam hubungan industrial tidaklah terasa.

Pada masa pemerintahan orde baru, telah terjadi gerak balik perkembangan hubungan industrial, sama seperti halnya pada masa kolonial. Pada waktu itu pemerintah terlibat jauh dalam penataan hubungan industrial di Indonesia. Dengan kata lain, kalau pada masa Orde Lama gerakan buruh menjadi riuh rendah dengan politik maka pada masa Orde Baru gerakan-gerakan buruh menjadi sepi secara politik. Bahkan buruh diasingkan, diabaikan dari politik, dan gerakan buruh dibatasi di bawah wadah tunggal serikat buruh atau yang dikenal dengan istilah *political labour union*.

Kemunculan hubungan Industrial Pancasila merupakan bagian dari restrukturisasi gerakan buruh di Indonesia oleh pemerintah orde baru. Langkah strukturalisasi yang dimaksudkan, antara lain untuk meredam ancaman aktivitas politik terhadap stabilitas sosial politik yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada masa orde baru menjalankan dua langkah, yaitu penataan pada aspek kelembagaan dan aspek ideologi.

Salah satu perubahan penting akibat kebijakan sentralisasi adalah munculnya sistem hubungan industrial yang memungkinkan para buruh bebas mendirikan serikat buruh pada setiap tingkat perusahaan sesuai dengan UU nomor 21/2000. Di samping itu, pemerintah juga telah meratifikasi beberapa konvensi ILO (International Labor Organization-PBB), termasuk Konvensi No. 87 Th. 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.

Sosiologi Industri salah satu cabang dari sosiologi yang mengkaji masyarakat di pandang dari sudut hubungan antarmanusia tersebut di dalam masyarakat. Sosiologi pada dasarnya mempelajari masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan peneliti kelompok yang dibangunnya. Sosiologi juga mempelajari perilaku dan interaksi kelompok dengan menelusuri asal-asul pertumbuhannya serta menganalisis pengaruh kegiatan kelompok terhadap anggotanya. Industri merupakan aplikasi metode-metode yang kompleks dan canggih untuk memproduksi barang dan jasa secara ekonomis. Metode yang kompleks maksudnya adalah menggunakan mesin sebagai alat memperbaiki atau mengembangkan kualitas dan kuantitas produksi. Jadi, manusia dan alat di gunakan untuk memenuhi kebutuhan (manusia sebagai makhluk induatri). Industri merupakan konsep yang tidak langsung sosio makna logis, dan sulit menentukan teoritis orientation sepanjang garis. Istilah industri telah di ambil alih dari bahasa akal sehat, ekonomi, dan *sensus occupations*, di gunakan dalam dua cara: sebagai sinonim dengan pabrik; dan sebagai meliputi setiap kerja skala besar tenaga kerja dan modal. Sosiologi industri merupakan studi tentang hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat industri. studi yang telah diperhitungkan dalam industri dan lingkungan sosial serta pengaruh hubungan dalam industri.

Sosiologi industri adalah bidang terapan sosiologi, dan telah tumbuh terutama luar kepentingan dalam isu-isu seperti Produktivitas, Motivasi, dan Serikat Kerja. Sosiologi industri tidak dinyatakan begitu banyak kurangnya implikasi teoritis dari lapangan. Ketika dapat di tunjukkan bahwa suatu diterapkan lapangan adalah sama dan sebangun wilayah teoritis, dan untuk menentukan tematik batas, maka ada kemungkinan untuk melihat hubungan lain bidang studi seperti (Sosiologi Politik) dan memanfaatkannya sebagai hipotesis dan konsep.

Demikian sosiologi industri mempunyai pemahaman yang lebih baik dari proses pengawasan dan peran mandor sejak konsep kepemimpinan, yang diambil dari luar daerah, telah diperkenalkan. Sosiologi Militer, di sisi lain memperoleh keuntungan dari ide organisasi informal, pertama kali digunakan oleh sosiologi industri. Pada hakikatnya sosiologi industri lebih menekankan pada perkembangan industri seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini mengingat antara industri dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat, karena adanya industri akan menimbulkan berbagai perubahan sosial dalam masyarakat. Misalnya dengan adanya industri, mata pencaharian hidup masyarakat berubah, dari sektor agraris menjadi sektor industri dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Sosiologi industri mengkaji tentang hubungan antara fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan kegiatan industri. Adapun materi yang dipelajari antara lain: peran industri dalam perubahan sosial, aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pokok ekonomi, serta hubungan industri dengan berbagai struktur yang ada dalam masyarakat. Sosiologi Industri mengkaji masalah fenomena industri dengan menitikberatkan kajiannya yang fokus manusia dan mengaitkannya dengan faktor mesin serta mekanisme kerja pabrik yang berorientasi pada efisiensi dan efektifitas. Jadi, Secara rinci sosiologi industri adalah studi tentang hubungan sosial yang arahnya pada sistem integrasi dalam perusahaan. Studi tentang kegiatan sosial, ekonomi, dengan latar belakang sosial kultural

Sosiologi industri adalah cabang dari ilmu sosiologi yang mengkaji hubungan antara fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan kegiatan industri. pada dasarnya sosiologi

industri lebih menitikberatkan pada perkembangan industri seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini mengingat antara industri dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat, karena adanya industri akan menimbulkan berbagai perubahan sosial dalam masyarakat.

H. Fenomena Sosial Industri Kreatif

Perkembangan Industri Pada akhir abad Pertengahan kota-kota di Eropa berkembang sebagai pusat kerajinan dan perdagangan. Warga kota (kaum Borjuis) yang merupakan warga berjiwa bebas dianggap menjadi tulang punggung perekonomian kota. Mereka bersaing secara bebas untuk kemajuan dalam perekonomian. Pertumbuhan kerajinan menjadi industri melalui beberapa tahapan. Sistem dometik. Sistem domestik merupakan tahapan yang disebut sebagai tahap kerajinan rumah. Para pekerja, mereka berkerja di rumah masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Bahkan kerajinan diperoleh dari pengusaha, dimana setelah selesai dikerjakan distorkan kepada pengusaha. Upah yang diperoleh berdasarkan jumlah barang yang selesai dikerjakan. Dengan cara kerja demikian majikan memiliki usaha hanya membayar tenaga kerja atas dasar prestasi atau hasil pekerjaannya. Para majikan tidak direpotkan soal tempat kerja dan masalah gaji yang harus diberikan.

Kegiatan industri manufaktur setelah kerajinan industri semakin berkembang diperlukan tempat khusus untuk bekerja agar majikan dapat mengawasi dengan baik dalam mengerjakan dan mengendalikan mutu produksinya. Sebuah manufaktur (pabrik) dengan puluhan tenaga kerja dan biasanya berada di bagian belakang rumah majikan. Rumah bagian tengah untuk tempat tinggal dan bagian depan sebagai toko untuk menjual produknya. Hubungan antara majikan dengan pekerja (buruh) lebih akrab karena tempat kerjanya jadi satu dan jumlah buruhnya masih sedikit. Barang-barang yang dibuat kadang-kadang juga masih berdasarkan pesanan.

Sistem pabrik pada tahap ini, industri yang sudah menggunakan mesin. Tempatnya di daerah industri yang telah ditentukan. Bisa di dalam kota atau bisa juga di luar kota. Tempat tersebut digunakan tempat kerja, sedangkan majikan tinggal di tempat lain. Demikian juga toko tempat pemasaran

hasil industri diadakan ditempat lain. Jumlah tenaga kerjanya sudah mencapai puluhan, bahkan ratusan. Barang-barang produksinya dibuat untuk dipasarkan. Sedangkan kerajinan tangan yang dilakukan pada masyarakat Indonesia, sebenarnya merupakan kebiasaan saling bekerjasama dan saling membantu ketika ada tetangga atau anggota masyarakatnya diberi pekerjaan. Kebiasaan ini lambat laun dikerjakan secara profesional dengan menghasilkan suatu produk yang bisa di jual bahkan diekspor sampai manca negara.

Sosiologi merupakan ilmu yang memusatkan perhatian kepada tindakan-tindakan manusia yang terbingkai dalam sejumlah aturan-aturan yang dibangun oleh sekumpulan manusia itu sendiri. Tindakan manusia juga terbingkai di dalam struktur sosial. Namun, sosiologi juga memperhatikan aspek dinamis dari tindakan. Individu mempunyai kemungkinan untuk mengelola tindakannya. Fenomena perkembangan industri pada masa sekarang tidak diartikan sebatas mesin atau pabrik, namun sekarang beralih yang disebut dengan industri kreatif. Industri Kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi.

Industri kreatif dikenal dengan nama lainnya adalah industri budaya atau juga ekonomi kreatif. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan yang menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta setiap individunya.

Beberapa bentuk ekonomi kreatif antara lain: periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, film, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian dan pengembangan, perangkat lunak, mainan dan permainan, televisi dan radio dan permainan video. Muncul pula definisi yang berbeda-beda mengenai sektor ini. Namun sejauh ini penjelasan Howkins masih belum diakui secara internasional. Industri kreatif dipandang semakin penting dalam mendukung kesejahteraan dalam menunjang perekonomian. Beberapa sub-sektor yang merupakan industri kreatif di Indonesia berdasarkan

pemetaan industri kreatif, sebagaimana telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, antara lain:

1. Periklanan.

Periklanan adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan yang meliputi, proses kreasi, produksi dan distribusi serta iklan yang dihasilkan. Misalnya: riset pasar, perencanaan komunikasi iklan. iklan ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak dan elektronik, pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran brosur, dan reklame sejenis, distribusi dan delivery advertising material atau sampel serta penyewaan kolom iklan.

2. Arsitektur

Arsitektur adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro sampai dengan mikro.

3. Pasar Barang Seni

Pasar Barang Seni ini merupakan kreativitas yang berkaitan dengan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang. Galeri, toko pasar swalayan, internet. Misalnya, alat musik, percetakan, kerajinan, automotif, film., seni rupa dan lukisan.

4. Kerajinan

Kerajinan merupakan kegiatan kreatif berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi: barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serta alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam, kayu, kaca, proselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapus. Proseuk kerajinan pada umumnya hanya diperoduksi dalam jumlah yang relatif kecil.

5. Desain

Desain merupakan kegiatan kreatif dengan desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri perusahaan

dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.

6. Mode atau Fashion

Adalah gaya berpakaian yang populer dalam suatu budaya. Secara umum fesyen termasuk masakan, bahasa, seni dan arsitektur. Namun secara spesifik di sini dimaksudkan yaitu fashion, Fashion adalah kegiatan kreatif terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, desain aksesoris mode lainnya. Produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fashion serta distribusi fashion.

7. Video, Film dan Potografi.

Adalah kegiatan kreatif terkait dengan kreasi produksi video, film dan fotografi, serta distribusi dengan kreasi video dan film. Termasuk di dalamnya manajemen produksi film. Penulisan skrip, tata dinematografi, tata artistik, tata suara, penyuntingan gambar sinetron dan ekshibisi film.

8. Permainan Interaktif

Permainan interaktif adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat menghibur, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaksi bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, namun juga sebagai alat bantu dalam pembelajaran atau edukasi.

9. Musik

Musik adalah kegiatan kreatif terkait dengan kreasi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari hasil rekaman tersebut.

10. Seni Pertunjukan

Seni pertunjukan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung dan tata pencahayaan.

11. Penerbit dan Percetakan

Penerbitan dan percetakan merupakan kegiatan kreatif dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan mencari berita. Bidang ini mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga

lainnya, pasport, tiket pesawat terbang dan terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto grafik dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya termasuk rekaman dan micro film.

12. Pelayanan Komputer dan Peranti Lunak

Pelayanan Komputer dan Peranti Lunak yang dimaksudkan adalah kegiatan kreatif terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer pengembangan peranti lunak, pengembangan database, integrasi sistem, desain dan analisi sistem, desain arsitektur peranti lunak, pengolahan data, desain prasarana peranti lunak dan peranti keras serta desain portal termasuk perawatannya.

13. Televisi dan Radio

Merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan serta televisi penyiaran dan tranmisi konten acara televisi dan rasio termasuk kegiatan sta tion relay siaran radio dan televisi.

14. Riset dan Pengembangan

Riset dan pengembangan merupakan kegiatan kreatif terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan tersebut untuk perbaikan dan kreasi produk baru, metode baru, proses baru, material baru, alat dan teknologi baru, yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian, dan pengembangan bahasa, sastra dan seni; serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

15. Kuliner

Kuliner adakah kegiatan kreatif dalam mengolah produk makanan alahan khas Indonesia untuk dapat ditingkatkan daya saingnya dipasar ritek dan pasar internasional. Studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lengkap mengenai produk-produk makanan olahan khas Indonesia unruk disebarluaskan melalui berbagai media yang tepat baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga memperoleh peningkatan daya saing di pasar ritek moders dan pasar internasional.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa industri keatif akan menjadi bagian yang sangat penting, mengingat

banyaknya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai warisan budaya dari produk makanan khas Indonesia yang berbeda dan tidak dimiliki oleh bangsa lain yang merupakan sumber keunggulan komperatif bagi bangsa Indonesia. Ciri khas yang dimiliki oleh bangsa kita merupakan keunggulan yang harus dijaga dan diperlihara dan yang paling penting adalah meningkatkan daya saing pada tingkat regional dan internasional.

I. Industri Ramah Lingkungan (Sebuah Upaya dan Gagasan

Harus diakui secara jujur bahwa pada sektor industri dianggap sebagai salah satu penghasil polusi dan limbah terbesar. Sejak industri besar mulai berdiri, polusi meningkat pesat. Hasil dari proses produksi tidak hanya berupa barang jadi yang bisa dijual, tetapi limbah sisa produksi tersebut bisa merusak lingkungan. Dalam setiap industri harus dilengkapi sistem pengolahan volusi dan limbah yang sesuai dengan standar untuk mengantisipasi kerusakan yang diakibatkab oleh produksi industri. Oleh karena itu, limbah harus dibuat secara tepat dan dioleh derngan tepat pula. Dengan demikian industri yang ramah lingkungan adalah cara tepat yang dapat digunakan untu menjaga kelestarian alam. Industri ramah lingkungan dapat di diwujudkan dengan menggunakan cara yang tepat dan efesien untuk memproduksi dengan tanpa merusak kelestarian alam. Metode industrialisasi baru peru diterapkan dengan kelestarian lingkungan alam sebagai salah satu fokus utamanya.

Konsep dan kajian yang seperti ini sudah diterapkan pada beberapa negara maju, karena pola pikir masyarakat negara yang sudah maju memahami serta memperhatikan pentingnya lingkungan bagi kelangsungan hidup mereka. Industri ramah lingkungan juga harus diterapkan di Indonesia karena negeri ini mempunyai potensi sumber daya alam yang begitu melimpah. Potensi tersebut harus dirawat dan dipertahankan. Kekayaan alam harus diolah dan diperbaharui sehingga bisa digunakan lagi. Jika kegiatan suat produksi tidak memperharikan aspek kelestarian lingkungan hidu[hanya akan berakibat kerusakan lingkungan alam. Terjadinya hujan asam bisa timbul karen pencemaran yang sudah parah.

Fenomena yang demikian disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup karena proses industri yang tidak terkendali. Kebocoran reaktor nuklir sebagai pemasok energi untuk proses industri bisa menjadi ancaman besar. Indonesia juga sudah cukup sering mendapatkan masalah karena tidak bisa mengelola kegiatan industri secara efektif. Industri ramah lingkungan tampaknya menjadi solusi menarik untuk mengontrol kegiatan industri yang cenderung merusak lingkungan. Dalam proses pembangunan, hendaknya diatur dan diawasi secara ketat oleh pemerintah, begitu juga keterlibatan masyarakat juga harus diberi ruang yang sama untuk mengawasi proses dan implementasi industrialisasi. Jika industri dinilai tidak mementingkan kelestarian lingkungan, maka masyarakat akan menuntutnya. Salah satu wujud nyata dari tindakan pemerintah untuk mengontrol industri adalah analisis dampak lingkungan. Dimana setiap industri harus memenuhi kriteria yang telah diatur dalam regulasi industri. kontrol terhadap industri ramah lingkungan bisa dilakukan melalui kontrol terhadap pembuangan limbah serta dalam memilih bahan baku. Pembuangan limbah yang seharusnya tidak menghasilkan polusi berlebihan akan mengganggu kenyamanan pada masyarakat sekitar.

Cerobong asap dilengkapi dengan filter untuk mengurangi polusi. Sementara itu, limbah padat dan cair harus dibuang ke tempat yang tepat. Pemilihan bahan baku untuk proses industri juga perlu diperhatikan. Gas yang membahayakan seperti CFC, Neon atau Metanol tidak layak digunakan akan berpotensi merusak lingkungan hidup. Salah satu contoh yang sangat memprihatinkan pada saat ini adalah tercemarnya sungai Citarum di Jawa Barat merupakan sungai tercemar yang sangat tinggi akibat pembuangan limbah industri, dimana pabrik-pabrik dan perusahaan industri sekitar bantaran sungai Citarum membuang limbahnya secara tidak bertanggungjawab sehingga sungai Citarum menjadi salah satu sungai yang tingkat pencemaran yang paling tinggi di dunia. Padahal kita ketahui bahwa sungai Citarum merupakan salah satu sungai purba peninggalan leluhur nenek moyang orang Sunda, dulunya disebut Pasundan dengan segala kekayaan alamnya. Para seniman menggambarkan dengan kalimat "Ketika Tuhan

Tersenyum Lahirlah Pasundan". Begitulah kira-kira para seniman melukiskannya dengan untaian kata-kata yang indah.

Begitu juga dalam pemilihan lokasi industri, harus benar diperhatikan dengan berbagai aspek, harus terutama memperhatikan terhadap aspek lingkungan hidup manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Di kota-kota besar biasanya menjadi tempat yang penuh dengan pabrik-pabrik. Sentralisasi industri di satu tempat akan mendatangkan banyak kerugian sehingga pengalihan industri ke lokasi lain perlu dipertimbangkan. Industri sebaiknya didirikan di wilayah kosong untuk mengurangi polusi dan persaingan yang tidak sehat. Berdasarkan lokasinya, industri bisa dibedakan menjadi industri perkotaan dan pedesaan. Industri di perkotaan mengolah bahan baku dan menghasilkan produksi baru dalam jumlah yang besar, sementara pedesaan bergerak pada sektor pertanian atau peternakan.

Industri ramah lingkungan pada dasarnya merupakan penerapan konsep "Zero Waste". Dimana dalam pelaksanaannya industri ramah lingkungan diharapkan dalam proses industri melakukan strategi mencegah, mengurangi dan menghilangkan terbentuknya limbah industri sebagai bahan yang dapat pencemari lingkungan hidup.

Hal yang demikian akan berjalan apabila dalam proses sebelumnya dirancang dan diperhitungkan secara matang mulai dari bahan baku sampai akhir kegiatan adalah senantiasa memperhatikan aspek ramah lingkungan. Maka untuk mendukung terlaksananya proses tersebut diperlukan suatu perubahan mendasar serta komitmen dari semua pihak. Sekurang-kurangnya ada 6 prinsip dasar industri yang ramah lingkungan, yaitu: *Refine, Reduce, Reuse, Recycle, Recovery dan retrieve energy*. Ke enam prinsip dasar tersebut merupakan "nir limbah" (*zero waste*), produksi bersih (*cleaner production*), produktivitas hijau (*green productivity*) atau perusahaan hijau (*green company*).

Beberapa hal yang disebutkan di atas, merupakan model untuk meningkatkan produktivitas, dalam menjaga keberlanjutan produksi dengan tetap memelihara lingkungan kelentarian alam, kesehatan dan keselamatan para pekerja. Sebagai bahan pertimbangan untuk menciptakan industri yang ramah lingkungan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Refine.*
Refine yaitu penggunaan bahan atau proses yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan atau proses yang ada pada saat sekarang.
2. *Reduce.*
Reduce yaitu pengurangan jumlah limbah atau kehilangan bahan dengan optimalisasi proses atau operasional yang menghasilkan limbah yang mengalami pemborosan. Contohnya: mengganti keran atau pipa bocor, memasang alat penangkap ceceran/lelehan.
3. *Reuse*
Reuse, yaitu pemakaian kembali bahan-bahan atau limbah pada proses yang berbeda.
4. *Recycle*
Recycle yaitu penggunaan kembali bahan-bahan atau sumber daya untuk proses yang sama
5. *Recovery*
Recovery yaitu kegiatan pengambilan kembali sebagian material penting dari aliran limbah untuk pemanfaatan ulang dalam proses atau pemanfaatan untuk keperluan lainnya.
6. *Retrieve Energy*
Retrieve Energy yaitu pemanfaatan limbah untuk digunakan sebagai bahan bakar atau dalam arti luas adalah penghematan energi dalam proses produksi.
 Salah satu teknologi ramah lingkungan yang sudah diterapkan di Indonesia adalah biopori. Biopori atau yang biasa disebut dengan Teknologi Lubang Resapan Biopori merupakan metode alternatif untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah, selain dengan sumur resapan. Pemanfaatan biopori akan membuat keseimbangan alam menjadi terjaga, sampah organik yang menimbulkan bau baru dapat ditangani, disamping itu dapat menyimpan air untuk cadangan di musim kemarau. Selain itu kelebihan dari biopori adalah dapat memperkaya kandungan air hujan, karena setelah diresapkan ke dalam tanah lewat biopori yang mengandung lumpur dan bakteri, air akan melarutkan dan mengandung mineral-mineral yang diperlukan oleh kehidupan. Adapun tujuan Lubang Resapan Biopori (LRB) ini adalah supaya air masuk sebanyak-

banyaknya ke dalam tanah. Sementara pembuatan biopori pun cukup mudah.

BAB III

MASYARAKAT PRA-INDUSTRI

Pada bab tiga, membahas tentang Masyarakat Pra Industri, akan dibahas beberapa hal tentang: **Pengertian Masyarakat Pra-Industri. Pertanian sebagai Mata Pencaharian Masyarakat Pra-Industri, Pesedsaan, Tradisional. Dan Proteksi Terhadap Masyarakat Pertanian.**

A. Pengertian Masyarakat Pra-Industri

Masyarakat pra-industri adalah suatu bentuk organisasi sosial, politik dan budaya pada masa sebelum terjadi revolusi industri. Masyarakat pra-industri identik dengan masyarakat pedesaan, mereka memiliki adat budaya yang khas dan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya, maka kepemilikan tanah menjadi hal yang penting.

Terdapat beberapa ciri masyarakat pra-industri di antaranya adalah:

1. Produksi yang terbatas
2. Ekonomi bertumpu pada pertanian.
3. Pembagian kerja yang terbatas. Dalam masyarakat pra-industri, proses produksi relatif sederhana dan jumlah spesialisasi kerja terbatas.
4. Variasi kelas sosial yang terbatas.
5. Komunikasi antar komunitas terbatas, hanya sedikit yang melihat atau mengetahui keadaan di luar desanya sendiri.
6. Masyarakat banyak berkembang di daerah pedesaan.

Dengan demikian masyarakat pra-industri kata sifat (komparatif lebih pra-industri, superlatif yang paling pra-industri) Dari atau berkaitan dengan budaya atau masyarakat yang belum menjadi industri.

Tabel I
Matrik Perbedaan masyarakat
Pra-Industri dan Masyarakat Industri

NO	Perbedaan dari	Masyarakat Pra-Industri	Industri
1	Sistem Mata Pencaharian	Mengandalkan sektor pertanian.	Menandalkan sektor industri dengan teknologi

2	Organisasi Sosial	Lebih mementingkan ikatan kekeluargaan.	Lebih mementingkan kebebasan untuk meningkatkan ekonomi
3	Perkembangan Teknologi	Mengandalkan tenaga manusia dan hewan	Menggunakan peralatan teknologi mutakhir
4	Pola Tempat Tinggal	Bangunan komersial dan dari golongan bawah menyebar di pinggiran kota	Pusat kota untuk bangunan keagamaan dan perumahan untuk golongan elit
5	Dalam Pekerjaan kelas Sosial.	Masih turun temurun dan bebas	Lebih fleksibel dan bebas

B. Sekilas Masyarakat Pra-Indusri di Eropa

Suatu tanda kehidupan masyarakat feodal mulai muncul di Eropa sejak terhentinya lalu lintas perdagangan antara Eropa dengan dunia Timur. Hal ini terjadi karena perdagangan di wilayah Laut Tengah dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam, maka bagi para pedagang luar Islam untuk melakukan aktivitasnya menjadi terhambat. Keadaan yang demikian mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat Eropa, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem kehidupan masyarakat feodal dan gereja berkembang dengan pesat, sehingga dapat menguasai seluruh sektor kehidupan masyarakat Eropa.

Akibat dari perang Salin (1096-1291) kontak antara Eropa dengan dunia Timur (Timur Tengah dengan Asia lainnya) mulai hidup kembali. Keadaan yang demikian mengakibatkan semakin ramai dengan lahirnya kembali kota-kota perdagangan seperti: Henoa, Venesia dan lainnya sebagai pusat perdagangan di daerah Eropa dan wilayah selatan. Dengan berkembangnya kota-kota perdagangan tersebut, diikuti dengan munculnya usaha-usaha industri secara kecil-kecilan dalam bentuk industri rumahan (*home Industry*). Maka pada sekitar tahun

1200. Industri rumahan semakin mengalami perkembangan yang cepat bahkan mereka membentuk kelompok-kelompok dalam bentuk gilda. Selanjutnya pada tahun 1350 di Eropa berkembang perserikatan kota-kota dagang yang disebut dengan "hansa", Tujuannya adalah untuk bersama-sama melindungi usaha dan perdagangan serta memiliki armada laut atau pasukan sendiri untuk menjaga keamanan dalam perdagangannya. Sementara pada abad pertengahan, Inggris masih merupakan negara agraris. Seluruh kehidupan masyarakat Inggris masih merupakan negara kaum bangsawan dan tuan-tuan tanah, dimana tanah-tanah itu diperuntukkan sebagai tempat pemeliharaan ternak domba yang akan menghasilkan bahan baku "WOL" sebagai komoditas ekspor Inggris. Bahan baku wol sebagian besar diekspor ke Belanda dan Italia Utara. Namun pada abad ke 14 di bawah kekuasaan Raja Edward II mulai membangun industri-industri len (sejenis kain wol). Dengan perkembangan ilmu pengetahuan setelah kemenangan pasca perang Salib sebagai dikemukakan di atas, kehidupan masyarakat Eropa secara signifikan membawa pengaruh dan mendorong terjadinya revolusi industri di Inggris.

Pertanyaannya, bagaimanakah kondisi sosial masyarakat Eropa sebelum ada revolusi industri? Saat belum ada mesin-mesin yang menjalankan moda transportasi maupun memproduksi pakaian dan bahan pangan. Tak seperti zaman sekarang yang tinggal pencet tombol *send* lalu kabar terkirim ke seberang, ritme kehidupan masyarakat sebelum revolusi industri berjalan sangat lambat. Mereka harus menggunakan kuda atau menitipkan surat pada para pengembara untuk bisa saling bertukar kabar. Sebagian besar masyarakat tinggal dan bekerja di dusun-dusun. Dari tahun 1300 sampai 1750, keluarga-keluarga kaum petani yang miskin tinggal di sebuah lahan yang sempit, berkebun untuk konsumsi keluarga sendiri. Anak-anak belajar untuk pemerah susu sapi, mengolah mentega di dalam tong susu, dan beternak. Dari generasi ke generasi, mereka bergantung pada alat-alat yang masih sangat tradisional, seperti bajak dari kayu yang harus menggunakan binatang untuk menariknya. Produksi yang dilakukan pada zaman itu masih menggunakan elemen-elemen alam serta tidak membutuhkan pengaturan pabrik yang kompleks seperti

zaman sekarang. Masyarakat menggunakan kincir angin untuk mempermudah aktivitas penggilingan. Atau menggunakan *Hand loom* (alat tenun tangan) untuk menenun pakaian.

Pendidikan masyarakat di masa tersebut bisa dikatakan, buruk. Orang-orang kaya menyerahkan pendidikan anak-anak mereka pada pengasuh dan pengajar pribadi. Laki-laki dan perempuan dengan status biasa tidak mendapat kesempatan untuk menikmati pendidikan di sekolah dan universitas yang ada. Anak-anak gadis akan dikeluarkan dari sekolah setelah berusia 7 tahun. Politik selalu dimenangkan oleh pemilik tanah dan kaum militer sedangkan masyarakat biasa hanya diberikan hak politik yang sangat sedikit. Kehidupan, sebagai hasilnya, menjadi sebuah pertempuran yang tak kunjung habis melawan kelaparan, tuan tanah yang jahat, pekerjaan yang bertumpuk, dan nasib sial yang buruk. Selama berabad-abad, menu diet orang-orang Inggris terdiri dari roti gandum hitam dan bubur dengan sangat sedikit daging. Orang-orang Eropa makan sedikit buah dan sayur karena mereka masih percaya bahwa buah dan sayur dapat menyebabkan penyakit, depresi, dan masuk angin. Sebagian besar mereka tidak dapat membaca dan jarang mandi. Mereka berpikir bahwa sakit fisik yang disebabkan oleh penyakit adalah kehendak Tuhan sebagai jalan untuk membersihkan jiwa. Ketidaktahuan tentang teori-teori kuman dan mikrobiologi membuat dokter-dokter di zaman pertengahan lebih percaya pada astrologi dan *bloodletting* (mengambil darah dari pasien untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit) dibanding sains. Gaya hidup yang tradisional agraris dan pandangan-pandangan tersebut berlaku selama beberapa generasi. Perkembangan penduduk di zaman pra-revolusi industri cenderung berjalan lambat dari generasi ke generasi. Kemiskinan, perang, penyakit pes, dan rendahnya tingkat higienitas mengakibatkan tingginya angka kematian, khususnya di kalangan orang-orang muda. Bahkan, di tahun 1600-an, sekitar 25% bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun dan 25% lainnya meninggal sebelum usia 10 tahun.

Begitu juga masalah jumlah penduduk di Eropa tidak mengalami perkembangan yang signifikan selama beberapa ribu tahun. Di daerah Eropa, misalnya, yang sekarang dikenal sebagai Jerman mempunyai populasi sekitar 12 juta pada

tahun 1300-an. Setelah 400 tahun, populasi hanya bertumbuh sebanyak 20% menjadi sekitar 15 juta. Sebagai perbandingan, penduduk Amerika selama 100 tahun antara tahun 1900 dan 2000 meningkat dari 76 juta menjadi 281 juta. Terjadi peningkatan sebanyak 400% hanya dalam waktu satu abad. Hanya beberapa orang yang mempunyai kesejahteraan hidup yang layak, yang lain berada dalam taraf kemiskinan. Di Florence, Italia, 10% penduduk (pedagang, pemilik tanah, bangsawan) mengontrol sebanyak 68% kesejahteraan. Tahun 2007 di Inggris, 25% dari total penduduk yang berjumlah 5,3 juta hidup dalam lingkaran kemiskinan. Sebagian besar masyarakat pra-industri di Inggris hidup dengan level penghidupan yang kecil atau bahkan tidak mempunyai tabungan sama sekali. Jika ada sebagian dari mereka yang terkena himpitan ekonomi yang cukup berat, jaminan sosial masyarakat yang ada tak mampu membantu menyelamatkan mereka. Sebagian besar petani berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka. Membeli sebuah baju bagi mereka sudah termasuk hal yang mewah. Masyarakat bergantung pada petani untuk menghasilkan makanan dan pajak. Para pendeta dan bangsawan, meskipun mengendalikan sebagian besar kekayaan di Eropa dalam bentuk tanah, biasanya mereka tidak dikenai pajak. Sebuah kondisi yang membuat beban petani dan pengrajin menjadi lebih berat.

C. Pertanian Sebagai Mata Pencapaian Masyarakat Pra-Industri

Petanian adalah suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Dalam proses kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati termasuk di dalamnya hasil pertanian yang biasa di fahami sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (*crop cultivation*) serta pembesaran microorganisme dan bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan seperti: pembuatan keju, dan tempe atau sekedar ekstraksi semata antara lain penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Sebagian besar penduduk di dunia bermata pencaharian dalam lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4 % saja dari PDB dunia.

Dalam perjalanan sejarah di Indonesia, sejak masa kolonial sampai sekarang yang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor-sektor yang demikian memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan masalah sosial di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut data BPS pada tahun 2002, bidang pertanian di negara Indonesia terdapat lapangan kerja sekitar 43% penduduk meskipun hanya menyumbangkan sekitar 17,3 % dari total pendapatan domestik bruto. Beberapa kelompok ilmu-ilmu yang mengkaji pertanian dengan linfunngan ilmu-ilmu pendukungnya. Karena dalam pertanian selalu terikat dengan ruang dan waktu. Ilmu-ilmu pendukung, seperti ilmu tanah, meteorologi, teknik pertanian, biokimia dan statistika juga diperelajari dalam pertanian. Usaha tani (*forming*) adalah bagian inti dan pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Istilah atau sebutan “Petani” adalah sebutan bagi mereka yang menyelenggarakan usaha tani. Contoh, petani tembakau atau petani ikan. Seorang pelaku budidaya hewan (*livestack*) secara khusus disebut sebagai peternak. Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia untuk kepentingan umat manusia.

Pertanian dalam arti sempit merupakan kegiatan pembudidayaan tanaman. Usaha pertanian diberi nama secara khusus untuk subjek usaha tani tertentu. Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar (hutan). Peternakan menggunakan subjek hewan darat kering (khususnya semua vertebrata kecuali ikan dan amfibia) atau serangga seperti lebah. Dalam usaha perikanan memiliki subjek hewan perairan termasuk amfibia dan semua non vetebrata air. Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek ini bersma-sama dengan alasan efesiensi dan peningkatan keuntungan. Berdasarkan pertimbangan pada kelestarian lingkungan alam mengakibatkan aspek-aspek konservasi sumber daya alam juga menjadi bagian dalam usaha pertanian.

Dalam setiap usaha pertanian pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar ilmu pengetahuan yang sama dalam hal pengetahuan tempat usaha,

termasuk pemilihan bibit dan benih, metode budidaya, pengemasan produk dan pemasaran. Jika seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal, maka ia melakukan pertanian intensif (*intensive farming*). Usaha pertanian yang dipandang dengan cara disebut sebagai agribisnis. Maka program dan kebijakan yang mengarah usaha pertanian ke cara pandang demikian disebut *intensifikasi*. Karena pertanian senantiasa menerapkan pertanian intensif. Kedua-duanya seringkali disamakan. Pada pertanian industri memperhatikan lingkungan pertanian yang berkelanjutan (*sustainable agriculture*). Pertanian yang berkelanjutan dikenal juga dengan variasinya seperti: pertanian organik atau permakultur memasukkan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor pengingat dalam perhitungan efisiensi. Maka akibatnya pertanian berkelanjutan biasanya memberikan hasil yang lebih rendah daripada pertanian industri.

Pertanian modern di masa sekarang lebih menerapkan sebagian komponen dari kedua kutub dalam ideologi pertanian sebagaimana disebutkan di atas. Selain kefuanya dikenal pula bentuk pertanian ekstensif (pertanian masukan rendah) yang dalam bentuk paling ekstrem dan tradisional akan berbentuk pertanian subsistem yang hanya dapat dilakukan tanpa ada motif bisnis dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kemunitasnya.

Dalam usaha pertanian akan memiliki dua ciri penting, pertama, selalu melibatkan barang dalam volume yang besar. Dan kedua, dalam proses produksi memiliki resiko yang relatif tinggi. Kedua ciri khas tersebut muncul karena pertanian melibatkan makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahap serta memerlukan ruang untuk kegiatan tersebut serta dalam jangka waktu tertentu dalam proses produksi. Dalam beberapa produk pertanian yang modern, misalnya dalam budidaya hidroponik kita dapat mengurangi ciri-ciri ini namun besaran biaya pertanian masih tetap ada.

D. Pedesaan

Pedesaan Berasal dari kata "Desa", menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi pemukiman di are

pedesaan (*rural*). Dalam istilah umum, desa merupakan kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia berada dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa, merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung (istilah yang sering di pakai di Jawa Barat dan Banten. Di Jogyaakarta disebut dusun, di Bali disbut Banjar, sedangkan di Sumatra barat disebut Jorong.

Begitu juga kepala desa memiliki nama-nama yang berbeda seperti kepala kampung atau Petinggi untuk di Kalimantan Timur, Klebun di Madura, Pembakal di kalimantan Selatan, Hukum tua di Sulawesi Utara. Demikian pula dengan segala istilah dan institusi Desa dapat disebut dengan naman lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat yang melekat pada desa tersebut. Hal yang demikian itu merupakan salah satu bentuk pengakuan dan kehormatan pemetintah terhadap keberadaan eksistensi desa.

Adapun masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang mediami pada suatu wilayah terntu dengan uukuran wilayah reltaif kecil dari wilayah kota. Masyarakat desa merupakan bentuk persekutuan abadi antara manusia dengan institusinya dalam suatu wilayah sebagai tempat tinggalnya dengan rumah-rumah yang dilengkapi dengan tanah pertanian yang tersebar dan biasanya terdapat sebuah kampung sebagai pusat kegiatan bersama.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Wijaya (2003) dalam bukunya "Otonomi Desa" menjelaskan bahwa "Desa adalah sebagian kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kelompok primer merupakan kelompok dominan
- b. Homogen dalam berbagai aspeknya
- c. Mobilitas sosial rendah
- d. Keluarga lebih dilihat dari fungsinya secara ekonomis sebagai unit produksi

- e. Proforsi anak lebih besar
- f. Bersifat koeltif dalam pembagian dan pengerjaan tanah
- g. Bersifat kesatuan ekonomis, yaitu dapat memenuhi kebutuhan sendiri (subsistensi)
- h. Jumlah penduduk kecil
- i. Sebagian besar penduduk dari pertanian
- j. Dikuasai alam

Berdasarkan tipologi Perkembangan Desa, akan mengikuti perkembangan desa mengikuti pola sebagai berikut:

1. Desa Tradisional (Pradesa)

Pada masyarakat suku terasing yang masih bergantung pada alam (cara bercocok tanam, cara memasak makanan, cara pemeliharaan kesehatan) kondisi masyarakat relatif statis tradisional masyarakat tergantung pada keterampilan dan kemampuan pemimpin (kepala suku).

2. Desa Swadaya

Sudah mampu mengolah alam untuk mencukupi kebutuhan sendiri sudah mengenal sistem iritasi sehingga tidak tergantung curah hujan.

3. Desa Swakarsa (desa peralihan)

Sudah menuju ke arah kemandirian benih-benih demokrasi sudah mulaki timbul (tidak tergantung pada pemimpin) dimana mobilitas sosial mulai ada baik secara vertikal maupun secara horizontal.

4. Desa Swasembada

Adalah suatu keadaan masyarakatnya tergolong maju karena sudah mengenal mekanisasi dan teknologi ilmiah partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan sudah efektif.

Begitu juga masalah budaya, pada masyarakat desa memiliki adat sebagai khas yang dapat membedakan dengan desa yang lainnya yang dipegang teguh oleh masyarakatnya secara turun-temurun. Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dan menjadi norma dalam masyarakat atau pola-pola perilaku tertentu dari warga masyarakat di suatu daerah. Dalam sebuah tradisi adat terkandung serangkaian nilai, pandangan hidup, cita-cita, pengetahuan, dan keyakinan serta aturan-aturan yang saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan bulat. Fungsinya sebagai pedoman tertinggi dalam bersikap dan bertingkah laku bagi seluruh warga masyarakat.

Dan setiap daerah memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda-beda sesuai dengan struktur sosial dalam masyarakat itu sendiri. Contoh adat tradisi kebudayaan masyarakat kampung Naga, berada di kawasan Singaparna kabupaten Tasikmalaya, suatu masyarakat yang mempertahankan nilai tradisi budaya, dimana masyarakat kampung Naga di era globalisasi disertai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mereka masih mempertahankan budaya dan nilai tradisi leluhur mereka salah satunya adalah mereka sangat menjaga kelestarian alam sekitarnya, mereka menganggap bahwa kelestarian alam harus dijaga karena alam akan memberi yang lebih baik kepada mereka, begitu juga jika alam dirusak, maka alam tidak akan memberi sesuatu kepada mereka. Salah satu yang dijaga adalah hutan terpelihara. Masyarakat kampung Naga sangat menghormati apa yang disebut dengan "pamali". Begitu juga, sistem kemasyarakatan masyarakat kampung Naga mereka hidup rukun dan mereka saling mengenal diantara mereka.

Bukti konkrit dari hal tersebut adalah adanya tahlilan pada hari ketiga setelah meninggalnya salah satu keluarga, kemudian tahlilan hari ketujuh, dan tahlilan hari ke empat puluh. Hal demikian merupakan wujud kepedulian masyarakat desa yang begitu tinggi dengan sesamanya. Sampai sekarang aktivitas tersebut masih berlanjut. Tidak hanya rasa simpati yang ditunjukkan masyarakat desa, namun gotong-royong dalam pembangunan rumah sebuah keluarga, masyarakat yang lain tanpa dimintai pertolongan mereka akan membantu dengan ikhlas. Baik tenaga maupun pikiran. Ada hal lain yang menarik dari kebudayaan masyarakat kampung Naga. Proses struktur sosial berjalan dengan lancar apabila jalinan didalam unsur-unsur sosial tersebut tidak mengalami kegoncangan pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Seseorang dalam bermasyarakat biasanya memiliki beberapa kedudukan. Kedudukan yang berbeda-beda sering disertai hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Pada umum hampir sama dengan daerah adat lainnya. Namun hal yang lebih penting para pimpinan adat mereka yang memiliki kedudukan apapun di kampung Naga mereka tetap dihormati. Salah ciri yang nampak pada masyarakat kampung Naga dapat

dilihat dalam bentuk rumah. Rumah mereka semua berbentuk bangunan rumah panggung dan setiap rumah mereka tidak memiliki tempat mandi dan cuci apalagi kakus. Tempat mandi, cuci dan kakus mereka dibuat menjadi tempat bersama sebagai tempat umum. Maka kebersamaan pada masyarakat kapung Naga sangat baik mereka saling mengenal satu sama lain sebagai masyarakat paguyuban.

Biasanya pada masyarakat desa maupun pada komunitas adat dalam menyelesaikan konflik perangkat desa melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. *Persuasive.*

Artinya perangkat desa atau orang tertentu yang dianggap berpengaruh dalam masyarakat melakukan usaha untuk mengajak / membimbing, berupa anjuran (pendekatan secara halus)

2. *Coersive*

Apabila dengan cara utama tidak efektif maka usaha berikutnya adalah dengan memberikan sanksi-sanksi mendidik

3. *Compulsive*

Artinya sekelompok masyarakat menciptakan situasi yang sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau patuh kepada aturan

4. *Pervasion*

Dengan penanaman norma yang ada secara rutin dengan harapan bahwa hal itu dapat membudaya.

Dengan demikian orang tersebut akan mengubah sikapnya. Lembaga social adalah suatu sistem pola social yang tersusun secara sistematis, bersifat permanen, mengandung perilaku-perilaku tertentu yang terpadu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap lembaga social memiliki fungsi dan tanggungjawab masing-masing yang berbeda satu sama lain. Dapat dikatakan pula bahwa pranata sosial merupakan seperangkat aturan sekitar kegiatan atau kebutuhan bersifat sosial tertentu. Oleh karena itu, di dalam masyarakat ada berbagai kegiatan dan kebutuhan sosial, maka di dalam masyarakat juga terdapat berbagai lembaga sosial. Lembaga social di Desa Wanayasa sangat berperan penting karena sebagai penentu kebijakan dalam masyarakat desa. Mulai dari lembaga yang paling kecil yaitu lembaga keluarga, sampai

perangkat desa. Perbedaan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, pada hakekatnya bersifat gradual. Kita dapat membedakan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota yang masing-masing punya karakteristik tersendiri. Pada masing-masing lingkungan pranata tersebut memiliki sistemnya tersendiri dengan fungsi-fungsi sosial yang sangat berbeda bahkan kadang pada hal tertentu saling berlawanan.

E. Tradisional

Istilah tradisional berasal dari kata Latin “traditum” yang artinya sesuatu yang diteruskan atau diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sesuatu yang diwariskan dapat berupa:

1. Sistem nilai, dapat berupa kepercayaan, keyakinan, agama, idea atau gagasan
2. Cara hidup (oleh Emmile Durkheim disebut sebagai fakta sosial, yakni cara berfikir, berperasaan dan bertindak para warga masyarakat yang mengikat).
3. Teknologi
4. Lembaga atau pranata sosial

Pada masyarakat tradisional mereka hidup dengan sistem nilai, cara berfikir, berperasaan dan bertindak, teknologi dan lembaga atau pranata sosial secara warisan dan turun temurun. Masyarakat desa adalah masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah dengan batas-batas tertentu dan diantara para warganya mempunyai hubungan yang erat dan mendalam. Menurut William F. Oughburn dan Nimkoff Meyer memberikan definisi bahwa desa adalah sebuah organisasi kehidupan sosial yang menyeluruh di dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu (*a total organization of social life within a limited area*).

Ada banyak macam desa, namun dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk desa, sebagai berikut:

1. Desa Swadaya.

Desa Swadaya adalah desa yang masih bersifat tradisional. Dimana adat istiadat mengikat kuat diantara warganya, mata pencaharian penduduknya diorientasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri, dengan tingkat

produktivitas yang rendah serta sarana prasarana kehidupannya masih kurang.

2. Desa Swakarya

Yaitu desa dengan adat istiadat sudah mulai mengalami perubahan karena pengaruh kebudayaan dari luar desanya mulai masuk. Lapangan pekerjaan dan mata pencaharian berdiferensiasi dan berkembang dari sektor primer ke sekunder. Begitu juga produktivitas desa mulai meningkat seiring dengan mulai bertambahnya sarana dan prasarana.

3. Desa Swasembada.

Yaitu desa yang telah mengalami kemajuan, dimana ikatan adat istiadat tidak yang mulai longgar. Begitu juga teknologi telah digunakan dalam proses produksi dan jasa, mata pencaharian masyarakatnya beraneka macam, sarana prasarana desa sudah memadai bahkan pada beberapa desa tidak dapat dibedakan dengan kota, seperti jaringan listrik dan telepon, air minum, sarana jalan beraspal angkutan umum dan sebagainya.

Meskipun demikian terdapat beberapa ciri umum masyarakat dari desa, yaitu:

1. Isolasi. Adalah hubungan yang terbatas dengan orang-orang di luar desa, sebuah komunitas desa bisa jadi terpisah hubungannya dengan komunitas desa lain. Karena keterbatasan ini menjadikan seorang warga desa sangat mengenal warga desa yang lainnya seluruh aspek kepribadiannya, bukan hanya peran dan fungsinya dalam masyarakat.
2. Homogenitas, adalah keseragaman yang relatif mengenai latar belakang etnik, keluarga maupun cara hidup diantara warga desa.
3. Pertanian. Yang dimaksudkan adalah pertanian dalam arti luas mengangkut aktivitas bercocok tanam, berternak, memelihara ikan maupun berkebun, walaupun ada warga desa yang berstatus pegawai negara, guru, dokter, petugas keamanan, macam-macam keahlian lainnya, namun mereka semua tetap akan terlibat dalam aktivitas pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung.\
4. Ekonomi sub-sistem. Maksudnya adalah aktivitas ekonomi pada suatu desa yang diorientasikan untuk menghasilkan

barang-barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhannya sendiri tidak berorientasi pada ekonomi pasar.

Untuk sekedar perbandingan mengenai ciri-ciri masyarakat desa di bawah ini akan dijelaskan menurut Roucek dan Warren, sebagai berikut:

1. Masyarakat desa memiliki sifat homogen dalam hal mata pencaharianm kebudayaan dan tingkah laku.
2. Kehidupan masyarakat desa menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi dan berperan dalam pengambilan keputusan.
3. Faktor geografi sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada, misalnya keterkaitan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahiran.
4. Hubungan sesama warga desa lebih intim dan awer daripada kota

Adapun desa menurut Rogers masyarakat desa memiliki ciri sebagai berikut:

1. *Matual distrust interpersonal relations* (rasa ketidakpercayaan timbal balik di antara warga desa terkait dengan sumber-sumber ekonomi desa seperti kepemilikan tanah)
2. *Perceived limitet group* (pandangan untuk meji yang sempit dan terbatas)
3. *Depedence on hostility towards government outhority* (ketergantungan dan sekaligus curiga terhadap pemetintah atau kepada unsur-unsur pemerintah)
4. *Familiesm* (adanya keakraban dan keintiman hubungan sosial di antara orang-orang yang memiliki hubungan darah)
5. *Lack of innovationess* (rasa enggan untuk menciptakan atau menerima ide baru)
6. *Fatalism* (pandangan bahwa kegagalan atau keberhasilan lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari pada faktor internal dalam diri warga masyarakat.

Menurut Nasikun ada tujuh macam bentuk fatalisme pada masyarkat pedesaan, yakni: 1) *Supernaturalism* (bahwa keberhasilan atau kegagalan ditentukan oleh sesuatu yang bersifat supernatural atau ghaib, 2) *Situation fatalism* (sikap aptis dan pasip terhadap kemungkinan perbaikan kehidupan karena kondisi atau situasi kehidupan tertentu, karena orang

kecil, karena tanah pertaniannya sempit dan sebagainya, 3) *project negativism* (sikap apatis dan pasif terhadap inovasi atau pembaruan disebabkan oleh kegagalan yang telah dialami dan dihayati di masa silam 4) *limited aspiration* (adanya keterbatasan dan ketidakmampuan menyatakan dan menyalurkan keinginan-keinginan), 5) *Luck of deferred gratification* (ketidakmampuan menunda kesenangan dan kenikmatan hidup sekarang, misalnya hasrat menabung atau berinvestasi), 6) *Limited view of this world* (pandangan yang terbatas terhadap dunia luar), 7) *Low emphatic* (yakni rendahnya ketrampilan “menangkap” peran orang lain, misalnya ketidakmampuan memahami keadaan orang lain).

F. Perlindungan Terhadap Masyarakat dan Pertanian

Daerah "bulan sabit yang subur" di Timur Tengah. Merupakan salah satu sejarah pertanian dengan ditemukannya bukti-bukti awal pertanian. Temuan itu antara lain; biji-bijian dan alat-alat pengolahnya. Ada fenomena domestifikasi hewan anjing, diduga telah dilakukan pada saat manusia belum mengenal budidaya (masyarakat berburu dan meramu) dan merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembudayaan hewan yang pertama kali. Selain itu, adanya praktek pemanfaatan hutan sebagai sumber bahan pangan diketahui sebagai agroekosistem konsisten yang paling tua.

Adanya pemanfaatan hutan sebagai kebun diawali dengan kebudayaan berbasis hutan yang dilakukan disekitar sungai. Secara bertahap manusia mengidektifikasi pepohonan dan semak yang bermanfaat. Hingga pada akhirnya dilakukan semacam seleksi buatan oleh manusia terjadi dengan cara menyingkirkan spesies atau varitas yang buruk dan memilih yang unggul.

Budidaya tanaman dan ternak (pertanian) sebagai salah satu kegiatan yang paling awal dikenal sebagai peradaban manusia mengubah total bentuk kebudayaan. Para ahli prasejarah pada umumnya sepakat bahwa pertanian pertama kali berkembang sekitar tahun 12.000 tahun yang lalu dari kebudayaan di daerah sekiat "bulan sabit yang subur" di Timur Tengah yang meliputi daerah lembah sungai Tigris dan Euprat terus memanjang sampai ke barat hingga daerah Suriah dan Yordania sekarang. Bukti-bukti yang pertama kali

dijumpai menunjukkan adanya budidaya tanaman biji-bijian (serealia, terutama gandum kuno seperti *emmer*) dan polongan-polongan di yang ada di daerah tersebut.

Sekitar tahun 2000 tahun setelah berakhirnya zaman es terakhir di era *Pleistosen*, di daerah ini banyak dijumpai hutan dan padang yang sangat cocok bagi dimaulainya pertanian. Pertanian telah dikenal oleh masyarakat yang mencapai kebudayaan batu muda (neolitikum), perunggu dan megalitikum. Pertanian telah mengubah bentuk-bentuk kepercayaan, dari pemujaan terhadap dewa perburuan menjadi pemujaan terhadap dewa-dewa yang ber lambang kesuburan dan ketersediaan pangan. Pada tahun 5300 tahun yang silam di Cina kucing telah didomestikasi untuk menangkap hewan pengerat yang menjadi hama di ladang. Teknik budidaya tanaman kemudian meluas sampai ke Barat (Eropa dan Afrika Utara, dimana pada saat itu Sahara belum sepenuhnya menjadi gurun) dan ke Timur (hingga Asia Timur dan Asia Tenggara) Bukti-bukti di Tiongkok menunjukkan adanya budidaya Jewawut (millet) dan padi sejak 6000 tahun sebelum Masehi. Sia Tenggara telah mengenal budidaya padi sawah paling tidak sejak 3000 tahun sebelum Masehi dan Jepang serta Korea sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Sementara itu masyarakat Amerika mengembangkan tanaman dan hewan budidaya sejak awal sama sekali berbeda. Hewan ternak yang pertama kali didomestikasi adalah domba/kambing sekitar 7000 tahun SM serta Babi (6000 tahun SM, bersama dengan didomestikasi nya hewan kucing. Sapi, kuda, dan kerbau mulai dikembangkan antara 6000 hingga 3000 tahun SM. Unggas mulai dibudidayakan lebih kemudian. Ulat sutera diketahui telah dibudidayakan 2000 tahun SM. Ikan air tawar baru dikenal semenjak 2000 tahun yang lalu di daerah Tiongkok dan Jepang. Budidaya ikan bahkan baru dikenal manusia abad ke 20 ini. Budidaya sayur-sayuran dan buah-buahan juga di kenal oleh manusia telah lama. Pada masyarakat Mesir Kuno (4000 tahun SM) dan Yunani Kuno (3000 tahun SM) telah mengenal baik budidaya anggur dan zaitun. Tanaman serat didomestikasikan disaat kuran lebih bersamaan dengan didomestikasi tanaman pangan. Cina mendomestikasikan ganja sebagai penghasil setat untuk membuat papan, tekstil dan sebagainya. Kapas

didomestikasikan pada dua tempat yang berbeda, yaitu Afrika dan Amerika Selatan. Di Timur Tengah dibudidayakan flax. Penggunaan nutrisi untuk mengkondisikan tanah seperti pupuk kandang, kompos dan abu telah dikembangkan secara independen di berbagai tempat di dunia termasuk Mesopotamia, lembah sungai Nil, dan Asia Timur. Petanian pada abad ke 20 bercirikan dengan peningkatan hasil, penggunaan pupuk pestisida sintetis, pembiakan selektif, mekanisasi, pencemaran air dan subsidi pertanian. Pendukung pertanian organik seperti Sir Albert Howard berpendapat bahwa awal abad ke 20, penggunaan pestisida dan pupuk sintetis yang berlebihan dan dalam jangka panjang dapat merusak kesuburan tanah.

Pendapat ini di diamkan selama puluhan tahun, sehingga timbul kesadaran terhadap lingkungan sekitar abad ke 21 yang menyebabkan gerakan pertanian berkelanjutan meluas dan mulai dikembangkan oleh petani, konsumen dan pembuat kebijakan. Pada tahun 1990-an telah terjadi perlawanan terhadap efek lingkungan dari para petani konvensional, terutama mengenai pencemaran air, yang menyebabkan tumbuhnya gerakan organik. Sebut saja salah satunya penggerak utama dari gerakan ini adalah dengan adanya sertifikasi bahan pangan organik pertama di dunia, yang dilakukan oleh uni Eropa pada tahun 1991, dan mulai mereformasi kebijakan pertanian bersama uni Eropa pada tahun 2005. Pertumbuhan pertanian organik telah memperbaharui penelitian alternatif seperti manajemen hama terpadu dan pembiakan selektif. Perkembangan teknologi terkini yang digunakan secara luas adalah bahan pangan yang termodifikasi secara genetik. Pada akhir tahun 2007, terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan harga biji-bijian yang dikonsumsi manusia dan hewan ternak yang menyebabkan peningkatan harga gandum hingga mencapai 58% kedelai hingga 32 % dan jagung hingga 11 % dalam kurun waktu satu tahun. Kontribusi terbesar berada pada peningkatan permintaan biji-bijian sebagai bahan pakan ternak terdapat di Cina dan India dan konversi biji-bijian bahan pangan menjadi produk. Hal demikian dapat menyebabkan kerusakan dan demonstrasi yang menuntut turunnya harga pangan. Maka organisasi International Fund for Agritultural

Development mengusulkan peningkatan pertanian skala kecil dapat memberi solusi untuk meningkatkan suplai. Misalnya kita bisa melihat di negara Vietnam. Perkembangan Vietnam yang bergerak dari importir makanan ke eksportir makanan kemudian mengalami penurunan angka kemiskinan secara signifikan hal ini disebabkan adanya peningkatan volume usaha kecil di bidang pertanian pada negara Vietnam.

Ada sebuah fenomena epidemi yang disebabkan adanya fungsi *Puccinia Graminis* pada tanaman gandum yang menyebar di Benua Afrika hingga sampai ke Asia, ini diperkirakan mencapai 40% lahan pertanian terdegradasi secara serius. Di Afrika terdapat kecenderungan degradasi tanah yang terus berlanjut dapat menyebabkan lahan tersebut hanya mampu memberi makan sekitar 25 % dari seluruh populasi.

Berbeda dengan Cina, pada tahun 2009 Cina merupakan produsen hasil pertanian terbesar di dunia yang diikuti Uni Eropa, India, dan Amerika Serikat berdasarkan perhitungan IMF. Menurut pakar ekonomi mengukur total faktor produksi pertanian menunjukkan bahwa Amerika Serikat saat ini mencapai 1.7 kali lipat produktif dibandingkan dengan pada tahun 1948. Sekurang-kurangnya ada enam negara di dunia yaitu Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Australia, Argentina, dan Thailand mensuplai 90% biji-bijian bahan pangan yang diperdagangkan di dunia. Defisit air yang terjadi telah meningkatkan impor biji-bijian di berbagai negara berkembang dan kemungkinan juga akan terjadi di negara-negara berkembang dan kemungkinan juga akan terjadi di negara yang lebih besar seperti Cina dan India. Terkait dengan pertanian dengan masalah tenaga kerja pertanian.

Pada tahun 2011, organisasi ILO (*Internasional Labour Organization*) menyatakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat satu miliar lebih penduduk di dunia bekerja di sektor pertanian. Sehingga pertanian menyumbang sekitar 70% jumlah pekerja anak-anak dibawah umur serta diberbagai negara terdapat sejumlah wanita yang bekerja di sektor pertanian. Lebih banyak jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

Hanya pada sektor jasa yang mampu mengungguli jumlah pekerja pertanian, yaitu: pada tahun 2017. Antara tahun 1997

dan 2017 jumlah tenaga kerja di bidang pekerja yang dipekerjakan di bidang pertanian sedcara bervariasi di berbagai negara. Mulai dari 2 % di begara maju seperti Amerika Serikat, dan Kabada bisa mencapai 80% diberbagai negara Afrika. Pada Negara maji, angka in secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan abad sebelumnya. Pada abad ke 16 antara 55% sampai 75% penduduk Eropa dibidang pertanian. Hingga abad ke 19, angka ini turun menjadi antara 35 hingga 65%, angka ini sekarang menjadi kurang dari 10%. Hal yang dapat mengganggu terhadap petani itu sendiri adalah masalah keamanan disektor pertanian merupakan industri yang berbahaya. Masalah keamanan menjadi bagian penting dalam pertanian, maka perlu diingat bahwa petani di seluruh dunia dalam bekerja memiliki resiko yang tinggi, seperti: terluka, penyakit paru-paru, hilangnya pendengaran, penyakit kulit, kanker akibat penggunaan kimia dan akibat pentalan cahaya matahari dalam jangka panjang.

Dalam sistem pertanian industri, luka secara berkala terjadi pada penggunaan alat serta mesin pertanian dan penyebab utamanya akibat luka serius. Begitu juha penggunaan pertisida dan bahan kimia lainnya dalam pertanian akan membahayakan kesehatan para petani. Para pekerja yang terpapar pestisida dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan fertilitas. Pada negara-negara industri dengan keluarga yang semuanya bekerja pada lahan pertanian yang dikembangkan sendiri, maka seluruh keluarga berada pada resiko tinggi. Penyebab utama kecelakaan fatal pada pekerja pertanian yaitu tenggelam dan luka akibat mesin. ILO menyatakan bahwa pertanian adalah salah satu sektor ekonomi yang membahayakan tenaga kerja.

Dapat diperkirakan, kematian para pekerja bisa mencapai 170.000 jiwa dalam setiap tahunnya. Hal ini dapat diperkirakan bahwa kematian para pekerja itu akibat luka, sakit serta gangguan terhadap petani mereka bekerja pada sektor pertanian yang tidak dilaporkan. Dalam hal ini, ILO telah mencanangkan konvensi kesehatan dan keselamatan pekerja pada bidang pertanian melalui pencegahan resiko pekerja para petani dengan meningkatkan peran individu dan organisasi pertanian

BAB IV

STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT INDUSTRI

Pada bab empat akan membahas tentang: Stratifikasi Sosial Masyarakat Industri, di dalamnya akan dibahas tentang: Rasional, Stratifikasi Sosial Masyarakat Industri, Industri dan Politik, Organisasi Di era Industri dan Industri Dan Implikasinya Terhadap Agama.

A. Keterkaitan Industri Dengan Yang Lainnya

Kajian tentang masyarakat selalu menarik untuk diperbincangkan dan bersifat dinamis. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi serta industri didalamnya. Secara historis perkembangan masyarakat industri berawal dari terjadinya revolusi industri di Inggris dan revolusi politik yang terjadi di Prancis. Revolusi industri yang terjadi di Inggris yang pada awalnya menggunakan alat produksi yang bersifat tradisional beralih secara modern kapitalis. Begitupun dengan adanya revolusi politik yang menerapkan sistem monarki absolut menjadi republik demokratis. Berbicara tentang sosiologi industri berarti tidak terlepas dengan adanya fenomena sosial yang menyangkut tentang hiruk pikuk di kehidupan masyarakat perkotaan dan kehadiran perusahaan di tengah masyarakat. Setiap kehadiran suatu perusahaan di tengah masyarakat secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Suatu daerah perindustrian yang baru mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak maka daerah tersebut akan menjadi pusat perindustrian dan akan mengambil alih semua aktivitas kerja yang telah berlangsung di daerah sekitarnya. Proses perkembangan daerah perindustrian akan membawa berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat.

Menurut S. R. Parker, R.K. Brown, J. Child, M.A. Smith, Sosiologi industri ialah suatu cabang ilmu sosial yang membahas karakter dan arti dunia kerja serta kehidupan manusia yang terlibat di dalamnya. Permasalahan yang berhubungan dengan industri tidak hanya segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan kegiatan kerjanya tapi banyak juga hal lain yang secara tidak langsung akan mempengaruhi

aktivitas kerja dalam industri tersebut. Bagi sebagian besar masyarakat, kerja selalu dihubungkan dengan aktivitas industri. Variasi dari konteks tersebut berarti bahwa pekerjaan pun bervariasi baik dalam perpindahan kerja ataupun perpindahan jabatan maupun tingkat kepuasan bagi pekerjanya, kesempatan maupun monotonitasnya, risiko maupun upah yang didapatkannya. Suatu tinjauan terhadap variasi-variasi tersebut memperlihatkan bahwa ia menyebar kedalam spektrum pekerjaan, dimulai dari tenaga pelaksana yang paling bawah kepada manajer dalam perusahaan. Sosiologi industri disebut juga sebagai sosiologi organisasi, membahas sikap dan ideologi setiap pimpinan pada suatu tingkat dalam struktur organisasi dan juga membahas apa yang dilakukan individu dalam organisasi.

Ada suatu keterkaitan antara perpindahan kerja dengan kebiasaan di dalam bekerja yang dialami oleh orang-orang merupakan suatu landasan utama baik bagi konflik maupun konsensus dalam suatu organisasi. Sosiologi industri membahas pula tentang jenis-jenis masyarakat yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung di dalam aktivitas dan eksistensi organisasi. Sistem Industri akan terkait dengan berbagai aspek kehidupan, di bawah ini akan dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Industri dan Ekonomi

Menurut Parker, konsepsi ekonomi sebagai suatu subsistem masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat merupakan pengatur suatu sistem. Sesungguhnya kita juga bisa mengatakan bahwa ekonomi merupakan induk sistem dari beberapa subsistem lainnya. Selanjutnya setiap subsistem memiliki peranan fungsional dalam hubungannya dengan sistem ekonomi sekaligus juga dengan sistem sosial yang merupakan induk dari semua sistem tersebut. Berbagai penemuan baru, perkembangan teknologi dan perubahan dalam dunia telah mengubah secara radikal karakter industrial Inggris dalam beberapa tahun terakhir ini. Industri-industri dengan teknik baru, misalnya didalam bidang elektronik, pesawat terbang, mobil, dan industri kimia serta dalam bidang konstruksi mesin dan teknologi perminyakan, telah menjadi bagian terbesar dari nilai ekspor dan memberikan kesempatan kerja yang cukup besar.

Menurut Parker, Nilai memainkan peranan penting di dalam merasionalisasikan norma-norma tertentu didalam suatu organisasi. Nilai yang berlaku biasanya selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi agar memungkinkan dirinya mampu mengembangkan dan mengendalikan berbagai macam sistem sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Di dalam masyarakat industri modern suatu nilai tertentu telah digunakan untuk mengendalikan, mengembangkan dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Keinginan untuk memaksimalkan keuntungan ataupun mendapat upah setinggi-tingginya serta naluri untuk bekerja keras, merupakan refleksi dari suatu nilai yang terasa ganjil di dalam suatu masyarakat yang tertutup suatu nilai yang jarang ditemukan di tempat manapun juga di dunia ini.

Suatu konsekuensi penting dari meningkatnya ukuran organisasi-organisasi industri adalah meningkatnya kecenderungan monopoli dan oligopolis. Perlu dicatat bahwa kenaikan laju konsentrasi industri yang menjadi ciri khas dalam perekonomian Inggris pada tahun 1960-an, telah menciptakan suatu situasi dimana sejumlah kecil perusahaan sekarang ini telah menguasai sektor industri tertentu. (Stant wort dan Giddens, 1975:5). Para pendukung sistem kapitalisme sudah lama: menduduki posisi kontradiktif di dalam monopoli; kelihatannya mereka mendapat keuntungan besar dari suatu pasar yang besar, sehingga mereka mampu merasionalisasikan produksinya, akan tetapi merekaupun "berada di dalam kontrol atau batasan-batasan kegiatan perdagangan". Walaupun mereka menghadapi berbagai kendala, tetapi di Amerika dan Inggris tetap tumbuh dengan pesatnya.

Suatu pertanyaan yang berkaitan dengan struktur ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius ialah "siapakah yang menjadi pemilik kekayaan negara?" Sering disinyalir bahwa kenaikan pajak justru memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, tetapi hanya sedikit fakta akurat yang mendukung pernyataan ini. Sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1969, kelompok orang yang paling kaya .di Inggris meliputi jumlah 5% dari populasi penduduk yang berumur 25 tahun keatas, dan 55% di antara populasi tersebut dapat digolongkan ke dalam kelompok orang-orang kaya (Atkinson,

1975:134). Walau suatu gambaran komparatif dari tahun 1950-1952 menunjukkan bahwa . terdapat kurang lebih 68% populasi yang termasuk ke dalam kelompok orang kaya, tetapi 1% dari 5% orang yang paling kaya (ke dalam kelompok ini termasuk orang-orang kaya yang memberikan hartanya sebagai warisan terhadap ahli waris sebelum kematiannya) telah mengalami perubahan besar di dalam jumlah nilai kekayaannya yang terjadi di antara tahun 1967-1969.

Masalah perindustrian dan akibatnya yang dirasakan oleh perekonomian secara keseluruhan, terutama yang menyangkut masalah perburuhan, telah ditunjukkan oleh semakin meningkatnya pengaruh dan kekuasaan serikat-serikat buruh (note: indikasi ini semakin terasa setelah perang dunia ke-II para pengusaha duduk bersama dengan para wakil buruh didalam komite produksi bersama yang disebut Trades Union Congress dimana cabangnya tersebar hampir disemua perusahaan industri, di Inggris. Trades Union Congress memegang peranan penting didalam merumuskan kebijaksanaan ekonomi negara. Para pemimpin organisasi tersebut kemudian ditunjuk menjadi anggota komisi yang bertanggungjawab terhadap perkembangan industri serta berada di bawah pengawasan para pemilik perusahaan.

Variasi dalam bidang lapangan kerja dan meningkatnya kemakmuran dapat kita perhatikan dalam sebuah ekspansi terhadap pasar konsumen remaja di dalam berbagai bentuk barang-barang konsumsi dan jasa, terutama pakaian, kaset dan berbagai produk lainnya, jelas merupakan akibat langsung dari situasi pasar yang cukup baik, didukung pula oleh pelayanan perusahaan yang baik dan tenaga kerja yang masih muda dan ini berakibat meningkatnya standar upah dan kesejahteraan di Inggris. Walaupun "*demand and Supply*" merupakan suatu proses sirkular, konsumen bukanlah merupakan satu-satunya faktor utama, tetapi pasang-surut perusahaan terletak pada kemampuan pengusaha untuk menguasai dan mengendalikan pasar, atau akan lebih baik lagi kalau mereka mampu menciptakan pasar; dimana seorang pengusaha harus mampu untuk "membujuk" konsumen agar dia merasa "perlu" dengan produk yang ditawarkannya. Pertumbuhan pesat dari penjualan barang-barang mebel dan, berbagai barang yang tahan lama lainnya (*durable consumer good*) telah berkembang

dengan pesatnya karena adanya sistem kredit. Walaupun adanya berbagai fluktuasi di dalam kegiatan perdagangan sebagai akibat dari berbagai perubahan dalam peraturan pemerintah mengenai sistem kredit, jumlah total kredit yang disalurkan kepada para konsumen terus menunjukkan kenaikan yang mengagumkan.

2. Industri dan Pendidikan

Menurut S.R. Parker, terdapat hubungan antara industri dan sistem pendidikan bersifat timbal-balik, serta memiliki pengaruh besar terhadap tenaga kerja yang telah terlatih atau calon tenaga kerja yang memiliki latar belakang dan tingkat pendidikan yang cukup memadai untuk mendapatkan suatu latihan, dipihak lain industri sendiri mempunyai suatu sub sistem "pendidikan" yang khas, termasuk kegiatan magang dan berbagai bentuk training. Terdapat pengaruh industri pendidikan yang nyata serta mudah di lihat adalah dari sektor pendidikan, yaitu adanya kecenderungan untuk menyusun dan menerapkan kurikulum serta materi pelajaran di sekolah maupun universitas supaya sesuai dengan kebutuhan industri. Ada yang disebut pembiasan: fungsi (*vocational bias*) pendidikan dimaksudkan agar tujuan pendidikan dapat mengarahkan siswanya untuk memiliki persiapan di dalam bekerja. Pihak industriawan atau pengusaha menghendaki suatu metode pendidikan yang memungkinkan lulusan sekolah atau perguruan tinggi menjadi tenaga kerja yang langsung siap pakai.

Sesungguhnya pendidikan teknik itu sangat heterogen, dan masing-masing mempunyai kurikulum yang saling beda. Selain sekolah teknik menengah terdapat juga lembaga pendidikan teknik, institut teknik, politeknik dan sebagainya. Dalam tahun terakhir ini jumlah lembaga-lembaga pendidikan teknik tersebut telah mengembangkan kurikulum dan sistem pendidikannya, sehingga bisa disejajarkan dengan sistem pendidikan di universitas, bahkan sekarang banyak diantara lembaga-lembaga tersebut yang telah mengubah dirinya menjadi universitas. Lembaga-lembaga pendidikan teknik pada umumnya lebih mengutamakan pendidikan teknis praktis ketimbang pendidikan teoritis. Pengaruh pendidikan terhadap perkembangan industri, pendidikan serta berbagai latihan keterampilan atau kejuruan yang ada di dalam perusahaan

merupakan refleksi atau perluasan dari tujuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalam "pendidikan yang akan disampaikan kepada masyarakat luas. Beberapa jenis sistem pendidikan tertentu" termasuk diantaranya sistem magang bersama dengan tenaga kerja terdidik telah memberikan pengaruh terhadap komposisi dan distribusi sumber-sumber tenaga kerja (*man power resources*) dan secara keseluruhan akan mengangsur dunia industri.

Semenjak abad pertengahan, sistem magang sudah dikenal baik dalam dunia perdagangan maupun industri. Sekarangpun sistem tersebut hampir tidak mengalami perubahan baik dalam arti maupun coraknya. Sistem magang memiliki sifat paternalistik, yang menggambarkan hubungan bapak dengan anaknya antara seorang mekanik berpengalaman dengan seorang pekerja-pemula. sekarang ini sistem magang sudah hampir hilang tetapi masih banyak perusahaan yang mempertahankannya. Seorang pekerja pemula biasanya harus melalui masa magang selama 4 sampai 5 tahun, atau sejak umur 15 atau 16 tahun. selama periode tersebut, si pekerja muda mendapatkan pendidikan dan latihan dan langsung mempraktekannya di lapangan. Dalam pendidikan tersebut tidak ada standar khusus, tes ataupun ujian. Juga tidak ada persyaratan khusus yang diperlukan untuk mengikutinya. Sebagian pengusaha memberikan pendidikan yang cukup baik bagi para pekerja pemula, sedangkan sebagian lagi kurang begitu memperhatikannya. Sebelum menerima calon pemula, beberapa perusahaan biasanya mengadakan tes daya adaptasi dan kecerdasan atau psychotest. Sekalipun sudah berusia lebih dari 30 tahun, penelitian Willaam (1957) mengenai sistem magang ternyata masih relevan dengan situasi dan kondisi sekarang. Seorang baru baru, sesungguhnya jarang mendapatkan pendidikan maupun pelatihan yang serius. Biasanya pengusaha lebih mempercayakan pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja ketangan pekerja itu sendiri karena dianggap memiliki keahlian, dimana penilaian terhadap instruktur tersebut biasanya didasarkan pada pengalaman lamanya bekerja. Pandangan Parker mengenai, "*Day-release*" dan "*Sandwich courses*". Setelah membahas tentang job training, termasuk sistem pendidikan magang, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang disebut "*day release*" dan

"sandwich". Kedua sistem pendidikan tersebut berfungsi mengatasi kekosongan yang ditinggalkan waktu job-training. "Day-Release" berarti bahwa seorang pekerja mula yang baru masuk mendapatkan hari bebas cari pekerjaannya, biasanya sehari dalam satu minggu kerja yang harus digantikan untuk mengikuti kursus pada berbagai jenis lembaga pendidikan teknik. Ada tiga tingkatan kursus yang dapat diikuti oleh seorang pekerja, yaitu: pertama kursus untuk menduduki jabatan profesional, kedua kursus untuk menjadi teknisi dan ketiga untuk menduduki jabatan sebagai tenaga mekanik. Lamanya kursus berbeda-beda. Untuk menjadi seorang teknisi diperlukan kursus antara tiga sampai lima tahun, sedangkan untuk menjadi seorang tenaga mekanik diperlukan kursus selama tujuh tahun dan untuk menjadi tenaga profesional diperlukan lebih dari tujuh tahun. Khusus untuk kandidat jabatan profesional diadakan kursus selama 2 x seminggu atau setiap Sabtu pagi. Begitu juga mengenai tenaga Kerja dan Pendidikan, sampai dengan masa Perang Dunia I, dalam dunia industri terdapat tiga macam kelompok kerja, yang semuanya berkaitan dengan berbagai tingkatan dalam perkembangan teknologinya. Ketiga macam kelompok itu ialah:

- a. *Unskilled manual* (tenaga kerja tidak terampil)
- b. *Skilled manual* (tenaga kerja terampil)
- c. Personal administrasi dan komersial.

Dengan diperkenalkannya mesin-mesin baru beserta teknologinya telah mengakibatkan kenaikan tajam dalam kecepatan mobilitas jabatan atau perpindahan posisi kerja, dan juga menimbulkan konsekuensi khusus yaitu perlunya pendidikan atau latihan bagi para pekerja. Terlalu mementingkan spesialisasi akan mengakibatkan seorang pekerja memiliki keahlian yang tinggi dalam satu pekerjaan; tetapi untuk mengerjakan pekerjaan lain, bahkan pekerjaan yang sama tetapi dengan peralatan dan teknologi baru, dia harus mengikuti pendidikan atau latihan lagi.

Menurut Parker, mengenai Sekolah dan pekerjaan, masa transisi dari "dunia sekolah" memasuki "dunia kerja" akan menimbulkan dua macam masalah yang akan dibahas dibawah ini, yaitu: "aspirasi dan harapan" calon pekerja yang baru saja menyelesaikan studinya berkaitan dengan dunia kerja yang akan dimasukinya, dan yang kedua ialah "proses pemilihan

pekerjaan". Melalui pendidikan dan pelatihan akan memberikan gambaran dan bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang pekerja. Di lembaga pendidikan para peserta didik mendapatkan informasi berbagai hal yang berhubungan apa yang akan mereka lakukan nanti ketika bekerja. Sekalipun demikian informasi dari pendidikan tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung sebab disamping pendidikan seorang pekerja memerlukan juga pelatihan-peralihan secara khusus untuk lebih mematangkan kemampuan dalam dunia kerjanya. Begitu juga keluarga dapat berperan sebagai sumber informasi tentang suatu pekerjaan serta mendorong serta membentuk motivasi untuk mencapai suatu prestasi. Selain itu berbagai media komunikasi massa dapat juga memberikan informasi langsung kepada masyarakat, baik berupa iklan tawaran kerja maupun berupa informasi tentang sesuatu pekerjaan yang meliputi posisi, sarana dan berbagai fasilitas lainnya yang diharapkan bisa diperoleh masyarakat yang berminat. Media massa yang cukup efektif memberikan informasi tersebut ialah surat kabar, televisi, radio dan juga film.

Sebagai gambaran untuk memasuki dunia kerja, biasanya pihak lembaga pendidikan memilih sekelompok peserta didiknya yang sudah senior untuk melakukan kunjungan ke perusahaan untuk mendapatkan pengetahuan praktis dari kegiatan kerja di perusahaan yang dikunjunginya. Hal tersebut dapat memberikan gambaran yang cukup baik bagi para peserta didik mengenai ruang lingkup pekerjaan yang akan dimasukinya secara signifikan dapat berpengaruh dalam proses pemilihan pekerjaan yang dilakukannya. Biasanya pihak perusahaan akan menjelaskan apa-apa yang akan dan harus mereka kerjakan jika mereka bekerja di perusahaan tersebut; tetapi tentunya pihak perusahaan tidak harus berharap bahwa mereka pasti akan menjadi pekerja di perusahaan tersebut. Dalam teori-teori yang terkenal tentang "masa memasuki dunia kerja" adalah teori Ginzberg dan Super. Kedua teori itu menyatakan bahwa kita harus menganggap masuknya seorang dalam dunia kerja sebagai suatu proses. Tapi kedua teori tersebut memiliki juga perbedaan, dimana Ginzberg lebih menekankan pertumbuhan kesadaran individu terhadap interest, dan kemampuannya, sedangkan Super lebih

menekankan peranan lingkungan sosial individu di dalam membentuk struktur konsep individu terhadap interest, kemampuan dan kapasitasnya Roberts (1975) menyatakan bahwa persamaan dan perbedaan di atas yang pada dasarnya bertumpuk pada proses yang dialami seseorang dalam memilih pekerjaan dengan melalui serangkain tahapan yang dapat diidentifikasi, sebetulnya tidak memadai untuk menerangkan sikap seseorang dalam memilih suatu pekerjaan. Sebagai pengganti dari teori tersebut dia mengusulkan suatu teori lain dengan "*Oportunity Structure*" sebagai konsep pedomannya. Dia menyatakan bahwa karir dapat dianggap sebagai suatu perkembangan pola-pola yang diatur oleh *oportunity structure*, untuk mengekspose seseorang pertama kali dengan melalui pendidikan dan kemudian diikuti oleh prestasinya, dalam pekerjaan. Sebaliknya ambisi individual dapat dinyatakan sebagai refleksi dari pengaruh struktur terhadap diri seseorang, yang dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap prestasi kerja dan lingkungan pekerjaan.

3. Industri dan Keluarga

Menurut S.R. Parker, Interaksi antara industri dan keluarga terjadi di dalam dua tingkatan yang pertama ialah interaksi antara organisasi industri dan struktur keluarga sebagai sistem keseluruhan, dan yang kedua, adalah dalam kaitannya dengan tingkat peranan individual yakni interaksi antara pekerjaan dengan lingkungan keluarga dari setiap individu. Pertama, kita harus mempertimbangkan pengaruh dari berbagai jenis organisasi industri modern terhadap pola-pola kehidupan keluarga dan yang kedua, memperhitungkan pengaruh peranan pekerjaan terhadap peranan keluarga. Selanjutnya kita harus meninjau pengaruh berbagai jeniskeluarga terhadap pembentukan pola tingkah laku dan pola organisasi industri. sekaligus memperhatikan bagaimana keterkaitan individu terhadap kehidupan keluarga dalam mempengaruhi penampilan pekerjaannya.

Pengaruh industri terhadap kehidupan keluarga mungkin bisa bersifat langsung. Dalam bentuknya yang langsung, lingkungan dan sikap kerja dari suatu jenis pekerjaan tertentu akan mempengaruhi lingkungan dan sikap hidup dari suatu keluarga. Bila pengaruhnya yang bersifat tidak bersifat

langsung, asosiasi antara pekerjaan dan keluarga dilakukan melalui media *social class membership* (keanggotaan dalam kelas sosial), hal itu berarti bahwa seseorang yang mendapatkan suatu pekerjaan akan mendapatkan tingkat sosial tertentu (*prestise*) yang akan menunjukkan pola-pola sikap serta tingkah laku tertentu. Kenyataannya bahwa kebanyakan studi empiris yang menyelidiki interaksi antara pekerjaan dengan kehidupan keluarga sering berpijak pada data "kelas sosial" semua keluarga yang menjadi obyek penelitian, sehingga dalam membahas pengaruh industri terhadap berbagai aspek kehidupan keluarga, kita harus memperhatikan "kelas sosial" sebagai suatu faktor utama.

4. Industri dan Suami-Istri

Dalam dunia Industri, baik secara langsung maupun tidak langsung akan ikut membentuk peranan yang dimainkan oleh pihak suami maupun istri di dalam suatu keluarga dan juga akan ikut membentuk arah dan corak hubungan antara suami dan istri berkenaan dengan peranannya di dalam keluarga. Umumnya, lingkungan keluarga dan lingkungan kerja akan berkembang menuju arah yang berbeda, terutama dikarenakan oleh adanya spesialisasi pekerjaan dalam peranannya di dalam masyarakat. Selain itu, jika kita melihat lebih dekat lagi terhadap hubungan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, ternyata tingkat integrasi pekerjaan dan kehidupan keluarga pada berbagai tingkat sosioekonomi yang berbeda akan menunjukkan banyak perbedaan pula.

Peran suami dalam keluarga golongan atas biasanya hanya sedikit mempunyai hubungan dengan peranannya dalam keluarga, sehingga sedikit kemungkinan ia akan menerapkan wibawa dan wewenang di tempat pekerjaannya ke dalam lingkungan keluarga. Pekerjaannya cenderung menyita waktu dan tenaganya, sehingga kurang mencurahkan perhatian terhadap keluarga. Dalam keluarga golongan menengah, keadaan keuangan dan status keluarga banyak tergantung pada pekerjaan sang suami jika suami bekerja di dalam pekerjaan yang secara teknis cukup kompleks dan sulit bisa dimengerti, dalam hal membantu atau terlibat langsung dalam pekerjaan suami. Bagi kelompok masyarakat ini tingkat pendapatan mereka relatif rendah dan sulit mendapatkan status dalam masyarakat pada umumnya. Dalam suatu

masyarakat, dimana secara tradisional yang bekerja itu hanyalah suami, akan terlihat adanya pemisahan antara pekerjaan dengan keluarga. Tetapi di dalam kelompok masyarakat lain, di mana istri juga ikut mencari nafkah, pendapatan tambahan yang didapatkan sering digunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang lebih baik, bahkan cenderung bersifat mewah. Di dalam keluarga seperti ini peranan istri mirip dengan peranan suami dalam keluarga kelas menengah.

Pengaruh lainnya dari faktor-faktor pekerjaan terhadap peranan suami-istri ialah terhadap keakraban antara suami dan istri. Suami harus dapat mencari jalan untuk menyesuaikan tuntutan pekerjaan dengan tuntutan keluarganya. Edgell (1970) telah mencoba melakukan penelitian terhadap sejumlah keluarga kelas menengah berkaitan dengan pengaruh pekerjaan terhadap hubungan suami istri.

5. Industri dan Keluarga

Berbagai pola hubungan antar keluarga selalu dipengaruhi oleh pekerjaan yang dimiliki oleh keluarga-keluarga tersebut: baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bott (1977) telah melakukan suatu studi yang intensif terhadap sejumlah kecil keluarga perkotaan di Inggris. Dia menyatakan bahwa ada suatu keterikatan di antara keluarga yang mungkin akan menjadi lebih kuat apabila ada suatu kerjasama dalam suatu pekerjaan di antara mereka. Berkaitan dengan istilah kelas dalam masyarakat, keluarga dengan pola pergaulan terbuka mungkin bersedia bergaul dengan kelas buruh tetapi tidak semua keluarga kelas pekerja memiliki pola pergaulan terbuka. Kekuatan suatu keluarga dalam hubungannya dengan tetangga tergantung secara langsung kepada jabatan suaminya di tempat pekerjaannya, yang akan memberikan suatu status kepada keluarganya secara keseluruhan. Jika seseorang bertetangga dengan salah seorang koleganya, hubungan yang terjadi di antara keluarga mereka akan semakin erat, tetapi jika koleganya itu tidak bertetangga dengannya, pola pergaulannya hanya akan terjadi di antara kedua suami saja.

6. Industri dan Sosialisasi

Posisi sosial ayah dalam lingkungan sosial masyarakat menimbulkan pengaruh besar terhadap proses sosialisasi

seorang anak (Schneider, 1969, hal.499-502). Pada orang tua di setiap tingkatan sosial terdapat suatu kecenderungan dimana posisi sosial membentuk suatu pola peran tertentu bagi anak-anaknya. Pada keluarga golongan atas, perawatan dan pendidikan anak sering diserahkan kepada pembantu rumah tangga. Dalam keluarga seperti ini proses sosialisasi seorang anak diarahkan melalui norma-norma dan nilai yang hanya berlaku di kalangan keluarga saja. Beda dengan anak-anak dari keluarga golongan menengah, dimana pihak orang tua memiliki banyak waktu luang untuk memperhatikan perkembangan dan pendidikan anaknya. Proses sosialisasi dalam keluarga golongan menengah ditujukan untuk mendidik agar anak mampu bersifat "mandiri", dan hal itu akan lebih banyak tergantung kepada kemampuan si anak untuk bersaing dengan rekannya dalam mencapai prestasi di sekolah dan selanjutnya dalam pekerjaan. Akan tetapi seorang yang berasal dari keluarga kelas pekerja, jarang mampu meningkatkan posisi sosial, justru mereka dipaksa untuk bersikap patuh dan tidak banyak membuat kesulitan bagi masyarakat sekelilingnya. banyak bukti yang memajukan bahwa dalam hubungan antara industri dan keluarga, pihak industri memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keluarga dibanding sebaliknya. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus mengabaikan pengaruh keluarga terhadap industri. Sebagai suatu contoh yang menunjukkan betapa pentingnya peranan keluarga terhadap industri maupun dalam suatu perubahan sosial yang tersembunyi, Goode (1964) telah mencoba membandingkan usaha yang dilakukan oleh Jepang dan Cina untuk melakukan industrialisasi pada akhir abad 19 dan awal abad 20). dimulai dengan kondisi sosial dan ekonomi yang relatif sama dan homogen, Jepang telah melangkah jauh lebih maju dibandingkan dengan Cina. Perbedaan pola dan sistem kekeluargaan antara kedua negara tersebut telah menimbulkan perbedaan dalam kecepatan proses industrialisasi. Sistem pewarisan di Jepang memudahkan pelaksanaan akumulasi kekayaan, dan nepotisme hanya sedikit memberikan hambatan dibandingkan dengan yang terjadi di Cina. Terdapat berbagai tipe hubungan antara keluarga dan pekerjaan

Sebagai permulaan kita mengambil suatu postulat dari Raports (1965) yaitu: pekerjaan dan peran keluarga cenderung bersifat isomorfik (saling-pengaruh-mempengaruhi satu sama lain dengan satu cara tertentu untuk membentuk suatu pola struktur yang sama), atau heteromorfik (membentuk suatu struktur yang masing-masing berbeda). Dari berbagai studi dan observasi yang telah disebutkan, (yaitu studi mengenai keluarga dimana istri ikut bekerjasama dengan suaminya di dalam pekerjaannya, studi tentang keluarga dimana rumah terdapat tinggal digunakan oleh ayah sebagai kantor atau toko, studi mengenai keluarga petani dan sedikit pembahasan mengenai keluarga Jepang modern), ternyata semua studi tersebut menunjukkan adanya isomorfisme antara pekerjaan dengan kehidupan keluarga. Jika isomorfisme menggambarkan suatu hubungan yang bersifat positif antara pekerjaan dan keluarga, ada juga suatu hubungan lain yang disebut *minimal relationship* dan *negative relationship* antara keluarga dengan pekerjaan yang membentuk suatu pola *heteromorfisme*. *Minimal relationship* atau *neutral relationship* di antara keluarga dan pekerjaan terjadi jika di dalam keluarga peranan ayah dalam pekerjaannya tidak berhubungan dengan usaha keluarganya untuk membentuk gaya hidup tertentu. Pekerjaan dengan waktu jam kerja yang teratur; tanpa adanya suatu efek tertentu baik secara fisik maupun psikologis terhadap sipekerja, dan tidak menyita waktu luangnya adalah suatu kasus yang termasuk ke dalam *neutral relationship*. Gambaran mengenai ketiga pola hubungan antara pekerjaan dengan lingkungan keluarga, yaitu ekstensi, netralitas, dan oposisi.

7. Industri dan Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja

Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan jumlah pekerja wanita yang sudah menikah mungkin adalah kesempatan, kapasitas dan motivasi. Berkaitan dengan "kesempatan" terdapat lima sub faktor, yakni :

- a. Kekurangan tenaga kerja. Selama beberapa waktu pasca erang dunia ke II, terdapat kekurangan tenaga kerja dalam jumlah besar dan dipersulit lagi. oleh lamanya masa pendidikan untuk anak-anak muda serta meningkatnya jumlah tenaga kerja asing menghadapi masa pensiun. Menyadari hal ini, perusahaan terpaksa memberikan

kesempatan luas bagi para wanita yang sudah menikah untuk bekerja.

- b. Perubahan di dalam struktur pekerjaan. Para pekerja bidang administrasi serta bidang kesejahteraan untuk pelayanan. Meningkatnya perdagangan barang-barang konsumsi, dapat memberi pengaruh besar terhadap sistem perdagangan eceran yang sebagian besar pekerjaannya yang didominasi oleh kaum wanita.
- c. Berubahnya pandangan masyarakat terhadap wanita yang bekerja. Kehadiran tenaga kerja wanita yang semakin membesar di perusahaan, termasuk wanita yang sudah menikah, dan adanya gerakan emansipasi telah berhasil mendobrak nilai-nilai tradisional yang mencela kehadiran wanita dalam dunia industri dan membatasi gerak-gerik wanita sebatas rumahnya. Tetapi tradisi ini masih berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan kasar, misalnya pekerjaan di sektor pertambangan.
- d. Hilangnya diskriminasi. Pada tahun 1975 diberlakukan undang-undang yang melarang pihak perusahaan melakukan diskriminasi terhadap pekerja wanita termasuk wanita yang sudah menikah.
- e. Perubahan dalam industri. Untuk lebih menarik kaum wanita yang sudah menikah, beberapa perusahaan telah membentuk suatu *special shifts* (regu kerja khusus). Misalnya, jam kerja wanita yang sudah menikah ditentukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka. Selain itu diperkenalkan juga mesin-mesin baru yang lebih ringan dan lebih mudah ditangani.

8. Problema Karir Ganda dalam Keluarga

Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah dan istri yang mengurus rumah tangga. Tetapi kini, dengan tumbuhnya kesempatan bagi wanita bersuami untuk bekerja, pola kekeluargaan segera berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir. Dualisme karir terjadi bila suami maupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersama pula (Rapoport and Rapoport), 1976, hal 198). Di dalam hubungannya dengan posisi masing-masing, setiap pasangan suami istri memiliki cara yang berbeda di dalam mengatur peranannya dalam

pekerjaan dan rumahtangga. Wanita yang bekerja secara *part timer* umumnya menganggap bahwa pekerjaan hanyalah sekedar hobbi dan hanya menduduki prioritas kedua di bawah kepentingan keluarga. Tetapi dalam keluarga dualisme karir egalitarian, suami-istri bekerja tidak hanya sekedar mencari nafkah tetapi juga dalam persaingan untuk mendapatkan posisi yang sama dalam pengambilan keputusan serta berbagai aktivitas dalam keluarga (Rapoport 1976, hal 286-296). Di dalam hubungan ini terdapat berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. *Over-load* (beban berlebih-lebihan). Kedua suami-istri dibebani terlalu banyak tanggung jawab. Pembantu rumahtangga bukanlah merupakan suatu jawaban, sebab kehadirannya malahan sering menimbulkan suatu ketegangan baru dalam kehidupan keluarga.
2. Tidak adanya sanksi lingkungan. Mungkin seorang istri masuk ke dalam suatu pekerjaan dimana istrinya tidak diterima secara keseluruhan, atau menjadi subyek kritik, karena mengabaikan anak-anaknya.
3. Identitas pribadi dan harga diri. Baik suami maupun istri harus mampu mengatasi kritik-kritik yang didasarkan pada tradisi pemisahan peranan berdasarkan jenis kelamin.
4. Dilema hubungan sosial. Hubungan antara keluarga dengan tetangga menjadi renggang, karena baik suami maupun istri masing-masing sibuk dengan pekerjaan di luar rumahnya.
5. Konflik peran ganda. Terdapat konflik baik bagi suami maupun istri diantara kepentingan perusahaan.

B. Stratifikasi Sosial Masyarakat Industri

Stratifikasi sosial masyarakat industri tentu akan mengacu pada pembagian anggota masyarakat pada tingkatan atau strata yang berkaitan dengan sikap dan karakteristik masing-masing anggota atau kelompok (schneider, 1069:148). Stratifikasi bukanlah suatu sub-sistem dalam masyarakat, lain halnya dengan ekonomi, pendidikan atau keluarga yang merupakan sub-sistem masyarakat. Stratifikasi adalah suatu aspek umum dari struktur dalam sistem sosial yang kompleks. Dalam bagian ini akan dibahas masalah hubungan antara

stratifikasi sosial dalam berbagai bentuk di dalam industri dan masyarakat luas. Stratifikasi sosial dalam masyarakat industri modern, memiliki dua bentuk utama, yaitu: kelas dan status. Bentuk-bentuk lain dari stratifikasi sosial seperti kekayaan dan kasta tidak perlu di bahas dalam buku ini. Ada banyak literatur yang kontroversial yang membahas masalah yang berhubungan dengan status dan kelas sosial (Bottomore, 1965). "Kelas" umumnya digunakan untuk menunjukkan pembagian di dalam masyarakat yang didasarkan atas posisi ekonomi dalam masyarakat, tanpa memperhatikan apakah mereka menyadari posisinya itu atau tidak. "Status sosial" tidak menggambarkan pembagian posisi dalam masyarakat, tetapi menunjukkan tingkat posisi seseorang atau kelompok yang ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya di dalam masyarakat. Secara historis, konsep kelas merupakan bagian terpenting dalam teori Karl Marx tentang masyarakat, yang menekankan perlunya perjuangan kelas, yaitu perjuangan si miskin melawan si kaya dalam usaha untuk menguasai sumber-sumber produksi. Sementara itu Marx Weber lebih menunjukkan perhatiannya terhadap tipe lain dari stratifikasi yang berasal dari pengakuan terhadap suatu status memungkinkan mematahkan struktur kelas.

Sedangkan kaitannya antara industri dengan stratifikasi berdasarkan status semakin lama akan semakin kabur, terutama disebabkan semakin luasnya ruang lingkup hal-hal yang terkait dengan istilah status. Seandainya status diukur dengan suatu nilai yang spesifik, baik yang berdampak positif, atau negatif, yaitu suatu nilai kehormatan diri, ia bisa dinyatakan sebagai suatu bentuk economic power dan non-economic power yang bentuknya bisa berupa kemampuan membeli berbagai jenis barang konsumtif, tingkat pendidikan, latar belakang keluarga atau keturunan dan sebagainya. Berkaitan dengan pengaruh industri terhadap keluarga, pengaruh industri terhadap sistem stratifikasi mungkin bisa bersifat langsung melalui kekuatan ekonomi serta posisi dan wewenang di dalam perusahaan, ataupun bisa juga bersifat tidak langsung, yaitu melalui status dalam perusahaan yang ditransmisikan menjadi status dalam masyarakat, termasuk melalui rantai antara situasi pasar dan gaya hidup.

Mungkin satu-satunya penelitian terbaik yang pernah dilakukan di Inggris mengenai tingkat sosial berkaitan dengan pekerjaan adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh Hall dan Jones pada tahun 1950. Mereka telah mewawancarai sekitar 1.400 orang dari 30 jenis pekerjaan dengan berbagai tingkatan. Mereka menyatakan pandangan para responden mengenai hal-hal bersifat umum. Mereka menyatakan bahwa tidak ada perbedaan ataupun pengistimewaan dalam penentuan tingkat pekerjaan yang diseleksi. Tetapi ternyata ada perbedaan dalam menentukan "rata-rata" dalam "skala pekerjaan", dimana kelihatannya rata-ratanya lebih besar untuk tingkat pekerjaan pada daerah sentral daripada daerah atas dan bawah dari skala "pekerjaan". Juga terdapat suatu kecenderungan untuk menetapkan status pekerjaan yang diseleksi sebagai variabel status pekerjaan responden yang nyatanya lebih rendah. Atau lebih jelasnya, menentukan status pekerjaan responden dengan mengimajinasikan status pekerjaan yang diseleksi sebagai patokannya.

Beberapa kritik terhadap Penelitian-penelitian yang telah dilakukan, berbagai penelitian terhadap status jabatan atau pekerjaan telah banyak dikritik oleh banyak orang, karena para peneliti sebenarnya mencoba membentuk berbagai perbedaan yang secara normal sebenarnya tidak ada dalam masyarakat. Gagasan yang tersembunyi dibelakang penelitian tersebut ialah bahwa kebanyakan status pekerjaan bersifat hirarkis dan dibuatkan dalam suatu skala status: Reiss pada tahun 1961 menegaskan bahwa "skala status pekerjaan dibuat hanyalah berdasarkan penaksiran yang ternyata tidak menghasilkan suatu skala yang unidimensional untuk semua pekerjaan, dan sesungguhnya status itu merupakan suatu gejala multidimensional dan demikian pula halnya dengan indikator dari status bersifat multi-dimensional".

Suatu alasan yang menyebabkan banyaknya kritik terhadap konsep status pekerjaan ialah bahwa dalam konsep tersebut, status dijadikan sebagai indikator tunggal, dan cara pengklasifikasian bersifat vertikal. Pada tahun 1959; Morris dan Murphy telah menggunakan istilah "situs" untuk mengklasifikasikan pekerjaan secara horisontal, dimana pekerjaan diklasifikasikan berdasarkan fungsinya.

Penggunaan dimensi situs memungkinkan kita memperkirakan efek relatif dari suatu pekerjaan terhadap sikap dan tingkah laku seseorang. Perbedaan di dalam penentuan suatu status boleh saja disebabkan adanya analisa terhadap sumber-sumber status yang berbeda. Misalnya, suatu pekerjaan dapat memberikan suatu status dikarenakan imbalan yang diberikannya (baik secara ekonomis ataupun psikologis), atau karena prestise, kekuasaan dan pentingnya fungsi pekerjaan tersebut dalam masyarakat (Pellegrin dan Bates, 1959). Ke empat sumber status tersebut mungkin memiliki tingkat yang sama, mungkin juga tidak, hal ini tergantung pada pandangan masyarakat terhadap pekerjaannya itu sendiri. Jika seseorang memiliki status yang tinggi dalam suatu pekerjaan, misalnya dikarenakan imbalannya yang tinggi, bisa saja merasa rendah diri bila pekerjaan tersebut memiliki nilai prestise yang rendah. Hal semacam itu menyebabkan "suatu tekanan terhadap persamaan dari atribut-atribut status".

Perusahaan-perusahaan industri, baik secara kolektif maupun individual, memiliki suatu sistem stratifikasi yang memiliki aspek-aspek internal dan eksternal. Secara internal, pekerjaan bisa dibagi berdasarkan fungsinya didalam perusahaan. Secara eksternal, kita harus meninjau stratifikasi status didalam masyarakat, dimana seseorang sering memiliki hak-hak istimewa berdasarkan jabatannya di tempat ia bekerja. Seperti halnya dalam masyarakat umum yang mengenal kelas-kelas sosial atau tingkat status, didalam perusahaan industri pun terdapat hirarki kekuasaan yang pada hakikatnya berkaitan dengan tingkat status sipemegang kekuasaan tersebut. Berbagai peranan dalam perusahaan diwujudkan dalam struktur jabatan dalam perusahaan, dimana kepala eksekutif berada pada struktur paling atas dan pekerja biasa berada dalam struktur paling bawah. Selanjutnya, perbedaan dalam tingkat struktur jabatan berkaitan dengan perbedaan dalam kondisi kerja yang didapatkan dalam masing-masing tingkat. Sebagai contoh, dari hasil survai nasional yang dilakukan di Inggris, diketahui bahwa pekerjaan biasa mendapat tekanan yang keras untuk terus hadir dalam pekerjaannya. Jika mereka mangkir maka gaji mereka akan dipotong. Tetapi jika pihak manajer mangkir maka potongan

gaji yang dilakukan sangat sedikit, padahal untuk mengoperasikan pekerjaan secara normal minimal diperlukan kehadiran 98% pekerja biasa dan hanya memerlukan minimal kehadiran 6% manager. (Field, 1974, hal 33). Dalam pemberian uang pensiunpun terdapat juga perbedaan. Sebagai contoh, para manajer mendapatkan uang pensiun sebanyak tiga kali lipat uang pensiun para pekerja biasa (Westergaard and Resler, 1976, hal 90).

Teori stratifikasi dan teori kelas sosial telah mengalami cukup banyak kemajuan (Mac Kenzie, hal 176). Kita telah mengenal bagaimana ketidaksamaan dalam bidang ekonomi diciptakan, ditegakkan dan diubah, tetapi teori tentang perbedaan-perbedaan nilai, ideologi dan pola tingkah laku antar kelas sedikit sekali dikembangkan. Sumbangan pikiran terhadap teori stratifikasi Inggris telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan teori perbedaan antar kelas. Beberapa ahli sosiologi Inggris telah memusatkan perhatiannya terhadap issue-issue konkrit mengenai perbedaan kelas ini, yaitu tentang "melimpahnya jumlah kelas pekerja" dan korelasi antar berbagai tipe situasi kelas pekerja yang berbeda-beda.

Dua orang sosiolog bernama Davis dan Moore pada tahun 1945 mengemukakan teorinya tentang stratifikasi. Mereka mengatakan bahwa "ada suatu kebutuhan universal untuk membentuk suatu stratifikasi dalam masyarakat". Stratifikasi itu akan muncul disebabkan oleh perbedaan yang kemudian menimbulkan perbedaan posisi yang selanjutnya menimbulkan perbedaan tingkat fungsional dalam masyarakat. Di lain pihak, orang-orang yang berbakat dan berpendidikan relatif sedikit, sehingga masyarakat terpaksa menawarkan posisi yang lebih tinggi kepada orang-orang yang memiliki bakat dan kemampuan yang dibutuhkan agar masyarakat tersebut mampu mempertahankan eksistensinya. Dalam tahun 1948, Davis melakukan modifikasi terhadap teori-teori itu dengan menambahkan bahwa mobilitas orang-orang yang lebih berbakat dan berkemampuan lebih tinggi sering dihambat oleh latar belakang status keluarganya. Jadi kesimpulannya stratifikasi adalah suatu hal yang tidak terhindarkan.

Huaco mencoba mengabaikan teori Davis Moore dengan mengatakan bahwa teori tersebut tidak mampu menjawab berbagai kritikan yang dilancarkan terhadapnya. Dia yakin bahwa postulat tentang "perbedaan fungsional" itu telah gagal menerangkan terjadinya stratifikasi, sebab tidak ada bukti bahwa perbedaan posisi akan menyebabkan perbedaan tingkat sumbangan untuk mempertahankan eksistensi masyarakat. Juga asumsi yang mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi akan lebih mendorong terjadinya persaingan untuk mendapatkan prestasi tidak bisa dipertahankan kebenarannya. Maka selanjutnya Huaco menerangkan teori stratifikasi berdasarkan pada tiga postulat, yaitu :

- a. Imbalan yang tidak sarna yang dikaitkan dengan perbedaan posisi adalah penyebab mobilitas individu untuk mendapatkan posisi tertentu.
- b. Eksistensi dan operasi keluarga adalah penyebab timbulnya status.
- c. Terbatasnya tenaga-tenaga bermutu menyebabkan timbulnya stratifikasi.

Sampai saat sekarang para ahli teori social action belum mengembangkan suatu teori tentang stratifikasi, walaupun sesungguhnya tidak sulit bagi mereka untuk berbuat demikian. Pembagian masyarakat kedalam beberapa strata merupakan suatu problematika. Strata didalam masyarakat maupun industri tidak berada di luar atau terpisah dari faktor situasi dalam masyarakat. Stratifikasi dalam masyarakat terletak pada mayoritas anggotanya yang melegalisasi perbedaan di dalam wewenang atas kekuasaan pada setiap stratanya. Posisi puncak pada strata tertinggi seperti manajer, pemimpin dan sebagainya, tidak mungkin ada tanpa dukungan dari mayoritas strata paling bawah atau tenaga pelaksana, bawahan dan sebagainya.

C. Industri dan Politik

Dalam arti luas, industri yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi, perusahaan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya telah sangat mempengaruhi masyarakat. Pengaruh tersebut bisa berupa nilai-nilai, pengaruh fisik terhadap

masyarakat dan usaha industrial interest group untuk mempengaruhi masyarakat.

Industri memberi input kepada masyarakat sehingga membentuk sikap dan tingkahlaku yang tercermin dalam sikap dalam bekerja. Weber mengatakan bahwa dengan adanya teknologi baru, diperlukan suatu nilai yang akan mengembangkan masyarakat menjadi masyarakat kapitalis tradisional; demikian pula jika hendak membentuk masyarakat kapitalis modern, diperlukan suatu nilai-nilai tertentu. Suatu cara yang lebih teoritis untuk pengaruh timbal-balik antara industri dan masyarakat ialah dengan cara mengidentifikasikan jenis-jenis hubungan antara industri dan masyarakat. Walaupun ada pemisahan economic interest groups dalam industri, seperti dalam bentuk-bentuk perdagangan, industri, pertanian, keuangan dan organisasi buruh, dalam beberapa hal kelompok tersebut dapat dianggap sebagai suatu interest group yang menyatu yang berinteraksi dengan masyarakat. Form dan Miller pada tahun sejak 1960 mengatakan bahwa ada lima jenis interaksi antara interest group tersebut dengan masyarakat yaitu:

1. *Business-dictated.*

Pihak perusahaan menentukan jam kerja karyawannya, tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap kehidupan rumah tangga, dan para karyawan harus menyesuaikan kehidupan keluarga mereka dengan kegiatan industri (ini mungkin terjadi di dalam suatu perusahaan dimana buruh tidak terorganisir, atau walaupun ada organisasi buruh, sangat lemah).

2. *Business-dominated.* Sama seperti di atas, akan tetapi sudah ada aturan-aturan kerja yang lebih lanjut, hanya ia masih ditentukan oleh pihak manajemen. Pihak buruh hanya mempunyai hak suara yang kecil (ini terjadi jika pihak perusahaan cukup kuat dengan organisasi buruh yang agak kuat tetapi dengan kelebihan penawaran tenaga kerja).

3. *Labour-mediated.*

Pihak buruh melalui organisasi buruh, mencoba ikut ambil bagian dalam menentukan jam kerja. Maka mulai terbentuk kerjasama antara pihak buruh dan manajemen dimana organisasi buruh akan kuat dan industri terhantung kepada tenaga kerja ahli.

4. *Equilibrium*

Organisasi buruh cukup kuat begiru juga pengaruh masyarakat. Pihak manajemen dalam membuat keputusan harus memperhitungkan semua akibatnya terhadap masyarakat sekitarnya.

5. *Family-mediated*. Dalam interaksi macatn ini nilai-nilai keluarga cukup dominan (keluarga pemilik perusahaan, *religitis* atau *co-operative communities*).

Ke lima jenis interaksi dan masyarakat tersebut, dalam kenyataannya di Amerika sudah tidak berlaku, dan di Inggris sendiri, memerlukan dimodifikasi teori. Sebagai contohnya, pola business-dictated sudah sulit ditemukan di Inggris, kecuali dalam beberapa jenis perusahaan dimana buruh mempunyai motivasi mendapatkan upah yang sangat tinggi, dan perusahaan bersedia memenuhinya.

Ada teori lain mengenai interaksi antara industri-masyarakat, dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu :

- a) *Structural functional*, yang meliputi penyebaran industri ke dalam berbagai sub sistem masyarakat lainnya.
- b) *Compensation*, dimana industri yang dianggap sebagai sumber sosiabilitas tidak mungkin ada di dalam masyarakat lokal.
- c) *Welfare* (kesejahteraan), suatu pendekatan terhadap peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat dimana pihak industri mengambil bagian sebagai partner masyarakat.
- d) *Power*, industri menjadi sumber kekuatan yang mempengaruhi masyarakat.

Industri bekerja di dalam suatu lingkungan sosial dan memiliki hubungan dengan kekuatan yang berada dalam lingkungan tersebut. Berbagai bentuk pengaruh balik yang terjadi antara industri dan kehidupan politik dibagi dalam dua jenis, yaitu: pertama, pengaruh kelompok terorganisir, dan kedua pengaruh peranan individu. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah, wakil-wakil industri interest akan bergabung ke dalam suatu organisasi "*pressure group*" dan pada saar yang bersamaan personal-personal pihak industri sendiri sering ikut langsung mengang politik dengan tujuan memajukan kepentingan ekonomi mereka.

Kemampuan pihak perusahaan untuk mempengaruhi kebijaksanaan politik pemerintah dengan melakukan partisipasi langsung di dalam pemerintahan adalah suatu aspek kontrol dari jalinan kelompok elite dalam industri dan dalam pemerintahan. Bekas-bekas menteri, baik yang tadinya duduk dalam pemerintahan Partai Buruh, maupun Partai Konservatif, sering diundang untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam perusahaan. Hal tersebut sangat membantu pihak perusahaan dalam mempengaruhi pemerintahan karena biasanya mereka memiliki relasi yang cukup banyak dalam pemerintahan. Peranan pemerintah di dalam bidang industri meliputi pengontrol, pengatur, promotor, pengusaha dan perencana (Grove, 1962). Cara-cara langsung dari pemerintah untuk mengontrol industri ialah melalui kebijaksanaan anggaran, pajak, kontrol jual-beli, pengontrolan terhadap modal publik dan kontrol terhadap distribusi produk maupun penyebaran industri.

Sebagai pengusaha pemerintah secara langsung berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui 4 (empat) cara yaitu :

- a) Pemerintah sebagai pembeli terbesar dari barang-barang dan jasa untuk menjalankan roda pemerintahannya.
- b) Pemerintah sebagai majikan; kurang lebih 1 juta orang penduduk Inggris bekerja pada pemerintah, dari seluruh pekerja di Inggris yang berjumlah 24 juta orang
- c) Pemerintah memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis dengan melalui berbagai lembaga keuangan yang dimilikinya, misalkan bank, tetapi tidak ikut langsung dalam kegiatan manajemennya.
- d) Pemerintah sebagai pengusaha langsung dengan memproduksi barang-barang dan menjualnya secara terbatas untuk kepentingan sendiri.

Terakhir sebagai perencana, pemerintah memperluas peranannya sebagai pengontrol dengan mengarahkan dan membimbing kegiatan ekonomi dengan cara melakukan desentralisasi. Kesulitan ekonomi, memperbesar peranan pemerintah. di dalam perencanaan aktivitas dan pengembangan industri. Sejumlah penelitian menemukan bahwa ukuran perusahaan dan tingkat pengetahuan majikan tentang pribadi para pekerjanya merupakan faktor yang

mempengaruhi sikap dan tingkahlaku politik para pekerjanya. Nordlinger (1967) menyatakan bahwa walaupun suatu perusahaan besar cenderung ke arah kiri (Partai Konservatif), tidak berarti bahwa para pekerjanya akan memiliki kecenderungan yang sama, karena biasanya hubungan antara pekerja dan majikan tidak begitu akrab. Ingham (1969) membuat suatu kesimpulan sama dengan Nordlinger. Dia melakukan penelitiannya terhadap para pekerja Bradford, dan hasil penelitiannya diungkapkan sebagai berikut : "Suatu kekuatan buruh yang berorientasi kiri akanmendorongnya mengarah pada intensifikasi nilai yang akan menyebabkan peranan dan aktivitas masing pihak terlihat secara lebih jelas".

D. Organisasi Di era Industri

Organisasi adalah suatu karakteristik penting dalam masyarakat industri dan perkotaan. Organisasi sosial adalah suatu susunan yang sangat luas dari berbagai bentuk hubungan dan proses, jadi struktur sosial berada dalam semua tingkat struktur sosial. Menurut Blau dan Scoot (1963) telah mengajukan suatu pendapat bahwa organisasi adalah suatu kumpulan individu yang batasannya jelas, aturan yang bersifat normatif, jenjang kekuasaan sistem komunikasi dan sistem keanggotaan yang terorganisasi. Fox berpendapat bahwa minimal organisasi terdiri dari sistem peranan sanksi dan komunikasi dan intisari dari organisasi adalah keteraturan, standarisasi dan perilaku yang berulang-ulang.

Tantangan terhadap organisasi muncul dari dua sumber, pertama dari para penulis yang mengira bahwa suatu bahaya besar akibat kelalaian terhadap kontrol, power dan konflik dalam organisasi. Tantangan kedua terhadap pendekatan sistem strukturalis ini berasal dari suatu tinjauan interaksionis yaitu apakah organisasi itu nyata atau apakah ia adalah suatu yang berinteraksi secara bersama-sama lebih daripada sekedar interaksi antar individu. Sosiologi bukanlah satu-satunya ilmu yang berkaitan dengan masalah organisasi. banyak disiplin lain yang membicarakan masalah organisasi dengan menetengahkan modelnya masing-masing.

Pugh (1971) mengelompokkan enam model utama yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda yang secara garis besarnya akan diuraikan sebagai berikut

1. Teori Ekonomi

Teori ini menentang suatu model organisasi yang mempunyai ciri khas dalam tujuannya yaitu keuntungan maksimal dan kerugian minimal. dalam organisasi ini, manusia dipandang sebagai pihak konsumen yang dimotivasi oleh perhitungan rasional dan ekonomis.

2. Teori Teknologi

Para ahli teknik adalah kelompok kedua yang mengklaim bahwa teknologi adalah variabel utama dari kondisi internal struktur organisasi beserta kondisi lingkungannya.

3. Teori individu

Teori ini memfokuskan perhatiannya pada masalah sikap, tingkah laku dan ciri-ciri pribadi individu yang ada dalam organisasi. teori ini lebih banyak berlandaskan pada teori klasik dari March dan Simon (1958) yang membuat suatu kerangka kerja yang menekankan peranan individu. mereka mengatakan bahwa organisasi dapat didefinisikan dan dipelajari melalui proses-proses pengambilan keputusan secara individual dalam organisasi, walaupun keputusan tersebut mungkin mungkin dihambat oleh adanya hierarki dan pembagian tugas.

4. Teori kelompok

Teori ini berdasarkan atas penelitian Elton Mayo dan eksperimen Hawthorne. Teori ini sangat mementingkan peranan pola kepemimpinan dan norma-norma yang berlaku dan menyatakan bahwa kendala bagi organisasi dan pengembangan orientasi individu hanya dapat dimengerti jika buruh dilibatkan dalam kegiatan kerja.

5. Teori Struktural

Menurut teori ini organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang memiliki keteraturan dalam hierarki wewenang, pembagian tugas yang dan koordinasi fungsional. Model-model organisasi yang dikembangkan oleh Burns dan Stalkers pada tahun 1961, serta oleh Pugh pada tahun 1968 termasuk kedalam tradisi struktural

6. Teori Manajemen

Teori ini dijelaskan oleh Fayol 1949. titik berat teori ini adalah usaha untuk memaksimalkan produktifitas. teori ini menganggap hierarki wewenang sebagai hal yang wajar dan memperlakukan manusia sebagai mesin.

Cara lain yang disebut teori tipologi, yang agak berbeda dengan cara diatas adalah, ialah teori yang lebih dulu mencoba mengidentifikasi unsur-unsur yang dianggap penting, kemudian baru membuat modelnya. Perbedaannya dengan cara pertama, ialah sebelum membuat suatu model, cara pertama memandang permasalahan secara keseluruhan, sedangkan cara kedua lebih mengutamakan semua unsure yang dianggap cukup penting.

Salah satu tipologi yang paling terkenal adalah klasifikasi organisasi yang didasarkan atas tujuan tipologi sebagaimana dikembangkan oleh Talcott Parsons pada tahun 1960, yakni:

1. *Production Organization* (organisasi produksi), yaitu: suatu organisasi yang berusaha memproduksi barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan sistem sosial yang mengelilinginya. contohnya perusahaan-perusahaan perdagangan, industri dan sebagainya.
2. *Political Goal Organization*. Yaitu: organisasi tipe ini memusatkan semua aktifitasnya untuk mencapai tujuan politik. Contoh partai-partai politik
3. *Integrative Organization*. Yaitu: Suatu organisasi yang baik bentuk maupun motifnya terintegrasi dan terarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. organisasi ini berusaha mengurangi bahkan menghilangkan segala macam konflik yang terjadi. Contoh angkatan bersenjata
4. *Educational dan Cultural Organization*. Yaitu: organisasi ini bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan, contoh: sekolah-sekolah dan perkumpulan kesenian.

Pembagian organisasi yang didasarkan atas perbedaan tujuan telah menimbulkan masalah serius, baik secara konseptual maupun secara empiris. Etzioni, Blau dan Scott mencoba melakukan klasifikasi organisasi yang didasarkan pada bentuk hubungan organisasi di dalam anggotanya.

Bentuk hubungan ini dikenal dengan *Compliance Relationship*. Bentuk-bentuk *Compliance Relationship* bisa berupa:

1. *Coercive*, dimana pihak penguasa berusaha memaksa para anggotanya untuk perbuatan-perbuatan tertentu, Contohnya : organisasi penjara.
2. *Remunerative*, dimana pihak penguasa memperhitungkan keterlibatan kalkulatif misalnya perusahaan dan industri.
3. *Normative*, pihak penguasa berusaha mengarahkan para anggotanya agar mengikuti suatu norma-norma atau nilai tertentu. Contoh organisasi keagamaan.

Teori-teori yang dikemukakan Etzioni dan kawan-kawan menunjukkan kecenderungan adanya penyesuaian antara tipe otoritas (*relational variable*) dengan orientasi partisipasinya (*Psychological variable*). Hal ini terjadi karena tekanan internal dan eksternal terhadap organisasi sangat efektif. Blau dan Scott (1963) menjelaskan suatu prinsip diferensiasi, yaitu: "siapa yang menggunakan" dan "siapa yang mendapat keuntungan", mereka mengusulkan bahwa lapisan-lapisan masyarakat yang mengkonsumsi *output* organisasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi tipe-tipe organisasi dan karakter partisipasi para anggotanya serta berbagai problema yang dihadapi organisasi. Dengan prinsip-prinsip di atas, mereka mengklasifikasikan organisasi tersebut akan menjadi sebagai berikut:

1. *Matual Benefit Organization*. Yaitu: suatu organisasi di mana semua anggotanya memperoleh keuntungan terhadap organisasi tersebut. Contohnya, Lion Club, yayasan-yayasan.
2. *Owner benefit Organization*. Yaitu Tipe Organisasi ini kira-kira sama dengan tipe organisasi normative
3. *Common Weal Organization* (Organisasi Kemasyarakatan). Yaitu suatu tipe organisasi yang penyangganya adalah masyarakat umum yaitu, Contoh: PMI, organisasi kampung seperti RT, RW dan sebagainya.

Suatu kesimpulan umum mengenai teori-teori yang diajukan oleh Etzioni, Blau dan Scott ialah bahwa organisasi bersifat kompleks dan tidak mudah mengklasifikasikan hanya dengan satu kriteria atau hanya dalam satu dimensi. Organisasi berdiri di atas sejumlah faktor internal dan eksternal yang memberikan pengaruh dan tekanan dalam berbagai tingkat

ukuran. untuk negosiasi hal ini Child mengajukan usul untuk mempertimbangkan peranan Holder Of Power yang menjadi media dimana variable-variable kontekstual dengan pola-pola strukturnya. Dia juga mengatakan bahwa pemegang kekuasaan mampu member corak terhadap suatu struktur organisasi dengan kekuasaannya, sehingga dengan mempelajari karakteristiknya kita akan mengetahui dan mempelajari suatu struktur organisasi.

E. Industri Dan Implikasinya Terhadap Agama

Ada *common sense* mengenai masa depan agama dalam suatu masyarakat industrial, sering diungkapkan dalam percakapan sehari-hari bahwa industrialisasi dan modernisasi merupakan ancaman terhadap religiusitas. Meskipun penilaian itu sering disertai dengan banyak contoh kasus, namun tidak berarti ia mengandung kebenaran yang bersifat mutlak dan menyeluruh. Memang benar bahwa bentuk-bentuk perubahan sosial yang menyertai proses industrialisasi telah memengaruhi secara negatif kehidupan keagamaan, misalnya dalam masyarakat industri, peranan pengelompokan sekunder semakin menggeser pengelompokan primer. Adapun yang termasuk pengelompokan sekunder ialah unit dan organisasi kerja atau produksi, sedangkan kelompok primer ialah keluarga, suku, agama, dan sebagainya. Sifat kelompok sekunder adalah *gesellschaft*, sedangkan yang primer adalah *gemeinschaft*. Dengan perkataan lain, formalitas, zaklijtheid dan rasionalitas semakin menggeser keakraban, kekeluargaan, dan afektivitas. Karena itu melalui berbagai sebab, peranan orangtua, khususnya ayah, sebagai agen sosialis anak, akan semakin berkurang untuk digantikan oleh bentuk-bentuk hubungan sosial yang lain, misalnya sekolah dan pergaulan. Hal ini tentu mempunyai pengaruh dalam bentuk pengenduran pola-pola religiusitas tertentu.

Dalam sebuah pergeseran religiusitas dalam masyarakat industrial terutama disebabkan oleh semakin dominannya peranan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, baik sosial maupun lainnya, adalah bentuk kesadaran seseorang tentang lingkungannya, baik yang jauh maupun yang dekat, serta pengetahuan atau penguasaannya atas masalah-masalah yang ada. Hal itu berarti paling tidak semakin sempitnya daerah

kegaiban atau misteri, padahal tindakan keagamaan dilakukan karena pengakuan adanya kenyataan supra empiris atau gaib dan misteri.

Terkait dengan konsep kegaiban atau misteri, yaitu merupakan perasaan tidak berdayanya manusia terhadap kenyataan-kenyataan yang diperkirakan tidak akan mampu dimengerti. Pada masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai ilmu pengetahuan, suatu *terra incognito* akan menyuguhkan tantangan untuk diselidiki dan dibongkar rahasia dari misteri. Tetapi, pada masyarakat lain, ketidakberdayaan manusia menghadapi alam telah melahirkan konsep dan tindakan yang bersifat religius magis. Memuja suatu objek alam yang dianggap memiliki rahasia dan keagungan dapat dilihat sebagai lompatan jauh seorang manusia dalam usahanya menundukkan objek tersebut untuk kepentingan dirinya. Sedangkan jalan yang wajar (bukan lompatan jauh) ialah meneliti, menyelidiki, dan mempelajari objek tersebut.

Begitu ketatnya persaingan di era industri, telah terjadi peralihan faham masyarakat mengenai agama, agama bagi mereka yang bergelut dengan industri adalah uang. Faham seperti ini menjadi sebuah realitas yang menjadi kartakteristik masyarakat industri. Atau agama masyarakat industri adalah tidak beragama, karena ada relitas juatru mengenyampingkan agama. Proses industrialisasi akan membawa serta akibat menurunnya religio-magisme yang, untuk sebagian masyarakat, merupakan religiusitas itu sendiri.

Oleh karena itu, bagi mereka, industrialisasi memerosotkan nilai-nilai rareligiusitas. Namun, pada masyarakat lain, industrialisasi dan modernisasi mungkin justru menopang dan meningkatkan religiusitas yang paling murni dan sejati ialah yang berdimensi budaya instrinsik atau *cultural consumatory* yaitu sikap keagamaan yang memandang kepercayaan atau iman sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Dimensi religiusitas ini yang agaknya akan semakin diperkuat oleh adanya pola-pola hubungan masyarakat industri. Karen hal-hal yang bernilai instrumental telah dengan melimpah disediakan oleh struktur dan pola masyarakat industri itu. Maka agama akan menjadi semakin murni, dalam arti bawah keagamaan tidak lagi banyak mengandung nilai instrumental. Contohnya, karena instrumen untuk meberas hama tanaman

pada masyarakat industri disediakan oleh ilmu dan teknologi, misalnya dalam bentuk doa dengan tujuan agar tanamannya di sawah tidak terkena hama. Ini mungkin akan berpindah dari religius berdimensi *cultural instrumental* ke *cultural consumator*. di mana ia melihat ibadah sebagai tujuan pada dirinya sendiri yang menjadi sumber kebahagiaan). Religiusitas yang tidak terancam oleh proses industrialisasi dan modernisasi, malahan memperoleh dukungan dan pengukuhan, merupakan religiusitas yang bebas dari magisme, yaitu naturalisasi tindakan-tindakan manusia (*physiomorphism of man*).

Namun syarat lainnya adalah religiusitas harus bersandar pada konsep wujud supra empiris yang tidak bergeser menjadi empiris. Dengan kata lain sumber kepercayaan dan nilai keagamaan harus dapat menjamin bahwa ia tidak akan dapat dimengerti manusia dan diketahui rahasia-rahasianya. Pertanyaannya, apakah ada kenyataan setupa itu? Seorang penganut filsafat materialisme (komunisme) akan mengatakan tidak. Sebab dengan kecerdasannya manusia, menurut falsafah itu, selalu mempunyai potensi untuk memahami dan membuka kenyataan apa saja dalam alam raya ini. Suatu objek yang dahulu dianggap agung dan penuh misteri atau kegaiban sehingga patut dipuja, misalnya matahari, kini sudah semakin dipahami manusia dan terbuka rahasia-rahasianya.

Matahari telah berhenti sebagai kenyataan supraempiris, dan hanya menjadi objek empiris biasa, sehingga tidak pantas lagi manusia menyembahnya. Maka, bagi seseorang yang religiusitasnya berkaitan dengan konsep kegaiban matahari, proses industrialisasi dan modernisasi benar-benar telah menghapuskan sama sekali religiusitas itu. Tentu, teori komunis tersebut masih harus ditunggu bukti kebenarannya sampai dengan lengkapnya pengalaman manusia dan pengetahuannya yang meliputi segala wujud di jagat raya ini. Tetapi, di sinilah letak paradoksnya: justru suatu kenyataan disebut supraempiris karena ia tidak mungkin dibuktikan ada-tidaknya melalui prosedur dan norma empiris. Manifestasi tunggal adanya kenyataan supraempiris itu hanya dirasakan oleh mereka yang meyakini dan menerima dengan sungguh-sungguh ajaran tentang adanya kenyataan itu. Hal ini membawa kita ke ungkapan sederhana, namun mungkin sekali

mengandung kebenaran yang bersifat prinsipil, bahwa ada atau tidak adanya religiusitas, baik di masyarakat industrial maupun lainnya, tergantung kepada kegiatan penanaman iman oleh masyarakat bersangkutan, yaitu pendidikan keagamaan pada umumnya.

BAB V MASYARAKAT MODERNISASI TEKNOLOGI DAN INDUSTRIALISASI

Pada bab lima ini akan dijelaskan mengenai Masyarakat Modernisasi, Teknologi dan Industrialisasi yang terdiri: Modernisasi, Teknologi dan Perkembangannya, Tantangan Dan Masa Depan Indonesia, Hubungan Kausalitas Masyarakat Teknologi, dan Industrialisasi dan Modernisasi.

A. Modernisasi

Modernisasi diartikan sebagai proses perubahan dari corak kehidupan masyarakat yang “tradisional” menjadi “modern”, terutama berkaitan dengan teknologi dan organisasi sosial. Teori modernisasi dibangun atas asumsi serta konsep-konsep evolusi bawa perubahan sosial sebagai gerakan yang searah (linier), progresif dan berlangsung secara perlahan yang akan membawa masyarakat dari suatu tahapan primitif kepada suatu keadaan yang lebih maju.

Istilah modern berasal dari kata “*modo*” yang artinya “yang kini” (just now). Dengan demikian masyarakat dinyatakan modern apabila para warganya hidup dengan sistem nilai, cara berfikir, berperasaan dan bertindak, teknologi serta organisasi sosial yang baru dan konstelasi zaman sekarang. Contohnya masyarakat modern adalah masyarakat kota. Untuk memberikan definisi atau batasan tentang kota tidak mudah. Karena banyak aspek yang harus diperhatikan dan dapat menjadi dasar dalam menyusun batasan tersebut. Suatu masyarakat dinyatakan sebagai kota karena kehidupan sosialnya, keadaan budidaya, kehidupan ekonominya, pemerintahannya, atau karena keadaan penduduknya. Profesor Budiarto, memberikan batasan bahwa kota merupakan suatu jaringan kehidupan sosial dan ekonomi ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai oleh strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistik

Kota merupakan fenomena yang unik dan kontraproduktif. Di satu sisi kota merupakan idekting kemajuan, kegembiraan dan daya tarik: sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan hiburan, kesehatan dan pengobatan dan sebagainya, namun di sisi lain, kota ternyata identik dengan perilaku buruk, immoralitas dan bahkan kejahatan: hedonisme atau kemewahan hidup, pemuasan diri tanpa batas, kepura-puraan dan ketidakjujuran.

Beberapa ciri umum masyarakat kota, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) *Anonimitas*

Kebanyakan warga kota hidup dengan menghabiskan waktunya di tengah kumpulan manusia yang anonim. David Riesman menyebutnya sebagai "*the lonely crowd*". Heterogenitas kehidupan kota dengan keanekaragaman manusianya dari segi ras, etnisitas, kepercayaan, pekerjaan maupun kelas sosial mempertajam anonimitas. Perbedaan kepentingan membuat orang-orang kota lebih banyak berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama saja dengan membentuk *special interested group* (kelompok kepentingan khusus) dan berkesempatan membentuk hubungan sosial yang bersifat akrab dan personal.

b) Jarak sosial yang jauh

Secara fisik orang-orang kota berada dalam suatu jarak yang dekat dan keramaian, namun secara sosial mereka saling berjauhan sebagai akibat anonimitas impersonalitas dan heterogenitas.

c) *Regimentation* (keteraturan hidup) Kota

Dalam iram dan keteraturan kehidupan masyarakat kota akan berbedan dengan kehidupan masyarakat Desa. Desa akan diwarnai oleh ketidakformalan dan kesantiaian yang bersifat mekanik alamian, dimana masyarakat dipengaruhi oleh keadaan dan cuaca setam jam biologis binatang ternak. Sementara keteraturan hidup di kota lebih bersifat organik, diatur oleh aturan-aturan legal formal seperti: jam kerja, rambu-rambu dan lampu pengaturan lalu-lintas, jadwal kereta api, jadwal penerbangan, dan sebagainya.

d) Keramaian (crowding)

Keramaian hidup di kota disebabkan oleh kepadatan, kecepatan dan tingginya aktivitas kehidupan masyarakat kota.

e) Kepribadian Kota

Sorokin, Zimmerman dan Louis Wirth dalam essainya yang berjudul "*Urbanism as a way of life*". Membuat kesimpulan bahwa kota menciptakan kepribadian kota, yakni anomis, materialistis, berorientasi kepentingan, berdikasi (*self sufficiency*), impersonal, tergesa-gesa. Interaksi sosial tingkat

dangkal, manipulatif, rekayasa insekuritas dan disorganisasi pribadi.

f) Proses modernisasi

Proses modernisasi pada suatu masyarakat atau bangsa ditempuh melalui yang berbeda serta perjalanan yang panjang, tentu pada masyarakat dan bangsa manapun memiliki sejarah dan perjalanan yang panjang masing-masing akan berbeda sesuai dengan dinamikanya.

Menurut Samuel Huntington proses modernisasi mengandung beberapa ciri pokok sebagai berikut:

- a. Merupakan proses bertahap, dari tatanan hidup yang primitif-sederhana menuju kepada tatanan yang lebih maju dan kompleks
- b. Merupakan proses homogenisasi.
Modernisasi membentuk struktur dan kecenderungan yang serupa pada banyak masyarakat. Penyebab utama proses homogenisasi ini adalah perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi. Contohnya fenomena *coca colunization*, *Mc World* serta *californiaztion*.
- c. Terwujud dalam bentuk lahir sebagai Amerikanisasi dan Erofanisasi. Merupakan proses tidak bergerak dan tidak dapat dihidari dan tidak dapat dihentikan.
- d. Merupakan proses progresif ke arah kemajuan, meskipun tidak dapat dihindari adanya dampak (sampingan)
- e. Merupakan proses evolusioner, namun bukan revolusioner dan radikal, banyak waktu dan sejarah yang dapat mencatat seluruh proses gasuk maupun akibat serta dampaknya.

Menurut Ales Inkeles dan David Smith mengemukakan bahwa ciri-ciri individu yang modern, yakni:

- a. Memiliki alam pikiran (*state of mind*) yang terbuka terhadap pengalaman baru
- b. Memiliki kesanggupan membentuk dan menghargai opini.
- c. Berorientasi ke masa depan
- d. Melakukan perencanaan
- e. Percaya terhadap ilmu
- f. Memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu dapat diperhitungkan
- g. Menghargai orang lain karena prestasinya
- h. Memiliki perhatian terhadap persoalan politik masyarakat
- i. Mengejar fakta dan informasi.

B. Modernisasi Bukan Westernisasi

Tidak mudah untuk mengubah pandangan modernisasi identik dengan westernisasi. Hal ini mengungkap dalam catatan sejarah Eropa dan Amerika merupakan sumber dari dual hal ini. Tema-tema ini menunjukkan ciri-ciri modern sebagaimana diungkapkan Inkeles dan Smith bahwa modern identik dengan barat, namun demikian modernisasi dan westernisasi tetap dapat dibedakan karena memang kedua berbeda. Nurcholis Majid menyebutkan berbagai macam proses rasionalisasi yakni perubahan tata kerja yang lama yang tidak rasional diganti dengan tata kerja yang baru yang lebih rasional. Sedangkan westernisasi adalah menjadi seperti orang Barat secara total, tanpa reserve, mulai dari pandangan hidup (atheisme, sekularisme, feminisme, humanisme, dan sebagainya) sampai dengan gaya hidupnya (seks bebas dan hidup bersama tanpa menikah (*cohabitation*), model pakaian yang tidak menutup atau bahkan menonjolkan aurat, NAPZA, Premanisme, dan sebagainya).

Modernisasi dalam masyarakat dapat berlangsung apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Terlembagakannya cara berfikir ilmiah di kalangan masyarakat, terutama di kalangan *the ruling class*.
2. Birokrasi pemerintahan yang rasional, efektif dan efisien bukan birokratisme.
3. Tersedianya sistem informasi yang baik: cepat dan akurat
4. Iklim yang *favorable* terhadap modernisasi hal ini terutama dengan hal-hal yang menyangkur nilai dan sistem keyakinan
5. Tingkat organisasi sosial yang tinggi
6. Pelaksanaan sosial planning yang bebas dan pengaruh atau kepentingan (*vested interest*) suatu golongan. Maka dalam hal ini diperlukan sentralisasi wewenang terkait dengan sosial planning.

C. Gejala Modernisasi Masyarakat Indonesia

Modernisasi dalam bidang kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terutama menyangkut dalam dua hal, yaitu: penemuan baru dan pembaruan. Demikian modernisasi di bidang IPTEK tidak terlepas dari perhatian besar terhadap dunia pendidikan, penelitian dan pengembangan, kegiatan pendidikan penelitian dan pengembangan akan

mendorong ditemukannya ide-ide dan alat-alat baru yang dapat diterapkannya dalam kehidupan masyarakat untuk melengkapi atau mengganti yang lama. Gelaja modernisasi di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bidang antara lain:

1) Bidang Kehidupan politik dan ideologi

Tema modernisasi di bidang politik dan ideologi adalah demokratisasi dan ideologi terbuka. Demokratisasi merupakan proses ke arah terbukanya kesempatan bagi seluruh warga masyarakat dari segala lapisan dan golongan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sedangkan ideologi terbuka merujuk kepada pandangan hidup yang tidak terbatas atau terkotak-kotak oleh sektarianisme, primordialisme, aliran, ras etnisitas atau kesukubangsaan, kedaerahan agana atau aliran. Menurut Huntington, proses demokratisasi dan keterbukaan memerlukan beberapa kondisi, yaitu Kemakmuran ekonomi dan pemerataan kekayaan; ada hubungan yang positif antara pembangunan dan pemerataan ekonomi dengan demokratisasi, artinya semakin maju tingkat ekonomi suatu masyarakat semakin besar peluangnya untuk menumbuhkan dan menegakkan tatanan kehidupan politik yang demokratis dan terbuka. Kemakmuran ekonomi akan memungkinkan tumbuhnya tingkat melek-huruf, pendidikan dan media massa yang sangat mendorong tumbuhnya demokrasi.

Terdapatnya kelas menengah yang otonom dalam struktur sosial masyarakat. Mereka terdiri atas para kaum intelektual, pengusaha, profesional, tokoh agama atau etnis) yang berfungsi dalam pengendalian (kontrol) terhadap kekuasaan dan membangun prasarana dasar untuk tumbuhnya pranata politik yang demokratik. Apabila tidak terdapat kelas menengah otonomi masyarakat cenderung didominasi oleh suatu model kekuasaan yang sentralistik, seperti monarkhi, absolutisme, korporatik ataupun birokratik otoritarian. Lingkungan internasional, menurut Huntington menjelaskan bahwa demokrasi lebih merupakan hasil dari difusi kaetimbang sebagai akibat pembangunan sehingga masyarakat menjadi lebih demikratis ketika memiliki lingkungan pergaulan internasional yang luas. Dalam konteks budaya masyarakat lebih bersifat egaliter, namun dalam konteks budaya feodal dan primordial ternyata akan menghambat terhadap proses demokratisasi.

2) Bidang Bidang Kehidupan Ekonomi

Dalam konteks modernisasi dalam bidang kehidupan ekonomi adalah masalah efisiensi dan produktivitas, salah satu faktornya adalah masalah biaya yang tinggi (*high-cost economi*) yang hampir pada semua bidang kehidupan.sumber-sumber ekonomi tingginya biaya itu antara lain:

- a. Sistem birokrasi
- b. Banyaknya pungutan yang tidak ada hubungannya dengan produktivitas
- c. Proteksi dan subsidi\
- d. Berbagai praktek bisnis atau yang disebut dengan economic criminality collar Crime) seperti kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)

Sedangkan masalah produktivitas yang rendah disebabkan oleh teknis dan organisasi produksi yang usang. Persoalan produktivitas yang rendah hal ini disebabkan oleh masalah teknis dan masalah organisasi yang usang, oleh sebab itu, peningkatan produktivitas harus dilakukan dengan memperbaharui teknologi baik teknologi mekanis seperti: mesin produksi, maupun teknologi sosial seperti tata kerja yang lebih teratur.

3) Kehidupan Agama Dan Sekularisme

Ada proses yang tidak bisa terhidarkan serta meresahkan di kalangan agamawan dalam hal modernisasi adalah masalah sekularisme. Sekuler berasal dari kata "*saeculum*" yang berarti "dunia dalam konteks waktu" yaitu "sekarang". Atau dunia dalam konteks ruang, dalam kata latin adalah mundus. Lawan kata saeculum adalah eternum yang artinya "keabadian". Di Indonesia ide tentang sekularisasi diperkenalkan oleh seorang tokoh bernama Nurcholish Madjid" pada tahun 1970-an. Menurut Majid, sekularisasi tidak sama dengan sekularisasi, sekularisasi merupakan proses, sedangkan sekularisme adalah paham. Sekularisasi merupakan proses menuju kehidupan cara beragama yang rasional. Yaitu proses pembebasan diri dari belenggu rakhyul (*superstition*) atau memberikan wewenang kepada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membina dan menyelesaikan urusan-urusan duniawi. Dimana di dalamnya mencakup sikap objektif dalam menelaah hukum-hukum yang menguasai dunia dan alam pada umumnya. Sedangkan sekularisasi merupakan paham keadaban, yaitu suatu paham yang

mengesampingkan agama. Sekularisme terbagi menjadi dua, yaitu: a) sekularisme moderat dan b) sekularisme mutlak. Sekularisme moderat merupakan pandangan yang mengakui keberadaan Tuhan untuk hal urusan-urusan berhubungan dengan kehidupan abad (*eternum*) saja. Adapun untuk urusan dunia adalah mutlak urusan manusia. Sedangkan sekularisme mutlak merupakan paham yang tidak mengakui adanya Tuhan yang puncaknya adalah *atheisme*.

Ada sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari dari pengertian sekularisasi sebagai proses menuju paham sekularisme dalam kehidupan di masyarakat. Maka di sinilah mulai timbul perbedaan pendapat yang bersifat kontroversi tentang sekularisasi. Maka untuk menghindari kontroversi tersebut, Kuntowijoyo menggunakan istilah objektivikasi untuk sebuah fenomena kehidupan beragama yang lebih rasional.

4) Modernisasi Dalam Masyarakat Sebagai Sebuah Proses Industrialisasi dan Urbanisasi.

Masyarakat modern, industri teknologi dan urbanisasi merupakan tiga serangkai yang tidak bisa dipisahkan, karena satu sama lain akan terjadi secara beriringan.

a. Modernisasi sebagai proses industrialisasi

Apabila melihat sejarah Eropa, maka modernisasi tidak lepas dari proses industrialisasi. Dalam kesejahteraan ekonomi dan kestabilan politik di Eropa tercapai setelah terjadinya revolusi industri yang diwakili oleh masa pencerahan (*renaissance*) dan penemuan-penemuan baru. Berdasarkan ini dinyatakan bahwa awal modernisasi adalah industrialisasi, yaitu berubahnya kehidupan dari “agraris-tradisional” menjadi “industri modern”. Menurut Talcott Parsons bahwa proses perubahan itu dalam teori variabel pola (*pattern variables*) sebagai berikut:

1. Perubahan dari *effectivity* kepada *affective neutrality*
2. Perubahan dari *particulatism* ke *universalism*
3. Perubahan dari *collective orientation* kepada *self orientation*
4. Perubahan dari *ascription* kepada *achievement*
5. Perubahan dari *functionality diffused* kepada *functionally specified*

b. Modernisasi sebagai proses urbanisasi

Suatu masyarakat modern akan identik dengan masyarakat kota. Maka modernisasi identik dengan urbanisasi. Dalam proses urbanisasi dikenal adanya tiga macam proses, yaitu:

1. *Centripetal process; the flow of people from country sides to the urban area accompanied with the change in behavior.* Dalam proses ini terjadi aliran penduduk dari wilayah desa atau kota satelit menuju ke wilayah pusat kota yang diikuti oleh perubahan pola perilaku desa-tradisional dengan perilaku kota-modern. Hal ini disebabkan adanya perindahan penduduk dari desa ke kota dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: 1) push factors (faktor pendorong) dan 2) pull Factors (faktor penarik). Faktor-faktor pendorong meliputi kondisi desa yang menjadikan orang tidak mau lagi tinggal di desa, karena minimnya lapangan kerja, kekangan adat istiadat, kurangnya variasi hidup. Sempitnya kesempatan pengetahuan kurangnya sarana rekreasi atau sempitnya kesempatan mengembangkan keahlian dan keterampilan. Sedangkan faktor penarik yang dimiliki kota meliputi kesempatan kerja yang luas, banyak kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian, kesempatan dan fasilitas pendidikan yang lebih memadai, kelebihan modal, variasi hidup, banyak tersedia tempat hiburan, tingkat kebudayaan dikota lebih tinggi dibanding dengan desa.
2. *Centrifugal process; urban extention in terms of physical, economic, technology and culture.* Dalam proses ini yang terjadi adalah meluasnya pengaruh kehidupan kota ke wilayah-wilayah pinggiran kota, dapat berupa perluasan fisik kota yang diikuti oleh perubahan kehidupan ekonomi, penggunaan teknologi maupun perubahan kebudayaan.
3. *Vertical process: social, economic, culture, and behavior.* Dalam proses ini yang terjadi adalah perubahan situasi atau iklim desa (rural sphere) menjadi kota (urban sphere), baik secara sosial, ekonomi, kebudayaan dan perilaku. Keadaan seperti ini dapat terjadi karena antara lain: 1) daerah itu menjadi pusat pemerintahan, 2) letaknya strategis untuk sebiah perdagangan, dan 3) pertumbuh industri.

c. Masalah-masalah yang timbul akibat urbanisasi

Bertambahnya tingkat persaingan hidup di kota akibat urbanisasi, misalnya untuk memperoleh sumber-sumber ekonomi dapat menimbulkan persoalan yang pelik, seperti berbagai macam konflik, tuna karya, kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) maupun yang tidak terorganisir, perkampungan kumuh (*slums*), gelandangan, tuna susila, maupun

rendahnya tingkat kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan bagi desa, urbanisasi menyebabkan terbatasnya jumlah penduduk usia produktif yang berakibat terhambatnya perkembangan desa. Di samping itu para urbanit yang pulang ke desa sering membawa pengaruh kehidupan kota (*urbanisme*) yang tidak selalu sesuai dengan kebudayaan orang desa.

D. Teknologi dan Perkembangannya

Teknologi sebagai pengetahuan *applied science* lebih menampakkan sifat gandaanya (*ambiguity*): bersifat positif dan negatif. Istilah teknologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1706 oleh Philips dalam buku berjudul "*Technology: A Description of the Arts, Especially the Mechanical*". Secara tradisional, teknologi berkembang bersama dengan perkembangan kebudayaan. Manusia menggunakan teknologi tradisional sejak sejuta tahun yang silam, Waktu itu manusia mulai membuat alat-alat dan menjinakkan api. "*With tools and weapons of wood, stone, and bone, man killed and skinned animals and made cothes and tents*" Delapan hingga sepuluh ribu tahun yang lalu, manusia mengenal teknologi pertanian yang menyebabkan revolusi di bidang pertanian. Sampai dua atau tiga abad yang lalu, teknologi terus menerus mengalami kemajuan. Kita kenal kebudayaan "Mesopotania" yang berada di lembah sungai Eufрат dan Tigris (Irak), serta lembah sungai Nil dan Indus. Orang Yunani yang menemukan mesin-mesin sederhana memberikan sumbangan yang amat mempermudah hidup manusia. Encyclopedia Americana, Grolier Incorporated, Danburry, Connecticut, 1986, vol26, hal.361: "*However one Greek discovery, the use and study of machines, was fundamental and this in turn gave rise the concept of natural power.*" Perkembangan selanjutnya, orang menemukan bubuk mesiu yang sangat bermanfaat dalam teknologi persenjataan. Mesin uap memajukan transportasi dan industri, listrik memberikan energi dan penerangan, telepon mempermudah komunikasi, dan sebagainya.

Teknologi benar-benar merupakan revolusi bagi kehidupan manusia sejak dunia ilmu diguncang oleh terobosan pembuktian pemikiran Galileo Galilei (1564-1642) tentang tata surya. Ia mendukung pendapat heliocentrisme Copernicus (1473-1543) dan Johannes Keppler (1546-1601) dengan teropong bintang yang dapat digunakan untuk melihat beberapa peristiwa di

angkasa secara langsung. Karena itu pantaslah bila Galileo Galilei dianggap sebagai pelopor perkembangan ilmu dan penemu dasar ilmu modern, karena penemuannya didasarkan pada soal-soal obyektif. Dari perkembangan antropo-budaya, (Sutarjo Adisusilo Jr., 1983:102-103) dikenal tiga fase proses teknik hingga dewasa ini, yaitu:

a) Fase “Teknik Destruktif”

Dalam fase primitif ini bahan teknik diambil langsung dari alam dan tidak ada usaha mengembalikannya ke alam lagi. Orang-orang pada zaman batu hidup dalam fase teknik ini, yakni mengambil apa saja dari alam tanpa usaha menanam sendiri.

b) Fase “Teknik Konstruktif”

Sejak zaman batu baru sampai abad pertengahan, manusia mulai menciptakan hasil-hasil kebudayaan yang sebelumnya tidak terdapat di alam, seperti: rumah, alat-alat memasak, senjata logam, ladang/ sawah, peternakan dan sebagainya. Dengan demikian mereka menciptakan suatu lingkungan baru (*the second nature*) demi kesejahteraan hidup mereka.

c) Fase “Teknik Modern”

Dalam fase modern ini teknologi selalu mendorong penciptaan atau tambahan ilmu baru yang lebih maju, dan demikian seterusnya secara berulang dan saling mengait, sehingga perkembangan ilmu modern tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi modern. *Science without technology has no fruit, technology without science has not root.*

Salah seorang antropolog bernama JJ Honingmann dan AL. Kroeber (1958:528-583) pernah menyatakan bahwa tiga wujud utama kebudayaan adalah wujud ideal (*culture system*), sistem sosial (*social system*) dan wujud fisik (*material/psysical culture*).

Adapun teknologi adalah sebagai wujud terakhir. Dalam kenyataan kehidupan masyarakat, ketiga wujud kebudayaan itu tak terpisahkan dan saling memengaruhi. Kemudian Sutarjo Adisusilo Jr. (1983:15) menjelaskan hubungan itu sebagai berikut: “Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia. Baik pikiran dan ide-ide, maupun tindakan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisik. Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan alamiahnya sehingga memengaruhi

pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikirnya.” Dalam dimensi isinya, kebudayaan dapat dipilah menjadi tujuh cabang, yakni: 1) bahasa, 2) kesenian, 3) religi, 4) sistem pengetahuan, 5) sistem teknologi, 6) organisasi sosial, dan 7) sistem ekonomi. Keseluruhan isi kebudayaan itu tidak dapat dianalisis secara terpisah, sebab pada hakikatnya setiap komponennya saling tumpang tindih secara komplementer. Dengan demikian sistem pengetahuan dan teknologi merupakan bagian integral dari kebudayaan secara universal. Hal itu lebih nyata dalam pengertian kebudayaan yang beredar di kalangan para ahli Unesco, sebagaimana pernah diungkapkan oleh Marsetio Donoseputro: “Kebudayaan adalah seluruh kekayaan warisan sosial (*inheritance social wealth*) yang didapatkan melalui proses historis yang panjang, berupa semua pandangan, pikiran, benda, kemahiran, nilai-nilai hidup, dan organisasi sosial tertentu, yang didapatkan melalui suatu proses pengalaman dan proses belajar serta tidak karena sekadar naluri.”

Secara historis perkembangan teknologi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan historis kebudayaan. Keberhasilan Galileo Galilei tampaknya merupakan konsekuensi logis dari proses pemutarbalikan orientasi pemikiran teologis ke “*antroposentrisme*” pada masa pembaruan *Renaissance*, yang berlangsung selamat lebih kurang dua abad (1400-1600). Para filsuf terpenting pada masa itu adalah Niccolo Machiavelli (1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), Thomas Moore (1478-1535) dan Francis Bacon (1561-1626) yang mencari inspirasi mereka dalam warisan Yunani-Romawi antik, untuk menjadikan manusia sebagai titik fokus kenyataan. Pembebasan dari dominasi agama itu menyebabkan manusia “lahir kembali” secara kultural. Zaman *Renaissance* disusul dengan zaman *Barok* yang lebih menekankan kemungkinan akal budi (*ratio*) manusia. Tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman ini adalah Rene Descartes (1596-1650) dengan ucapannya: *Cogito, ergo sum!* Juga B. Spinoza (1632-1677) dan G. Leibniz (1646-1710). Mereka lebih menegaskan pencarian rasionalitas manusia dalam kedudukan dan martabatnya selain yang dijelaskan oleh agama bahwa ia adalah makhluk Tuhan.

Pada abad ke XVIII telah menunjukkan perkembangan baru, yang menyusul reformasi zaman *Renaissance* dan rasionalisme

zaman *Barok*. Menurut sejarah filsafat Barat, periode ini dikenal dengan “Zaman Pencerahan” atau “Fajar Budi” (Ing. Enlightenment; Jer. Aufklärung). Filsuf-filsuf terkenal pada masa ini antara lain: John Locke (1632-1704), G. Berkeley (1684-1753), David Hume (1711-1776) dari Inggris, Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dari Prancis dan Immanuel Kant (1724-1804) dari Jerman. Mereka menciptakan sintesis dari rasionalisme dan empirisme.

Terjadinya revolusi Industri dimulai, yakni dengan ditemukannya karya tembikar ilmiah oleh Josiah Wedgwood, disusul dengan John Smeaton yang memperdalam penemuan ledakan dalam tungku perapian. Tahun 1769 James Watt menemukan mesin uap, dan tahun 1785 Cartwright berhasil menemukan alat tenun untuk pabrik tekstil. Berbagai penemuan berikutnya saling menyusul, sehingga membangkitkan optimisme bahwa teknologi akan mampu memakmurkan dan meningkatkan taraf hidup manusia. Sirkulasi teknologi pada masa itu dianggap sebagai keterampilan yang membebaskan manusia dari pekerjaan fisik yang melelahkan. Bertolak dari kenyataan inilah kiranya teknologi dapat dipandang sebagai sintesis dari rasionalisme dan empirisme.

E. Tantangan Dan Masa Depan Indonesia

Penduduk yang sangat besar akan menghabiskan pendapatan nasional Indonesia, sehingga porsi pembangunan menjadi sangat terbatas. Pendapatan perkapita tak bisa begitu saja digunakan untuk mengukur kemajuan kesejahteraan suatu bangsa. Ketika puluhan juta rakyat (menurut data dari BPS maupun Bank Dunia silakan saja tentu dengan parameter masing-masing) berada di bawah garis batas hidup layak minimal alias miskin, beberapa orang Indonesia tercatat sebagai orang-orang terkaya di dunia. Demikian pun kita masih terus dihantui mentalitas korup yang tak mudah diberantas oleh banyak dan beragamnya peraturan, undang-undang dan pembentukan aneka komisi. Bahkan korupsi itu kian marak pula di antara para penegak hukum dan lembaga-lembaga yang semestinya menjadi garda terdepan upaya kolektif pemberantasan korupsi. Masalah penyediaan lapangan kerja dan kebutuhan pangan yang cukup bagi penduduk adalah tantangan yang luar biasa beratnya. Demikian pula pengendalian sentra-sentra perumahan yang padat (*over-crowded*) dan mobilitas

warga. Daratan Indonesia (lebih kurang 1.919.443 km persegi) tak akan bertambah luas. Sumber alam yang selama ini digali dari dalam tanah, hutan, dan sungai terancam habis bila tidak ada usaha konservasi yang memadai. Berkat kemajuan teknologi, lingkungan buatan manusia (*man made environment*) semakin mendesak lingkungan alam. Persawahan yang beberapa tahun sebelumnya subur, produktif dan sekaligus menjadi tandon air, sebagian besar sudah ditumbuhi gedung-gedung, dan jalan di depannya sering tergenang air. Taman dan hutan kota pun mudah sekali beralih fungsi. Hal ini menimbulkan aneka masalah lingkungan hidup, sehingga usaha pemeliharannya pun semakin penting dan mendesak.

Untuk menghadapi tantangan masalah kependudukan dan lingkungan hidup, maka peran ilmu dan teknologi semakin dibutuhkan. Ilmu dan teknologi harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana menghidupi jumlah manusia yang sedemikian besar dengan sumber alam dan lingkungan yang tersedia. Indonesia pun menghadapi tantangan gelombang “revolusi genetika” (sesudah revolusi di bidang pertanian, industri dan informasi). Kesempatan berperanserta aktif dalam revolusi keempat itu terbuka lebar karena sesungguhnya kekayaan areal hutan tropis yang luas dan memuat banyak sumber plasma nutfah (*genetic resources*). Demikian disarankan oleh Emil Salim (1989) agar “Indonesia memelihara keutuhan seluas mungkin hutannya bagi perkembangan pembangunan di masa depan.” Penyilangan berbagai plasma nutfah dapat meningkatkan produksi dan menghasilkan produk-produk baru. Dalam hal terakhir ini selain contoh-contoh serupa lainnya di bidang percepatan pembangunan yang didukung ilmu dan teknologi modern tentang varietas padi unggul beberapa waktu lalu mungkin merupakan sebuah kecelakaan yang tak perlu terjadi bila semua pihak mematuhi aturan dan bisa mengendalikan diri.

Kemampuan dalam mengolah sumber alam serta pengembangan teknologi berlangsung dalam iklim persaingan yang semakin ketat. Dalam situasi persaingan itu, negara-negara maju lebih beruntung karena jumlah penduduknya sudah stationer dan ditopang pula oleh ilmu dan teknologi modern yang mendorong pendapatan perkapita penduduknya. Sementara itu negara-negara berkembang masih sibuk membendung laju pertambahan penduduknya dan dengan mentalitas yang kurang

mendukung ditambah pendapatan perkapita yang nyata masih belum tergolong layak untuk hidup di tengah pesatnya perkembangan zaman yang semakin menuntut kemampuan bersaing. Maka untuk itu semua tantangan berikut kelemahan dan atau kekurangan pada bangsa ini semestinya mendorong upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain ketimbang tak pernah berhenti saling menyalahkan karena merasa diri dan kelompoknya yang paling benar. Sayang apabila kita mengabaikan tantangan-tantangan yang nyata di depan mata dan justru menciptakan tantangan-tantangan maya di bidang ini dan itu untuk sekejap bermimpi menjadi bangsa yang besar sambil terus bertengkar sehingga nilai-nilai persatuan sebagai prasyarat kesejahteraan bersama seluruh bangsa justru semakin longgar.

F. Hubungan Kausalitas Teknologi, Industrialisasi dan Modernisasi

Sejatinya teknologi yang memberikan pengetahuan teknis dan latihan tentang *know-how* keterampilan dan kerajinan tangan, memungkinkan manusia mampu secara pribadi maupun kolektif mencari nafkah dengan menguasai lingkungannya. Namun pada perkembangan selanjutnya, kemajuan ekonomis yang diperoleh melalui Revolusi Industri itu juga menimbulkan lompatan-lompatan yang sulit terkejar oleh perkembangan sistem sosial-kemasyarakatan, sehingga pada gilirannya dapat juga menelurkan akibat-akibat yang tidak dikehendaki. Salah satu akibat yang dibuktikan oleh kenyataan sejarah antara lain bahwa kemajuan teknologi membuat bangsa dan negara penemu atau tempat penerapannya menjadi bangsa dan negara yang bersifat imperialis/kolonialis. Ketika sumber daya alam yang dimilikinya menipis, negara-negara itu mengalihkan eksplorasinya ke negara-negara lain yang kaya sumber daya alam penunjang industrinya. Eksplorasi sumber daya alam di negeri-negeri jajahan pada perkembangan selanjutnya maupun bersamaan dengan itu menimbulkan eksploitasi sumber daya manusia yang diabdikan kepada teknologi. Oleh karena itu, negara-negara bekas kolonial seperti Indonesia, yang baru diberi kesempatan sejak tahun 1945 untuk secara bebas menentukan sendiri identitasnya dan mengembangkan sendiri potensinya sebagai suatu kesatuan ekonomi, kultural dan politik, tidak bisa diharapkan dapat berdiri

atas dasar yang sama dengan negara-negara yang telah memulai pembangunannya sejak ratusan tahun lalu. Dalam hal ini, B.J. Habibie (1986:13) mengatakan bahwa: “Untuk dapat menjadi suatu negara-bangsa yang merdeka secara ekonomis, negara itu harus mampu menghasilkan barang-barang, jasa-jasa yang diperlukannya sendiri atau yang diperlukan oleh dunia pada umumnya, sehingga kelebihan produksinya dapat ditukarkannya dengan barang-barang dan jasa yang diperlukannya tetapi tidak mampu dihasilkannya sendiri.”

Realitas yang terjadi sekarang telah menunjukkan bahwa perkembangan kerajinan tangan dan keterampilan itu telah menumbuhkan cara berpikir produktif yang disertai pandangan dan sikap hidup teknokratis. Cara berpikir produktif tersebut mempercepat proses industrialisasi yang diperlukan untuk meningkatkan dan atau mempertahankan eksistensi suatu bangsa dan negara yang mandiri secara ekonomis, politis dan kultural. Demikianlah teknologi telah merembes ke dalam kehidupan manusia sehari-hari sehingga dapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dalam hal ini industrialisasi berperan sebagai produsen yang membanjiri masyarakat dengan berbagai produk teknologi yang terbukti mampu memenuhi kebutuhan manusia. Dengan bantuan teknologi, industrialisasi mampu menyediakan sebagian besar barang-barang dan jasa yang memberikan kenikmatan material bagi masyarakat modern. Untuk mengulas gejala hubungan kausalitas antara teknologi, industrialisasi dan modernisasi itu Fuad Hassan (1977:27) mengungkapkan bahwa manusia-manusia tropis pun kini merasa tak mampu melakukan kegiatan produktif kalau ruang kerjanya tidak *air conditioned*. Pada bagian lain telaah filosofisnya yang dirangkum dalam buku berjudul *Heteronomia*, ia pun menyatakan: “Tidak kalah penting artinya pengaruh teknologi modern terhadap perubahan status mental manusia yang dikenai oleh teknologi modern itu. Tanpa sadar kita berangsur-angsur menghadapi kenyataan hidup baru; menyempitnya penghayatan Ruang dan Waktu adalah salah satu di antaranya. Dan ini berarti bahwa teknologi telah menciptakan suatu Ruang Hidup (*life-space*) dan Tempo Hidup (*life-pace*) yang radikal berbeda dengan apa yang kita hayati dalam kehidupan masyarakat tradisional.”

Perbedaan menjadi jelas antara hidup tradisional dengan pola hidup modern itu tampak pada kemajuan teknologi dan

industrialisasi yang melayani kebutuhan manusia. Oleh karena itu sikap antipati terhadap teknologi modern tidaklah adil. Sebagaimana kita alami, untuk mengetahui segi positif dari perkembangan teknologi dan hubungan kausalitasnya dengan industrialisasi dan modernisasi tidaklah sesukar mengenali dampak negatif yang dapat ditimbulkannya melalui penampilan fisik teknologi itu. Dalam kenyataannya, kini tak sebuah bidang kehidupan manusia yang tidak disentuh teknologi modern. Di bidang pertambangan, pertahanan dan keamanan, pertanian, informasi dan komunikasi, kedokteran, maupun dan terutama dalam berbagai macam industri dengan mesin-mesin dan robot-robot elektroniknya, dan sebagainya, teknologi modern menampakkan keunggulannya.

Maka semakin nyata bahwa hubungan kausalitas antara teknologi, industrialisasi dan modernisasi. Dunia semakin maju (modern) karena industrialisasi yang didukung oleh teknologi modern. Teknologi telah menjadi kunci keberhasilan pembangunan bangsa-bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan masing-masing. Namun demikian, peningkatan kuantitas pembangunan untuk menanggapi pertumbuhan penduduk yang semakin besar dalam keadaan semakin berkurangnya sumber alam serta lingkungan alam, pengembangan teknologi dan persaingan dunia yang semakin ketat tidak boleh mengabaikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human resources*). Hal itu disebabkan oleh karena pada hakikatnya pembangunan ditujukan pada manusia sebagai satu kesatuan yang utuh. Manusia tidak dapat dipuaskan oleh kebutuhan material belaka seperti pangan, sandang, perumahan dan sebagainya. Selain pemenuhan kebutuhan materialnya, manusia juga menuntut pemenuhan kebutuhan non-material seperti keadilan, kebebasan, keterbukaan dan sebagainya.

Perkembangan industrialisasi saat sekarang menyebabkan tumbuhnya perikehidupan perkotaan, yang budaya keduanya jelas berlainan dengan budaya desa dan pertanian. Perbenturan budaya ini sebagaimana sudah dan akan terus dialami menimbulkan dampak yang sangat luas, sehingga kualitas pembangunan perlu mendapatkan tumpuan iman, moral, dan rasionalitas. Peningkatan kualitas pembangunan hendaknya tidak dimaksudkan sebagai tindakan progresif untuk dapat mengikuti arus perkembangan pembangunan fisik atau material belaka,

melainkan juga merupakan tindakan defensif untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara Indonesia atas dasar kepribadian Pancasila.

BAB VI

SISTEM PRODUKSI MASYARAKAT INDUSTRI

Pada bab enam membahas tentang Sistem Produksi Masyarakat Industrialisasi, di dalamnya akan di bahas tentang: Konsep Produksi Pada Masyarakat Industri, Karakteristik Produksi Masyarakat Industri, Sistem Produksi dan Operasi, Proses Produksi dan Teori Sistem Produksi Masyarakat Industri

E. Konsep Produksi Pada Masyarakat Industri

Manusia sebagai makhluk hidup tentunya membutuhkan makan dan minum guna mempertahankan kelangsungan hidup. Untuk itu, manusia harus bekerja, banting tulang tiap harinya demi mendapatkan uang. Uang tersebut yang dipergunakan membeli kebutuhan hidup, baik sandang, papan, maupun pangan. Manusia dikatakan hidup sejahtera ketika sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, seorang suami yang sudah mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Barang dan jasa merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia baik secara individu maupun dalam hidup berkelompok.

Ketika manusia melakukan kegiatan ekonomi, berarti manusia sedang berusaha dalam membuat keputusan dan melaksanakannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan gejala bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa. Cara yang dimaksud adalah berkaitan dengan semua aktifitas orang dan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang-barang atau jasa-jasa langka. Berikut ini akan dibahas lebih khusus mengenai produksi sebagai salah satu aktivitas ekonomi manusia. Produksi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu dari kata "production". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, produksi diartikan sebagai proses pengeluaran hasil; penghasilan. Selain itu, produksi juga dimaknai sebagai hasil dan pembuatan. Dengan demikian produksi dikatakan sebagai segala kegiatan dengan prosesnya yang dapat menciptakan hasil, penghasilan dan pembuatan. Produksi mencakup dan meliputi banyak

kegiatan. Misalnya, pabrik kain yang mengelolah bahan mentah menghasilkan kain dengan berbagai warna dan motifnya, pabrik yang membuat makanan siap saji, ibu rumah tangga yang memasak makanan untuk anggota keluarganya, atau petani memanen padi di sawah, dan sebagainya. Kegiatan produksi tersebut menghasilkan suatu produk. Produk itulah yang distribusikan selanjutnya dikonsumsi oleh masyarakat. Kata produk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 1) barang atau jasa yang dibuat ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu; 2) benda atau uang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi; 3) hasil-hasil kerja. Dari ketiga definisi produk yang disebutkan di atas, dapat dipahami produksi akan berkaitan dengan proses yang dinamakan kerja.

a. Pandangan para ahli mengenai produksi

Terdapat pandangan yang beragam dari para tokoh teori sosiologi klasik tentang produksi. Para tokoh tersebut membicarakan produksi dengan sudut pandang dan isi dari teori yang dikembangkan beragam. Para tokoh dengan pemikirannya yang akan didiskusikan adalah Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber.

1. Karl Marx

Marx mengatakan manusia adalah makhluk yang mampu melakukan kerja. Manusia dianggap sebagai produsen melalui kerja yang dilakukannya. Proses kerja yang dilakukan menghasilkan suatu produk, merupakan hakekat manusia yang membedakannya dari makhluk lainnya, seperti binatang. Dalam kapitalisme, manusia sebagai pekerja tidak lagi mempunyai kontrol atas potensi yang terkandung dalam kerja mereka. Potensi yang dimaksudkan Marx ialah tenaga kerja (*labour power*). Oleh orang kapitalis dipertukarkan dengan benda abstrak yang terdapat dalam upah. Dalam kapitalisme dikenal dengan sistem upah-kerja. Kerja (produksi) tidak dianggap sebagai tidak pemenuhan kebutuhan (konsumen). namun sekedar sarana untuk memenuhi kebutuhan. Manfaat tenaga kerja tidak lagi ditemukan pada kemampuan untuk menghasilkan objek yang dapat memenuhi dan mengembangkan kebutuhan pekerja, tetapi sebagai benda

abstrak yang dapat dipertukarkan dengan upah. Pertukaran tersebut menyebabkan tenaga kerja sebagai komoditas.

2. Emile Durkheim

Untuk melihat gagasan sosiologi Durkheim mengenai produksi dapat ditelusuri dari bukunya "*The Division of Labor in Society*". Dalam buku itu, Durkheim menjelaskan tentang teori perubahan sosial dan mendiskusikan dua tipe masyarakat yaitu masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Masyarakat berlandaskan solidaritas mekanik dapat dirujuk pada masyarakat pedesaan dicirikan dengan pembagian kerja yang rendah, kesadaran kolektif kuat, individualitas rendah, hukum refresif dominan, pola normative sebagai consensus terpenting dalam komunitas, dan saling ketergantungan rendah. Sedangkan masyarakat yang berlandaskan solidaritas organik dirujuk pada masyarakat kota yang ditandai pembagian kerja yang tinggi, kesadaran kolektif lemah, individualitas tinggi, hukum restitutif dominan, nilai abstrak dan umum sebagai consensus terpenting dalam komunitas dan saling ketergantungan tinggi. Perbedaan kedua tipe masyarakat tersebut di atas sangatlah jelas. Durkheim, juga menjelaskan bawah terjadinya perubahan masyarakat dari mekanik menjadi masyarakat organik dimulai dari adanya penambahan penduduk disertai kepadatan moral. Maksudnya terjadi penambahan penduduk disertai penambahan komunikasi dan interaksi antara para anggota. Sehingga perjuangan hidup menjadi tajam. Menghindari terjadinya konflik maka diadakan pembagian kerja secara terspesialisasi.

3. Max Weber

Pemikiran sosiologi Weber tentang produksi dapat ditelusuri dalam bukunya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Dimana Weber dalam buku tersebut melihat hubungan *elective affinity*, yaitu hubungan yang memiliki konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat mendukung secara timbal balik, antara etika protestan dan semangat kapitalisme pada awal perkembangan kapitalisme modern. Ditemukan adanya aspek tertentu

dalam etika protestan sebagai perangsang yang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan sistem ekonomi kapitalis modern dalam tahap-tahap pembentukannya. Dalam pandangan Weber, dimana penganut protestan seperti Calvinisme dan Metodisme percaya pada konsep predistinasi yaitu gagasan bahwa keselamatan abadi di akhirat atau masuknya orang sorga telah ditentukan oleh Allah dan tidak dapat diubah oleh perbuatan baik atau buruk manusia dalam kehidupannya di muka bumi. Orang protestan menjadi gelisah dan tidak tinggal diam. Mereka mencari tahu tanda apa dia termasuk orang yang terpilih atau tidak terpilih untuk memperoleh keselamatan abadi atau masuk sorga. Pada masa awal, penganut protestan percayai bahwa kesuksesan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh pekerjaan adalah tanda dari terpilihnya mereka memperoleh keselamatan abadi. Dengan demikian pekerjaan ditempatkan sebagai suatu panggilan suci (*beruf* atau *calling*). Akibatnya secara logis, menghasilkan motivasi untuk setia terhadap pekerjaan, berprestasi dalam pekerjaan, membatasi konsumsi, dan gaya hidup yang rasional dan sistematis. Pola motivasi dari etika protestan tersebut mamiliki konsistensi logis dan saling mendukung secara motivasional dengan semangat kapitalisme modern yang sedang berkembang seperti akuntansi rasional, hukum rasional, dan teknik rasional.

b. Fokus kajian Sosiologi tentang Produksi

Seperti yang diterangkan mengenai pandangan dari tiga tokoh teori di atas yaitu Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber, produksi dapat dipahami sebagai suatu proses yang diorganisasi secara sosial dimana barang dan jasa diciptakan. Terkait dengan hal tersebut, adapun fenomena produksi yang menjadi fokus kajian sosiologi adalah sebagai berikut:

1. Kerja (ideologi, nilai, sikap, motivasi, dan kepuasan),
2. Faktor produksi (tanah, tenaga kerja, teknologi, kapital, dan organisasi),
3. Pembagian kerja,
4. Cara-cara produksi
5. Hubungan-hubungan produksi,
6. Proses teknologis (instrument, pengetahuan, jaringan operasi, kepemilikan)

7. Alienasi
8. Teknologi dan kerja
9. Pendidikan, teknologi, dan kerja

Pada dasarnya barang mempunyai dua jenis nilai yaitu nilai guna (*use value*) dan nilai tukar (*exchange value*). Nilai guna suatu barang dipahami sebagai nilai kebergunaan suatu barang atau keuntungan yang diberikan suatu barang ketika digunakan. Misalnya, nilai guna pakaian bagi manusia yang menjadi pelindung tubuh dari panasnya matahari ataukah dinginnya suhu pada malam hari. Seperti juga nilai guna suatu kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang membantu manusia dalam mempermudah perjalanannya dari suatu tempat ke tempat lain sebagai tujuan. Suatu barang juga memiliki nilai tukar, artinya nilai barang itu diperoleh ketika barang tersebut ditukarkan dengan barang lain. Misalnya, dua orang bersepakat menukarkan barang miliknya, orang pertama memberikan 150 m² tanah kepada orang kedua sebagai ganti dari sepeda motor, maka nilai tukar sepeda motor tersebut adalah 150 m² tanah. Nilai tukar dapat diukur atau dinilai berdasarkan barang berharga lain seperti emas atau dengan perantara medium pertukaran yaitu uang.

Menurut Sanderson, oleh Damsar bahwa sistem ekonomi itu sendiri cenderung diorganisasi, terutama, menurut salah satu dari dua jenis nilai ini. Pada masyarakat pra-kapitalis, produksi barang untuk nilai guna merupakan perhatian satu-satunya produsen. Barang diproduksi agar dapat dikonsimsi bukan agar dapat dipertukarkan dengan barang lain. Sebaliknya pada masyarakat kapitalisme modern, produksi ditujukan terutama untuk nilai tukarnya. Guna memperoleh sejumlah uang yang diterima produsen kapitalis atas barang yang dijual di pasar. Jelas juga bahwa barang-barang yang dijual itu memiliki nilai guna, jika tidak maka orang tidak akan membeli barang tersebut. Di sini sangatlah jelas bahwa barang-barang diproduksi oleh para produsen kapitalis untuk mendapatkan nilai tukarnya bukan nilai gunanya. Sehingga kapitalisme modern adalah suatu ekonomi produksi untuk dijual (*production for exchange economy*). Bukan untuk digunakan sendiri.

- c. Produksi dan sepanjang sejarah manusia
1. Produksi pada Masyarakat Prapitalis

Secara etimologis, kata kapitalis berasal dari kata “capital” yang akar katanya dari bahasa Latin “caput” berarti “kepala”. Berger oleh Damsar, istilah kapitalis dipahami pada abad ke-12 dan abad ke-13 adalah dana, persediaan barang, sejumlah uang dan bunga uang pinjaman. Sementara kapitalis menurut Berger (1990) oleh Damsar mengacu pada pemilik “kapital”. Menurut Max Weber oleh Damsar, seperti yang dikutip Berger konsep usaha kapitalis merupakan suatu kegiatan ekonomi yang ditunjukkan pada suatu pasar dan dipacu untuk menghasilkan laba dengan adanya pertukaran. Pasar yang dimaksudkan adalah suatu sistem pengaturan produksi dan distribusi barang untuk pertukaran bagi pencapaian tujuan memperoleh laba, keuntungan atau margin berdasarkan hukum permintaan dan penawaran.

Dari gambaran definisi yang diungkapkan Weber maka dapat dikatakan bahwa masyarakat prakapitalis merupakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak ditujukan untuk pasar dan tidak untuk menghasilkan laba melalui pertukaran. Menurut Polanyi dan kawan-kawan (1957) oleh Damsar ekonomi dalam masyarakat prakapitalis (aslinya mereka menggunakan konsep pra industri), melekat (*embedded*) dalam institusi sosial, agama, dan politik. Kehidupan masyarakat prakapitalis diatur oleh resiprositas, redistribusi, dan kerumahtanggaan (*householding*).

Suatu mekanisme pasar tidak boleh mendominasi kehidupan ekonomi, sehingga permintaan dan penawaran bukan sebagai pemebentuk harga, namun lebih kepada tradisi atau sebagai bentuk otoritas politik. Pada masyarakat prakapitalis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: masyarakat yang sudah dan masyarakat belum tersentu revolusi pertanian. Masyarakat yang sudah tersentuh revolusi pertanian adalah kelompok kecil; yang hidup berpindah-pindah, berkelana mencari makanan melalui meramu menangkap ikan, berburu dan peramu holtikultura sederhana dan holtikultura intensip. Dalam masyarakat pemburu dan peramu berkembang sistem komunisme primitive, sebagaimana yang dikatakan Karl Marx yaitu suatu jenis masyarakat dimana orang memenuhi kebutuhan subsistensinya dengan berburu dan meramu atau bentuk-bentuk pertanian sederhana dan semua sumber daya alam yang penting dimiliki bersama. Pada masyarakat

holikultura dimana terdapat kepemilikan oleh keluarga besar dan sebagainya berkembang menjadi kepemilikan oleh pemimpin (kepala suku, kepala adat, atau kepala wilayah). Mereka memiliki teknologi yang sangat sederhana. Masyarakat ini meramu hasil-hasil hutan (kemeyan, kamper, dll), menangkap ikan atau hewan buruan, membuat alat kerja pertanian yang sangat sederhana (tombak, busur, dan anak panah).

Masyarakat yang sudah tersentuh revolusi pertanian merupakan kelompok yang hidup dari sistem sosial ekonomi pertanian atau dikenal dengan istilah masyarakat agraris. Masyarakat ini sudah hidup menetap, membuat pemukiman, membuka dan mengembangkan lahan pertanian, membentuk desa dan mengembangkan gaya hidup baru. Dalam masyarakat ini telah berkembang sistem pemilikan modal, dari kepemilikan komunal menjadi kepemilikan oleh pemimpin, sebagai berlanjut pada kepemilikan pribadi. Teknologi yang dimiliki sudah berkembang ditandai dengan sudah adanya sistem irigasi, alat tenun bukan mesin (ATBM), peralatan kerja pertanian seperti bajak, cangkul, parang, tombak, dan sebagainya. Pada masyarakat ini mereka memproduksi berbagai hasil pertanian (sayur-sayuran, buah-buahan, dll), kerajinan rumah tangga (panci, cangkir, guci, dll), tenunan kain, dan peralatan kerja pertanian yang lebih canggih. Di Indonesia sebagian masyarakat pedesaan masih hidup dalam sistem ekonomi pertanian. Hal ini terlihat jelas dimana masyarakat hidup bertani yang menjadi warisan dari nenek moyang. Bertani dilakukan lebih kepada tujuan untuk bertahan hidup, walaupun ada hasil produksi yang dijual di pasar itu hanya merupakan bagian dari subtenansi untuk bertahan hidup, misalnya untuk biaya sekolah anaknya.

2. Produksi pada Masyarakat Kapitalis dan Pascakapitalis

Masyarakat kapitalis merupakan masyarakat yang dalam melakukan kegiatan ekonomi ditujukan untuk pasar dan menghasilkan laba serta mengakumulasi modal melalui pertukaran. Sistem ekonomi dikontrol, diatur, dan diarahkan oleh pasar itu sendiri. Pasar dianggap sebagai tempat penyediaan barang, termasuk jasa, dengan harga tertentu yang berdasarkan harga tadi akan memenuhi permintaan. Uang berfungsi sebagai daya beli berada di tangan pemiliknya.

Produksi dan distribusi dipercayakan kepada mekanisme mengatur diri sendiri (Self-regulation) dimana produksi di kontrol oleh harga. Perbedaan pengertian masyarakat kapitalis dan masyarakat pascakapitalis terletak pada landasan ekonomi industri yang berdasarkan pada Fordisme dan pasca-Fordisme. Masyarakat kapitalis berhubungan dengan fordisme dan masyarakat pascakapitalis berhubungan dengan pasca-Fordisme.

Fordisme, menurut Geogre Ritzer (2002) serta Ritzer dan Goodman (2003) oleh Damsar, merupakan gagasan, prinsip, dan sistem yang ditumbuhkembangkan oleh Henry Ford. Tokoh ini berjasa dalam mengembangkan sistem produksi massal modern, terutama melalui penciptaan sistem perakitan mobil secara bergilir (*assembly line*).

Ciri-ciri Fordisme yaitu:

- 1) Produksi Massal untuk Produksi Sejenis.
Fordisme melibatkan produksi homogen massal. Memproduksi secara banyak suatu barang yang sejenis yang dijual di pasar nasional, di pasar regional, bahkan di pasar global. Contoh sebuah pabrik mobil memproduksi suatu jenis mobil dengan model, warna dan seri secara massal.
- 2) Penggunaan Teknologi yang Tidak Fleksibel.
Ciri teknologi Fordisme adalah teknologi jalur perakitan (*assembly line*), yaitu suatu teknologi semi otomatis dimana setiap jalur memiliki spesifikasi pekerjaan dengan tingkat keterampilan tertentu seperti tukang pasang baut (mur), pasang pintu, pasang spion, pasang ban dan seterusnya sampai pada suatu jalur dimana suatu mobil sempurna diproduksi kemudian siap dipasarkan.
- 3) Adopsi Rutinitas Kerja Standar (*Taylorisme*)
Seorang buruh pekerja hanya memiliki keterampilan kerja tertentu yang terstandar. Misalnya, seseorang yang memasang ban motor, yang dikerjakan terus menerus sepanjang waktu dengan cara yang sama.
- 4) Peningkatan Produktivitas berasal dari Ekonomi Skala, serta Penghapusan Skill, Intensifikasi, dan Homogenitas Kerja.
Ekonomi skala yang dimaksudkan sebagai perusahaan besar menghasilkan sejumlah besar produk bisa

memproduksi tiap produk individu lebih murah dibandingkan perusahaan kecil yang menghasilkan barang dalam jumlah kecil. Penghapusan skill (keahlian) dipahami sebagai produktivitas meningkat bila banyak pekerja melakukan pekerjaan yang memerlukan sedikit skill bahkan tanpa skill (misalnya memasang ban mobil) dibandingkan apa yang terjadi pada waktu lalu, sedikit pekerja dengan skill tinggi yang melakukan seluruh pekerjaan. Intensifikasi adalah semakin menuntut dan cepat suatu proses produksi akan semakin tinggi produktivitas. Homogenitas kerja berarti tiap pekerja melakukan jenis kerja khusus yang sama.

- 5) Pertumbuhan Pasar Bagi Item Produksi Massal, yang Menimbulkan Homogenisasi Pola Konsumsi.

Fordisme menciptakan pertumbuhan pasar bagi homogen industri produksi massal akan menimbulkan homogenisasi pola konsumsi. Misalnya, pertumbuhan pasar nasional bagi mobil yang diproduksi massal dalam arti satu model, satu seri, dan satu warna, mendorong perkembangan pola konsumsi yang seragam (homogen).

- 6) Meningkatnya Pekerja Massal dan Serikat Pekerja yang Birokratis

Fordisme membutuhkan peningkatan pekerja massal seiring dengan kebutuhan dari pertumbuhan industri yang merespon pertumbuhan pasar terhadap produksi massal. Peningkatan jumlah pekerja massal menciptakan serikat pekerja yang birokratis.

- 7) Negosiasi Serikat Pekerja Mengenai Kesenyaman Upah Berkaitan Erat dengan Keuntungan dan Produktivitas

Fordisme melahirkan serikat pekerja yang berfungsi untuk menegosiasi upah yang seragam atas keuntungan dan produktivitas perusahaan yang sebagian disumbangkan oleh aktifitas pekerja.

- 8) Kenaikan Permintaan Atas Kenaikan Suplai Produk yang Diproduksi Secara Massal, Berkaitan dengan Unionisasi, Menyebabkan Kenaikan Upah

Fordisme menghasilkan produk massal dalam jumlah banyak oleh para pekerja. Peningkatan permintaan produk massal akan meningkatkan upah para pekerja.

- 9) Pasar Untuk Produk Dipengaruhi oleh Kebijakan Ekonomi Keynesian dan Pasar untuk Tenaga Kerja Ditangani Melalui Persetujuan Kolektif yang Diatur Pemerintah.

Menurut Sumitro Djojohadikusuma (1991) oleh Damsar, kebijakan ekonomi Keynesian dikenal sebagai *demand management*. Artinya kebijakan yang berpola pengelolaan terhadap pengeluaran agregatif dan pengendalian tentang permintaan efektif. Pasar tenaga kerja tidak diserahkan murni pada hukum pasar, yang dibangun oleh keadaan dari permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja, namun ditangani oleh suatu persetujuan kolektif yang melibatkan negara, serikat pekerja, dan perusahaan.

- 10) Lembaga Pendidikan umum Menyediakan Tenaga Kerja Massal yang Diperlukan oleh Industri

Fordisme menciptakan lembaga pendidikan umum yang mampu memasok tenaga kerja massal. Lembaga pendidikan umum memproduksi secara massal lulusan yang mampu menggerakkan industri Fordisme.

Pasca-Fordisme. Fordisme tumbuh sepanjang abad ke-20 khususnya di Amerika Serikat, ia mencapai puncaknya dan menurun di tahun 1970-an, khususnya setelah krisis minyak bumi tahun 1973, diikuti dengan penurunan industri mobil Amerika serta berkembangnya industri mobil Jepang sehingga menjadi pesaing potensial bagi produk mobil Amerika. Ini menurut Ritzer dan Goodman sebagai indikator kemerosotan Fordisme dan kemunculan pasca-Fordisme yang ditandai oleh:

- 1) Minat Terhadap Produk Massal Menurun, Minat Terhadap Produk Khusus Meningkat
- 2) Produk yang Lebih Terspesialisasi Memerlukan Jangka Waktu yang Lebih Pendek, yang Dapat Dihasilkan dalam Sistem yang Lebih Kecil dan Lebih Produktif
- 3) Produksi yang Lebih Fleksibel Menjadi Menguntungkan dengan Datangnya Teknologi Baru
- 4) Teknologi Baru Memerlukan Tenaga Kerja yang Selanjutnya Mempunyai Keterampilan yang Berbeda dan Pendidikan yang Lebih Baik, Lebih Bertanggungjawab dan Otonomi Makin Besar
- 5) Produksi Harus Dikontrol Melalui Sistem yang Lebih Fleksibel

- 6) Birokrasi yang Sangat Besar dan Tidak Fleksibel Perlu Diubah Secara Dramatis agar Beroperasi Lebih Lanjut
- 7) Serikat Pekerja yang Dibirokrasikan (dan Partai Politik) Tidak Lagi Memadai untuk Mewakili Kepentingan Tenaga Kerja Baru yang Sangat Terdiferensiasi
- 8) Perundingan Kolektif yang Terdesentralisasi Menggantikan Negosiasi yang Tersentralisasi
- 9) Tenaga Kerja Menjadi Semakin Terdiferensiasi dan Memerlukan Komoditas, Gaya Hidup, dan Saluran Kultural yang Makin Terdiferensiasi
- 10) Kejayaan Negara Tersentralisasi Tidak Lagi Dapat Memenuhi Kebutuhan Rakyat yang Berbeda-beda dan Diperlukan Lembaga yang Lebih Terdiferensiasi dan Lebih Fleksibel

Menurut Martin J Lee (2006) oleh Damsar, terdapat dua tipe ideal antara komoditas masyarakat kapitalis dan pasca-kapitalis. Berikut perbedaan tersebut:

- a) *Durabilitas versus Nondurabilitas*
Komoditi dalam masyarakat Fordisme ditekankan perketahanan usia atau tahan lama karena kuat atau tidak cepat rusak dari sisi komponen material produk seperti barang-barang elektronik, sedangkan pada masa pasca-Fordisme produk yang ditawarkan tidak lagi mengutamakan soal ketahanan usia.
- b) *Elektro-mekanis versus Elektro-mikro*
Pada masa Fordisme komoditas lebih banyak dikembangkan pada basis elektromekanis seperti mobil, radia, dan sebagainya. Sedangkan masa pasca-Fordisme berbagai komoditas berbasis elektro mikro dikembangkan seperti komputer, kamera, handphone, dan sebagainya.
- c) *Materi versus Ekperensial*
Pada masa Fordisme lebih ditekankan pada materinya, sedangkan pada masa pasca-Fordisme pada pengalaman terhadap komoditas.
- d) *Soliditas versus Fluiditas*
Komoditas produksi Fordis mengadopsi ideologi yang didalamnya ciri “soliditas” yaitu komoditas yang terkolonialisasi oleh aspek temporal dan spasial seperti telepon, televise, lemari es, dan sebagainya yang diikat oleh runag dan waktu. Sedangkan komoditas pasca-fordis

adalah barang yang disesuaikan dengan pembebasan dimensi temporal dan spasial yang sebelumnya relatif bersifat statis dalam kehidupan sosial. Dorongan kearah “*fluidisasi*” kehidupan sehari-hari yang terdapat dalam komoditas modern tampak dalam beberapa wujud seperti komoditas yang dapat digunakan diberbagai lokasi dan waktu seperti stereo pribadi, telepon seluler, kamera perekam, dan sebagainya.

e) Struktur *versus* *Fleksibilitas*

Selain soliditas, Fordisme juga mengandung ideologi struktur. Kekakuan struktural dalam organisasi produksi Fordisme dipecahkan dengan penemuan teknologi baru yang lebih fleksibel pada pasca-Fordisme. Sehingga organisasi produksi dan produk yang dihasilkan semakin fleksibel. Fleksibilitas komoditas ditunjukkan oleh adanya bonsainisasi/miniaturisasi komoditas yaitu membuat produk yang lebih kecil dalam hal ukuran fisik komoditas. Jadi, pada masa Fordisme suatu komoditas menempati ruang yang besar, sedangkan masa pasca-Fordisme telah terjadi kompresi spasial dari suatu produk sehingga kesannya produk bonsai.

f) Kolektif *versus* Individualitas

Pada masa Fordisme komoditas diproduksi secara massal yang ditujukan bagi kebutuhan yang dikonstruksi melalui media secara kolektif. Sedangkan masa pasca-Fordisme komoditas diproduksi bagi berbagai segmen pasar yang berbeda sehingga suatu produk mengalami perubahan bentuk, warna, dan ukuran sesuai dengan target pasar yang dibidik.

g) Homogen *versus* Heterogen

Masa Fordisme komoditas diproduksi secara massal yang bersifat homogen dalam ukuran, warna, dan fungsi. Pada masa Fordis belum mampu menghasilkan produk massal yang berbeda-beda. Sedangkan masa pasca-Fordisme komoditas diproduksi secara heterogenitas, dimana teknologi berkembang dengan pesatnya sehingga mampu menghasilkan produk dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, pernik, dan tambahan fungsi.

h) Terstandar *versus* Biasa

Semua komoditas yang diproduksi pada masa Fordis semua kegiatannya terstandar dalam ukuran, warna dan fungsi mulai dari input, proses sampai pada output. Sedangkan masa pasca-Fordisme, ukuran, warna, dan fungsi produk tidak lagi terstandar, namun tetap produk itu memiliki standar kualitas.

i) Perangkat keras versus Perangkat Lunak

Perangkat lunak pada masa pasca-Fordis berkembang pesat dibanding masa sebelumnya. Misalnya telepon seluler memiliki berbagai macam program yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan perangkat lunak yang ada. Masa Fordis komputer dan telepon lebih terkait dengan perangkat lunak saja.

j) Tetap versus Portabel

Masa Fordis komoditasnya bersifat tetap, artinya komoditas yang diproduksi secara massal terikat pada ruang sehingga harus berada tetap di ruang tersebut. Contoh, telepon pada Fordis tidak dapat dipindah-pindahkan kecuali kabelnya juga dipindahkan. Sedangkan, pasca-Fordis komoditas diproduksi dalam bentuk portabel melalui inovasi teknologi yang tidak terikat dengan ruang dan dapat dipindah-pindahkan seperti telepon seluler, radio, televisi, komputer, dan sebagainya.

k) Bertahan Lama versus Instan

Produk Fordis merupakan komoditas yang tahan lama, keunggulan produk dapat dipergunakan secara terus menerus dalam jangka waktu yang relatif panjang. Sedangkan masa pasca-Fordis komoditas diproduksi untuk masa yang relatif pendek, karena inovasi teknologi berkembang pesat, sehingga mampu memproduksi suatu barang terus menerus dengan berbagai model dalam bentuk, warna, dan fungsi. Sehingga produk pasca-Fordisme cepat usang atau ketinggalan zaman karena selalu diproduksi komoditas yang lebih terbaru.

l) Fungsi versus Bentuk

Fungsi menjadi hal utama ditawarkan pada konsumen, pengiklanan yang dilakukan perusahaan lebih menonjolkan keunggulan fungsi. Berbeda pada pasca-Fordis perusahaan menawarkan bentuk, warna, ukuran, pernik, dan asesoris dari komoditas yang ditawarkan kepada konsumen. Masa

pasca-Fordis, masyarakat tidak hanya melihat fungsi suatu barang tetapi lebih pada bentuk, warna, ukuran, pernik, dan asesoris dari produk tersebut disesuaikan dengan gaya miliknya.

m) Manfaat versus Gaya

Komoditas yang ditawarkan lebih diutamakan fungsinya daripada lainnya maka masa Fordis manfaat dari suatu produk lebih ditonjolkan kepada konsumen. Sedangkan masa pasca-Fordis gaya menjadi hal yang utama ditonjolkan kepada konsumen karena komoditas diproduksi harus memenuhi keinginan dan kebutuhan terhadap suatu gaya, terutama gaya hidup.

Produksi merupakan proses kegiatan ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) dan teknologi untuk menghasilkan barang maupun jasa yang dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dalam hal ini terjadi kerjasama atau solidaritas anggota masyarakat dalam melakukan proses produksi untuk mendapatkan barang dan jasa itu. Sebagaimana yang telah diterangkan bahwa produksi itu melalui suatu penginputan, proses pengolahan sampai pada output sehingga komoditas yang dihasilkan menjadi sempurna siap didistribusikan dan dikonsumsi masyarakat.

F. Karakteristik Produksi Masyarakat Industri

Marcuse yang dikenal juga sebagai perintis dari Mazhab Frankfurt juga melihat ciri perkembangan masyarakat industri saat ini. Menurutnya Marcuse ada tiga ciri masyarakat industri atau teknologi modern. *Pertama*, masyarakat berada di bawah kekuasaan prinsip teknologi. Suatu prinsip yang semua tekanannya dikerahkan untuk memperlancar, memperluas, dan memperbesar produksi. Kemajuan manusia disamakan dengan terciptanya perluasan teknologi. Kekuasaan teknologi sudah mencakup seluruh bidang kehidupan; tidak hanya melingkupi bidang ekonomi saja, melainkan juga bidang-bidang lain: politik, pendidikan, dan budaya. *Kedua*, masyarakatnya menjadi irasional secara keseluruhan, sebab terjadi kesatuan antara produktifitas dan destruktifitas. Kekuatan produksi tidak digunakan untuk perdamaian, melainkan untuk menciptakan potensi-potensi permusuhan

dan kehancuran, misalnya, untuk persenjataan. Semua pihak setuju jika anggaran senjata dan pertahanan perlu ditingkatkan, padahal ini tidak masuk akal. Namun demi kelangsungan pertahanan, anggaran militer harus terus bertambah. modern menampakkan sifat “rasional dalam detail, tetapi irasional dalam keseluruhan.” *Ketiga*, masyarakatnya berdimensi satu. Inilah ciri yang paling fundamental. Dalam segala kehidupan hanya diarahkan pada satu tujuan, yaitu meningkatkan dan melangsungkan satu sistem yang telah berlan, manusia tidak lagi memiliki dimensi-simenasi lain, bahkan dengan satu tujuan itu, pada dimensi lain dikesampingkan.

Sejarah telah mencatat bahwa manusia pada masyarakat industri modern memiliki kemungkinan yang objektif agar dapat merealisasikan pemuasan akan kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi, yang terjadi sesungguhnya, manusia tetap saja terhalang karena adanya suasana represif. Peran dan peluang ilmu dan teknologi memang sangat besar. Ukuran rasionalitas masyarakat adalah rasionalitas teknologis. Manusia dan masyarakat masuk ke dalam perangkat, penguasaan, dan manipulasi teknologi. Teknologi mampu menggantikan tenaga manusia bukan saja dalam bidang industri, namun juga dalam seluruh mata rantai kehidupan. Asal manusia dan masyarakat dapat dikuasai, digunakan, diperalat, dimanipulasi, atau ditangani, berarti manusia dan masyarakat sudah terjerat dalam sistem yang mutakhir ini.

Teknologi yang awalnya diciptakan sebagai alat emansipasi dari kekejaman alam sekarang malah dipakai untuk menindas dan merepresi manusia. Oleh karen aitu, hal yang paling menonjol dalam masyarakat adalah industri modern adalah toleransi represi, yaitu toleransi yang memberikan kesan seakan menyajikan kebebasan yang luas padahak maksudnya tidak lain dari pada menindas. Kemanusiaan, kebebasan, otonomi, kehidupan sosial, tidak diberi kesempatan, semuanya sudah menjadi alat. Masyarakat demikian, menurut Marcuse, lebih suka memertahankan *status-quo*, baik bagi penganut sistem kapitalisme maupun para penganut sistem sosialisme. Masyarakat modern juga tidak menunjukkan adanya penghapusan kelas. Bedanya, rakyat banyak (termasuk kaum buruh) mendukung kelangsungan sistem tersebut dan

sekaligus ikut dalam sistem yang sudah begitu mapan. Jika Marx mengeluh akibat pekerjaan yang berat dan membosankan, ditambah akibat dari upah kerja yang sangat rendah dari kaum pemodal. Maka Marcuse mengatakan kini kaum buruh tidak mengeluh lagi dengan kerja kerasnya karena terpuaskan kebutuhannya. Kaum buruh tidak lagi revolusioner, mereka sudah menjadi pada pembela sistem kerja itu sendiri.

Setidaknya ada lima karakter masyarakat satu dimensi seperti dijelaskan oleh Marcuse. *Pertama*, Administrasi Total. Dari sejumlah kemajuan hebat dan keberhasilan terbesar yang diraih sistem kapitalis yang bertumpu pada keunggulan teknologi adalah kemampuan penguasa kapitalis mengalihkan dominasi ke dalam administrasi total. Administrasi total merupakan strategi pengaturan dan pengelolaan yang bertujuan mengharmoniskan pemusatan dan penyatuan kekuatan sosial, politik, ekonomi, militer, dan budaya ke dalam satu tangan. Sarana yang dimanfaatkan adalah menciptakan “musuh bersama” nasional guna memaksa semua warga agar memerlukan yang tidak diperlukan dan mengorbankan yang harus dilindungi dan dilestarikan. *Kedua*, Bahasa Fungsional. Medium utama administrasi total adalah bahasa, mengingat subjek utama yang dihadapi, diatur, dan dikelola adalah manusia. Bahasa merupakan ungkapan kemampuan berpikir dan proses perwujudan potensi individu. Karena itu, hal utama yang perlu digarap dalam upaya penaklukan total dan tuntas adalah pembentukan wacana berpikir, cara berkomunikasi, dan berwicara. Rezim kapitalis ingin mengubah wacana prateknologi dan memberikan muatan baru yang lebih sesuai dengan realitas teknologis dengan menciptakan bahasa sendiri: bahasa fungsional. *Ketiga*, Penghapusan Sejarah. Dalam hidup menyejarah, nalar manusia mengambil dua sikap yang berbeda. Di satu pihak, ada kontinuitas gerak dialektis nalar dalam rangka mengenal, mengerti, memahami, dan mengolah fakta, data, dan peristiwa. Kontinuitas mengacu pada karya nalar sebagai kemampuan yang otonom dan transenden. Di pihak lain, terdapat diskontinuitas sejarah nalar berada dalam kesatuan dengan badan. Dalam kesatuan ini, nalar terikat dengan ruang dan waktu sehingga aktifitasnya tunduk pada hukum sebelum dan sesudah, di sana dan di sini, kini dan

nanti. Berangkat dari pemakaian bahasa fungsional sebagai bahasa tunggal dalam masyarakat kapitalis, pernyataan Marcuse bahwa pemaksaan makna tunggal bahasa dalam semesta wacana merupakan keputusan dan tindakan politis, bukan sekadar persoalan dunia akademis, mendapat pembenarannya.

Promosi dan aplikasi bahasa fungsional yang bersikap anti oposisi dan selalu alergi pada kekaburan dan perbedaan makna merupakan strategi penguasa untuk menguasai kesadaran dan menutup ruang perbedaan dalam waktu. Secara sosial, bahasa fungsional memuat kandungan ideologis, sehingga menjadi bahasa anti historis yang radikal, dan radikalitas demikian memuat dan mengalir dari rasionalitas operasional yang cenderung menafikan relasi masa lampau dan masa kini. *Keempat*, Kebutuhan Palsu. Kebutuhan palsu merupakan suatu keperluan yang dibebankan oleh aneka kepentingan sosial tertentu kepada semua individu dengan maksud menindas dan menggerogoti mereka. Sekarang ini, terpampang jelas propaganda sistematis dan kontinu untuk semua kebutuhan palsu yang dijejalkan. Propaganda kebutuhan palsu dilakukan lewat aneka macam promosi, pameran dan iklan mengenai merek dagang, tempat wisata, pusat perbelanjaan, mode, apartemen, lokasi perumahan, ponsel, komputer, kendaraan bermotor, dan peralatan rumah tangga, hingga beragam jenis kursus. *Kelima*, Imperium Citra. Dewasa ini, citra (*image*) menjelma menjadi mantra gaib yang menyusup ke segala sisi kehidupan individu dan masyarakat, bahkan memainkan peranan besar dalam dunia politik dan kekuasaan. Para pemimpin negara, kandidat yang bersaing guna merebutkan posisi sebagai presiden atau perdana menteri dan jabatan di bawahnya menaruh perhatian yang besar terhadap citra. Mereka sungguh serius merawat citra dirinya sebagai *public figure* dan sering berperilaku bagaikan selebritas dari dunia *entertainment*. Lebih parah lagi, dominasi citra merasuk pula ke wilayah praksis kekuasaan dan menjadi bahan pertimbangan utama dalam keputusan politik dan kebijakan pemerintah yang tergambar dalam istilah populis dan tidak populis.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa realitas sosial Herbert Marcuse telah memasuki tahap

kontemporer. Dalam tahap kontemporer realitas sosial tidak lagi dipandang sebagai kenyataan abadi seperti tahap parenial, melainkan menghindari asumsi yang bersifat metafisik. Tahap kontemporer juga berbeda dengan tahap dinamis-historis yang memandang realitas sosial selalu berkembang secara historis, melainkan memadukan unsur teknologi, bahasa, dan unsur kebudayaan lainnya. Pandangan Marcuse tentang realitas sosial masyarakat industri seperti sekarang ini terpengaruh mulai dari aspek teknologi yang menindas manusia sampai manipulasi bahasa. Oleh karena itu realitas sosial masyarakat bagi Herbert Marcuse tak bisa lepas dari cengkaman kapitalisme yang telah berkembang menjadi *late capitalism*.

G. Sistem Produksi dan Operasi

Manajemen produksi dan operasi merupakan manajemen dari suatu sistem informasi yang mengkonversikan masukan (*inputs*) menjadi keluaran (*outputs*) yang berupa barang atau jasa. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi produksi dan operasi memerlukan serangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem. Sistem produksi dan operasi mempunyai unsur, yaitu masukan, pertransformasian dan keluaran. Sedangkan produksi dan operasi suatu sistem untuk menyediakan barang-barang dan jasa yang dituhkan dan akan dikombinasikan oleh anggota masyarakat, maksudnya adalah suatu rangkaian unsur-unsur yang saling berkaitan dan tergantung serta saling mempengaruhi antara yang satu dengan lainnya yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan sistem produksi dan operasi adalah suatu keterkaitan unsur-unsur yang berbeda secara terpadu, menyatu dan menyeluruh dalam proses transformasi masukan menjadi keluaran. Sistem produksi tidak hanya dimiliki pada sektor industri manufaktur, namun terdapat juga dalam sektor jasa, seperti perbankan, asuransi, pasar, swalayan dan rumah sakit. Dalam sebuah sistem produksi dan operasi pada industri jasa menggunakan bauran yang berbeda dari masukan yang dipergunakan dalam industri manufaktur, contohnya perusahaan telekomunikasi dalam pengoperasiannya akan membutuhkan modal untuk suku cadang dan komponen elektronik serta peralatan yang terdapat dalam suatu

bangunan, disamping peralatan transmisi suara melalui kabel, menara microwave, station, computers dan operasi operator. Contoh sistem produksi dan operasi adalah sebagai berikut: dalam sistem produksi mempunyai masukan dapat berupa bahan baku, komponen atau bagian dari produk, barang setengah jadi, formulir-formulir, para pemesan atau langganan dari para pasien. Keluaran dari sistem produksi dapat berupa barang jadi, bahan-bahan kimia, pelayanan kepada pembeli dan pasien. Formulir-formulir yang telah selesai diisi dan diproses. Sistem produksi yang sering dipergunakan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Proses produksi yang kontinyui (*continuous proses*)
Dalam peralatan produksi yang digunakan disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan-urutan kegiatan atau *routing* dalam menghasilkan produk tersebut, serta arus bahan dalam proses telah distandarkan.
2. Proses produksi yang terputus-putus (*intermittent proses*)
Dalam sebuah kegiatan produksi dilakukan tidak standar, tetapi didasarkan pada produk yang dikerjakan, sehingga peralatan yang digunakan disusun dan diatur dapat bersifat lebih luwes, untuk dapat dipergunakan untuk menghasilkan berbagai produk dan berbagai ukuran.
3. Proses produk yang bersifat proyek
Kegiatan produksi dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda, sehingga peralatan produksi yang digunakan ditempatkan di tempat atau lokasi di mana proyek tersebut dilaksanakan dan pada saat yang direncanakan.

Setiap sistem dari sub-sistem yang lebih kecil, sehingga dalam perusahaan sebagai suatu organisasi, sistem pengorganisasiannya terdiri dari beberapa sub-sistem berupa sub-sistem fungsional.

Sekurang-kurangnya ada macam subsistem dalam perusahaan yang dapat dibedakan yaitu :

1. Sistem Perumusan Kebijakan (*Policy Formulating System*)

Fungsinya adalah menyelarakan kebijaksanaan organisasi perusahaan yang mendasar dan menyeluruh dengan memproses dan mengolahserta menganalisis informasi yang mencerminkan keadaan perusahaan dan lingkungan sekarang ini , keadaan di masa depan bagi pencapaian

tujuan dan sasaran perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Sistem Pengendalian Umum (*General Control System*).

Fungsi utamanya adalah mengubah dan mentransformasikan informasi untuk dasar pengukuran, pengevaluasian dan pemantauan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan, strategi dan program perencanaan serta sekaligus memberikan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk perbaikan atau koreksi agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai.

3. Sistem Pengorganisasian Antara (*Intermediate Organisasi System*)

Fungsinya adalah untuk memberikan dukungan pelayanan yang dibutuhkan oleh subsistem yang terdapat dalam organisasi perusahaan atau sekaligus mendukung sistem organisasi perusahaan. Dukungan pelayanan yang terkait dengan fungsi dari sistem ini termasuk pengendalian, pelimpahan wewenang, penyampaian saran dan keputusan serta dukungan pelayanan lainnya.

Proses Transformasi informasi pada sistem produksi dan operasi dapat dilakukan dengan menggunakan model-model matematis, yang guna menggambarkan dan memprediksi hubungan fungsi-fungsi yang ada dalam sistem produksi dan operasi. Misalnya dalam penggunaan model-model matematis dalam sistem produksi dan operasi terdapat dalam pecahan optimisasi produksi, optimisasi biaya produksi, optimisasi persediaan, optimisasi keseimbangan kapasitas dan lain-lain. Model-model yang digunakan sangat bermanfaat bagi penganalisaan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

H. Proses Produksi

Kegiatan utama dalam manajemen produksi adalah proses produksi. Sebelum membahas proses produksi, sebaiknya kita perlu mengetahui arti dari proses dan produksi. Proses adalah cara, metode dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin dan dana) yang ada diubah untuk memperoleh hasil yang ada di rubah untuk memperoleh suatu hasil. Sedangkan produksi adalah kegiatan untuk menciptakan

atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa, jadi proses produksi dapat diartikan sebagai cara, metode dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja mesin, bahan-bahan dan dana) yang ada, jenis-jenis proses produksi itu sengaja banyak. Tetapi pada umumnya terdapat dua. Jenis-jenis produksi, yaitu:

1. Proses produksi terus menerus (*continuous Processes*), ada suatu proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan
2. Produksi terputus-putus (*intermittent processes*)
3. Proses produksi terputus-putus (*intermittent processes*) adalah proses produksi dimana arus proses yang ada dalam perusahaan tidak selalu sama.

Ada ciri-ciri proses produksi terus-menerus adalah produksi dalam jumlah besar (produksi massa), variasi produk sangat kecil dan sudah distandarisasi

- 1) Menggunakan produk *lay out* atau *departmentation by product*.
- 2) Mesin bersifat khusus (*special purpose machines*)
- 3) Operator tidak mempunyai keahlian/skill yang tinggi
- 4) Salah satu mesin/peralatan rusak atau terhenti, seluruh proses produksi terhenti
- 5) Tenaga kerja sedikit
- 6) Persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses kecil.
- 7) Dibutuhkan *maintenance specialist* yang berpengetahuan dan berpengalaman yang banyak.
- 8) Perpindahan bahan dengan peralatan handling yang fixed (*fixed path equipment*) menggunakan ban berjalan (*conveyor*)

Adapun kebaikan proses produksi yang terus-menerus adalah:

- a) Biaya per-unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisasi
- b) Biaya tenaga kerja rendah
- c) Biaya perpindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek.

Sedangkan kekurangan proses produk terus menerus adalah:

- 1) Terdapat kesulitan dalam perubahan produk
- 2) Proses produksi sudah terhenti sehingga menyebabkan kemacetan pada setiap proses produksi.
- 3) Pemerintah kesulitan menghadapi tingkat permintaan
Ada beberapa ciri dalam proses produksi yang terputus-putus, yaitu:
 - a. Produksi yang menghasilkan dalam jumlah kecil, variasi sangat besar dan berdasarkan pesanan
 - b. Menggunakan *process lay out* (*depatementatiom of equipment*)
 - c. Menggunakan mesin-mesin bersifat umum (*general pupose machines*)
 - d. Operator mempunyai keahlian yang tinggi
 - e. Proses produksi tidak mudah berhenti walaupun terjadi kesusakan di salah satu mesin
 - f. Menimbulkan pengawasan yang lebih sukar
 - g. Persediaan bahan mentah tinggi
 - h. Perpindahan bahan dengan peralatan handling yang *flexile* (*waried path equipment*) menggunakan tenaga manusia seperti kereta dorong (*forklift*)
 - i. Membutuhkan tempat besar.

Sedangkan kelebihan yang terputus-putus, yaitu:

 - a) Flesibility yang tinggi dalam menghadapi perubahan produk yang berhubungan dengan *process lay out* , mesin bersifat umum (*general pupose machines*), sistem pemindahan menggunakan tenaga manusia.
 - b) Diperoleh penghematan uang dalam investasi mesin yang bersifat umum
 - c) Proses produksi tidak meudah terhenti, walaupun ada kerusakan di salah satu mesin
Sedangkan kerurangan dari proses produksi yang terputus-putus adalah:
 - a) Dibutuhkan scheaduling, routing yang banyak karena produk berbeda tergantung pemesan
 - b) Pengawasan produksi sangat sukar dilakukan
 - c) Persediaan bahan mentah terbatas dan dalam proses cukup besar
 - d) Biaya tenaga kerja dan pemindahan bahan sangat tinggi, karena menggunakan tenaga kerja yang banyak dan tenaga ahli.

I. Teori Sistem Produksi Masyarakat Industri

Sosiologi memusatkan perhatian kepada tindakan-tindakan manusia yang terbingkai dalam sejumlah aturan-aturan yang dibangun oleh sekumpulan manusia itu sendiri. Tindakan manusia juga terbingkai di dalam struktur sosial. Namun sosiologi juga memperhatikan aspek yang bersifat dinamis dari suatu tindakan, individu mempunyai kemungkinan untuk mengelola suatu tindakannya, perspektif ini akan membuat sosiologi bersifat medua (ganda). Meskipun demikian, diantara keduanya terdapat keterkaitan yang sangat erat. Perkembangan sosiologi tidak bisa terlepas dari pemikiran para tokoh sosiologi klasik yang banyak memberi sumbangan berharga melalui pengamatan mereka terhadap perubahan-perubahan besar dalam masyarakat.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai materi di atas konsep-konsep penting antara lain: Revolusi industri dan berbagai revolusi sosial politik lainnya di negara Eropa menghasilkan beragam cara pandang di antara para sosiolog klasik mengenai perkembangan kapitalisme, rasionalisme, serta perubahan struktur sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi baik di tingkat masyarakat maupun khususnya di dalam organisasi kerja memberi sumbangan yang berarti bagi pengembangan sosiologi industri.

Sosiologi Industri memiliki cakupan teori yang sangat luas. Ada tiga penyebab luasnya cakupan tersebut. Pertama, cakupan subsansi yang dibahas di dalam sosiologi industri yang cukup luas. Kedua, adanya perbedaan pada tingkat analisis yang menghasilkan keragaman berbagai teori. Yang ketiga, karena teori-teori yang digunakan dalam sosiologi industri memiliki keragaman berdasarkan asal pemikirannya. Luasnya cakupan seluruh teori yang digunakan dalam analisis sosiologi industri itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga katagori. Pertama, pendekatan non sosiologis. Kedua pendekatan sosiologis. Ketiga, pendekatan hubungan industrial.

Pendekatan non-sosiologis dipelopori oleh hadirnya teori-teori yang memiliki basis analisis psikologis. Pertama dan yang paling populer adalah manajemen ilmiah atau tylorisme, kedua adalah psikologi-manajerial. Sementara teori-teori yang berbasis pada pendekatan sosiologis dapat dilihat dari teori

Durheim yang berpengaruh terhadap katagori teori hubungan antara manusia dari Elton Mayo, teroti Dunlop. Begitu juga teori Max Weber dan Karl Marx, sedangkan teori-teori yang berdekatan hubungan industrial, terbagi ke dalam kelompok pemikiran unitaris, plularis dan dan faham radikal.

Adapun beberapa teori yang akan dijelaskan di bawah ini, antara lain: Sistem Produksi, Sistem Produksi Primer, Gilda, dan *Putting-Out*

1) Sistem Produksi Primer

Sistem produksi primer banyak terdapat pada masyarakat agraris, biasanya terdiri dari suatu keluarga luas yang terdiri dari generasi pertama sampai generasi berikutnya. Kedudukan mereka dalam pekerjaan ditentukan oleh pertalian darah.

Pembagian kerja rendah, lebih pada aspek jenis kelamin dan usia. Hubungan pada mereka bersifat sosial. Pekerjaan sistem produk sepenuhnya terhantung pada kebaiukan alam. Dimana seluruh hasil produksi untuk kepentingan konsumsi, persediaan pada musim paceklik dan dibarter dengan kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Sistem produksi ini lebih ditunjukkan untuk ketercukupan sandang, pangan dan papan. Sistem ini tergantung pada pihak lain karena tanah yang dikelola bukan miliknya sendiri atau pertimbangan kemanan.

2) Sistem Produksi Gilda

Sistem pertanian Gilda berukuran lebih kecil dari sistem produksi Primer, dimana merupakan sarana perlarian bagi petani karena berbagai alasan. Namun pada prinsipnya petani yang datang Gilda harus diterima dan biasanua mereka sudah memiliki keterampilan. Gilda dipimpin oleh seorang master (Tua) yang memiliki keterampilan, modal, alat dan mereka cenderung mengembangkan. Mater mengendalikan hidup dari barang-barang sekunder shingga mater harus membuat barang yang berkualitas dan berstandar yang harus laku jual di pasaran, karena itu sehingga sifat dasar gilda menjadi tinggi. Setiap jenis Gilda membentuk asosiasi induk untuk tujuan tententu. Sifat kekeluargaan dalam Gilda cukup baik, bahkan kadang-kadang terjadi perkawinan anak mater dengan karyawan Gilda. Seiring dengan perjalanan waktu, gilda menjadi

lemah karena beberapa faktor, antara lain terhambatnya monolitas vertikal kawyawan untuk menjadi master, dan terjadi kopetisi yang tidak sehat, sejumlah gilda menjadi kaya raya, ada beberapa gilda yang menjadi pedagang dan luasnya pasar di luar negeri yang menjadikan gilda semakin tergantung pada pedagang ekspor.

3) Sistem Produksi *Putting-Out*

Dengan banyaknya saudagar yang kaya raya serta semakin besar. Kekayaan diperoleh dari perdagangan luar negeri, jarahan dari negara jajaham, monopoli perdagangan, serta hancurnya gilda di dalam koloni. Dengan semakin besarnya pasar di luar negeri, gilda tidak dapat mencukupi pasar, sehingga pedagang memanfaatkan petani. Pada mulanya petani harus menyediakan alat dan modal sendiri, namun dalam perkembangan selanjutnya, alat, modal dan pemasaran ditangani pedagang, sistem produksi *Putting out* hancur karena sulitnya mengontrol tepatnya penyelesaian produksi, serta beragam waktu dalam penyelesaian produksi, semakin sulitnya melakukan pengawasan serta sulitnya menekan biaya produksi atau meningkatkan produksi

4) Sistem Produksi Prabrik

Sistem produksi pabrik muncul seiring dengan munculnya industri. Begitu juga dengan penemuan mesin-mesin memudahkan pekerjaan bagi manusia sehingga terjadi efesiensi biaya dan tenaga manusia serta semakin meningkatnya kualitas produksi.

Terdapat beberapa keuntungan bila suatu pekerjaan dibagi dalam banyak bagian, yaitu pekerjaan kecil dan sederhana dapat dikerjakan semua orang, maka produktivitas setiap pekerja menurut satuan pekerjaannya akan menjadi meningkat dan produktivitas akhir setiap pekerja meningkat pesat. Tentu sistem produksi pabrik akan berbeda dengan sistem produksi primer, gilda dan *putting-out* pada fakta bahwa seluruh modal, alat dan mesin sampai pemasaran sepenuhnya dikuasai oleh pemegang modal sehingga pengusaha mempunyai posisi tawar yang kuat. Maka bisa mengerti bila orientasi pokok pengusaha hanya tertuju pada kapasitas pemahaman bagaimana orang dapat terus memupuk dan meningkatkan investasinya. Hubungan

antara karyawan dan pengusaha bersifat formal. Untuk menekan ongkos produksi, pengusaha tidak segan-segan memperkerjakan wanita dan anak-anak.

BAB VII

SISTEM KERJA MASYARAKAT INDUSTRI

Pada bab tujuh membahas tentang Sistem Kerja Masyarakat Industri, yang terdiri: Pengertian Sistem Kerja Masyarakat Industri, Karakteristik Kerja Masyarakat Industri, Perbaikan Sistem Kerja, Sistem Kerja Lembur dan Dampak Yang Ditimbulkannya, dan Sistem Upah dan Kerja Lembur (*overtime*) dan Dampaknya.

A. Pengertian Sistem Kerja Masyarakat Industri

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “*system*” yang artinya himpunan, bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Sistem memiliki pengertian suatu sari atai rangkaian yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung sedemikian rupa sehingga interaksi dan saling memperngaruhi dari satu bagian akan memperngaruhi secara keseluruhan. Contohnya, sistem lampu di motor jika salah satu bagiannya tidak berhubungan (putus) maka lampu tidak akan menyala. Sistem kerja adalah serangkaian dari beberapa pekerjaan yang berbeda kemudian dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang menghasilkan pelanggan atau keuntungan perusahaan/organisasi. Sistem kerja melibatkan banyak faktor manusia dan adanya keterkaitan pola kerja manusia dengan alat atau mesin, faktor-faktor yang dikombinasikan antara manusia dan alat tersebut suatu prosedur atau tahapan kerja yang sudah tetap dan di dokumentasikan sehingga menghasilkan suatu sistem kerja yang konsisten dan dapat menghasilkan hasil kerja yang berkualitas.

Dalam seluah perusahaan kita mengenal apa yang disebut sisdur atau sistem prosedur kerja yaitu bagaimana cara mengatur perusahaan yang kita miliki tata kerja merupakan cara melaksanakan suatu pekerjaan dengan !enar dengan cara yang efektif dan efsien. Prosedur merupakan suatu tahapan dalam tata kerja yang haarus dilakukan oleh suatu pekerjaan !aik asal pekerjaan dan tujuan akhir dari pekerjaan itu sendiri akaan harus selesai dan memakai peralatan ada saja dan keada siapa saja kita terhubungan. Sistem merupakan susunan antara tata kerja dengan prosedur yang menjadi satu sehinggaa

membentuk pola tertentu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam perencanaan sistem kerja adalah suatu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik untuk mendapatkan rancangan sistem kerja yang terbaik. Ilmu ini merupakan salah satu ilmu dalam disiplin teknik industri, bahkan di lihat dari sejarahnya. Perencanaan sistem kerja merupakan cikal bakal disiplin ini. Dalam penerapannya sistem kerja akan berinteraksi dengan berbagai ilmu lain di dalam disiplin teknik industri untuk secara bersamaan mencapai keadaan optimal dari suatu sistem produksi, dalam arti kata yang luas yaitu sistem yang terdiri dari komponen manusia, bahan, mesin, peralatan dan uang. Sebagai ilmu, perencanaan sistem kerja mempunyai kerangka tersendiri dengan bagian-bagiannya yang secara bersama-sama terpadu untuk mencapai tujuan. Perancangan sistem kerja sebagaimana dikemukakan FW. Taylor dan FB. Gilberth sekalipun tidak secara bersamaan yang dikenal sebagai perancangan kerja atau *Methods Engineering*. Perencanaan ini dilakukan dengan memperhatikan pada beberapa aspek seperti: teknologi, Psikologis dan sosiologis kerja sehingga diperoleh sistem kerja yang lebih sesuai dengan kemampuan serta keterbatasan manusia.

Menurut FW. Taylor dan FB. Gilberth, dalam pengembangan teknik kerja dikemukakan sebagai berikut:

1. FW. Taylor (1981). Memperhatikan para pekerja dan menilai mereka tidak berprestasi maksimal. Taylor dengan menggunakan sistem jam henti (*stopwatch*) untuk melakukan pengukuran waktunya. Pengukuran waktu ini dikembangkan terus sampai dikenal istilah waktu/standar untuk suatu pekerjaan. Dalam penentuan waktu bagi suatu pekerjaan sangatlah penting bagi sistem produksi, yakni: upah perangsang, penjadwalan kerja dan mesin pengaturan tata letak pabrik.
2. FB. Gilberth
Melakukan penelitian terhadap gerakan-gerakan dan membaginya menjadi sejumlah elemen-elemen gerakan. Misalnya gerakan tangan mengambil sebuah gelas diurai menjadi elemen-elemen yang menjangkau, memegang, dan mengangkat. FB. Gilberth bernama Lilian yang juga seorang psikolog mereka mengembangkan serangkaian

prinsip perancangan system kerja yang dikenal dengan ekonomi gerakan. Adapun tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu sistem kerja yang terencana dengan baik. Sehingga memudahkan dan menyamankan gerakan-gerakan kerja untuk menghindari atau melambatkan datangnya kelelahan (*fatigue*). Dalam proses produksi, perancangan kerja bukan suatu yang mudah. Kesalahan dalam perancangan maupun metode kerja akan berdampak pada proses secara keseluruhan. Untuk itu, evaluasi perancangan kerja harus dilakukan secara berkesinambungan dengan metode yang terbaik.

Oleh karena itu, perancangan sistem kerja merupakan bagian yang sangat penting dan harus diperhatikan untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Untuk mencari system kerja terbaik, kita harus menganalisa masalah-masalah yang mungkin muncul. Langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendefinisikan masalah
- b. Menganalisa masalah
- c. Mencari alternative solusi
- d. Mengevaluasi alternative solusi
- e. Mengimplementasikan solusi

Untuk melakukan Penganalisaan Sistem Kerja diperlukan Komponen pembentuk system kerja antara lain : 1) Manusia, 2) Bahan 3) Mesin 4) Lingkungan Kerja dan 5) Ergonomi. Perancangan Sistem Kerja ini tidak lain tidak bukan untuk mewujudkan Sistem Kerja yang EASNE-P :

- a. Efektif: Output dari sistem kerja dapat memenuhi kebutuhan/menjawab tujuan. (*Are we doing the right things*)
- b. Efisiensi: Sistem kerja dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan, dengan sumber daya yang paling minimum (*Are we doing things right?*). Rasio antara output/input yang tinggi. Lebih cepat, lebih murah.
- c. Aman: tidak menyebabkan kecelakaan kerja
- d. Sehat: tidak menyebabkan penyakit kronis
- e. Nyaman: membuat pekerja menjadi betah (psikologis), hubungan sosial, semangat kerja, tidak monoton, tidak membosankan.
- f. Produktif: hasil kerja yang berkualitas

B. Karakteristik Kerja Masyarakat Industri

1. Kohesifitas Masyarakat Industri

Masyarakat industri menurut Straubhaar dan LaRose (2004) adalah masyarakat industri mengacu pada terjadinya revolusi industri, yang umumnya dikaitkan dengan penemuan mesin uap. Namun sesungguhnya, pemicu penting menuju era industri dimulai dengan penemuan dibidang komunikasi, yakni publikasi Bible yang diproduksi dengan mesin cetak pengembangan dari Johannes Gutenberg (1455). Manusia cenderung bersifat dinamis selalu ada perubahan yang terjadi pada setiap diri manusia. Semakin meningkatnya kebutuhan hidup sedangkan sumber daya alam yang tersedia semakin menipis dan lahan kerja yang tidak memadai, keterbatasan lahan perkotaan untuk migrasi, pemerataan pembangunan dan penghematan biaya produksi menyebabkan munculnya keinginan untuk menciptakan hal baru yang dapat meningkatkan taraf hidup manusia yang lebih baik dengan mengubah pola hidup.

Perubahan yang paling sederhana tampak secara nyata adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan kawasan perumahan yang tentu berdampak pada beralihnya profesi masyarakat pertanian beralih ke profesi lain. Hal ini akan berpengaruh pada pola hidup, mata pencaharian, perilaku maupun cara berfikir. Masyarakat dan kebudayaan memang saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena kebudayaan merupakan produk dari masyarakat. Pengaruh yang nantinya akan membuat perubahan umumnya terjadi karena adanya tuntutan situasi sekitar yang berkembang. Sehingga, masyarakat yang awalnya masyarakat pertanian lambat laun berubah menjadi masyarakat industri. Perubahan sosial terjadi karena adanya kondisi-kondisi sosial primer, misalnya kondisi ekonomi, teknologi, geografi dan biologi. Kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya.

Herbert Marcuse dikenal sebagai seorang inspirator dari sebuah gerakan yang disebut gerakan "Kiri Baru" (The New Left), doktrin Marcuse tentang sistem politik dan sistem sosial dinilai lebih radikal dari kaum komunis ortodoks. Para

pengikutnya malah menjulukinya sebagai seorang “Nabi” dianggap menjadi inspiratory revolusi mahasiswa tahun 1068. Marcuse dikenal juga sebagai perintis dari mashab Frankfurt juga melihat ciri perkembangan masyarakat industri saat ini. Menurutny ada tiga ciri pada masyarakat Industri:

Pertama, masyarakat berada di bawah kekuasaan prinsip teknologi. Suatu prinsip yang semua tekanannya dikerahkan untuk memperlancar, memperluas, dan memperbesar produksi. Kemajuan manusia disamakan dengan terciptanya perluasan teknologi. Kekuasaan teknologi sudah mencakup seluruh bidang kehidupan; tidak hanya melingkupi bidang ekonomi saja, melainkan juga bidang-bidang lain: politik, pendidikan, dan budaya.

Kedua, masyarakat menjadi irasional secara keseluruhan, karena terjadinya kesatuan antara produktifitas. Kekuatan produksi tidak digunakan untuk mendamaikan, melainkan menciptakan potensi-potensi permusuhan dan kehancuran, contohnya untuk mempersenjatai, semua pihak setuju jika anggaran senjata dan pertahanan perlu ditingkatkan, padahal yang demikian hal yang tidak masuk akal. Namun demi kelangsungan pertahanan, anggaran militer harus terus bertambah. kemodernan menampilkan sifat yang “rasional dalam detail, tetapi irasional dalam keseluruhan”.

Ketiga, masyarakatnya berdimensi satu. Inilah ciri yang paling fundamental. Segala segi kehidupannya hanya diarahkan pada satu tujuan, yaitu meningkatkan dan melangsungkan satu sistem yang telah berjalan. Manusia tidak lagi memiliki dimensi-dimensi lain, bahkan dengan satu tujuan itu, dimensi-dimensi lain disingkirkan.

Sejarah telah mencatat bahwa manusia pada masyarakat industri modern memiliki kemungkinan yang objektif agar dapat merealisasikan pemuasan akan kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi, yang terjadi sesungguhnya, manusia tetap saja terhalang karena adanya suasana represif. Peran dan peluang ilmu dan teknologi memang sangat besar. Ukuran rasionalitas masyarakat adalah rasionalitas teknologis. Manusia dan masyarakat masuk ke dalam perangkap, penguasaan, dan manipulasi teknologi. Teknologi mampu menggantikan tenaga manusia bukan saja dalam bidang industri, namun juga dalam seluruh mata rantai kehidupan.

Asal manusia dan masyarakat dapat dikuasai, digunakan, diperalat, dimanipulasi, atau ditangani, berarti manusia dan masyarakat sudah terjatuh dalam sistem yang mutakhir ini. Teknologi yang pada awalnya diciptakan sebagai alat emansipasi dari kekejaman alam, kini malah dipakai untuk menindas atau merepresi manusia, oleh karena itu, hal yang paling menonjol pada masyarakat industri modern adalah toleransi represi, yaitu suatu toleransi yang memberi kesan seakan menyajikan kebebasan yang luas padahal maksudnya tidak lain dari pada menindas. Kemanusiaan, kebebasan, otonomi, kehidupan sosial, tidak diberi kesempatan, semuanya sudah menjadi alat. Masyarakat demikian, menurut Marcuse, lebih suka memertahankan status-quo, baik bagi penganut sistem kapitalisme maupun para penganut sistem sosialisme.

Masyarakat modern juga tidak menunjukkan adanya penghapusan kelas. Bedanya, rakyat banyak (termasuk kaum buruh) mendukung kelangsungan sistem tersebut dan sekaligus ikut dalam sistem yang sudah begitu mapan. Jika Marx mengeluh akibat pekerjaan yang berat dan membosankan, ditambah pula akibat upah kerja yang amat rendah akibat kebijakan pemilik modal, maka Marcuse mengatakan kini kaum buruh tidak mengeluh lagi dengan kerja kerasnya karena pemenuhan kebutuhan sudah terpenuhi. Kaum buruh tidak lagi revolusi. Mereka sudah menjadi para pembela dari sistem kerjanya. Setidaknya ada lima karakter masyarakat satu dimensi seperti dijelaskan oleh Marcuse, yaitu pertama administrasi total.

Dari sejumlah kemajuan hebat dan keberhasilan terbesar yang diraih sistem kapitalis yang bertumpu pada keunggulan teknologi adalah kemampuan penguasa kapitalis mengalihkan dominasi ke dalam administrasi total. Administrasi total merupakan strategi pengaturan dan pengelolaan yang bertujuan mengharmoniskan pemusatan dan penyatuan kekuatan sosial, politik, ekonomi, militer, dan budaya ke dalam satu tangan. Sarana yang dimanfaatkan adalah menciptakan musuh bersama nasional guna memaksa semua warga agar memerlukan yang tidak diperlukan dan mengorbankan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Kedua, Bahasa Fungsional. Medium utama administrasi total adalah bahasa, mengingat subjek utama yang dihadapi, diatur, dan dikelola adalah

manusia. Bahasa merupakan ungkapan kemampuan berpikir dan proses perwujudan potensi individu. Karena itu, hal utama yang perlu digarap dalam upaya penaklukan total dan tuntas adalah pembentukan wacana berpikir, cara berkomunikasi, dan berbicara. Rezim kapitalis ingin mengubah wacana prateknologi dan memberikan muatan baru yang lebih sesuai dengan realitas teknologis dengan menciptakan bahasa sendiri: bahasa fungsional. Ketiga. Penghapusan Sejarah. Dalam hidup menyejarah, nalar manusia mengambil dua sikap yang berbeda. Di satu pihak, ada kontinuitas gerak dialektis nalar dalam rangka mengenal, mengerti, memahami, dan mengolah fakta, data, dan peristiwa. Kontinuitas mengacu pada karya nalar sebagai kemampuan yang otonom dan transenden. Di pihak lain, terdapat diskontinuitas sejarah nalar berada dalam kesatuan dengan badan. Dalam kesatuan ini, nalar terikat dengan ruang dan waktu sehingga aktifitasnya tunduk pada hukum sebelum dan sesudah, di sana dan di sini, kini dan nanti. Berangkat dari pemakaian bahasa fungsional sebagai bahasa tunggal dalam masyarakat kapitalis, pernyataan Marcuse bahwa pemaksaan makna tunggal bahasa dalam semesta wacana merupakan keputusan dan tindakan politis, bukan sekadar persoalan dunia akademis, mendapat pbenarannya. Promosi dan aplikasi bahasa fungsional yang bersikap anti oposisi dan selalu alergi pada kekaburan dan perbedaan makna merupakan strategi penguasa untuk menguasai kesadaran dan menutup ruang perbedaan dalam waktu. Secara sosial, bahasa fungsional memuat kandungan ideologis, sehingga menjadi bahasa anti historis yang radikal, dan radikalitas demikian memuat dan mengalir dari rasionalitas operasional yang cenderung menafikan relasi masa lampau dan masa kini.

Keempat, Kebutuhan Palsu. Kebutuhan palsu merupakan suatu keperluan yang dibebankan oleh aneka kepentingan sosial tertentu kepada semua individu dengan maksud menindas dan menggerogoti mereka. Sekarang ini, terpampang jelas propaganda sistematis dan kontinu untuk semua kebutuhan palsu yang dijejalkan. Propaganda kebutuhan palsu dilakukan lewat aneka macam promosi, pameran dan iklan mengenai merek dagang, tempat wisata, pusat perbelanjaan, mode, apartemen, lokasi perumahan, ponsel, komputer,

kendaraan bermotor, dan peralatan rumah tangga, hingga beragam jenis kursus.

Kelima, Imperium Citra. Dewasa ini, citra (*image*) menjelma menjadi mantra gaib yang menyusup ke segala sisi kehidupan individu dan masyarakat, bahkan memainkan peranan besar dalam dunia politik dan kekuasaan. Para pemimpin negara, kandidat yang bersaing guna memerebutkan posisi sebagai presiden atau perdana menteri dan jabatan di bawahnya menaruh perhatian yang besar terhadap citra. Mereka sungguh serius merawat citra dirinya sebagai *public figure* dan sering berperilaku bagaikan selebritas dari dunia entertainment. Lebih parah lagi, dominasi citra merasuk pula ke wilayah praksis kekuasaan dan menjadi bahan pertimbangan utama dalam keputusan politik dan kebijakan pemerintah yang tergambar dalam istilah populis dan tidak populis.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa realitas sosial Herbert Marcuse telah memasuki tahap kontemporer. Dalam tahap kontemporer realitas sosial tidak lagi dipandang sebagai kenyataan abadi seperti tahap parenial, melainkan menghindari asumsi yang bersifat metafisik. Tahap kontemporer juga berbeda dengan tahap dinamis-historis yang memandang realitas sosial selalu berkembang secara historis, melainkan memadukan unsur teknologi, bahasa, dan unsur kebudayaan lainnya. Pandangan Marcuse tentang realitas sosial masyarakat insustri seperti sekarang ini terpengaruh mulai dari aspek teknologi yang menindas manusia sampai manipulasi bahasa. Oleh karena itu realitas sosial masyarakat bagi Herbert Marcuse tak bisa lepas dari cengkraman kapitalisme yang telah berkembang menjadi *late capitalism*. Ada dua hal penting yang terjadap pada masyarakat indudtri, yakni:

a. Secara Umum:

- 1) Meluasnya produksi massa barang-barang industri dengan menggunakan mesin, yang terpusat di kota-kota besar
- 2) Migrasi massal dari pedesaan ke kota-kota (urbanisasi)
- 3) Peralihan dari pekerjaan sektor pertanian kepada pekerjaan di sektor pabrik
- 4) Jumlah penduduk kota yang melek huruf seiring kebutuhan bidang pekerjaan yang lebih komplek

- 5) Munculnya surat kabar untuk kaum urban sebagai sarana untuk mengiklankan produk-produk baru industri. Media massa mempunyai peran peting dalam masyarakat industri
- 6) Penemuan teknologi baru seperti Film, radio dan televisise sebagai hiburan kaum urban.

b. Secara khusus

Pertama. Mereka dalam menyambung kehidupan tidak melewati lahan pertanian seperti masyarakat agraris atau mengandalkan hasil peternakan, seperti masyarakat padang pasir, melainkan pada jalannya mesin-mesin pabrik, khususnya di daerah perkotaan, sedangkan pertanian dikerjakan di daerah pedesaan dalam lokalisasi yang sangat kecil, karena dengan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menciptakan panen yang cukup besar, di Amerika Serikat lokalisasi pertanian hanya 5% saja, sudah mampu memberikan kehidupan pada masyarakat lain yang bekerja di luar sektor pertanian. Ketergantungan masyarakat industri terhadap pabrik, sama halnya bergantung dengan penguasa pabrik, tidak jarang dijumpai penguasa pabrik bersikap tidak etis atau tidak manusiawi terhadap pekerja diantaranya melarang beribadah, membuka aurat, memaksa ikut upacara agamanya. Bila tidak tersedia akan dikeluarkan. Mereka yang tidak tahan menghadapi kesulitan hidup mudah melepaskan kepercayaan agamanya. Berbeda dengan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan tanah pertanian, karena tanah tersebut tidak mampu memaksakan orang berlaku dzalim.

Kedua. Potensi-potensi kehidupan terdapat pada sarana-sarana yang dapat menunjang perkembangan pabrik diantaranya ialah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan gedung misalnya pengetahuan arsitek atau sipil, yang berhubungan dengan pengaturan personalnya terdapat pada pengetahuan personalia atau manajemen untuk pengembangan produksi terdapat pada manajemen pemasaran, akuntansi untuk kegiatan administrasinya dan masih banyak lagi pengetahuan untuk bekal hidup pada Masyarakat Industri. Pengetahuan yang tidak berhubungan langsung untuk menunjang terhadap produksi kurang mendapatkann perhatian, misalnya pengetahuan tentang ilmu keguruan, lebih di jauhkan lagu apabila bidangnya tidak

berhubungan dengan produksi, misalnya bidang ilmu keagamaan, sejarah, bahasa atau filsafat. Secara alamiah akan terjadi khas ilmu pengetahuan, pengetahuan teknik perusahaan lebih dominan dari pada pengetahuan social. Akibatnya mereka akan cepat mendapatkan kemajuan secara material, akan tetapi mereka sangat ketinggalan terhadap masalah nilai kemanusiaan kehidupan dan tentang ke-Tuhanan.

Ketiga, kecintaan masyarakat industri terhadap kebahagiaan material sangat besar dibandingkan dengan kebahagiaan immaterial, sebagaimana kebahagiaan pada masyarakat agraris, yang lebih menekankan pada kerukunan, kasih sayang dan saling menghormati. Hal yang demikian dapat dimaklumi karena bentuk-bentuk kebahagiaan material pada masyarakat industri kuantitas dan kualitas sangat banyak, variatif dan selalu mengalami perubahan, berkat dukungan kemajuan pengetahuan teknologi. Mereka lebih baik mengorbankan kebahagiaan immaterial yang ruang lingkungannya lebih kecil demi material. Sehingga masyarakat industri banyak mengalami gangguan psikis, rasa ketangan, persaingan, ketakutan terhadap ketertinggalan, konflik, judi, wanita dan minuman keras sering dijadikan tempat hiburan untuk menghilangkan akibat ketegangan.

2. Perilaku Masyarakat Industri

Masyarakat industri secara umum dapat mengurus dirinya sendiri tanpa ketergantungan kepada orang lain. Namun yang terpenting adalah manusia secara perseorangan atau individu, kesempatan kerja lebih banyak diperoleh warga kota karena system pembagian kerja yang tegas dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya atau profesionalisinya. Pola pemikiran yang rasional, sistematis dan objektif yang secara umum dianut pada sebagian besar masyarakat perkotaan yang mengakibatkan interaksi yang terjadi didasarkan pada factor kepentingan dicari pada factor pribadi. Begitu juga masalah faktor waktu lebih penting dan berharga, sehingga pembagian waktu yang sangat teliti sangat penting untuk mengejar kepentingan individu, para pengelola industri akan menciptakan aturan-aturan yang berlaku sesuai tuntutan dalam dunia industri yang jauh berbeda dengan aturan masyarakat agraris. Mereka cenderung lebih menghargai

waktu, hidup serba cepat, jam kerja mereka lebih jelas, kerja sistematisasi, persaingan yang ketat di harga dalam berbagai aspek dan lain sebagainya. Mereka cenderung menggunakan logikanya untuk memutuskan sesuatu atau dalam bertindak. Perubahan social sangat Nampak dengan nyata dihadapannya karena pada masyarakat kota lebih terbuka dalam menerima pengaruh dari luar karena seringnya berinteraksi dengan masyarakat dalam berbagai segmen.

3. Budaya Masyarakat Industri

Industri memberikan input kepada masyarakat sehingga membentuk sikap dan tingkah laku yang mencerminkan cara bersikap dalam bekerja. Dengan berkembangnya aspek ekonomi yaitu industrialisasi jelas akan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat walaupun secara perlahan. Masyarakat secara bertahap menerima adanya zaman baru, yaitu modernisasi. Mereka mulai belajar menerima budaya yang ditularkan dari Negara luar karena adanya kerjasama satu sama lain dan dengan demikian tidak bias dihindarkan. Mereka harus bias menyesuaikan diri, namun hal itu tidak harus serta merta meninggalkan budayanya sendiri. Secara ekonomis kini masyarakat industri semakin bertambah kaya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Namun kondisi yang membaik ini menurut Marcuse adalah suatu keadaan yang terlihat hanya dari kulit luarnya saja. Sesuatu yang menipu karena kenyataan peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan manusia hanya dirasakan secara lahiriah saja. Manusia pada masyarakat industri adalah manusia yang tidak uruh dari nilai-nilai kemanusiaannya. Mereka terjebak dalam budaya konsuméristik hedonism yang dipacu oleh faktor-faktor produksi. Kemajuan pada bidang material justru berbanding terbalik dengan merosotnya nilai-nilai moral, kebudayaan dan agama.

Kemajuan teknologi dengan sokongan kapitalisme hadir untuk membantu manusia mengisi kekosongan dalam kehidupan pribadi manusia. Alih-alih melepas lelah setelah habis bekerja seharian, orang-orang kemudian menghabiskan uang dari hasil kerjanya ditempat-tempat yang telah disiapkan untuk menghilangkan kepenatan, baik itu tempat rekreasi, game zone, shopping dengan aneka barang pilihan dan yang pasti gelaran itu akan serta-merta mendorong masyarakat pada

posisi konsumen dari apa yang mereka produksi sendiri. Mereka terjebak dalam gaya hidup (*life style*) konsumtif dan hedonis, sehingga secara tidak sadar mereka menjadi obyek pasar. Untuk menjadi industrial, masyarakat harus disiapkan untuk menerima nilai-nilai yang bakal menunjang proses industrialisasi, dikehendaki ataupun tidak pasti melahirkan tata nilai yang kebanyakan tidak dikenal oleh suatu masyarakat pedesaan (Nurcholish Madjid, 1999 : 127).

4. Sistem Mata Pencaharian Masyarakat Industri

Thayeb M Gobel seorang Pendiri Gobel Group Dan Mr. Konosike Matsushita pendiri Matsushita Electric Industri, Ltd-Jepang menjelaskan bahwa kemajuan masyarakat industri di Indonesia tidak akan terlepas dari daya kreativitas dan inovasi pelaku industri masyarakat pengguna produk industri. Karena itu, daya kretivitas yang menjadi sumber mata air. Karena itu, daya kretivitas dan inovasi yang menjadi sumber kemajuan dan perkembangan masyarakat industri di Indonesia. Pada Masyarakat industri terdiri dari kaum spesialisasi yang berpendidikan. Terbentuknya spesialisasi pekerjaan karena semakin kompleks dan rumitnya bidang-bidang pekerjaan dalam masyarakat industri. Proses perubahan pada masyarakat secara diferensiasi pekerjaan akan mengakibatkan terjadinya klerak pretise dan penghasilan yang selanjutnya akan menimbulkan adanya stratifikasi dalam masyarakat yang berbentuk seperti piramida. Stratifikasi social yang demikian akan menentukan strata anggota masyarakat yang ditentukan berdasarkan pada sikap dan karakterisitik pada masing-masing anggota kelompok.

Pada suatu wilayah industry biasanya akan terdapat banyak perusahaan industri. Hal ini biasanya disebabkan terjadinya alih fungsi tanah menjadi industri yang menjadikan kebanyakan masyarakat menjadikan mata pencaharian utam adalah sebagai karyawan pabrik atau sebagai buuruh industry. Sejalan dengan perkembangan wilayah menjadi tempat industry maka berkembang pula menjamurnya para pedagang sekitar yang beraneka ragam. Secara umum mata pencaharian masyarakat sekitar industri dapat diklasifikasikan sebagai pengolah dan pembuat barang-barang industri. Kegiatan bercocok tanam tidak lagi menjadi pekerjaan utama, sebab lahan-lahan pertanian telah berubah tidak lagi menjadi

pekerjaan tetap mereka sekalipun ada masih ada hanya merupakan pekerjaan sampingan dalam petah area yang relative terbatas. Tentu hal ini cukup beralasan karena lahan-lahan pertanian telah berubah fungsi menjadi *home industry* dan pabrik-pabrik. Perubahan mata pencaharian tersebut sangat berpengaruh terhadap kemajuan perdagangan, sehingga aktivitas berdagang pada sekitar masyarakat industri merupakan salah satu ciri mata pencaharian yang tidak bias dipisahkan pada suatu masyarakat industri.

C. Dampak Penerapan Sistem Kerja Lembur

Pada saat sekarang ini sebagian besar industri atau perusahaan yang ada di wilayah perkotaan menerapkan system kerja lembur (*overtime*) dalam mengejar hasil produksi sebagai *output* untuk memenuhi pesanan dari pelanggan (*customer*) sesuai dengan perjanjian atau kontrak kerja. Tenaga kerja kontrak ini secara otomatis menjadi subjek dari penerapan sistem tersebut adalah terdiri karyawan yang berkerja pada perusahaan-perusahaan tersebut. Secara khusus pembahasan lebih menekankan terhadap dampak maupun pengaruh dari sebuah system kerja lembur bagi para karyawan yang berefek baik secara positif maupun negatif baik secara materiil maupun non materiil, termasuk di dalamnya bagaimana urgensinya dari penerapan sistem kerja lembur (*overtime*) bagi karyawan atau pekerja itu sendiri.

Proses produksi dalam lingkungan industri/perusahaan saat ini umumnya membutuhkan waktu pelaksanaan yang cepat. Waktu pelaksanaan yang cepat ini antara lain mempunyai tujuan untuk mengejar target produksi sesuai kontrak kerja atau karena suatu alasan tertentu. Untuk mengembangkan hal ini dilakukan sistem kerja lembur (*overtime*). Sistem kerja lembur harus diimbangi dengan kesiapan faktor-faktor penunjang antara lain berupa tenaga kerja (karyawan), material dan alat kerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan tersebut. Untuk mengatasi berbagai faktor penunjang diperlukan biaya berupa pembayaran tenaga kerja yaitu upah, pengadaan material dan penguasaan alat kerja. Kerja lembur sebagai salah satu bagian rencana kerja proyek sebagai cara untuk menyelesaikan proses produksi yang tidak mungkin diselesaikan dalam hari-hari kerja seperti biasa.

Melalui kerja lembur ini akan menggunakan tenaga kerja yang khusus dengan tetap memperhatikan kualitas. Tentu dalam melaksanakan system kerjanya akan sangat berpengaruh pada konsisi para karyawan baik secara pisik maupun secara psikis. Bagi karyawan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam bekerja dapat memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya sehingga dalam bekerja karyawan dapat lebih bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Masyarakat pada umumnya dapat memberikan pengetahuan bahwa tingkat pemberian upah yang tinggi bukan berarti akan mendapat kepuasan kerja yang baik, tetapi pekerjaan yang memang dapat memuaskan pekerja dapat dipengaruhi pula oleh adanya lingkungan perusahaan dan juga iklim kerja di tempat kerja tersebut.

Mengacu pada Keputusan Nomor 102/MEN/VI/2014 pasal I, bahwa waktu kerja lembur adalah waktu yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat. Mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah. Jadi pada perusahaan yang menerapkan 5 hari kerja, maka waktu kerja yang seharusnya berlangsung setiap harinya adalah 8 jam. Tanpa ditentukan apakah jam kerja akan dimulai pada jam 7 pagi, 8 atau 9 pagi. Hanya ditentukan waktu kerja berlangsung selama 8 jam. Jika ada karyawan yang bekerja lebih dari 8 (delapan) jam, maka ia berhak mendapatkan upah lembur. Waktu kerja lebur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) dalam 2 (satu) minggu dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Namun hal ini tidak termasuk lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Apabila seorang karyawan dapat melakukan kerja lebur dengan maksimal satu minggu terhitung Senin sampai jum'at, maka lebur pada akhir minggu atau pada hari libur resmi memiliki perhitungannya sendiri. Pada beberapa perusahaan terkadang memperkerjakan karyawan lebih dari 14 jam lebur, namun hanya membayarkan upah lebur untuk 14 jam saja. Maka yang demikian jelas tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manun tidak semua karyawan yang lembur harus

mendapatkan upah lembur. Berdasarkan pasal 4 dijelaskan bahwa mereka yang memiliki tanggungjawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan mengendalikan jalannya perusahaan, waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Idealnya, lebur dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pengusaha dan persetujuan terutlis dari karyawan. Lebur tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keinginan sepihak. Terlalu sering lembur bukan berarti akan dianggap karyawan yang loyal. Justru bisa dianggap lamban dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan tidak mampu bekerja tepat waktu (*on time*)

Mekanisme Kerja Lembur Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 3 Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur menyatakan secara tegas bahwa "Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu". Meskipun Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah secara tegas membatasi waktu kerja lembur seperti tersebut diatas, tetapi karena mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan dunia usaha, ketentuan undang-undang tersebut oleh Keputusan Menakertrans No. 102/MEN/VI/2004 agak sedikit dianulir seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Ketentuan waktu kerja lembur seperti tersebut diatas termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mengguan atau harian resmi". Ketentuan keputusan Menakertrans, hendaknya jangan dipandang dari sudut ketentuan tersebut bertentangan dengan pertaturan perusahaan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang nomor 13 tahun 2003. Namun sebaiknya dipandang dari adanya kebutuhan dunia kerja yang memerlukan kerja lebur dari 40 (empat puluh) jam dalam seminggu dimana di dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tidak diakomodatif. Begiru juga dalam keputusan Menakertrans mengenai kerja lembur pada hari istirahat minggian dan libur resmi, tidak melanggar kepentingan dan hal pekerja, karena dalam melakukan kerja lembur harus atas dasar persetujuan dari para pekerja/buruh yang bersangkutan, sehingga pekerja tidak dapat dipaksa untuk melakukan kerja lebur. Dengan adanya pada saat kerja lebur pada waktu istirahat mingguan dan hari libur resmi,

maka dimungkinkan waktu kerja lembur bisa mencapai 40 (empat puluh) jam dalam satu minggu. Kewajiban perusahaan membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja/buruh yang kerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur, dalam membayar upah lembur, memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya.

Waktu istirahat ini harus mengacu pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yang menetapkan bahwa "Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tidak termasuk jam kerja". Memberikan makan dan minumannya sekurang-kurangnya 1.400 (seribu empat ratus) kalori apabila kerja lembur selama 3 (tiga) jam atau lebih. Pemberitahuan maka nanti tidak boleh diganti dengan uang, hal ini dimaksudkan agar kesehatan pekerja dapat tetap terpelihara.

1. Perbaikan Sistem Kerja

Sistem kerja adalah serangkaian kegiatan kerja dan prosedur kerja yang membentuk satu kebulatan pola dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut Stewert dan Stewert (1983:52), suatu kondisi kerja adalah "*working condition can be defined as series of condition of the working environment in which become the working place of the employee who works there*". Maksudnya adalah kondisi kerja sebagai serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari para karyawan yang bekerja di dalam lingkungan tersebut. Yang dimaksudkan adalah suatu kondisi yang baik, yaitu nyaman dan mendukung pekerja untuk dapat menjalankan aktivitas dengan baik, akan meliputi segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja serta keselamatan dan keamanan kerja, temperature, kelambatan, ventilasi, penerangan kebersihan dan lain-lain.

Menurut Newstrom (1996:469) *Work condition relates to the scheduling of work-the days and the time of day(or night) during which people work*, maksudnya bahwa kondisi kerja berhubungan dengan perjawalan dari pekerjaan, lamanya bekerja dalam hari dan dalam waktu sehari atau semalam selama orang-orang bekerja, oleh sebab itu kondisi kerja yang terdiri dari factor-faktor seperti kondisi fisik, kondisi

psikologis dan kondisi sementara dari lingkungan kerja harus diperhatikan agar para pekerja dapat merasa nyaman dalam bekerja sehingga mereka atau para pekerja dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Oleh karena itu terdapat beberapa jenis kondisi kerja yang harus diperhatikan, yaitu:

2. Kondisi dari lingkungan kerja

Kondisi fisik dari lingkungan kerja sekitar karyawan sangat perlu diperhatikan oleh badan usaha, sebab hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjamin agar karyawan dapat melaksanakan tugas tanpa mengalami gangguan. Memperhatikan kondisi fisik dari lingkungan kerja karyawan dalam hal ini berarti berusaha menciptakan kondisi lingkungan kerja sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para karyawan sebagai pelaksana kerja pada tempat kerja tersebut. Kondisi fisik dari lingkungan kerja menurut Newsstrom (1996:469) adalah : *“among the more obvious factors that can affect the behavior of workers are the physical conditions of the work environment, including the level of lighting, the usual temperature, the level of noise, the amounts and the types of airborne chemicals and pollutants, and aesthetic features such as the colors of walls and floors, and the presence (or absence) of art work, music, plants decorative items”*. Maksudnya bahwa faktor yang lebih nyata dari faktor-faktor yang lainnya dapat mempengaruhi perilaku para pekerja adalah kondisi fisik, dimana yang termasuk di dalamnya adalah tingkat pencahayaan, suhu udara, tingkat kebisingan, jumlah dan macam-macam radiasi udara yang berasal dari zat kimia dan polusi, ciri-ciri estetis seperti warna dinding dan lantai dan ada seni di dalam bekerja, music, tumbuh-tumbuhan atau hal-hal yang menghiasi tempat kerja.

Menurut Handoko (1995:84) lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja meliputi temperatur, kelembaban udara, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanik, bau-bauan, warna dan lain-lainnya dalam hal ini akan mempengaruhi terhadap hasil kerja manusia tersebut. Faktor-faktor lingkungan kerja akan meliputi:

a. *Illumination*

Menurut Newstrom (1996: 459-478) cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi para karyawan guna mendapatkan keselamatan dan kelancaran kerja. Pada

dasarnya cahaya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu cahaya yang berasal dari sinar matahari dan cahaya lampu oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Dengan penerangan yang baik para karyawan akan dapat bekerja dengan penerangan yang baik para karyawan akan dapat bekerja dengan cermat dan teliti sehingga hasil kerjanya mempunyai kualitas yang memuaskan. Cahaya yang kurang jelas (silau) akan mengakibatkan penglihatan kurang jelas. Sehingga pekerjaan menjadi lambat, banyak mengalami kesalahan dan pada akhirnya menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan sehingga tujuan dari badan usaha sulit di capai

b. Temperature

Menurut Newstrom (1990: 469-469) bekerja pada suhu yang panas atau dingin dapat menimbulkan penurunan kinerja. Secara umum kondisi yang panas dan lembab cenderung meningkatkan penggunaan tenaga fisik yang lebih berat, sehingga pekerja akan merasa sangat letih dan kinerjanya akan menurun.

c. Noise

Menurut Newstrom (1996: 469-478) bising dapat didefinisikan sebagai bunyi yang tidak disukai, suara yang mengganggu atau bunyi yang menjengkelkan suara bising adalah suatu hal yang dihindari oleh siapapun, terlebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan, karena konsentrasi perusahaan akan dapat terganggu. Dengan terganggunya konsentrasi ini akan banyak timbul kesalahan ataupun kerusakan sehingga menimbulkan kerugian.

d. Motion

Menurut Newstrom (1996: 469-478) kondisi gerakan secara umum adalah getaran. Getaran tersebut akan menyebabkan pengaruh yang buruk dalam kinerja terutama untuk aktivitas yang melibatkan penggunaan mata dan getaran. Getaran tersebut dapat menyebabkan pengaruh yang jelek dalam kinerja, terutama untuk aktivitas yang melibatkan penggunaan mata dan gerakan tangan secara terus menerus.

e. Pollution

Menurut Newstrom (1996: 469-478) pencemaran ini dapat disebabkan karena tingkat pemakaian bahan-bahan kimia di

tempat kerja dan keanekaragaman zat yang dipakai pada berbagai bagian yang ada di tempat kerja dan pekerjaan yang menghasilkan perabot atau perkakas. Bahan baku-bahan baku bangunan yang digunakan di beberapa kantor dapat dipastikan mengandung bahan kimia yang beracun. Situasi tersebut akan sangat berbahaya jika di tempat tersebut tidak terdapat ventilasi yang memadai.

f. Aesthetic factors

Menurut Newstrom (1996: 469-478) factor keindahan ini meliputi musik, warna dan bau-bauan. Musik warna dan bau-bauan yang menyenangkan dapat meningkatkan kepuasan kerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

3. Kondisi Psikologis dan Lingkungan Kerja

Rancangan fisik dan desain dari pekerjaan sejumlah ruangan kerja yang tersedia dan jenis-jenis dari perlengkapan dapat mempengaruhi perilaku pekerja dalam menciptakan bermacam-macam kondisi psikologi. Menurut Newstrom (1996: 494) *"Psychological conditions of the work environment that can effect work performance include feeling of privacy or crowding, the status associated with the amount or location of workspace, and the amount of control over the work environment"*. Kondisi psikologis suatu lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja yang meliputi perasaan pribadi atau kelompok dan status yang dihubungkan dengan sejumlah lokasi ruang kerja. Factor-faktor dari kondisi psikologis meliputi:

a. Feeling Of Privacy

Menurut Newstrom (1996: 469-478) privasi dari pekerja dapat dirasakan dari desain ruang kerja. Ada ruang kerja yang di desain untuk seorang pekerja, ada pula yang didesain untuk beberapa orang sehingga penyelia untuk mengawasi interaksi antar karyawan.

b. sense of status and impotence

Menurut Newstrom (1996: 469-478), para karyawan tingkat bawah senang dengan desain ruang yang terbuka karena memberi kesempatan kepada karyawan berkomunikasi secara informal. Sebaliknya para manajer merasa tidak puas dengan desain ruang terbuka karena banyak gangguan suara dan privasi yang dimiliki menjadi terbatas.

4. Kondisi Sementara dari lingkungan Kerja

Menurut Newstrom (1996: 480) *"The temporal condition the time structure of the work day. Some of the more flexible work schedules have developed in an effort to give workers a greater sense of control over the planning and timing of their work days"*, Kondisi sementara meliputi struktur waktu pada hari kerja.

Mayoritas dari pekerja bekerja dengan jadwal 5-9 jam dimana pekerja akan diberi waktu 1 jam untuk istirahat dan makan siang. Faktor-faktor dari kondisi sementara akan meliputi:

a. Shift

Menurut Newstrom (1996: 481) dalam satu hari system kerja shift dapat dibagi menjadi tiga shift, yaitu Pagi, Sore dan Malam. Berdasarkan banyak penelitian bahwa shift malam dianggap banyak menimbulkan masalah seperti stress, yang tinggi, ketidakpuasan kerja dan banyak menimbulkan kinerja yang jelek.

b. Compressed Work Weeks

Menurut Newstrom (1996: 481) maksudnya adalah mengurangi jumlah hari kerja dalam satu minggu, namun menambah jam kerja dalam setiap harinya. Mengurangi hari kerja dalam seminggu mempunyai dampak yang positif dari karyawan yaitu akan merasa sangat kembali pada waktu karena masa liburnya lebih lama dan juga dapat mengurangi tingkat absensi dari karyawan.

c. *Flexitime*

Menurut Newstrom (1996: 481) yang dimaksud adalah jadwal kerja karyawan dapat memutuskan kapan mulai bekerja dan kapan mengakhiri pekerjaannya selama karyawan dapat memenuhi jam kerja yang telah ditetapkan oleh badan usaha. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang di akhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan. Kondisi kerja dipandang mempunyai perasaan yang cukup penting terhadap kenyamanan, ketenangan dan keamanan kerja.

Terciptanya kondisi yang nyaman akan membantu para karyawan dalam bekerja yang lebih baik sehingga mendorong produktivitas dan kepuasan kerja akan lebih meningkat. Iklim kerja yang baik merupakan kondisi yang bebas dari gangguan fisik seperti kebisingan, kurangnya penerangan, maupun

polusi serta bebas dari gangguan yang bersifat psikologis maupun yang bersifat temporer seperti hal-hal yang bersifat privasi yang dimiliki karyawan tersebut maupun aturan sistem kerja.

Manusia sebagai makhluk individu memiliki perbedaan dalam hal kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas, pekerjaan menggunakan peralatan atau fungsi peralatan meskipun telah dilakukan pelatihan atau rekruitmen secara profesional dan mandiri dengan kualifikasi pekerjaan yang sama. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka aspek manusia dapat menjadi penting untuk menjadi bahan pertimbangan. Dalam hal ini '*human factor*' muncul sebagai salah satu aspek yang sangat diperhirungkan secara khusus. Pada Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, ada bentuk-bentuk lain dari *Human Factor* yang sering dihubungkan dengan *ergonomi* atau *human engineering*. *Human Factor* terfokus pada aspek manusia serta interaksinya dengan produk, peralatan fasilitas yang digunakan, prosedur pekerjaan dan lingkungan di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Menurut Chapanis (1985) bahwa *Human Factor* akan berhubungan dengan informasi mengenai tingkah laku, kemampuan dan keterbatasan manusia serta karakteristik mengenai rancangan, mesin, sistem, pekerjaan dan lingkungan untuk menghasilkan kesenangan, kenyamanan dan efektivitas dalam menggunakannya. Pada pelaksanaannya, aspek *Human Factor* ini dicoba untuk menyesuaikan dengan sesuatu yang digunakan serta lingkungan tempat kegiatannya dalam bekerja sehingga dapat sesuai dengan kapabilitas, keterbatasan dan kebutuhan orang yang melakukan suatu pekerjaan. Pada dasarnya *Human Factor* memiliki dua tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam peningkatan terhadap kemampuan menggunakan peralatan, menurunkan kesalahan yang ditimbulkan serta meningkatkan produktivitas.
2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan, menurunkan stress kelelahan, kemudahan terhadap adaptasi, meningkatkan kepuasan terhadap pekerjaan dan yang terpenting adalah meningkatkan kualitas hidup dari manusia yang bekerja.

3. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menciptakan kesesuaian antara manusia sebagai pusat kendali dengan komponen lainnya pada saat melakukan kegiatan adalah Model SHEL. Model ini merupakan gambaran dari unsur-unsur utama yang saling berinteraksi. Manusia (*liveware*) sebagai pusat interaksi dikelilingi oleh 4 (empat) kelompok utama yaitu:
 - a. *Liveware-hardware* : manusia dan mesin (termasuk peralatan);
 - b. *Liveware-software*: manusia dan material lainnya (seperti dokumen, prosedur, simbol dan sebagainya);
 - c. *Liveware-environment* : manusia dan lingkungan (termasuk faktor internal dan eksternal tempat kerja);
 - d. *Liveware-liveware*: manusia dan manusia lainnya (termasuk teman sekerja dan kolega).

Tujuan dari model ini adalah bagaimana menciptakan interaksi optimal antar setiap komponen. Dalam melaksanakannya interaksi tersebut di atas, seringkali manusia (*liveware*) merasakan gangguan sebagai akibat dari faktor pembebanan yang dirasakan. Faktor pembebanan ini dapat berupa fisik maupun psikis.

D. Sistem Kerja Lembur dan Dampak Yang Dimbulkannya

Dalam surat KEP.102/MEN/VI/2004 pasal 1, waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi dari tujuan jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu atau waktu kerja jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah. Jadi pada perusahaan yang menerapkan 5 hari kerja, maka waktu kerja yang seharusnya berlangsung setiap harinya adalah 8 jam. Tanpa ditentukan apakah jam kerja akan dimulai pada jam 7 pagi, 8 atau 9 pagi. Hanya ditentukan waktu kerja berlangsung selama 8 jam.

Apabila karyawan bekerja lebih dari 8 jam, maka ia berhak mendapatkan upah kerja lembur. Waktu kerja lemburpun hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam satu minggu. Namun

yang demikian tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Seorang karyawan dapat melakukan kerja lembur dengan maksimal 14 jam dalam satu minggu terhitung senin sampai hari jumat. Lembur pada akhir minggu atau pada hari libur resmi ada perhitungannya sendiri. Pada beberapa perusahaan terkadang memperkerjakan karyawannya lebih dari 14 jam lembur, namun hanya membayarkan upah lembur untuk 14 jam saja. Hal yang demikian jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun tidak semua karyawan yang kerja lembur harus mendapatkan upah lembur. Berdasarkan pasal 4 dijelaskan bahwa mereka yang memiliki tanggungjawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan, waktu kerjanya tidak dibatasi menurut waktu yang telah ditetapkan perusahaan. Idealnya lembur dilaksanakan berdasarkan permintaan pengusaha dengan persetujuan secara tertulis dari para karyawan. Dalam kerja lembur, tidak dapat dilaksanakan hanya berdasarkan keinginan satu pihak. Justru terlalu banyak lembur bukan berarti karyawan tersebut loyal, melainkan bisa dicap lambat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan tidak mampu bekerja tepat waktu (*on time*)

1. Mekanisme Kerja Lembur

Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 3 Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur menyatakan secara tegas bahwa "*Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu*".

Meskipun Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah secara tegas membatasi waktu kerja lembur seperti tersebut diatas, tetapi karena mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan dunia usaha, ketentuan undang-undang tersebut oleh Keputusan Menakertrans No. 102/MEN/VI/2004 agak sedikit dianulir seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Ketentuan waktu kerja lembur seperti tersebut diatas termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau harian resmi*". Ketentuan Keputusan Menakertrans, hendaknya jangan dipandang dari sudut ketentuan tersebut bertentangan dengan peraturan

perusahaan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tetapi sebaiknya harus dipandang dari adanya kebutuhan dunia usaha yang memerlukan kerja lembur lebih dari 40 (empat puluh) jam dalam seminggu yang oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak diakomodir.

Disamping itu ketentuan Keputusan Menakertrans mengenai kerja lembur padahari istirahat mingguan dan libur resmi tidak melanggar kepentingan dan hak pekerja, karena untuk melakukan kerja lembur harus atas persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan, sehingga pekerja tidak dapat dipaksa untuk melakukan kerja lembur. Dengan adanya ketentuan waktu kerja lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur resmi, maka dimungkinkan waktu kerja lembur lebih dari 40 (empat puluh) jam dalam seminggu.

2. Kewajiban Perusahaan

Terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, antara lain:

- a. Membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja/buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur.
- b. Membayar upah lembur.
- c. Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya. Waktu istirahat ini harus mengacu pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yang menetapkan bahwa "*Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tidak termasuk jam kerja*".
- d. Memberikan makan dan minumannya sekurang-kurangnya 1.400 (seribu empat ratus) kalori apabila kerja lembur selama 3 (tiga) jam atau lebih. Pemberitahuan makanan tidak boleh diganti dengan uang, hal ini dimaksudkan agar kesehatan pekerja dapat tetap terpelihara.

E, Sistem Upah Kerja Lembur (*overtime*) dan Dampaknya

Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, atas dasar perintah atasan, yang melebihi jam kerja biasa pada hari-hari kerja, atau pekerjaan yang dilakukan pada hari istirahat mingguan karyawan atau hari libur resmi. Pada prinsipnya sistem kerja lembur bersifat sukarela, kecuali dalam

dalam kondisi tertentu saja. Pekerjaan harus secepat selesai untuk kepentingan perusahaan. Lembur bermakna tempat tinggal para pekerja. Jadi yang dimaksud kerja lembur adalah bekerja ketika waktunya seharusnya ada di rumah, pegawai tersebut melaksanakan pekerjaan tambahan diluar kewajiban sebagai pekerja. Menurut Thomas (2002) "kerja lembur adalah pekerjaan tambahan yang dilakukan diluar jam kerja yang melebihi 40 jam kerja per-minggu yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak mungkin diselesaikan dalam hari kerja normal.

Menurut Donal S Barrie, Boys, et al. (1995) kerja lembur adalah jadwal kerja yang direncanakan menunjuk pada situasi dimana operasi itu telah dijadwalkan secara teratur untuk dilampui hari yang terdiri dari 8 jam yang normal 40 jam dalam seminggu. Di Indonesia, ketentuan kerja lembur diatur oleh Menteri Tenaga Kerja dengan dikeluarkannya SK Menteri Tenaga Kerja No. 580/M/BM/BK/1992 pasal 2 dan 3, yang menyebutkan bahwa kerja lembur merupakan waktu dimana seorang pekerja bekerja melebihi dari jadwal waktu yang berlaku, yaitu 7 jam sehari dan 40 jam seminggu.

1. Formula Upah Lembur (overtime)

Perhitungan jam kerja lembur dan tarif upah lembur mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-72/MEN/1984, dengan rumusan:

- a) Tarif upah lembur: $1/173 \times \text{Gaji Pokok}$
- b) Perhitungan lembur dilakukan pada hari kerja biasa:
 - 1) Untuk jam pertama adalah 1,5 kali TUL (Tunjangan Upah Lembur).
 - 2) Untuk jam-jam berikutnya adalah sebesar 2 kali TUL.
 - 3) Lebih dari jam 19.30 WIB akan mendapatkan 1 kali tunjangan makan.
 - 4) Lebih dari jam 22.30 WIB akan mendapatkan 1 kali tunjangan transport.
- c) Perhitungan lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari raya resmi:
 - 1) Untuk setiap jam dalam batas waktu 7 (tujuh) jam pertama adalah sebesar dua kali TUL.
 - 2) Untuk jam ke 8 (delapan) sebesar 3 kali TUL.
 - 3) Untuk jam ke 9 (sembilan) dan seterusnya adalah sebesar empat kali TUL.

- d) Pekerjaan lembur kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jam sehari tidak diperhitungkan dengan upah lembur.
- e) Ketentuan upah lembur hanya berlaku untuk karyawan dengan golongan I-III atau dinyatakan lain dalam perjanjian kerja.
- f) Untuk karyawan shift, bilamana hari tugas
- g) Untuk karyawan shift, pada waktu hari tugasnya jatuh pada hari libur resmi (hari raya), maka pada jam kerja pada hari itu dihitung sebagai kerja lembur dan perhirungan upah lemburnya menggunakan hitungan jam lembur hari raya. Berhubungan dengan hari raya, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Hari kerja biasa

Kerja lembur yang dilakukan melewati pukul 19.30 WIB, bila tidak disediakan makan minum oleh perusahaan akan diberikan tunjangan makan yang besarnya ditetapkan oleh perusahaan.

2. Hari libur/Raya

Karyawan yang melakukan pekerjaan lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi/hari raya akan mendapatkan tunjangan trasfort sesuai dengan ketentuan hari kerja biasa ditambah tunjangan makan jika lembur yang dijalankan telah melewati tiga hari kerja.

Tunjangan transfor tidak berlaku bagi karyawan yang mendapatkan fasilitas kendaraan sebagai kebijakan perusahaan dapat mempertimbangkan mengganti biaya transfort tidak berlaku bagi karyawan yang mendapat fasilitas kendaraan, sebagai kebijakan perusahaan dapat mempertimbangkan mengganti biaya transfort (misalnya: bayar tol, paker dan sebagainya sesuai dengan biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh karyawan untuk keperluan lembur.

Apabila pekerjaan lembur dilakukan melewati waktu pukul 19.30, bila tidak disediakan makanan oleh perusahaan dengan memberikan tunjangan makan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Banyak orang yang tidak memahami bagaimana cara menghitung upah lembur. Perhitungan upah lembur mengacu pada keputusan menteri Nomoer Kep. 107/MEN/IV/2014. Sebagaimana pada pasal 10 nayat 1 dan 2. Kita membahas pasal 10 ayat 1 dalam hal upah

terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap muka sebagai dasar perhitungan upah lembur adalah 100% (seratus persen) dari upah, makna pasal 10 ayat 1 (satu) sangat jelas, bahwa seperti apakah upah pokok dan tunjangan tetap itu. Misalnya pengusaha menetapkan upah sebesar Rp 1.500.000 yang terdiri dari komponen sebagai berikut:

- Gaji pokok	Rp 1.200.000
- Tunjangan Jabatan	<u>Rp 300.000</u>
Total Upah	Rp 1.500.000

Berdasarkan uraian di atas, telah kita ketemuan total upah yang komponennya terdiri dari gaji/upah pokok dan tunjangan tetap sebesar Rp 1.500.000. *Perhitungannya adalah:* Tarif upah sejam adalah $\text{Rp } 1.500.000 \times 1/173 = \text{Rp } 8.670,51$. Contoh kasus 2 *Pasal 10 ayat (2)* Sedangkan ayat (2) menyatakan: Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil 75% (tujuh puluh lima perseratus) keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lembur 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan upah.

Seperti apakah upah pokok dan tunjangan tetap ditambah tidak tetap?, Kalau kita perhatikan rasio dari upah (gaji pokok dan tunjangan tetap) sebesar 79% (seperti tabel 10.2), maka acuan perkalian tidak bisa menggunakan rumus 75% dari total upah keseluruhan.

Kalau 75% dari total upah keseluruhan berarti $\text{Rp } 1.900.000 \times 75\% = \text{Rp } 1.425.000$. Sedangkan nilai komponen upah saja sebesar Rp 1.500.000. Artinya yang digunakan adalah angka Rp 1.500.000 yaitu angka yang tertinggi dan lebih baik bagi kepentingan karyawan, dengan perhitungan $\text{Rp } 1.500.000 \times 1/173 = \text{Rp } 8.670,51$ per-jamnya. *Nilai upah keseluruhan.* Prinsipnya, bila nilai lebih baik dari ketentuan yang dimaksud Kepmen sangat dibenarkan. Sekarang *Bagaimana perhitungannya?* Jika menggunakan dari keseluruhan akan lebih baik, dan tarif sejamnya adalah $\text{Rp } 1.900.000 \times 1/173 = \text{Rp } 10.983,-$

2. Dampak Penerapan Sistem Kerja Lembur Terhadap Karyawan

Seringkali kita menemukan fenomena, dan ini sangat mudah dijumpai di Kota Batam khususnya, dimana

orang/karyawan dalam perusahaan bekerja sangat keras diluar kelaziman bahkan sampai “pontang pating” tidak karuan. Mereka sudah tidak perduli lagi dengan waktu. Berangkat kerja pagi-pagi, kembali waktu malam. Catatan lembur, untuk karyawan perusahaan misalnya, sudah tidak bisa dihitung lagi. Bahkan tidak jarang, mereka juga terpaksa harus masuk disaat hari-hari besar. Waktu menjadi seolah-olah sangat sempit sementara beban tugas terus semakin menumpuk dan permasalahan tidak selesai selesai. Begitu selesai permasalahan yang satu, muncul permasalahan yang lain. Begitu selesai target yang satu, muncul target yang lain seolah tanpa berkesudahan. Berikut Dampak dari implementasi sistem kerja lembur (overtime) yang dirangkum dari hasil interview dan jajak pendapat terhadap beberapa karyawan (secara acak) yang bekerja pada perusahaan yang berbeda.

Kata lembur memang sudah tidak asing lagi bagi para pekerja/karyawan perusahaan, termasuk di Kota Batam. Beberapa karyawan sangat suka mendapat jatah lembur karena mereka bisa mencari penghasilan tambahan. Bahkan sekarang ini eksistensi kerja lembur menjadi semacam komponen yang sangat dibutuhkan oleh karyawan untuk menambah jumlah penghasilan. Dengan lembur, maka ada baiknya kita bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan. Selain uang yang bertambah, kita juga bisa mendapatkan nilai positif dari atasan. Hal ini penting bagi anda, sesuai dengan jenjang karier. Namun tidak dipungkiri juga kalau lembur itu sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Karena banyak kendala yang harus dihadapi. Suka atau tidak suka masalah kerja lembur masih banyak menyisakan masalah semua pihak, maka perlu banyak melibatkan semua pihak agar mampu menjawab persoalan secara substansial dan komprehensif. Maka disini akan dijelaskan dampak dari kerja lembur yang dirasakan oleh karyawan, dampak positif bagi karyawan, adalah:

1. Akan mendapatkan masukan uang tambahan
2. Akan mendapatkan nilai lebih dari atasan, dan
3. Akan berimplikasi pada karier

Adapun dampak negatif adalah ada pembagian waktu yang kurang proporsional, dengan kerja lembur waktu lebih banyak untuk perusahaan, selain itu, secara psikologis ada

implikasinya terhadap keluarga. Yaitu perhatian terhadap keluarga menjadi berkurang akibat lembur. Dari sisi pribadi misalnya, faktor gangguan kesehatan seperti stress, darah tinggi bahkan stroke adalah hal yang kerap dijumpai akibat dari pola hidup yang “keluar” dari jalur fitrahnya disamping pola makan yang buruk tentunya. Umur muda bukan lagi jaminan untuk terhindar dari resiko penyakit-penyakit tersebut.

Dari sisi keluarga, waktu untuk berkumpul dengan istri dan anak-anak menjadi dikorbankan. Terutama dalam hubungan dengan keluarga menjadi berkurang cenderung akan mengakibatkan disharmonisasi keluarga. Terlalu sibuk untuk urusan sendiri menyebabkan kehilangan waktu untuk berkumpul atau bahkan untuk sekedar menegur dan mengucapkan ucapan selamat kepada tetangganya yang baru saja mendapat suka cita. Atau sekedar bertakziyah kepada sahabat dan kerabat yang berduka cita. Sikap hidup yang tidak ideal tersebut muncul karena kita seringkali memiliki persepsi yang tidak proporsional terhadap lingkungan dimana kita berada, kepada atasan kita, kepada kantor tempat kita bekerja atau bahkan kepada klien atau partner bisnis yang seharusnya dalam kendali kita. Kontrol kita serahkan sepenuhnya kepada pihak luar. Atau bisa dikatakan kita seringkali hanya menjadi sekedar objek bukannya sebagai subjek.

Berdasarkan beberapa studi menemukan hubungan kuat antara kerja lembur dan depresi. Korelasi ini muncul tanpa mengabaikan sejumlah faktor pemicu depresi seperti sosial demografi, gaya hidup, dan aktivitas lain yang memengaruhi tingkat stres. "Meski kerja lembur kadang-kadang memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat, penting bagi kita untuk menyadari bahwa jam kerja yang berlebihan terkait dengan peningkatan risiko depresi berat," kata Dr Virtanen, yang memublikasikan studinya di jurnal online *PLoS ONE*, seperti dikutip *Times of India*. Tuntutan lembur dan menyelesaikan beban pekerjaan di luar jam kerja seringkali membuat pekerja tertekan. Jam kerja yang berlebih jelas akan menyita waktu berkumpul bersama keluarga dan istirahat.

Ada yang memilih berhenti kerja, karena jam kerja tak sesuai dengan. Tetapi banyak pula yang bertahan karena alasan tertentu seperti alasan karena masalah ekonomi. Bahkan

berdasarkan hasil riset di Inggris, orang yang sering kerja lembur yang menghabiskan waktu antara 10 sampai dengan 11 jam perharinya lebih tinggi mengalami sakit jantung. Penelitian ini berdasarkan hasil studi terhadap 6.000 pekerja sipil di Inggris yang dipublikasikan dalam *European Heart Journal*, edisi On Line. Dalam laporannya, disebutkan mereka yang menambah waktu tiga hingga jam sehari untuk kerja lembur beresiko 60 % lebih tinggi menderita sakit jantung. Angka tersebut muncul setelah menghitung dari berbagai macam penyakit termasuk kebiasaan merokok. Berdasarkan data hasil studi terungkap terdapat 369 kasus kematian akibat penyakit jantung. Mereka meninggal dunia akibat mengalami serangan jantung. Waktu yang dihabiskan dalam seminggu kerja lembur memiliki kaitan erat dengan banyak kasus. Bekerja terlalu keras membuat jantung. Berdasarkan hasil penelitian di Vietnam terhadap sejumlah hal yang berhubungan dengan masalah kerja lembur. Pekerja yang sering lembur pada umumnya mereka yang memiliki kepribadian dengan tipe:

- a. Jenis pribadi yang cenderung agresif, kompetitif, mudah tegang, sangat peduli waktu, dan cepat marah.
- b. Mudah stress akibat kurang banyak istirahat dan tidur
- c. Ada tekanan darah tinggi yang berhubungan dengan stress kerja yang tersembunyi. Masalah ini tak muncul saat *checkup* medis.
- d. Pekerja yang sering bekerja lembur sering kali tetap bekerja ketika sakit, tak mempedulikan gejala masalah kesehatan, dan tidak pergi dokter untuk mengobati penyakitnya.
- e. Pengalaman stress yang kronis dapat berdampak pada proses metabolisme tubuh

Berdasarkan hasil penelitian, resiko penderita jantung iskemik pada pekerja wanita meningkat akibat adanya tekanan pekerjaan yang terlalu berat. Penyakit jantung iskemik sering disebut sebagai *silent killer*, banyak di antara penderita tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit ini karena mereka tidak mengalami gejala. Studi penelitian terdahulu telah menyebutkan adanya keterkaitan antara stress di tempat kerja dan risiko penyakit jantung. Akan tetapi kebanyakan studi ini hanya berfokus pada kalangan pria. Sementara menurut hasil riset lainnya di New York yang dilakukan

terhadap 2.200 pekerja pria dan wanita. Kestabilan kejiwaannya yang rata-rata bekerja dalam seminggu mencapai 40 jam sebagai pekerja yang memiliki jam kerja lama cenderung mengalami masalah kejiwaan. Yang berpengaruh menurunnya kinerja, mental para pekerja. Sebagai contoh, seorang peneliti bernama Dr Marianna Virtanen mengungkapkan bahwa waktu kerja yang panjang berpengaruh pada fungsi kognitif seseorang.

Pada saat berlangsung lama, akan berpengaruh pada kesehatan jiwa pada pekerja. Dimana para pekerja yang memiliki jam kerja 55 jam perminggu akan mengalami penurunan kestabilan yang cukup parah dalam kurun waktu sekitar lima tahun. Sehingga para ahli menilai, temuan ini menunjukkan sebuah pesan akan pentingnya keseimbangan antara hidup dan pekerjaan bagi sebuah kesehatan. Agen Penelitian Kanker Internasional (IARC) baru-baru ini memutuskan untuk memasukan poin mengenai bekerja pada malam hari ke dalam kedalam daftar pekerjaan yang beresiko kanker. Daftar tersebut termasuk sinar ultraviolet kedalam daftar pekerjaan beresiko kanker. Dalam daftar tersebut juga termasuk sinar ultraviolet, karbon hitam, mesin pembuatan uap, zat-zat berwarna berbahaya dan sebagainya. Seorang ilmuwan Jepang University Of Occupational and Environmental Health pernah mengadakan sebuah eksperimen. Mereka mengamati 14.000 orang selama 10 tahun. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa karyawan yang bekerja dengan jam kerja yang fleksibel lebih banyak menderita kanker prostat ketimbang mereka yang bekerja dengan jam kerja standar. Pakar Denmark dari Institut Epidemiology melakukan pemeriksaan terhadap tujuh ribu wanita berusia 30 sampai dengan 54 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa para wanita yang bekerja setidaknya selama enam bulan lamanya memiliki peluang tinggi mengidap penyakit tumor payudara.

Pada wanita yang bekerja enam bulan pada malam hari, cenderung berpeluang mengidap penyakit payudara. Richard Steven seorang professor dari Connecticut University Health Centre merupakan ilmuwan pertama yang meneliti interkoneksi antara bekerja malam hari dan kanker payudara yang dilakukan pada tahun 1930-an, pada saat itu ditemukan banyak perusahaan yang mulai menetapkan 24 jam

kerja penuh sehari dengan memperkerjakan wanita sebagai buruh dengan system shift siang dan malam hari. Fenomena yang terjadi sekarang posisi kerja lembur (*overtime*) seolah menjadi suatu kebutuhan dalam rangka menambah pendapatan. Karena pada kenyataannya, seiring dengan kenaikan harga komponen kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari sehingga terjadi inflasi, ternyata tidak diimbangi dengan kenaikan upah/gaji pokok yang signifikan. Istilahnya kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang terjadi tidak sebanding dengan meroketnya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran. Sehingga seandainya tidak ada tambahan pemasukan dari kerja lembur (*overtime*) dan hanya mengandalkan dari gaji pokok saja tidak bisa cukup. Dan inilah fakta yang terjadi di lapangan sekarang ini.

BAB VIII PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT INDUSTRI

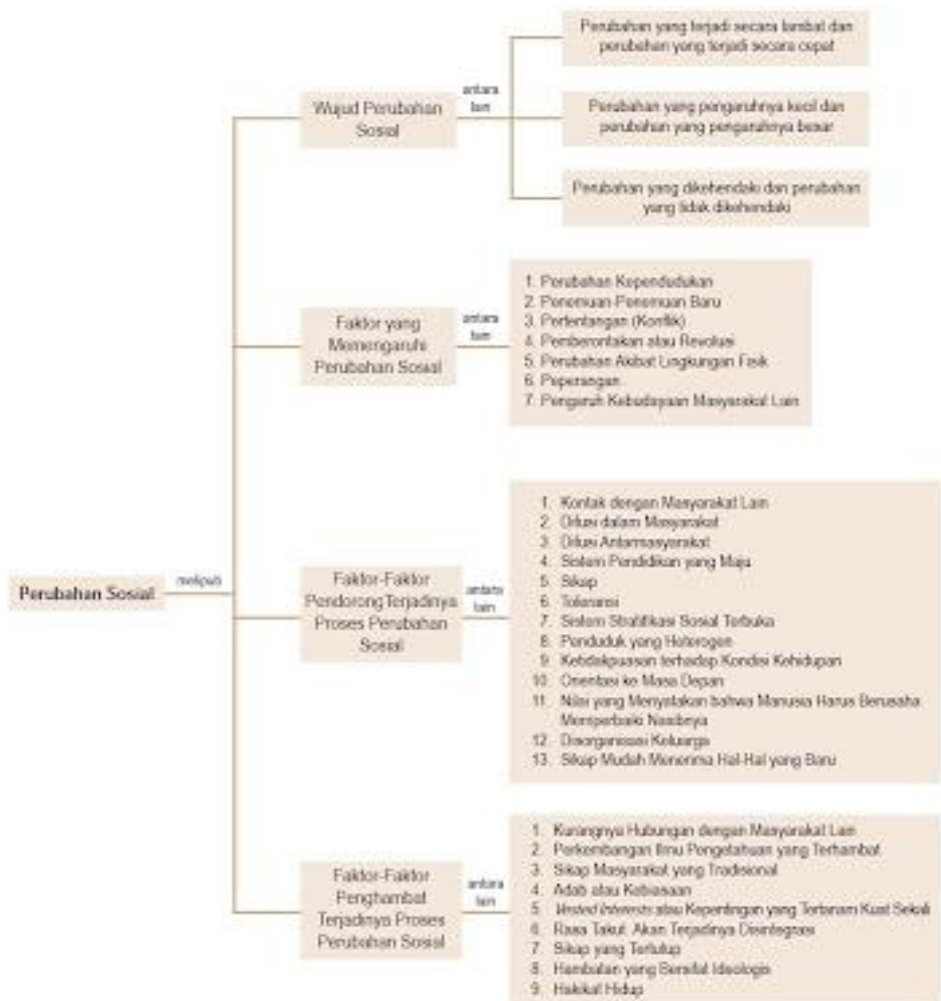
Pada bab delapan terang Perubahan Sosial Masyarakat Industri, akan dibahas tentang: Pengertian Perubahan Sosial Masyarakat Industri, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Sosial, Proses Perubahan Sosial Masyarakat Industri, Fenomena dan Dinamika, Masyarakat Industri dan Industri, Dan Masyarakat Yang Akan Datang.

A. Konsep Perubahan Sosial Masyarakat Industri

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat dari adanya interaksi antar manusia dan antarkelompok. Akibatnya, di antara mereka terjadi proses saling memengaruhi yang menyebabkan perubahan sosial. Hal ini berarti perubahan sosial tidak bisa kita hindari. Kemajuan teknologi yang amat pesat telah membawa berbagai macam pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar. Pengaruh kemajuan teknologi begitu mudah hadir di tengah-tengah kita, cepat atau lambat dengan tanpa disadari telah megadopsi nilai-nilai baru tersebut

Terjadinya perubahan yang terjadi di masyarakat dapat berupa nilai-nilai sosial, norma-norma, berupa pola-pola perilaku individu dan organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan atau kelas-kelas dalam masyarakat, kekuasaan, wewenang, interaksi sosial, status, lembaga dan struktur sosial dalam masyarakat. Perubahan dalam bidang kehidupan sosial tertentu tidak hanya semata-mata pada suatu kemajuan (*progres*), namun dapat berupa kemuduran (*regres*), atau dengan kata lain, perubahan social merupakan katidak sesuaian unsut-unsur yang saling berbeda yang ada dan terjadi dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu pola kehdupan yang fungsinya tidak serasi dengan keadaannya lebih buruk dari yang sebelumnya. Dengan demikian, perubahan social merupakan wujud dari sebuah dinamika yang menjadi yang menjadi inti etos dari masyarakat. Oleh sebab itu perubahan sosial selalu menjadi tofik menarik bagi banyak sosiologi modern, terutma dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi yang diusahakan oleh banyak masyarakat di berbagai negara yang memperoleh kemerdekaan setelah perang dunia ke dua.

Perubahan pada bidang-bidang kehidupan tertentu tidak hanya semata-mata berarti suatu kemajuan, namun dapat pula berarti kemunduran. Dengan kata lain, perubahan sosial merupakan ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda yang ada di masyarakat sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang fungsinya tidak serasi yang keadaannya lebih buruk dari sebelumnya. Untuk lebih jekasnya, di sini akan bawah ini akan dojelaskan Peta Konsep Perubahan Sosial.



Gambar 1. Peta Konsep Perubahan Sosial.

Perubahan sosial merupakan wujud dari sebuah dinamika yang menjadi inti jiwa masyarakat. Jadi, masalah perubahan sosial menjadi topik yang menarik bagi banyak sosiolog modern, terutama dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi yang diusahakan oleh banyak masyarakat negara-negara yang memperoleh kemerdekaan politiknya setelah Perang Dunia II. Perubahan sosial itu didorong oleh rangsangan terhadap kemauan untuk bertindak. Kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan sosial menurut Margono (dalam Taneko) bersumber pada hal-hal berikut:

1. Ketidakpuasan terhadap situasi yang ada karena ada keinginan untuk situasi yang lain.
2. Adanya pengetahuan tentang perbedaan antara yang ada dan yang seharusnya bisa ada.
3. Adanya tekanan dari luar, seperti kompetisi, keharusan menyesuaikan diri, dan lain-lain.
4. Kebutuhan dari dalam untuk mencapai efisiensi dan peningkatan, misalnya produktivitas dan lain-lain. (Pengantar Sosiologi, 2004)

Perubahan sosial pada masyarakat industri dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat yang terjadi sebagai akibat dari proses industrialisasi, mulai dari yang bersifat individual sampai yang lebih kompleks. Perubahan sosial dapat dilihat dari segi terganggunya kesinambungan di antara kesatuan sosial walaupun keadaannya relatif kecil. Perubahan ini meliputi struktur, fungsi, nilai, norma, pranata, dan semua aspek yang dihasilkan dari interaksi antar manusia, organisasi atau komunitas, termasuk perubahan dalam hal budaya. Adanya pengenalan teknologi, cara mencari nafkah, migrasi, pengenalan ide baru, dan munculnya nilai-nilai sosial baru untuk melengkapi ataupun menggantikan nilai-nilai sosial yang lama merupakan beberapa contoh perubahan sosial dalam aspek kehidupan. Dengan kata lain, perubahan sosial merupakan suatu perubahan menuju keadaan baru yang berbeda dari keadaan sebelumnya.

Di bawah ini akan dijelaskan pengertian perubahan sosial secara umum menurut para sosiolog, sebagai berikut:

1. William F. Ogburn (1964:), mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan material dan immaterial, yang ditekankan pada pengaruh

besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.

2. Kingsley Davis (1960:), mengartikan *perubahan sosial* adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan yang selanjutnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.
3. Mac Iver (1937: 272), mengartikan bahwa perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial (perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial.
4. Gillin dan Gillin (1957: 279), mengartikan perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, dan ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
5. Selo Soemardjan (1962: 379), merumuskan perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Perubahan yang paling awal dapat muncul adalah adanya kebutuhan setiap individu sebagai anggota masyarakat dalam menanggapi lingkungannya. Hal itu mengakibatkan terjadinya interaksi sosial antar individu, baik antar warga masyarakat setempat maupun dengan warga masyarakat lain yang saling mempengaruhi. Menurut Bonner, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih yang saling memengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Dalam interaksi sosial, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi seperti imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Keempat faktor tersebut membuat individu memilih untuk melakukan interaksi sosial yang hasilnya adalah menanggapi setiap gerak kehidupan dalam masyarakat.

Tanggapan anggota masyarakat tersebut terutama dalam menanggapi tradisi yang berlaku.

Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat terjadi karena masyarakat tersebut menginginkan perubahan. Perubahan juga dapat terjadi karena adanya dorongan dari luar sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak akan mengikuti perubahan. Perubahan yang menyangkut kehidupan manusia atau terkait dengan lingkungan fisik, alam, dan sosial disebut perubahan sosial. Perubahan sosial cepat atau lambat senantiasa terjadi dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Suatu perubahan bergantung dan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Perubahan dapat berarti suatu perkembangan yang sesuai dengan tujuan atau dapat juga tidak sesuai dengan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, orang perlu mengetahui mengapa perubahan dapat terjadi dan mengapa masyarakat perlu menanggapi atau menyesuaikan dengan perubahan.

1. Wujud Perubahan Sosial

Perubahan sosial dapat terjadi dalam segala bidang yang wujudnya dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Beberapa bentuk perubahan sosial menurut Soekanto, yaitu sebagai berikut:

- a. Perubahan yang Terjadi Secara Lambat dan Perubahan yang Terjadi Secara Cepat. Perubahan terjadi secara lambat akan mengalami rentetan perubahan yang saling berhubungan dalam jangka waktu yang cukup lama. Perkembangan perubahan ini termasuk dalam evolusi. Perubahan secara evolusi dapat diamati berdasarkan batas waktu yang telah lampau sebagai patokan atau tahap awal sampai masa sekarang yang sedang berjalan. Adapun penentuan kapan perubahan tersebut terjadi, bergantung pada orang yang bersangkutan. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat mengubah dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, perubahan itu dinamakan revolusi. Contohnya, Revolusi Industri di Eropa. Revolusi tersebut menyebabkan perubahan besar-besaran dalam proses produksi barang-barang industri. Contoh lain Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang mengubah tatanan kenegaraan dan sistem pemerintahan NKRI.
- b. Perubahan yang Pengaruhnya Kecil dan Perubahan yang Pengaruhnya Besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang mempengaruhi unsur-unsur kehidupan

masyarakat. Akan tetapi, perubahan ini dianggap tidak memiliki arti yang penting dalam struktur sosial. Contohnya, perubahan mode pakaian yang tidak melanggar nilai sosial. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang dapat memengaruhi lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat. Misalnya, perubahan sistem pemerintahan yang mempengaruhi tatanan kenegaraan suatu bangsa.

- c. Perubahan yang Dikehendaki dan Perubahan yang Tidak Dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang memang telah direncanakan sebelumnya terutama oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijaksanaan. Misalnya, penerapan program Keluarga Berencana untuk membentuk keluarga kecil yang sejahtera dan menurunkan angka pertumbuhan penduduk. Perubahan yang tidak dikehendaki umumnya beriringan dengan perubahan yang dikehendaki. Misalnya adanya pembuatan jalan baru yang melalui suatu desa maka sumber alam desa akan mudah dipasarkan ke kota. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan penduduk desa akan meningkat. Meskipun begitu lancarnya hubungan desa dengan kota menyebabkan mudahnya penduduk desa melakukan urbanisasi dan masuknya budaya kota terutama yang bersifat negatif, seperti mode yang dipaksakan, minuman keras, dan keinginan penduduk desa untuk memiliki barang-barang mewah.

Perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan masyarakat atau perubahan ke arah kemajuan atau kemunduran suatu masyarakat, bergantung pada keadaan masyarakat yang mengalami perubahan itu sendiri. Perubahan sosial terbagi atas dua wujud sebagai berikut: Pertama, Perubahan dalam arti kemajuan (progress) atau menguntungkan, kedua. Perubahan dalam arti kemunduran (regress) yaitu yang membawa pengaruh kurang menguntungkan bagi masyarakat. Jika perubahan sosial dapat bergerak ke arah suatu kemajuan, masyarakat akan berkembang. Sebaliknya, perubahan sosial juga dapat menyebabkan kehidupan masyarakat mengalami kemunduran. Kemunduran atau kemajuan suatu masyarakat disebabkan oleh perubahan sosial. Jika muncul inovasi baru dengan kualitas tinggi, akan terjadi proses perubahan yang sangat cepat pada masyarakat. Sebaliknya, perubahan yang terjadi di masyarakat

dapat juga seperti jalan di tempat. Misalnya keadaan masyarakat berubah, tetapi perubahan tersebut tidak meningkatkan atau menurunkan kualitas hidup mereka. Keadaan sosial yang baru dengan masuknya teknologi atau peraturan baru tidak mempunyai kualitas inovasi tinggi apabila masyarakat menganggapnya hanya mengganti keadaan yang lama. Akibatnya, proses perubahan ke arah kemajuan menjadi lambat. Hal itu disebut perubahan sirkuler (berputar-putar tanpa menimbulkan pengaruh). Jika dibiarkan tanpa adanya campur tangan pemerintah, akan sampai pada kemacetan pembangunan (stagnasi).

Akibatnya, terjadi proses pelapukan kebudayaan atau peradaban masyarakat menjadi menurun. Oleh karena itu, maju mundurnya suatu masyarakat bergantung pada masyarakat itu sendiri dalam menanggapi setiap gejala perubahan yang ada di lingkungannya. Perubahan sosial ke arah kemajuan merupakan perubahan yang diinginkan oleh setiap masyarakat. Kadang-kadang perubahan sosial tidak diinginkan oleh kelompok masyarakat tertentu karena perubahan tersebut dianggap dapat mengganggu kehidupan mereka yang telah mapan. Perubahan sosial dapat pula mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, ada beberapa faktor yang cukup berperan dan berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya suatu perubahan oleh masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal yang baru. Contohnya, masyarakat tersebut mengadakan kebiasaan yang berhubungan dengan kebudayaan lain.
- b. Suatu unsur baru dapat diterima oleh suatu masyarakat apabila unsur baru tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut.
- c. Corak struktur sosial masyarakat menentukan proses penerimaan unsur kebudayaan baru. Struktur sosial yang tertutup akan sulit menerima kebudayaan baru.
- d. Unsur kebudayaan baru akan dapat diterima oleh suatu masyarakat apabila telah ada dasar unsur-unsur kebudayaan sebelumnya.
- e. Unsur baru dapat diterima oleh warga masyarakat apabila telah terbukti kegunaannya.

2. Teori Perubahan Sosial

Spencer menerapkan konsep “yang kuat yang akan menang”. Adapun Darwin berpendapat survival of the fittest. Darwin berpandangan bahwa orang-orang yang cakap dan bergairah (energetik) akan memenangkan perjuangan hidup, sedangkan orang-orang yang malas dan lemah akan tersisih. Pandangan ini kemudian dikenal sebagai “Darwinisme sosial” dan banyak dianut oleh golongan kaya. (Sumber: Sosiologi Jilid 2, 1984) Perubahan sosial merupakan suatu hal yang wajar dan akan terus berlangsung sepanjang manusia berinteraksi dan bersosialisasi. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat, baik yang bersifat materiil maupun immaterial, sebagai cara untuk menjaga keseimbangan masyarakat dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Misalnya, unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan. Para sosiolog berpendapat bahwa perubahan sosial adalah kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kondisi yang dimaksud antara lain kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, ataupun biologis. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek kehidupan sosial lainnya. Beberapa teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadi perubahan sosial antara lain sebagai berikut:

1) Teori Evolusi (*Evolutionary Theory*).

Teori ini berpijak pada teori evolusi Darwin dan dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Spencer. Tokoh yang berpengaruh pada teori ini ialah Emile Durkheim dan Ferdinand Tonnies. Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja. Adapun Tonnies memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif, menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonal. Tonnies tidak yakin bahwa perubahan-perubahan tersebut selalu membawa kemajuan. Dia melihat adanya fragmentasi sosial (perpecahan dalam masyarakat), individu menjadi terasing, dan lemahnya ikatan sosial sebagai akibat langsung dari perubahan sosial budaya ke arah individualisasi dan pencarian kekuasaan. Gejala itu tampak jelas pada masyarakat perkotaan. Teori ini

masih belum memuaskan banyak pihak karena tidak mampu menjelaskan jawaban terhadap pertanyaan mengapa masyarakat berubah. Teori ini hanya menjelaskan proses perubahan terjadi.

2) Teori Konflik (*Conflict Theory*).

Menurut teori ini, konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok tertindas dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa semua perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Ia yakin bahwa konflik atau pertentangan selalu menjadi bagian dari masyarakat. Menurut pandangannya, prinsip dasar teori konflik (konflik sosial dan perubahan sosial) selalu melekat dalam struktur masyarakat

3) Teori Fungsional (*Functional Theory*).

Teori fungsional berusaha melacak penyebab perubahan sosial sampai pada ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi memengaruhi mereka. Teori ini berhasil menjelaskan perubahan sosial yang tingkatnya moderat. Konsep kejutan budaya menurut William F. Ogburn berusaha menjelaskan perubahan sosial dalam kerangka fungsional. Menurutnya, meskipun unsur-unsur masyarakat saling berhubungan satu sama lain, beberapa unsurnya bisa saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur lainnya tidak. Ketertinggalan tersebut menjadikan kesenjangan sosial dan budaya di antara unsur-unsur yang berubah sangat cepat dan unsur yang berubah lambat. Kesenjangan ini akan menyebabkan adanya kejutan sosial dan budaya pada masyarakat. Ogburn menyebutkan perubahan teknologi biasanya lebih cepat daripada perubahan budaya non material, seperti kepercayaan, norma, nilai-nilai yang mengatur masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa perubahan teknologi seringkali menghasilkan kejutan budaya yang pada gilirannya akan memunculkan pola perilaku yang baru meskipun terjadi konflik dengan nilai-nilai tradisional. Contohnya, ketika alat-alat kontrasepsi pertama kali diluncurkan untuk mengendalikan jumlah penduduk dalam program keluarga

berencana (KB), banyak pihak menentang program tersebut karena bertentangan dengan nilai-nilai agama serta norma yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. Meskipun demikian, lambat laun masyarakat mulai menerima program KB tersebut karena dapat bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.

4) Teori Siklus (*Cyclical Theory*)

Teori ini mempunyai perspektif (sudut pandang) yang menarik dalam melihat perubahan sosial karena beranggapan bahwa perubahan sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun, bahkan orang-orang yang ahli sekalipun. Dalam setiap masyarakat, terdapat siklus yang harus diikutinya. Kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban (budaya) tidak dapat dielakkan dan tidak selamanya perubahan sosial membawa kebaikan.

Sejalan dengan itu, Oswald Spengler mengemukakan teorinya bahwa setiap masyarakat berkembang melalui empat tahap perkembangan seperti pertumbuhan manusia, yaitu masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua. Ia merasa bahwa masyarakat Barat telah mencapai masa kejayaannya pada masa dewasa, yaitu selama zaman pencerahan (*renaissance*) abad ke-15. Sejak saat itu, peradaban Barat mulai mengalami kemunduran dan menuju ke masa tua. Tidak ada yang dapat menghentikan proses tersebut, seperti yang terjadi pada peradaban Babilonia di Mesir, Yunani, dan Romawi yang terus mengalami kemunduran sampai akhirnya runtuh. Teori-teori yang berkaitan dengan arah perubahan sosial telah diringkas Moore dalam bentuk diagram-diagram sederhana, yaitu sebagai berikut.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Sosial

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial antara lain:

1) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri dan dapat pula dari luar. Meskipun demikian, perubahan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari luar, tetapi masyarakatlah yang akan melaksanakan perubahan. Oleh karena itu, perubahan sosial dapat terjadi karena adanya faktor yang saling memengaruhi, baik dari masyarakat sendiri maupun dari masyarakat lain.

Dengan kata lain, masyarakatlah yang menerima dan melaksanakan perubahan tersebut. Masyarakat secara sadar mengetahui perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Misalnya, masuknya listrik ke pedesaan mempengaruhi perkembangan industri. Kerajinan dan industri kecil akan bertambah maju karena produksi dapat dilakukan pada malam hari. Masuknya televisi ke desa mengakibatkan orang di pedesaan dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan hiburan secara visual. Masuknya listrik ke pedesaan membawa perubahan besar dalam tata kehidupan penduduk, yang meliputi peningkatan industri kecil dan industri rumah tangga, kepuasan menikmati hiburan dan informasi mengenai peristiwa terkini dari seluruh penjuru dunia. Adanya listrik masuk desa secara tidak langsung dapat juga berdampak negatif dan dapat membawa perubahan-perubahan yang justru dapat merugikan masyarakat desa itu sendiri. Misalnya, tayangan iklan komersial di televisi yang akan memengaruhi pola konsumtif dan meningkatkan daya beli penduduk desa.

Beberapa faktor perubahan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri dan dari luar masyarakat atau dari masyarakat lain, antara lain sebagai berikut:

a. Perubahan Kependudukan.

Jumlah penduduk yang terus meningkat akan menambah kebutuhan terhadap beberapa fasilitas yang mendukung kehidupan mereka. Contohnya, fasilitas pendidikan, kesehatan, atau lapangan kerja. Jika jumlah anak dalam sebuah keluarga cukup besar, hak atas warisan akan semakin berkurang karena terbagi berdasarkan jumlah anak. Oleh karena itu, pemilikan tanah di pedesaan akan semakin berkurang. Penduduk yang terus bertambah memerlukan lapangan-lapangan kerja baru sedangkan lapangan kerja utama yang ada di desa hanya berkisar pada bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Desa tidak mampu menyediakan lapangan kerja baru dan sumber daya alam pedesaan yang terbatas membuat desa tidak mampu menampung tenaga kerja. Dengan demikian, banyak penduduk desa yang mengadu nasib ke kota untuk bekerja.

b. Penemuan-Penemuan Baru

Penemuan baru merupakan proses sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam jangka waktu relatif cepat yang sering disebut inovasi atau innovation. Penemuan tersebut kemudian

memiliki daya guna dan manfaat bagi masyarakat sehingga tata kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Di samping inovasi terdapat pula discovery yang artinya penemuan dari unsur-unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat baru maupun berupa ide baru atau suatu rangkaian ciptaan-ciptaan dari warga masyarakat. Discovery merupakan pengembangan dari penemuan yang sudah ada kemudian disempurnakan. Jika hasil penyempurnaan atau pengembangan penemuan tersebut (discovery) diakui manfaatnya oleh masyarakat, penemuan tersebut dinamakan invention. Ditemukannya mesin cetak membawa perubahan bagi masyarakat, terutama dalam hal penggandaan buku-buku ilmu pengetahuan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat mengetahui akan kebenaran-kebenaran ilmiah dan mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak dikenal.

Penemuan tersebut dinamakan inovasi. Akan tetapi, alat cetak tersebut sifatnya kaku karena huruf yang ada pada mesin cetak tidak dapat diubah-ubah, satu lempengan untuk satu halaman. Dengan demikian, orang berusaha menemukan alat pencetak yang hurufnya dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan agar pencetakan dapat dengan mudah diperbanyak. Hal tersebut disebut dengan discovery. Penemuan yang sudah ada tersebut dapat juga dikombinasikan dengan berbagai alat bantu agar pencetakan-pencetakan berbagai buku, surat kabar, dan lain-lain lebih mudah. Alat percetakan ini tidak hanya digunakan oleh penemunya, tetapi juga dipasarkan ke berbagai tempat atas permintaan masyarakat. Jika masyarakat telah mengetahui manfaat dari penemuan alat cetak tersebut, proses ini dinamakan invention. Seorang Austria, S. Marcus (1875) membuat motor gas yang pertama. Tiga puluh tahun kemudian banyak pencipta lain yang menambah perbaikan pada motor tersebut sehingga terciptalah mobil yang dapat dipakai sebagai alat pengangkut oleh manusia dengan cukup praktis dan aman. Bentuk mobil semacam itu yang mendapat paten di Amerika Serikat tahun 1911. Mobil dapat diterima sampai sekarang maka mobil menjadi suatu "*Invention*". (Sumber: Sosiologi Suatu Pengantar, 1990). Jika orang mengamati perkembangan penemuan baru, tampak ada faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi masyarakat atau individu untuk lebih menyempurnakannya. Hal tersebut bertujuan agar penemuan

tersebut menjadi lebih berguna dan bermanfaat dan diharapkan dapat berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan yang lain.

a. Pertentangan (Konflik)

Pertentangan dalam masyarakat dapat menimbulkan perubahan sosial. Pertentangan dapat terjadi antara kelompok tua yang konservatif dan kelompok muda yang dinamis. Pertentangan ini sering terjadi pada masyarakat yang sedang berkembang menuju masyarakat modern yang lebih kompleks dan masyarakat tradisional. Pertentangan juga terjadi antarindividu, antarkelompok, serta antara individu dan kelompok. Misalnya, seorang yang membawa nilai-nilai baru mengenai penundaan usia perkawinan. Gagasan tersebut diutarakan pada masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi pelaksanaan perkawinan di usia muda. Tentu saja gagasan tersebut ditentang karena tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Usaha agar masyarakat dapat menerima pemikiran tersebut memerlukan waktu yang lama. Kesadaran akan penundaan perkawinan umumnya bergantung pada tingkat pendidikan di masyarakat. Jika tingkat pendidikan di masyarakat tinggi, perkawinan dilakukan setelah mencapai hal-hal tertentu tanpa memandang usia.

b. Terjadinya Pemberontakan atau Revolusi dalam Masyarakat

Pemberontakan yang terjadi di masyarakat dapat di ketahui melalui pemberitaan di media massa, seperti surat kabar, radio, dan televisi akan membawa perubahan-perubahan politik di negara bersangkutan. Contohnya, pemberontakan yang terjadi di Sri Lanka yang dilakukan oleh Suku Tamil atau pemberontakan di India yang dilakukan di daerah Kashmir. Contoh lainnya adalah pernyataan kemerdekaan secara sepihak oleh masyarakat Chechnya yang mengakibatkan pemerintah Rusia berusaha menumpas pemberontakan tersebut.

c. Perubahan yang Diakibatkan oleh Lingkungan Fisik

Gejala yang terjadi di lingkungan alam dapat menyebabkan perubahan sosial. Misalnya, gempa bumi terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Gempa bumi tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan banyak harta benda dan keluarga. Keadaan tersebut memaksa masyarakat membentuk kehidupan kembali melalui lembaga atau organisasi sosial yang

baru karena kehidupan lama telah rusak atau hilang. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perubahan mata pencaharian, perubahan keluarga, atau perubahan kekayaan.

d. Peperangan

Peperangan yang terjadi antara satu negara dan negara lain menyebabkan terjadinya perubahan karena kehancuran akibat perang. Contohnya, hancurnya harta benda, kehilangan anggota keluarga, atau bencana kelaparan. Negara yang kalah perang akan tunduk dengan menerima ideologi dan kebudayaan dari pihak yang memenangkan peperangan.

e. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain

Pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain terutama kebudayaan Barat, dapat berasal dari film, televisi, radio, surat kabar, dan media massa lainnya. Kadang-kadang media tersebut memberikan pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan gaya hidup masyarakat Indonesia. Akan tetapi, ada pula pengaruh luar yang positif, contohnya dalam hal pendidikan. Mereka yang menerima beasiswa belajar di luar negeri membawa pulang teori dan pandangan barat ke tanah air sehingga ilmu yang mereka dapat digunakan dan disesuaikan dengan budaya Indonesia, meski tidak menutup mata apabila ada beberapa orang yang lebih memilih untuk tetap berideologi Barat.

2) Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Proses Perubahan Sosial

Adapun faktor-faktor pendorong terjadinya proses perubahan sosial, antara lain sebagai berikut:

a. Kontak dengan Masyarakat Lain

Adanya interaksi dengan masyarakat di luar masyarakatnya sendiri akan menimbulkan komunikasi yang saling mempengaruhi. Hal tersebut berakibat terjadinya penyebaran atau difusi suatu gagasan atau teknologi, dari masyarakat satu ke masyarakat lain yang dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan merupakan difusi dari penemuan baru atau dapat juga dalam bentuk penyebaran informasi, teknologi, atau manfaat dari suatu lembaga masyarakat seperti KUD.

b. Difusi dalam Masyarakat

Proses penyebaran suatu gagasan atau hasil dari proses (produksi) dari dalam masyarakat itu sendiri, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan secara meluas sehingga melewati batas tempat kebudayaan itu timbul. (Sumber: Sosiologi Suatu Pengantar, 1990)

c. Difusi Antar Masyarakat

Penyebaran unsur-unsur baru di masyarakat dapat berasal dari pengaruh masyarakat yang lain. Misalnya, adanya proyek percontohan di masyarakat petani dengan menerapkan sistem diversifikasi tanaman. Adanya sistem rotasi tanaman dengan beragam tanaman pada setiap musim berpengaruh terhadap kondisi kesuburan tanah dan hasil yang dicapai dapat melebihi hasil sebelumnya. Dengan adanya diversifikasi tanaman, harga dapat dipertahankan sehingga memberi keuntungan bagi petani. Difusi antar masyarakat dapat terjadi apabila proyek diversifikasi tanaman ini dicontoh oleh petani-petani dari daerah lain.

d. Sistem Pendidikan yang Maju

Kemajuan suatu bangsa atau masyarakat dapat dilihat dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Perkembangan zaman akan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang tidak lain dipenuhi melalui bidang pendidikan. Berkembangnya pendidikan akan mendorong terjadi perubahan sosial. Pendidikan membuat seorang individu mengetahui banyak hal dan mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi pada kehidupan masyarakat lain, melalui pola pikir yang maju dan terpelajar. Pendidikan dapat menyejajarkan masyarakat yang sedang berkembang dengan masyarakat yang maju.

e. Sikap

Masyarakat atau seorang individu yang memiliki keinginan untuk maju akan menghargai karya yang dihasilkan oleh masyarakat atau orang lain. Jika sikap tersebut telah tertanam dengan baik, akan mendorong munculnya penemuan-penemuan baru atau berusaha untuk membuat karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, pemerintah memberikan penghargaan Kalpataru terhadap orang yang berjasa dalam bidang lingkungan hidup, LIPI menyelenggarakan lomba karya ilmiah remaja sebagai awal

dari usaha penemuan baru di kalangan remaja, setiap pengajar di perguruan tinggi wajib melakukan penelitian sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (Penelitian, Pengabdian, dan Pengajaran). Adanya penelitian dan penemuan unsur-unsur baru merupakan sikap kepedulian terhadap masyarakat dan sebagai usaha mempersiapkan dan mengisi pembangunan nasional.

f. Toleransi

Masyarakat tidak kaku dalam menghadapi norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri, terutama norma yang tidak tertulis. Apabila terjadi suatu perilaku yang berbeda dalam suatu masyarakat, namun tidak keluar dari persoalan yang dapat mengarah pada aspek-aspek negatif, seperti konflik sosial. Sikap tidak mempersoalkan perilaku tersebut merupakan bagian dari sikap toleransi terhadap orang lain. Contohnya, di perkotaan secara umum dihuni oleh warga yang sangat heterogen. Salah satu heterogenitasnya adalah dalam bahasa. Terkadang bahasa yang digunakan antara anggota masyarakat memiliki nilai yang berbeda. Satu pihak menilainya sebagai bahasa halus dan sopan, namun pihak lain menilai sebaliknya. Di sinilah sangat dibutuhkan sikap toleransi.

g. Sistem Stratifikasi Sosial Terbuka

Masyarakat yang memiliki stratifikasi (lapisan) sosial terbuka memungkinkan terjadinya mobilitas (perpindahan) sosial antar lapisan. Seseorang yang berada pada lapisan yang paling bawah dapat berpindah ke lapisan yang lebih atas apabila yang bersangkutan berusaha dan bekerja keras untuk mencapainya.

h. Penduduk yang Heterogen

Penduduk Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama, dan budaya merupakan masyarakat heterogen atau disebut juga masyarakat majemuk. Jika di antara mereka ada yang merasa lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, hal ini mudah memicu konflik yang dapat mengakibatkan munculnya masalah sosial atau kegoncangan masyarakat. Keadaan yang demikian berakibat terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat terutama dalam rangka mencapai suatu integrasi yang dapat diterima oleh berbagai pihak.

- i. Ketidakpuasan terhadap Kondisi Kehidupan
Masyarakat yang tidak puas dengan keadaan sosial, akibat adanya tekanan dari pihak lain atau kekecewaan, maka masyarakat menginginkan ada perubahan agar lepas dari penderitaan yang lama.
- j. Orientasi ke Masa Depan
Masa depan merupakan tumpuan harapan, masa sekarang merupakan masa berusaha. Masa lalu dapat menjadi pengalaman untuk memperbaiki masa sekarang sehingga hasilnya dapat dipetik dan dinikmati di kemudian hari.
- k. Nilai yang Menyatakan bahwa Manusia Harus Berusaha Memperbaiki Nasibnya
Hidup ini tidak semata-mata ditentukan oleh yang Mahakuasa, tetapi hasil usaha yang dicapai manusia itu sendiri. Agar manusia dapat mengubah nasibnya, manusia harus berusaha untuk mencapainya. Setiap perubahan yang diinginkan dapat dicapai dengan usaha, tetapi besar kecilnya hasil bergantung pada kemampuan manusia itu sendiri.
- l. Disorganisasi Keluarga
Kehidupan keluarga yang sering terjadi percekocokan atau konflik di antara anggotanya menyebabkan berkurangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga sehingga anak menjadi korban dan mencari pelarian di luar kehidupan keluarga. Beberapa anak yang memiliki perilaku menyimpang berawal dari rasa kesal, kecewa, atau tidak puas tinggal di rumah yang kemudian melampiaskannya dalam pergaulan yang negatif. Disorganisasi atau perpecahan dalam sebuah keluarga merupakan jalan ke arah perubahan karena di antara satu sama lain sudah tidak ada lagi kecocokan.
- m. Sikap Mudah Menerima Hal-Hal yang Baru
Penemuan baru merupakan langkah menuju perubahan karena yang bersangkutan harus menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, atau barang yang diterimanya. Keadaan tersebut merupakan perubahan hasil adaptasi terhadap lingkungan dan barang baru yang dimilikinya. Contohnya, seorang individu yang selalu mengikuti perkembangan dunia mode atau fashion, menyebabkan yang bersangkutan harus selalu mengikuti perubahan mode dalam masyarakat. Perubahan biasanya dipelopori oleh para generasi muda

yang memiliki pembaru. Jadi perubahan sosial hanya dapat diketahui oleh seseorang yang bercita-cita maju.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Terjadinya Perubahan Sosial

Dorongan terjadinya perubahan sosial senantiasa terdapat di dalam setiap kehidupan, terutama ditunjang oleh keinginan untuk berubah. Adapun faktor penghambat atau yang menghalangi terjadinya perubahan sosial antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya Hubungan dengan Masyarakat yang Lain. Akibat kurangnya hubungan dengan masyarakat luar sehingga informasi yang dapat menunjang pembangunan pada masyarakat tidak dapat diterima dengan baik.
- b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan yang Terlambat. Latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan sempitnya pola pikir seorang individu. Akibatnya, masyarakat tidak mengalami kemajuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat disebabkan oleh masyarakat itu sendiri karena merasa cukup dengan pengetahuan yang dimilikinya, masyarakat tidak siap menerima perubahan.
- c. Sikap Masyarakat yang Tradisional
Sikap masyarakat ini lebih memihak masa lampau karena masa tersebut merupakan masa yang penuh kemudahan menurut beberapa kelompok. Tradisi yang berlaku sebagai warisan masa lampau tidak dapat diubah dan harus terus dilestarikan. Hal ini dapat menghambat perubahan, terutama beberapa kelompok yang konservatif dan ingin tetap bertahan dalam kepemimpinan masyarakat.
- d. Adat atau Kebiasaan
Adat atau keyakinan masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku turun-temurun merupakan pegangan hidup yang harus tetap berlaku dan dijalankan. Kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun merupakan suatu hal yang sulit diubah pada masyarakat. Masyarakat sendiri tidak mau mengubahnya karena takut terjadi bencana atau berkurangnya keberuntungan yang ada dalam kehidupan mereka. Masyarakat yang memegang teguh adat istiadat lama umumnya hidup dan bertahan pada masyarakat tradisional.

- e. **Kepentingan-Kepentingan yang Tertanam Kuat Sekali atau Vested Interests**
Setiap masyarakat memiliki stratifikasi sosial masing-masing yang bergantung pada kedudukan seorang individu yang memiliki peranan dan pengaruh dalam masyarakat. Orang yang berpengaruh akan memiliki kedudukan tinggi. Agar kedudukannya tetap bertahan, setiap perubahan yang masuk akan ditolaknya dengan berbagai alasan.
- f. **Rasa Takut akan Terjadinya Disintegrasi**
Perubahan yang terjadi dalam kehidupan dianggap mengganggu tatanan sosial yang telah berjalan. Hal tersebut disebabkan masuknya unsur perubahan dari luar yang dapat menggoyahkan pola-pola kehidupan dan pada akhirnya masyarakat tidak lagi mempercayai pemimpin mereka bahkan akan meninggalkan tradisi yang telah lama dianut.
- g. **Sikap yang Tertutup**
Unsur-unsur perubahan yang datangnya dari luar dianggap berbahaya. Masyarakat yang demikian umumnya masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa lain sehingga setiap unsur-unsur yang berbau negara penjajah akan ditolak dan dianggap tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat pada sebuah bangsa.
- h. **Hambatan yang Bersifat Ideologis**
Setiap unsur perubahan yang berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan masyarakat akan ditolak karena dianggap berlawanan dengan ideologi mereka. Misalnya, masyarakat percaya bahwa pembangunan sebuah jembatan harus diadakan selamatan terlebih dahulu. Akan tetapi, perencanaan proyek pembangunan tidak percaya akan hal tersebut sehingga perencanaan akan ditolak keberadaannya oleh masyarakat.
- i. **Hakikat Hidup**
Ada masyarakat yang memiliki keyakinan bahwa baik buruknya kehidupan ini ada yang mengatur. Dorongan terjadinya perubahan dan penghambat perubahan senantiasa ada di setiap masyarakat, bergantung besar kecilnya kekuatan dalam menanggapi perubahan tersebut. Apabila dorongan lebih kuat daripada hambatan perubahan sosial akan terjadi. Namun, apabila hambatan lebih kuat daripada dorongan, perubahan akan terhambat atau tidak

terjadi. Hakikat dan sifat manusia menurut kerangka analisis Kluckhohn dan Strodtbeck (1961), bahwa hidup itu buruk dan hidup itu baik. Hidup itu buruk tetapi harus diperbaiki. (Sumber: Pengantar Sosiologi, 2001)

3. Proses Perubahan Sosial Masyarakat Industri

Perubahan sosial merupakan suatu proses yang selalu terjadi dalam setiap kehidupan. Suatu proses perubahan sosial dalam bidang kehidupan tertentu tidak mungkin berhenti pada satu titik karena perubahan di bidang lain akan segera mengikutinya. Hal ini disebabkan struktur lembaga-lembaga kemasyarakatan sifatnya saling terjal. Misalnya, apabila suatu negara mengubah undang-undang atau bentuk pemerintahannya, perubahan yang kemudian terjadi tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga politik. Dewasa ini proses-proses perubahan sosial dapat diketahui dengan adanya ciri-ciri tertentu, antara lain sebagai berikut.

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat akan mengalami perubahan, baik yang terjadi secara lambat maupun secara cepat.
2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Lembaga-lembaga sosial tadi sifatnya interdependen sehingga sulit sekali untuk mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu saja. Proses awal dan proses-proses selanjutnya merupakan suatu mata rantai.
3. Perubahan-perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai lain yang baru.
4. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan dan timbal balik yang sangat kuat.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, proses-proses perubahan sosial yang menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan, disorganisasi, dan reorganisasi adalah sebagai berikut.

- a. Penyesuaian Masyarakat terhadap Perubahan

Keserasian atau harmoni dalam masyarakat (social equilibrium) merupakan keadaan yang diinginkan setiap masyarakat. Keserasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan ketika lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Dalam keadaan demikian, individu secara psikologis merasakan akan adanya ketenteraman karena tidak adanya pertentangan dalam norma-norma dan nilai-nilai. Setiap kali terjadi gangguan terhadap kehidupan, masyarakat dapat menolaknya atau mengubah susunan lembaga-lembaga kemasyarakatannya dengan maksud menerima unsur yang baru. Akan tetapi, kadang unsur yang baru dipaksakan masuknya oleh suatu kekuatan. Jika masyarakat tidak dapat menolaknya karena unsur baru tersebut tidak menimbulkan kegoncangan, pengaruhnya tetap ada, tetapi sifatnya dangkal dan terbatas pada bentuk luarnya. Norma-norma dan nilai-nilai sosial tidak akan terpengaruh olehnya dan dapat berfungsi secara wajar. Kadang unsur-unsur baru dan lama yang bertentangan secara bersamaan memengaruhi norma-norma dan nilai-nilai yang kemudian berpengaruh pula pada warga masyarakat. Hal itu berarti ada gangguan yang terus-menerus terhadap keserasian masyarakat. Keadaan tersebut berarti bahwa ketegangan-ketegangan serta kekecewaan di antara para warga tidak mempunyai saluran pemecahan. Apabila ketidakserasian dapat dipulihkan kembali setelah terjadi suatu perubahan, keadaan tersebut dinamakan penyesuaian (*adjustment*). Jika sebaliknya yang terjadi, dinamakan ketidakpenyesuaian sosial (*maladjustment*) yang mungkin mengakibatkan terjadinya anomie. Suatu perbedaan dapat diadakan antara penyesuaian dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dan penyesuaian dari individu yang ada dalam masyarakat tersebut. Peranan keluarga-keluarga besar atau masyarakat hukum adat semakin berkurang. Kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar atas dasar ikatan atau kesatuan wilayah tempat tinggal terpecah menjadi kesatuan-kesatuan kecil. Misalnya, dalam tradisi di Minangkabau, wanita mempunyai kedudukan penting karena garis keturunan yang matrilineal, terlihat adanya suatu kecenderungan hubungan antara anggota keluarga batih lebih erat. Hubungan antara anak-anak dan ayahnya yang semula dianggap tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap anak-anak karena ayah dianggap sebagai

orang luar, cenderung bergeser. Pendidikan anak-anak yang sebelumnya dilakukan oleh keluarga ibu diserahkan kepada ayah. Jika seorang individu tidak ingin mengalami tekanan-tekanan psikologis, harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Matrilineal adalah garis keturunan ke atas yang ditarik pada penghubung wanita melalui ibu (garis keturunan ibu). (Sumber: Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pangantar, 1993)

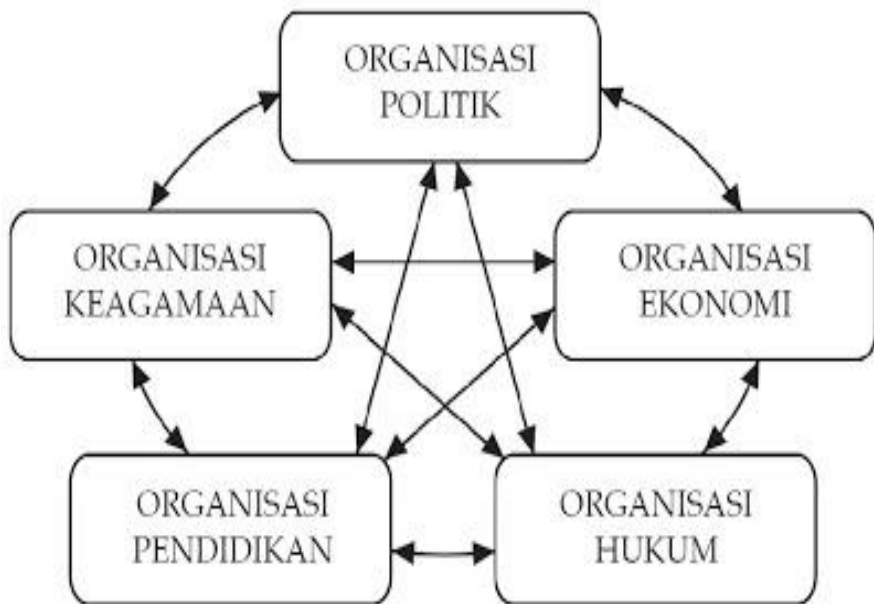
b. Saluran-Saluran Perubahan Sosial

Saluran-saluran perubahan sosial merupakan saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Umumnya, saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, atau rekreasi. Lembaga kemasyarakatan yang menjadi titik tolak, bergantung pada fokus kebudayaan masyarakat pada suatu masa yang tertentu. Lembaga kemasyarakatan yang pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat cenderung untuk menjadi saluran utama perubahan sosial. Perubahan lembaga kemasyarakatan tersebut akan membawa akibat pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya karena lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu sistem yang terintegrasi.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut merupakan suatu struktur apabila mencakup hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pola-pola tertentu dan keserasian tertentu. Misalnya, pada 17 Agustus 1945 saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang merupakan kali pertama terjadinya perubahan pada struktur pemerintahan dari jajahan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini menjalar ke lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Misalnya, dalam bidang pendidikan, tidak ada lagi diskriminasi antara golongan-golongan, seperti pada zaman penjajahan. Setiap orang boleh memilih pendidikan macam apapun yang disukai. Perubahan tersebut berpengaruh pada sikap dan pola perilaku serta nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Saluran tersebut berfungsi agar sesuatu perubahan dikenal, diterima, diakui, serta dipergunakan oleh khalayak ramai, atau mengalami proses institutionalization (pelembagaan). Di bawah ini digambarkan bagan lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai sistem sosial sebagai berikut:

Gambar Bagan 1 keterkaitan Lembaga Kemasyarakatan



Gambar 2. Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan mempunyai pola-pola dan keserasian tertentu.
(Copy Right)

c. Disintegrasi dan Reintegrasi

Perubahan sosial dapat mengakibatkan terjadinya proses disintegrasi atau perpecahan. Disintegrasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Soekanto, disintegrasi disebut juga disorganisasi, yaitu suatu proses pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat yang disebabkan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Proses perubahan sosial akan menyebabkan nilai dan norma masyarakat menjadi tergeser atau berubah.

Dengan demikian, gejala-gejala disorganisasi dan disintegrasi pada awalnya dimulai dari hal-hal sebagai berikut.

- 1) Tidak ada lagi kesepakatan anggota kelompok mengenai tujuan sosial yang hendak dicapai yang semula menjadi pegangan kelompok tersebut.
- 2) Norma-norma sosial tidak lagi membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan yang disepakati.
- 3) Norma-norma dalam kelompok yang dihayati oleh setiap anggota dianggap tidak sesuai lagi.
- 4) Sanksi sudah lemah, bahkan sudah tidak dilaksanakan secara konsekuen. Sanksi yang dikenakan pada orang yang melanggar norma dianggap sudah tidak berlaku.

- 5) Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sudah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Disintegrasi atau disorganisasi merupakan proses pembentukan nilai-nilai baru, baik yang akan mengurangi ikatan dalam masyarakat itu sendiri maupun integrasi masyarakat yang pada akhirnya bergantung pada keinginan masyarakat. Adanya disintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat harus diimbangi dengan reintegrasi yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang diinginkan sesuai dengan tujuan persatuan dan keutuhan masyarakat. Menurut Soekanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reintegrasi terlaksana apabila norma-norma atau nilai-nilai baru telah melembaga (institutionalized) dalam diri warga masyarakat.

Pada dasarnya, setiap perubahan bisa mengakibatkan terjadinya perbedaan tanggapan atau penafsiran. Hal tersebut berakibat tidak sedikit terjadinya reaksi terhadap suatu perubahan. Jika perubahan tersebut dapat menumbuhkan kepentingan kesatuan nasional, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang reintegrasi atau reorganisasi yang tepat, seperti hal-hal berikut ini.

1. Menanamkan kesadaran akan pentingnya berbangsa dan bertanah air.
2. Perundingan apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan reaksi keras (pergolakan).
3. Melalui saluran hukum terhadap mereka yang menyimpang.
4. Menggunakan saluran militer untuk memadamkannya apabila terjadi pergolakan mengarah pada pemberontakan.

Perubahan sosial pada masyarakat industri ditandai dengan semakin berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak selamanya diterima masyarakat. Kadang-kadang masyarakat menolak suatu kebijaksanaan apabila dianggap merugikan atau terlalu memberatkan masyarakat. Misalnya, kenaikan harga barang yang diakibatkan oleh naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Penolakan dapat pula berupa protes dan demonstrasi. Contohnya, demo yang dilakukan oleh karyawan di beberapa perusahaan yang menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kadangkala aksi protes dan demonstrasi juga

dilakukan oleh mahasiswa terhadap pemerintah seperti yang terjadi pada 1966 dan 1998.

Disintegrasi sosial yang terjadi akan mempunyai kekuatan yang merongrong atau melemahkan kedudukan seseorang yang memiliki kekuasaan. Di Indonesia pernah terjadi beberapa kali konflik atau pertentangan dengan kekuasaan pemerintahan. Hal seperti itu terjadi sejak awal kemerdekaan sampai awal berdirinya Orde Baru, bahkan pada masa reformasi pasca 1998. Uraian berikut disusun berdasarkan intensitas (besar-kecilnya) pertentangan itu sendiri antara lain sebagai berikut.

- 1) Kerusuhan (dapat juga disebut riot walaupun pengertiannya tidak tepat), ialah hampir sama dengan demonstrasi atau protes. Perbedaannya kerusuhan mengandung unsur kekerasan fisik dan biasanya diikuti dengan perusakan terhadap barang-barang, penganiayaan terhadap orang yang tidak disenangi, atau terjadi bentrokan fisik dengan pihak pengendali kerusuhan (keamanan). Kerusuhan umumnya ditandai dengan spontanitas terhadap suatu insiden atau sebagai kelanjutan dari demonstrasi.
- 2) Serangan bersenjata (armed attack), ialah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh atau untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan maksud melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan dari kelompok lain. Serangan bersenjata ditandai dengan adanya pertumpahan darah, pergulatan fisik (perkelahian atau pertempuran) atau perusakan barang-barang. Serangan bersenjata terjadi pada kekerasan politik (pemberontakan), kriminalitas, atau kelanjutan dari kerusuhan.
- 3) Kematian akibat kekerasan politik terjadi sebagai akibat dari pengendalian demonstrasi, kerusuhan atau serangan bersenjata.
- 4) Demonstrasi, ialah protes terhadap pemegang kekuasaan tanpa melalui kekerasan. Protes dilakukan secara bersama-sama, umumnya terhadap kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemimpin perusahaan.

d. Dampak Perubahan Sosial

Adanya suatu perubahan dalam masyarakat akibat perubahan sosial bergantung pada keadaan masyarakat itu sendiri yang mengalami perubahan. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi tidak selamanya suatu kemajuan

(progress). Bahkan, dapat pula sebagai suatu kemunduran (regress) masyarakat. Kecepatan perubahan tiap daerah berbeda-beda bergantung pada dukungan dan kesiapan masyarakat untuk berubah. Perbedaan perubahan tersebut dapat mengakibatkan munculnya kecemburuan sosial, yang harus dihindari.

Terdapat beberapa tanggapan masyarakat sebagai akibat dari perubahan sosial yang menimbulkan suatu ketidakpuasan, penyimpangan masyarakat, ketinggalan, atau ketidaktahuan adanya perubahan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Perubahan yang diterima masyarakat kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan. Hal ini karena setiap orang memiliki gagasan mengenai perubahan yang mereka anggap baik sehingga perubahan yang terjadi dapat ditafsirkan bermacam-macam, sesuai dengan nilai-nilai sosial yang mereka miliki.
- 2) Perubahan mengancam kepentingan pihak yang sudah mapan. Hak istimewa yang diterima dari masyarakat akan berkurang atau menghilang sehingga perubahan dianggapnya akan menggoncangkan berbagai aspek kehidupan. Untuk mencegahnya, setiap perubahan harus dihindari dan ditentang karena tidak sesuai kepentingan kelompok masyarakat tertentu.
- 3) Perubahan dianggap sebagai suatu kemajuan sehingga setiap perubahan harus diikuti tanpa dilihat untung ruginya bagi kehidupan. Perubahan juga dianggap membawa nilai-nilai baru yang modern.
- 4) Ketidaktahuan pada perubahan yang terjadi. Hal ini mengakibatkan seseorang ketinggalan informasi tentang perkembangan dunia.
- 5) Masa bodoh terhadap perubahan. Hal itu disebabkan perubahan sosial yang terjadi dianggap tidak akan menimbulkan pengaruh bagi dirinya.
- 6) Ketidaksiapan menghadapi perubahan. Pengetahuan dan kemampuan seseorang terbatas, akibatnya ia tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Perubahan sosial mengakibatkan terjadinya masalah-masalah sosial, seperti kejahatan, atau kenakalan remaja. Meskipun begitu, tidak setiap masalah yang terjadi pada masyarakat disebut masalah sosial. Menurut Merton (dalam

Soekanto), suatu masalah disebut masalah sosial jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut.

1. Tidak adanya kesesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan-kenyataan serta tindakan-tindakan sosial.
2. Semula ada pendapat keliru yang menyatakan bahwa masalah sosial bersumber secara langsung pada kondisi-kondisi ataupun proses-proses sosial. Pendapat tersebut tidak memuaskan dan telah ditinggalkan. Hal pokok di sini bukanlah sumbernya, melainkan akibat dari gejala tersebut (baik gejala sosial maupun gejala bukan sosial) yang menyebabkan terjadinya masalah sosial.
3. Pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan masalah sosial atau tidak. Dalam hal ini, urutannya sangat relatif.
4. Adanya masalah-masalah sosial yang terbuka dan masalah-masalah sosial yang tertutup. Masalah sosial tersebut timbul akibat terjadinya kepincangan-kepincangan masyarakat karena tidak sesuainya tindakan-tindakan dengan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Akibat hal tersebut, masyarakat tidak menyukai tindakan-tindakan yang menyimpang dan berlawanan dengan nilai-nilai yang berlaku.
5. Adanya perhatian masyarakat terhadap masalah-masalah sosial. Masalah sosial merupakan proses terjadinya ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan suatu masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok-kelompok sosial. Dengan kata lain, masalah sosial menyebabkan terjadinya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan warga masyarakat. Hal itu berakibat terjadi disintegrasi sosial atau rusaknya ikatan sosial.

Proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berbentuk antara lain sebagai berikut.

1. Pergolakan dan Pemberontakan. Proklamasi dikumandangkan sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia dapat diterima di berbagai daerah walaupun tidak secara bersamaan. Rakyat menyambut dan mendukungnya. Oleh karena itu, segera dibentuk suatu tatanan dan kehidupan sosial baru. Rangkaian peristiwa itu disebut revolusi. Adanya pergolakan dan

pemberontakan di berbagai daerah pasca kemerdekaan, bertujuan untuk menjatuhkan kedudukan penguasa pada saat itu, sekaligus menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap ideologi pemerintah.

2. Aksi Protes dan Demonstrasi

Aksi protes disebut juga unjuk rasa yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Hal itu terjadi karena setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang mungkin berbeda. Protes dapat terjadi apabila suatu hal menimpa kepentingan individu atau kelompok secara langsung sebagai akibat dari rasa ketidakadilan akan hak yang harus diterima. Akibatnya, individu atau kelompok tersebut tidak puas dan melakukan tindakan penyelesaian. Protes merupakan aksi tanpa kekerasan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat terhadap suatu kekuasaan. Protes dapat pula terjadi secara tidak langsung sebagai rasa solidaritas antar sesama karena kesewenang-wenangan pihak tertentu yang mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain.

3. Kriminalitas

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan memberi peluang bagi setiap orang untuk berubah, tetapi perubahan tersebut tidak membawa setiap orang ke arah yang dicita-citakan. Hal ini berakibat terjadinya perbedaan sosial berdasarkan kekayaan, pengetahuan, perilaku, ataupun pergaulan. Perubahan sosial tersebut dapat membawa seseorang atau kelompok ke arah tindakan yang menyimpang karena dipengaruhi keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi atau terpuaskan dalam kehidupannya.

Perbuatan kriminal yang muncul di masyarakat secara khusus akan diuraikan sebagai akibat terjadinya perubahan sosial yang menimbulkan kesenjangan kehidupan atau jauhnya ketidaksamaan sosial. Akibatnya, tidak semua orang mendapat kebahagiaan yang sama. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan setiap orang memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap hak dan kewajibannya. Setiap orang harus mendapat hak disesuaikan dengan kewajiban yang dilakukan. Adakalanya orang ingin mendapatkan hak tetapi tidak sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan dan kesempatan untuk melakukan hal yang salah terbuka, sedangkan pengawasan terhadap perbuatan yang salah lemah. Akibatnya, terjadi

penyelewengan dan pelanggaran. Perbuatan demikian bisa terjadi karena melihat perubahan orang lain dianggap lebih baik daripada dirinya atau sebagian besar masyarakat mengalami perubahan sedangkan dirinya tidak. Oleh karena itu, timbul suatu dorongan untuk meningkatkan kemampuan nya yang tidak sesuai dengan kebenaran atau norma yang berlaku dalam masyarakat.

4. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Bangsa Indonesia yang sedang membangun perlu memiliki sistem administrasi yang bersih dan berwibawa, bebas dari segala korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah korupsi menyangkut berbagai aspek sosial dan budaya maka Bung Hatta (dalam Mubyarto) mengatakan bahwa korupsi adalah masalah budaya. Apabila hal ini sudah membudaya di kalangan bangsa Indonesia atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa akan sulit untuk diberantas. Akibatnya, hal tersebut akan menghambat proses pembangunan nasional. Untuk memberantas korupsi, tidak hanya satu atau beberapa lembaga pemerintahan saja yang harus berperan, tetapi seluruh rakyat Indonesia harus bertekad untuk menghilangkan korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kolusi adalah kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji. Nepotisme merupakan kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri.

5. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan disintegrasikan dari keutuhan suatu masyarakat. Hal itu karena tindakan yang mereka lakukan dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, kenakalan remaja disebut sebagai masalah sosial. Munculnya kenakalan remaja merupakan gejala kehidupan yang disebabkan adanya perubahan-perubahan sosial di masyarakat, seperti pergeseran fungsi keluarga karena kedua orangtua bekerja sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi berkurang.

Selain itu, pergeseran nilai dan norma masyarakat mengakibatkan berkembangnya sifat individualisme. Juga pergeseran struktur masyarakat mengakibatkan masyarakat lebih menyerahkan setiap permasalahan kepada yang berwenang. Perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan unsur budaya lainnya dapat mengakibatkan disintegrasikan.

e. Modernisasi

Pengertian modernisasi pada awalnya berkembang pada abad XVIII di Eropa, ketika ditemukannya mesin uap dan mesin pemintal untuk tekstil. Dengan demikian, perkembangan tersebut merupakan landasan bagi industrialisasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat Eropa, yaitu yang lazim dikenal dengan Revolusi Industri. Perubahan-perubahan penggunaan alat-alat industri terjadi di Inggris kemudian menyebar ke berbagai negara di Eropa. Peristiwa industrialisasi tersebut ternyata sejalan dengan Revolusi Prancis yang menentang dan menghancurkan hak-hak istimewa yang dimiliki secara turun-temurun oleh sekelompok orang (kaum feodal), dan munculnya persamaan hak setiap warga negara sehingga hal ini merupakan hal awal demokratisasi di Eropa. Dari kedua revolusi tersebut, kemajuan perekonomian melalui industrialisasi menyebabkan negara menjadi maju dan munculnya persamaan hak telah menyadarkan peranan setiap orang dalam menentukan kehidupannya. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dikatakan sebagai awal dari modernisasi.

Perkembangan modernisasi selanjutnya tidak terbatas pada industrialisasi dan demokratisasi saja, tetapi menyangkut pula berbagai bidang kehidupan lain yang saling berhubungan. Dengan demikian, kemajuan suatu bidang kehidupan akan diikuti oleh bidang-bidang kehidupan lain, yaitu:

- 1) kemajuan ilmu pengetahuan maka akan diikuti oleh teknologi;
- 2) kemajuan material atau kebendaan yang digunakan setiap manusia harus diimbangi oleh sikap mental untuk menyesuaikan diri dengan benda yang dimilikinya; jika tidak, akan dianggap sebagai orang yang ketinggalan zaman atau ketinggalan kebudayaan.

Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat tentu saja ada sisi baik dan sisi buruknya. Hal ini bergantung pada masyarakat sendiri yang menafsirkan modern. Salah menafsirkan kata modern akan mengakibatkan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan budaya atau kepribadian bangsa. Modernisasi sebagai perubahan sosial dari keadaan tradisional atau pra industri ke masyarakat industri. Perubahan tersebut merupakan titik tolak perkembangan ke arah modernisasi. Untuk mencapai masyarakat modern, harus melalui transisi (peralihan) yang

akan mengubah pola kehidupan masyarakat. Masyarakat tradisional dianggap statis dan hampir tidak mengalami perubahan. Seperti halnya karakteristik masyarakat tradisional berorientasi pada pertanian dengan menggunakan metode yang dianggap belum berkembang. Proses perubahan ke arah lebih maju daripada sebelumnya yang ditunjang oleh sikap dan perilaku masyarakat untuk menerima perubahan-perubahan tersebut merupakan suatu proses ke arah modern yang dinamakan modernisasi. Modernisasi dapat diartikan sebagai suatu sikap pikiran yang mempunyai kecenderungan untuk mendahulukan sesuatu yang baru dari yang bersifat tradisi dan satu sikap pikiran yang hendak menyesuaikan soal-soal yang sudah menetap dan menjadi kebutuhan-kebutuhan yang baru. Dengan kata lain, modernisasi merupakan perubahan sosial yang terarah (*directed change*) yang didasarkan pada perencanaan (*social planing*). Modernisasi umumnya dihubungkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk suatu kemajuan masyarakat secara positif, begitu pula masyarakat secara terbuka menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya.

Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam modernisasi memainkan peranan yang sangat penting di berbagai bidang kehidupan sehingga manusia sebagai pelaku modernisasi dituntut untuk selalu siap menerima perubahan-perubahan ke arah kemajuan yang positif. Gejala modernisasi merupakan awal terjadinya perubahan-perubahan ke arah yang diketahui. Misalnya:

- 1) sikap masyarakat akan pentingnya pendidikan sekolah;
- 2) keinginan untuk hidup lebih baik;
- 3) adanya usaha untuk mengejar ketinggalan dari masyarakat lain;
- 4) menghargai pendapat orang lain;
- 5) tidak menganggap pendapat pribadi lebih baik daripada orang lain;
- 6) memandang bahwa kehidupan hari esok harus lebih baik daripada hari ini; dan lain-lain.

Menurut M. Kamal Hasan (dalam Pardoyo) menyatakan bahwa proses modernisasi Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Berorientasi ke Depan. Kemajuan bangsa dan negara dengan jalan memperbaiki diri guna menyongsong hari esok yang lebih baik.
- 2) Memiliki Sikap Dinamis dan Aktif
Perbaikan diri dan kemajuan suatu negara harus dicapai dengan usaha dan kerja keras karena hal tersebut tidak akan datang sendiri tanpa adanya perjuangan.
- 3) Memberikan Tempat bagi Rasionalitas
Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan harus diperkirakan baik atau buruknya bagi manusia dan kehidupannya, tidak dirasakan atas dasar perasaan atau pendapat pribadi.
- 4) Mengembangkan Suatu Sikap Terbuka terhadap Pemikiran dan Hasil Penemuan Ilmiah. Pendapat atau pemikiran orang lain yang dianggap baik bagi pembangunan dapat di terima sebagai suatu masukan guna melengkapi hasil pemikiran yang telah ada. Begitu pula halnya hasil penelitian merupakan kebenaran ilmiah yang bermanfaat bagi pelaksanaan modernisasi.
- 5) Memberikan Prioritas kepada Hal-Hal yang Telah Dicapai Seseorang, bukan Statusnya. Keberhasilan seseorang patut untuk ditiru sebagai langkah ke arah kemajuan dan jangan beranggapan bahwa suatu kemajuan berasal dari pendapat orang yang memiliki status sosial terhormat di masyarakat.
- 6) Memberikan Perhatian yang Terbesar kepada Persoalan Langsung dengan Skala Prioritas. Segala masalah yang terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang merupakan bidang kajian seseorang merupakan suatu hal yang sangat utama dibandingkan masalah-masalah lain yang bukan bidang garapannya.
- 7) Melibatkan Dirinya kepada Tujuan yang Mengatasi Tujuan Golongan. Tujuan yang lebih penting adalah tujuan yang lebih besar dan lebih utama dibandingkan dengan tujuan pribadi atau golongan sehingga seseorang dituntut untuk terlibat dalam segala kepentingan masyarakat dan negara.

Pembangunan nasional melalui modernisasi akan melibatkan beberapa aspek kehidupan, terutama yang dapat dinikmati dan dirasakan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Adapun aspek-aspek kehidupan tersebut muncul sebagai gejala modernisasi, di antaranya meliputi bidang iptek, politik, dan

ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Modernisasi tidak sama dengan reformasi yang menekankan pada faktor-faktor rehabilitasi. Modernisasi bersifat preventif dan konstruktif agar proses tersebut tidak mengarah pada angan-angan, sebaiknya modernisasi harus dapat memproyeksikan kecenderungan yang ada dalam masyarakat ke arah waktu-waktu yang mendatang. Menurut Soekanto, terdapat syarat-syarat suatu modernisasi sebagai berikut.

- 1) Cara berpikir yang ilmiah (scientific thinking) yang melembaga dalam kelas penguasa ataupun masyarakat. Hal ini meng hendaki suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik.
- 2) Sistem administrasi negara yang baik adalah sistem yang benarbenar mewujudkan birokrasi.
- 3) Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur serta terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Hal ini memerlukan penelitian yang terus-menerus agar data tidak ter tinggal.
- 4) Penciptaan iklim yang favourable dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa.
- 5) Tingkat organisasi yang tinggi, di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan.
- 6) Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial (social planing).

f. Fenomena dan Dinamika Masyarakat Industri

Fenomena masyarakat kita saat ini tengah mengalami perubahan menuju industrialisasi yang melibatkan banyak pihak; pemerintah, pengusaha (manajemen), teknokrat, dan kaum buruh. Menurut Schneider perubahan itu disebabkan oleh faktor yang secara prinsip bersifat aktif maupun pasif. Prinsip aktif adalah yang memprakarsai perubahan-perubahan yang diterima oleh pasif. Sedangkan prinsip pasif merupakan pengaruh reaktif, suatu pengaruh lingkungan yang “membatasi” wilayah yang bisa dicapai aktif. Sebagaimana perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Amerika Serikat sebagai setting lokasi yang diteliti Schneider dalam bukunya perubahan yang terjadi disebabkan oleh prinsip aktif, industrialisme. Dimana energi manusia dikerahkan pada sistem produksi. Akibatnya, lembaga-lembaga industri berubah dengan kecepatan luar biasa

dibanding perubahan di bidang lain. Meskipun terdapat prinsip aktif yang lain disamping industri seperti dari peranan pemerintah akan tetapi pengaruh industri tetap dominan di dalam proses perubahan itu. Proses perubahan sosial dalam masyarakat dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam dinamika industrialisme yang menyebabkan terjadinya perubahan di dalam sistem produksi dan kemudian mempengaruhi sistem lainnya terdapat tiga sumber utama yang bersifat internal, meliputi:

Pertama, Peran Manajemen. Peran manajemen menempati posisi penting terkait dengan faktor yang mempengaruhi perubahan dalam masyarakat Amerika. Peran manajemen yang diterapkan dibuat sedemikian rupa sehingga untuk memainkannya dengan sukses, orang harus melampaui peran itu; sedikit banyak, manajer yang berhasil berbuat demikian berdasarkan kenyataan bahwa ia menghancurkan peran pertamanya lalu menggantikannya dengan peran pertamanya lalu menggantikannya dengan peran yang mempunyai kekuasaan, cakupan dan kebebasan lebih besar. Sarana untuk mengukur keberhasilan ini adalah dengan grafik keuntungan. Apabila keuntungan tinggi, maka keberhasilan juga baik dan begitupula sebaliknya. Dalam proses mencapai keuntungan itu seorang manajer menjalankan peran yang membawa dampak perubahan dalam bidang-bidang masyarakat. Antara lain yaitu:

- a) Pertumbuhan kota yang terus menerus. Dengan segala perubahan sosial yang menyertai pertumbuhan kota, sebagian merupakan akibat dari dorongan terus menerus bagi manajemen untuk memperluas industri dengan maksud untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat keuntungan. Dalam memperluas industri diperlukan tenaga kerja, peralatan teknik yang lebih banyak, komunikasi yang berbelit-belit dan semua ini tersedia di lingkungan perkotaan. Pada gilirannya lingkungan kota terus mengubah sistem keluarga, lembaga keagamaan dan sistem pendidikan. Akhirnya sikap, nilai-nilai dan pandangan manusia berubah bila lingkungan kota tempatnya hidup berkembang dan berubah.
- b) Dorongan manajemen mengakibatkan invasi ke bidang-bidang baru. Manajemen selalu mencari sumber tenaga kerja baru dan lebih murah, mencari sumber bahan mentah yang

belum dikembangkan, mencari pesanan baru. Dengan adanya dorongan inilah Schneider menyatakan industri Amerika tersebar luas di seluruh penjuru barat maupun timur, bahkan menyerbu negara-negara berkembang termasuk Indonesia maupun negara yang belum berkembang sekalipun. Dimana ketika memasuki wilayah yang belum industrialis, ia menimbulkan banyak perubahan sosial. Seperti dibangunnya kota-kota; urbanisasi penduduk pedesaan; keluarga, adat istiadat, dan tradisi mengalami perubahan dengan salah satu indikasi melemahnya ikatan primordial

- c) Mendesak sistem industri ke bidang produksi baru. Ketika manajer mencari sumber keuntungan baru maka industrialisme selanjutnya memasuki berbagai bidang pertanian, perkantoran, pembangunan perumahan dan gedung-gedung pertanian. Akibatnya muncul perubahan sosial. Para buruh lama digantikan buruh baru, kebiasaan dan irama hidup lama diganggu. Misalnya masuknya industri ke bidang pertanian merusak cara hidup lama di pedesaan dimana sangat dipentingkan harta warisan dan ikatan keluarga yang erat.

Kedua, eknologi. Teknologi merupakan faktor yang membedakan dengan sistem produksi lain. Dengan adanya penemuan mesin baru, proses fisika atau kimia yang baru dan sistem organisasi baru. Proses ini berlangsung dari dorongan manajemen untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, teknologi juga mengalami prosesnya sendiri (internal). Satu penemuan baru menimbulkan penemuan baru lainnya. Perkembangan teknologi berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak ada batasnya. Pengaruh teknologi dalam kehidupan sosial menyangkut dua hal:

- 1) Jenis perubahan sosial yang terjadi secara langsung diakibatkan oleh perubahan dalam proses produksi. Suatu penemuan dapat menghancurkan basis ekonomi suatu kota, yakni menggantikan ribuan buruh; namun penemuan yang sama dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar atau berdirinya kota baru di tempat lain. Perubahan semacam ini dapat menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat, dengan banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan berusaha mencari pekerjaan baru. Hal ini dapat

mempengaruhi penyebaran penduduk secara geografis tidak merata dengan banyaknya penduduk yang berpindah ke pusat-pusat industri. Disamping mempengaruhi persebaran populasi, secara langsung juga menghasilkan perubahan sosial (pola kehidupan sosial masyarakat). Misalnya bergesernya fungsi keluarga dengan adanya penemuan teknologi yang membuka kesempatan bagi kaum wanita bekerja di luar rumah, kesempatan bekerja bagi remaja. Perkembangan teknologi dapat mengubah stratifikasi suatu komunitas. Prestise bagi pekerja terampil dihilangkan, pekerjaan terbuka bagi anggota anggota yang selama ini didiskriminasikan (kelas rendah). Kadang-kadang suatu penemuan merusak dasar untuk keberadaan suatu kelompok kelas atau status. Contohnya, mekanisme pekerjaan kantor meniadakan klaim para buruh kantoran bahwa mereka mempunyai status yang hebat, Pada waktu yang sama, perkembangan industri meningkatkan atau mengurangi homogenitas kelas pekerja. Tergantung pada perkembangan itu apakah menyebabkan perbedaan pekerjaan atau tidak.

- 2) Perubahan sosial yang diakibatkan oleh produk teknologi yang berkembang. Karena perkembangan teknologi telah menangani produksi massal, sejumlah besar komoditi yang mulanya langka, mahal dan sulit didapat sekarang telah tersedia bagi masyarakat umum. Ciri yang menyolok dari teknologi adalah meringankan pekerjaan, memperbaiki cara komunikasi, peralatan perang yang semakin efisien yang dihasilkan oleh teknologi telah membawa pengaruh bagi perubahan kehidupan sosial yang bersifat kecil atau fundamental, baik bersifat sementara maupun lama.

Ketiga Gerakan Buruh yang Terorganisasi. Perkembangan industri menimbulkan suatu perubahan sosial yang terbesar yaitu diantaranya; perkembangan suatu angkatan kerja yang terikat pada tanah, keluarga, atau tuan tanah, dan suatu angkatan kerja yang tidak mempunyai mata pencaharian kecuali dari industri. Apabila industri semakin besar dan berkembang maka status angkatan kerja akan semakin ditingkatkan. Perubahan sosial yang baru diakibatkan oleh perubahan yang dihasilkan oleh dinamika perkembangan industri dan teknologi, sedangkan angkatan kerja pada awalnya adalah prinsip pasif dalam masyarakat yang kemudian diubah menjadi prinsip aktif

oleh hubungannya dengan manajemen industri. Hubungan yang terbentuk pada dasarnya adalah hubungan konflik, manajemen berusaha menunaikan peranannya dengan menekan /mengekan (dalam batas tertentu) kesempatan buruh untuk mencapai kepuasan perannya. Demikian juga sebaliknya. Selama konflik ini buruh mempersatukan diri menjadi kelas kemudian mengembangkan bentuk-bentuk organisasi yang bertujuan untuk membawa perubahan sosial.

Kelas pekerja berusaha menimbulkan beberapa tipe perubahan sosial. Diantaranya dengan menimbulkan kerusuhan, menghancurkan mesin-mesin akan tetapi perubahan yang ditimbulkan dari peristiwa ini bukanlah perubahan sosial yang permanen. Perubahan yang permanen dapat terjadi apabila buruh mengorganisasi diri menjadi asosiasi yang permanen dan mulai menyelesaikan permasalahannya dengan manajemen secara sistematis. Langkah-langkah yang dapat dijalankan untuk mewujudkan perubahan itu antara lain:

- a. Menjadikan Organisasi buruh bersifat permanen yang merupakan perubahan sosial
- b. Organisasi buruh merombak keseimbangan kekuasaan dan kebebasan manajemen
- c. Meningkatkan kekuasaan serta prestise buruh di masyarakat
- d. Mengubah angkatan kerja dari massa individu yang hanya pasrah menerima nasibnya menjadi massa yang aktif memperjuangkan nasibnya.

g. Masyarakat Industri Masyarakat Yang Akan Datang

Lembaga-lembaga industri telah mempengaruhi bentuk masyarakat, saat ini maupun yang akan datang. Masa mendatang adalah merupakan hasil dari perimbangan kekuatan masa sekarang. Ada empat alternatif bentuk masyarakat tertentu di masa yang akan datang. Tiga bentuk merupakan varietas ekstrem dan satu berdasarkan kesinambungan kecenderungan yang ada sekarang:

- a) Masyarakat yang Didominasi oleh Manajemen. Bentuk masyarakat seperti ini merupakan bentuk masa lalu seperti halnya totaliterianisme fasis Nazi, dimana negara didominasi oleh manajemen, serikat-serikat buruh dilebur atau dibuat jadi bagian dari bagian organisasi industri. Lembaga-lembaga pemerintah menjadi alat kebijakan manajemen. Maksimalisasi keuntungan menempati kedudukan tertinggi

dalam masyarakat. Dalam dunia modern bentuk semacam ini sulit terbentuk karena manajer hanya sebagian kecil dari masyarakat kita. Dan tidak mungkin apabila merealisasikan suatu program maksimum manajemen dapat memikat suatu masyarakat apabila massanya terdiri dari kaum buruh industri dan kaum menengah. Maka apabila manajemen ingin mendominasi masyarakat harus bekerjasama dengan partai politik yang mempunyai dukungan massa, karena di era modern tindakan politik yang efektif adalah terletak pada kemampuan untuk memikat atau memperoleh dukungan massa dalam masyarakat. Setidaknya suatu masyarakat didominasi oleh manajemen industri merupakan kemungkinan riil yang akan terjadi di masyarakat terutama yang paling terlihat adalah di negara-negara Amerika, dimana manajemen menempati prestise yang tinggi di tengah masyarakat kelas menengah. Manajemen menguasai media massa komunikasi yang vital. Oleh karena pengaruh manajemen yang efektif di masa yang akan datang serikat buruh dibuat tidak berdaya atau pengaruhnya dapat dilemahkan dengan program kesejahteraan jangka panjang yang dilakukan oleh para manajer. Pemerintah dapat dikuasai dengan menggunakan partai palsu. Masyarakat media dapat dibingungkan dengan propaganda media massa. Lembaga pendidikan dan keagamaan dapat diatur dengan kombinasi kekerasan, propaganda dan kebijakan keuangan yang dibuat secara bijaksana.

- b) Didominasi Buruh. Ada dua kemungkinan masyarakat yang didominasi oleh buruh. Buruh berkuasa mutlak atau buruh menguasai lembaga-lembaga sosial yang ada. Kemungkinan pertama, masyarakat bersifat totaliter. Lembaga-lembaga pemerintah menjadi alat buruh yang terorganisasi; dalam kenyataannya dewan buruh yang terorganisasi sepenuhnya menggantikan pemerintah. Media massa dikuasai oleh buruh yang terorganisasi. Dalam industri kelas manajemen dihilangkan, para manajerc digaji dengan tugas-tugas khusus. Kelas menengah tidak ada lagi. Pekerja kantoran tidak lagi mempunyai status yang lebih tinggi dari kaum buruh dan mereka menjadi bagian dari massa yang terorganisasi. Nilai-nilai yang tertinggi dalam masyarakat menjadi nilai-nilai buruh yang terorganisir; tindakan kolektif; pemerataan

penghasilan, pemerataan kondisi kerja dan status. Kondisi ini merupakan kondisi khayalan yang belum pernah terjadi di negara manapun. Kalaupun buruh mendominasi paling-paling hanya mendominasi lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Misalnya mungkin mereka dapat membentuk partai buruh, yang dapat memenangkan pemilu dan dengan jumlah anggotanya yang besar di pemerintahan mereka dapat membuat peraturan yang memihak kaum buruh. Dalam kondisi ini, kelas-kelas lain tidak dihilangkan akan tetapi berkurang kekuasaannya. Buruh dapat menekan dominasi manajer dengan Undang-Undang anti monopoli, pajak yang tinggi, Undang-Undang yang mengatur kondisi kerja dan kualitas produk. Media massa dikuasai dengan sponsor organisasi buruh, atau mereka mendirikan jaringan komunikasi sendiri. Dan kelas menengah boleh ada tetapi harus setia mendukung buruh.

- c) Masyarakat yang Didominasi Para Teknisi. Anggapan tentang dominasi teknisi dalam masyarakat berdasarkan fakta bahwa masyarakat modern berkembang berdasarkan teknologi yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan. Manajemen dapat berjalan mencapai tujuannya apabila didukung dengan teknologi maju. Buruh terikat pada teknologi yang melimpah. Cara hidup dan standar hidup mereka tergantung pada ketrampilan para teknisi dan ilmuwan. Jadi, para teknisi dan ilmuwan merupakan orang kunci dalam peradaban saat ini. Akan tetapi, nilai-nilai spesialis yang berada di atas efisiensi dan rasionalitas, tidak mungkin dicapai di dalam masyarakat yang didominasi oleh manajemen yang berorientasi kepada keuntungan atau dalam suatu masyarakat yang didominasi buruh yang berorientasi pada kesejahteraan. Suatu “revolusi para teknisi” dijamin akan berhasil karena kekuasaan teknisi di dalam masyarakat industri sangat strategis. Kekuasaan dapat direbut dengan pemogokan yang berlangsung lama atau kekuasaan bisa jatuh apabila kelompok lain tidak mampu menangani suatu masyarakat industri yang kompleks. Masyarakat yang didominasi oleh para teknisi akan menjadikan nilai-nilai produktivitas, rasionalitas, dan efisiensi menempati posisi yang tinggi dalam masyarakat. Manajemen menjadi pekerjaan teknik saja; manajer dianggap sejenis teknisi. Buruh dianggap sebagai salah satu faktor

dalam proses produksi. Mereka tidak lagi berhak untuk berorganisasi atau mogok; buruh dipindahkan dari pabrik yang satu ke yang lain apabila diperlukan. Pengendalian atas manajemen dan buruh memungkinkan perencanaan berskala nasional atau mungkin dunia. Karena industri berskala besar lebih efisien daripada industri kecil, maka perekonomian diorganisasi di sekitar serangkaian monopoli raksasa. Industri (seluruh masyarakat) dibirokratisasi. Tidak ada tempat bagi produser kecil, pengecer dan orang profesional yang lepas dari birokrasi. Konsekuensinya juga tidak ada kelas menengah dalam masyarakat. Lembaga-lembaga dalam masyarakat direkonstruksi atau bahkan dihilangkan. Misalnya fungsi keluarga, tidak sesuai lagi di zaman ini karena dianggap mengganggu efisiensi dan rasionalitas. Fungsi pro kreatif dapat dilaksanakan dengan inseminasi buatan. Pendidikan dapat dibuat menjadi lembaga pragmatis yang hanya dibaktikan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Agama dapat dihilangkan atau jika memang dibutuhkan untuk mengendalikan rakyat bisa diciptakan agama ilmiah atau agama negara.

Kondisi masyarakat tersebut sangat tidak mungkin terjadi karena dukungan massa terhadap teknokrat sedikit. Lagipula jumlah teknokrat sangat terbatas di tengah masyarakat. Sedikitnya jumlah teknokrat dan dukungan massa itulah yang menyebabkan kemungkinan terjadinya dominasi para teknisi tidak bisa terwujud. Kecuali dalam kondisi yang mendesak seperti terjadinya perang memungkinkan peran teknisi untuk mendominasi masyarakat.

Kemungkinan bentuk masyarakat ini adalah yang mempunyai kecenderungan terkuat dari keadaan saat ini. Mengingat stabilnya kondisi masyarakat Amerika sejak satu atau dua dasawarsa yang telah lalu. Tetapi kecenderungan dan kondisi sosial dapat berubah secara tiba-tiba. Kondisi seperti ini terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1929 dan pada tahun 1933 mengalami perubahan signifikan dan secara cepat.

Apabila tidak terjadi perubahan secara cepat seperti ini mengakibatkan posisi manajemen yang sangat berkuasa saat ini akan tetap bertahan. Karena mempunyai sumber keuangan kuat, mudah menggunakan media massa, dan mempunyai prestis yang tinggi, kekuatan manajemen tak tergoyahkan. Sekurang-

kurangnya selama ia mampu memberi kemakmuran, kesempatan kerja yang cukup dan standar hidup yang tinggi. Kekuatan buruh akan tetap seperti keadaan saat ini, pada tingkat sedang atau mungkin bertambah secara berlahan-lahan. Pada masa mendatang jumlah prosentase buruh yang terorganisir diprediksi akan semakin besar, menyebar memasuki pertanian dan menjadi lebih penting dibanding kalangan pekerja kantoran. Di bidang politik kecil kemungkinan akan terbentuk partai buruh, kecuali apabila mereka tidak yakin lagi dengan partai politik yang memperjuangkan tujuan-tujuannya. Gambaran masa depan seperti ini akan menempatkan buruh tetap pada peran yang lebih rendah dibanding peran manajemen. Akan masuk akal apabila kekuasaan pemerintah semakin meningkat atas manajemen dan buruh walaupun mungkin agak lambat dibanding tahun 1930an. Pemerintah akan melicinkan atau meningkatkan usahanya dalam siklus ekonomi, meningkatkan kontrol terhadap perselisihan manajemen dan buruh, peran pemerintah semakin jauh dalam mengurus urusan intern organisasi buruh dan manajemen. Fungsi melindungi pemerintah ini akan semakin kuat dengan dibuatnya Undang-Undang pengangguran, jaminan kerja, perawatan medis akan diperluas bagi buruh dan rakyat dan kelas menengah. Akhirnya kecil kemungkinan perkembangan ini diperhambat. Produktifitas akan semakin meningkat, dengan jumlah jam kerja yang lebih singkat, waktu luang semakin banyak. Juga akan terjadi penggunaan energi atom menggantikan sumber energi yang ada dalam beberapa produksi. Dan perbaikan terhadap pola komunikasi dan media massa.

Jika gambaran ini berhasil di masa yang akan datang ini tepat maka sebagian besar perubahan sosial bukan hasil perubahan peran dalam peran manajemen ataupun buruh, atau pemerintah. Akan tetapi, hasil perubahan teknologi. Perubahan teknologi akan terus berlangsung dan dengan demikian pola kehidupan manusia pun akan diubah dalam banyak hal. Dalam jangka panjang perubahan teknologi akan merubah struktur masyarakat itu sendiri. Jika ini terjadi maka seperti masa lampau, sifat struktur kelas dan hubungan antar kelas akan dirombak secara mendasar dan merupakan akumulasi perubahan teknologi

BAB IX

MASYARAKAT BURUH INDUSTRI

Pada bab sembilan membahas tentang Masyarakat Buruh Industri, yang terdiri: Pengertian Buruh, Masalah Buruh Kontak dan *Outsourcing*, Sejarah Buruh di Dunia dan Indonesia, Gerakan dan Solidaritas Buruh, Perkembangan Serikat Buruh/Pekerja Di Indonesia, dan Organisasi Serikat Pekerja/Buruh.

G. Pengertian Buruh

Buruh, pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau majikan.

Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama. namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan kerja. akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Secara umum buruh adalah warga negara yang mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hal untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi serta mendirikan dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Era Reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3), UU NO 21 tahun 2000, KEP/16/MEN/2001, merupakan dasar hukum dalam melaksanakan Organisasi Serikat

Pekerja (SP). Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus di pahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha. Perjuangan buruh di Indonesia selama ini menginginkan agar buruh memiliki kekuatan tawar (Bargainning) yang sejajar dengan pengusaha dan pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial.

Buruh atau pekerja merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja haruslah memiliki rasa tanggung-jawab atas kelangsungan perusahaan dan begitu pula sebaliknya, pengusaha harus memperlakukan pekerja sebagai mitra sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan juga bertanggung jawab oleh pekerja/buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya. Keberadaan Serikat Buruh mutlak dibutuhkan oleh pekerja. Berkumpul untuk bersatunya buruh dalam Serikat Buruh secara filosofi diibaratkan Muchtar Pakpahan, seperti sapu lidi, kendaraan umum, burung gelatik, main catur, memancing ikan, solidaritas atau berani mati.

Melalui Serikat Buruh, diharapkan akan terwujud hak berserikat buruh dengan maksimal. Buruh dapat memperjuangkan kepentingannya. Sayangnya hak berserikat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sudah bersifat universal belum dipahami oleh pengusaha dan pemerintah. Sementara pengusaha seringkali menganggap keberadaan Serikat Buruh sebagai pengganggu untuk melaksanakan hak prerogratifnya dalam mengatur jalannya usaha. Pemerintah seringkali menganggap aktivitas Serikat Buruh dalam mengembangkan organisasinya merupakan ancaman

stabilitas dan keamanan nasional. Menjadi anggota serikat pekerja adalah kekuatan pekerja untuk menghilangkan permasalahan yang dihadapi seperti gaji yang rendah, buruknya kondisi pelayanan kesehatan dan perlindungan kerja, PHK sepihak dan sebagainya. Karena sebagai individu mereka tidak akan mampu melawan kombinasi yang hebat antara pemodal dan manajemen. Melalui serikat pekerja mereka terlindungi kepentingannya, dapat menyuarakan aspirasinya kepada pengusaha, peningkatan kondisi-kondisi kerja melalui perjanjian kerja bersama.

Hak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan hak asasi pekerja yang telah dijamin didalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 dan untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja, dimana Serikat Pekerja/Serikat Buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan juga meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dimana dalam menggunakan haknya tersebut pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan Bangsa dan Negara oleh karena itu penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Hak berserikat dan berkumpul bagi pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi dan Konvensi ILO Nomor 98 Tentang Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama. Konvensi tentang hak berserikat bagi pekerja/buruh ini telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Berlakunya dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari Peraturan PerUndang-Undangan Nasional yakni Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dimana Pekerja merupakan mitra kerja Pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang No.21 Tahun 2000 menggunakan istilah serikat pekerja/serikat buruh bukan serikat pekerja atau serikat buruh saja. Kedua istilah itu sebenarnya sama saja dan tidak ada perbedaan. Judul semula yang diajukan oleh Presiden ke DPR melalui suratnya No.R.01/PU/I/2000 adalah RUU tentang serikat pekerja. Dalam proses pembahasan di DPR penggunaan istilah serikat pekerja disetujui menjadi serikat pekerja/serikat buruh. Penggunaan kedua istilah tersebut dilakukan untuk mengadopsi keinginan dari berbagai organisasi pekerja/buruh yang menggunakan kedua istilah alternatif tersebut untuk menyebut nama organisasinya masing-masing. Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pengertian Serikat Pekerja/Serikat Buruh menurut Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat, Buruh terbagi menjadi dua yaitu Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.21 tahun 2000, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan ialah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para

pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.21 tahun 2000, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan ialah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan. Serikat Pekerja/Buruh dapat membentuk Federasi Serikat Pekerja/Buruh maupun Konferensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.21 tahun 2000, Federasi serikat pekerja/serikat buruh ialah gabungan serikat pekerja/serikat buruh. Adapun pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.21 tahun 2000, Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh ialah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.

Federasi serikat pekerja adalah bentukan dari sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja. Dan Konfederasi serikat pekerja merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja. Pada dasarnya sebuah serikat pekerja harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku dan jenis kelamin. Jadi sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan, anda hanya tinggal menghubungi pengurus serikat pekerja di kantor anda, biasanya akan diminta untuk mengisi formulir keanggotaan untuk data. Ada pula sebagian serikat pekerja yang memungut iuran bulanan kepada anggotanya yang relatif sangat kecil berkisar Rp. 1,000 - Rp. 5,000, gunanya untuk pelaksanaan-pelaksanaan program penyesuaian karyawan anggotanya. Tidak mahal kan? Tidak akan rugi ketika kita tahu apa saja keuntungan yang didapat.

Berdasarkan Pasal 14, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja tertera bahwa seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan. Apabila seorang pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan namanya tercatat di lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya. Setiap serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu

federasi serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 16 UU No. 21 tahun 2000). Dan demikian pula sebuah federasi hanya dapat menjadi anggota dari satu konfederasi. UU No. 21 tahun 2000. Pekerja/buruh menurut UU No.21 tahun 2000 ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan unsur menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hal ini berbeda dengan definisi tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

H. Masalah Buruh Kontak dan *Outsourcing*

Krisis umum imperialisme pada abad ke-21 ini telah semakin memperjelas watak mereka yang sesungguhnya; perampok yang rakus dan barbar, terorisme negara yang getol mengobarkan perang agresi, dan kehancuran sosial di seluruh dunia. Sistem kapitalisme telah melewati masa-masa keemasannya. Dunia kapitalis tidak akan mendapati lagi kemunculan negeri-negeri persemakmuran (*welfare-state*) sebagaimana terjadi pada era booming kemakmuran tahun 1980-an. Pemangkasan subsidi sosial, kesehatan, pendidikan, dsb, menjadi kenyataan pahit bagi rakyat di tengah kondisi penghidupan yang semakin dimiskinkan; baik di negeri-negeri maju belahan Utara maupun negeri-negeri bergantung di belahan Selatan.

Disebabkan oleh kedudukannya sebagai negeri-negeri yang bergantung pada imperialisme, krisis umum imperialisme memiliki dampak langsung terhadap negeri setengah-jajahan seperti Indonesia. Secara obyektif, kedudukan negeri-negeri jajahan/setengah-jajahan dan setengah feodal yang tersebar di berbagai belahan dunia merupakan basis sosial bagi imperialisme. Negeri-negeri tersebut diperintah oleh rezim-rezim komprador (kaki-tangan) yang melayani kepentingan imperialisme dengan mengeluarkan berbagai peraturan/perundang-undangan untuk mengeksploitasi kekayaan alam dan rakyat negerinya. Demikianlah kenyataannya, rezim-rezim komprador Republik Indonesia

yang datang silih berganti; masih dengan setia diperbudak oleh Imperialisme dengan menerbitkan berbagai perundang-undangan betapa pun paket peraturan tersebut bertentangan dengan semangat UUD-1945 yang jelas-jelas memiliki watak anti-imperialisme (kolonialisme). Namun pengebolan atas UUD 1945 yang lahir dari perjuangan revolusi nasional anti kolonialisme tersebut telah benar-benar dilakukan oleh rezim-rezim komprador sejak zaman Suharto hingga SBY-Budiono. Sistem Buruh Kontrak dan Outsourcing adalah Kebijakan Pro-imperialisme dan Anti-Buruh

Dengan motif hakiki untuk melayani kepentingan imperialisme dan kelas borjuasi komperador dalam negeri (domestik), pemerintah komprador Republik Indonesia yang diwakili oleh klik SBY-budiono berusaha melakukan revisi paket UU 13/2003. Undang-undang yang sudah menindas dan anti-buruh ini akan segera di revisi oleh rezim komperador pengabdian setia Imperialis . UU 13/2003 yang selama ini telah menjadi alat legal bagi pengusaha dalam hal penggunaan buruh kontrak dan outsourcing akan segera di revisi, akan tetapi draf revisi tersebut justru memperkuat kedudukan dari penggunaan sistem kerja kontrak dan outsourcing di Indonesia. Meskipun selama ini rencana tersebut mendapat perlawanan hebat dari kelas buruh Indonesia di mana ratusan ribu buruh turun ke jalan untuk menolaknya. Namun perlawanan buruh tersebut belum mampu menggagalkan Rencana revisi UU 13/2003 dan hanya berhasil menunda pengesahannya, akan tetapi di dalam prakteknya hampir di semua perusahaan telah menggunakan buruh kontrak dan outsourcing tanpa ada batas-batas ketentuan sama sekali sebagaimana di atur dalam undang-undang tersebut. Merujuk pada UU no 13/2013, khususnya pada bab IX pasal 58 dan 59, perihal sistem kerja kontrak dinyatakan secara tegas, bahwa buruh Kontrak dalam istilah UU 13/2003 disebut sebagai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan: *pekerjaan yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu paling lama 3 tahun, pekerjaan musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk dan kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan*. Intinya tidak boleh ada sistem kerja kontrak pada pekerjaan yang bersifat tetap. Namun kenyataan

faktual di lapangan berjalan penuh manipulasi. Majikan dan kaki tangannya di pabrik yang penuh trik-trik culas, telah mempraktekkan berbagai manipulasi sekian lama.

Sementara pada pasal 64-66, mengatur tentang *outsourcing* atau jasa percaloan dalam perekrutan tenaga kerja untuk mengerjakan beberapa bagian produksi non utama yang bisa di-sub-kontrakkan. Outsourcing boleh dilakukan dengan persyaratan ketat yaitu, *dilakukan terpisah dari kegiatan utama, berupa kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan tidak menghambat proses produksi secara langsung*. Tetapi kenyataannya banyak sekali perusahaan yang mempekerjakan buruh dengan status outsourcing menempati bagian-bagian yang langsung dengan produksi. Sungguh kenyataan telah membuka mata kita bahwa begitu culas dan liciknya para majikan melakukan segala daya untuk kepentingan keserakahannya mendapat berbagai keuntungan. Praktek manipulasi penggunaan buruh outsourcing begitu mudah dilakukan oleh para majikan di pabrik tidak lain dan tidak bukan karena dukungan dari para pejabat pemerintah. Tidak ada satupun pihak disnaker mengambil sikap atas keculasan para majikan tersebut, bahkan justru mendukungnya, meraka selalu saja beralih kepada buruh dengan mengatakan “dari pada tidak bekerja”, pernyataan yang sangat manipulatif dan tidak bertanggungjawab sama sekali, karena justru merekalah yang menjadi sumber dari menjamurnya praktek ini.

Terdapat kerugian dari sistem kerja kontrak dan outsourcing yang dialami oleh buruh, antara lain sebagai berikut: Pertama, tentang sistem kerja kontrak. Praktek ini merupakan suatu taktik bagi kaum majikan untuk mengeruk keuntungan lebih besar di atas penderitaan kaum buruh. Fenomena buruh kontrak yang semakin massif dalam sepuluh tahun terakhir ini, adalah langkah untuk melepaskan tanggung jawab perusahaan terhadap buruh. Membahas persoalan buruh kontrak akan lebih terang bila kita perbandingan dengan status buruh tetap. Bagi buruh tetap, perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menjamin berbagai jaminan sosial seperti jamsostek, THR, bonus, pesangon jika ter-PHK dan, Uang pensiun, dsb. Sementara bagi buruh kontrak, ia hanya mendapatkan upah yang sesuai dengan UMP saja. Tidak lebih, bahkan mayoritas dari buruh kontrak dan outsourcing upahnya

dibawah ketentuan UMK/UMP. Kita bisa membayangkan, bila upah buruh di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2012 senilai Rp. 1.529.150,- maka hanya dengan upah itulah ia harus melanjutkan hidupnya baik bagi yang lajang atau yang sudah berkeluarga. Bila sakit ia tidak mendapat santunan kesehatan. Bila ia di-PHK, ia tidak mendapat pesangon betapapun ia sudah lebih dari 5 tahun bekerja di pabrik tersebut dan tentu saja mereka juga tidak akan pernah mendapatkan hak pensiun selama dia bekerja. Bila ia kritis terhadap kebijakan perusahaan yang merugikan kaum buruh, ia diputus kontakannya atau dipaksa mengundurkan diri secara sepihak.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa sistem kontrak dan outsourcing ada ketidakadilan dan cenderung merugikan kaum pekerja atau buruh. Ada pemerasan ekonomi terdapat kaum pekerja dalam bentuk jam kerja yang lebih panjang, kerja tanpa kepastian status, pemangkasan hak-hak dasar atas kesehatan, jaminan hari tua, kecelakaan dan kematian; seluruh syarat-syarat menuju sejahtera seperti membentur dinding tebal. Demikian juga seiring sejalan dengan penindasan atas hak-hak politik (demokratis) dalam hal berserikat sebagai alat perjuangan yang semakin dipangkas. Sudah menjadi ketakutan umum bagi buruh kontrak, bahwa ketika ia bergabung dengan Serikat Buruh sejati pada saat itu juga mengancam statusnya kerjanya. Dengan mempermainkan waktu kontrak sependek mungkin (sekitar 3 bulan, 6 bulan hingga setahun), maka status kepastian kerja sangat rentan di pihak buruh. Besar kemungkinan bagi buruh yang bergabung dengan Serikat Buruh sejati dan terlibat dalam perjuangan akan di-PHK, dimutasi, dipaksa mundur dan tidak diperpanjang lagi kontrak 3 bulan berikutnya. Dampak Berikutnya buruh kontrak yang tidak diperpanjang lagi masa kontraknya, maka akan menambah angka pengangguran. Bertambahnya angka pengangguran berarti menambah jumlah kemiskinan. Inilah hakekat penghancuran sosial dari sistem kapitalisme berupa buruh kontrak ini; bagaimana ia berlaku sebagai mesin kemiskinan yang setiap hari bekerja memproduksi kemiskinan secara massal. Di mana hak-hak buruh atas kesejahteraan sosial-ekonomi diberangus dan hak-hak politiknya dipangkas. Dalam praktek buruh kontrak, apa yang dalam teks perundang-undang hanya diperbolehkan untuk jenis pekerjaan produksi

tertentu (lihat pasal 58-59), namun dalam lapangan prakteknya pihak perusahaan sudah menginjak-injak undang-undang yang berlaku tersebut. Sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan buruh, bahwa pekerjaan produksi utama kini sudah dikerjakan oleh buruh kontrak. Bahkan di banyak pabrik mayoritas buruhnya adalah buruh kontrak. Artinya, buruh kontrak telah menjadi fenomena massal yang mengerjakan bagian-bagian produksi utama yang semestinya dikerjakan oleh buruh tetap. Bila ada pemeriksaan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah setempat, mereka disembunyikan atau dipaksa diam agar tidak ketahuan sebagai buruh yang berstatus kontrak.\

Dalam berbagai keadaan, sistem buruh kontrak hanya sebagai alat pemecah belah di dalam kekuatan buruh. Meskipun sama-sama menjadi buruh, antara buruh tetap dan buruh kontrak muncul perasaan seolah-olah memiliki status yang 'lebih' dan yang 'kurang' di antara mereka. Banyak buruh tetap yang 'merasa aman' kemudian bersikap pasif dalam perjuangan karena tak mau kehilangan 'status aman'-nya yang relatif tersebut. Sedangkan di pihak buruh kontrak merasa cemburu dengan beban pekerjaan yang sama, namun tidak mendapatkan hak-hak sosial-ekonomi yang dijamin perusahaan. Politik pecah belah sistem kapitalisme tidak hanya dalam hal pembagian kerja (*devision of labour*) semata, namun sudah berkembang pembagian status seperti 'buruh tetap' dan 'buruh kontrak'. Bila tidak kita sikapi dengan propaganda yang tepat, soal-soal konkrit semacam ini akan menjadi pemecah-belah yang akan semakin melemahkan kekuatan dan persatuan buruh. Kedua, tentang masalah outsourcing. Hakekat outsourcing adalah menyerahkan beberapa bagian pekerjaan di luar produksi utama kepada pihak di luar perusahaan. Bahasa lain dari outsourcing adalah sub-kontrak/order. Fenomena ini meluas di kalangan industri sektor jasa seperti perbankan dan niaga, namun kini juga telah berkembang di industri manufaktur hingga yang paling modern. Persoalan outsourcing lagi-lagi adalah bentuk penghisapan untuk menumpuk keuntungan lebih besar dan upaya dari perusahaan untuk lepas tanggung jawab atas perbaikan nasib buruh. Karena jika buruh bekerja dalam status outsourcing bisa dipastikan dia adalah buruh kontrak.

Cengkraman globalisasi ini tidak bisa lepas dari negeri induk imperialis seperti Amerika Serikat yang telah lama mempraktekannya. Banyak perusahaan IT di AS yang berpindah ke India untuk mencari upah buruh yang lebih rendah. Beberapa komponen di luar yang inti seperti mesin mereka sub-kontrakkan. Demikian juga di Eropa dan Jepang, banyak perusahaan otomotif, elektronik, garmen, sepatu, dsb, yang membikin perakitan sebagian *part-part*-nya di negeri-negeri dunia ketiga dengan upah buruh yang murah untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan. Outsourcing cenderung merugikan kaum buruh atau pekerja, oleh karena itu, outsourcing sebagai parasit yang mencari keuntungan dari keringat buruh-buruh kontrak yang dibikin tidak jelas nasibnya. Isi otak dari perusahaan besar adalah untung dan untung. Demikian juga isi otak dari para pengelola Yayasan outsourcing hanya untuk mengejar untung. Di balik penimbunan untung besar tersebut, ada jutaan buruh yang hidupnya menjadi sapi perahan. Di tengah kondisi jumlah pengangguran yang besar seperti sekarang ini, mereka memiliki alasan untuk hidup sebagai parasit. Seorang buruh untuk bisa bekerja selama 6 bulan – 1 tahun harus merogoh kocek antara 1 juta hingga 3 juta rupiah. Sejumlah uang yang tidak sedikit bagi kocek kelas buruh yang hidupnya pas-pasan. adapula yayasan outsourcing yang masih melakukan pungutan setiap bulan dengan kisara Rp. 200.000 hingga Rp. 300.000 kepada si buruh setelah mereka bekerja, biasanya pungutan ini dilakukan selama dia dipekerjakan, Inilah ironi yang pahit. Untuk dihisap pun kaum buruh harus membayar.

Salah satu fenomena yang juga cukup terjadi di perusahaan di daerah Jakarta Barat, perusahaan yang memproduksi segala macam kaleng minuman dengan merk terkenal seperti Perusahaan minum CC, Pocari, Bir Btg, minuman cap KT, dll, telah memperkerjakan buruhnya dengan status kontrak tidak kurang dari 800 buruh dari total buruh sekitar 2300 orang, mereka untuk dapat bekerja di perusahaan ini harus melalui yayasan Outsourcing dengan membayar Rp. 1000.000,- s/d Rp. 1200.000,- untuk sekali kontrak dengan masa kontrak 6 bulan. Dan jika perusahaan memperpanjang kontrak kerja maka mereka harus membayarnya dengan jumlah yang sama demikian seterusnya. Banyak pemilik Yayasan outsourcing ini dari elite-

elite pemerintah local (DPRD, Kepala dinas dan jajarannya dll) yang bekerja sama dengan borjuis-borjuis asing dan domestik untuk menghisap kaum buruh Indonesia, Inilah hakekat kelas komprador dari para kapitalis birokrat di Republik ini. Tetapi tidak sedikit pula yayasan yang di miliki oleh para pimpinan dan mantan pimpinan serikat buruh. Krisis ekonomi memang terus mencekik kehidupan rakyat luas seperti yang menimpa buruh dan petani; namun hidup di atas penderitaan massal tersebut kelas komprador dan tuannya, yakni borjuis-borjuis besar di negeri imperialis yang bergelimang kemewahan.

Pembedahan kita tentang sepotong kebijakan bernama sistem kerja buruh kontrak dan outsourcing serta dampaknya bagi kehidupan kelas buruh di Indonesia. Kita bisa membayangkan masih terdapat ratusan kebijakan yang kini diterapkan di berbagai sektor lainnya. Sekarang bagaimana puluhan juta nasib rakyat yang menjadi korban dari sistem kapitalisme yang makin usang dan barbar ini. Berbagai kebijakan reaksioner ini juga menjadi trend di seluruh dunia, sebagaimana imperialisme yang menganggangi planet bumi ini telah membawakan semua sebagai kabar buruk bagi kelas buruh di seluruh dunia. Pratek penerapan kotrak majikan dan buruh dianggap cenderung merugikan:

1. Banyak Majikan yang awalnya mempekerjakan buruh tanpa melalui perjanjian kerja, bahkan buruh hanya menggunakan KTP untuk melamar kerja tetapi setelah buruh bekerja 3 bulan atau lebih majikan memanggil si buruh untuk menandatangani perjanjian kerja dengan alasan di lakukan perpanjangan kontrak. Padahal dalam Pasal 57 ayat 1 *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.* Dan dalam pasal 2 *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.* Dengan kata lain menjadi buruh tetap.
2. Praktek lain yang di lakukan oleh Majikan dalam mempekerjakan buruh kontrak, sebelumnya di berlakukan masa percobaan, sedangkan perjanjian kerja waktu tertentu tidak di bolehkan adanya masa percobaan selama 3 bulan, setelah itu majikan memanggil untuk membuat perjanjian

kerja/kontrak. Sebagaimana dalam pasal 58 ayat 1 *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja*. Dan dalam ayat 2 *Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum*. Dengan kata lain tidak berlaku kontraknya.

3. Selain dua praktek diatas tidak sedikit pengusaha yang melakukan perpanjangan kontrak hingga lebih satu kali bahkan tidak sedikit buruh yang menandatangani kontrak hingga puluhan kali yang kemudian si buruh tetap menjadi buruh kontrak meskipun masa kerja telah melebihi 3 tahun. Padahal dalam pasal 59 ayat 4 *"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun"*.
4. Masalah lain yang sering di langgar oleh pengusaha adalah dalam melakukan perpanjangan kontrak kerap melebihi waktu berakhirnya masa kontrak sebelumnya. Sedangkan dalam ketentuan pasal 59 ayat 5 *"Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan"*.
5. Praktek lain yang saat ini marak terjadi adalah, para majikan yang telah menggunakan buruh berstatus tetap, berupaya menerapkan trik-trik culas dengan alasan sepi order mereka meliburkan sementara buruhnya di beberapa bagian atau seluruhnya beberapa bulan, ketika meliburkan ada majikan yang membayar upah buruh yang di liburkan tetapi tidak sedikit dan bahkan mayoritas majikan tidak membayar buruhnya ketika meliburkan. Setelah beberapa bulan mereka meliburkan maka si majikan kemudian memanggil dan menyampaikan perusahaan tidak lagi sanggup untuk beroperasi, maka menawarkan buruh untuk di PHK dengan pesangon alakadarnya/tidak sesuai dengan ketentuan. Tetapi setelah berhasil melakukan PHK mereka kemudian menerima kembali buruh baru dengan status kontrak.

6. Fenomena terbaru yang berkembang saat ini adalah semakin banyak pengusaha dengan kedok memberikan sarana pendidikan dan pelatihan mereka mendirikan Pusat Pelatihan dan merekrut tenaga kerja dengan tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka dipekerjakan sebagaimana layaknya buruh biasa yang juga menghasilkan barang produksi. Banyak buruh yang salah dalam memandang karena seolah-olah perusahaan baik dengan memberikan sarana pendidikan dan pelatihan gratis, padahal jika kita pahami lebih dalam maka akan terkuaklah keculasan para pengusaha tersebut. Mereka sejatinya menghindari tenaga kerja buruh baru dengan status masa percobaan/training, sebab apabila buruh yang sudah mampu bekerja dengan baik di Pusat Pelatihan tersebut maka mereka akan melakukan rekrutmen dengan setatus ikatan dinas dengan masa kerja 3-5 tahun, padahal sejatinya mereka bekerja dengan setatus buruh kontrak dengan masa kerja yang sangat panjang dan menindas buruh mereka di kontrak sampai dengan 5 tahun, dan apabila belum selesai masa kontrak/ikatan dinas buruh ingin keluar dari perusahaan maka mereka diberikan denda sebanyak biaya pendidikan dan pelatihan perusahaan. Prkatek ini dapat kita temukan di PT UCC begitu juga praktek yang hampir sama dilakukan di PT. Jaba Garmino. Jika kita memeriksa ketentuan perundang-undangan disitu dijelaskan didalam pasal 58: (1) *"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja".* (2) *Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.*

Pertanyaannya sekarang, bagaimana Kelas Buruh dan Rakyat Bersatu Melawan Sistem Buruh Kontrak dan Outsourcing? Disebabkan zaman sekarang adalah zaman imperialisme, maka persoalan pokok kelas buruh dan rakyat adalah berjuang melawan setiap bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim yang berkuasa di negeri ini yaitu rezim pengabdian setia imperialisme. Di zaman imperialisme sistem yang berkembang di Indonesia adalah sistem masyarakat setengah jajahan dan setengah feodal sehingga kelas buruh tidak bisa berdiri sendiri dan berjuang sendiri karena yang dihisap dan ditindas selain kelas buruh adalah kaum tani yaitu kelas mayoritas dan seluruh

rakyat tertindas dan tertindas lainnya. Dan skala penghisapan dan penindasan imperialisme mencakup kelas buruh, rakyat dan bangsa di berbagai negeri jajahan dan setengah jajahan. Dalam pengertian inilah, penting bagi kita sebagai rakyat dari suatu bangsa yang masih terjajah (setengah jajahan dan setengah feodal) bernama Indonesia untuk mengobarkan watak perjuangan anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Tanpa perjuangan anti-imperialisme dan anti-feodalisme yang gigih, kita tak lebih dari bangsa kuli yang akan terus diperbudak oleh Imperialis. Demikian juga dalam menyikapi masalah sistem buruh kontrak dan outsourcing ini. Di tengah situasi pemiskinan yang semakin mencekik buruh dan massa rakyat luas ini, berbagai upaya propaganda yang menerangi kenyataan untuk meningkatkan kesadaran kaum buruh harus terus ditingkatkan dan diluaskan. Kemudian diorganisasikan dalam wadah serikat buruh sejati dan melakukan bentuk-bentuk perjuangan massa melalui organisasi massa buruh dan kerjasama dengan ormas rakyat lainnya harus lebih diperkuat persatuannya. Pengorganisasian massa, cara kerja massa yang memadukan konsolidasi organisasi dengan gerakan propaganda yang massif dan intensif harus kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Untuk mengurai organisasi buruh kontrak dan outsourcing maka perlu suatu metode maupun taktik-taktik kerja pengorganisasian yang tepat harus di rumuskan sesuai dengan kondisi obyektif tersebut. Sebab apabila tidak dapat memecahkan persoalan tersebut maka gerakan serikat buruh lambat tapi pasti akan mengalami kehancuran karena tidak dapat berkembang, masa depan buruh di Indonesia dapat di pasikan akan menjadi buruh kontrak seiring dengan usaha yang keras dilakukan oleh pemerintah agar dapat melegalkan praktek ini ke dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, dan saat ini beberapa pimpinan serikat pekerja/buruh juCstru ingin memperkuat praktek sistem buruh kontrak dan sistem Outsourcing dengan cara mendesakan kepada pemerintah agar mengeluarkan peraturan menteri, hal inilah yang mendasari kaum buruh harus terus waspada dan kritis dengan berbagai upaya yang dijalankan pemerintah dan berbagai kalangan yang seolah-olah pro buruh akan tetapi pandangan dan pendiriannya justru mendukung praktek sistem buruh kontrak dan outsourcing di langgengkan di Indonesia.

I. Sejarah Buruh di Dunia dan Indonesia

Perburuhan, telah ada di dunia sejak peradaban manusia dimulai. Sejak dulu, buruh telah dipandang sebelah mata diseluruh dunia, padahal keberadaan mereka sangat membantu roda perekonomian suatu bangsa. Hingga akhirnya muncullah usaha-usaha dari kalangan buruh untuk melindungi hak-hak mereka. Kita mengenal istilah *may day*. Namun, apakah kita tahu apa arti dari istilah itu?, Akar sejarah *May Day* mungkin dimulai pada tahun 1806, ketika terjadi pemogokan pekerja di AS yang pertama kalinya. Ketika itu pekerja *Cordwainers*, perusahaan pembuat sepatu, melakukan mogok kerja. Namun para pengorganisir aksi mogok kerja itu dibawa ke pengadilan untuk diproses hukum. Dalam pengadilan itu, terungkap fakta pekerja di era itu benar-benar diperas keringatnya. Mereka harus bekerja 19-20 jam per harinya. Padahal sehari hanya 24 jam. Artinya para pekerja itu hanya bisa beristirahat 4 jam dalam sehari, dan mereka tidak punya kehidupan lain di luar bekerja untuk perusahaan yang membayar mereka. Maka kelas pekerja Amerika Serikat pada masa itu kemudian memiliki agenda perjuangan bersama, yaitu menuntut pengurangan jam kerja. Peter McGuire, seorang pekerja asal New Jersey, punya peran penting dalam mengorganisir perjuangan ini. Pada tahun 1872, ia dan 100 ribu pekerja lainnya melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut pengurangan jam kerja. McGuire menghimpun kekuatan para pekerja dan pengangguran, serta melobi pemerintah kota untuk menyediakan pekerjaan dan uang lembur bagi pekerja. Tahun 1881, McGuire pindah ke Missouri dan mulai mengorganisir para tukang kayu. Hasilnya, di Chicago berdiri persatuan tukang kayu dengan McGuire sebagai sekretaris umumnya. Inilah cikal bakal serikat pekerja. Ide membentuk serikat pekerja ini kemudian menyebar dengan cepat ke seantero AS. Serikat-serikat pekerja lain didirikan di berbagai kota.

Tanggal 5 September 1882, digelarlah parade Hari Buruh pertama di kota New York dengan 20 ribu peserta. Mereka membawa spanduk yang berisi tuntutan mereka: 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam rekreasi. Itulah 24 jam kehidupan ideal dalam sehari yang diinginkan kelas pekerja Amerika Serikat. Tuntutan pengurangan jam kerja itu pada akhirnya menjadi

perjuangan kelas pekerja dunia. Kongres internasional pertama mereka dilangsungkan di Jenewa, Swiss, pada tahun 1886, dan dihadiri organisasi pekerja dari berbagai negara. Kongres buruh internasional ini menetapkan tuntutan pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari sebagai perjuangan resmi buruh sedunia. Tanggal 1 Mei ditetapkan menjadi hari perjuangan kelas pekerja sedunia. Satu Mei dipilih karena mereka terinspirasi kesuksesan aksi buruh di Kanada pada tahun 1872. Ketika itu buruh Kanada menuntut 8 jam kerja seperti buruh di AS, dan mereka berhasil. Delapan jam kerja di Kanada resmi diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1886.

Sejak abad XIV Indonesia telah menjadi pusat perhatian dan menarik pedagang-pedagang luar negeri, karena kekayaan Indonesia mengenai hasil rempah-rempah seperti: lada, pala, ketumbar, kayu manis dsb. yang diperdagangkan oleh pedagang-pedagang dari India, Persia, Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Disamping berdagang, pedagang-pedagang tersebut juga menyebarkan agama yang dianut oleh masyarakat dari negeri asalnya, misalnya: agama Hindu, Budha, dan Kristen maupun Katolik. Untuk mendapatkan kepentingan ekonominya, pedagang-pedagang asing tersebut menggunakan pertentangan-pertentangan yang ada antara raja-raja di wilayah Indonesia. Perpecahan yang ada diantara raja-raja tersebut serta keunggulan teknik yang dimiliki oleh pedagang-pedagang asing itu menyebabkan mereka selalu kalah dalam peperangan menghadapi orang-orang asing tersebut.

Pada tanggal 22 Juni 1596 armada Belanda berlabuh di Indonesia dibawah pimpinan Cornelis Houtman di Banten. Pada tahun 1602 dibentuk perkumpulan dagang bernama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) serta kemudian diangkat seorang Gubernur Jenderal pada tahun 1610. Politik dalam negeri VOC berdasarkan eksploitasi terhadap organisasi-organisasi feodal yang telah ada, sehingga rakyat menderita dua macam penindasan, yaitu dari raja-raja dan dari VOC. Timbulnya perlawanan-perlawanan dari kaum tani yang menderita dua macam ketertindasan tersebut serta merajalelanya korupsi di dalam tubuh VOC menyebabkan VOC dibubarkan dan kekuasaannya dialihkan langsung kepada pemerintah Belanda pada tahun 1800. Pada saat itu penghisapan Belanda terhadap Indonesia dengan cara penimbunan modal secara sederhana

beserta sistem monopolinya. Dengan ikut sertanya kapital swasta di negeri Belanda dalam penghisapan kolonial terhadap Indonesia itu berarti suatu perpindahan yang sangat pokok dari sistem monopoli menjadi sistem persaingan bebas. Ini berlaku sejak diadakannya perubahan penguasaan tanah oleh pemerintahan kolonial Belanda yang dinamakan “domein verklaring “ pada tahun 1870. Berhubung dengan adanya krisis ekonomi yang sangat hebat pada tahun 1895, maka sebagian besar kapitalis-kapitalis swasta di negeri Belanda mengalami kehancuran, sehingga tinggal beberapa gelintir kapitalis besar yang masih bertahan hidup. Ini menyebabkan ‘kapital finans’ berkuasa sepenuhnya (perpaduan dari kapital bank, kapital industri dan kapital perdagangan). Dengan demikian, maka zaman kapital industri yang berdasarkan persaingan bebas berakhir dan segera disusul oleh zaman imperialisme.

Dengan demikian kedudukan Indonesia sejak tahun 1895 di dalam hubungan ekonomi Dunia ialah bahwa Indonesia dijadikan tempat sumber bahan mentah, tempat penanaman modal, tempat pemasaran hasil produksi kapitalis dunia serta sebagai sumber tenaga buruh yang sangat murah. Dengan lahirnya imperialisme Belanda di Indonesia itulah, lahir dalam arti yang sebenarnya kaum buruh di Indonesia. Dengan adanya penanaman modal industri oleh imperialis (kapitalis monopoli tingkat tinggi) dalam berbagai lapangan di Indonesia (pabrik-pabrik, bengkel-bengkel, pertambangan, transport, perkebunan, industri-industri gula, industri-industri kecil dll) lahirlah golongan rakyat dalam masyarakat yang baru yaitu “kaum Buruh” , sebagai golongan yang menurut kedudukan sosialnya berkepentingan untuk menghapuskan sistem penghisapan dan penindasan yang dijalankan oleh kaum kapitalis monopoli (imperialis) Belanda.

Buruh yang menjual tenaga kerjanya untuk mendapat upah, muncul pada dekade-dekade terakhir abad XIX, terutama di perkebunan swasta yang berkembang di Jawa dan Sumatra. Penetrasi kapitalisme dalam wilayah pedesaan ditunjukkan dengan hadirnya para petani yang tidak memiliki tanah, dan bekerja pada tanah-tanah sewaan untuk mendapat upah. Sementara itu, di kota-kota besar, seiring dengan perkembangan teknologi yang ditancapkan kolonialisme, muncul pula bidang-bidang pekerjaan baru seperti masinis, sopir, pegawai kantor

dan sebagainya. Munculnya buruh upah ini tidak seketika menghadirkan gerakan buruh yang terorganisir dan 'modern'. Perubahan cara pandang, kereta api, surat kabar, dan pendidikan, menjadi elemen-elemen penting yang membawa perubahan pada abad XX. Orang-orang pribumi berpendidikan, yang kemudian dikenal sebagai tokoh-tokoh pergerakan, menjadi pemimpin atau penggerak sejumlah organisasi modern, seperti Budi Utama, Sarekat Islam, dan sebagainya. Sebaliknya gerakan buruh, pada awalnya digerakkan oleh orang-orang Belanda. Di Eropa pada masa itu gerakan buruh sudah dikenal secara luas dalam masyarakat, sehingga bukan hal yang aneh lagi jika timbulnya gerakan buruh di Jawa dipelopori oleh orang-orang Eropa.

J. Gerakan dan Solidaritas Buruh

Serikat pekerja/serikat buruh bebas dalam menentukan asas organisasinya tetapi tidak boleh menggunakan asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat antara lain:

- a. Bebas ialah sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tidak dibawah pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun.
- b. Terbuka ialah dalam menerima anggota ataupun dalam memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.
- c. Mandiri ialah dalam mendirikan, menjalankan dan juga mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi.
- d. Demokratis ialah dalam melakukan pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan juga

melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi.

- e. Bertanggung jawab ialah untuk mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara.

Gerakan buruh merupakan sering digunakan secara luas untuk menjelaskan dinamika organisasi kolektif para pekerja atau buruh dalam rangka menuntut perbaikan nasib mereka kepada majikan (pengusaha) dan kebijakan-kebijakan perburuhan yang pro-buruh dan adil. Secara sederhana, gerakan-gerakan buruh dapat dikelompokkan ke dalam kategorisasi sebagai berikut:

- a. Gerakan buruh yang berorientasi untuk menyejahterakan para anggotanya sehingga para anggotanya mendapatkan keuntungan, seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan uang pensiun. Salah satu serikat buruh tertua yang tercatat dalam sejarah, Friendly Societies, didirikan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
- b. Gerakan buruh yang bertujuan untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif (bargaining collective) sehingga mereka dapat bernegosiasi dengan para pengusaha mengenai upah dan kondisi kerja yang manusiawi
- c. Gerakan buruh yang berorientasi untuk melakukan perlawanan tindakan industri, seperti pemogokan
- d. Gerakan buruh yang berorientasi kepada aktivitas politik. Di antara tujuan gerakan ini berupaya untuk mewujudkan legislasi yang adil buat para buruh. Gerakan ini biasanya berwujud partai politik, seperti halnya Partai Buruh di Inggris yang berawal dari gerakan buruh.

Keadaan Indonesia hari ini yang neo-kolonialisme dan sisa-sisa feodalisme, sudah Sangat konkrit bahwa semua aspek kehidupan negara baik ekonomi, politik dan kebudayaan Indonesia didominasi oleh kaum Imperialisme yang didukung oleh kakitangannya didalam negeri yaitu penguasa komprador [pemerintah], kapitalis birokrat serta tuan tanah-tuan tanah besar. Yang dampaknya adalah rakyat dijadikan tumbal keserakahannya, termasuk didalamnya adalah kaum buruh yang dijadikan semata-mata alat/mesin pencipta

keuntungan/kekayaan semata bagi mereka. Nasibnya terus tertindas dan dihisap sehingga ketergantungan pada kaum pemodal/kapitalis. Dari situasi itu pergerakan buruh mempunyai peranan yang sangat penting kedudukannya dalam kaum buruh untuk mendapatkan hak-haknya, serta terbebas dari penindasan dan penghisapan.

Pergerakan buruh mencakup semua aksi perjuangan kaum buruh dalam menghentikan tekanan kapitalis dan eksploitasi. Pergerakan ini bertujuan untuk membuang dan menghancurkan sistem sosial lama yang menindas dan menghisap, dimana dibangun sistem sosial baru yang kelas pekerja menjadi pemilik alat-alat produksi dan mengarahkan ekonomi, politik dan budaya nasional ke arah yang lebih baik. Untuk menyadari tujuan dari pergerakan buruh, serikat buruh asli harus diperkuat oleh para anggotanya [para buruh] para buruh harus bergerak menuntut perbaikan dibidang ekonomi dan politik bersama-sama dengan kelas dan sektor rakyat lainnya dalam masyarakat dimana selanjutnya harus melancarkan aksi politik. Semua langkah tersebut akan menghasilkan garis yang kuat dalam melawan monopoli imperialisme, dan para pengikut lokalnya yaitu kapitalis birokrat, penguasa komprador dan tuan tanah besar. Klas pekerja harus bersatu dan memimpin kelas-kelas tertekan, tertindas dan terhisap lainnya di Indonesia ini, seperti kaum tani, pelajar/mahasiswa dan profesional, kaum miskin kota dan kapitalis nasionalis dalam satu kesatuan dan kemerdekaan nasional dan demokrasi yang sejati [demokrasi rakyat]. Kemerdekaan nasional dan demokrasi sejati berarti kemerdekaan negara yang terbebas dari pengaruh dan dominasi imperialisme – kapitalisme dan kakitangannya, kebebasan kaum petani dari eksploitasi kaum feodal, hak-hak demokrasi bagi seluruh penduduk dan membangun pemerintahan adil makmur yang benar-benar memprentasikan pekerja dan rakyat. Usaha dan perjuangan kaum buruh akan mengarah pada pembangunan tatanan sosial yang baru dibawah kepemimpinan klas pekerja dimana alat-alat produksi dan hasil kerja pekerja dapat dimiliki secara sosial.

Ketija sorang buruh akan bergabung dengan organisasi buruh, harus memahami beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengertian Serikat buruh/serikat pekerja. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Tenaga Kerja

tahun 2003 no 17, serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

- b. Fungsi serikat buruh/serikat pekerja. Sesuai dengan pasal 102 UU Tenaga Kerja tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- c. Cara membuat serikat pekerja di tingkat perusahaan. Sesuai pasal 5 UU No. 21 Tahun 2000, sebuah serikat buruh/serikat pekerja dapat dibentuk oleh minimal 10 orang karyawan di suatu perusahaan. Dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa pembentukan serikat pekerja ini tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari perusahaan, pemerintah, partai politik, atau pihak manapun juga. Serikat pekerja juga harus memiliki anggaran dasar yang meliputi :
 - nama dan lambang
 - dasar negara, asas, dan tujuan
 - tanggal pendirian
 - tempat kedudukan
 - keanggotaan dan kepengurusan
 - sumber dan pertanggungjawaban keuangan
 - ketentuan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.
- d. Cara menjadi anggota serikat buruh/serikat pekerja. Caranya simple sebetulnya. Pada dasarnya sebuah serikat buruh/serikat pekerja harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku dan jenis kelamin. Jadi sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan, anda hanya tinggal menghubungi pengurus serikat buruh/serikat pekerja di kantor anda, biasanya akan diminta untuk mengisi formulir keanggotaan untuk data.

Ada pula sebagian serikat pekerja yang memungut iuran bulanan kepada anggotanya yang relatif sangat kecil berkisar Rp. 1,000 - Rp. 5,000, gunanya untuk pelaksanaan-pelaksanaan program kesejahteraan karyawan anggotanya. Tidak mahal kan? Tidak akan rugi ketika kita tahu apa saja keuntungan yang didapat

- e. Keuntungan menjadi anggota serikat buruh/serikat pekerja. Banyak sekali keuntungan menjadi anggota serikat pekerja, terlebih jika serikat pekerja perusahaan anda sudah berafiliasi ke federasi serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja. Sebagai contoh, anggota serikat pekerja akan mendapatkan program-program training peningkatan kemampuan kerja dan diri seperti training *negotiation skill*, training pembuatan perjanjian kerja bersama, dll. Selain itu, anggota serikat pekerja juga akan mendapat bantuan hukum saat tertimpa masalah dengan perusahaan yang berkaitan dengan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai karyawan.
- f. Seorang pekerja dapat menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja. Dalam pasal 14, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja tertera bahwa seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan. Apabila seorang pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan namanya tercatat di lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya.
- g. Anggota dapat mengundurkan diri atau diberhentikan dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Untuk menjadi anggota organisasi Serikat Buruh atau pekerja, itu merupakan hak bagi setiap pekerja atau buruh. Pekerja dapat berhenti sebagai anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja dengan syarat ada pernyataan tertulis. Pekerja juga dapat diberhentikan dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang bersangkutan. Pekerja, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang berhenti atau diberhentikan tetap harus bertanggung jawab

atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap Serikat Buruh/Serikat Pekerja (pasal 17 UU No. 21 tahun 2000).

- h. Bentuk prosedur pemberitahuan dan pencatatan Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang baru terbentuk. UU No. 21 tahun 2000 mengenai Serikat Buruh/Serikat Pekerja mengatur tentang tata cara pemberitahuan dan pencatatan Serikat Buruh/Serikat Pekerja dalam pasal 18-24. Serikat Buruh/Serikat Pekerja, federasi dan konfederasi yang telah dibentuk harus memberitahukan keberadaannya kepada instansi pemerintah setempat yang menangani urusan perburuhan. Dalam surat pemberitahuan, harus dilampirkan daftar nama anggota, pendiri dan pengurusnya serta salinan peraturan organisasi Badan pemerintah setempat harus mencatat serikat yang telah memenuhi persyaratan dan memberikan nomor pendaftaran kepadanya dalam kurun waktu 21 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan. (Apabila sebuah serikat belum memenuhi persyaratan yang diminta, maka alasan penundaan pendaftaran dan pemberian nomor pendaftaran kepadanya harus diserahkan oleh badan pemerintah setempat dalam tenggang waktu 14 hari setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan) Serikat harus memberitahukan instansi pemerintah diatas bila terjadi perubahan dalam peraturan organisasinya. Instansi pemerintah tersebut nantinya harus menjamin bahwa buku pendaftaran serikat terbuka untuk diperiksa dan dapat diakses masyarakat luas. Serikat Yang telah memiliki nomor pendaftaran wajib menyerahkan pemberitahuan tertulis tentang keberadaan mereka kepada pengusaha/perusahaan yang terkait. Selengkapnnya mengenai prosedur pendaftaran Serikat Buruh/Serikat Pekerja diatur oleh Keputusan Menteri No.16/MEN/2001 tentang Prosedur Pendaftaran Resmi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Hak Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak :

1. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha.
2. Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial.
3. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan.

4. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh.
5. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pergerakan buruh mencakup semua aksi perjuangan kaum buruh dalam menghentikan tekanan kapitalis dan eksploitasi. Pergerakan ini bertujuan untuk membuang dan menghancurkan sistem sosial lama yang menindas dan menghisap, dimana dibangun sistem sosial baru yang kelas pekerja menjadi pemilik alat-alat produksi dan mengarahkan ekonomi, politik dan budaya nasional ke arah yang lebih baik. Untuk menyadari tujuan dari pergerakan buruh, serikat buruh asli harus diperkuat oleh para anggotanya [para buruh] para buruh harus bergerak menuntut perbaikan dibidang ekonomi dan politik bersama-sama dengan kelas dan sektor rakyat lainnya dalam masyarakat dimana selanjutnya harus melancarkan aksi politik. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Tenaga Kerja tahun 2003 no 17, serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Begitu juga fungsi serikat buruh/serikat pekerja Sesuai dengan pasal 102 UU Tenaga Kerja tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

K. Tujuan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang No.21 Tahun 2000, Serikat Pekerja /Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Buruh bertujuan untuk memberikan

perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Secara luas tujuan dari keberadaan serikat buruh/pekerja adalah :

1. Mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil secara materi dan spiritual, khususnya masyarakat pekerja berdasarkan Pancasila;
2. Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja;
3. Terlaksananya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;
4. Terhimpun dan bersatunya kaum pekerja di segala kelompok industrial barang dan jasa serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan menumbuhkembangkan solidaritas diantara sesama kaum pekerja;
5. Terciptanya perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan produktivitas;

6. Terciptanya kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang selaras, serasi dan seimbang menuju terwujudnya tertib sosial, tertib hukum dan tertib demokrasi;
7. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi serta penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sedangkan menurut UU No.21 tahun 2000 mengenai Serikat Buruh/Serikat Pekerja, Fungsi serikat mencakup pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyelesaian perselisihan industrial, mewakili pekerja di dewan atau lembaga yang terkait dengan urusan perburuhan, serta membela hak dan kepentingan anggota serikat. Pekerja sebagai salah satu unsur utama dari produksi, pengusaha sebagai pemilik modal, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengawasan terhadap perarutan perundang-undangan Ketenagakerjaan, hubungan ketiga unsur inilah yang disebut Hubungan Industrial³ yang berazaskan Pancasila. Oleh karena itu azas musyawarah mufakat seyogyanya dikedepankan apabila terjadi perselisihan anatara pekerja dan pengusaha. Konsep hubungan hubungan industrial diharapkan mampu mewujudkan hubungan yang dinamis, harmonis dan berkeadilan.

Hambatan dan tantangan Ketenagakerjaan pada era reformasi diantaranya angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, pengusaha kurang mau memahami makna hubungan industrial serta rendahnya hukuman pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku disatu pihak, kurangnya keterampilan pekerja dan sikap yang arogan dipihak lain, oleh karena itu sering terjadi perselisihan hak bahkan konflik sosial. Menghadapi tantangan tersebut diatas Lembaga Tripartit yang anggotanya merupakan perwakilan dari Serikat Pekerja dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Dinas Tenaga Kerja sesuai tingkatan,

diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan saran terhadap pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan Ketenagakerjaan, khususnya dalam rangka mendorong investor untuk membuka usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan terciptanya lapangan kerja, iklim dan kondisi kerja yang kondusif dapat didorong melalui sosialisasi dan pelatihan tata aturan ketenagakerjaan agar pengusaha dan pekerja secara sadar dan ikhlas bersama-sama meningkatkan Hubungan Industrial mengedepankan perundingan Bipartit dalam merumuskan Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan dan pada lembaga-lembaga Ketenagakerjaan sehingga tercipta hubungan yang harmonis untuk mewujudkan peningkatan produktifitas dan kesejahteraan pekerja. Di Prov. Kep. Bangka Belitung khususnya penulis banyak mendengar keluhan pengusaha terhadap kinerja pengurus Serikat Pekerja yang dianggap mereka (Pengusaha) terkesan arogan dalam menjembatani kepentingan pekerja disatu pihak, dipihak lain penulis sering mendapat laporan dari PUK tentang sikap Pengusaha yang beranggapan bahwa keberadaan serikat pekerja identik dengan bermacam-macam tuntutan. Oleh karena itu pertanyaannya adalah: Apakah kedua belah pihak telah mempunyai pengetahuan (*Knowledge*) tentang Hubungan Industrial; Apakah kedua belah pihak telah terampil (*skill*) dalam menafsirkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; Apakah kedua belah pihak telah mempunyai sikap (*attitute*) yang elegan sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan industrial yang berazaskan Pancasila.

L. Perkembangan Serikat Buruh/Pekerja Di Indonesia

Tanggal 1 Mei 1886 adalah merupakan puncak demonstrasi di Kota Chicago Amerika Serikat dan merupakan simbol kemenangan buruh sedunia diputuskan dalam Kongres International Labour Organisation (ILO) pertama tahun 1889 di kota Paris Perancis. Maka setiap tanggal 1 Mei diseluruh

dunia diperingati sebagai Hari Buruh, tak terkecuali di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang menyulut emosionalisasi kebersamaan dalam perjuangan pekerja santer dikumandangkan, bahkan di Medan Sumatera Utara (Mei Day 2007) sebelum hari peringatan sudah ada kegiatan serikat pekerja unjuk rasa damai menuntut perbaikan kesejahteraan pekerja. Momentum Hari Buruh dimanfaatkan pekerja untuk merepleksikan diri terhadap perjuangan dan cita-cita pekerja menuju kehidupan yang lebih baik. Organisasi buruh sedunia International Labour organization (ILO) merupakan kanalisasi serikat pekerja antar bangsa yang selalu menyuarakan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan buruh di jagat raya ini. Menurut Susetawan Organisasi Buruh yang pertama berdiri di Indonesia berdiri pada tahun 1897 didirikan oleh orang-orang Eropa dan secara eksklusif beranggotakan orang-orang Eropa. Kemunculan organisasi ini lebih diinspirasi oleh gerakan buruh di Nederland, pada waktu itu disebabkan oleh kondisi-kondisi kerja yang kurang baik di kalangan pekerja Eropa di Indonesia. Organisasi buruh pertama dengan nama N.I.O.G (Ned Ind Onderw Genootschm) memiliki anggota para pegawai swasta Eropa.

Masyarakat pribumi Indonesia yang memiliki pekerjaan - pekerjaan terendah dalam hirarki kolonial, oleh karenanya tidak diizinkan untuk menjadi anggota. Pada tahun 1908 Organisasi pertama buruh Indonesia dengan keanggotaan campuran antara orang Eropa dan Indonesia didirikan. Organisasi tersebut bernama V.S.T.P (Vereeniging van Spoor en Tramweg Personeel) dipimpin oleh seorang Jawa yaitu Semaun. Setelah 1965, seluruh serikat pekerja/buruh di Indonesia dipaksa bergabung dengan sebuah organisasi yang dipayungi pemerintah dibawah nama Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Pada tanggal 20 Februari 1973 lahirlah deklarasi buruh seluruh Indonesia yang naskahnya yang antara lain membentuk organisasi bernama FBSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) sebagai induk organisasi yang

ditopang oleh 21 serikat pekerja buruh lapangan. Selanjutnya Istilah Federasi dan buruh menurut Menteri Tenaga Kerja pada waktu itu Sudomo tidak sesuai dengan hubungan industrial di Indonesia sebab mereferensi situasi demoksrasi-demokrasi liberal, maka pada Tahun 1985 organisasi tersebut akhirnya diberi nama baru menjadi Serikat pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Pada era reformasi SPSI berkembang menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K. SPSI).

Menurut Mardjono perkembangan Serikat Pekerja yang terdaftar di Depnakertrans hingga Mei 2000 meliputi :

- a. Unit Kerja/Tingkat Perusahaan : 9.820 SP
- b. SP Tingkat Nasional BUMN : 44 SP
- c. Serikat Pekerja Tingkat Nasional Swasta : 46 SP
- d. Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia : 23 Federasi

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 98 tahun 1984 dengan UU No. 18 tahun 1956, konvensi dimaksud mengandung dua pokok penting yaitu Hak Berorganisasi dan Hak Berunding bahkan Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Organisasi Serikat Pekerja terbesar di Indonesia adalah Konfederasi Serikat pekerja Seluruh Indonesia (K. SPSI), secara historis telah berumur berumur 35 tahun tepatnya tanggal 20 Februari 2008 yang sering disebut Hari Pekerja Indonesia (HAPERI ke-35).

M. Organisasi Serikat Pekerja/Buruh

Kemajuan Industrialisasi berdampak pada menjaknya kebutuhan Tenaga Kerja. Dengan semakin banyaknya penggunaan tenaga kerja maka semakin banyak menimbulkan pemasalahan dan gesekan-gesekan yang akhirnya dapat menimbulkan keresahan unjuk rasa dan pemogokan. Keberadaan organisasi SP sangatlah penting karena dapat menjadi patner dengan pengusaha dalam rangka memajukan usaha dan menciptakan iklim kondusif. Oleh karena pemerintah mengeluarkan suatu peraturan perundang-

undangan yang memberikan arah dan tujuan keberadaan SP/SB dari hasil UU No. 18 tahun 1956 yang telah meratifikasi Konvensi ILO No. 98 tahun 1949 tentang Hak Berserikat dan berunding bersama. Dan yang terakhir dikeluarkan UU No. 21 tahun 2000 tentang SP/SB. Menurut Soedarjadi, SH yang dimaksud Organisasi Serikat Pekerja dalam Konvensi ini, antara lain:

- a. Pekerja harus mendapatkan perlindungan terhadap Peraturan Perundang – Undangan dan tindakan yang membatasi hak berserikat seperti :
- b. Mempekerjakan seseorang dengan syarat dia tidak boleh menjadi anggota SP/SB atau harus melepaskan keanggotaannya dari SP; dan
- c. Diberhentikan dari pekerjaan karena anggota atau mengikuti kegiatan SP.
- d. Pengusaha atau organisasi pengusaha tidak boleh mengintervensi SP dan kegiatannya,
- e. Pengusaha dan SP didorong untuk secara sukarela berunding merumuskan kerjasama yang memuat kondisi kerja yaitu hak dan kewajiban pekerja serta kewenangan dan kewajiban pengusaha.

Sebagai wadah pekerja organisasi SP/SB yang telah terbentuk dengan mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya serta mempunyai peranan dan fungsi yang sangat strategis didalam pelaksanaan Hubungan Industrial. Ada beberapa ketentuan dalam mendirikan serikat buruh atau pekerja, antara lain

- a. Serikat Pekerja. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja dilindungi perusahaan dengan anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang
- b. Federasi Serikat Pekerja. Sekurang - kurangnya 5 (lima) organisasi serikat pekerja dapat membentuk federasi serikat pekerja.

- c. Konfederasi Serikat Pekerja. Hal ini dapat dibentuk apabila ada 3 (tiga) atau lebih Federasi Serikat Pekerja/Buruh bergabung untuk membentuknya.

Ketentuan dan syarat-syarat anggota sebagai berikut:

- 1) Serikat pekerja/buruh, Federasi, Konfederasi harus terbuka dalam menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku dan jenis kelamin.
- 2) Dalam hal persyaratan keanggotaan diatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja di suatu perusahaan.
- 4) Apabila tercatat lebih dari satu, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja yang dipilih.

1. Hak dan Fungsi Serikat Buruh/Pekerja

Hak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan hak asasi pekerja yang telah dijamin didalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 dan untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja, dimana Serikat Pekerja/Serikat Buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan juga meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dimana dalam menggunakan haknya tersebut pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan Bangsa dan Negara oleh karena itu penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Hak berserikat bagi pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi dan Konvensi ILO Nomor 98 Tentang Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama. Konvensi tentang hak berserikat bagi pekerja/buruh ini telah diratifikasi

oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Adapun fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sering dikaitkan dengan keadaan hubungan industrial. Hubungan industrial itu diartikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku didalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha,pekerja, dan pemerintah. Pengertian itu memuat semua aspek yang ada didalam suatu hubungan kerja yang terdiri dari:

- 1) Para pelaku : pekerja, pengusaha, pemerintah;
- 2) Kerja sama : manajemen-karyawan;
- 3) Perundingan bersama: perjanjian kerja, kesepakatan kerja bersama, peraturan perusahaan;
- 4) Kesejahteraan: upah, jaminan sosial, pensiun, keselamatan dan kesehatan kerja, koperasi, pelatihan kerja;
- 5) Perselisihan industrial: arbitrase, mediasi, mogok kerja, penutupan perusahaan, pemutusan hubungan kerja.

Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dituangkan di dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja . Fungsi berasal dari kata function, yang artinya *"something that performs a function: or operation"*. Fungsi dan peran yang dapat dilakukan sebagai lembaga organisasi serikat buruh/pekerja adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai pihak dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dan penyelesaian Perselisihan Industrial
- 2) Sebagai wakil pekerja buruh dalam lembaga kerja bersama dibidang Ketenagakerjaan sasuai tingkatannya;
- 3) Sebagai sarana menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentiongan anggota; dan
- 5) Sebagai perencana, pelaksanaan dan penanggung jawab, pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

- 6) Sebagai wakil dari para pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Fungsi serikat buruh/pekerja secara khusus adalah :

- a) Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja.
- b) Lembaga perunding mewakili pekerja.
- c) Melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan kerja.
- d) Wadah pembinaan dan wahana peningkatan pengetahuan pekerja.
- e) Wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
- f) Wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.
- g) Wakil pekerja dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
- h) Wakil untuk dan atas nama anggota baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Fungsi dapat juga diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan; apabila ketua tidak ada maka wakil ketua akan melakukan fungsi ketua; fungsi adalah kegunaan suatu hal; berfungsi artinya berkedudukan, bertugas sebagai; menjalankan tugasnya. Dengan demikian fungsi Serikat Buruh/Serikat Pekerja dapat diartikan sebagai jabatan, kegunaan, kedudukan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

2. Peran Serikat Buruh/Pekerja

Buruh memiliki peran yang cukup strategis dalam rangka memberikan perlindungan dan memperjuangkan anggotanya. Di baweah ini ada bebera peran dari serikat buruh/pekerja adalah :

- 1) Serikat pekerja mempunyai fungsi Kanalisasi, yaitu fungsi menyalurkan aspirasi, saran, pandangan, keluhan bahkan tuntutan masing-masing pekerja kepada pengusaha dan sebaliknya, serikat pekerja berfungsi sebagai saluran informasi yang lebih efektif dari pengusaha kepada para pekerja;

- 2) Dengan memanfaatkan jalur dan mekanisme serikat pekerja, pengusaha dapat menghemat waktu yang cukup besar menangani masalah-masalah ketenagakerjaan, dalam mengakomodasikan saran-saran mereka serta untuk membina para pekerja maupun dalam memberikan perintah-perintah, daripada melakukannya secara individu terhadap setiap pekerja;
- 3) Penyampaian saran dari pekerja kepada pimpinan perusahaan dan perintah dari pimpinan kepada para pekerja, akan lebih efektif melalui serikat pekerja, karena serikat pekerja sendiri dapat menseleksi jenis tuntutan yang realistis dan logis serta menyampaikan tuntutan tersebut dalam bahasa yang dapat dimengerti dan diterima oleh direksi dan perusahaan;
- 4) Dalam manajemen modern yang menekankan pendekatan hubungan antar manusia (Human Approach), diakui bahwa hubungan nonformal dan semiformal lebih efektif atau sangat diperlukan untuk mendukung daripada hubungan formal. Dalam hal ini serikat pekerja dapat dimanfaatkan oleh pengusaha sebagai jalur hubungan semi formal
- 5) Serikat pekerja yang berfungsi dengan baik, akan menghindari masuknya anasir-anasir luar yang dapat mengganggu kelancaran proses produksi dan ketenagakerjaan, jika di suatu perusahaan tidak ada PUK SPSI atau bila PUK SPSI tidak berfungsi dengan baik, maka anasir luar dengan dalih memperjuangkan kepentingan pekerja akan mudah masuk mencampuri masalah intern perusahaan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa campur tangan LSM, LBH dan pihak luar lainnya ke perusahaan lebih banyak menambah rumitnya persoalan daripada mempercepat penyelesaian masalah;
- 6) Mewakili pekerja pada Lembaga Tripartit dan Dewan Pengupahan pada Lembaga Departemen Tenaga Kerja sesuai tingkatan;

3. Usaha Serikat Pekerja/Buruh

Adapun yang menjadi usaha dari serikat buruh/pekerja adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan peran serta kaum pekerja dalam Pembangunan Nasional untuk mengisi cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- b) Memperjuangkan terciptanya dan terlaksananya peraturan perundangan untuk mewujudkan pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
- c) Memacu terciptanya kondisi dan syarat-syarat kerja yang layak;
- d) Bekerja sama dengan badan-badan pemerintah dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi;
- e) Memperjuangkan jaminan sosial yang luas sesuai dengan tuntutan kebutuhan;
- f) Menyelenggarakan pendidikan bidang ketenagakerjaan dalam rangka memperluas pengetahuan, keterampilan dan prilaku, meningkatkan kemampuan tenaga kerja baik dalam berorganisasi maupun dalam bekerja;
- g) Mendorong terbentuknya dan berkembangnya koperasi pekerja dan usaha-usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial.

4. Tata Cara Pembentukan Serikat Pekerja

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 menganut multi union system yaitu memberikan kebebasan kepada pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh. Setiap 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh menurut undang- undang tersebut telah dapat membentuk suatu serikat pekerja/serikat buruh. Ketentuan ini memungkinkan dalam satu perusahaan bisa berdiri beberapa serikat pekerja/serikat buruh. Banyaknya serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan dapat memungkinkan terjadinya perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh

yang biasanya menyangkut masalah keanggotaan yang akan berdampak pada posisi mayoritas sebuah serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tersebut.

Sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yakni : setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh. Pembentukan serikat pekerja/serikat buruh ini dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dimana sekurang-kurangnya memuat (Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja) :

1. Nama dan lambang;
2. Dasar negara, asas, dan tujuan;
3. Tanggal pendirian;
4. Tempat kedudukan;
5. Keanggotaan dan kepengurusan;
6. Sumber dan pertanggung jawaban keuangan; dan
7. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

Apabila ada perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pengurus serikat pekerja harus memberitahukan kepada instansi pemerintah paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga tersebut (Pasal 21 UU No.21 Tahun 2000). Memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat dengan dilampiri :

1. Daftar nama anggota pembentuk;
2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
3. Susunan dan nama pengurus; (Pasal 18 UU No.21 Tahun 2000).

Instansi pemerintah yang bertanggung-jawab, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan, wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja yang telah memenuhi ketentuan (Pasal 20 ayat 1 UU No.21 Tahun 2000); buku pencatatan harus dapat dilihat setiap saat dan terbuka untuk umum. Dalam hal serikat pekerja belum memenuhi ketentuan, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab itu dapat menanggukkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dengan memberitahukan secara tertulis kepada serikat pekerja selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan (Pasal 20 ayat 2 dan 3 UU No.21 Tahun 2000).

Pengurus serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan, harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya (Pasal 23 UU No.21 Tahun 2000). Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat dibentuk berdasarkan kesamaan sektor usaha, jenis usaha, atau lokasi tempat kerja dan dapat berafiliasi dengan serikat pekerja/serikat buruh internasional dan atau organisasi internasional lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU No. 21 tahun 2000 mengenai Serikat Buruh/Serikat Pekerja mengatur tentang tata cara pemberitahuan dan pencatatan Serikat Buruh/Serikat Pekerja dalam Pasal 18-24. Serikat Buruh/Serikat Pekerja, federasi dan konfederasi yang telah dibentuk harus memberitahukan keberadaannya kepada instansi pemerintah setempat yang menangani urusan perburuhan.

Dalam surat pemberitahuan, harus dilampirkan daftar nama anggota, pendiri dan pengurusnya serta salinan peraturan organisasi. Badan pemerintah setempat harus mencatat serikat yang telah memenuhi persyaratan dan

memberikan nomor pendaftaran kepadanya dalam kurun waktu 21 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan. (Apabila sebuah serikat belum memenuhi persyaratan yang diminta, maka alasan penundaan pendaftaran dan pemberian nomor pendaftaran kepadanya harus diserahkan oleh badan pemerintah setempat dalam tenggang waktu 14 hari setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan). Serikat harus memberitahukan instansi pemerintah diatas bila terjadi perubahan dalam peraturan organisasinya. Instansi pemerintah tersebut nantinya harus menjamin bahwa buku pendaftaran serikat terbuka untuk diperiksa dan dapat diakses masyarakat luas. Serikat Yang telah memiliki nomor pendaftaran wajib menyerahkan pemberitahuan tertulis tentang keberadaan mereka kepada pengusaha/perusahaan yang terkaitSelengkapnya mengenai prosedur pendaftaran Serikat Buruh/Serikat Pekerja diatur oleh Keputusan Menteri No.16/MEN/2001 tentang Prosedur Pendaftaran Resmi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pemberitahuan dan pencatatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Nomor KEP. 16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001 Tentang Prosedur Pendaftaran Resmi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah sebagai berikut:

1. Serikat Pekerja/Buruh, Federasi, Konfederasi yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan setempat untuk Dicatat. didalam pemberitahuan dilampirkan: daftar nama anggota pembentuk; dan anggaran dasar anggaran rumah tangga sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Nama dan lambang serikat pekerja/buruh,
 - b) Dasar Negara dan tujuan yang tidak bertentangan Pancasila UUD 1945,
 - c) Tanggal pendirian,
 - d) Tempat kedudukan,

- e) Persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhentiannya,
 - f) Hak dan Kewajiban Pengurus,
 - g) Persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhentiannya,
 - h) Sumber dan tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan,
 - i) Ketentaun perubahan AD/ART
 - j) Susunan dan Nama Pengurus.
2. Setelah menerima pemberitahuan dari organisasi serikat pekerja/buruh, maka instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan. Apabila berkas pencatatan tidak/kurang memenuhi persyaratan maka pencatatan ditangguhkan ,untuk kemudian diperbaiki atau dilengkapi.

Adapun persyaratan yang tidak memenuhi ketentuan dapat berupa :

- a. Anggota kurang dari ketentuan yang berlaku baik untuk pengajuan serikat pekerja/buruh, Federasi maupun Konfederasi.
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Nama dan lambang sama dengan organisasi serikat pekerja yang lain.

5. Perlindungan Terhadap Serikat Pekerja

Siapapun dilarang untuk menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja dengan cara :

- a) Melakukan pemutusan hubungan kerja;
- b) Memberhentikan sementara
- c) Menurunkan jabatan atau melakukan mutasi;

- d) Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja;
- e) Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; dan
- f) Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja (Pasal 28 UU No.21 Tahun 2000).

Sanksi hukum atas pelanggaran Pasal 28 tersebut di atas yang merupakan tindak pidana kejahatan, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) (Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000). Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja dalam jam kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. Memberikan kesempatan adalah membebaskan pengurus dan anggota serikat pekerja dalam beberapa waktu tertentu dari tugas pokoknya sebagai pekerja sehingga dapat melaksanakan kegiatan serikat pekerja. Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama harus diatur mengenai: 1) Jenis kegiatan yang diberikan kesempatan, 2) Tata cara pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah. Adapaun yang menjadi Sumber hukum yaitu:

- a) Undang Undang Dasar 1945,
- b) Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi,
- c) Konvensi ILO Nomor 98 Tentang Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama,
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja,
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Internasional No. 98

Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama.

- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- g) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Nomor KEP. 16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001 Tentang Prosedur Pendaftaran Resmi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

BAB X

FENOMENA KONFLIK BURUH INDUSTRI

Pada bab sepuluh dibahas tentang: Fenomena Konflik Buruh Masyarakat Industri, di dalamnya terdiri dari: Pengertian Konflik dalam Masyarakat Industri, Konflik Buruh Versus Pengusaha dan Pemerintah, Penyebab Terjadinya Konflik dalam Industri dan Langkah-Langkah Mengatasi Konflik Industrial.

A. Pengertian Konflik Masyarakat Industri

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Robbins (1996) dalam "*Organization Behavior*" menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Dari beberapa pengertian konflik diatas saya menghubungkannya dalam Industri, adalah suatu benturan pemikiran antara pihak pengelola dalam hal ini ketua dengan para anggota maupun kerja dalam dunia industry dimana menimbulkan percekocan antara pihak yang terkait yang mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan penggugatan baik itu dari pihak atasan maupun bawahan.

Perselisihan ini pada umumnya timbul karena adanya sikap yang berbeda antara pemilik dan pekerja. Pemilik perusahaan

memandang dirinya sebagai pemodal sehingga terlalu menonjolkan diri sebagai pembuka kesempatan kerja, sehingga mereka lebih menonjolkan kekuasaan dan keinginan. Dalam keadaan yang seperti inilah, maka pihak yang mempunyai kekuatan yang lebih (disini dalam artian pemilik perusahaan) yang mendominasi pihak yang lainnya (dalam artian perkerja).

B. Konflik Buruh Versus Pengusaha dan Pemerintah

Era pasca Reformasi telah membukakan keran bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance*. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3), UU NO 21 tahun 2000, KEP/16/MEN/2001, merupakan dasar hukum dalam melaksanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus di pahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha. Perjuangan buruh di Indonesia selama ini menginginkan agar buruh memiliki kekuatan tawar (*Bargaining*) yang sejajar dengan pengusaha dan pemerintah dalam melaksanakan hubungan penentuan kebijakan terutama hal-hal yang terkait dengan nasib buruh itu sendiri. Para buruh pun sadar untuk memiliki kekuatan posisi tawar harus melakukan pergerakan-pergerakan untuk melawan kebijakan yang dianggap sangat merugikan buruh. Organisasi buruh dinilai sudah waktunya menjadi kekuatan politik di Indonesia. Bahkan, organisasi politik ini bakal menjadi kekuatan politik utama di Indonesia masa depan. Organisasi buruh yang ideologis akan mampu memperjuangkan kepentingan hak-hak buruh, tidak hanya soal normatif semata. Seperti hak-hak pekerja, jaminan sosial dan lainnya. Lebih dari itu, jika organisasi buruh menjadi partai politik baru, maka bisa mewarnai kebijakan yang lahir dari negara terkait perbaikan nasib hidup buruh dan masyarakat secara luas.

Untuk bisa menjadi kekuatan politik yang besar, organisasi buruh harus terus di ingatkan atas beberapa hal, yakni: *Pertama*, Kepemimpinan buruh yang tidak homogen dan primordial, tetapi harus mencerminkan pluralitas dan

kebersamaan. tidak boleh terjebak dalam segmentasi profesi yang sektarian. Karena keberadaan buruh tidak melihat berasal dari latar belakang keyakinan tertentu. Serikat Buruh harus mampu merancang bangun platform perjuangan ke-indonesiaan yang nyata, yang terintegrasi dalam bingkai NKRI dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu apalagi terkait kepentingan asing. Kemudian Serikat Buruh harus mempunyai ideologi yang tegas dalam perjuangannya. Potensi organisasi buruh menjadi kekuatan politik baru ke depan lebih berpeluang karena Parpol yang ada saat ini tidak menempatkan isu buruh sebagai isu strategis dalam program partainya. Parpol saat ini lebih memilih sikap pragmatis-opportunis dalam memandang isu buruh. Hal ini terjadi karena kemunculan Parpol bukan karena kematangan ideologi, tetapi lebih kepada kepentingan aktualisasi syahwat kekuasaan untuk memperkaya diri, keluarga, kroni dan kelompoknya saja.

Kedua, Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Lahirnya Undang-undang ini merupakan anugrah sekaligus juga bencana. Sebagai anugrah, karena dalam undang-undang itu dengan sangat jelas memberi kebebasan yang seluas-luasnya bagi para buruh untuk menyalurkan aspirasinya dalam wadah organisasi yang benar-benar mereka percayai. Namun di sisi lain, ada kerugian yang dialami gerakan buruh, antara lain terpecah-pecahnya buruh dalam berbagai serikat. Banyaknya serikat buruh menjadi suatu kelemahan karena menyulitkan buruh untuk melakukan konsolidasi. Dengan banyaknya serikat buruhpun lebih memungkinkan terjadinya konflik antar-serikat buruh, dari konflik antar-serikat tingkat perusahaan, daerah, hingga tingkat nasional. Kenyataan ini harus dihadapi oleh serikat buruh di Indonesia. Dengan terkotak-kotaknya serikat buruh sudah menyulitkan buruh untuk konsolidasi guna menggalang kekuatan politik baik untuk menghadapi politik perburuhan yang diterapkan oleh negara maupun politik industri yang dicanangkan oleh pemodal. Jika karena pengkotak-kotakan itu juga menyebabkan terjadi konflik antar-serikat buruh, maka harapan buruh melalui serikat buruh untuk dapat memenangkan “pertempuran” akan semakin jauh. Karenanya sulit pula bagi serikat buruh untuk mencapai salah satu tujuannya, yaitu mensejahterakan anggotanya. Siapakah

sebenarnya yang bertanggung jawab atas terjadinya konflik antar-serikat buruh, baik di tingkat pabrik, lokal, maupun nasional. Hal inilah yang perlu dirumuskan secara bersama-sama oleh semua pimpinan serikat buruh atau para ketua umum untuk membuka sebuah forum diskusi yang membahas tentang konflik buruh, konsolidasi secara keseluruhan kekuatan buruh, kisruh upah yang tak kunjung selesai dan rekonsiliasi persepsi tentang problem mendasar yang di hadapi oleh buruh di Indonesia kekinian ini.

Konflik atau perbedaan pandangan adalah hal biasa. Konflik dapat terjadi di manapun dan menimpa siapapun yang memiliki kepentingan. Di serikat buruh konflik bahkan tak dapat dipisahkan dari keseharian kerja organisasi buruh ini. Permasalahan selalu muncul dan kerap kali tercampur antara yang organisasional dengan yang personal. Tentu hal ini pun berlaku di banyak organisasi atau kelompok kepentingan lain. Beberapa literatur menyebutkan bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya konflik antara lain adanya perbedaan pendapat dan pandangan, perbedaan tujuan, ketidaksesuaian cara pencapaian tujuan, ketidakcocokan perilaku, pemberian pengaruh negatif dari pihak lain pada apa yang akan dicapai oleh pihak lainnya, persaingan, kurangnya kerja sama, dll. Para ahli juga memberikan pentahapan konflik secara berbeda, dikaitkan dengan isu yang dibicarakan. Stephen P Robins (2001), misalnya, memberi tahapan sebagai berikut: oposisi dan ketidakcocokan potensial, kognisi dan personalisasi, maksud, perilaku serta hasil. Sedangkan Kartikasari (2001) memberi tahapan: prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca-konflik.

Pekerja sebagai salah satu unsur utama dari produksi, pengusaha sebagai pemilik modal, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengawasan terhadap perarutan perundang - undangan Ketenagakerjaan, hubungan ketiga unsur inilah yang disebut Hubungan Industri yang berazaskan Pancasila. Oleh karena itu azas musyawarah mufakat seyogyanya dikedepankan apabila terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Konsep hubungan hubungan industrial diharapkan mampu mewujudkan hubungan yang dinamis, harmonis dan berkeadilan. Hambatan dan tantangan Ketenagakerjaan pada era reformasi diantaranya angkatan

kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, pengusaha kurang mau memahami makna hubungan industrial serta rendahnya hukuman pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku disatu pihak, kurangnya keterampilan pekerja dan sikap yang arogan dipihak lain, oleh karena itu sering terjadi perselisihan hak bahkan konflik sosial, bahkan pemerintah pun sebagai salah satu dari unsur hubungan industrial kadang lebih condong kepada salah satu pihak, yang sewajarnya posisi pemerintah harus menjadi mediasi, fasilitator antara pihak buruh dan pengusaha yang bertikai, sehingga tidak jarang di temukan suara baik dari buruh atau dari pengusaha adanya upaya tangan-tangan jahil yang melakukan pemerasan, penekanan terhadap pengusaha juga, padahal pengusaha ingin memenuhi apa yang menjadi tuntutan buruh. Pengusaha harus menyiapkan anggaran untuk sektor tangan jahil tersebut, dengan jumlah yang tidak sedikit.

Puncak dari kebuntuan mediasi, lobi dan negosiasi antara tiga unsure hubungan industrial tadi, menyebabkan terjadinya reaksi dari buruh dengan menggalang peregarakan-pergerakan seperti demonstrasi ribuan buruh dan ancaman mogok nasional, Tapi hal tersebut merupakan bagian dari perjuangan kaum buruh dan kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin dalam pasal 28 UUD 1945. Hal ini harus kita lihat secara menyeluruh, bahwa demonstrasi dan aksi mogok nasional tersebut terjadi bukan tanpa sebab. Akar permasalahan terjadinya aksi ketidakpuasaan buruh adalah politik upah murah Pemerintah dan pengusaha dalam menetapkan UMP/UMK. Upaya Pemerintah melayani kepentingan investasi membuat Pemerintah selama ini lalai dalam melindungi kesejahteraan warga buruh/pekerja. Cita rasa kebijakan politik ekonomi pemerintah selama ini adalah eksploitasi sumber daya alam, upah buruh murah dan kosumerisme yang tinggi. Kebijakan Pemerintah selama ini tunduk kepada mekanisme pemodal yang melancarkan nuansa "*Market Friendly*" dalam dunia investasi. Upah buruh selama ini dianggap sebagai komponen yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*), sehingga tidak menarik pertumbuhan investasi. Untuk menumbuhkan investasi, maka upah buruh ditekan semurah mungkin. Waku dekat ini, kondisi

kekinian pergerakan buruh juga masih runyam, yakni masalah tuntutan kenaikan upah 50% dan pro kontra Intruksi Presiden (Inpres) tentang standarisasi UMP/UMK. Perselisihan dan perbedaan pandangan masih lebar antara buruh dan pengusaha, pemerintah untuk mencari solusi terhadap dua issue krusial tersebut. Sehingga pihak buruh berencana akhir bulan Oktober ini (28,29,dan 30 Oktober) akan melakukan aksi mogok nasional. Diantara serikat buruh yang akan melakukan mogok Nasional adalah:

- a. KSPSI: FSPMI, ASPEK Indonesia, FSP KEP, SP PAR Ref, SP PPMI, FSP ISI, dan PGRI
- b. SEKBER BURUH: GSPB, FPBI, SBTPI, Federasi Progresif, FBLP, SBMI, SBM, SPCI, SERBUK, Front Jakarta, SMI, SPRI, Pembebasan, Perempuan Mahardika, PPI, KPO PRP, Politik Rakyat, PPR, SBIJ, SPKAJ dan KPOP.

Kenaikan upah bisa tidak mengurangi keuntungan jika harga dinaikkan. Tetapi, kenaikan harga akibat kenaikan upah relatif tidak akan mengurangi daya beli masyarakat, karena kenaikan harga itu diimbangi oleh kenaikan upah dan pendapatan masyarakat. Kenaikan harga hanya akan berdampak pada daya beli masyarakat jika kenaikan harga itu tidak dibarengi dengan kenaikan upah atau pendapatan masyarakat. Artinya, kenaikan harga hanya akan berdampak pada daya beli masyarakat jika kenaikan harga itu bersumber dari (1) kenaikan biaya alat-alat produksi dan/atau (2) kenaikan keuntungan pengusaha, yang tidak diimbangi oleh kenaikan upah. Pengusaha berinvestasi dan membuka usaha untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, motivasi dasar pengusaha adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Untuk memperbesar keuntungannya, pengusaha bisa mempermurah biaya alat-alat produksi, menerapkan upah murah atau menaikkan harga. Namun, karena pengusaha berada dalam situasi persaingan dengan pengusaha lain, maka ia tidak bisa menaikkan harga seenaknya. Pasalnya, para pembelinya akan beralih ke pengusaha lain yang memproduksi dan menjual komoditi serupa dengan harga lebih murah.

Dipihak lain untuk memenangkan persaingan pasar, pengusaha harus menjual satu unit komoditinya dengan harga lebih murah dari pengusaha lain. Tetapi, agar keuntungan totalnya tidak turun, ia harus memproduksi dan menjual

komoditi itu dengan jumlah lebih banyak. Untuk itu, ia harus meningkatkan produktivitas pekerjaanya dengan cara meningkatkan teknologi produksinya. Dengan demikian, biaya alat-alat produksi cenderung meningkat. Karena pengusaha sulit mempermurah biaya alat-alat produksi dan menaikkan harga, maka cara yang paling mungkin mereka tempuh untuk memperbesar keuntungan adalah dengan mempraktekkan upah murah. Jadi, pengusaha memiliki kecenderungan menekan upah buruh semurah mungkin demi memperbesar keuntungannya. Ini sudah menjadi 'watak' mereka. Kaum buruh hanya bisa membendung hal ini dengan memaksa pengusaha agar tidak mempraktekkan upah murah. Namun, di luar buruh dan pengusaha, terdapat pihak yang bernama Negara. Negara seharusnya bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya, termasuk kaum buruh. Karenanya, Negara seharusnya ikut bersama-sama dengan kaum buruh memaksa pengusaha agar tidak mempraktekkan upah murah. Tetapi kenapa Negara lebih sering terlihat berpihak kepada pengusaha dan bukan buruh. Sudah menjadi pengetahuan umum kiranya bahwa Negara cenderung berpihak pada pengusaha dan bukan buruh. Ini bisa dilihat dari respon pemerintah terhadap krisis Rupiah dalam "Paket Kebijakan Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi," yang melindungi pengusaha dan mengorbankan kaum buruh serta rakyat pekerja lainnya. Juga dari sikap pemerintah terhadap tuntutan kenaikan upah dari buruh, dimana pemerintah menganggap kenaikan upah 50 persen tidak wajar. Pemerintah malah mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2013 yang hendak meneruskan praktek upah murah di Indonesia dan bisa dimanfaatkan oleh pihak kepolisian sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan represif dalam proses penentuan upah minimum.

Apapun alasannya negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan berkepanjangan antara buruh dan pengusaha. Negara memiliki peran strategis untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam konflik tersebut. Negara mempraktekkan model pembangunan ekonomi yang berbasis pada investasi swasta. Negara tidak terlihat membangun ekonomi sektor publik, bahkan cenderung merusaknya dengan melakukan privatisasi. Itulah kenapa Negara memiliki

kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan investor swasta dan berusaha menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi mereka, meski kondisi itu bertentangan dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat, termasuk kaum buruh.

Dianutnya model pembangunan yang berbasis pada investasi swasta dapat dilihat dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI), yang dikeluarkan pemerintah pada Mei 2011. MP3EI adalah salah satu dokumen pokok pembangunan pemerintah dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011. Dalam Abstrak MP3EI, disebutkan bahwa 'Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Adapun di bidang perburuhan, salah satu upaya yang hendak dilakukan oleh MP3EI adalah memperbaiki regulasi ketenagakerjaan untuk mendukung dunia usaha. Dan apa yang dimaksud dengan diperbaiki demi dunia usaha ini dapat dilihat dari RUU tentang Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 Tahun 2003, yang diajukan pemerintah tidak lama setelah MP3EI dikeluarkan. Di antara isi revisi itu adalah THR dihilangkan, sifatnya hanya bantuan dan bukan kewajiban pengusaha; upah minimum dibahas dua tahun sekali; cuti panjang dihilangkan, serta untuk PHK, pengusaha tidak perlu melalui proses perizinan.[4] RUU revisi ini lebih buruk dari UUK No. 13 Tahun 2003 yang juga bermasalah. Untungnya, RUU tersebut ditolak oleh DPR.

Upah murah sendiri sebenarnya hanyalah salah satu masalah yang ditimbulkan oleh model pembangunan yang berbasis pada investasi swasta. Ada banyak masalah lain yang muncul dari model pembangunan seperti itu. Konflik agraria yang saat ini marak terjadi, misalnya, juga merupakan akibat dari model pembangunan yang seperti itu. Sektor Sumber Daya Alam (SDA) memang merupakan sektor yang ditekankan oleh MP3EI untuk investasi. Dari enam koridor ekonomi dalam MP3EI, hanya dua koridor yang memiliki sektor non-SDA, yaitu Jawa dengan industri dan jasa serta Bali-Nusa Tenggara dengan pariwisata. Sisanya diperuntukkan khusus bagi hasil

bumi, pertanian, perkebunan, perikanan, pangan, pertambangan, migas, dan energi.

Berdasarkan uraian di atas maka penyebab upah murah di Indonesia. Pertama-tama, pengusaha memiliki kecenderungan menekan upah buruh semurah mungkin, karena inilah cara yang paling mungkin mereka tempuh untuk memperbesar keuntungan mereka. Untuk membendung hal ini, pengusaha perlu dipaksa agar tidak mempraktekkan upah murah. Negara yang bertanggungjawab atas kesejahteraan kaum buruh, seharusnya ikut—bersama-sama dengan kaum buruh memaksa pengusaha agar tidak mempraktekkan upah murah. Masalahnya, Negara Indonesia saat ini menerapkan model pembangunan yang berbasis pada investasi swasta, sehingga Negara cenderung memprioritaskan kepentingan investor swasta, termasuk kepentingan mereka untuk mempraktekkan upah murah.

C. Penyebab Terjadinya Konflik dalam Industri

Dewasa ini kita berada pada zaman globalisasi dimana kehidupan serta merta menjadi lebih mudah. Beraneka ragam kebutuhan manusia meningkat. tak ayal peran Industri sangat mendukung untuk kemajuan dari pada tingkat kehidupan manusia. semakin lama semakin berkembang industri yang dapat kita temukan khususnya kota-kota besar. Tahukah kita bahwa dalam dunia perindustrian sering kita temui masalah-masalah yang terjadi. mogok kerja, PHK yang bisa terjadi antara pihak pengelola industri dengan pekerja. Tidak menutup kemungkinan masalah terjadi diantara sesama pihak pengelola, antara atasan maupun bawahannya. Hubungan kerja industri memiliki kompleksitas sumber dinamika seperti isu upah, kesejahteraan pekerja, dan identitas para pekerja. Sumber-sumber dinamika hubungan kerja tersebut mampu mendorong efektivitas proses industri sekaligus menciptakan konflik kekerasan yang mereduksi kualitas kerja industri. Itu bisa menyebabkan efek-efek tak produktif seperti berhentinya aktivitas perusahaan, kerugian ekonomis, dan merenggangnya kohesivitas sosial antar-pekerja. Konflik industrial muncul akibat adanya perbedaan kepentingan diantara para pelaku industrial, yakni pengusaha/manajemen, buruh/serikat buruh, maupun pemerintah. Senjata yang sering digunakan buruh

atau serikat buruh agar tuntutananya diterima adalah pemogokan. Banyak pihak yang menganggap bahwa pemogokan merupakan suatu masalah, sebagai sebuah penyakit yang harus cepat-cepat dicari obatnya. Dengan asumsi bahwa pemogokan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena terhentinya proses produksi akan mengakibatkan perusahaan tidak mendapatkan laba, menanggung beban utang, dan atau kehilangan konsumen.

Fenomena pemogokan kaum buruh menunjukkan indikasi adanya suatu masalah yang sedang terjadi, seringkali menyangkut dengan upah buruh entah itu yang belum dibayar atau tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional. Sebagai akibatnya, bukan hanya pemogokannya saja yang harus diatasi melainkan juga akar masalah penyebab terjadinya pemogokan. Sistem hubungan industrial dibuat untuk tujuan mendorong kerjasama antara pekerja dan pengusaha, melalui suatu proses kelembagaan dalam bentuk negosiasi atau tawar menawar antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks Indonesia, UU yang mengatur tentang hal-hal diatas diantaranya adalah UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU tersebut mendefinisikan perselisihan industrial sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antar pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, dan keputusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja disuatu perusahaan.

Dalam proses perjalanannya, penyelesaian konflik industrial seringkali melibatkan pemerintah sebagai pihak ketiga yang diharapkan dapat memfasilitasi dan membantu menyelesaikan perselisihan industrial. Pemerintah Indonesia mengatur penyelesaian konflik industrial dengan mengeluarkan peraturan perundangan seperti UU No. 12 tahun 1957 bahwa penyelesaian dilakukan secara bertahap melalui perundingan antara pengusaha/gabungan pengusaha dengan pekerja/serikat pekerja (bipatrit), mediasi, P-4D (Tripatrit), dan P-4P. Sedangkan UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI mengusulkan tambahan melalui konsiliasi, arbitrase, dan melalui pengadilan PPHI.. Proses PPHI tingkat bipatrit diawali dari musyawarah informal, apabila tidak mencapai

kesepakatan dapat dibawa ke tingkat bipartit formal. Umumnya pemicu PPHI adalah masalah ketidaksesuaian upah dengan peraturan UMR, status pekerja kontrak, tuntutan jamsostek, uang makan, uang transportasi, dan tuntutan agar perusahaan tetap memperkerjakan pekerja yang sedang menuntut hak. Dalam proses perselisihan di tingkat tripartit, biasanya pihak perusahaan diwakili oleh pengacara sebagai kuasa hukum, sedangkan pekerja diwakili oleh federasi serikat pekerja sebagai kuasa hukum. Pemerintah daerah berfungsi sebagai perantara dengan menunjuk pegawai Pemda. Perselisihan industrial dianggap selesai apabila keputusan yang diberikan telah memuaskan pihak-pihak yang berselisih.

Model penyelesaian lain adalah mekanisme kelembagaan tripartit plus, yakni selain unsur perusahaan, pekerja, dan pemerintah, juga melibatkan lembaga independen, seperti LSM dan Perguruan Tinggi. Kendala utama yang di idap pemerintah dalam hal ini (Disnaker) dalam membantu kasus PPHI adalah keterbatasan jumlah tenaga kerja yang memiliki kapasitas dalam menangani perselisihan dibandingkan dengan banyaknya kasus yang harus di selesaikan. Selanjutnya, kembali dalam masalah konflik, penyebab lain yang dapat menimbulkan konflik (perselisihan hubungan industrial) menurut I Gusti Ngurah Gorda (1994:186) adalah:

1. Timbulnya suasana perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dikendalikan.
2. Adanya pihak yang merasa dirugikan.
3. Perasaan yang sensitif.
4. Adanya pihak-pihak tertentu dari luar perusahaan yang menginginkan terjadinya konflik dalam perusahaan tersebut.

Orang sering menganggap konflik bersumber dari tindakan dan inti persoalan, namun sebenarnya konflik sering disebabkan oleh komunikasi yang buruk. Komunikasi dapat menjadi masalah besar. Banyak persoalan dapat diselesaikan jika komunikasi berjalan lancar. Komunikasi yang buruk memperparah persoalan karena setiap orang yang terlibat dalam konflik secara tidak sadar mereka-reka motivasi buruk pihak lain. Perbedaan antara pesan yang disampaikan dan pesan yang diterima akan menimbulkan masalah komunikasi ketika konflik berlangsung. Setiap hubungan antar pribadi

mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat atau perbedaan kepentingan. Konflik yang dimaksud adalah situasi dimana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain (Johnson,1981).

D. Langkah-Langkah Penyelesaian Konflik Industrial

Setiap perselisihan, baik dalam masyarakat umum maupun dalam hubungan industrial tentunya memerlukan upaya, sistem atau proses penyelesaiannya. Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk penyelesaian tersebut dengan dua kategori bahasan, yaitu penyelesaian perselisihan secara Bipartite dan penyelesaian perselisihan secara Tripartite, yakni:

1. Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartite.

Bisa dikatakan penyelesaian secara Bipartite dapat diartikan sebagai perselisihan yang penyelesaiannya diupayakan secara internal yakni antara pihak pekerja dengan pemilik perusahaan. Upaya penyelesaian ini dapat ditentukan dalam Peraturan Perusahaan dengan dasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 02/MEN/1978 yang telah mendapatkan persetujuan oleh Departemen Tenaga Kerja. Dalam penyelesaian musyawarah untuk mencapai mufakat adalah yang diutamakan, dimana pihak akan merundingkan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam penyelesaian keluhan kesah. Dan dalam penyelesaian secara Bipartite ini akan terlihat lebih mendekati kehendak dari para pihak, karena masing-masing dapat langsung berbicara dan dapat memperoleh kepuasan tersendiri secara murni karena tidak ada campur tangan dari pihak ketiga. Namun, jika dihubungkan dengan kasus yang ada pada pembahasan sebelumnya. Kemungkinan adanya musyawarah antar pekerja dengan pemilik perusahaan sangat sulit. Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa tidak bisa terlaksananya musyawarah antara pekerja dengan pemilik perusahaan. Bisa saja karena sistem *outsourcing* yang diterapkan dalam perusahaan tersebut.

2. Penyelesaian Perselisihan Secara Tripartite.

Pengertian penyelesaian perselisihan secara Tripartite yaitu bahwa perselisihan tersebut terjadi antara pekerja

dengan pengusaha tidak dapat diselesaikan secara Bipartite, maka upaya selanjutnya diselesaikan melalui forum yang dihadiri oleh wakil pemilik perusahaan, wakil perkerja (SPSI) dan wakil dari pemerintahan (Departemen Tenaga Kerja). Penyelesaian ini diadakan di Kantor Departemen Tenaga Kerja di tingkat daerah yang dipimpin oleh pegawai perantara.

Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 22 tahun 1957, menyatakan bahwa setelah menerima surat pemberitahuan dari perusahaan tentang pernyataan bahwa telah diadakan perundingan yang langsung antara keduanya (disini berarti pekerja dan pemilik perusahaan) tidak memberikan hasil dan mereka tidak bermaksud menyerahkan perselisihannya kepada Dewan Pemisah, maka pegawai perantara yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja mengadakan penyelidikan tentang permasalahan perselisihan dan mengenai sebab-sebabnya, selambatnya 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal penerimaan sudah harus diperantarai. Apabila pegawai perantara belum dapat menyelesaikan persoalannya, maka persoalan tersebut diserahkan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dengan memberitahukan kepada pihak-pihak yang berselisih.

Hubungan industrial adalah seluruh hubungan kerjasama antara semua pihak yang bersangkutan dalam proses produksi di suatu perusahaan. Penerapan hubungan industrial merupakan perwujudan pengakuan dan pengakuan atas hak dan kewajiban antara pekerja dengan pemilik perusahaan untuk menjamin kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Peselisihan yang dilaksanakan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi pada dasarnya kurang sesuai dengan pola hubunga kerja yang berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang pada dasarnya segala permasalahan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Tetapi mengingat bagaimana tipe manusia yang bekerja sebagai pekerja dalam perusahaan yang akan berhadapan dengan kebijaksanaan para pengusaha dengan para stafnya, jelas musyawarah yang diharapkan sulit untuk dapat mencapai mufakat. Permasalahan atau konflik yang terjadi antara karyawan atau karyawan dengan atasan yang terjadi karena masalah komunikasi harus di antisipasi dengan baik dan dengan system yang terstruktur. Karena jika masalah

komunikasi antara atasan dan bawahan terjadi bias-bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mogok kerja, bahkan demo.

E. May Day Dan Perjuangan Buruh

Masalah Buruh, sudah ada didunia sejak peradaban manusia dimulai. Sejak dulu, buruh telah dipandang sebelah mata diseluruh dunia, padahal keberadaan mereka sangat membantu roda perekonomian suatu bangsa. Hingga akhirnya muncullah usaha-usaha dari kalangan buruh untuk melindungi hak-hak mereka. Kita mengenal istilah *may day*. Namun, apakah kita tahu apa arti dari istilah itu?

Akar sejarah *May Day* mungkin dimulai pada tahun 1806, ketika terjadi pemogokan pekerja di AS yang pertama kalinya. Ketika itu pekerja *Cordwainers*, perusahaan pembuat sepatu, melakukan mogok kerja. Namun para pengorganisir aksi mogok kerja itu dibawa ke pengadilan untuk diproses hukum. Dalam pengadilan itu, terungkap fakta pekerja di era itu benar-benar diperas keringatnya. Mereka harus bekerja 19-20 jam per harinya. Padahal sehari hanya 24 jam. Artinya para pekerja itu hanya bisa beristirahat 4 jam dalam sehari, dan mereka tidak punya kehidupan lain di luar bekerja untuk perusahaan yang membayar mereka. Maka kelas pekerja Amerika Serikat pada masa itu kemudian memiliki agenda perjuangan bersama, yaitu menuntut pengurangan jam kerja. Peter McGuire, seorang pekerja asal New Jersey, punya peran penting dalam mengorganisir perjuangan ini. Pada tahun 1872, ia dan 100 ribu pekerja lainnya melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut pengurangan jam kerja. McGuire menghimpun kekuatan para pekerja dan pengangguran, serta melobi pemerintah kota untuk menyediakan pekerjaan dan uang lembur bagi pekerja. Tahun 1881, McGuire pindah ke Missouri dan mulai mengorganisir para tukang kayu. Hasilnya, di Chicago berdiri persatuan tukang kayu dengan McGuire sebagai sekretaris umumnya. Inilah cikal bakal serikat pekerja. Ide membentuk serikat pekerja ini kemudian menyebar dengan cepat ke seantero AS. Serikat-serikat pekerja lain didirikan di berbagai kota.

Tanggal 5 September 1882, digelarlah parade Hari Buruh pertama di kota New York dengan 20 ribu peserta. Mereka

membawa spanduk yang berisi tuntutan mereka: 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam rekreasi. Itulah 24 jam kehidupan ideal dalam sehari yang diinginkan kelas pekerja Amerika Serikat. Tuntutan pengurangan jam kerja itu pada akhirnya menjadi perjuangan kelas pekerja dunia. Kongres internasional pertama mereka dilangsungkan di Jenewa, Swiss, pada tahun 1886, dan dihadiri organisasi pekerja dari berbagai negara. Kongres buruh internasional ini menetapkan tuntutan pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari sebagai perjuangan resmi buruh sedunia.

Tanggal 1 Mei ditetapkan menjadi hari perjuangan kelas pekerja sedunia. Satu Mei dipilih karena mereka terinspirasi kesuksesan aksi buruh di Kanada pada tahun 1872. Ketika itu buruh Kanada menuntut 8 jam kerja seperti buruh di AS, dan mereka berhasil. Delapan jam kerja di Kanada resmi diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1886. Sejak abad XIV Indonesia telah menjadi pusat perhatian dan menarik pedagang-pedagang luar negeri, karena kekayaan Indonesia mengenai hasil rempah-rempah seperti: lada, pala, ketumbar, kayu manis dsb, yang diperdagangkan oleh pedagang-pedagang dari India, Persia, Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Disamping berdagang, pedagang-pedagang tersebut juga menyebarkan agama yang dianut oleh masyarakat dari negeri asalnya, misalnya: agama Hindu, Budha, dan Kristen maupun Katolik. Untuk mendapatkan kepentingan ekonominya, pedagang-pedagang asing tersebut menggunakan pertentangan-pertentangan yang ada antara raja-raja di wilayah Indonesia. Perpecahan yang ada diantara raja-raja tersebut serta keunggulan teknik yang dimiliki oleh pedagang-pedagang asing itu menyebabkan mereka selalu kalah dalam peperangan menghadapi orang-orang asing tersebut. Pada tanggal 22 Juni 1596 armada Belanda berlabuh di Indonesia dibawah pimpinan Cornelis Houtman di Banten. Pada tahun 1602 dibentuk perkumpulan dagang bernama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) serta kemudian diangkat seorang Gubernur Jenderal pada tahun 1610. Politik dalam negeri VOC berdasarkan eksploitasi terhadap organisasi-organisasi feodal yang telah ada, sehingga rakyat menderita dua macam penindasan, yaitu dari raja-raja dan dari VOC. Timbulnya perlawanan-perlawanan dari kaum tani yang menderita dua

macam ketertindasan tersebut serta merajalelanya korupsi di dalam tubuh VOC menyebabkan VOC dibubarkan dan kekuasaannya dialihkan langsung kepada pemerintah Belanda pada tahun 1800. Pada saat itu penghisapan Belanda terhadap Indonesia dengan cara penimbunan modal secara sederhana beserta sistem monopolinya.

Dengan ikut sertanya kapital swasta di negeri Belanda dalam penghisapan kolonial terhadap Indonesia itu berarti suatu perpindahan yang sangat pokok dari sistem monopoli menjadi sistem persaingan bebas. Ini berlaku sejak diadakannya perubahan penguasaan tanah oleh pemerintahan kolonial Belanda yang dinamakan "*domein verklaring*" pada tahun 1870. Berhubung dengan adanya krisis ekonomi yang sangat hebat pada tahun 1895, maka sebagian besar kapitalis-kapitalis swasta di negeri Belanda mengalami kehancuran, sehingga tinggal beberapa gelintir kapitalis besar yang masih bertahan hidup. Ini menyebabkan 'kapital finans' berkuasa sepenuhnya (perpaduan dari kapital bank, kapital industri dan kapital perdagangan). Dengan begitu maka zaman kapital industri yang berdasarkan persaingan bebas berakhir dan segera disusul oleh zaman imperialisme. Dengan demikian kedudukan Indonesia sejak tahun 1895 di dalam hubungan ekonomi Dunia ialah bahwa Indonesia dijadikan tempat sumber bahan mentah, tempat penanaman modal, tempat pemasaran hasil produksi kapitalis dunia serta sebagai sumber tenaga buruh yang sangat murah. Dengan lahirnya imperialisme Belanda di Indonesia itulah, lahir dalam arti yang sebenarnya kaum buruh di Indonesia. Dengan adanya penanaman modal industri oleh imperialis (kapitalis monopoli tingkat tinggi) dalam berbagai lapangan di Indonesia pabrik-pabrik, bengkel-bengkel, pertambangan, transport, perkebunan, industri-industri gula, industri-industri kecil dll) lahirlah golongan rakyat dalam masyarakat yang baru yaitu "kaum Buruh", sebagai golongan yang menurut kedudukan sosialnya berkepentingan untuk menghapuskan sistem penghisapan dan penindasan yang dijalankan oleh kaum kapitalis monopoli (imperialis) Belanda.

Buruh yang menjual tenaga kerjanya untuk mendapat upah, muncul pada dekade-dekade terakhir abad XIX, terutama di perkebunan swasta yang berkembang di Jawa dan Sumatra.

Penetrasi kapitalisme dalam wilayah pedesaan ditunjukkan dengan hadirnya para petani yang tidak memiliki tanah, dan bekerja pada tanah-tanah sewaan untuk mendapat upah. Sementara itu, di kota-kota besar, seiring dengan perkembangan teknologi yang ditancapkan kolonialisme, muncul pula bidang-bidang pekerjaan baru seperti masinis, sopir, pegawai kantor dan sebagainya. Munculnya buruh upah ini tidak seketika menghadirkan gerakan buruh yang terorganisir dan 'modern'. Perubahan cara pandang, kereta api, surat kabar, dan pendidikan, menjadi elemen-elemen penting yang membawa perubahan pada abad XX. Orang-orang pribumi berpendidikan, yang kemudian dikenal sebagai tokoh-tokoh pergerakan, menjadi pemimpin atau penggerak sejumlah organisasi modern, seperti Budi Utama, Sarekat Islam, dan sebagainya. Sebaliknya gerakan buruh, pada awalnya digerakkan oleh orang-orang Belanda. Di Eropa pada masa itu gerakan buruh sudah dikenal secara luas dalam masyarakat, sehingga bukan hal yang aneh lagi jika timbulnya gerakan buruh di Jawa dipelopori oleh orang-orang Eropa.

BAB XI

POLA HUBUNGAN MASYARAKAT INDUSTRIAL

Pada bab sebelas tentang Pola Hubungan Masyarakat Industri, yang terdiri dari: Konsep Hubungan Masyarakat Industrial, Pola Hubungan Industrial (*Industrial Relation*), Ruang Lingkup Hubungan Industrial, Organisasi Pengusaha, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Khusus (PKK) dan Rancangan Sistem Hubungan Industrial di Indonesia

A. Konsep Hubungan Masyarakat Industrial

Sudah menjadi pemahaman bahwa kemiskinan merupakan fenomena multi-dimensi. Hal ini terkait dengan rendahnya nilai kekayaan dan arus pendapatan reguler, kerentanan, ketidakberdayaan dan ketersisihan sosial. Salah satu dimensi kemiskinan adalah hilangnya kemampuan manusia. Tidak ada yang meragukan bahwa kemiskinan berkonotasi dengan berkurangnya kemampuan. Dengan demikian, pengembangan kemampuan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dimensi lain yang penting dan berkaitan adalah tidak adanya hak asasi manusia, termasuk di tempat kerja.

Hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dinamakan hubungan industrial, karena hubungan ini merupakan hubungan yang berkaitan dengan bidang produksi dan jasa sehingga selayaknya masing-masing pihak mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Memperhatikan permasalahan yang kompleks dalam praktek hubungan industrial, maka sudah selayaknya pengetahuan hubungan industrial disebarluaskan kepada khalayak umum sehingga dapat dipahami dan dikembangkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial adalah suatu fenomena yang menarik untuk dicermati bahwa secara tidak disadari ketika berbicara tentang Undang-Undang No 2 tahun 2004, para praktisi hubungan industrial begitu besar mencurahkan perhatiannya pada Pengadilan Hubungan Industrial sebagai lembaga pemutus untuk perkara yang diserahkan ke lembaga peradilan ini.

Terkesan masyarakat hubungan industrial tidak terlalu memperhatikan pada lembaga-lembaga yang merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang juga diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2004. Padahal di dunia perdagangan pada umumnya terlebih lagi dalam skala perdagangan internasional, para pelaku bisnis cenderung lebih menyukai penyelesaian sengketa mereka diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa karena prosedur dan acaranya yang lebih fleksibel dan mengarah pada "*win-win solution*".

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi, konsiliasi, dan mediasi lebih sesuai apabila kedua pihak masih mengharapkan terpeliharanya hubungan baik secara berkesinambungan karena para pihak yang bersangkutan yang memberi putusan tentang penyelesaian sengketa mereka. Di sisi lain, penyelesaian perkara melalui arbitrase dan pengadilan bersifat "*ajudikatif*" (*memutus*), akan menghasilkan kondisi kalah dan menang di kedua pihak. Pengadilan bagaimanapun merupakan terminal akhir manakala penyelesaian sengketa oleh para pihak tidak menghasilkan penyelesaian.

Sistem pelatihan/workshop kerja merupakan paket lengkap yang memberikan pemahaman dan ketrampilan dua macam penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik yang di luar pengadilan maupun proses melalui pengadilan. Diharapkan bahwa setelah mengikuti pelatihan/workshop ini, peserta akan mempunyai ketrampilan yang memadai untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial baik melalui lembaga di luar pengadilan maupun melalui Pengadilan Hubungan Industrial. *Role play/* simulasi latihan yang diberikan dalam pelatihan ini baik dalam lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dan sidang Pengadilan Hubungan Industrial akan lebih memberikan gambaran konkrit tentang mekanisme dan proses penyelesaian sengketa pada lembaga-lembaga tersebut.

B. Pola Hubungan Industrial (*Industrial Relation*)

Hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan Pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan (Stakeholders):

1. Pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak manajemen
2. Para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh
3. Supplier atau perusahaan pemasok
4. Konsumen atau para pengguna produk/jasa
5. Perusahaan Pengguna
6. Masyarakat sekitar
7. Pemerintah

Disamping para *stakeholders* tersebut, para pelaku hubungan industrial juga melibatkan:

1. Para konsultan hubungan industrial dan/atau pengacara
2. Para Arbitrator, konsiliator, mediator, dan akademisi
3. Hakim-Hakim Pengadilan hubungan industrial

Dijelaskan Abdul Khakim (2009) bahwa istilah hubungan industrial merupakan terjemahan dari "labour relation" atau hubungan perburuhan. Istilah ini pada awalnya menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha. Seiring dengan perkembangan dan kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa masalah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha ternyata juga menyangkut aspek-aspek lain yang luas. Dengan demikian, Abdul Khakim (2009) menyatakan hubungan perburuhan tidaklah terbatas hanya pada hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha, tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah. Payaman J. Simanjuntak (2009) menjelaskan beberapa prinsip dari Hubungan industrial, yaitu:

1. Kepentingan Bersama: Pengusaha, pekerja/buruh, masyarakat, dan pemerintah
2. Kemitraan yang saling menguntungkan: Pekerja/buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan
3. Hubungan fungsional dan pembagian tugas
4. Kekeluargaan
5. Penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja

6. Peningkatan produktivitas
7. Peningkatan kesejahteraan bersama

Menurut Payaman J. Simanjuntak (2009) menyebutkan sarana-sarana pendukung Hubungan industrial, sebagai berikut :

1. Serikat Pekerja/Buruh
2. Organisasi Pengusaha
3. Lembaga Kerjasama bipartit (LKS Bipartit)
4. Lembaga Kerjasama tripartit (LKS Tripartit)
5. Peraturan Perusahaan
6. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
8. Lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial

Perjanjian Kerja Bersama atau disingkat PKB merupakan pijakan karyawan dalam menorehkan prestasi yang pada gilirannya akan berujung kepada kinerja korporat dan kesejahteraan karyawan. Jadi, PKB memang penting bagi perusahaan manapun. Hubungan kerja senantiasa terjadi di masyarakat, baik secara formal maupun informal, dan semakin intensif di dalam masyarakat modern. Di dalam hubungan kerja memiliki potensi timbulnya perbedaan pendapat atau bahkan konflik. Untuk mencegah timbulnya akibat yang lebih buruk, maka perlu adanya pengaturan di dalam hubungan kerja ini dalam bentuk PKB. Dalam praktiknya, persyaratan kerja diatur dalam bentuk perjanjian kerja yang sifatnya perorangan.

Perjanjian kerja Bersama ini dibuat atas persetujuan pemberi kerja dan Karyawan yang bersifat individual. Pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif dapat dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perjanjian Kerja Bersama atau PKB sebelumnya dikenal juga dengan istilah KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau CLA (*Collective Labour Agreement*) adalah merupakan perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang merupakan hasil perundingan antara Pengusaha, dalam hal ini diwakili oleh Manajemen Perusahaan dan Karyawan yang dalam hal ini diwakili oleh Serikat Karyawan, serta tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 1 UU No.13 tahun 2003 Point 21. PKB

dibuat dengan melalui perundingan antara manajemen dan serikat karyawan. Kesemua itu untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan di dalam hubungan kerja, sehingga dapat tercipta ketenangan kerja dan berusaha. Lebih dari itu, dengan partisipasi ini juga merupakan cara untuk bersama-sama memperkirakan dan menetapkan nasib perusahaan untuk masa depan. Masa berlakunya PKB paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun. PKB juga merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk untuk menjalankan hubungan industrial, dimana sarana yang lain adalah serikat karyawan, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Berdasarkan ketentuan, Perundingan pembuatan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat tiga bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku. Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka PKB yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun. Sehingga dengan demikian proses pembuatan PKB tidak memakan waktu lama dan berlarut-larut sampai terjadi kebuntuan (*dead lock*) yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Hubungan Industrial sebagai sebuah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis yaitu pengusaha, karyawan dan pemerintah, sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha (Industrial Peace). Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 1 angka 16 Hubungan Industrial didefinisikan sebagai "Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945." Melihat pentingnya kegiatan ini, masalah hubungan industrial perlu mendapat perhatian khusus dalam penanganannya, karena berpengaruh besar terhadap kelangsungan proses produksi yang terjadi di perusahaan.

Keseimbangan antara pengusaha dan pekerja merupakan tujuan ideal yang hendak dicapai agar terjadi hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha karena tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan yang saling membutuhkan dan saling mengisi satu dengan yang lainnya. Pengusaha tidak akan dapat menghasilkan produk barang atau jasa jika tidak didukung oleh pekerja, demikian pula sebaliknya. Yang paling mendasar dalam Konsep Hubungan Industrial adalah Kemitra-sejajaran antara Pekerja dan Pengusaha yang keduanya mempunyai kepentingan yang sama, yaitu bersama-sama ingin meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan perusahaan.

C. Ruang Lingkup Hubungan Industrial

1. Ruang Lingkup Cakupan

Pada dasarnya prinsip-prinsip dalam hubungan industrial mencakup seluruh tempat-tempat kerja dimana para pekerja dan pengusaha bekerjasama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah, perintah dan pekerjaan.

2. Ruang lingkup Fungsi

Fungsi Pemerintah: Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Fungsi Pekerja/Serikat Pekerja: Menjalankan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan ketrampilan, keahlian dan ikut memajukan perusahaan serta memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Fungsi Pengusaha: Menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis serta berkeadilan.

3. Ruang Lingkup Masalah

Adalah seluruh permasalahan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerinta, didalamnya termasuk:

- a. Syarat-syarat kerja
- b. Pengupahan

- c. Jam kerja
- d. Jaminan sosial
- e. Kesehatan dan keselamatan kerja
- f. Organisasi ketenagakerjaan
- g. Iklim kerja
- h. Cara penyelesaian keluhan kesah dan perselisihan.
- i. Cara memecahkan persoalan yang timbul secara baik, dsb.

4. Ruang Lingkup Peraturan/Per Undang-undangan Ketenagakerjaan

a. Hukum Materiil:

- 1) Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
- 2) Peraturan Pemerintah/Peraturan Pelaksanaan yang berlaku
- 3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja.

b. Hukum Formal

- 1) Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 2) Perpu No. 1 Tahun 2005, dan diberlakukan mulai 14 Januari 2006

5. Tujuan Hubungan Industrial

Tujuan Hubungan Industrial adalah mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, Dinamis, kondusif dan berkeadilan di perusahaan.

Ada tiga unsur yang mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial, yaitu:

- a. Hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan
- b. Apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal/bipartit
- c. Mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan (lock out) oleh pengusaha, tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak masing-masing, karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan dengan baik.

Namun demikian Sikap mental dan sosial para pengusaha dan pekerja juga sangat berpengaruh dalam mencapai berhasilnya tujuan hubungan industrial yang kita karapkan. Sikap mental dan sosial yang mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial tersebut adalah:

- a. Memperlakukan pekerja sebagai mitra, dan memperlakukan pengusaha sebagai investor

- b. Bersedia saling menerima dan meningkatkan hubungan kemitraan antara pengusaha dan pekerja secara terbuka
- c. Selalu tanggap terhadap kondisi sosial, upah, produktivitas dan kesejahteraan pekerja
- d. Saling mengembangkan forum komunikasi, musyawarah dan kekeluargaan.

6.Sarana Dalam Hubungan Industri

Agar tertibnya kelangsungan dan suasana bekerja dalam hubungan industrial, maka perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja yang harmonis dan kondusif. Peraturan tersebut diharapkan mempunyai fungsi untuk mempercepat pembudayaan sikap mental dan sikap sosial Hubungan Industrial. Oleh karena itu setiap peraturan dalam hubungan kerja tersebut harus mencerminkan dan dijiwai oleh nilai-nilai budaya dalam perusahaan, terutama dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Hubungan Industrial. Dengan demikian maka kehidupan dalam hubungan industrial berjalan sesuai dengan nilai-nilai budaya perusahaan tersebut. Dengan adanya pengaturan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan oleh pekerja dan pengusaha dalam melaksanakan hubungan industrial, maka diharapkan terjadi hubungan yang harmonis dan kondusif. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 bahwa hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana sebagai berikut :

- a. Lembaga kerja sama Bipartit
- b. Lembaga kerja sama Tripartit
- c. Organisasi Pekerja atau Serikat Pekerja/Buruh
- d. Organisasi Pengusaha
- e. Lembaga keluhan kesah & penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- f. Peraturan Perusahaan, dan
- g. Perjanjian Kerja Bersama
- h. Lembaga Kerjasama (Lks):

7.Bipartit

Yang di maksud dengan Lembaga Kerjasama (Lks) Bipartit Adalah suatu badan ditingkat usaha atau unit produksi yang dibentuk oleh pekerja dan pengusaha. Setiap pengusaha yang mempekerjakan 50 (limapuluh) orang pekerja atau lebih dapat membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan anggota-

anggota yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dan keahlian. LKS Bipartit bertugas dan berfungsi sebagai Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah dalam memecahkan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan pada perusahaan guna kepentingan pengusaha dan pekerja. Para manager perusahaan diharapkan ikut mendorong berfungsinya Lembaga Kerjasama Bipartit, khususnya dalam hal mengatasi masalah bersama, misalnya penyelesaian perselisihan industrial. LKS Bipartit bertujuan :

1. Terwujudnya ketenangan kerja, disiplin dan ketenangan usaha
2. Peningkatan kesejahteraan Pekerja dan perkembangan serta kelangsungan hidup perusahaan.
3. Mengembangkan motivasi dan partisipasi pekerja sebagai pengusaha di perusahaan.

Ada beberapa Kriteria LKS Bipartit antara lain:

1. Pengurus terdiri dari minimal 6 anggota yang ditunjuk (3 wakil pengusaha, 3 wakil pekerja)
2. Proses penunjukkan anggota dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
3. Kepengurusan bersifat kolektif dan kekeluargaan.
4. Struktur kepengurusan (Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, merangkap anggota dari 2 anggota)
5. Masa kerja kepengurusan 2 tahun dan dapat ditunjuk kembali.
6. Azasnya adalah kekeluargaan dan gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal konsultasi dengan pekerja, yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Jika Perusahaan sudah memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, konsultasi dapat dilakukan dengan lembaga tersebut, begitu pula jika ada Serikat Pekerja, maka konsultasi dapat dilakukan dengan Serikat Pekerja yang telah disahkan.
2. Jika Lembaga Kerjasa Sama Bipartit dan Serikat Pekerja tidak ada, maka konsultasi dapat dilakukan dengan karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut.

Perundingan antara pengusaha dengan pekerja untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Pengurus

Bipartit menetapkan jadwal acara dan waktu untuk rapat perundingan.

Penyelesaian Melalui Bipartit:

1. Perselisihan hubungan industrial wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan;
3. Dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak, sifatnya mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak;
4. Wajib didaftarkan oleh para pihak kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian bersama;
5. Diberikan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian bersama;
6. Salah satu pihak atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftarkan.
7. Permohonan eksekusi dapat dilakukan melalui PHI di Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon untuk diteruskan ke PHI di Pengadilan Negeri yang berkompeten melakukan eksekusi;
8. Perundingan dianggap gagal apabila salah satu pihak menolak perundingan atau tidak tercapai kesepakatan;
9. Salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.

Risalah Perundingan Bipartit :

1. Nama lengkap dan alamat para pihak.
2. Tanggal dan tempat perundingan
3. Pokok masalah atau alasan perselisihan
4. Pendapat para pihak.
5. Kesimpulan atas hasil perundingan.
6. Tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.

Tugas Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

1. Meneliti perselisihan hubungan industrial, bukti upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit
2. Mengembalikan berkas perselisihan paling lambat dalam waktu 7 hari kerja apabila tidak dilengkapi bukti upaya penyelesaian perundingan bipartit.
3. Wajib menawarkan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase.
4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari para pihak tidak menetapkan pilihan konsiliasi atau arbitrase, melimpahkan penyelesaiannya kepada mediator.

8.Tripartit

Lembaga kerjasama Tripartit merupakan LKS yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintahan, Organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. Fungsi lembaga kerjasama Tripartit adalah sebagai Forum Komunikasi, Konsultasi dengan tugas utama menyatukan konsepsi, sikap dan rencana dalam menghadapi masalah-masalah ketenagakerjaan, baik berdimensi waktu saat sekarang yang telah timbul karena faktor-faktor yang tidak diduga maupun untuk mengatasi hal-hal yang akan datang. Dasar Hukum lembaga kerja sama Bipartit dan Tripartit adalah :

1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Kepmenaker No. Kep.255/Men/2003 tentang Lembaga Kerjasama Bipartit
3. Kepmenaker No. Kep.355/Men/X/2009 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit

9.Organisasi Pekerja

Organisasi pekerja adalah suatu organisasi yang didirikan secara sukarela dan demokratis dari, oleh dan untuk pekerja dan berbentuk Serikat Pekerja, Gabungan serikat Pekerja, Federasi, dan Non Federasi. Kehadiran Serikat Pekerja di perusahaan sangat penting dan strategis dalam pengembangan dan pelaksanaan Hubungan Industrial. Dasar Hukum Pendirian Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur dalam:

1. UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
2. UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI

3. Kepmenaker No. 16 Tahun 2001 tentang Tatacara Pencatatan Serikat Pekerja/Buruh
4. Kepmenaker No. 187 Tahun 2004 tentang Iuran anggota Serikat Pekerja/Buruh

Setiap pekerja berhak untuk membentuk dan menjadi Anggota Serikat Pekerja. Serikat Pekerja pada perusahaan berciri-ciri sebagai berikut :

1. Dibentuk dari dan oleh pekerja secara demokrasi melalui musyawarah para pekerja di perusahaan.
2. Bersifat mandiri, demokrasi, bebas dan bertanggung jawab.
3. Dibentuk berdasarkan SEKTOR usaha/lapangan kerja.

Pengusaha dilarang menghalangi pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja dan menjadi pengurus Serikat Pekerja dan pekerja yang menduduki jabatan tertentu dan/atau fungsi tugasnya dapat menimbulkan pertentangan antara pengusaha dan pekerja tidak dapat menjadi pengurus Serikat Pekerja

Serikat Pekerja yang telah terdaftar secara hukum pada Departemen Tenaga Kerja memiliki dua hal :

1. Berhak melakukan perundingan dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
2. Berhak sebagai pihak dalam Penyelesaian Perselisihan Industrial.

D. Organisasi Pengusaha

Setiap pengusaha berhak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang khusus menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan Hubungan Industrial. Hal tersebut tercermin dari visinya yaitu Terciptanya iklim usaha yang baik bagi dunia usaha dan misinya adalah Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis terutama ditingkat perusahaan, Merepresentasikan dunia usaha Indonesia di lembaga ketenagakerjaan, dan Melindungi, membela dan memberdayakan seluruh pelaku usaha khususnya anggota. Untuk menjadi anggota APINDO Perusahaan dapat mendaftar di Dewan Pengurus kota/Kabupaten (DPK) atau di Dewan Pengurus Provinsi (DPP) atau di Dewan Pengurus Nasional (DPN). Bentuk pelayanan APINDO adalah sebagai berikut:

1. Pembelaan

a. Bantuan hukum baik bersifat konsultatif, pendampingan, legal opinion maupun legal action di tingkat perusahaan dalam proses :

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)
- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- Perlindungan Lingkungan (*Environmental*).

b. Pendampingan dalam penyusunan, pembuatan dan perpanjangan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

c. Perundingan Pengusaha dengan Wakil Pekerja/Buruh maupun dengan Pemerintah.

2. Perlindungan: a) Apindo pro-aktif dan turut serta dalam pembahasan pembuatan kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan di tingkat daerah maupun nasional, b) Sosialisasi peraturan-peraturan ketenagakerjaan tingkat nasional, propinsi dan kabupaten, c) Pro-aktif dalam pembahasan penetapan upah minimum propinsi dan kabupaten, d) Ikut serta mendorong penciptaan iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan bagi dunia usaha melalui forum LKS Bipartit maupun LKS Tripartit

3. Pemberdayaan

a. Penyediaan informasi ketenagakerjaan yang selalu terbaru dan relevan

b. Pelatihan/seminar masalah ketenagakerjaan di dalam dan di luar negeri

c. Konsultasi ketenagakerjaan mulai dari rekrutmen, tata laksana sampai pasca kerja, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan perlindungan Lingkungan.

Landasan hukum APINDO adalah sebagai berikut:

a. KADIN (Kamar Dagang Indonesia) menyerahkan sepenuhnya urusan ketenagakerjaan kepada APINDO, karena hubungan industrial adalah salah satu dimensi manajemen usaha

b. Berdasarkan Kesepakatan kedua belah pihak yang diperkuat oleh SK Menakertranskop No. 2224/MEN/1975

Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional terdiri dari :

1. Unsur Pemerintah diwakili Depnakertranskop

2. Unsur Pengusaha diwakili APINDO

3. Unsur Buruh diwakili FBSI

c. Pengakreditasi

APINDO sebagai Wakil KADIN Indonesia dalam Kelembagaan Hubungan Industrial dengan Keputusan Dewan Pengurus KADIN Indonesia No. 037/SKEP/DP/VII/2002 tanggal 31 Juli 2002. Pembaruan pengakreditasi APINDO sebagai Wakil KADIN Indonesia dalam Kelembagaan Hubungan Industrial dengan Keputusan Dewan Pengurus KADIN Indonesia No. 019/SKEP/DP/III/2004 tanggal 5 Maret 2004. Dengan kata lain, dalam rangka hubungan industrial, organisasi ketenagakerjaan mempunyai peran penting sebagai pelaku, baik langsung maupun tidak langsung dan pemberi warna pada falsafah serta proses Hubungan Industrial itu sendiri. Pengusaha dan Pemerintah dalam kehidupan ketenagakerjaan sehari-hari, kehadiran serikat pekerja dan organisasi pengusaha sangatlah diperlukan.

Berdasarkan ciri-ciri umum organisasi ketenagakerjaan yang sesuai dengan tuntutan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), maka ciri khusus yang diharapkan baik dari organisasi pekerja, pengusaha maupun profesi adalah :

1. Organisasi didirikan untuk meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab anggota dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Organisasi didirikan untuk meningkatkan efektifitas komunikasi antara para pelaku proses produksi barang dan jasa.
3. Organisasi didirikan untuk lebih menyeraskan penghayatan hak dan kewajiban masing-masing anggotanya dan mengefektifkan pengalaman secara selaras, serasi dan seimbang.
4. Organisasi didirikan untuk bersama-sama mengisi dan mengembangkan isi syarat-syarat kerja dan meningkatkan praktek-praktek Hubungan Industrial.
5. Organisasi didirikan untuk lebih mengefektifkan pendidikan dibidang ketenagakerjaan.

Untuk lebih menunjang dan mendukung hal tersebut diatas masih perlu dibentuk badan-badan lain yang berorientasi pada kebersamaan, keselarasan, dan keseimbangan. Bentuk badan tersebut anggotaannya juga semua pekerja perusahaan

tersebut. Badan itu antara lain Koperasi, Persatuan Olah Raga dan Seni, Persatuan Rekreasi dsb. Dalam perjalanan Hubungan Industrial untuk mencapai suatu masyarakat industri yang diharapkan, benturan-benturan antara para pelaku yang timbul sebagai akibat belum serasnya pemakaian ukuran dan kacamata untuk menilai permasalahan bersama kadang-kadang tidak dapat dihindari. Keluh kesah bisa juga terjadi akibat berbagai pertanyaan yang timbul baik dari pekerja ataupun dari pengusaha yang berkaitan dengan penafsiran atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dapat juga karena berbagai tuntutan dari salah satu pihak terhadap pihak lain yang melanggar peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dengan demikian untuk menghindari benturan-benturan tersebut perlu dikembangkan suatu mekanisme penyelesaian keluh kesah sehingga benih-benih perselisihan tingkat pertama seharusnya diselesaikan diantara pelaku itu sendiri. Mekanisme penyelesaian keluh kesah merupakan sarana yang seharusnya diadakan setiap perusahaan. Mekanisme ini harus transparan dan merupakan bagian dari Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi supervisi dari setiap para manajer merupakan kunci terlaksananya mekanisme ini. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam lembaga mekanisme penyelesaian keluh kesah ini. Penyelesaian dapat dilaksanakan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

1. Penyelesaian Keluh Kesah:

- a. Penyelesaian keluh kesah yang timbul di perusahaan didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat secara kekeluargaan antara pekerja dengan atasannya tanpa campur tangan pihak lain
- b. Apabila seorang pekerja mempunyai keluh kesah tentang segala sesuatu mengenai hubungan kerja, pertama-tama pekerja tersebut menyampaikan keluh kesahnya pada atasannya langsung untuk dimintakan penyelesaian.

- c. Apabila atasan langsung yang bersangkutan tidak menyelesaikannya atau pekerja tidak puas atas penyelesaiannya, pekerja mengajukan masalahnya kepada atasan yang lebih tinggi
 - d. Apabila atasan yang lebih tinggi tidak bisa menyelesaikannya atau pekerja tidak puas atas penyelesaiannya maka pekerja dapat minta bantuan pengurus serikat pekerja untuk mewakili atau mendampingi pekerja untuk penyelesaiannya lebih lanjut.
2. **Perselisihan Hubungan Industrial**
- Perselisihan Hubungan Industrial terjadi akibat perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan. Perselisihan Hubungan Industrial timbul karena :
- a. Tidak dilaksanakannya hak pekerja
 - b. Kesadaran pekerja akan perbaikan kesejahteraan
 - c. Kurangnya komunikasi antara pekerja dengan pengusaha
- Adapun Penyelesaian Hubungan Industrial dapat dilakukan sebagai berikut :
- a. Penyelesaian diluar Pengadilan Hubungan Industrial. Yaitu: Bipartit (wajib Pasal 4 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Mediasi, Konsiliasi, Arbiter (wajib Pasal 83, UU No.2 Tahun 2004)
 - b. Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu dengan Hukum Acara Perdata Pasal 57, UU No. 2 tahun 2004

E. Peraturan Perusahaan

Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

1. Ketentuan Khusus

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Peraturan Perusahaan, adalah :

- a. Wajib dibuat oleh pengusaha yang mempekerjakan 25 orang karyawan atau lebih
- b. Dalam pembuatannya pengusaha mengadakan konsultasi lebih dahulu dengan pekerja/pegawai Depnaker setempat.
- c. Perusahaan yang telah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak dapat menggantikannya dengan Peraturan Perusahaan.
- d. Peraturan Perusahaan sebelum diterapkan (berlaku) setelah mendapat pengesahan/kesaksian dari Departemen Tenaga Kerja cq. Dirjen Binawas untuk Peraturan Perusahaan yang berlaku di seluruh wilayah RI, dan Kadinas/Kasudinas Tenaga Kerja setempat untuk yang berlaku di wilayah tersebut. Tujuh hari setelah pengesahan

Peraturan Perusahaan harus di sosialisasikan kepada seluruh karyawan. Peraturan Perusahaan berlaku paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Masing-masing Peraturan Perusahaan secara periodik perlu diadakan perubahan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Setiap perubahan ini sebelum dilaksanakan harus mendapat pengesahan/kesaksian dari Depnaker/Disnaker atau pejabat yang ditunjuk.

2. Dasar Hukum. Dasar Hukum pembuatan Peraturan Perusahaan ini adalah :

- a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 115
- b. Kepmenaker No. Kep. 48/Men/IV/2004 tentang Tatacara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB. Pada umumnya penyusunan Peraturan Perusahaan sudah merupakan suatu hal yang standar, dimana beberapa ketentuan yang ada dalam perundang-undangan ketenagakerjaan dimasukkan kedalam Peraturan Perusahaan, baru kemudian ditambahkan dengan hal-hal umum dan spesifik yang diperlukan perusahaan tersebut.

3. Kerangka Peraturan Perusahaan

Sistimatika atau kerangka yang ideal Peraturan Perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Mukadimah

4. Umum
5. Aturan Perusahaan (Bab II)
6. Jam Kerja, Peraturan Kerja dan Disiplin Kerja (Bab III)
7. Pembebasan kewajiban dari bekerja (Bab IV)
8. Penggajian (Bab V)
9. Perjalanan Dinas (Bab VI)
10. Jaminan Kesehatan (Bab VII)
11. Pengembangan dan Pelatihan (Bab VIII)
12. Penghargaan (Bab IX)
13. Kegiatan/aktivitas (Bab X)
14. Penyelesaian Keluh Kesah (Bab XI)
15. Penutup (XII)

Ketentuan Umum Hal-hal umum yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Bila masa berlaku Peraturan Perusahaan belum berakhir kemudian terbentuk Serikat Pekerja, dan Serikat Pekerja meminta diadakan perundingan untuk pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka perusahaan wajib melayani kehendak Serikat Pekerja untuk merundingkan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama.
 - b. Bilamana Serikat Pekerja 3 bulan sebelum Peraturan Perusahaan berakhir tidak mengajukan secara tertulis untuk perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, maka perusahaan wajib mengajukan Peraturan Perusahaan yang lama/ yang tidak diperbaharui untuk disahkan atau diperpanjang.
 - c. Ketentuan yang ada dalam Peraturan Perusahaan tetap berlaku sampai dengan ditandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan atau sampai dengan disahkan permohonan diperpanjang Peraturan Perusahaan.
 - d. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap Peraturan Perusahaan ini, sanksi yang diberikan berupa administratif, bukan pidana
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang disusun oleh pengusaha dan serikat yang telah terdaftar yang dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat:
1. Dasar Hukum. Dasar Hukum pembuatan PKB ini didasarkan kepada :
 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 115 yang mengatur tentang

pembuatan dan pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

3. Kepmenaker No. Kep. 48/Men/IV/2004 tentang tatacara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Terdapat beberapa ketentuan Khusus:

Ketentuan khusus dalam penyusunan PKB beberapa ketentuan harus diperhatikan :

- a. Dirundingkan oleh pengusaha dan Serikat Pekerja yang telah terdaftar.
- b. Didukung oleh SEBAGIAN BESAR pekerja di perusahaan tersebut.
- c. Masa berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang.
- d. Setiap perpanjangan PKB harus disetujui secara TERTULIS oleh pengusaha dan Serikat. Pekerja serta diajukan 90 hari sebelum masa PKB berakhir.
- e. Dibuat dengan Surat Resmi sekurang-kurangnya rangkap 3 (satu bundel diserahkan ke Depnaker untuk didaftarkan).
- f. PKB yang telah disepakati dibubuhi tangan dan ditandatangani oleh pengurus yang oleh anggota dasar diperbolehkan, jika diwakilkan harus ada surat kuasa
- g. Ketentuan PKB tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat Beberapa Ketentuan Umum

1. PKB sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Hak dan kewajiban pengusaha
 - b. Hak dan kewajiban Serikat Pekerja
 - c. Tata tertib perusahaan
 - d. Jangka waktu berlakunya PKB
 - e. Tanggal mulai berlakunya PKB.
 - f. Tanda tangan para pihak yang membuat
2. Dalam hal perubahan PKB perlu diperhatikan sebagai berikut:
 - a. Keinginan untuk melakukan perubahan tersebut oleh para pihak harus diajukan secara tertulis
 - b. Perubahan PKB harus dilakukan berdasarkan Perjanjian Bersama secara tertulis antara pengusaha dan pekerja.

- c. Perubahan PKB yang diperjanjikan kedua belah pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku.
- 3. Para Pihak yang terikat dengan PKB. Para pihak yang terikat dengan PKB adalah pihak-pihak yang membuatnya yaitu Serikat Pekerja/pekerja dan Pengusaha
- 4. Tahap Pembuatan PKB. Dalam pembuatan PKB dibagi beberapa tahap yaitu :
 - a. Serikat Pekerja/Buruh dan Pengusaha menunjuk team perunding pembuat PKB secara resmi dengan surat kuasa yang ditandatangani pimpinan masing-masing
 - b. Permusyawaratan PKB dalam perundingan Bipartit harus selesai dalam waktu 30 hari.
 - c. Apabila dalam waktu 30 hari perundingan Bipartit belum selesai, maka salah satu atau kedua belah pihak wajib melaporkan secara tertulis ke Departemen Tenaga Kerja setempat untuk diperantarai.
 - d. Apabila dalam waktu 30 hari pegawai perantara tidak dapat menyelesaikan pembuatan PKB, maka pegawai perantara melaporkan secara tertulis ke Menteri Tenaga Kerja.
 - e. Menteri Tenaga Kerja menetapkan langkah-langkah penyelesaian pembuatan PKB, dengan memperhatikan hasil musyawarah tingkat Bipartit dan perantara paling lama 30 hari.
 - f. Tempat perundingan pembuatan PKB dilaksanakan di kantor pengusaha/Serikat Pekerja atau ditempat lain yang telah disepakati tingkat Bipartit.
 - g. Biaya permusyawaratan PKB ditanggung pengusaha kecuali jika Serikat Pekerja telah dianggap mampu maka ditanggung bersama.

F. Perjanjian Kerja Khusus (PKK)

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain atau majikan, selama waktu tertentu sesuai perjanjian. Dasar Hukumnya adalah :

- 1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 59 tentang PKWT.

2. Kepmenaker No.Kep.100/Men/VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

PKK dirumuskan sebagai berikut :

- a) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- b) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Hal tersebut diatas dapat diuraikan bahwa:

- b) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- c) PKWT adalah Perjanjian Kerja antara pekerja dengan pengusaha
- d) untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan atau pekerjaan tertentu.

Ketentuan Umum PKWT :

1. Dibuat secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia
2. Didalamnya tidak boleh mempersyaratkan adanya masa percobaan, bila dicantumkan masa percobaan, maka masa percobaan tersebut batal demi hukum
3. Dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat, jenis, atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu..
4. Nilai isi PKWT tidak boleh lebih rendah dari syarat-syarat kerja yang dimuat dalam Peraturan Perusahaan yang bersangkutan, jika lebih rendah yang berlaku adalah apa yang termuat dalam Peraturan Perusahaan.
5. Dibuat rangkap 3 (pengusaha, pekerja, pemerintah/Depnaker) dan seluruh biaya yang timbul karena pembuatan ini menjadi tanggung jawab pengusaha.

Ketentuan Khusus PKWT :

1. Dibuat atas kemauan bebas kedua belah pihak.
2. Para pihak mampu dan cakap menurut Hukum untuk melakukan perikatan.
3. Adanya pekerjaan tertentu.
4. Yang disepakati tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

PKWT yang tidak memenuhi item 1,2, ketentuan khusus diatas dapat dibatalkan, sedangkan yang bertentangan dengan 3 dan 4 adalah batal demi hukum. Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu sebagaimana tersebut diatas adalah:

1. Yang sekali selesai/sementara sifatnya.

2. Yang penyelesaian pekerjaannya diperkirakan tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun
3. Yang bersifat musiman/berulang kembali.
4. Yang bukan merupakan kegiatan bersifat tetap dan tidak terputus-putus.
5. Yang berhubungan dengan produk baru, atau kegiatan baru, atau tambahan yang masih dalam percobaan/penjajagan.

Dalam pembuatan PKWT, konsepnya terlebih dahulu harus diajukan ke kantor Depnaker setempat untuk disetujui. Dalam PKWT tersebut harus memuat :

1. Nama dan alamat pengusaha/perusahaan.
2. Nama, alamat, umur dan jenis kelamin pekerja.
3. Jabatan/jenis macam pekerjaan.
4. Besarnya upah dan cara pembayarannya.
5. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.
6. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.
7. Tempat atau lokasi kerja.
8. Tempat, tanggal perjanjian kerja dibuat, tanggal mulai berlakunya dan berakhir serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.
9. Hal-hal yang dapat mengakhiri PKWT sebelum masa berlakunya habis.

Jangka waktu PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun, dan dapat diperpanjang 1 kali dengan ketentuan jumlah seluruh tidak boleh lebih dari 3 tahun. Perubahan PKWT hanya dapat dilakukan 30 hari setelah berakhirnya PKWT yang lama. Sedangkan PKWT yang ingin di perpanjang tanpa mengalami perubahan dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum Perjanjian Kerja berakhir. Perubahan dan perpanjangan ini berlakunya tidak boleh melebihi masa maksimum berlangsung hubungan kerja PKWT. PKWT berakhir disebabkan oleh :

1. Berakhirnya waktu perjanjian kerja.
2. Berakhir dengan selesainya pekerjaan yang diperjanjikan.
3. Berakhir karena pekerja meninggal dunia.

PKWT tidak berakhir jika pengusaha meninggal dunia, ahli waris atau pengurus perusahaan yang lain dapat melanjutkannya, kecuali dalam PKWT diperjanjikan lain. Para pihak yang mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa alasan

yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum diwajibkan membayar ganti rugi sebesar sisa upah masa berlakunya PKWT. Masalah Kerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Pada prinsipnya secara umum sama dengan PKWT. Dalam PKWTT, Perjanjian Kerja dapat berlangsung selamanya sampai dengan pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak ada lagi, atau pekerjaanya pensiun. Begitu pula dengan ketentuan-ketentuan lainnya hampir sama.

Para Pihak bebas mengakhiri perjanjian, namun bila yang mengakhiri pengusaha tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka pengusaha wajib membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak jasa dan penggantian hak, sebagaimana diatur Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

G. Rancangan Sistem Hubungan Industrial di Indonesia

Belakangan ini berbagai perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing kian meningkat sehingga kata outsourcing menjadi terdengar akrab di telinga kita. Sayangnya meskipun begitu, masih banyak diantara calon pekerja yang belum paham benar, apa sebenarnya yang dimaksud tenaga kerja outsourcing itu sendiri. Apa itu outsourcing. Bila merujuk pada Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, *Outsourcing* (Alih Daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga *outsourcing*. Awalnya, perusahaan outsourcing menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan jenjang karier. Seperti operator telepon, call centre, petugas satpam dan tenaga pembersih atau *cleaning service*. Namun saat ini, penggunaan outsourcing semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan.

Dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan. Karena, yang bertanggung jawab adalah perusahaan *outsourcing* itu sendiri. Meski menguntungkan perusahaan, namun sistem ini merugikan untuk karyawan *outsourcing*. Selain tak ada jenjang

karier, terkadang gaji mereka dipotong oleh perusahaan induk. Bayangkan, presentase potongan gaji ini bisa mencapai 30 persen, sebagai jasa bagi perusahaan outsourcing. Namun, tidak semua karyawan outsourcing mengetahui berapa besar potongan gaji yang diambil oleh perusahaan outsourcing atas jasanya memberi pekerjaan di perusahaan lain itu. Dalam Sistem kerja *outsourcing*. Sistem perekrutan tenaga kerja outsourcing sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perekrutan karyawan pada umumnya. Perbedaannya, karyawan ini direkrut oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, bukan oleh perusahaan yang membutuhkan jasanya secara langsung. Nanti, oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, karyawan akan dikirimkan ke perusahaan lain (klien) yang membutuhkannya. Dalam sistem kerja ini, perusahaan penyedia jasa outsource melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan. Selanjutnya mereka menagih ke perusahaan pengguna jasa mereka. Karyawan outsourcing biasanya bekerja berdasarkan kontrak, dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing, bukan dengan perusahaan pengguna jasa.

BAB XII

INDUSTRI DAN IMPLIKASI SOSIAL

Pada Bab Dua Belas Membahas tentang Industri dan implikasi sosial, di dalamnya akan dibahas, yakni: Rasionalisasi, Stratifikasi Sosial dan Perbedaan Status Masyarakat Industri, Stratifikasi Sosial Masyarakat Industri, Perbedaan Status Masyarakat Industri, Industri dan Politik, Organisasi Di era Industrialisasi, dan Agama di Era Industri.

A. Fenomena Sosial Masyarakat Industri

Kajian tentang masyarakat selalu menarik untuk diperbincangkan dan bersifat dinamis. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi serta industri didalamnya. Secara historis perkembangan masyarakat industri berawal dari terjadinya revolusi industri di Inggris dan revolusi politik yang terjadi di Prancis. Revolusi industri yang terjadi di Inggris yang pada awalnya menggunakan alat produksi yang bersifat tradisional beralih secara modern kapitalis. Begitupun dengan adanya revolusi politik yang menerapkan sistem monarki absolut menjadi republik demokratis. Berbicara tentang sosiologi industri berarti tidak terlepas dengan adanya fenomena sosial yang menyangkut tentang hiruk pikuk di kehidupan masyarakat perkotaan dan kehadiran perusahaan di tengah masyarakat. Setiap kehadiran suatu perusahaan di tengah masyarakat secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Suatu daerah perindustrian yang baru mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak maka daerah tersebut akan menjadi pusat perindustrian dan akan mengambil alih semua aktivitas kerja yang telah berlangsung di daerah sekitarnya. Proses perkembangan daerah perindustrian akan membawa berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat.

Menurut S. R. Parker, R.K. Brown, J. Child, M.A. Smith, Sosiologi industri ialah suatu cabang ilmu sosial yang membahas karakter dan arti dunia kerja serta kehidupan manusia yang terlibat di dalamnya. Permasalahan yang berhubungan dengan industri tidak hanya segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan kegiatan kerjanya tapi banyak

juga hal lain yang secara tidak langsung akan mempengaruhi aktivitas kerja dalam industri tersebut. Bagi sebagian besar masyarakat, kerja selalu dihubungkan dengan aktivitas industri. Variasi dari konteks tersebut berarti bahwa pekerjaan pun bervariasi baik dalam perpindahan kerja ataupun perpindahan jabatan maupun tingkat kepuasan bagi pekerjanya, kesempatan maupun monotonitasnya, risiko maupun upah yang didapatkannya. Suatu tinjauan terhadap variasi-variasi tersebut memperlihatkan bahwa ia menyebar kedalam spektrum pekerjaan, dimulai dari tenaga pelaksana yang paling bawah kepada manajer dalam perusahaan. Sosiologi industri disebut juga sebagai sosiologi organisasi, membahas sikap dan ideologi setiap pimpinan pada suatu tingkat dalam struktur organisasi dan juga membahas apa yang dilakukan individu dalam organisasi. Ada suatu keterkaitan antara perpindahan kerja dengan kebiasaan di dalam bekerja yang dialami oleh orang-orang merupakan suatu landasan utama baik bagi konflik maupun konsensus dalam suatu organisasi. Sosiologi industri membahas pula tentang jenis-jenis masyarakat yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung di dalam aktivitas dan eksistensi organisasi. Sistem Industri akan terkait dengan berbagai aspek kehidupan, di bawah ini akan dijelaskan antara lain sebagai berikut:

a. Industri dan Ekonomi

Menurut Parker, konsepsi ekonomi sebagai suatu subsistem masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat merupakan pengatur suatu sistem. Sesungguhnya kita juga bisa mengatakan bahwa ekonomi merupakan induk sistem dari beberapa subsistem lainnya. Selanjutnya setiap subsistem memiliki peranan fungsional dalam hubungannya dengan sistem ekonomi sekaligus juga dengan sistem sosial yang merupakan induk dari semua sistem tersebut. Berbagai penemuan baru, perkembangan teknologi dan perubahan dalam dunia telah mengubah secara radikal karakter industrial Inggris dalam beberapa tahun terakhir ini. Industri-industri dengan teknik baru, misalnya didalam bidang elektronik, pesawat terbang, mobil, dan industri kimia serta dalam bidang konstruksi mesin dan teknologi perminyakan, telah menjadi

bagian terbesar dari nilai ekspor dan memberikan kesempatan kerja yang cukup besar.

Menurut Parker, Nilai memainkan peranan penting di dalam merasionalisasikan norma-norma tertentu didalam suatu organisasi. Nilai yang berlaku biasanya selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi agar memungkinkan dirinya mampu mengembangkan dan mengendalikan berbagai macam sistem sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Di dalam masyarakat industri modern suatu nilai tertentu telah digunakan untuk mengendalikan, mengembangkan dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Keinginan untuk memaksimumkan keuntungan ataupun mendapat upah setinggi-tingginya serta naluri untuk bekerja keras, merupakan refleksi dari suatu nilai yang terasa ganjil di dalam suatu masyarakat yang tertutup suatu nilai yang jarang ditemukan di tempat manapun juga di dunia ini.

Suatu konsekuensi penting dari meningkatnya ukuran organisasi-organisasi industri adalah meningkatnya kecenderungan monopoli dan oligopolis. Perlu dicatat bahwa kenaikan laju konsentrasi industri yang menjadi ciri khas dalam perekonomian Inggris pada tahun 1960-an, telah menciptakan suatu situasi dimana sejumilah kecil perusahaan sekarang ini telah menguasai sektor industri tertentu. (Stant wort dan Giddens, 1975; hal 5). Para pendukung sistem kapitalisme sudah lama: menduduki posisi kontradiktif di dalam monopoli; kelihatannya mereka mendapat keuntungan besar dari suatu pasar yang besar, sehingga mereka mampu merasionalisasikan produksinya , akan tetapi merekapun "berada di dalam kontrol atau batasan-batasan kegiatan perdagangan". Walaupun mereka menghadapi berbagai kendala, tetapi di Amerika dan Inggris tetap tumbuh dengan pesatnya.

Suatu pertanyaan yang berkaitan dengan struktur ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius ialah "siapakah yang menjadi pemilik kekayaan negara?" Sering disinyalir bahwa kenaikan pajak justru memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, tetapi hanya sedikit fakta akurat yang mendukung pernyataan ini. Sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1969, kelompok orang yang paling kaya .di Inggris meliputi jumlah 5% dari populasi penduduk yang berumur 25

tahun keatas, dan 55% di antara populasi tersebut dapat digolongkan ke dalam kelompok orang-orang kaya (Atkinson, 1975 hal 134). Walau suatu gambaran komparatif dari tahun 1950-1952 menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 68% populasi yang termasuk ke dalam kelompok orang kaya, tetapi 1% dari 5% orang yang paling kaya (ke dalam kelompok ini termasuk orang-orang kaya yang memberikan hartanya sebagai warisan terhadap ahli waris sebelum kematiannya) telah mengalami perubahan besar di dalam jumlah nilai kekayaannya yang terjadi di antara tahun 1967-1969.

Masalah perindustrian dan akibatnya yang dirasakan oleh perekonomian secara keseluruhan, terutama yang menyangkut masalah perburuhan, telah ditunjukkan oleh semakin meningkatnya pengaruh dan kekuasaan serikat-serikat buruh (note: indikasi ini semakin terasa setelah perang dunia ke-II para pengusaha duduk bersama dengan para wakil buruh didalam komite produksi bersama yang disebut *Trades Union Congress* dimana cabangnya tersebar hampir disemua perusahaan industri, di Inggris. *Trades Union Congress* memegang peranan penting didalam merumuskan kebijaksanaan ekonomi negara. Para pemimpin organisasi tersebut kemudian ditunjuk menjadi anggota komisi yang bertanggungjawab terhadap perkembangan industri serta berada di bawah pengawasan para pemilik perusahaan.

Variasi dalam bidang lapangan kerja dan meningkatnya kemakmuran dapat kita perhatikan dalam sebuah ekspansi terhadap pasar konsumen remaja di dalam berbagai bentuk barang-barang konsumsi dan jasa, terutama pakaian, kaset dan berbagai produk lainnya, jelas merupakan akibat langsung dari situasi pasar yang cukup baik, didukung pula oleh pelayanan perusahaan yang baik dan tenaga kerja yang masih muda dan ini berakibat meningkatnya standar upah dan kesejahteraan di Inggris. Walaupun "*demand and Supply*" merupakan suatu proses sirkular, konsumen bukanlah merupakan satu-satunya faktor utama, tetapi pasang-surut perusahaan terletak pada kemampuan pengusaha untuk menguasai dan mengendalikan pasar, atau akan lebih baik lagi kalau mereka mampu menciptakan pasar; dimana seorang pengusaha harus mampu untuk "membujuk" konsumen agar dia merasa "perlu" dengan produk yang ditawarkannya. Pertumbuhan pesat dari

penjualan barang-barang mebel dan, berbagai barang yang tahan lama lainnya (*durable consumer good*) telah berkembang dengan pesatnya karena adanya sistem kredit. Walaupun adanya berbagai fluktuasi di dalam kegiatan perdagangan sebagai akibat dari berbagai perubahan dalam peraturan pemerintah mengenai sistem kredit, jumlah total kredit yang disalurkan kepada para konsumen terus menunjukkan kenaikan yang mengagumkan.

b. Industri dan Pendidikan

Menurut S.R. Parker, terdapat hubungan antara industri dan sistem pendidikan bersifat timbal-balik, serta memiliki pengaruh besar terhadap tenaga kerja yang telah terlatih atau calon tenaga kerja yang memiliki latar belakang dan tingkat pendidikan yang cukup memadai untuk mendapatkan suatu latihan, dipihak lain industri sendiri mempunyai suatu sub sistem "pendidikan" yang khas, termasuk kegiatan magang dan berbagai bentuk training. Pengaruh industri terhadap pendidikan adalah suatu yang nyata dan mudah dilihat dari sektor industri terhadap sektor pendidikan ialah adanya kecenderungan untuk menyusun dan menerapkan kurikulum serta materi pelajaran di sekolah maupun universitas agar sesuai dengan kebutuhan sektor industri. Apa yang disebut pembiasan: fungsi (*vocational bias*) pendidikan dimaksudkan agar tujuan pendidikan dapat mengarahkan siswanya untuk memiliki persiapan di dalam bekerja. Pihak industriawan atau pengusaha menghendaki suatu metode pendidikan yang memungkinkan lulusan sekolah atau perguruan tinggi menjadi tenaga kerja yang langsung siap pakai.

Sesungguhnya pendidikan teknik itu sangat heterogen, dan masing-masing mempunyai kurikulum yang saling beda. Selain sekolah teknik menengah terdapat juga lembaga pendidikan teknik, institut teknik, politeknik dan sebagainya. Dalam tahun terakhir ini jumlah lembaga-lembaga pendidikan teknik tersebut telah mengembangkan kurikulum dan sistem pendidikannya, sehingga bisa disejajarkan dengan sistem pendidikan di universitas, bahkan sekarang banyak diantara lembaga-lembaga tersebut yang telah mengubah dirinya menjadi universitas. Lembaga-lembaga pendidikan teknik pada umumnya lebih mengutamakan pendidikan teknis praktis ketimbang pendidikan teoritis. Pengaruh pendidikan terhadap

perkembangan industri, pendidikan serta berbagai latihan keterampilan atau kejuruan yang ada di dalam perusahaan merupakan refleksi atau perluasan dari tujuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalam "pendidikan yang akan disampaikan kepada masyarakat luas. Beberapa jenis sistem pendidikan tertentu" termasuk diantaranya sistem magang bersama dengan tenaga kerja terdidik telah memberikan pengaruh terhadap komposisi dan distribusi sumber-sumber tenaga kerja (*man power resources*) dan secara keseluruhan akan mengangsur dunia industri.

Semenjak abad pertengahan, sistem magang sudah dikenal baik dalam dunia perdagangan maupun industri. Sekarangpun sistem tersebut hampir tidak mengalami perubahan baik dalam arti maupun coraknya. Sistem magang memiliki sifat paternalistik, yang menggambarkan hubungan bapak dengan anaknya antara seorang mekanik berpengalaman dengan seorang pekerja-pemula. sekarang ini sistem magang sudah hampir hilang tetapi masih banyak perusahaan yang mempertahankannya. Seorang pekerja pemula biasanya harus melalui masa magang selama 4 sampai 5 tahun, atau sejak umur 15 atau 16 tahun. selama. periode tersebut, si pekerja muda mendapatkan pendidikan dan latihan dan langsung mempraktekkannya di lapangan. Dalam pendidikan tersebut tidak ada standar khusus, tes ataupun ujian. Juga tidak ada persyaratan khusus yang diperlukan untuk mengikutinya. Sebagian pengusaha memberikan pendidikan yang cukup baik bagi para pekerja pemula, sedangkan sebagian lagi kurang begitu memperhatikannya. Sebelum menerima calon pemula, beberapa perusahaan biasanya mengadakan tes daya adaptasi dan kecerdasan atau psychotest. Walaupun sudah berusia lebih dari 20 tahun, penelitian Williams (1957) mengenai sistem magang ternyata masih cukup relevan dengan situasi dan kondisi sekarang. Seorang pekerja baru sesungguhnya jarang mendapatkan pendidikan yang serius. Perusahaan biasanya mempercayakan pendidikan bagi para calon pekerja ke tangan pekerja yang sudah dianggap cukup ahli, yang mana penilaian terhadap instruktur tersebut biasanya didasarkan atas pengalaman kerjanya yang cukup lama.

Pandangan Parker mengenai, "*Day-release*" dan "*Sandwich courses*". Setelah membahas tentang job training, termasuk

sistem pendidikan magang, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang disebut "day release" dan "sandwich". Kedua sistem pendidikan tersebut berfungsi mengatasi kekosongan yang ditinggalkan waktu job-training. "Day-Release" berarti bahwa seorang pekerja mula yang baru masuk mendapatkan hari bebas cari pekerjaannya, biasanya sehari dalam satu minggu kerja yang harus dititinkan untuk mengikuti kursus pada berbagai jenis lembaga pendidikan teknik. Ada tiga tingkatan kursus yang dapat diikuti oleh seorang pekerja, yaitu: pertama kursus untuk menduduki jabatan profesional, kedua kursus untuk menjadi teknisi dan ketiga untuk menduduki jabatan sebagai tenaga mekanik. Lamanya kursus berbeda-beda. Untuk menjadi seorang teknisi diperlukan kursus antara tiga sampai lima tahun, sedangkan untuk menjadi seorang tenaga mekanik diperlukan kursus selama tujuh tahun dan untuk menjadi tenaga profesional diperlukan lebih dari tujuh tahun. Khusus untuk kandidat jabatan profesional diadakan kursus selama 2 x seminggu atau setiap Sabtu pagi. Begitu juga mengenai tenaga Kerja dan Pendidikan, sampai dengan masa Perang Dunia I, dalam dunia industri terdapat tiga macam kelompok kerja, yang semuanya berkaitan dengan berbagai tingkatan dalam perkembangan teknologinya. Ketiga macam kelompok itu ialah:

- a. Unskilled manual (tenaga kerja tidak terampil)
- b. Skilled manual (tenaga kerja terampil)
- c. Personal administrasi dan komersial.

Dengan diperkenalkannya mesin-mesin baru beserta teknologinya telah mengakibatkan kenaikan tajam dalam kecepatan mobilitas jabatan atau perpindahan posisi kerja, dan juga menimbulkan konsekuensi khusus yaitu perlunya pendidikan atau latihan bagi para pekerja. Terlalu mementingkan spesialisasi akan mengakibatkan seorang pekerja memiliki keahlian yang tinggi dalam satu pekerjaan; tetapi untuk mengerjakan pekerjaan lain, bahkan pekerjaan yang sama tetapi dengan peralatan dan teknologi baru, dia harus mengikuti pendidikan atau latihan lagi.

Menurut Parker, mengenai Sekolah dan pekerjaan, masa transisi dari "dunia sekolah" memasuki "dunia kerja" akan menimbulkan dua macam masalah yang akan dibahas dibawah ini, yaitu: "aspirasi dan harapan" calon pekerja yang baru saja

menyelesaikan studinya berkaitan dengan dunia kerja yang akan dimasukinya, dan yang kedua ialah "proses pemilihan pekerjaan". Sekolah memberikan suatu bayangan atau gambaran dari bentuk pekerjaan yang akan didapatkan oleh seseorang. Di sekolah para siswa mendapatkan suatu informasi tentang berbagai pekerjaan yang bisa dan akan mereka lakukan, walaupun mungkin informasi tersebut tidak bersifat langsung bila sekolah yang dimasukinya adalah sekolah ilmu-ilmu sosial. Lingkungan keluarga sering berpesan sebagai sumber informasi (dan kadang-kadang sering memberikan informasi yang tidak benar), tentang pekerjaan, dan juga sering mendorong pembentukan motivasi untuk mencapai prestasi. Selain itu berbagai media komunikasi massa dapat juga memberikan informasi langsung kepada masyarakat, baik berupa iklan tawaran kerja maupun berupa informasi tentang sesuatu pekerjaan yang meliputi posisi, sarana dan berbagai fasilitas lainnya yang diharapkan bisa diperoleh masyarakat yang berminat. Media massa yang cukup efektif memberikan informasi tersebut ialah surat kabar, televisi, radio dan juga film.

Sebagai persiapan memasuki dunia kerja, biasanya pihak sekolah memilih sekelompok siswa yang sudah senior untuk melakukan kunjungan ke perusahaan untuk mendapatkan pengetahuan praktis dari kegiatan kerja di perusahaan yang dikunjunginya. Hal ini akan memberikan gambaran yang cukup baik bagi para siswa mengenai ruang lingkup pekerjaan yang akan dimasukinya serta cukup berpengaruh terhadap proses pemilihan pekerjaan yang akan dilakukannya. Biasanya pihak perusahaan akan menjelaskan apa-apa yang akan dan harus mereka kerjakan jikalau mereka bekerja diperusahaan tersebut; tetapi tentunya pihak perusahaan tidak harus berharap bahwa mereka pasti akan menjadi pekerja di perusahaan tersebut. Dalam teori-teori yang terkenal tentang "masa memasuki dunia kerja adalah teori Ginzberg dan Super. Kedua teori itu menyatakan bahwa kita harus menganggap masuknya seorang dalam dunia kerja sebagai suatu proses. Tapi kedua teori tersebut memiliki juga perbedaan, dimana Ginzberg lebih menekankan pertumbuhan kesadaran individu terhadap interest, dan kemampuannya, sedangkan Super lebih menekankan peranan lingkungan sosial individu di dalam

membentuk struktur konsep individu terhadap interest, kemampuan dan kapasitasnya Roberts (1975) menyatakan bahwa persamaan dan perbedaan di atas yang pada dasarnya bertumpuk pada proses yang dialami seseorang dalam memilih pekerjaan dengan melalui serangkain tahapan yang dapat diidentifikasi, sebetulnya tidak memadai untuk menerangkan sikap seseorang dalam memilih suatu pekerjaan. Sebagai pengganti dari teori tersebut dia mengusulkan suatu teori lain dengan "*Oportunity Structure*" sebagai konsep pedomannya. Dia menyatakan bahwa karir dapat dianggap sebagai suatu perkembangan pola-pola yang diatur oleh oportunity structure, untuk mengekspose seseorang pertama kali dengan melalui pendidikan dan kemudian diikuti oleh prestasinya, dalam pekerjaan. Sebaliknya ambisi individual dapat dinyatakan sebagai refleksi dari pengaruh struktur terhadap diri seseorang, yang dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap prestasi kerja dan lingkungan pekerjaan.

d. Industri dan Keluarga

Menurut S.R. Parker, Interaksi antara industri dan keluarga terjadi di dalam dua tingkatan yang pertama ialah interaksi antara organisasi industri dan struktur keluarga sebagai sistem keseluruhan, dan yang kedua, adalah dalam kaitannya dengan tingkat peranan individual yakni interaksi antara pekerjaan dengan lingkungan keluarga dari setiap individu. Pertama, kita harus mempertimbangkan pengaruh dari berbagai jenis organisasi industri modern terhadap pola-pola kehidupan keluarga dan yang kedua, memperhitungkan pengaruh peranan pekerjaan terhadap peranan keluarga. Selanjutnya kita harus meninjau pengaruh berbagai jeniskeluarga terhadap pembentukan pola tingkah laku dan pola organisasi industri. sekaligus memperhatikan bagaimana keterkaitan individu terhadap kehidupan keluarga dalam mempengaruhi penampilan pekerjaannya.

Pengaruh industri terhadap kehidupan keluarga mungkin bisa bersifat langsung. Dalam bentuknya yang langsung, lingkungan dan sikap kerja dari suatu jenis pekerjaan tertentu akan mempengaruhi lingkungan dan sikap hidup dari suatu keluarga. Bila pengaruhnya yang bersifat tidak bersifat langsung, asosiasi antara pekerjaan dan keluarga dilakukan

melalui media social class membership (keanggotaan dalam kelas sosial), hal itu berarti bahwa seseorang yang mendapatkan suatu pekerjaan sekaligus juga akan mendapatkan suatu tingkat kelas sosial tertentu (prestise) yang sering ditunjukkan oleh pola-pola sikap dan tingkahlaku tertentu. Kenyataannya bahwa kebanyakan studi empiris yang menyelidiki interaksi antara pekerjaan dengan kehidupan keluarga sering berpijak pada data "kelas sosial" semua keluarga yang menjadi obyek penelitian, sehingga dalam membahas pengaruh industri terhadap berbagai aspek kehidupan keluarga, kita harus memperhatikan "kelas sosial" sebagai suatu faktor utama.

e. Industri dan Suami-Istri

Dalam dunia Industri, baik secara langsung maupun tidak langsung akan ikut membentuk peranan yang dimainkan oleh pihak suami maupun istri di dalam suatu keluarga dan juga akan ikut membentuk arah dan corak hubungan antara suami dan istri berkenaan dengan peranannya di dalam keluarga. Umumnya, lingkungan keluarga dan lingkungan kerja akan berkembang menuju arah yang berbeda, terutama dikarenakan oleh adanya spesialisasi pekerjaan dalam peranannya di dalam masyarakat. Selain itu, jika kita melihat lebih dekat lagi terhadap hubungan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, ternyata tingkat integrasi pekerjaan dan kehidupan keluarga pada berbagai tingkat sosio ekonomi yang berbeda akan menunjukkan banyak perbedaan pula.

Peran suami dalam keluarga golongan atas biasanya hanya sedikit mempunyai hubungan dengan peranannya dalam keluarga, sehingga sedikit kemungkinan ia akan menerapkan wibawa dan wewenang di tempat pekerjaannya ke dalam lingkungan keluarga. Pekerjaannya cenderung menyita waktu dan tenaganya, sehingga kurang mencurahkan perhatian terhadap keluarga. Dalam keluarga golongan menengah, keadaan keuangan dan status keluarga banyak tergantung pada pekerjaan sang suami jika suami bekerja di dalam pekerjaan yang secara teknis cukup kompleks dan tidak bisa dimengerti oleh keluarganya, mungkin sang istri tidak akan bisa membantu atau ikut terlibat secara langsung di dalam pekerjaan suaminya. Bagi kelompok masyarakat seperti ini, tingkat pendapatan mereka relatif rendah dan sulit

mendapatkan status yang tinggi dalam masyarakat luas. Di dalam suatu masyarakat, dimana secara tradisional yang bekerja itu hanyalah suami, akan terlihat adanya pemisahan antara pekerjaan dengan keluarga. Tetapi di dalam kelompok masyarakat lain, di mana istri juga ikut mencari nafkah, pendapatan tambahan yang didapatkan sering digunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang lebih baik, bahkan cenderung bersifat mewah. Di dalam keluarga seperti ini peranan istri mirip dengan peranan suami dalam keluarga kelas menengah.

Pengaruh lainnya dari faktor-faktor pekerjaan terhadap peranan suami-istri ialah terhadap keakraban antara suami dan istri. Suami harus dapat mencari jalan untuk menyesuaikan tuntutan pekerjaan dengan tuntutan keluarganya. Edgell (1970) telah mencoba melakukan penelitian terhadap sejumlah keluarga kelas menengah berkaitan dengan pengaruh pekerjaan terhadap hubungan suami istri.

f. Industri dan Keluarga

Berbagai pola hubungan antar keluarga selalu dipengaruhi oleh pekerjaan yang dimiliki oleh keluarga-keluarga tersebut: baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bott (1977) telah melakukan suatu studi yang intensif terhadap sejumlah kecil keluarga perkotaan di Inggris. Dia menyatakan bahwa ada suatu keterikatan di antara keluarga yang mungkin akan menjadi lebih kuat apabila ada suatu kerjasama dalam suatu pekerjaan di antara mereka. Berkaitan dengan istilah kelas dalam masyarakat, keluarga dengan pola pergaulan terbuka mungkin bersedia bergaul dengan kelas buruh tetapi tidak semua keluarga kelas pekerja memiliki pola pergaulan terbuka. Kekuatan suatu keluarga dalam hubungannya dengan tetangga tergantung secara langsung kepada jabatan suaminya di tempat pekerjaannya, yang akan memberikan suatu status kepada keluarganya secara keseluruhan. Jika seseorang bertetangga dengan salah seorang koleganya, hubungan yang terjadi di antara keluarga mereka akan semakin erat, tetapi jika koleganya itu tidak bertetangga dengannya, pola pergaulannya hanya akan terjadi di antara kedua suami saja.

g. Industri dan Sosialisasi

Posisi sosial ayah dalam lingkungan sosial masyarakat menimbulkan pengaruh besar terhadap proses sosialisasi seorang anak (Schneider, 1969, hal.499-502). Pada orang tua di setiap tingkatan sosial terdapat suatu kecenderungan dimana posisi sosial membentuk suatu pola peran tertentu bagi anak-anaknya. Dalam keluarga golongan atas, perawatan dan pendidikan anak sering diserahkan kepada pembantu rumah tangga. Dalam keluarga seperti ini proses sosialisasi seorang anak diarahkan dengan melalui norma-norma dan nilai yang hanya berlaku di kalangan keluarga golongan atas saja. Beda dengan anak-anak dari keluarga golongan menengah, dimana pihak orang tua memiliki banyak waktu luang untuk memperhatikan perkembangan dan pendidikan anaknya. Proses sosialisasi dalam keluarga golongan menengah ditujukan untuk mendidik agar anak mampu bersifat "mandiri", dan hal itu akan lebih banyak tergantung kepada kemampuan si anak untuk bersaing dengan rekannya dalam mencapai prestasi di sekolah dan selanjutnya dalam pekerjaan. Tetapi anak yang berasal dari keluarga kelas pekerja jarang mampu meningkatkan posisi sosialnya mereka sering dipaksa untuk selalu bersikap patuh dan tidak banyak membuat kesulitan bagi masyarakat sekelilingnya.

Banyak bukti yang memajukan bahwa dalam hubungan antara industri dan keluarga, pihak industri memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keluarga dibanding sebaliknya. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus mengabaikan pengaruh keluarga terhadap industri. Sebagai suatu contoh yang menunjukkan betapa pentingnya peranan keluarga terhadap industri maupun dalam suatu perubahan sosial yang tersembunyi, Goode (1964) telah mencoba membandingkan usaha yang dilakukan oleh Jepang dan Cina untuk melakukan industrialisasi pada akhir abad 19 dan awal abad 20). dimulai dengan kondisi sosial dan ekonomi yang relatif sarna dan homogen, Jepang telah melangkah jauh lebih maju dibandingkan dengan Cina. Perbedaan pola dan sistem kekeluargaan antara kedua negara tersebut telah menimbulkan perbedaan dalam kecepatan proses industrialisasi. Sistem pewarisan di Jepang memudahkan pelaksanaan akumulasi kekayaan, dan nepotisme hanya sedikit

memberikan hambatan dibandingkan dengan yang terjadi di Cina.

Sebagai permulaan kita mengambil suatu postulat dari Raports (1965) yaitu: pekerjaan dan peranan keluarga cenderung bersifat isomorfik (saling-pengaruh-mempengaruhi satu sama lain dengan satu cara tertentu untuk membentuk suatu pola struktur yang sama), atau heteromorfik (membentuk suatu struktur yang masing-masing berbeda). Dari berbagai studi dan observasi yang telah disebutkan, (yaitu studi mengenai keluarga dimana istri ikut bekerjasama dengan suaminya di dalam pekerjaannya, studi tentang keluarga dimana rumah tempat tinggal digunakan oleh ayah sebagai kantor atau toko, studi mengenai keluarga petani dan sedikit pembahasan mengenai keluarga Jepang modern), ternyata semua studi tersebut menunjukkan adanya isomorfisme antara pekerjaan dengan kehidupan keluarga. Jika isomorfisme menggambarkan suatu hubungan yang bersifat positif antara pekerjaan dan keluarga, ada juga suatu hubungan lain yang disebut minimal relationship dan negative relationship antara keluarga dengan pekerjaan yang membentuk suatu pola heteromorfisme. Minimal relationship atau neutral relationship di antara keluarga dan pekerjaan terjadi jika di dalam keluarga peranan ayah dalam pekerjaannya tidak berhubungan dengan usaha keluarganya untuk membentuk gaya hidup tertentu. Pekerjaan dengan waktu jam kerja yang teratur; tanpa adanya suatu efek tertentu baik secara fisik maupun psikologis terhadap si pekerja, dan tidak menyita waktu luangnya adalah suatu kasus yang termasuk ke dalam neutral relationship. Gambaran mengenai ketiga pola hubungan antara pekerjaan dengan lingkungan keluarga, yaitu ekstensi, netralitas, dan oposisi.

h. Industri dan Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja

Terdapat beberapa faktor yang mendorong peningkatan jumlah pekerja wanita yang sudah menikah mungkin adalah kesempatan, kapasitas dan motivasi. Berkaitan dengan "kesempatan" terdapat lima sub faktor, yakni :

- 1) Kekurangan tenaga kerja. Selama beberapa waktu pasca PD II, terdapat kekurangan tenaga kerja dalam jumlah besar dan dipersulit lagi oleh lamanya masa pendidikan untuk anak-anak muda serta meningkatnya jumlah tenaga kerja

asing menghadapi masa pensiun. Menyadari hal ini, perusahaan terpaksa memberikan kesempatan luas bagi para wanita yang sudah menikah untuk bekerja.

- 2) Perubahan di dalam struktur pekerjaan. Meningkatnya perdagangan barang-barang konsumsi memberikan pengaruh besar terhadap sistem perdagangan eceran yang bagian terbesar pekerjaannya adalah kaum wanita. Para pekerja bidang administrasi serta bidang kesejahteraan untuk pelayanan sosial juga didominasi oleh kaum wanita.
- 3) Berubahnya pandangan masyarakat terhadap wanita yang bekerja. Kehadiran tenaga kerja wanita yang semakin membesar di perusahaan, termasuk wanita yang sudah menikah, dan adanya gerakan emansipasi telah berhasil mendobrak nilai-nilai tradisional yang mencela kehadiran wanita dalam dunia industri dan membatasi gerak-gerik wanita sebatas rumahnya. Tetapi tradisi ini masih berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan kasar, misalnya pekerjaan di sektor pertambangan.
- 4) Hilangnya diskriminasi. Pada tahun 1975 diberlakukan undang-undang yang melarang pihak perusahaan melakukan diskriminasi terhadap pekerja wanita termasuk wanita yang sudah menikah.
- 5) Perubahan dalam industri. Untuk lebih menarik kaum wanita yang sudah menikah, beberapa perusahaan telah membentuk suatu special shifts (regu kerja khusus). Misalnya, jam kerja wanita yang sudah menikah ditentukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka. Selain itu diperkenalkan juga mesin-mesin baru yang lebih ringan dan lebih mudah ditangani.

Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah dan istri yang mengurus rumah tangga. Tetapi kini, dengan tumbuhnya kesempatan bagi wanita bersuami untuk bekerja, pola kekeluargaan segera berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir. Dualisme karir terjadi bila suami maupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersama pula (Rapoport and Rapoport), 1976, hal 198). Di dalam hubungannya dengan posisi masing-masing, setiap pasangan suami istri memiliki cara yang berbeda di dalam mengatur peranannya dalam pekerjaan dan

rumahtangga. Wanita yang bekerja seacara part timer umumnya menganggap bahwa pekerjaan hanyalah sekedar hobi dan hanya menduduki prioritas kedua di bawah kepentingan keluarga. Tetapi dalam keluarga dualisme karir egalitarian, suami-istri bekerja tidak hanya sekedar mencari nafkah tetapi juga dalam persaingan untuk mendapatkan posisi yang sama dalam pengambilan keputusan serta berbagai aktivitas dalam keluarga (Rapoport 1976, hal 286-296). Di dalam hubungan ini terdapat berbagai permasalahan sebagai berikut :

- i. *Over-load* (beban berlebih-lebihan). Kedua suami-istri dibebani terlalu banyak tanggung jawab. Pembantu rumahtangga bukanlah merupakan suatu jawaban, sebab kehadirannya malahan sering menimbulkan suatu ketegangan baru dalam kehidupan keluarga.
- ii. Tidak adanya sanksi lingkungan. Mungkin seorang istri masuk ke dalam suatu pekerjaan dimana istrinya tidak diterima secara keseluruhan, atau menjadi subyek kritik, karena mengabaikan anak-anaknya.
- iii. Identitas pribadi dan harga diri. Baik suami maupun istri harus mampu mengatasi kritik-kritik yang didasarkan pada tradisi pemisahan peranan berdasarkan jenis kelamin.
- iv. Dilema hubungan sosial. Hubungan antara keluarga dengan tetangga menjadi renggang, karena baik suami maupun istri masing-masing sibuk dengan pekerjaan di luar rumahnya.
- v. Konflik peranan ganda. Terdapat konflik baik bagi suami maupun istri diantara kepentingan perusahaan.

h. Stratifikasi Sosial dan Perbedaan Status Masyarakat Industri

1. Stratifikasi Sosial Masyarakat Industri

Stratifikasi sosial mengacu pada pembagian para anggota masyarakat ke dalam tingkatan atau strata yang berkaitan dengan sikap dan karakteristik masing-masing anggota atau kelompok (Schneider, 1969, hal 148). Stratifikasi bukanlah suatu sub sistem dalam masyarakat, lain halnya dengan ekonomi, pendidikan atau keluarga yang merupakan sub-sistem masyarakat. Stratifikasi adalah suatu aspek umum dari struktur dalam sistem sosial yang kompleks. Dalam bab ini

akan dibahas masalah hubungan antara stratifikasi sosial dalam berbagai bentuk di dalam industri dan masyarakat luas.

Stratifikasi sosial dalam masyarakat industri modern, memiliki dua bentuk utama, yaitu: kelas dan status. Bentuk-bentuk lain dari stratifikasi sosial seperti kekayaan dan kasta tidak perlu di bahas dalam buku ini. Ada banyak literatur yang kontroversial yang membahas masalah yang berhubungan dengan status dan kelas sosial (Bottomore, 1965). "Kelas" umumnya digunakan untuk menunjukkan pembagian di dalam masyarakat yang didasarkan atas posisi ekonomi dalam masyarakat, tanpa memperhatikan apakah mereka menyadari posisinya itu atau tidak. "Status sosial" tidak menggambarkan pembagian posisi dalam masyarakat, tetapi menunjukkan tingkat posisi seseorang atau kelompok yang ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya di dalam masyarakat. Secara historis, konsep kelas merupakan bagian terpenting dalam teori Karl Marx tentang masyarakat, yang menekankan perlunya perjuangan kelas, yaitu perjuangan si miskin melawan si kaya dalam usaha untuk menguasai sumber-sumber produksi. Sementara itu Marx Weber lebih menunjukkan perhatiannya terhadap tipe lain dari stratifikasi yang berasal dari pengakuan terhadap suatu status yang memungkinkan mematahkan struktur kelas.

Kaitan antara industri dan stratifikasi berdasarkan status semakin lama semakin kabur, terutama disebabkan semakin luasnya ruang lingkup hal-hal yang berkaitan dengan istilah status. Seandainya status diukur dengan suatu nilai yang spesifik, baik yang berdampak positif, atau negatif, yaitu suatu nilai kehormatan diri, ia bisa dinyatakan sebagai suatu bentuk economic power dan non-economic power yang bentuknya bisa berupa kemampuan membeli berbagai jenis barang konsumtif, tingkat pendidikan, latar belakang keluarga atau keturunan dan sebagainya. Berkaitan dengan pengaruh industri terhadap keluarga, pengaruh industri terhadap sistem stratifikasi mungkin bisa bersifat langsung melalui kekuatan ekonomi serta posisi dan wewenang di dalam perusahaan, ataupun bisa juga bersifat tidak langsung, yaitu melalui status dalam perusahaan yang ditransmisikan menjadi status dalam masyarakat, termasuk melalui rantai antara situasi pasar dan gaya hidup.

Mungkin satu-satunya penelitian terbaik yang pernah dilakukan di Inggris mengenai tingkat sosial berkaitan dengan pekerjaan adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh Hall dan Jones pada tahun 1950. Mereka telah mewawancarai 1.400 orang dari 30 jenis pekerjaan dengan berbagai tingkatan. Mereka menyatakan pandangan para responden mengenai hal-hal bersifat umum. Mereka menyatakan bahwa tidak ada perbedaan ataupun pengistimewaan dalam penentuan tingkat pekerjaan yang diseleksi. Tetapi ternyata ada perbedaan dalam menentukan "rata-rata" dalam "skala pekerjaan", dimana kelihatannya rata-ratanya lebih besar untuk tingkat pekerjaan pada daerah sentral daripada daerah atas dan bawah dari skala "pekerjaan". Juga terdapat suatu kecenderungan untuk menetapkan status pekerjaan yang diseleksi sebagai variabel status pekerjaan responden yang nyatanya lebih rendah. Atau lebih jelasnya, menentukan status pekerjaan responden dengan mengimakan status pekerjaan yang diseleksi sebagai patokannya.

Kritik-kritik terhadap Penelitian-penelitian yang telah dilakukan, berbagai penelitian terhadap status jabatan atau pekerjaan telah banyak dikritik orang, karena para peneliti sebenarnya mencoba membentuk berbagai perbedaan yang secara normal sebenarnya tidak ada dalam masyarakat. Gagasan yang tersembunyi dibelakang penelitian tersebut ialah bahwa kebanyakan status pekerjaan bersifat hirarkis dan dibuatkan dalam suatu skala status: Reiss pada tahun 1961 menegaskan bahwa "skala status pekerjaan dibuat hanyalah berdasarkan penaksiran yang ternyata tidak menghasilkan suatu skala yang unidimensional untuk semua pekerjaan, dan sesungguhnya status itu merupakan suatu gejala multidimensional dan demikian pula halnya dengan indikator dari status bersifat multi-dimensional" .

Suatu alasan yang menyebabkan banyaknya kritik terhadap konsep status pekerjaan ialah bahwa dalam konsep tersebut, status dijadikan sebagai indikator tunggal, dan cara pengklasifikasian bersifat vertikal. Pada tahun 1959; Morris dan Murphy telah menggunakan istilah "situs" untuk mengklasifikasi pekerjaan secara horisontal, dimana pekerjaan diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Penggunaan dimensi situs memungkinkan kita memperkirakan efek relatif

dari suatu pekerjaan terhadap sikap dan tingkah laku seseorang.

1. Perbedaan Status Masyarakat Industri

Perbedaan di dalam penentuan suatu status boleh saja disebabkan adanya analisa terhadap sumber-sumber status yang berbeda. Misalnya, suatu pekerjaan dapat memberikan suatu status dikarenakan imbalan yang diberikannya (baik secara ekonomis ataupun psikologis), atau karena prestise, kekuasaan dan pentingnya fungsi pekerjaan tersebut dalam masyarakat (Pellegrin dan Bates, 1959). Ke empat sumber status tersebut mungkin memiliki tingkat yang sama, mungkin juga tidak, hal ini tergantung pada pandangan masyarakat terhadap pekerjaannya itu sendiri. Jika seseorang memiliki status yang tinggi dalam suatu pekerjaan, misalnya dikarenakan imbalannya yang tinggi, bisa saja merasa rendah diri bila pekerjaan tersebut memiliki nilai prestise yang rendah. Hal semacam itu menyebabkan "suatu tekanan terhadap persamaan dari atribut-atribut status".

Perusahaan-perusahaan industri, baik secara kolektif maupun individual, memiliki suatu sistem stratifikasi yang memiliki aspek-aspek internal dan eksternal. Secara internal, pekerjaan bisa dibagi berdasarkan fungsinya didalam perusahaan. Secara eksternal, kita harus meninjau stratifikasi status didalam masyarakat, dimana seseorang sering memiliki hak-hak istimewa berdasarkan jabatannya di tempat ia bekerja. Seperti halnya dalam masyarakat umum yang mengenal kelas-kelas sosial atau tingkat status, didalam perusahaan industri pun terdapat hirarki kekuasaan yang pada hakikatnya berkaitan dengan tingkat status sipemegang kekuasaan tersebut. Berbagai peranan dalam perusahaan diwujudkan dalam struktur jabatan dalam perusahaan, dimana kepala eksekutif berada pada struktur paling atas dan pekerja biasa berada dalam struktur paling bawah. Selanjutnya, perbedaan dalam tingkat struktur jabatan berkaitan dengan perbedaan dalam kondisi kerja yang didapatkan dalam masing-masing tingkat. Sebagai contoh, dari hasil survai nasional yang dilakukan di Inggris, diketahui bahwa pekerjaan biasa mendapat tekanan yang keras untuk terus hadir dalam pekerjaannya. Jika mereka mangkir maka gaji mereka akan dipotong. Tetapi jika pihak manajer mangkir maka potongan

gaji yang dilakukan sangat sedikit, padahal untuk mengoperasikan pekerjaan secara normal minimal diperlukan kehadiran 98% pekerja biasa dan hanya memerlukan minimal kehadiran 6% manager. (Field, 1974, hal 33). Dalam pemberian uang pensiunpun terdapat juga perbedaan. Sebagai contoh, para manajer mendapatkan uang pensiun sebanyak tiga kali lipat uang pensiun para pekerja biasa (Westergaard and Resler, 1976, hal 90).

Teori stratifikasi dan teori kelas sosial telah mengalami cukup banyak kemajuan (Mac Kenzie, hal 176). Kita telah mengenal bagaimana ketidaksamaan dalam bidang ekonomi diciptakan, ditegakkan dan diubah, tetapi teori tentang perbedaan-perbedaan nilai, ideologi dan pola tingkah laku antar kelas sedikit sekali dikembangkan. Sumbangan pikiran terhadap teori stratifikasi Inggris telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan teori perbedaan antar kelas. Beberapa ahli sosiologi Inggris telah memusatkan perhatiannya terhadap isu-isu konkrit mengenai perbedaan kelas ini, yaitu tentang "melimpahnya jumlah kelas pekerja" dan korelasi antar berbagai tipe situasi kelas pekerja yang berbeda-beda.

Pada tahun 1945, Davis dan Moore mengetengahkan teori mereka tentang stratifikasi. Mereka mengatakan bahwa "ada suatu kebutuhan universal untuk membentuk suatu stratifikasi dalam masyarakat". Stratifikasi muncul disebabkan oleh perbedaan posisi yang kemudian menimbulkan perbedaan tingkat fungsional dalam masyarakat. Di lain pihak, orang-orang yang berbakat dan berpendidikan relatif sedikit, sehingga masyarakat terpaksa menawarkan posisi yang lebih tinggi kepada orang-orang yang memiliki bakat dan kemampuan yang dibutuhkan agar masyarakat tersebut mampu mempertahankan eksistensinya. Dalam tahun 1948, Davis melakukan modifikasi terhadap teori-teori itu dengan menambahkan bahwa mobilitas orang-orang yang lebih berbakat dan berkemampuan lebih tinggi sering dihambat oleh latar belakang status keluarganya. Jadi kesimpulannya stratifikasi adalah suatu hal yang tidak terhindarkan.

Huaco mencoba mengabaikan teori Davis Moore dengan mengatakan bahwa teori tersebut tidak mampu menjawab berbagai kritikan yang dilancarkan terhadapnya. Dia yakin

bahwa postulat tentang "perbedaan fungsional" itu telah gagal menerangkan terjadinya stratifikasi, sebab tidak ada bukti bahwa perbedaan posisi akan menyebabkan perbedaan tingkat sumbangan untuk mempertahankan eksistensi masyarakat. Juga asumsi yang mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi akan lebih mendorong terjadinya persaingan untuk mendapatkan prestasi tidak bisa dipertahankan kebenarannya. Maka selanjutnya Huaco menerangkan teori stratifikasi berdasarkan pada tiga postulat, yaitu :

- a. Imbalan yang tidak sarna yang dikaitkan dengan perbedaan posisi adalah penyebab mobilitas individu untuk mendapatkan posisi tertentu.
- b. Eksistensi dan operasi keluarga adalah penyebab timbulnya status.
- c. Terbatasnya tenaga-tenaga bermutu menyebabkan timbulnya stratifikasi.

Sampai saat sekarang para ahli teori social action belum mengembangkan suatu teori tentang stratifikasi, walaupun sesungguhnya tidak sulit bagi mereka untuk berbuat demikian. Pembagian masyarakat kedalam beberapa strata merupakan suatu problematika. Strata didalam masyarakat maupun industri tidak berada di luar atau terpisah dari faktor situasi dalam masyarakat. Eksistensi stratifikasi dalam masyarakat terletak pada mayoritas anggotanya yang melegalisir perbedaan didalam wewenang atas kekuasaan pada setiap strata. Posisi puncak pada strata tertinggi (manajer, pemimpin dsb) tidak mungkin ada tanpa dukungan mayoritas strata paling bawah (tenaga pelaksana, bawahan dan sebagainya).

i. Industri dan Politik

Dalam arti luas, industri yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi, perusahaan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya telah sangat mempengaruhi masyarakat. Pengaruh tersebut bisa berupa nilai-nilai, pengaruh fisik terhadap masyarakat dan usaha industrial interest group untuk mempengaruhi masyarakat.

Industri memberi input kepada masyarakat sehingga membentuk sikap dan tingkahlaku yang tercermin dalam sikap dalam bekerja. Weber mengatakan bahwa dengan adanya teknologi baru, diperlukan suatu nilai yang akan

mengembangkan masyarakat menjadi masyarakat kapitalis tradisional; demikian pula jika hendak membentuk masyarakat kapitalis modern, diperlukan suatu nilai-nilai tertentu. Industri memiliki pengaruh yang menimbulkan akibat fisik di dalam masyarakat. Akibat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya industri bisa dalam berbagai bentuk yang berbeda. Bila suatu kota sangat tergantung hanya kepada satu jenis industri atau perusahaan, perkembangan industri atau perusahaan tersebut akan menentukan apakah kota tersebut akan berkembang atau hancur. Munculnya industri-industri baru dalam suatu wilayah akan memberikan pengaruh besar terhadap jumlah tenaga kerja.

Suatu cara yang lebih teoritis untuk pengaruh timbal-balik antara industri dan masyarakat ialah dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis hubungan antara industri dan masyarakat. Walaupun ada pemisahan *economic interest groups* dalam industri, seperti dalam bentuk-bentuk perdagangan, industri, pertanian, keuangan dan organisasi buruh, dalam beberapa hal kelompok tersebut dapat dianggap sebagai suatu interest group yang menyatu yang berinteraksi dengan masyarakat. Form dan Miller pada tahun sejak 1960 mengatakan bahwa ada lima jenis interaksi antara interest group tersebut dengan masyarakat yaitu :

1. *Business-dictated.*

Pihak perusahaan menentukan jam kerja karyawannya, tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap kehidupan rumah tangga, dan para karyawan harus menyesuaikan kehidupan keluarga mereka dengan kegiatan industri (ini mungkin terjadi di dalam suatu perusahaan dimana buruh tidak terorganisir, atau walaupun ada organisasi buruh, sangat lemah).

2. *Business-dominated.*

Sama seperti di atas, akan tetapi sudah ada aturan-aturan kerja yang lebih lanjut, hanya ia masih ditentukan oleh pihak manajemen. Pihak buruh hanya mempunyai hak suara yang kecil (ini terjadi jika pihak perusahaan cukup kuat dengan organisasi buruh yang agak kuat tetapi dengan kelebihan penawaran tenaga kerja).

3. *Labour-mediated.*

Pihak buruh; dalam hal ini organisasi buruh, mencoba ikut ambil bagian dalam menentukan jam kerja. Disini mulai terbentuk kerjasama antara pihak buruh dan manajemen (organisasi buruh cukup kuat, dan industri tergantung kepada tenaga ahli lokal).

4. *Equilibrium.*

Organisasi buruh cukup kuat, begitu juga pengaruh masyarakat. Pihak manajemen dalam membuat keputusan harus memperhitungkan semua akibatnya terhadap masyarakat sekitarnya.

5. *Family-mediated.*

Dalam interaksi macatn ini nilai-nilai keluarga cukup dominan (keluarga pemilik perusahaan, religitis atau co-operative communities).

Ke lima jenis interaksi dan masyarakat tersebut, dalam kenyataannya di Amerika sudah tidak berlaku, dan di Inggris sendiri, memerlukan dimodifikasi teori. Sebagai contohnya, pola business-dictated sudah sulit ditemukan di Inggris, kecuali dalam beberapa jenis perusahaan dimana buruh mempunyai motivasi mendapatkan upah yang sangat tinggi, dan perusahaan bersedia memenuhinya. Ada teori lain mengenai interaksi antara industri-masyarakat, dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu :

- e) *Structural functional*, yang meliputi penyebaran industri ke dalam berbagai sub sistem masyarakat lainnya.
- f) *Compensation*, dimana industri yang dianggap sebagai sumber sosiabilitas tidak mungkin ada di dalam masyarakat lokal.
- g) *Welfare* (kesejahteraan), suatu pendekatan terhadap peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat dimana pihak industri mengambil bagian sebagai partner masyarakat.
- h) *Power*. industri menjadi sumber kekuatan yang mempengaruhi masyarakat.

Industri bekerja di dalam suatu lingkungan sosial dan memiliki hubungan dengan kekuatan yang berada dalam lingkungan tersebut. Berbagai bentuk pengaruh timbal balik yang terjadi antara industri dan kehidupan politik dibagi dalam dua jenis: pertama, pengaruh kelompok terorganisir, dan kedua pengaruh peranan individu. Dalam rangka mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan daerah, wakil-

wakil industrial interest akan bergabung ke dalam suatu organisasi "pressure group" dan pada saat bersamaan personal-personal pihak industri sendiri sering ikut langsung memegang peranan politik dengan tujuan memajukan kepentingan ekonomi mereka.

Kemampuan pihak perusahaan untuk mempengaruhi kebijaksanaan politik pemerintah dengan melakukan partisipasi langsung di dalam pemerintahan adalah suatu aspek kontrol dari jalinan kelompok elite dalam industri dan dalam pemerintahan. Bekas-bekas menteri, baik yang tadinya duduk dalam pemerintahan Partai Buruh, maupun Partai Konservatif, sering diundang untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam perusahaan. Hal tersebut sangat membantu pihak perusahaan dalam mempengaruhi pemerintahan karena biasanya mereka memiliki relasi yang cukup banyak dalam pemerintahan. Peranan pemerintah di dalam bidang industri meliputi pengontrol, pengatur, promotor, pengusaha dan perencana (Grove, 1962). Cara-cara langsung dari pemerintah untuk mengontrol industri ialah melalui kebijaksanaan anggaran, pajak, kontrol jual-beli, pengontrolan terhadap modal publik dan kontrol terhadap distribusi produk maupun penyebaran industri.

Sebagai pengusaha pemerintah secara langsung berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui empat cara yaitu:

- a. Pemerintah sebagai pembeli terbesar dari barang-barang dan jasa untuk menjalankan roda pemerintahannya.
- b. Pemerintah sebagai majikan; kurang lebih 1 juta orang penduduk Inggris bekerja pada pemerintah, dari seluruh pekerja di Inggris yang berjumlah 24 juta orang
- c. Pemerintah memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis dengan melalui berbagai lembaga keuangan yang dimilikinya, misalkan bank, tetapi tidak ikut langsung dalam kegiatan manajemennya.
- d. Pemerintah sebagai pengusaha langsung dengan memproduksi barang-barang dan menjualnya secara terbatas untuk kepentingan sendiri.

Terakhir sebagai perencana, pemerintah memperluas peranannya sebagai pengontrol dengan mengarahkan dan membimbing kegiatan ekonomi dengan cara melakukan

desentralisasi. Kesulitan ekonomi, memperbesar peranan pemerintah. di dalam perencanaan aktivitas dan pengembangan industri. Sejumlah penelitian menemukan bahwa ukuran perusahaan dan tingkat pengetahuan majikan tentang pribadi para pekerjanya merupakan faktor yang mempengaruhi sikap dan tingkahlaku politik para pekerjanya. Nordlinger (1967) menyatakan bahwa walaupun suatu perusahaan besar cenderung ke arah kiri (Partai Konservatif), tidak berarti bahwa para pekerjanya akan memiliki kecenderungan yang sama, karena biasanya hubungan antara pekerja dan majikan tidak begitu akrab. Ingham (1969) membuat suatu kesimpulan sama dengan Nordlinger. Dia melakukan penelitiannya terhadap para pekerja Bradford, dan hasil penelitiannya diungkapkan sebagai "Suatu kekuatan buruh yang berorientasi kiri akanmendorongnya mengarah pada intensifikasi nilai yang akan menyebabkan peranan dan aktivitas masing pihak terlihat secara lebih jelas".

j. Organisasi Di era Industrialisasi

Organisasi adalah suatu karakteristik penting dalam masyarakat industri dan perkotaan. Organisasi sosial adalah suatu susunan yang sangat luas dari berbagai bentuk hubungan dan proses, jadi struktur sosial berada dalam semua tingkat struktur sosial. Menurut Blau dan Scoot (1963) telah mengajukan suatu pendapat bahwa organisasi adalah suatu kumpulan individu yang batasannya jelas, aturan yang bersifat normatif, jenjang kekuasaan sistem komunikasi dan sistem keanggotaan yang terorganisasi. Fox berpendapat bahwa minimal organisasi terdiri dari sistem peranan sanksi dan komunikasi dan intisari dari organisasi adalah keteraturan, standarisasi dan perilaku yang berulang-ulang.

Tantangan terhadap organisasi muncul dari dua sumber, pertama dari para penulis yang mengira bahwa suatu bahaya besar akibat kelalaian terhadap kontrol, power dan konflik dalam organisasi. Tantangan kedua terhadap pendekatan sistem strukturalis ini berasal dari suatu tinjauan interaksionis yaitu apakah organisasi itu nyata atau apakah ia adalah suatu yang berinteraksi secara bersama-sama lebih daipada sekedar interaksi antar individu. Sosiologi bukanlah satu-satunya ilmu yang berkaitan dengan masalah organisasi. banyak disiplin lain

yang membicarakan masalah organisasi dengan menetengahkan modelnya masing-masing.

Pugh (1971) mengelompokkan enam model utama yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda yang secara garis besarnya akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Teori Ekonomi.** Teori ini menetengahkan suatu model organisasi yang mempunyai ciri khas dalam tujuannya yaitu keuntungan maksimal dan kerugian minimal. dalam organisasi ini, manusia dipandang sebagai pihak konsumen yang dimotifisir oleh perhitungan rasional dan ekonomis.
- b. Teori Teknologi.** Para ahli teknik adalah kelompok kedua yang mengklaim bahwa teknologi adalah variabel utama dari kondisi internal struktur organisasi beserta kondisi lingkungannya.
- c. Teori individu.** Teori ini memfokuskan perhatiannya pada masalah sikap, tingkah laku dan ciri-ciri pribadi individu yang ada dalam organisasi. teori ini lebih banyak berlandaskan pada teori klasik dari March dan Simon (1958) yang membuat suatu kerangka kerja yang menekankan peranan individu. mereka mengatakan bahwa organisasi dapat didefinisikan dan dipelajari melalui proses-proses pengambilan keputusan secara individual dalam organisasi, walaupun keputusan tersebut mungkin mungkin dihambat oleh adanya hierarki dan pembagian tugas.
- d. Teori kelompok.** Teori ini berdasarkan atas penelitian Elton Mayo dan eksperimen Hawthorne. Teori ini sangat mementingkan peranan pola kepemimpinan dan norma-norma yang berlaku dan menyatakan bahwa kendala bagi organisasi dan pengembangan orientasi individu hanya dapat dimengerti jika buruh dilibatkan dalam kegiatan kerja.
- e. Teori Struktural.** Menurut teori ini organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang memiliki keteraturan dalam hierarki wewenang, pembagian tugas yang dan koordinasi fungsional. Model-model organisasi yang dikembangkan oleh Burns dan Stalkers pada tahun 1961, serta oleh Pugh pada tahun 1968 termasuk kedalam tradisi struktural.

f. Teori Manajemen. Teori ini dijelaskan oleh Fayol 1949. titik berat teori ini adalah usaha untuk memaksimumkan produktifitas. teori ini menganggap hierarki wewenang sebagai hal yang wajar dan memperlakukan manusia sebagai mesin.

Cara lain yang disebut teori tipologi, yang agak berbeda dengan cara diatas adalah, ialah teori yang lebih dulu mencoba mengidentifikasikan unsur-unsur yang dianggap penting, kemudian baru membuat modelnya. Perbedaannya dengan cara pertama, ialah sebelum membuat suatu model, cara pertama memandang permasalahan secara keseluruhan, sedangkan cara kedua lebih mengutamakan semua unsure yang dianggap cukup penting.

Beberapa tipologi yang terkenal ialah klasifikasi organisasi yang didasarkan atas tujuan. Tipologi yang dikembangkan oleh Tallcot Parsons pada tahun 1960 itu ialah:

1. *Production Organization* (organisasi produksi), yaitu: suatu organisasi yang berusaha memproduksi barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan sistem sosial yang mengelilinginya. contohnya perusahaan-perusahaan perdagangan, industri dan sebagainya.
2. *Political Goal Organization*. Yaitu: organisasi tipe ini memusatkan semua aktifitasnya untuk mencapai tujuan politik. Contoh partai-partai politik
3. *Integrative Organization*. Yaitu: Suatu organisasi yang baik bentuk maupun motifnya terintegrasi dan terarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. organisasi ini berusaha mengurangi bahkan menghilangkan segala macam konflik yang terjadi. Contoh angkatan bersenjata
4. *Educational dan Cultural Organization*. Yaitu: organisasi ini bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan, contoh : sekolah-sekolah dan perkumpulan kesenian.

Klasifikasi organisasi yang didasarkan atas perbedaan tujuan telah menimbulkan masalah serius secara konsepsi maupun empiris. Etzioni, Blau dan Scott: telah mencoba membuat suatu klasifikasi organisasi yang didasarkan atas bentuk hubungan antara organisasi dengan para anggotanya.

Bentuk hubungan ini dikenal dengan *Compliance Relationship*. Bentuk-bentuk *Compliance Relationship* bisa berupa:

- a. *Coercive*, dimana pihak penguasa berusaha memaksa para anggotanya untuk perbuatan-perbuatan tertentu, Contohnya : organisasi penjara.
- b. *Remunerative*, dimana pihak penguasa memperhitungkan keterlibatan kalkulatif misalnya perusahaan dan industri.
- c. *Normative*, pihak penguasa berusaha mengarahkan para anggotanya agar mengikuti suatu norma-norma atau nilai tertentu. Contoh organisasi keagamaan.

Beberapa teori yang diajukan oleh Etzioni dan kawan-kawan menunjukkan suatu kecenderungan akan adanya penyusuaian antara tipe otoritas (*relational variable*) dengan orientasi partisipannya (*Psychological variable*). Hal ini terjadi karena tekanan-tekanan internal dan eksternal terhadap organisasi sangat efektif. Blau dan Scott, (1963) menggunakan suatu prinsip diferensiasi yaitu “ siapa yang menggunakan” dan “siapa yang mendapat keuntungan“. mereka mengusulkan bahwa lapisan-lapisan masyarakat yang mengkonsumsi output organisasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi tipe-tipe organisasi dan karakter partisipasi para anggotanya serta berbagai problema yang dihadapi organisasi. Dengan prinsip-prinsip diatas mereka mengklasifikasikan organisasi tersebut menjadi:

1. *Manual Benefit Organization*. Yaitu suatu organisasi dimana semua anggotanya memberikan keuntungan terhadap organisasi tersebut, Contoh: Lion Club, yayasan-yayasan
2. *Owner benefit Organization*. Yitu Tipe Organisasi ini kira-kira sama dengan tipe organisasi normative
3. *Common Weal Organization* (Organisasi Kemasyarakatan). Yaitu suatu tipe organisasi yang penyangganya adalah masyarakat umum yaitu, Contoh: PMI, organisasi kampung seperti RT,RW dan sebagainya.

Suatu kesimpulan umum mengenai teori-teori yang diajukan oleh Etzioni, Blau dan Scott ialah bahwa organisasi bersifat kompleks dan tidak mudah mengklasifikasikan hanya dengan satu kriteria atau hanya dala satu dimensi. Organisasi berdiri diatas sejumlah faktor internal dan eksternal yang memberikan pengaruh dan tekanan dalam berbagai tingkat

ukuran. untuk negosiasi hal ini Child mengajukan usul untuk mempertimbangkan peranan Holder Of Power yang menjadi media dimana variable-variable kontekstual dengan pola-pola strukturnya. Dia juga mengatakan bahwa pemegang kekuasaan mampu member corak terhadap suatu struktur organisasi dengan kekuasaannya, sehingga dengan mempelajari karakteristiknya kita akan mengetahui dan mempelajari suatu struktur organisasi.

k. Agama di Era Industri

Ada *common sense* mengenai masa depan agama dalam suatu masyarakat industrial, sering diungkapkan dalam percakapan sehari-hari bahwa industrialisasi dan modernisasi merupakan ancaman terhadap religiusitas. Meskipun penilaian itu sering disertai dengan banyak contoh kasus, namun tidak berarti ia mengandung kebenaran yang bersifat mutlak dan menyeluruh. Memang benar bahwa bentuk-bentuk perubahan sosial yang menyertai proses industrialisasi telah memengaruhi secara negatif kehidupan keagamaan, misalnya dalam masyarakat industri, peranan pengelompokan sekunder semakin menggeser pengelompokan primer. Adapun yang termasuk pengelompokan sekunder ialah unit dan organisasi kerja atau produksi, sedangkan kelompok primer ialah keluarga, suku, agama, dan sebagainya. Sifat kelompok sekunder adalah *gesellschaft*, sedangkan yang primer adalah *gemeinschaft*. Dengan perkataan lain, formalitas dan *rasionalitas* semakin menggeser keakraban, kekeluargaan, dan afektivitas. Karena itu melalui berbagai sebab, peranan orangtua, khususnya ayah, sebagai agen sosialis anak, akan semakin berkurang untuk digantikan oleh bentuk-bentuk hubungan sosial yang lain, misalnya sekolah dan pergaulan. Hal ini tentu mempunyai pengaruh dalam bentuk pengenduran pola-pola religiusitas tertentu.

Dalam sebuah pergeseran religiusitas dalam masyarakat industrial terutama disebabkan oleh semakin dominannya peranan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, baik sosial maupun lainnya, adalah bentuk kesadaran seseorang tentang lingkungannya, baik yang jauh maupun yang dekat, serta pengetahuan atau penguasaannya atas masalah-masalah yang ada. Hal itu berarti paling tidak semakin sempitnya daerah

kegaiban atau misteri, padahal tindakan keagamaan dilakukan karena pengakuan adanya kenyataan supraempiris atau gaib dan misteri. Berkaitan dengan konsep kegaiban atau misteri itu ialah perasaan tidak berdaya manusia menghadapi kenyataan-kenyataan yang diperkirakan tidak akan mampu dimengerti. Pada masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai ilmu pengetahuan, suatu terra incognita akan menyuguhkan tantangan untuk diselidiki dan dibongkar rahasianya. Tetapi, pada masyarakat lain, ketidakberdayaan manusia menghadapi alam telah melahirkan konsep dan tindakan yang bersifat religius magis. Memuja suatu objek alam yang dianggap memiliki rahasia dan keagungan dapat dilihat sebagai lompatan jauh seorang manusia dalam usahanya menundukkan objek tersebut untuk kepentingan dirinya. Sedangkan jalan yang wajar (bukan lompatan jauh) ialah meneliti, menyelidiki, dan mempelajari objek tersebut.

Begitu ketatnya persaingan di era industri, telah terjadi peralihan faham masyarakat mengenai agama, agama bagi mereka yang bergelut dengan industri adalah uang. Faham seperti ini menjadi sebuah realitas yang menjadi kartakteristik masyarakat industri. Atau agama masyarakat industri adalah tidak beragama, karena ada relitas juatru mengenyampingkan agama. Proses industrialisasi akan membawa serta akibat menurunnya religio-magisme yang, untuk sebagian masyarakat, merupakan religiusitas itu sendiri. Karena itu, bagi mereka ini, industrialisasi memerosotkan religiusitas. Tetapi, bagi masyarakat lain, industrialisasi dan modernisasi mungkin justru menopang dan meningkatkan religiusitas. Seperti telah diungkapkan mengenai empat dimensi religiusitas, bahwa religiusitas yang paling murni dan sejati ialah yang berdimensi budaya intrinsik, atau cultural consumatory, yaitu sikap keagamaan yang memandang kepercayaan atau iman sebagai tujuan pada dirinya sendiri, yang menimbulkan perasaan bahagia karena nilai intrinsiknya. Religiusitas dalam dimensi ini tidak mengharapkan kegunaan di luar imannya sendiri. Dimensi religiusitas inilah yang agaknya akan semakin diperkuat oleh adanya pola-pola hubungan masyarakat industrial. Karena hal-hal yang bernilai instrumental telah dengan melimpah disediakan oleh struktur dan pola masyarakat industrial itu, maka agama menjadi

semakin murni, dalam arti bahwa keagamaan tidak lagi banyak mengandung nilai instrumental. (Contoh sederhana ialah, karena “instrumen” untuk memberantas hama tanaman dalam suatu masyarakat industrial telah disediakan oleh ilmu dan teknologi misalnya dalam bentuk insek-tisida maka orang akan semakin berkurang mendekati Tuhan misalnya dalam bentuk doa dengan tujuan agar tanamannya di sawah tidak terkena hama; ia mungkin akan berpindah dari religiusitas berdimensi cultural instrumental ke cultural consumatory, di mana ia melihat ibadah sebagai tujuan pada dirinya sendiri yang menjadi sumber kebahagiaan). Religiusitas yang tidak terancam oleh proses industrialisasi dan modernisasi, malahan memperoleh dukungan dan pengukuhan, merupakan religiusitas yang bebas dari magisme, yaitu naturalisasi tindakan-tindakan manusia (physiomorphism of man). Tetapi syarat lainnya ialah religiusitas itu harus bersandar kepada konsep wujud supraempiris yang tidak akan bergeser menjadi empiris. Dengan perkataan lain, sumber kepercayaan dan nilai keagamaannya harus dapat dijamin bahwa ia tidak akan dapat dimengerti manusia dan diketahui rahasia-rahasianya. Pertanyaannya, apakah ada kenyataan serupa itu? Seorang penganut falsafah materialisme (komunisme) akan mengatakan tidak. Sebab dengan kecerdasannya manusia, menurut falsafah itu, selalu mempunyai potensi untuk memahami dan membuka kenyataan apa saja dalam alam raya ini. Suatu objek yang dahulu dianggap agung dan penuh misteri atau kegaiban sehingga patut dipuja, misalnya matahari, kini sudah semakin dipahami manusia dan terbuka rahasia-rahasianya.

Matahari telah berhenti sebagai kenyataan supraempiris, dan hanya menjadi objek empiris biasa, sehingga tidak pantas lagi manusia menyembahnya. Maka, bagi seseorang yang religiusitasnya berkaitan dengan konsep kegaiban matahari, proses industrialisasi dan modernisasi benar-benar telah menghapuskan sama sekali religiusitas itu. Tentu ,teori komunis tersbut masih harus ditunggu bukti kebenarannya sampai dengan lengkapnya pengalaman manusia dan pengetahuannya yang meliputi segala wujud di jagat raya ini. Tetapi, di sinilah letak paradoksnya: justru suatu kenyataan disebut supraempiris karena ia tidak mungkin dibuktikan ada-

tidaknya melalui prosedur dan norma empiris. Manifestasi tunggal adanya kenyataan supraempiris itu hanya dirasakan oleh mereka yang meyakini dan menerima dengan sungguh-sungguh ajaran tentang adanya kenyataan itu. Hal ini membawa kita ke ungkapan sederhana, namun mungkin sekali mengandung kebenaran yang bersifat prinsipil, bahwa ada atau tidak adanya religiusitas, baik di masyarakat industrial maupun lainnya, tergantung kepada kegiatan penanaman iman oleh masyarakat bersangkutan, yaitu pendidikan keagamaan pada umumnya.

BAB XIII

STRATIFIKASI SOSIAL KONFLIK DAN MOBILITAS SOSIAL MASYARAKAT INDUSTRI

Pada tiga belas tentang Stratifikasi Sosial, Konflik dan Mobilitas Sosial Masyarakat Industri, akan di bahas: Individu dan Masyarakat Industri, Struktur Sosial Masyarakat Industri, Varian-varian Stratifikasi Sosial Masyarakat Industri, Konflik Sosial Masyarakat Industri, dan Mobilitas Sosial Masyarakat Industri.

F. Individu dan Masyarakat Industri

Dalam masyarakat industri biasanya terdapat spesialisasi pekerjaan. Terbentuknya spesialisasi pekerjaan tersebut disebabkan oleh semakin kompleks dan rumitnya bidang-bidang pekerjaan dalam masyarakat industri. Proses perubahan yang terjadi dalam diferensiasi pekerjaan ini mengakibatkan terjadinya hierarki prestise dan penghasilan yang kemudian menimbulkan adanya stratifikasi dalam masyarakat yang biasanya berbentuk piramida. Stratifikasi sosial inilah yang menentukan strata anggota masyarakat yang ditentukan berdasarkan sikap dan karakteristik masing-masing anggota kelompok. Distribusi terjadi karena dalam masyarakat terdapat barang-barang yang bernilai/berharga namun jumlahnya langka dan harus dialokasikan kepada anggota-anggota masyarakat. Model dari proses distribusi dalam masyarakat, terutama masyarakat industri adalah stratifikasi sosial.

Mobilitas sosial merupakan perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Studi tentang mobilitas sosial bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu struktur sosial yang ada di dalam masyarakat terbuka atau memberikan peluang yang sama pada seluruh anggotanya untuk meningkatkan posisi sosialnya. Di sisi lain, studi tentang mobilitas sosial juga merupakan suatu studi untuk mengetahui berbagai sebab, pola dan konsekuensi perubahan sosial yang terjadi pada individu maupun masyarakat. Dalam analisis mobilitas sosial perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: beberapa dimensi dari mobilitas sosial, yaitu rangking okupasi, kelas, rangking konsumsi, dan rangking kekuasaan, penyebab dari mobilitas

sosial, dan konsekuensi politis dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial vertikal diukur berdasarkan dua hal, yaitu menurut dimensi keluarga dan menurut dimensi individu. Menurut dimensi keluarga, mobilitas disebut sebagai mobilitas antargenerasi (*intergenerational mobility*), sedangkan menurut dimensi individu, mobilitas disebut sebagai mobilitas intragenerasi (*intragenerational mobility*). Pengukuran mobilitas antargenerasi adalah dengan membandingkan posisi status individu dengan posisi status ayahnya, dan mungkin juga kakeknya. Sedangkan dalam mobilitas intergenerasi, yang diukur adalah membandingkan posisi status individu dalam satu rentang kariernya. Mobilitas sosial horisontal merupakan gerak perpindahan individu dari satu kedudukan ke kedudukan sosial lainnya yang tingkatannya sederajat. Misalnya adalah perpindahan dalam satu rentang hierarki.

Manusia pada dasarnya berjuang untuk mempertahankan dirinya sendiri. Dan perjuangan manusia dalam mempertahankan diri telah menjadi budaya manusia. Kehidupan sosial, selain untuk mempertahankan spesies juga untuk memaksimalkan kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kerja sama dengan individu lain. Dengan kerja sama, manusia dapat memuaskan kebutuhan dan keinginannya dengan lebih efisien. Di samping manusia melakukan kerja sama tersebut, manusia tetap mencari cara untuk memaksimalkan kepuasannya. Untuk memaksimalkan kepuasannya ini hanya dapat diperoleh jika kegiatan tersebut menempati suatu sistem kerangka kerja dan hak-hak dasar dari tiap-tiap individu dijamin.

Sifat alam masyarakat pada tradisi konservatif seringkali dibandingkan dengan organisme biologis. Sebagaimana halnya organisme sebagai suatu sistem keberlangsungan hidup dan keberadaannya tercapai melalui pembagian kerja sama dari bagian-bagian yang kecil. Untuk itu teori konservatif modern memberi nama “sistem sosial” Dalam melihat masyarakat manusia, terdapat perbedaan pandangan yaitu antara teori fungsional, teori konflik dan teori radikal. Teori fungsional memposisikan karakter sistemik dari masyarakat manusia dan kemudian menjelaskan tindakan pada bagian-bagian dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan dan pencapaian-

pencapaian yang diharapkan. Sebaliknya teori konflik berkarakter antisistemik. Teori ini menekankan bahwa konflik dan perjuangan secara konstan mengancam struktur masyarakat. Sedangkan teori radikal cenderung memandang masyarakat manusia berada di tengah-tengah, di mana konflik kehidupan berlangsung.

Kepentingan individu berbeda dengan kepentingan masyarakat. Di mana kepentingan masing-masing individu berbeda-beda. Manusia tidak mempunyai tujuan yang sama. Meskipun ada kesamaan tujuan seringkali tidak ditempatkan pada tingkatan yang sama. Ini dikarenakan masing-masing individu secara tetap harus memilih di antara tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Namun tujuan yang paling dasar dari individu adalah usaha mempertahankan status dan prestise, menciptakan kenyamanan, keselamatan di dunia dan akhirat. Kepentingan masyarakat berbeda dengan kepentingan individu. Karena ketika menjadi anggota masyarakat kita diharuskan untuk mendefinisikan sebagai tujuan masyarakat bukan sebagai tujuan individu lagi. Dalam mendefinisikan tersebut tanpa melihat lagi atau memandang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bagi anggota-anggota individu bahkan sebagian mayoritas. Dan seringkali kelas yang dominan mempunyai pengaruh yang sangat besar, di mana mereka memiliki kekuatan untuk menentukan arah terkoordinasi dari masyarakat. Sehingga tujuan-tujuan masyarakat adalah tujuan-tujuan dari kelas yang dominan tersebut.

G. Struktur Sosial Masyarakat Industri

Struktur sosial merupakan susunan atau konfigurasi dari unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat, yaitu kelompok, kelas sosial, nilai dan norma sosial, dan lembaga sosial. Struktur sosial merupakan ruang abstrak dalam masyarakat, sebagaimana ruang geografi yang kita kenal dan lebih konkrit. Kalau dalam ruang geografi kita dapat mempunyai alamat geografik (titik posisi atau lokasi kita berada). Tentu akan tergantung pada parameter apa yang kita gunakan, apakah nilai dan norma, kelompok, status atau kelas sosial, ataukah lembaga sosial. Apabila unsur nilai dan norma kita gunakan untuk mengetahui posisi atau alamat sosial kita, maka apakah kita termasuk orang kebanyakan (*normal*), orang

yang dijadikan panutan (super ordinat), ataukah orang menyimpang (*deviant*). Apabila menggunakan status atau kelas, maka apakah kita berada pada kelas atas, menengah atau bawah. Lembaga-lembaga termapat kita beraktivitas yakni Pendidikan, keluarga, politik, ekonomi, hokum, ataukah agama.

Struktur sosial identik dengan struktur peluang hidup (*life chance*), semakin tinggi posisi dalam struktur sosial, semakin baik peluang hidupnya. Struktur sosial merupakan fakta sosial, yaitu cara bertindak, berfikir, dan berperasaan yang berada diluar individu tetapi mengikat. Sehingga, kelas sosial tertentu identik dengan cara hidup tertentu. Kelas sosial bukanlah sekedar kumpulan dari orang-orang yang pendidikan atau penghasilannya relative sama, tetapi lebih merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki cara atau gaya hidup yang relative sama.

Paramater struktur sosial, terdapat dua macam parameter yang dapat digunakan untuk menganalisis struktur sosial, yaitu:

1. Parameter Graduated/berjenjang, meliputi antara lain: kekuasaan, keturunan/kasta, tingkat pendidikan, kekayaan, usia, dst., dan
2. paramater Nominal/tidak berjenjang, meliputi antara lain: sukubangsa, ras, golongan/kelompok, jenis kelamin, agama, dan seterusnya.

Konfigurasi atau pemilahan struktur sosial berdasarkan parameter-parameter graduated disebut stratifikasi sosial (diferensiasi rank/tingkatan). Sedangkan, konfigurasi atau pemilahan struktur sosial berdasarkan parameter nominal disebut diferensiasi sosial (diferensiasi fungsi, dan custom/adat). Status, kedudukan, atau posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial tidak bersifat statis atau tetap, melainkan dapat mengalami perubahan atau perpindahan. Perpindahan posisi dalam struktur sosial yang dialami oleh individu ataupun kelompok dalam struktur sosial disebut mobilitas sosial. Struktur sosial masyarakat Industrti merupakan dasar utama dalam stratifikasi social pada masyarakat industry adalah kemampuan ekonomi (kekayaan). Kekuasaan sangat ditentukan oleh penguasaan iptek, keterampilan yang professional, jenis pekerjaan yang ditekunii, dan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki.

Berdasarkan keahlian dalam pekerjaan, dapat disusun stratifikasi social sebagai berikut.

1. Golongan elite, meliputi orang-orang kaya dan orang-orang yang menempati kedudukan/pekerjaan yang oleh masyarakat sangat dinilai/dihargai yaitu pengusaha kolongmerat, pejabat tinggi Negara , serta para pemimpin tertinggi parpol dan ormas.
2. Golongan Profesional, yaitu para ahli dalam bidangnya masing-masing, berpendidikan setaraf sarjana (berijazah/bergelar).
3. Golongan semiprofessional meliputi para pegawai kantor, pedagang, teknisi yang berpendidikan menengah dan setaraf diploma.
4. Golongan *skill* (tenaga terampil), Meliputi orang-orang yang mempunyai keterampilan mekanis, teknisi, dan kapster.
5. Golongan *semiskill* (semi terampil), missal burh pabrik, pelayan toko dan pelayan restoran.
6. Golongan *unskill* (tenaga kerja yang tidak terlatih/tidak terdidik), misalnya pembantu rumah tangga, tukang kebun, pasukan kuning (pegawai kebersihan jalan), pedagang asongan.

Hal yang menjadi dasar utama dalam stratifikasi social pada masyarakat industri adalah kemamuan ekonomi (kekayaan). Kekuasaan sangat ditentukan oleh penguasaan iptek, keterampilan yang professional, jenis pekerjaan yang ditekuni, dan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki.

H. Varian-varian Dalam Masyarakat Industri

Stratifikasi sosial merupakan konfigurasi atau pemilahan struktur sosial menggunakan parameter *graduated*/berjenjang. Hasilnya adalah dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial. Kriteria yang digunakan dapat berupa kriteria (1) sosial, (2) ekonomi, dan (3) politik. Kriteria sosial meliputi: pendidikan, profesi atau pekerjaan, dan keturunan atau keanggotaan dalam kasta dan kebangsawanan. Kriteria ekonomi meliputi pendapatan/penghasilan dan pemilikan/kekayaan. Kriteria politik meliputi kekuasaan.

Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial, Menurut Weber, para anggota masyarakat dapat dipilah secara vertikal berdasarkan atas ukuran-ukuran kehormatan, sehingga ada

orang-orang yang dihormati dan disegani dan orang-orang yang dianggap biasa-biasa saja, atau orang kebanyakan, atau bahkan orang-orang yang dianggap hina. Orang-orang yang dihormati atau disegani pada umumnya adalah mereka yang memiliki jabatan atau profesi tertentu, keturunan bangsawan atau orang-orang terhormat, atau berpendidikan tinggi. Ukuran-ukuran penempatan anggota masyarakat dalam stratifikasi sosial yang dapat dikategorikan sebagai kriteria sosial antara lain, (1) profesi, (2) pekerjaan, (3) tingkat pendidikan, (4) keturunan, dan (5) kasta.

1. Profesi.

Yang dimaksud profesi adalah pekerjaan-pekerjaan yang untuk dapat melaksanakannya memerlukan keahlian, misalnya dokter, guru, wartawan, seniman, pengacara, jaksa, hakim, dan sebagainya. Orang-orang yang menyandang profesi-profesi tersebut disebut kelas profesional. Di samping kelas profesional, dalam masyarakat terdapat juga kelas-kelas tenaga terampil dan tidak terampil, yang pada umumnya ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam stratifikasi sosial masyarakat.

2. Pekerjaan.

Berdasarkan tingkat prestise atau gengsinya, pekerjaan-pekerjaan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi: (1) pekerjaan kerah putih (white collar), dan (2) pekerjaan kerah biru (blue collar). Pekerjaan kerah putih merupakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih menuntut penggunaan pikiran atau daya intelektual, sedangkan pekerjaan-pekerjaan kerah biru lebih menuntut penggunaan energi atau kekuatan fisik. Pada umumnya anggota masyarakat lebih memberikan penghargaan atau gengsi yang lebih tinggi pada pekerjaan-pekerjaan kerah putih. Walaupun, tidak selalu bahwa pekerjaan kerah putih memberikan dampak ekonomi atau finansial yang lebih besar daripada pekerjaan kerah biru.

3. Pendidikan

Pada zaman sekarang ini pendidikan sudah dianggap sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebagian besar anggota masyarakat. Orang-orang yang berpendidikan tinggi akan menempati posisi dalam

stratifikasi sosial yang lebih tinggi. Sehingga tamatan S-3 dipandang lebih tinggi kedudukannya daripada tamatan S2, S1, SMA/SMK, SMP, SD, dan mereka yang tidak pernah sekolah.

4. Keturunan

Keturunan raja atau bangsawan dalam masyarakat dipandang memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan, pada masyarakat feodal, hampir tidak ada pengakuan terhadap simbol-simbol yang berasal dari luar istana, termasuk tata kota, arsitektur, pemilihan hari-hari penting, pakaian, seni, dan sebagainya. Penempatan orang dalam posisi-posisi penting dalam masyarakat akan selalu mempertimbangkan faktor keturunan, dan keaslian keturunan dipandang sangat penting.

5. Kasta

Kasta merupakan pemilahan anggota masyarakat yang dikenal pada masyarakat Hinduisme. Masyarakat dipilah menjadi kasta-kasta, seperti: Brahmana, Ksatria, Weisyia, dan Sudra. Kemudian ada orang-orang yang karena tindakannya dihukum dikeluarkan dari kasta, digolongkan menjadi paria.

Sebagian besar orang menganggap pemilahan dalam kasta bersifat graduated atau berjenjang, mengingat orang-orang yang berasal dari kasta yang berbeda akan memiliki gengsi (*prestige*) dan hak-hak istimewa (*privelege*) yang berbeda. Namun, tokoh-tokoh Hinduisme menyatakan bahwa kasta bukanlah pemilahan vertikal, melainkan hanyalah merupakan catur warna.

Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Kriteria ekonomi yang digunakan sebagai dasar stratifikasi sosial dapat meliputi penghasilan dan pemilikan atau kekayaan. Apabila dipilah menggunakan kriteria ekonomi, maka masyarakat akan terdiri atas

- a) Kelas atas, yaitu orang-orang yang karena penghasilan atau kekayaannya dengan leluasa dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya
- b) Kelas menengah, yaitu orang-orang yang karena penghasilan dan kekayaannya dapat leluasa memenuhi kebutuhan hidup mendasarnya, tetapi tidak leluasa untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya

- c) Kelas bawah, yaitu orang-orang yang dengan sumberdaya ekonominya hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup mendasarannya, tetapi tidak leluasa, atau bahkan tidak mampu untuk itu.

Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik. Ukuran yang digunakan untuk memilah masyarakat atas dasar dimensi atau kriteria politik adalah distribusi kekuasaan. Kekuasaan (power) berbeda dengan kewenangan (otoritas). Seseorang yang berkuasa tidak selalu memiliki kewenangan. Yang dimaksud kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain dalam masyarakat, termasuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif. Sedangkan wewenang adalah hak untuk berkuasa. Apa yang terjadi apabila orang mempunyai wewenang tetapi tidak memiliki kekuasaan? Mana yang lebih efektif, orang mempunyai kekuasaan saja, atau wewenang saja? Meskipun seseorang memiliki hak untuk berkuasa, artinya ia memiliki wewenang, tetapi kalau dalam dirinya tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, maka ia tidak akan dapat melaksanakan hak itu dengan baik. Sebaliknya, apabila seseorang memiliki kemampuan mempengaruhi pihak lain, meskipun ia tidak punya wewenang untuk itu, pengaruh itu dapat berjalan secara efektif.

Untuk lebih memahami hal ini, dapat diperhatikan pengaruh tokoh masyarakat, seperti seorang tokoh agama atau orang yang dituakan dalam masyarakat. Sudah berabad-abad menjadi pemikiran dalam dalil politik, bahwa kekuasaan dalam masyarakat selalu terdistribusikan tidak merata. Gaetano Mosca (1939) menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat selalu terdapat dua kelas penduduk: satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama yang jumlahnya lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama itu. Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, dan Robert Michels memberikan pengertian bahwa beberapa asas umum yang menjadi dasar bagi terbentuknya stratifikasi sosial, khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan politik, adalah:

1. Kekuasaan politik tidak dapat didistribusikan secara merata
2. Orang-orang dikategorikan ke dalam dua kelompok: yang memegang kekuasaan dan yang tidak memilikinya
3. Secara internal, elite itu bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok
4. Keanggotaan dalam elite berasal dari lapisan yang sangat terbatas
5. Kelompok elite pada hakikatnya bersifat otonom, kebal akan gugatan dari siapa pun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya

Di dalam masyarakat yang demokratis, pembagian dikotomis antara yang berkuasa dan tidak berkuasa tidak sesederhana yang dikemukakan Mosca dan kawan-kawannya. Walaupun kelas berkuasa jumlah orangnya selalu lebih sedikit, tetapi pada umumnya distribusi kekuasaan lebih terfragmentasi ke berbagai kelompok-kelompok. Dalam masyarakat yang demokratis, kelompok elite tidak memiliki otonomi sebagaimana pada masyarakat diktator. Kekuasaan elite dalam masyarakat demokratis selalu dapat dikontrol oleh kelompok-kelompok yang ada di luar kelompok elite, dan jumlahnya lebih dari satu.

Dominasi. Dominasi merupakan kekuasaan yang nyaris tidak dapat ditolak oleh siapapun. Kekuasaan yang sifatnya hampir mutlak. Kekuasaan dalam masyarakat berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) kekuasaan tradisional, (2) kekuasaan kharismatik, dan (3) kekuasaan legal-rasional. Kekuasaan tradisional adalah kekuasaan yang sumbernya berasal dari tradisi masyarakat, misalnya raja. Kekuasaan kharismatik bersumber dari kewibawaan atau kualitas diri seseorang, dan kekuasaan legal rasional bersumber dari adanya wewenang yang didasarkan pada pembagian kekuasaan dalam birokrasi, misalnya pemerintahan.

Mengapa ada dominasi? Dominasi dapat terjadi karena unsur-unsur kekuasaan seperti kharisma, tradisi dan legal rasional dimiliki oleh seseorang. Dalam batas-batas tertentu, Sultan Yogyakarta memiliki ketiga unsur kekuasaan tersebut. Status sosial Unsur penting dalam stratifikasi sosial adalah status. Apakah status? Status adalah Posisi atau kedudukan

atau tempat seseorang atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat atau pola hubungan sosial tertentu. Status seseorang dapat diperoleh sejak kelahirannya (*ascribed status*), diberikan karena jasa-jasanya (*assigned status*), atau karena prestasi dan perjuangannya (*achieved status*). Masyarakat modern lebih menghargai status-status yang diperoleh melalui prestasi atau perjuangan, masyarakat feodal lebih menghargai status yang diperoleh sejak lahir. Terdapat beberapa yang dijawab untuk memenuhi status, antara lain sebagai berikut:

Apakah kelas sosial pada masyarakat industri?

- a. Segolongan orang yang menyandang status relatif sama
- b. Memiliki cara hidup tertentu
- c. Sadar akan privilege (hak istimewa) tertentu, dan
- d. memiliki prestige (gengsi kemasyarakatan) tertentu

Apakah simbol status itu ?

- a. Simbol “sesuatu” yang oleh penggunanya diberi makna tertentu
- b. Ciri-ciri/tanda-tanda yang melekat pada diri seseorang atau kelompok yang secara relatif dapat menunjukkan statusnya
- c. Antara lain: cara berpakaian, cara berbicara, cara belanja, desain rumah, cara mengisi waktu luang, keikutsertaan dalam organisasi, tempat tinggal, cara berbicara, perlengkapan hidup, akses informasi, dst.

Sekarang Bagaimana konsekuensi perbedaan status dalam pelapisan sosial masyarakat? Cara hidup (cara berfikir, berperasaan dan bertindak) yang berbeda: sikap politik, kepedulian sosial, keterlibatan dalam kelompok sosial, dst.). Ingat: $PS = f(S + K)$, bahwa perilaku sosial pada dasarnya merupakan fungsi dari struktur sosial dan kebudayaan. Jawablah: mengapa seorang individu menyebut orangtuanya sebagai mama dan papa, bukan ayah dan ibu, bukan bapak dan ibu, atau bapak dan simbok? Jawabanya dapat dilihat karena ada beberapa hal, sebagai berikut:

- a. *Prestige* (gengsi/kehormatan sosial) yang berbeda
- b. *Privilege* (hak istimewa) yang berbeda
- c. Peluang hidup yang berbeda.

D, Konflik Sosial Masyarakat Industri

1. Konsep Konflik Sosial Masyarakat Industri

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut kamus Bahasa Indonesia (2002) konflik dapat diartikan sebagai percekocan, perselisihan, dan pertentangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat menurut para ahli pengertian konflik sebagai berikut:

- a. Kartono & Gulo (1987), konflik berarti ketidaksepakatan dalam satu pendapat emosi dan tindakan dengan orang lain.
- b. Robbins (1996) dalam "Organization Behavior" menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.
- c. Luthans (1981) konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah yaitu perbedaan pendapat, persaingan dan permusuhan.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Dari beberapa pengertian konflik diatas saya menghubungkannya dalam Industri, adalah suatu benturan pemikiran antara pihak pengelola dalam hal ini ketua dengan para anggota maupun kerja dalam dunia industry dimana menimbulkan percekocan

antara pihak yang terkait yang mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan penggugatan baik itu dari pihak atasan maupun bawahan.

Perselisihan ini pada umumnya timbul karena adanya sikap yang berbeda antara pemilik dan pekerja. Pemilik perusahaan memandang dirinya sebagai pemodal sehingga terlalu menonjolkan diri sebagai pembuka kesempatan kerja, sehingga mereka lebih menonjolkan kekuasaan dan keinginan. Dalam keadaan yang seperti inilah, maka pihak yang mempunyai kekuatan yang lebih (disini dalam artian pemilik perusahaan) yang mendominasi pihak yang lainnya (dalam artian perkerja).

2. Penyebab Timbulnya Konflik dalam Industri

Selanjutnya, kembali dalam masalah konflik, penyebab lain yang dapat menimbulkan konflik (perselisihan hubungan industrial) menurut I Gusti Ngurah Gorda (1994 : 186), adalah:

- a. timbulnya suasana perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dikendalikan
- b. adanya pihak yang merasa dirugikan
- c. perasaan yang sensitif
- d. adanya pihak-pihak tertentu dari luar perusahaan yang menginginkan terjadinya konflik dalam perusahaan tersebut

Beberapa literatur menyebutkan bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya konflik antara lain adanya perbedaan pendapat dan pandangan, perbedaan tujuan, ketidaksesuaian cara pencapaian tujuan, ketidakcocokan perilaku, pemberian pengaruh negatif dari pihak lain pada apa yang akan dicapai oleh pihak lainnya, persaingan, kurangnya kerja sama, dll. Para ahli juga memberikan pentahapan konflik secara berbeda, dikaitkan dengan isu yang dibicarakan. Stepen P Robins (2001), misalnya, memberi tahapan sebagai berikut: oposisi dan ketidakcocokan potensial, kognisi dan personalisasi, maksud, perilaku serta hasil. Sedangkan Kartikasari (2001) memberi tahapan: prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca-konflik.

- 1. tahap pertama, oposisi atau ketidak cocokan-potensial. Tahap ini adalah langkah pertama dalam proses konflik, yaitu adanya kondisi yang menciptakan munculnya konflik

(Stephen P. Robins, 2001:139). Oleh Terry dalam Winardi (1994:2) tahap ini juga disebutkan dalam kondisi mengancam pengoperasian secara harmonis serta eksistensi organisasi yang bersangkutan.

2. Tahap kedua adalah konfrontasi. Pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Kadang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi diantara kedua pihak. Masing-masing pihak mungkin mengumpulkan sumber daya dan kekuatan dan mungkin mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan di antara kedua pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi di antara para pendukung di masing-masing pihak (Kartikasari, 2001:19).

Tahap I: Oposisi atau ketidak-cocokan potensial

Dalam konflik antar-serikat buruh dapat digambarkan pada tahap awal pembentukan serikat. Seperti yang diperlihatkan oleh seluruh proses pembentukan serikat baru di ke tiga perusahaan yang saya teliti, awalnya mereka memperlihatkan oposisi yang didorong oleh rasa kecewa terhadap serikat yang ada.

Tahap II: Konfrontasi

Dalam konflik antar-serikat semakin nyata dengan menempakan berbagai tindakan untuk memperlihatkan adanya konflik antar-serikat. Yang terjadi di PT. PI, pada tahap konfrontasi ini, dua serikat di perusahaan tersebut saling mengeluarkan selebaran untuk menyerang satu sama lain. Sedangkan di PT. DJI, puncak dari konflik yang terjadi adalah demonstrasi yang dilakukan oleh salah satu serikat pada 20 Januari 2004, di mana salah satu tuntutan adalah meminta pengakuan perusahaan tentang keberadaan mayoritas anggota mereka. Sehingga setelahnya demonstrasi tersebut diadakanlah pemilihan keanggotaan serikat buruh untuk menentukan serikat mana yang mayoritas. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan. Oleh karena konflik bersumber pada keinginan, maka perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik. Persaingan sangat erat hubungannya dengan konflik karena dalam persaingan

beberapa pihak menginginkan hal yang sama tetapi hanya satu yang mungkin mendapatkannya. Persaingan tidak sama dengan konflik namun mudah menjurus kearah konflik, terutama bila ada persaingan yang menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan aturan yang disepakati. Permusuhan bukanlah konflik karena orang yang terlibat konflik bisa saja tidak memiliki rasa permusuhan. Sebaliknya orang yang saling bermusuhan bisa saja tidak berada dalam keadaan konflik. Konflik sendiri tidak selalu harus dihindari karena tidak selalu negatif akibatnya. Berbagai konflik yang ringan dan dapat dikendalikan (dikenal dan ditanggulangi) dapat berakibat positif bagi mereka yang terlibat maupun bagi kelompok.

Orang sering menganggap konflik bersumber dari tindakan dan inti persoalan , namun sebenarnya konflik sering disebabkan oleh komunikasi yang buruk. Komunikasi dapat menjadi masalah besar. Banyak persoalan dapat diselesaikan jika komunikasi berjalan lancar. Komunikasi yang buruk memperparah persoalan karena setiap orang yang terlibat dalam konflik secara tidak sadar mereka – reka motivasi buruk pihak lain. Perbedaan antara pesan yang disampaikan dan pesan yang diterima akan menimbulkan masalah komunikasi ketika konflik berlangsung. Setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat atau perbedaan kepentingan. Yang dimaksud konflik adalah situasi dimana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain (Johnson, 1981).

Kendati unsur konflik selalu terdapat dalam setiap bentuk hubungan antar pribadi, pada umumnya individu memandang konflik sebagai keadaan yang buruk dan harus dihindarkan. Konflik dipandang sebagai faktor yang akan merusak hubungan, maka harus dicegah. Namun, kini banyak orang mulai sadar bahwa rusaknya suatu hubungan lebih disebabkan oleh kegagalan memecahkan konflik secara konstruktif, adil dan memuaskan kedua belah pihak bukan oleh munculnya konflik itu sendiri. Pengelolaan konflik secara konstruktif, konflik dapat memberikan manfaat positif bagi diri kita sendiri maupun bagi hubungan kita dengan orang lain.

Beberapa contoh manfaat dari konflik adalah sebagai berikut (Johnson, 198):

- a. Konflik dapat membuat kita sadar bahwa ada masalah yang perlu diselesaikan dalam hubungan kita dengan orang lain.
 - b. Konflik dapat memunculkan kesadaran dan memotivasi kita untuk melakukan berbagai perubahan dalam diri kita.
 - c. Konflik dapat memotivasi kita untuk segera memecahkan masalah yang selama ini tidak kita sadari dengan jelas.
 - d. Konflik juga bisa membuat kehidupan menjadi lebih menarik.
 - e. Munculnya konflik dalam ragam pendapat bisa membantu kita kearah pencapaian keputusan bersama yang lebih matang dan qualified.
 - f. Konflik juga dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering terjadi dan muncul dalam hubungan kita dengan orang lain.
 - g. Konflik juga dapat membuat diri kita sadar tentang dan bagaimana kita sebenarnya.
 - h. Konflik bahkan dapat menjadi sumber hiburan.
 - i. Konflik dapat mengakrabkan dan memperluas hubungan.
- Menurut Baden Eunson (Conflict Management, 2007,diadaptasi), terdapat beragam jenis konflik:

- a. **Konflik vertikal** yang terjadi antara tingkat hirarki, seperti antara manajemen puncak dan manajemen menengah, manajemen menengah dan penyelia, dan penyelia dan subordinasi. Bentuk konflik bisa berupa bagaimana mengalokasi sumberdaya secara optimum, mendeskripsikan tujuan, pencapaian kinerja organisasi, manajemen kompensasi dan karir.
- b. **Konflik Horisontal**, yang terjadi di antara orang-orang yang bekerja pada tingkat hirarki yang sama di dalam perusahaan. Contoh bentuk konflik ini adalah tentang perumusan tujuan yang tidak cocok, tentang alokasi dan efisiensi penggunaan sumberdaya, dan pemasaran.
- c. **Konflik di antara staf lini**, yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki tugas berbeda. Misalnya antara divisi pembelian bahan baku dan divisi keuangan. Divisi pembelian menganggap akan efektif apabila bahan baku dibeli dalam jumlah besar dibanding sedikit-sedikit tetapi makan waktu berulang-ulang. Sementara divisi keuangan

menghendaki jumlah yang lebih kecil karena terbatasnya anggaran. Misal lainnya antara divisi produksi dan divisi pemasaran. Divisi pemasaran membutuhkan produk yang beragam sesuai permintaan pasar. Sementara divisi produksi hanya mampu memproduksi jumlah produksi secara terbatas karena langkanya sumberdaya manusia yang ahli dan teknologi yang tepat.

- d. **Konflik peran** berupa kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang. Konflik bisa terjadi antarkaryawan karena tidak lengkapnya uraian pekerjaan, pihak karyawan memiliki lebih dari seorang manajer, dan sistem koordinasi yang tidak jelas.

Aplikasi Prinsip Masalah, Imam Al-Ghazali dalam bukunya *al-Mus-tasfa* mendefinisikan masalah sebagai sebuah ekspresi untuk mencari manfaat dan meninggalkan mudarat. Beliau kemudian membagi tiga kategori kebutuhan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap masalah tersebut. Pertama, *daruriyyat*, yaitu kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi untuk mencapai kelima tujuan Syariah, yang jika terganggu maka dapat mengancam kestabilan masyarakat. Kelima tujuan Syariah tersebut adalah perlindungan agama, jiwa, intelektual, keturunan, dan kepemilikan harta. Kedua, *hajiyyat*, adalah kebutuhan pelengkap, penyeimbang, untuk mengharmonisasikan kebutuhan dasar. Kebutuhan ini juga bertujuan untuk membuang segala kesulitan. Dan yang terakhir, *tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan tambahan memperindah kehidupan untuk mencapai “kesempurnaan”. Konflik dapat dicegah atau dikelola dengan:

- 1) Disiplin: Mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Manajer perawat harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk memahaminya.
- 2) Pertimbangan Pengalaman dalam Tahapan Kehidupan: Konflik dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Misalnya; Perawat junior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, sedangkan bagi perawat senior yang

berprestasi dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi

- 3) Komunikasi: Suatu Komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terpetik dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari yang akhirnya dapat dijadikan sebagai satu cara hidup
- 4) Mendengarkan secara aktif: Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik. Untuk memastikan bahwa penerimaan para manajer perawat telah memiliki pemahaman yang benar, mereka dapat merumuskan kembali permasalahan para pegawai sebagai tanda bahwa mereka telah mendengarkan.

3. Langkah-Langkah mengatasi Konflik

Setiap perselisihan, baik dalam masyarakat umum maupun dalam hubungan industrial tentunya memerlukan upaya, sistem atau proses penyelesaiannya. Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk penyelesaian tersebut dengan dua kategori bahasan, yaitu penyelesaian perselisihan secara Bipartite dan penyelesaian perselisihan secara

Tripartite:

a. Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartite

Bisa dikatakan penyelesaian secara Bipartite dapat diartikan sebagai perselisihan yang penyelesaiannya diupayakan secara internal yakni antara pihak pekerja dengan pemilik perusahaan. Upaya penyelesaian ini dapat ditentukan dalam Peraturan Perusahaan dengan dasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 02/MEN/1978 yang telah mendapatkan persetujuan oleh Departemen Tenaga Kerja. Dalam penyelesaian musyawarah untuk mencapai mufakat adalah yang diutamakan, dimana pihak akan merundingkan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam penyelesaian keluhan. Dan dalam penyelesaian secara Bipartite ini akan terlihat lebih mendekati kehendak dari para pihak, karena masing-masing dapat langsung berbicara dan dapat memperoleh kepuasan tersendiri secara murni karena tidak ada campur tangan dari pihak ketiga.

Namun, jika dihubungkan dengan kasus yang ada pada pembahasan sebelumnya. Kemungkinan adanya musyawarah

antar pekerja dengan pemilik perusahaan sangat sulit. Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa tidak bisa terlaksananya musyawarah antara pekerja dengan pemilik perusahaan. Bisa saja karena sistem outsourcing yang diterapkan dalam perusahaan tersebut.

b. Penyelesaian Perselisihan Secara Tripartite

Pengertian penyelesaian perselisihan secara Tripartite yaitu bahwa perselisihan tersebut terjadi antara pekerja dengan pengusaha tidak dapat diselesaikan secara Bipartite, maka upaya selanjutnya diselesaikan melalui forum yang dihadiri oleh wakil pemilik perusahaan, wakil perkerja (SPSI) dan wakil dari pemerintahan (Departemen Tenaga Kerja). Penyelesaian ini diadakan di Kantor Departemen Tenaga Kerja di tingkat daerah yang dipimpin oleh pegawai perantara. Mengacu pada pasal 4 Undang-undang Nomor 22 tahun 1957, menyatakan bahwa setelah menerima surat pemberitahuan dari perusahaan tentang pernyataan bahwa telah diadakan perundingan yang langsung antara keduanya (disini berarti pekerja dan pemilik perusahaan) tidak memberikan hasil dan mereka tidak bermaksud menyerahkan perselisihannya kepada Dewan Pemisah, maka pegawai perantara yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja mengadakan penyelidikan tentang permasalahan perselisihan dan mengenai sebab-sebabnya, selambatnya 7 hari terhitung dari tanggal penerimaan sudah harus diperantarai. Apabila pegawai perantara belum dapat menyelesaikan persoalannya, maka persoalan tersebut diserahkan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dengan memberitahukan kepada pihak-pihak yang berselisih;

Pilihan terhadap jalan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dalam sejarah hidup masyarakat, selalu diikuti penderitaan. Penderitaan itu disebabkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka, kerugian material, dan trauma jiwa para korban. Pada saat bersamaan, cara kekerasan hampir sama sekali tidak menawarkan pemecahan masalah, tetapi menciptakan lingkaran balas dendam dan kebencian. Melihat konsekuensi destruktifnya, kekerasan seharusnya mulai dipahami bukan sebagai cara mempertahankan identitas atau memperjuangkan kepentingan lainnya. Jalan damai dalam mencari penyelesaian konflik (*peaceful conflict resolution*) lebih memberikan

kesempatan kepada pemecahan berbagai isu konflik. Termasuk konflik dalam hubungan industri di negeri ini. Sayang, negara dan perusahaan belum memiliki kelembagaan mekanisme damai yang mampu mengelola sumber-sumber dinamika hubungan kerja industri secara komprehensif. UU No 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial lebih banyak mengatur penyelesaian konflik antara buruh dan perusahaan. Artinya, peraturan tersebut hanya mengelola salah satu aspek sumber dinamika hubungan kerja industri yang sebenarnya bersifat kompleks. Sebagaimana kasus di Batam, konflik industri terjadi karena faktor identitas, bukan isu upah pekerja.

Selain kelembagaan mekanisme damai secara legal formal, pendekatan-pendekatan kultural dan keterampilan menyelesaikan konflik secara damai memiliki porsi penting. Kasus di Batam merupakan pelajaran penting bagi pemerintah dan perusahaan-perusahaan di negeri ini bahwa cara kekerasan bisa disebabkan ketidaktahuan cara menyelesaikan konflik secara damai. Kekecewaan dan kemarahan para pekerja tidak ditransformasikan menjadi bentuk tuntutan tanpa kekerasan. Seperti menggunakan jalur yudisial (hukum) atau menggunakan forum dialog untuk mencari penyelesaian konflik. Kasus rusuh hubungan industri di Batam adalah bentuk tidak terkelolanya sumber-sumber dinamika hubungan kerja industri. Tidak tertutup kemungkinan kasus serupa akan terjadi di tempat-tempat lain di Indonesia. Membiarkan kemungkinan itu terjadi sama halnya dengan membiarkan negeri ini selalu menghadapi konsekuensi destruktif dari kekerasan. Kita tentu mengharapkan kekerasan bisa dieliminasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, negara dan berbagai elemen bangsa ini perlu berkomitmen dengan cara menciptakan mekanisme damai dalam setiap konteks hubungan sosial di Indonesia.

Konflik dalam komunikasi perlu diatasi, maka dari itu yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu keterampilan untuk membedakan yang wajar dan sehat serta terampil untuk mengelolanya.
2. Menetapkan batas secara konstruktif antara yang boleh dibahas dengan yang tidak.

3. Memulai percakapan yang bermanfaat dan dapat diterima setiap pihak.
4. Mengarahkan pada batas-batas yang disepakati.
5. Terampil menyatakan ketidaksetujuan tanpa ada kesan menolak gagasan pihak lain.
6. Sebaliknya, ia mampu menerima ketidaksetujuan pihak lain tanpa merasa ditolak.
7. Melihat konflik dari sudut pandang orang lain.
8. Mengarahkan keputusan pada kepuasan bersama (win-win solution)

Hubungan industrial adalah seluruh hubungan kerjasama antara semua pihak yang bersangkutan dalam proses produksi di suatu perusahaan. Penerapan hubungan industrial merupakan perwujudan pengakuan dan pengakuan atas hak dan kewajiban antara pekerja dengan pemilik perusahaan untuk menjamin kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Perselisihan yang dilaksanakan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi pada dasarnya kurang sesuai dengan pola hubungan kerja yang berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang pada dasarnya segala permasalahan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Tetapi mengingat bagaimana tipe manusia yang bekerja sebagai pekerja dalam perusahaan yang akan berhadapan dengan kebijaksanaan para pengusaha dengan para stafnya, jelas musyawarah yang diharapkan sulit untuk dapat mencapai mufakat.

Kembali lagi kita mengenalkan mengenai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban pekerja serta hak dan kewajiban bagi pemilik perusahaan. Disamping itu juga memuat mengenai ketentuan pokok pendayagunaan, tindakan disiplin, dan petunjuk mengenai penyelesaian perselisihan. Namun, dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan pada penyelesaian perselisihan dalam penerapan KKB tersebut. Dengan adanya pembuatan KKB yang baik, dalam artian telah dapat menengahi keluhan dari para pihak yang mengalami perselisihan, maka dalam menyelenggarakan hubungan kerjanya telah mendapatkan dasar hak dan kewajiban yang kuat. Dengan demikian mengenai permasalahan perselisihan telah dapat tersalurkan mengenai KKB tersebut. Yang akhirnya dapat mengurangi aksi

unjuk rasa oleh para pekerja. Sehingga diharapkan akan tercipta sarana untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam suatu perusahaan. Namun, ironisnya masih banyak perusahaan yang belum dapat menerima pembuatan KKB tersebut dikarenakan kurang sadarnya para pihak akan pentingnya keberadaan KKB ditengah-tengah hubungan kerja mereka. Terutama pada pihak perkerja yang menganggap bahwa pembuatan KKB hanya sia-sia belaka dilatarbelakangi oleh jeratan Outsourcing. Di sisi lain, kurang berhasilnya pembuatan KKB dikarenakan kurang gencarnya sosialisasi KKB kepada para pekerja sehigga dalam menyelesaikan masalah sering kesulitan untuk menemukan titik temunya.

Permasalahan atau konflik yang terjadi antara karyawan atau karyawan dengan atasan yang terjadi karena masalah komunikasi harus di antisipasi dengan baik dan dengan system yang terstruktur. Karena jika masalah komunikasi antara atasan dan bawahan terjadi bias-bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mogok kerja, bahkan demo. Sehingga untuk mensiasati masalah ini bias dilakukan dengan berbagai cara:

1. Membentuk suatu system informasi yang terstruktur, agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Misalnya, dengan membuat papan pengumuman atau pengumuman melalui loudspeaker.
2. Buat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan menjadi lancer dan harmonis, misalnya dengan membuat rapat rutin, karena dengan komunikasi yang dua arah dan intens akan mengurangi masalah di lapangan
3. Beri pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan, pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi setiap individu dalam organisasi dan meminimalkan masalah dalam hal komunikasi

Biasanya masalah timbul karena lingkungan yang kurang kondusif di suatu perusahaan. Misalnya, kondisi cahaya yang kurang, atau sirkulasi yang kurang baik, dan temperature ruangan yang tinggi sangat mungkin untuk meningkatkan emosi seseorang, jadi kondisi dari lingkungan juga harus di perhatikan. Konflik dalam perusahaan juga sering terjadi antar karyawan, hal ini biasanya terjadi karena masalah diluar perusahaan, misalnya tersinggung karena ejekan, masalah ide

yang dicuri, dan senioritas. Perusahaan yang baik harus bisa menghilangkan masalah senioritas dalam perusahaan. Hal ini dapat meminimalisir masalah yang akan timbul, karena dengan suasana yang harmonis dan akrab maka masalah akan sulit untuk muncul. Konflik sosial merupakan salah satu konsekuensi dari adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, misalnya peluang hidup, gengsi, hak istimewa, dan gaya hidup. Terdapat beberapa sumber konflik:

- a. Perbedaan kepentingan
- b. Perbedaan individual
- c. Perbedaan kebudayaan
- d. Perubahan sosial

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa macam konflik, antara lain, sebagai berikut:

1. Individu atau kelompok (berdasarkan pelakunya perorangan atau kelompok)
2. Horizontal atau vertical (berdasarkan status pihak-pihak yang terlibat, sejajar atau bertingkat).
3. Konflik horizontal, yaitu antar-etnis, antar-agama, antar-aliran, dll. Konflik vertical yaitu: antara buruh dengan majikan, pemberontakan atau gerakan separatis/makar terhadap kekuasaan negara
4. Ideologis atau politis (berdasarkan tingkat konflik, apabila sebatas pemikiran/ideologi, disebut konflik tingkat ideologis (misalnya pertentangan ideology antara santri dengan abangan dan priyayi), apabila sampai muncul di tingkat tindakan disebut tingkat politis

(misalnya: riot/kerusuhan, demonstrasi, pemberontakan, makar, dan sebagainya)

5. Konflik terbuka, konflik laten dan konflik permukaan

E. Mobilitas Sosial Masyarakat Industri

Istilah mobilitas (dalam bahasa Inggris yaitu *mobility*) berasal dari kata *mobilis* (bahasa Latin) yang artinya bergerak atau berpindah. Meskipun demikian mobilitas sosial tidak sama dengan gerakan sosial. Yang dimaksud gerakan sosial (*social movement*) suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelas atau golongan sosial untuk memperoleh tujuan-tujuan yang diinginkan.

Mobilitas sosial merupakan perubahan posisi atau kedudukan orang atau kelompok orang dalam struktur sosial, misalnya dari satu lapisan ke lapisan lain yang lebih atas ataupun lebih bawah, atau dari satu kelompok/golongan ke kelompok/golongan lain. Struktur sosial, sebagaimana disebut di bagian awal ringkasan materi ini, struktur sosial merupakan salah satu konsep paling esensial dalam sosiologi. Struktur sosial berkaitan dengan posisi-posisi individu atau kelompok dalam masyarakat. Kalau dalam ruang geografi seseorang atau sekelompok orang memiliki lokasi/tempat tinggal atau dalam bahasa yang lebih populer "alamat", maka dalam ruang sosial seseorang juga memiliki "lokasi", "tempat", atau "alamat". Anda dan keluarga Anda memiliki posisi tertentu dalam struktur sosial, posisi itu sering disebut sebagai status atau kedudukan sosial. Di Perguruan tinggi mana anda sekarang, apa posisi anda di kampus anda, dan dalam struktur sosial anda dalam masyarakat.

Bagaimana mengetahui posisi kita? Sama dengan ruang geografik, ruang sosial juga memiliki dimensi horizontal dan vertikal. Di ruang geografik seseorang memiliki alamat "Jl. AH Nasution nomor 105 Cibiru Bandung", maka di ruang sosial seseorang dapat memiliki alamat "orang tua atau muda, beragama Islam, Kristen-Protestan, Kristen-Katholik, Hindu, atau Budha, bekerja sebagai petani, pedagang, pegawai pemerintah, pegawai swasta, atau bekerja di sektor nonformal perkotaan, miskin, setengah kaya, atau kaya raya, berbudi pekerti luhur dan berhati mulia atau dikenal sebagai pengikut setia Bung Karno, Bung Hatta, Gus Dur, Amien Rais, atau yang lain, dan seterusnya. Dalam ruang imajiner "struktur sosial", setiap orang punya tempat tinggal, dan sama dengan di ruang geografi, tempat tinggal itu dapat berubah-ubah. Orang dan sekelompok orang dapat bermigrasi dalam ruang geografi, dari Jawa ke Sumatra, atau sebaliknya. Maka, dalam ruang sosial, orang atau sekelompok orang dapat mengalami "mobilitas sosial", dari orang kaya menjadi orang miskin, atau sebaliknya, dari orang miskin menjadi orang kaya. Dari pemimpin menjadi orang biasa. Dari orang baik menjadi orang jahat, atau sebaliknya dari orang jahat menjadi orang baik.

Di samping manusia hidup dan bergerak dalam sebuah ruang geografik, manusia juga hidup dalam sebuah ruang yang

unik, yaitu struktur sosial yang di dalamnya terdapat pemilahan-pemilahan vertikal maupun horizontal. Sehingga, di samping manusia dapat berpindah dari satu ruang geografik (wilayah) ke ruang geografik yang lain, dalam sebuah ruang sosial yang unik tadi, manusia juga dapat berpindah dari satu strata atau kelas sosial ke strata atau kelas sosial yang lain, ataupun dari satu golongan ke golongan yang lain. Mobilitas dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:

1. Mobilitas geografik, yakni perpindahan orang dari satu tempat/daerah ke tempat/daerah yang lain
2. Mobilitas sosial, yakni perpindahan posisi dari suatu kelas sosial atau kelompok sosial ke kelas sosial atau kelompok sosial yang lain.

Berdasarkan arah perpindahan, mobilitas sosial dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Mobilitas sosial horizontal, yakni perpindahan posisi individu atau kelompok individu dari satu kelompok atau golongan sosial ke kelompok atau golongan sosial lain yang sederajat
2. Mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan posisi atau kedudukan individu atau kelompok individu dari satu strata sosial ke strata sosial lain, baik yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah.

Mobilitas sosial vertikal dapat dibedakan menjadi:

1. Mobilitas sosial vertikal naik (*social climbing*), dapat berupa:
 - masuknya individu dari kedudukan rendah ke kedudukan tinggi
 - pembentukan kelompok baru yang derajatnya lebih tinggi
2. Mobilitas sosial vertikal turun (*social sinking*), dapat berupa:
 - turunnya individu dari kedudukan yang lebih tinggi ke kedudukan yang lebih rendah
 - turunnya derajat sekelompok individu karena disintegrasi kelompok (sering disebut sebagai dislokasi sosial)
3. Mobilitas sosial antar-generasi, yang dimaksud adalah mobilitas yang terjadi pada generasi yang berbeda, misalnya:

- a) orang tua berkedudukan sebagai petani atau buruh, anak-anaknya menjadi pengajar di perguruan tinggi atau majikan. Contoh mobilitas dalam bentuknya yang demikian banyak terjadi di daerah-daerah yang mengalami industrialisasi. Banyak orang yang akhirnya meninggalkan pekerjaan sebagai petani atau pekerjaan agraris yang lain sebagaimana yang ditekuni oleh para orangtua mereka karena tertarik untuk bekerja di pabrik-pabrik/industri.
- b) Atau sebaliknya, orang tuanya sebagai majikan atau pejabat negara, sedangkan anak-anaknya menjadi buruh atau pegawai biasa di instansi pemerintah.

Di samping dua macam mobilitas di atas, sering pula dijumpai istilah mobilitas mental, yang artinya perubahan sikap dan perilaku individu atau sekelompok individu karena didorong oleh rasa ingin tahu, tuntutan penyesuaian diri, hasrat meraih prestasi, dan sebagainya. Sedangkan faktor penghambatnya dapat berupa sikap malas dan kepasrahan terhadap nasib maupun isolasi sosial.

Terdapat Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat mobilitas social. Menurut berbagai pengamatan terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, antara lain:

1. Status sosial

Ketidakpuasan seseorang atas status yang diwariskan oleh orangtuanya, karena orang pada dasarnya tidak dapat memilih oleh siapa ia dilahirkan, dapat menjadi dorongan untuk berupaya keras memperoleh status atau kedudukan yang lebih baik dari status atau kedudukan orangtuanya.

2. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan, misalnya yang dialami oleh masyarakat di daerah minus, mendorong mereka untuk berurbanisasi ke kota-kota besar dengan harapan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik.

3. Situasi politik

Situasi politik yang tidak menentu, biasanya juga berakibat pada jaminan keamanan yang juga tidak menentu, dapat mendorong orang untuk meninggalkan tempat itu menuju ke tempat lain.

4. **Motif-motif keagamaan**

Mobilitas sosial yang didorong oleh motif keagamaan tampak pada peristiwa orang berhaji. Orang yang melakukan ibadah haji lazim disebut naik haji. Istilah “naik” jelas menunjuk adanya peristiwa mobilitas sosial, bahwa status orang tersebut akan menjadi berbeda antara sebelum dan sesudah menjalankan ibadah haji. Demikian juga fenomena-fenomena dalam kehidupan agama yang lain, misalnya yang dilakukan oleh kaum misionaris atau zending.

5. **Faktor kependudukan/demografi.**

Bertambahnya jumlah dan kepadatan penduduk yang berimplikasi pada sempitnya permukiman, kualitas lingkungan yang buruk, kesempatan kerja yang menyempit, kemiskinan, dan sebagainya, dapat mendorong orang untuk melakukan migrasi ke tempat lain.

6. **Keinginan melihat daerah lain**

Hal ini tampak pada fenomena *tourisme*, orang mengunjungi daerah atau tempat tertentu dengan tujuan sekedar melihat sehingga menambah pengalaman atau bersifat rekreasional.

Di samping faktor-faktor yang mendorong ada pula faktor-faktor yang menghambat mobilitas sosial, misalnya:

1. Perangkap kemiskinan
2. Diskriminasi gender, ras, agama, kelas sosial
3. Subkultur kelas sosial, misalnya apa yang oleh Oscar Lewis disebut sebagai *the culture of poverty*, ataupun rendahnya hasrat meraih prestasi, yang oleh David McClelland disebut sebagai *need for achievement (n-Ach)*.

Terdapat pula beberapa prinsip dalam Mobilitas Sosial antara lain:

1. Hampir tidak terdapat masyarakat yang sistem pelapisan sosialnya secara mutlak tertutup, sehingga mobilitas sosial meskipun terbatas tetap akan dijumpai pada setiap masyarakat
2. Sekalipun suatu masyarakat menganut sistem pelapisan sosial yang terbuka, namun mobilitas sosial tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya
3. Tidak ada mobilitas sosial yang umum berlaku bagi semua masyarakat; artinya setiap masyarakat memiliki

karakteristiknya sendiri dalam hubungannya dengan mobilitas sosial

4. Laju mobilitas sosial yang disebabkan faktor-faktor ekonomi, politik maupun pekerjaan tidaklah sama
5. Tidak ada kecenderungan yang kontinyu mengenai bertambah atau berkurangnya laju mobilitas sosial

Adapun Saluran-saluran dari Mobilitas Sosial sebagaimana menurut Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa mobilitas sosial vertikal mempunyai saluran-saluran yang disebut *social circulation* sebagai berikut:

1. Angkatan bersenjata (tentara); terutama dalam masyarakat yang dikuasai oleh sebuah rezim militer atau dalam keadaan perang
2. Lembaga keagamaan. Contohnya tokoh organisasi massa keagamaan yang karena reputasinya kemudian menjadi tokoh atau pemimpin di tingkat nasional
3. Lembaga pendidikan; sekolah sering merupakan saluran yang paling konkrit untuk mobilitas sosial, sehingga disebut *social elevator* yang utama. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang berhasil diraih seseorang semakin terbuka peluangnya untuk menempati posisi atau kedudukan tinggi dalam struktur sosial masyarakatnya.
4. Organisasi politik, ekonomi dan keahlian (profesi); seorang tokoh organisasi politik yang pandai beragitasi, berorganisasi, memiliki kepribadian yang menarik, penyalur aspirasi yang baik, akan lebih terbuka peluangnya memperoleh posisi yang tinggi dalam masyarakat.
5. Perkawinan; melalui perkawinan seorang rakyat jelata dapat masuk menjadi anggota kelas bangsawan. Status sosial seseorang yang bersuami/beristerikan orang ternama atau menempati posisi tinggi dalam struktur sosial ikut pula memperoleh penghargaan-penghargaan yang tinggi dari masyarakat.

Begitu juga dalam mobilitas sosial akan terjadi dalam masyarakat yang akan menimbulkan berbagai konsekuensi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pertanyaannya, apakah konsekuensi tersebut positif atau negatif ditentukan oleh kemampuan individu atau kelompok individu menyesuaikan dirinya terhadap “situasi” baru: kelompok baru, orang baru, cara hidup baru. Apabila individu atau kelompok

individu yang mengalami mobilitas sosial mampu menyesuaikan dirinya dengan situasi yang baru maka akan memperoleh hal-hal positif sebagai konsekuensi mobilitas sosial, antara lain:

- a. mengalami kepuasan, kebahagiaan dan kebanggaan.
- b. Peluang mobilitas sosial juga berarti kesempatan bagi individu atau kelompok individu untuk lebih maju.
- c. Kesempatan mobilitas sosial yang luas akan mendorong orang-orang untuk mau bekerja keras, mengejar prestasi dan kemajuan sehingga dapat meraih kedudukan yang dicita-citakan.

Apabila individu atau kelompok individu tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan situasi baru, maka akan terjadi konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut:

- a. Konflik antar-kelas

Konflik ini terjadi karena benturan kepentingan antar-kelas sosial. Misalnya konflik antara majikan dengan buruh yang menghendaki kenaikan upah.

- b. Konflik antar-kelompok

Konflik antar-kelompok (konflik horizontal) bisa melibatkan ras, etnisitas, agama atau aliran/golongan. Konflik jenis ini dapat terjadi karena perebutan peluang mobilitas sosial, misalnya kesempatan memperoleh sumber-sumber ekonomi, rekrutmen anggota, peluang memperoleh kekuasaan politik atau pengakuan masyarakat.

- c. Konflik antar-individu

Konflik antar-individu dapat terjadi misalnya karena masuknya individu ke dalam kelompok tidak diterima oleh anggota kelompok yang lain. Misalnya lingkungan organisasi atau seseorang tidak dapat menerima kehadiran seseorang yang dipromosikan menduduki suatu jabatan tertentu.

- d. Konflik antar-generasi

Konflik ini terjadi dalam hubungannya mobilitas antar-generasi. Fenomena yang sering terjadi adalah ketika anak-anak berhasil meraih posisi yang tinggi, jauh lebih tinggi dari posisi sosial orang tuanya, timbul ethnosentrisme generasi. Masing-masing generasi orangtua maupun anak saling menilai berdasarkan ukuran-ukuran yang berkembang dalam generasinya sendiri. Generasi anak memandang orang tuanya sebagai generasi yang tertinggal,

kolot, kuno, lambat mengikuti perubahan, dan sebagainya. Sementara itu generasi tua menganggap bahwa cara berfikir, berperasaan dan bertindak generasinya lebih baik dan lebih mulia dari pada yang tumbuh dan berkembang pada generasi anak-anaknya.

e. Konflik status dan konflik peran

Seseorang yang mengalami mobilitas sosial, naik ke kedudukan yang lebih tinggi, atau turun ke kedudukan yang lebih rendah, dituntut untuk mampu menyesuaikan dirinya dengan kedudukannya yang baru.

Kesulitan menyesuaikan diri dengan statusnya yang baru akan menimbulkan konflik status dan konflik peran. Konflik status adalah pertentangan antar-status yang disandang oleh seseorang karena kepentingan-kepentingan yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan banyaknya status yang disandang oleh seseorang. Konflik peran merupakan keadaan ketika seseorang tidak dapat melaksanakan peran sesuai dengan tuntutan status yang disandangnya. Hal ini dapat terjadi karena statusnya yang baru tidak disukai atau tidak sesuai dengan kehendak hatinya. *Post Power Syndrome* merupakan bentuk konflik peran yang dialami oleh orang-orang yang harus turun dari kedudukannya yang tinggi.

BAB XIV DINAMIKA MASYARAKAT INDUSTRI

Bab empat belas membahas Dinamika Masyarakat Industri, di dalamnya terdiri dari: Realitas Dinamika Masyarakat Kota, Dinamika Masyarakat Pedesaan, Industri, Perubahan Sosial dan Masyarakat Pinggiran, Masalah Industri Bagi Desa dan Kota,

A. Realitas Dinamika Masyarakat Kota

Masyarakat kota memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat desa atau nelayan, oleh karena itu pada masyarakat kota memiliki yang tersendiri sebagai masyarakat kota. Ada beberapa ciri masyarakat dari masyarakat Kota, yakni:

- a. Keanggotaan tidak saling mengenal
- b. Bermata pencaharian di bidang sektor industri, jasa, dan perdagangan
- c. Lebih terikat kontrak dan mulai meninggalkan tradisi
- d. Mempunyai tatanan nilai yang heterogen
- e. Memiliki struktur masyarakat yang terbuka

Pada masyarakat kota dengan segala hiruk pikuknya di mana masyarakat kota yang erat dengan kehidupan industri memiliki dinamika tersendiri, sebab pada masyarakat kota apalagi sebagai masyarakat industri memiliki teologi yang sama bahwa segalanya diukur dengan uang. Untuk melihat tingkat perkembangan masyarakat Kota dalam persepektif ekonomi dalam dilihat dalam beberapa aspek sebagai berikut:

- a. *Aspek ekonomi*, dapat dilihat dari pembangunan pasar swalayan, alat pembayaran tidak hanya uang (dengan kartu kredit)
- b. *Aspek sosial*, kelompok kekerabatan mulai memudar diganti kelompok berdasarkan kepentingan yang sama, lebih terikat kontrak dan mulai meninggalkan tradisi.
- c. *Aspek politik*, masyarakat mulai tanggap dan kritis terhadap kehidupan politik, sehingga lebih dinamis.
- d. *Aspek budaya*, keterbukaan terhadap dunia luar menyebabkan masyarakat kota merasa lebih modern bila mengadaptasi budaya asing dan mulai meninggalkan budaya tradisional.

Masyarakat kota bisa terjadi karena adanya perkembangan masyarakat desa. Hal ini bisa berlangsung secara lambat (evolusi) maupun secara cepat (revolusi). Perubahan secara evolusi berlangsung sangat lama dan tidak direncanakan, yang terjadi karena dorongan pemenuhan kebutuhan yang lebih kompleks. Sedangkan perubahan secara revolusi berlangsung cepat dan bersifat

dasar. Misalnya revolusi industri di Inggris, memberikan pengaruh yang sangat besar pada perkembangan desa untuk menjadi masyarakat kota yang berbasis IPTEK. Terjadinya urbanisasi dari desa ke kota atau desa yang berkembang menjadi kota menunjukkan bahwa terjadi proses perkembangan dinamika dalam masyarakat yang begitu terus berkembang secara signifikan. Urbanisasi dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota atau proses perubahan masyarakat desa menjadi masyarakat kota. Ada dua faktor yang mengakibatkan terjadinya urbanisasi, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik.

Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya urbanisasi, yakni:

- a. Sempitnya lapangan pekerjaan di desa
- b. Kurangnya fasilitas pendidikan
- c. Adanya keinginan untuk merubah nasib
- d. Kemiskinan di desa
- e. Para generasi muda yang ingin meninggalkan sikap tradisional

Sedangkan faktor penarik dari urbanisasi adalah:

- a. Lapangan pekerjaan yang lebih bervariasi
- b. Sarana prasarana yang lebih lengkap
- c. Tingginya upah buruh di kota daripada di desa
- d. Kota menghimpun modal yang besar dan terkonsentrasi
- e. Kota dianggap memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa masyarakat kota mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek sebagai mana dijelaskan di atas. Perkembangan masyarakat kota yang ditunjang dengan industrialisasi semakin menambah dinamika yang terjadi pada masyarakat kota. Adapun faktor Pendorong Dinamika Masyarakat Kota, antara lain sebagai berikut:

- a. *Perubahan situasi sosial*, seperti pemekaran sebuah wilayah, masuknya industrialisasi kepedesaan, dan adanya penemuan-penemuan baru.
- b. *Perubahan situasi ekonomi*, masyarakat perkotaan memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang lebih tinggi dibanding masyarakat pedesaan.
- c. *Perubahan situasi Politik*, pergantian elite politik menyebabkan perkembangan kelompok-kelompok sosial masyarakat.

Dinamika yang terjadi pada suatu masyarakat, pada saat tertentu akan mengalami kefakuman. Kefakuman itu sendiri akan tergantung pada masyarakat itu sendiri. Sebab ada istilah yang disebut "*cultural determinism*" yang artinya budaya suatu masyarakat akan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Termasuk dalam proses dinamika masyarakat itu sendiri. Ada beberapa faktor penghambat Dinamika Masyarakat pada suatu masyarakat kota, yaitu:

- a. *Adanya konflik antar anggota kelompok*, menyebabkan keretakan dan berubahnya pola hubungan sosial.
- b. *Adanya perbedaan kepentingan*, kelangsungan kelompok akan terancam, karena anggota yang tidak sepaham akan berusaha memisahkan diri.
- c. *Adanya perbedaan paham*, perbedaan pemahaman mempengaruhi kelompok sosial secara keseluruhan.

Proses dinamika yang terjadi pada masyarakat kota akan menimbulkan dua hal penting dalam masyarakat kota. Yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak Positif Dinamika Masyarakat Kota, antara lain:

- a. Tingkat pendidikan lebih merata.
- b. Komunikasi dan informasi lebih cepat dan mudah.
- c. Pembagian kerja yang berdasarkan kemampuan yang meningkatkan efektifitas.
- d. Pembangunan dalam berbagai bidang lebih terjamin.

Adapun dampak negatif dinamika yang terjadi pada masyarakat kota, yaitu:

- a. Munculnya sikap individualistis.
- b. Memudarnya nilai kebersamaan.
- c. Munculnya sikap kurang mempercayai pihak lain.
- d. Memudarnya perhatian terhadap budaya lokal dan budaya nasional, terutama para generasi mudanya

B. Dinamika Masyarakat Pedesaan

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang sebagian besar/ keseluruhan aktivitasnya berkaitan erat dengan tradisi, baik yang berkaitan dengan religi maupun non religi. Masyarakat tradisional pada umumnya hidup di pedesaan, sehingga dapat diidentikkan dengan masyarakat pedesaan. H. Landis mengemukakan desa dari aspek statistik, psikologi sosial dan ekonomi. Dari statistik, pedesaan adalah tempat dengan penduduk kurang dari 2.500 orang. Psikologi sosial, pedesaan adalah daerah dimana pergaulannya ditandai dengan derajat intimasi/ keakrabannya yang sangat tinggi, sedangkan kota adalah tempat dimana hubungan sesama individu sangat impersonal/ longgar. Aspek ekonomi, pedesaan adalah daerah dimana pusat perhatian/ kepentingan adalah pertanian dalam arti yang luas. Bintarto mendefinisikan pedesaan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungan. Hasil dari perpaduan berupa bentuk di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur fisiografi, sosial dan ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur serta dalam hubungan dengan daerah lain. Unsur desa meliputi daerah, penduduk dan tata kehidupan. Ketiganya dikatakan sebagai *living unit* atau satu kesatuan hidup yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain.

Secara sosiologis, pengertian desa memberikan penekanan pada kesatuan masyarakat pertanian dalam suatu masyarakat yang jelas menurut susunan pemerintahannya. Kehidupan di desa sering dinilai sebagai kehidupan yang tentram, damai, selaras, jauh dari perubahan yang dapat menimbulkan konflik. Perlu ditandaskan bahwa tidak semua masyarakat desa dapat disebut masyarakat tradisional, sebab ada sebagian desa yang sedang mengalami perubahan ke arah kemajuan dengan meninggalkan kebiasaan lama. Sehingga lebih ditekankan pada masyarakat desa yang berada di pedalaman dan kurang memahami perubahan/ pengaruh dari kehidupan kota. Terdapat beberapa Ciri masyarakat desa. Menurut Redfield, ciri masyarakat pra industri atau primitif meliputi :

- 1) Agak rendah perkembangan pengetahuan dan teknologinya.
- 2) Komunitasnya kecil (sampai ratusan jiwa).
- 3) Belum banyak mengenal pembagian kerja dan spesialisasi.
- 4) Masih tidak banyak deferensiasi kemasyarakatan.

5) Tidak ada heterogenitas kebudayaan.

6) Terdapat ciri orde moral yaitu prinsip hidup yang mengikat.

Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat yang semakin maju, masyarakat primitif semakin lama semakin sedikit, akibat dari dinamika dalam masyarakat yang pluralistik, lambat laun masyarakat primitif menjadi sebuah desa yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisi dan budaya yang masih mereka pegang. Pada masyarakat desa dengan segala perkembangannya terus mengalami perubahan dengan segala dinamikanya terutama yang berhubungan sistem yang diadun oleh masyarakat desa itu sendiri dengan yang semakin deras pengaruh kota yang berimbas pada masyarakat desa, misalnya akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tidak bisa terhidarkan lagi oleh masyarakat desa, misal adanya Hand phone, televisi, radio, media sosial dan lain sebagainya yang semakin mempengaruhi dan mewarnai gaya hidup suatu masyarakat. Akibat dari perkembangan itu, setiap desa memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda antara desa yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan ciri masyarakat desa di Indonesia meliputi:

- a. Berkaitan dengan tradisi masyarakat.
- b. Memiliki rangkaian sistem teknologi yang sederhana.
- c. Bersifat tetap/ tidak banyak mengalami perubahan
- d. Memiliki sifat sederhana dan daya pakai serta produktivitas yang relatif rendah.
- e. Dalam beberapa hal memiliki sifat rasional.
- f. Tingkat buta huruf relatif tinggi.
- g. Hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks
- h. Ekonomi produksi untuk keperluan keluarga.

Dinamika dalam masyarakat pedesaan Secara sosiologis, mentalitas individu dominan dibentuk oleh situasi tata pergaulan dalam masyarakat, termasuk didalamnya tekanan hidup. Masyarakat tradisional yang tinggal di desa pada umumnya masih lugu, polos, jujur, lemah dalam pamrih, semangat solidaritas tinggi dan murni.

Adapun faktor yang mempengaruhi mentalitas tersebut adalah :

- a. Tekanan hidup terasa lebih ringan
- b. Masih memiliki waktu yang cukup dan seimbang antara rohani dengan keduniawian.

- c. Letaknya di pedalaman berakibat belum banyak dicemari pengaruh media massa.
- d. Kehidupan paguyuban menajadikan warga saling mengenal dan akrab.

Masyarakat pedesaan atau rural community merupakan masyarakat yang pada umumnya memiliki mata pencaharian bertani, berkebun, berladang. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan dan mempunyai hubungan yang erat serta mendalam di antara anggotanya. Cara bertani masih dilakukan dengan tradisional dan tidak efisien karena belum dikenal mekanisasi dalam pertanian. Kegiatan bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga atau masyarakatnya sendiri, bukan untuk dijual. Ditinjau dari aspek kepemimpinan, hubungan antara pemimpin dan rakyat berlangsung secara informal. Seorang pimpinan memiliki beberapa kedudukan dan peranan yang sulit dipisahkan, sehingga segala sesuatu dipusatkan pada seorang kepala desa. Perubahan pada masyarakat pedesaan sulit dilakukan karena pola pikir masyarakat (terutama generasi tua) masih didasarkan pada tradisi. Disamping itu juga kurang meratanya proses pembangunan dan informasi sehingga menimbulkan kondisi yang kontras antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Dengan berkembangnya iptek dan informasi melalui media massa mulai masuk ke masyarakat pedesaan. Hal ini berakibat perubaha karakter/watak, bahkan menghilangkan karakter masyarakat pedesaan, meskipun pengaruh media massa tidak selalu negatif. Di Indonesia, desa memiliki peran penting, mengingat mayoritas penduduk tinggal di pedesaan. Menurut Bintarto, desa memiliki fungsi :

- a. *Hinterland* atau daerah dukung yang berperan sebagai daerah pemberi makanan pokok yang tidak dapat dihasilkan kota.
- b. Dari sudut ekonomi, berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*).
- c. Dari segi kegiatan/okupasi, desa merupakan desa agraris, manufaktur, industri dan sebagainya

Masyarakat pedesaan memiliki keyakinan yang mendalam terhadap norma sosial, sehingga mereka memiliki sifat sulit berubah. Hal ini menguntungkan dalam pembakuan akhlak dan

budi pekerti, namun merugikan dalam pengembangan iptek. Kepatuhan warga bukan karena takut terhadap sanksi sosial, melainkan keyakinan mendalam akan kebenaran nilai sosial dalam norma. Faktor yang mendukung kepatuhan murni yaitu:

- a. Kehidupan rohani lebih tebal dan berkembang lebih subur.
- b. Tuntutan hidup relatif ringan.
- c. Letaknya yang terpencil dan komunikasi tertutup menghambat masuknya pengaruh negatif.
- d. Jumlah penduduk relatif sedikit dan saling mengenal.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, desa menjadi sebuah tempat yang memiliki teologi budaya yang berbeda, dimana pada masyarakat desa tersebut memiliki dinamika yang berbeda dengan desa yang lainnya, sosok desa di yang ada di sekitar pinggiran kota. Desa seperti ini sebagai desa yang sudah menerima dan mengadopsi kebudayaan kota dengan sistem pemerintahan desa dengan melaksanakan semua kebijakan pemerintahan desanya serta menerima sistem industri, namun dipihak lain masyarakat desa sekitar pinggiran kota ini masih mempertahankan nilai-nilai tradisi budaya, pada masyarakat yang demikian biasanya disebut masyarakat transisi. Bahasa lain sebagai masyarakat *ambigua*, artinya mereka sama dengan masyarakat kota pada umumnya, namun masih mempertahankan nilai-nilai tradisi budaya sebagai warisan dari leluhurnya.

Pembangunan dan perkembangan industri di sekitar dan dalam wilayah desa telah menyebabkan perusahaan sosial ekonomi dan berdampak positif dan negatif pada masyarakat tersebut. Perubahan sosial ekonomi masyarakat meliputi:

1. Perubahan mata pencaharian, yaitu sebelum industri bermata pencaharian di sektor pertanian setelah adanya industri masyarakat beralih ke sektor industri dan jasa.
2. perubahan kesempatan kerja, yaitu setelah berkembangnya industri maka peluang kesempatan kerja semakin luas.
3. perubahan tingkat pendapatan, adanya perubahan pendapatan masyarakat setelah berkembangnya industri.
4. perubahan jumlah sarana dan prasarana

Dengan masuknya industrialisasi pada wilayah pedesaan tentu akan membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif terhadap masyarakat adalah penciptaan peluang usaha dan pekerjaan, yaitu terciptanya peluang usaha dan pekerjaan

yang lebih luas bagi masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya terhadap masyarakat adalah pencemaran lingkungan antara lain polusi air bersih, polusi kebisingan suara, dan polusi udara. dampak negatif lainnya adalah adanya potensi konflik, disebabkan oleh kecemburuan sosial yang disebabkan oleh kecemburuan sosial sebagian orang asli desa terhadap masyarakat pendatang dalam kemudahan mengakses pekerjaan khususnya di sektor industri.

C. Industri, Perubahan Sosial dan Masyarakat Pinggiran

Titik berat pembangunan nasional menekankan pada sektor industri, dengan harapan sektor ini dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri, selain menaikkan nilai ekonomi suatu komoditi, juga dapat membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat, yaitu memberikan alternatif lapangan kerja baru. Semua orang menyadari bahwa masyarakat hidup dan bekerja dalam suatu lingkungan senantiasa mengalami perubahan. Perubahan di suatu bidang secara langsung akan mengakibatkan perubahan di bidang lain. Perubahan dalam peningkatan taraf hidup akan dapat mempengaruhi dan mengubah sikap, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai yang selama ini menjadi pedoman mulai mengalami benturan yang diakibatkan masuknya pengaruh nilai dari luar. Perubahan itu dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku dan yang lainnya.

Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada didalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang telah mencapai peradaban tertentu, berarti telah mengalami evolusi kebudayaan yang lama dan bermakna sampai tahap tertentu yang diakui tingkat IPTEK dan unsur budaya lainnya. Dengan demikian, masyarakat tadi telah mengalami proses perubahan sosial yang berarti, sehingga taraf kehidupannya makin kompleks. Proses tersebut tidak terlepas dari berbagai perkembangan, perubahan dan

pertumbuhan yang meliputi aspek-aspek demografi, ekonomi, organisasi, politik, IPTEK dan lainnya.

Perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungan interaksi antar orang, organisasi atau komunitas. Faktor-faktor pendorong perubahan adalah adanya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya, sistem terbuka masyarakat dan heterogenitas penduduk. Perubahan sosial itu bersifat umum meliputi perubahan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, sampai pada pergeseran persebaran umur, tingkat pendidikan dan hubungan antar warga. Dari perubahan aspek-aspek tersebut terjadi perubahan struktur masyarakat serta hubungan sosial. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengilangan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Untuk berlangsungnya kegiatan industri dibutuhkan lokasi strategis agar industri dapat memperoleh keuntungan melimpah. Peletakan lokasi industri di suatu wilayah, akan mengakibatkan perubahan sosial pada wilayah tersebut. Salah satu akibat yang terpenting dari timbulnya industrialisme adalah terbentuknya komunitas-komunitas baru atau perubahan serta pertumbuhan yang cepat.

Perubahan sosial masyarakat pinggiran kota yang dipicu oleh pembangunan industri di daerah tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya adalah aspek ketenagakerjaan. Masyarakat pinggiran kota memiliki karakter yang cepat berubah dan mudah terpengaruh, sehingga perubahan yang terjadi dalam lingkungan cepat di adaptasi. Namun dalam hal perubahan mental bekerja, ternyata belum dapat mengikuti perubahan yang terjadi dalam teknologinya. Pembangunan industri yang pada awalnya ditujukan untuk mendorong kemajuan perekonomian, berpengaruh pula secara sosial terhadap perkembangan masyarakat. Hadirnya industri di pedesaan dengan cepat membangun komunitas di sekitarnya. Tumbuhnya industri di daerah pedesaan akan memunculkan perubahan bagi masyarakat lokal setempat. Tumbuhnya industri di daerah pedesaan akan memunculkan perubahan bagi masyarakat lokal setempat. Perubahan sosial itu sendiri terjadi dalam masyarakat, maupun terjadi karena

faktor-faktor yang datang dari luar. Kalau di lihat saat ini, terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat desa, kebanyakan datang dari luar masyarakat. Komunitas yang ada di sekitar industri, baik yang pada awalnya adalah komunitas pedesaan maupun komunitas diciptakan setelah adanya industri, mengembangkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan kebutuhan industri. Industri memiliki pengaruh yang besar terhadap komunitas untuk menimbulkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Dampak industri terhadap masyarakat sangat banyak, misalnya dampak positifnya yaitu terbukanya kesempatan kerja yang besar yang menyerap pengangguran dan munculnya prasarana dan sarana ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya dapat pula terasa seperti polusi air bersih, pemukiman semakin sesak, perbedaan yang mencolok dalam kehidupan dalam kawasan industri dan sebagainya. Industri memiliki pengaruh yang menimbulkan akibat fisik di dalam masyarakat. Bila suatu wilayah sangat tergantung hanya kepada satu jenis industri, perkembangan industri tersebut akan menentukan apakah wilayah tersebut akan berkembang atau hancur. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat, ada masyarakat yang dapat menerima dan ada yang tidak dapat menerima. Masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan biasanya masih memiliki pola pikir tradisional. Masyarakat tradisional cenderung sulit menerima budaya asing yang masuk ke lingkungannya, namun ada juga yang mudah menerimanya. Hal ini disebabkan unsur budaya asing tersebut membawa kemudahan bagi kehidupannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat hidup dan bekerja dalam suatu lingkungan senantiasa mengalami perubahan. Perubahan di suatu bidang secara langsung akan mengakibatkan perubahan di bidang lain. Perubahan dalam peningkatan taraf hidup akan dapat mempengaruhi dan mengubah sikap dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai yang selama ini menjadi pedoman mulai mengalami benturan yang diakibatkan masuknya pengaruh nilai dari luar. Perubahan itu dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku dan yang lainnya. Perubahan masyarakat pinggiran kota diwarnai dengan tumbuhnya berbagai alternatif lapangan usaha, selain

industri itu sendiri, yang dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Diferensiasi dan segmentasi dalam masyarakat di dorong ke arah homogenitas yang membuat diferensiasi dalam masyarakat tetap fungsional. Sedangkan, perubahan sosial masyarakat pada daerah pedesaan akibat adanya industri misalnya dampak positifnya terbukanya kesempatan kerja yang besar, munculnya prasarana dan sarana ekonomi. Dampak negatifnya dapat pula terasa seperti perbedaan yang menyolok dalam kehidupan dalam kawasan industri tersebut.

D. Masalah Industri Bagi Desa dan Kota

Kota secara fisik dapat didefinisikan sebagai area yang terdiri atas bangunan-bangunan yang saling berdekatan yang berada di atas tanah atau dekat dengan tanah, instalasi-instalasi di bawah tanah dan kegiatan-kegiatan di dalam ruangan kosong di angkasa. Bangunan merupakan tempat yang dapat memberikan perlindungan bagi manusia untuk dapat bertahan hidup. Oleh karenanya, bangunan merupakan unsur pertama yang dibangun di kota setelah air dan makanan tersedia. Kategori utama penggunaan bangunan yang terdiri atas permukiman, komersial, industri, pemerintahan, transportasi merupakan unsur-unsur pembentuk pola penggunaan tanah kota. Selain tersusun atas bangunan seperti kategori di atas, kota juga berisikan struktur atau bangunan yang lain yang bukan berupa bangunan gedung, yaitu: jembatan, gardu-gardu listrik, pengilangan minyak, dan berbagai instalasi lain yang tidak lazim disebut sebagai bangunan, karena struktur bangunan tersebut tidak sebagaimana bangunan umumnya dalam hal menutupi tanah yang ada dibawahnya. Struktur-struktur yang bukan berupa bangunan juga memiliki fungsi yang penting bagi sebuah kota, sebagaimana pentingnya bangunan gedung. Kota juga tersusun atas jaringan utilitas yang berada di bawah permukaan tanah. Bangunan gedung di atas baik yang digunakan untuk permukiman, komersil, industri, pemerintahan maupun transportasi akan terhubung dengan jaringan utilitas umum yang ada di bawah tanah seperti jaringan air bersih, kabel telepon, saluran pengolahan limbah, bak-bak penampungan, gorong-gorong, saluran irigasi dan pengendali banjir (Branch, 1996).

Secara sosial kota dapat dilihat sebagai komunitas yang diciptakan pada awalnya untuk meningkatkan produktivitas, melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja dan memungkinkan adanya diversitas intelektual, kebudayaan, dan kegiatan rekreatif di kota-kota. Suatu wilayah disebut sebagai kota jika wilayah tersebut mampu untuk menyediakan kebutuhan/pelayanan yang dibutuhkan oleh penduduk pada komunitas tersebut.

1. Masalah Permukiman

Pada dasarnya kota terdiri dari bangunan tempat tinggal, perkantoran dan perniagaan. Gambaran tentang satu kota selalu berupa susunan bangunan fisik yang berjajar sepanjang jalan ekonomi, gugus perkantoran pemerintahan dan perniagaan, perkampungan atau permukiman warga kota, rumah ibadah dan pertamanan. Seluruh bangunan fisik ini biasanya berkembang lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan penduduk kota, baik pertumbuhan penduduk kota secara alami maupun karena derasnya arus urbanisasi (Marbun, 1994). Permukiman sebagai bagian dari lingkungan hidup dan merupakan lingkungan hidup buatan adalah salah satu hasil kegiatan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Permukiman terdiri dari kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, dan berfungsi sebagai sarana tempat tinggal untuk beristirahat setelah melakukan tugas sehari-hari, tempat bernaung dan melindungi diri maupun keluarganya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Permukiman sebagai wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya dari para penghuninya. Tidak hanya menyangkut kuantitas melainkan juga kualitas. Selama ini kawasan pemukiman baru lebih ditekankan pada aspek fisik bangunannya saja. Sedangkan permukiman lama yang sudah ada tumbuh dan berkembang dengan pesat tanpa terkendali karena kurang adanya tertib dan pengawasan pembangunan. Kedua hal di atas tersebut mengakibatkan semakin menurunnya kualitas permukiman dalam arti (Marbun, 1994):

- a. Kepadatan bangunan yang terlalu tinggi.
- b. Lenyapnya taman-taman dan ruang terbuka

- c. Tidak mencukupinya jaringan air bersih, listrik dan pembuangan air kotor.
- d. Berkurangnya tingkat pelayanan dan fasilitas umum seperti sekolah, tempat pertemuan dan olahraga, rekreasi, dan lain-lain.
- e. Hilangnya ciri-ciri khas atau karakter spesifik dari daerah permukiman tertentu.

Menurunnya kualitas permukiman yang disertai dengan meningkatnya pencemaran lingkungan dan menipisnya sumber daya alam merupakan masalah penting bagi seluruh negara di dunia. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman merupakan prakondisi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab produktivitas manusia terutama sekali tergantung pada tersedianya wadah yang memadai untuk bekerja, beristirahat sekeluarga dan bermasyarakat. Agar suatu permukiman dapat dikatakan baik, maka suatu permukiman harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain (Departemen Pekerjaan Umum dalam Nasoetion, 1997):

- a. Lokasi kawasan yang baik, seperti tidak terganggu polusi, tidak berada di bawah permukaan air setempat, mempunyai kemiringan rata-rata, memberikan kemungkinan untuk perkembangan selanjutnya, ada keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahnya
- b. Kualitas hunian yang baik, seperti kualitas bahan bangunan yang memenuhi syarat, ventilasi yang cukup, kepadatan bangunan, perbandingan antara luas bangunan dengan kepadatan penghuni, tersedianya penampungan dan pembuangan kotoran manusia.
- c. Ada prasarana lingkungan yang baik, seperti jalan, air bersih, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, dan tersedianya jaringan listrik. Sarana lingkungan yang sesuai dengan kepadatan penduduk, seperti sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, ruang terbuka hijau, dan lain-lain.

2. Masalah Lingkungan

Laju urbanisasi dan pembangunan kota yang tinggi akan membawa dampak tersendiri bagi lingkungan hidup di dalam maupun di sekitar kota. Perkembangan aktivitas ekonomi,

social, budaya dan jumlah penduduk membawa perubahan besar dalam keseimbangan lingkungan hidup di kota. Aktivitas kota dan pertumbuhan penduduk tersebut telah menyita areal taman, tanah kosong, hutan ladang di sekelilingnya untuk tempat tinggal, tempat usaha, tempat pendidikan, kantor, ataupun tempat berolahraga dan untuk jalan. Hal ini otomatis memperburuk keseimbangan lingkungan mulai dari menciutnya areal tanaman, merosotnya daya absorpsi tanah yang kemudian sering berakibat banjir apabila hujan, sampai masalah sampah dengan segala akibatnya.

Demikian pula dengan perkembangan industri dan teknologi mencemari lingkungan dengan asap knalpot kendaraan bermotor, jelaga dari cerobong pabrik, air buangan pabrik dan segala buangan produk obat-obatan anti hama seperti DDT dan lain-lain. Sampah plastik juga turut menambah permasalahan bagi lingkungan hidup karena tidak hancur lebur dengan tanah seperti sampah daun atau sampah lainnya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Akibat dari pembangunan kota dan perkembangan teknologi ini adalah timbulnya pencemaran lingkungan yang berupa (Marbun, 1994):

- a. Pencemaran udara;
- b. Pencemaran air;
- c. Pencemaran tanah;
- d. Kebisingan.

Akibat atau bahaya yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan secara garis besar merugikan manusia, terutama mereka yang tinggal di kota. Kota-kota di Indonesia dan beberapa kota dunia, umumnya menjadi pelanggan penyakit menular seperti kolera, thypus, sesak nafas dan lain-lain. Udara di kota menjadi panas dan berdebu. Air minum tercemar oleh berbagai macam bakteri dan zat kimia yang merugikan kesehatan (Marbun, 1994).

Bahaya pencemaran lingkungan hidup di kota-kota Indonesia semakin hari semakin serius dan akan memberi dampak yang berbahaya pada jangka panjang jika tidak segera diambil langkah-langkah konkrit dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat dalam

menanggulangi masalah lingkungan hidup antara lain (Marbun, 1994):

- a. Menciptakan peraturan standar yang mengatur segala seluk beluk persyaratan pendirian pabrik atau industri;
- b. Adanya perencanaan lokasi industri yang tepat dan relokasi bagi industri yang pada saat ini dirasa sudah kurang tepat;
- c. Memilih proses industri yang minim polusi dilihat dari segi bahan baku, reaksi kimia, penggunaan air, asap, penyimpanan bahan baku dan barang jadi, serta transportasi dan penyaluran cairan buangan;
- d. Pengelolaan sumber-sumber air secara berencana disertai pengamatan terhadap segala aspek yang berhubungan dengan pengolahan air tersebut berikut saluran irigasi yang teratur. Cairan buangan yang berasal dari pabrik yang belum dijernihkan jangan beracmpu dengan sungai yang biasanya banyak dipakai untuk kepentingan air minum dan air cuci;
- e. Pembuatan sistem pengolahan air limbah secara kolektif dari seluruh industri yang berada di daerah industri tertentu;
- f. Penanaman pohon-pohon secara merata dan berencana di seluruh kota yang diharapkan dapat mengurangi debu, panas dan sekaligus menghisap zat kimia yang beterbangan diudara yang kalau mendarat di paru-paru atau bahan makanan dapat menimbulkan penyakit.
- g. Peraturan dan penggunaan tanah berdasar rencana induk pembangunan kota sesuai dengan peruntukannya secara berimbang.
- h. Perbaikan lingkungan sosial ekonomi masyarakat hingga mencapai taraf hidup yang memenuhi pendidikan, komunikasi dan untuk belanja sehari-hari.

Penduduk kota tidak akan sempat berpikir tentang masalah lingkungan hidup kalau tingkat kesejahteraan mereka masih di bawah rata-rata.

3. Masalah Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga; keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang

lebih luas yang berada pada inti pembangunan. Pendidikan memainkan peranan utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Demikian pula halnya dengan kesehatan, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi (Todaro dan Smith, 2006).

Karena perannya yang sangat penting maka pelayanan pendidikan dan kesehatan harus senantiasa ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Todaro dan Smith (2006) mengatakan pada tahun 1950, sebanyak 280 dari setiap 1.000 anak di semua negara berkembang meninggal sebelum mencapai usia lima tahun. Pada tahun 2002, angka tersebut telah menurun menjadi 120 per 1.000 di negara-negara miskin, dan 37 per 1.000 di negara-negara berpendapatan menengah, sementara negara-negara berpendapatan tinggi berhasil menekan angka tersebut menjadi 7 per 1.000 anak. Demikian pula halnya dengan pendidikan, sejak beberapa dekade terakhir kemampuan baca tulis (*literacy*) dan pendidikan dasar sudah dinikmati secara meluas oleh sebagian besar orang di negara-negara berkembang. PBB melaporkan bahwa walaupun masih terdapat 857 juta orang berusia di atas 15 tahun yang buta huruf di dunia pada tahun 2000, namun sekarang 80 persen penduduk dunia telah mampu membaca dan menulis dibandingkan dengan 63 persen pada tahun 1970.

Jhingan (2004) memasukkan pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu unsur modal manusia. Menurut Jhingan (2004) modal manusia adalah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh rakyat suatu negara, termasuk juga kesehatan. Menurut Jhingan (2004) dalam proses pertumbuhan, lazimnya orang lebih menekankan arti penting akumulasi modal fisik. Harbison dan Meyers dalam Jhingan (2004) menjelaskan bahwa sekarang makin disadari bahwa

pertumbuhan persediaan modal nyata sampai batas-batas tertentu tergantung pada pembentukan modal manusia yaitu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh rakyat suatu negara. Penanaman modal pada modal manusia (pendidikan dan kesehatan) sangatlah penting. Jhingan (2004) mengatakan kebutuhan investasi pada pembentukan modal manusia di dalam perekonomian terutama di negara terbelakang dan berkembang menjadi penting karena ternyata investasi modal fisik secara besar-besaran ternyata tidak mampu mempercepat laju pertumbuhan, lantaran sumber manusianya terbelakang.

Pertumbuhan sudah barang tentu dapat juga terjadi melalui pembentukan modal konvensional meskipun tenaga buruh yang ada kurang terampil dan kurang pengetahuan. Tetapi laju pertumbuhan tersebut akan sangat terbatas tanpa adanya faktor modal manusia. Karena itu, modal manusia diperlukan untuk menyiapkan tenaga-tenaga pemerintahan yang semakin penting untuk memperkenalkan sistem baru penggunaan lahan dan metode baru pertanian, untuk membangun peralatan baru komunikasi, untuk melaksanakan industrialisasi, dan untuk membangun sistem pendidikan. Dengan kata lain, pembaharuan atau proses perubahan dari masyarakat statis atau tradisional, memerlukan sejumlah besar modal manusia strategis.

BAB XV MASYARAKAT POS INDUSTRI

**Pada Bab lima belas membahas tentang
Masyarakat Post-Industri di dalamnya terdiri dari:
Konsep Masyarakat Post-Modern, Ciri-ciri Masyarakat
Post-Industri, Perkembangan Masyarakat Post-Industri di
Indonesia, Implikasi Masyarakat Post-Industri di
Indonesia, Masyarakat Post-Industrial Dan Demokratisasi
dan Agama di Era Post-industri.**

A. Konsep Masyarakat Post-Modern

Masyarakat Post-Industri dalam bahasa Inggrisnya "*Post-industrial society*", merupakan konsep yang sering digunakan untuk mengungkapkan karakteristik dari struktur, dinamika dan kedudukan dari masyarakat industri maju. Sebagaimana konsep baru lainnya, seperti postmodern, konsep masyarakat post-industrial berupaya untuk membuat pandangan mengenai perubahan substansial yang dialami masyarakat industri maju sejak akhir Perang Dunia ke II (Edgar F. Borgotta, Rhonda J.V. Montgomery, 2000) Konsep masyarakat post-industrial mengindikasikan perubahan signifikan dalam karakteristik sentral masyarakat industri (*industrial society*) yang menjadi fase sebelumnya dalam hal meningkatnya pemanfaatan teknologi dan mekanisasi bagi kerja, meningkatnya komunikasi, transportasi, pasar, dan income; urbanisme menjadi *way of life*, pembagian tenaga kerja (*division of labor*) semakin kompleks; ditandai dengan peningkatan peran Negara, serta birokratisasi dalam pemerintahan dan ekonomi; juga ditandai dengan peningkatan sekularisasi dan rasionalisasi. Jadi, masyarakat post-industrial merupakan perkembangan lebih lanjut dari masyarakat-masyarakat industri maju

Masyarakat post-industri berbeda dari masyarakat industri klasik karena yang disebut belakangan ini adalah berasal dari masyarakat agraris pra-industri. Masyarakat post-industri lebih memperhatikan produksi jasa daripada barang, mayoritas angkatan kerjanya adalah kalangan kerah putih, bukan pada pekerjaan-pekerjaan manual, dan banyak dari mereka adalah pekerja profesional, manajerial dan teknik. Kelas kerja lama menghilang dan bersama dengan itu

menghilang pula banyak konflik kelas di masyarakat industri. Aliansi-aliansi baru berdasarkan status dan konsumsi menggantikan aliansi berdasarkan kerja dan produksi.

Istilah masyarakat post-industri tampaknya berasal dari Arthur Penty, seorang Sosialis mazhab Guild dan pengikut William Morris, pada akhir abad ke-19. Penty mengharapkan akan munculnya suatu “negara post-industri” berdasarkan pada unit-unit kerja kecil dan terdesentralisasi dari pemerintahan. Konsep ini tidak dipakai lagi hingga dekade 1950-an, ketika dimunculkan dalam wajah yang sama sekali baru. Konsep ini punya makna baru terutama dalam tulisan-tulisan sosiolog Harvard, Daniel Bell.

Dalam banyak karyanya, terutama *The Corning of Post Industrial Society* (1973), Bell mengemukakan bahwa masyarakat industri modern tengah memasuki fase baru evolusi mereka, yakni fase post-industri. Masyarakat post-industri berbeda dari masyarakat industri klasik karena yang disebut belakangan ini adalah berasal dari masyarakat agraris pra-industri. Masyarakat post-industri lebih memperhatikan produksi jasa daripada barang, mayoritas angkatan kerjanya adalah kalangan kerah putih, bukan pada pekerjaan-pekerjaan manual, dan banyak dari mereka adalah pekerja profesional, manajerial dan teknik. Kelas kerja lama menghilang dan bersama dengan itu menghilang pula banyak konflik kelas di masyarakat industri. Aliansi-aliansi baru berdasarkan status dan konsumsi menggantikan aliansi berdasarkan kerja dan produksi.

Masyarakat post-industri adalah masyarakat yang sangat terdidik; tentu saja pengetahuan adalah sumber utamanya, tapi pengetahuan dalam pengertian khusus. Masyarakat industri bekerja atas pengetahuan praktis, yakni pengetahuan yang datang setelah melakukan sesuatu, bukan dari riset murni. Tokohnya yang representatif adalah para penemu seperti Watt dan Edison. Masyarakat post-industri berdasar pada pengetahuan teoretis, pengetahuan yang dikembangkan di universitas-universitas dan lembaga-lembaga riset. Ia tidak hanya mengacu pada pengetahuan teoretis untuk banyak industri khususnya, seperti industri kimia dan *aeronotika*, tapi terus menempatkan semakin banyak bagian yang baik dari sumber daya nasionalnya untuk mengembangkan pengetahuan

semacam itu, dalam bentuk dukungan untuk aktivitas pendidikan tinggi dan riset pengembangan. Perubahan penekanan ini tercermin dalam meningkatnya arti ilmuwan dan profesional “kelas pengetahuan”, lembaga-lembaga pengetahuan seperti universitas. Ini semua pada akhirnya akan menyingkirkan kalangan bisnis dan organisasi bisnis sebagai kelompok penguasa dalam masyarakat.

Penjelasan Bell tentang masyarakat post-industri sangat berpengaruh. Penjelasan itu secara umum memang didasarkan pada generalisasi pengalaman Amerika, tapi banyak sosiolog Eropa menemukan kemiripan yang memadai yang terjadi dalam masyarakat mereka sendiri misalnya, Alain Touraine dalam *Post Industrial Society* (1971), meski dia lebih tegas dari pada Bell, bahwa konflik-konflik dalam masyarakat baru akan sesengit di dalam masyarakat lama. Gagasan-gagasan Bell dapat diterima terutama oleh para *futurolog*, baik di Barat maupun Timur, yang telah menjadikan konsep masyarakat post-industri bagian utama dari pemikiran mereka. Di Eropa Timur, post-industrialisme biasanya diberi suatu tafsiran Marxis, sebagai “tahap lebih tinggi” menuju sosialisme penuh, tapi karena kualifikasi penting itu, penerimaan Eropa Timur terhadap ide post-industri sangat hangat. Masyarakat industri dalam skala yang luas adalah masyarakat kerah putih dan jasa. Tapi ini lebih banyak dikarenakan mereka mengekspor sektor-sektor manufaktur mereka ke negara-negara Dunia Ketiga, tanpa sedikit pun melepas kontrol mereka. Korporasi-korporasi multinasional menempatkan markasnya di kota-kota dunia “post-industri, tapi mendirikan pabrik dan merekrut pekerja di dunia industri, tentu saja karena alasan murah dan kenyamanan politik. Sehingga, masyarakat post-industri mempertahankan dan meneruskan etika serta tujuan sosial industrialisme, yang dalam banyak kasus memenuhi tujuan kepada etika tanggung jawab sosial dan komitmen profesional post-industri yang lebih baru. Ciri yang sama adalah jelas dalam bidang yang punya makna penting, pekerjaan kerah putih dan profesional.

Mungkin kita (hampir) semua sudah menjadi profesional saat ini, tapi banyak pekerjaan profesional telah terindustrialisasi oleh birokratisasi dan penerapan teknologi komputer, sehingga semakin menjadikan pekerja profesional

seperti kaum proletar masyarakat industri. Bagian terbesar dari riset di Universitas serta bagian riset dan pengembangan departemen industri di pemerintahan dikerahkan untuk memperbanyak sekaligus memperbaharui produk-produk dan proses-proses yang sudah ada, seperti desain mobil baru atau pesawat televisi yang lebih canggih. Selain itu, riset diarahkan untuk menemukan cara yang lebih baru dan lebih efisien untuk perang (pertahanan dan riset ruang angkasa) atau mengendalikan jumlah penduduk (kebanyakan ilmu sosial terapan). Dalam kasus mana pun, kita bisa melihat suatu prinsip sosial baru dalam bekerja, seakan-akan menandai datangnya suatu tatanan sosial baru.

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama akibat rangsangan tulisan-tulisan Ivan Illich dan E.F. Schumacher, sebuah konsep baru post-industrialisme telah tumbuh. Dalam banyak hal, ini berkaitan dengan penggunaan semula istilah tersebut oleh Penty. Ia menjelaskan tentang ciri-ciri masyarakat modern yang secara murni mengungkapkan suatu gerakan di balik industrialisme, bukan seperti dikemukakan Bell keberlangsungannya. Meski nostalgia kehidupan pra-industri turut terlibat dalam reformulasi ini, para pemikir yang lebih serius menaruh harapan pada sektor-sektor yang paling maju dari teknologi dan organisasi modern untuk mensuplai batu-batu dinding masyarakat baru. Mereka terutama terkesan oleh kapasitas teknologi modern dalam merampungkan pekerjaan: pekerjaan yang mendatangkan pendapatan. Jika dibiarkan berjalan sendiri, proses ini akan menjadi bentuk bencana pengangguran massal dan terulangnya konflik dekade 1930-an. Tapi mereka juga melihat suatu peluang yang bisa diraih, tergantung pada kemauan politik. Pekerjaan dalam ekonomi formal yang sangat terasionalisasi bisa tereduksi hingga titik paling minim dan dibagi sama rata. Dari upah pekerjaan semacam itu, bersama dengan bentuk tertentu dari jaminan pendapatan minimum, kita bisa membeli teknologi yang tepat” atau “cepat” yang dibutuhkan untuk mendatangkan barang dan jasa yang bagus yang kita inginkan. Sebagian besar pekerjaan bisa diorganisasikan dalam ekonomi informal di antara ekonomi domestik atau komunal yang dihidupkan kembali. Pada 1980-an, Daniel Bell kembali kepada tema masyarakat

post-industri, yang kini dia lebih tegas mengidentifikasinya sebagai masyarakat informasi.

B. Ciri-ciri Masyarakat Post-Industri

Masyarakat post-industrial dicirikan kegiatan produksi untuk menghasilkan informasi yang dimungkinkan oleh adanya teknologi komputer. Jika masyarakat industri kegiatannya terpusat pada pabrik dan mesin penghasil barang material, maka masyarakat post-industri fokus pada pengelolaan dan manipulasi informasi, yang produksinya bergantung pada komputer dan peralatan elektronik lain. Teknologi utamanya digunakan untuk memproduksi, memproses, menyimpan, dan menerapkan informasi. Jika individu masyarakat industri belajar keahlian teknis, maka individu masyarakat post-industri mengembangkan kemampuan teknologi informasi menggunakan komputer dan perangkat teknologi informasi lain sebagai alat bantu kerja. Masyarakat post-industri cenderung mengembangkan *softskill* ketimbang *hardskill*. Percepatan pekerjaan masyarakat post-industri berkali-kali lipat masyarakat industri.

Produksi barang lewat tenaga manusia dalam masyarakat post-industri lebih sedikit. Akibatnya, terjadi peralihan besar-besaran tenaga kerja untuk menjalani profesi guru, penulis, sales, penjual pulsa, operator telepon, operator *foreign-exchange*, pialang saham, termasuk bisnis on-line (*e-business* dan *e-commerce*). Masyarakat post-industri dihadang oleh kian merenggangnya kohesi sosial, rumitnya varian kriminalitas, serta rusaknya lingkungan akibat aktivitas masyarakat sebelumnya (industrial). Masyarakat pemburu dan peramu hingga kini masih dapat ditemui di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Sekalipun jumlahnya semakin sedikit, karena terhimpit proses pembukaan wilayah oleh masyarakat pendatang, mereka tetap masyarakat Indonesia yang punya hak hidup, bermata pencaharian, serta mengembangkan kebudayaannya. Masyarakat *hortikultural* Indonesia ditandai konsep umum perladangan berpindah. Masyarakat seperti ini terutama masih terdapat di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Masyarakat pastoral terdapat di kepulauan Nusa Tenggara, wilayah Indonesia yang punya padang rumput yang luas guna mempraktekkan kehidupan menggembala. Masyarakat agraris

(termasuk nelayan) masih merupakan elemen terbesar masyarakat Indonesia dan ini ditandai masih adanya Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, kendati ditandai perhatian mereka yang setengah hati. Masyarakat industrial menempati ruang hidup di kota-kota besar. Masyarakat Post-industrial menggejala di kota-kota industri Indonesia, yang kendati kuantitas definitifnya sulit diprediksi, tetapi dipastikan meningkat seiring mewabahnya penggunaan teknologi virtual *communication*, data digital, telepon seluler, dan didukung pengembangan *backbone-backbone* kabel internet yang massif. Masyarakat tersebut saling berkelindan, jenis yang satu ada bercampur di sisi jenis lainnya. Namun, karakteristik mereka yang cukup berlainan menghendaki penyikapan yang berbeda. Dalam konteks perbedaan ini negara hadir sebagai regulator dan antisipator masalah. Terdapat beberapa ciri-ciri khusus masyarakat Post-Industri yaitu:

1. Metode pembiayaan yang tinggi;
2. Evaluasi riset, yang hasilnya dapat dipakai untuk alokasi masa depan sumber-sumber penelitian yang langka;
3. Penentuan proses kondisi dan setting untuk penciptaan kreativitas dan produktivitas;
4. Proses penemuan-penemuan teknologis yang dibuat dalam laboratorium bisa ditransfer sehingga lebih siap untuk diproduksi;
5. Analisa arah dan kecepatan perkembangan pengetahuan dan tata cara penyesuaian guru-guru terhadap perkembangan terakhir;
6. Masalah monitoring perubahan sosial.

Dalam hipotesa utama Bell menjelaskan bahwa dunia Barat sedang mengalami sebuah proses transisi dari masyarakat industri menuju masyarakat post-industri. Konsep masyarakat post-industri ini dapat lebih dipahami lewat analisa lima dimensi atau komponen Bell, (1973:14-33), sebagai tokoh post-Industri yakni:

Dimensi *pertama* menyangkut sektor ekonomi, di mana masyarakat penghasil barang jadi beralih menjadi masyarakat penghasil jasa. Karena industri suatu bangsa semakin maju, semakin besar prosentase angkatan kerja yang bergerak meninggalkan sektor pertanian atau perkebunan menuju ke

sektor manufaktur ekonomi. Karena terjadi kenaikan pendapatan nasional, sebagai konsekuensi dari transisi itu, maka permintaan di sektor jasa akan menjadi lebih besar. Dalam pandangannya Bell (1973:15) menyatakan bahwa, “Amerika Serikat dewasa ini merupakan satu-satunya negara di dunia di mana sektor jasa bertanggung jawab bagi lebih separuh pengerjaan total dan menarik lebih dari separuh hasil pendapatan nasional (GNP)”. Dimensi *kedua*, terjadi di lapangan pekerjaan. Di sini terdapat perubahan dalam jenis kerja, yaitu keunggulan kelas profesional dan teknis: “Di Amerika Serikat, di tahun 1956 untuk pertama kali dalam sejarah peradaban industri, jumlah karyawan berkerah putih (White collar) dalam struktur pekerjaan telah melampaui jumlah karyawan berkerah biru (Blue collar) (Bell, 1974:17)”. Pertumbuhan pekerjaan profesional dan teknis itu bahkan lebih mengejutkan lagi. Dimensi *ketiga*, masyarakat post-industri ialah “pemusatan pengetahuan teoritis sebagai inovasi dan pembentukan kebijaksanaan bagi masyarakat” (Bell, 1973:14). Perubahan dalam dimensi pengetahuan dapat dilihat dari perbedaan masyarakat post-industri dan masyarakat industri. Dalam memproduksi barang, dalam masyarakat industri hubungan utama terletak pada koordinasi manusia dan mesin. Bell (1963:20) menyatakan: “masyarakat post-industri terorganisasi di sekitar pengetahuan, demi tujuan kontrol sosial dan pengarahan inovasi serta perubahan; dan hal ini sebaliknya melahirkan hubungan-hubungan sosial dan struktur-struktur baru yang harus ditangani secara politis”. Dalam masyarakat post-industri pengetahuan teoritis-abstrak lebih unggul dari pengetahuan empiris yang konkret (penemuan). Pengetahuan teoritis ini penting sebagai sumber bagi keputusan-keputusan kebijakan. Dimensi *keempat*, ialah orientasi masa depan, yang mengendalikan teknologi dan penaksiran teknologis. Dengan kata lain masyarakat post-industri bisa berencana dan mengontrol pertumbuhan teknologi itu daripada hanya “membiarkan segalanya terjadi”. Dan dimensi *kelima*, mencakup pengambilan keputusan dan penciptaan “teknologi intelektual” baru. Dimensi ini berhubungan dengan metode atau cara-cara memperoleh pengetahuan. Teknologi intelektual mencakup penggunaan pengetahuan ilmiah untuk memperinci cara melakukan

sesuatu dengan cara yang dapat diulang melalui substitusi aturan-aturan, pemecahan masalah bagi penilaian-penilaian yang sifatnya intuitif.

Dalam pernyataan teoritisnya yang pertama Bell menganalisa perubahan dalam karakter pengetahuan dan struktur masyarakat post-industri. Hal ini meliputi pertumbuhan dan percabangan ilmu yang berjalan cepat, timbulnya teknologi intelektual baru, dan kodifikasi pengetahuan teoritis. Pergeseran tipe pengetahuan ini memiliki efek terhadap ekonomi masyarakat kita, mengenai bentuk perubahan ini, Bell memberikan perhatiannya. Terdapat beberapa faktor penyebab munculnya masyarakat Post-industri adalah *The Great Depression dan Penyebab Utamanya*. Yang dimaksudkan adalah: *The Great Depression*, adalah gabungan dari dua kata yaitu *the great* yang artinya besar dan *depression* yang mempunyai tekanan jiwa atau kemunduran dalam dunia perdagangan. Jika dikaji dalam ranah pemikiran Daniel Bell, *The Great Depression* adalah tekanan jiwa yang secara besar-besaran dialami oleh seluruh masyarakat dunia di era post-industri, hal ini tidak terjadi begitu saja tetapi ada penyebab utama yang menyebabkan fenomena itu terjadi. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat menyebabkan umat manusia kalang kabut dalam menghadapinya, seperti halnya kegiatan ekonomi yang pada era industri menjual barang, akan tetapi pada era post-industri yang diperjual belikan bukan barang lagi melainkan jasa. Selain pada sektor ekonomi, perubahan juga terjadi pada sektor kepemilikan penguasaan yaitu pada era pra-industri yang memegang kuasa adalah pemilik tanah dan militer sedangkan era industri yang memiliki kuasa adalah para pengusaha dan pada era post-industri yang memiliki kuasa adalah yang mempunyai profesionalitas dan pengetahuan. Jadi, dalam era ini universitas dan lembaga-lembaga pendidikan benar-benar memegang peran yang sangat penting.

C. Perkembangan Masyarakat Post-Industri di Indonesia

Post-industrial *society* (masyarakat post-industrial) merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk mengungkapkan karakteristik dari struktur, dinamika dan kedudukan dari masyarakat industri maju. Sebagaimana

konsep baru lainnya, seperti postmodern, konsep masyarakat post-industrial berupaya untuk membuat pandangan mengenai perubahan substansial yang dialami masyarakat industri maju sejak akhir Perang Dunia ke II. Konsep masyarakat post-industrial mengindikasikan perubahan signifikan dalam karakteristik sentral masyarakat industri (*industrial society*) yang menjadi fase sebelumnya dalam hal meningkatnya pemanfaatan teknologi dan mekanisasi bagi kerja, meningkatnya komunikasi, transportasi, pasar, dan *income*; urbanisme menjadi *way of life*, pembagian tenaga kerja (*division of labor*) semakin kompleks; ditandai dengan peningkatan peran negara, serta birokratisasi dalam pemerintahan dan ekonomi; juga ditandai dengan peningkatan sekularisasi dan rasionalisasi. Jadi, masyarakat post-industrial merupakan perkembangan lebih lanjut dari masyarakat-masyarakat industri maju.

Dalam konteks pembahasan mengenai perkembangan masyarakat Indonesia walaupun Indonesia belum termasuk Negara industri maju bukan berarti pembahasan ini tidak relevan. Pembahasan mengenai masyarakat post-industrial dalam konteks masyarakat Indonesia memiliki empat relevansi penting, yaitu :

1. Terjadinya proses globalisasi yang menyebabkan seluruh dunia terkena dampaknya, termasuk Indonesia. Secara literal, globalisasi diartikan sebagai proses transformasi dari fenomena lokal menjadi fenomena global; sebuah proses dimana warga dunia tersatukan menjadi masyarakat tunggal. Proses ini merupakan kombinasi dari aspek ekonomi, teknologi, sosiokultural dan kekuatan politik;
2. Peran sentral sains dan teknologi serta meningkatnya Perkembangan Teknologi informasi (*information age*). Terdapat kesepakatan umum bahwa beberapa tahun terakhir ini telah terjadi ledakan teknis (*explosion of techniques*), yang telah mempengaruhi kemajuan dalam banyak bidang: atom, sains komputer, laser, teknologi ruang angkasa dan rekayasa genetika (Jacques Ellul, 1986). Lima bidang utama ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi kemajuan bidang-bidang lainnya, termasuk teknologi informasi dan komunikasi yang bertumpu pada sains komputer. Dalam sepanjang sejarah, kemajuan teknologi

informasi dan komunikasi, energi dan teknologi transportasi, bioteknologi dan *life science*, *agreculture* dan industri, teknologi senjata, dan bidang *saintifik* teknis, telah memainkan peran penting dalam mengendalikan perubahan di berbagai kegiatan manusia, baik dalam bisnis dan perbankan, industri dan manufaktur, kebijakan pemerintah dan militer, entertainment dan berita;

3. Munculnya konsep *knowledge society*. Dalam pembahasan mengenai masyarakat post-industrial, telah muncul bersamanya konsep *knowledge society*. Konsep ini dimunculkan untuk menggambarkan perkembangan masyarakat yang secara sentral dipengaruhi oleh peran *knowledge* dalam semua bidang kehidupan;
4. Kedudukan agama dalam masyarakat post-industrial yang sekular.

Sejak kebangkitan sains dan teknologi, kemudian revolusi industri, masyarakat Barat menegaskan dirinya sebagai masyarakat sekuler. Hal ini menandai era baru perpisahan antara agama dan kehidupan masyarakat modern. Apa yang terkandung dalam sekularisme yang paling tampak adalah dalam institusi dan perilaku. Dalam institusi politik misalnya, jika dalam masyarakat pra-modern dihubungkan dengan Tuhan, maka dalam Negara Barat modern, Negara lepas dari hubungan semacam itu. Gereja sekarang ini terpisah dari struktur politik (kecuali Britania dan Skandinavia). Agama telah menjadi urusan pribadi (Charles Taylor, 2007).

Teori perkembangan masyarakat, disebutkan pada teori Karl Marx (corak produksi), Rostow (Globalisasi), Daniel Bell (*social forecasting*). Perkembangan corak produksi Karl Marx dimulai dari tahapan primitif: aktivitas ekonominya adalah berburu-meramu, pengembalaan, dan pengelolaan lahan secara sederhana. Tidak ada spesialisasi pekerjaan dan kepemilikan pribadi, hubungan sosial didasarkan atas ikatan kekeluargaan (kesukuan) sehingga tidak ada kelas-kelas sosial (komunisme primitif). Zaman perbudakan: seperti pada zaman Yunani dan Romawi Kuno. Terjadi karena adanya penambahan penduduk, produksi pertanian dan proses jual-beli. Zaman feodal: merujuk pada tatanan sosial-ekonomi Perancis dan Inggris sejak abad ke-8 hingga menjelang revolusi

Perancis (1789). Masyarakat ini didominasi oleh kaum bangsawan sebagai pemilik tanah. Zaman kapitalis: muncul sekitar abad ke-16 dan menjadi dominan dengan revolusi industri. Pada masyarakat ini, kegiatan produksi setidaknya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan saja, melainkan untuk mendapatkan keuntungan. Komunis: ditandai dengan sistem kepemilikan bersama alat produksi serta tidak adanya kelas-kelas sosial. Manusia dihargai karena manusianya, yaitu kemampuan produktif manusia dikembangkan secara seimbang dan memuaskan.

Menurut Rostow mengenai globalisasi, terbagi menjadi lima bagian yaitu: masyarakat tradisional (tingkat produksi masih rendah dan terbatas serta terpusat pada sektor pertanian; prasyarat lepas landas (mulai menerapkan ilmu pengetahuan, peningkatan modal, pembangunan infrastruktur dan adanya dukungan terhadap *enterpreneuship*, tahap lepas landas (ditandai dengan efektifitas investasi dan meningkatnya tabungan masyarakat), kearah dewasa (penerapan teknologi secara efektif, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan tenaga kerja terdidik, konsumsi tinggi: perhatian masyarakat pada masalah kualitas konsumsi dan kesejahteraan sosial, serta tidak lagi memperhatikan masalah produksi. Ramalan sosial (*Social Forcasting*) menurut Daniel Bell yaitu: masyarakat pra-industri: ditandai dengan sektor ekonomi yang sangat bergantung pada alam (sektor pertanian), masyarakat industri: ditandai dengan sektor ekonomi yang bertumpu pada aktivitas produksi barang dengan menggunakan kekuatan energi, masyarakat post-industri: ditandai dengan peralihan dari masyarakat penghasil barang menjadi masyarakat penghasil jasa; pertumbuhan jenis kerja kelas profesional dan teknis; pemusatan pengetahuan teoritis; orientasi masa depan; serta pengambilan keputusan dan penciptaan teknologi teknologi baru.

Masyarakat post-industri lebih memperhatikan produksi jasa dari pada barang, mayoritas angkatan kerjanya adalah kalangan kerah putih, bukan pada pekerjaan-pekerjaan manual, dan banyak dari mereka adalah pekerja profesional, manajerial dan teknik. Kelas kerja lama menghilang dan bersama dengan itu menghilang pula banyak konflik kelas di masyarakat industri. Dalam masyarakat pra industri yang

berkuasa adalah pemilik tanah (yang melindungi tanah itu), dan kekuasaan mereka berdasarkan kekuatan. Sedangkan dalam masyarakat industri yang berkuasa adalah kaum pemilik modal atau kaum kapital, yang kekuasaannya berdasarkan pengaruh tak langsung dari politik. Selanjutnya masyarakat post industri dimana kekuasaan mereka berada di tangan universitas dan lembaga-lembaga, sedang figur sentral dominannya adalah kaum ilmuwan dan peneliti, sarana kekuasaan yang digunakannya ialah keseimbangan antara tenaga-tenaga rasional (yang disediakan oleh para ilmuwan), dan kekuatan-kekuatan politik yang diperhitungkan (yang dijalankan oleh elit kuasa), dan dalam hal ini politik bukan salah satu sistem rasional. Dengan demikian, masyarakat post industri politik semakin berperan dan politik tidak hanya sebagai suatu sistem rasional dalam pengertian yang sama dengan yang terdapat dalam teknologi dan ilmu.

D. Implikasi Masyarakat Post-Industri di Indonesia

Sebagai seorang tokoh Post-Industri Daniel Bell mencoba membuat ramalan sosial (*social forecasting*) sebagai hasil studinya. Hasil ramalan sosialnya ini merupakan gabungan dari perspektif makro teoritis, yaitu berasal dari teori sosiologi klasik, digabung dengan perspektif tentang sosiologi baru yang lebih relevan dan bermanfaat sehingga sejalan dengan perkembangan kekinian. Bell menjelaskan ramalan sosial ini penting, sebab dari sinilah dapat dibuat garis besar peringkat kemungkinan dari berbagai pengalaman yang lalu. Dalam peristiwa masa lalu, terdapat keajegan dan keteraturan fenomena yang dari situ dapat dibuat kecenderungan akan peristiwa dimasa mendatang. Namun, dalam realitasnya tidak semua peristiwa itu ajeg dan teratur, seperti peristiwa pemberantasan korupsi. Baru-baru ini berita tentang KPK yang mengalami penurunan produktivitas (yaitu menyidik 10 kasus pada triwulan-I 2015, padahal biasanya mampu menyidik 15 kasus) diterbitkan, KPK yang sejak tahun 2003 menjadi tameng terkuat dalam memerangi korupsi kian meredup karena beberapa “bintang”-nya terjerat kasus hukum. Dan sebaliknya, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara RI justru dapat mengungkapkan lebih banyak kasus. Disini Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara RI ingin merebut kembali kepercayaan

masyarakat. Meskipun tidak ada keajegan dan keteraturan dalam suatu fenomena sosial, bukan berarti ramalan sosial omong kosong. Menurut Bell, ramalan sosial tidak hanya meramalkan hasil, namun juga dapat memperinci berbagai rintangan atau batas-batas dimana berbagai keputusan kebijakan dapat lebih diefektifkan.

Penjelasan teori ramalan sosial ini diambil dari kedua buku Daniel Bell. Dalam buku pertamanya "*The Coming of Post Industrial Society*", berbicara tentang konsekuensi politik dan struktur sosial dari masyarakat post industri. Sedangkan buku keduanya yaitu: "*The Cultural Contradictions of Capitalism*" mengungkap tentang kebudayaan masyarakat post industri. Dari karya-karyanya Bell tidak terpengaruh pemikiran dari tokoh-tokoh klasik, ia memiliki ketertarikan yang sama dengan Mills dan Etzioni yang mana teori-teori ini dapat menjadi pijakan dari jaman teori sosiologi post modern itu muncul. Kembali kepada teori Bell tentang ramalan masyarakat post industri. Disini Bell memecah 3 jaman, yaitu jaman pra industri, jaman industri dan yang terakhir inilah yang disebut dengan jaman post industri. Bila pada jaman pra industri perekonomian bergantung pada oleh Sumber Daya Alam seperti bercocok tanam, menangkap ikan dan hasil tambang. Maka, pada jaman industri masyarakat beralih menggantungkan ekonominya kepada mesin. Dan ketergantungan ekonomi itu berubah ketika masyarakat memasuki gerbang masyarakat post industri, yaitu masyarakat lebih tertarik memproduksi pada jasa daripada barang (misalnya pendidikan, kesehatan). Dari jarum ketertarikan ekonomi yang berubah inilah nantinya akan mengubah sistem pembagian kekuasaan dalam struktur sosial masyarakat post industri.

Dalam masyarakat post industri, pendidikan, teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi unggulan. Bukan pemilik alat produksi dan modal lagi (seperti penjelasan Karl Marx tentang jaman industri). Bell menjelaskan bahwa lapangan pekerjaan pada jaman ini memberi peluang sukses kepada kelas profesional seperti dokter dan guru. Sehingga pengambilan kebijakan negara erat dipengaruhi oleh kelas profesional tadi. Misalnya, dalam membuat kebijakan transportasi dalam mengurangi kemacetan Jakarta pemerintah membuat

monorail. Dalam pengambilan keputusan itu tentu pemerintah menyeret orang berlatar belakang pendidikan arsitek, teknik sipil, pembangunan wilayah kota (PWK) dan lainnya. Begitu juga kebijakan yang lain seperti strategi pemberantasan kemiskinan, pelayanan kesehatan dll. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sumber unggulan, maka masyarakat pada jaman post industri berlomba untuk mencari ilmu sebanyak mungkin melalui penyedia jasa pendidikan. Dan semakin kesini jenis sekolah sangat beragam, seperti PAUD untuk anak dibawah 5 tahun, artinya masyarakat menjadi mempunyai orientasi pada masa depan. Masyarakat mulai menyiapkan kehidupan masa datang, selain lewat pendidikan mereka juga menanamkan investasi dalam bisnis. Sehingga inilah yang membuat Ralf Dahrendorf menyempurnakan teori Karl Marx, bahwa pemilik modal bukan perseorangan lagi, melainkan dibagi kepada beberapa orang dalam bentuk saham.

Bisnis dalam bidang jasa sangat menguntungkan. Selain itu negara juga memfokuskan diri pada penyedia jasa, namun hal itu juga dijadikan celah untuk mencari keuntungan dengan "cara lain". Hal ini terbukti dari laporan Kompas tanggal 28 Mei 2015 yang mengatakan bahwa lembaga terkorup berasal dari penyedia jasa, yang pertama adalah dalam bidang keamanan, kedua soal keadilan, ketiga kesehatan dan keempat pendidikan.

Dimensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipenuhi oleh orang terpelajar dan terdidik tadi menjadi struktur kelas baru dalam masyarakat post industri. Kelas tertinggi diduduki oleh mereka yang mengecap pendidikan profesional (dokter, guru) sedangkan kelas kedua diisi kelas semi profesional (buruh, sales) yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi untuk meraihnya. Karena kelas terpelajar menjadi unggulan, maka dalam berbisnis pun bekerjasama dengan kelas terpelajar untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan konsumen. Namun, pada jaman ini masyarakat menjadi sangat berorientasi pada keuntungan, Bell sendiri menyebut hal ini dengan "*mode economizing*". Demi mereguk keuntungan masyarakat tidak ramah terhadap lingkungan, tidak memperhatikan kenyamanan konsumen (jasa) ataupun kesehatan konsumen (bisnis makanan) dan hanya menekankan pada persoalan individualitas. Contoh nyatanya

adalah bisnis jasa transportasi bus dalam kota atau antar kota. Pertama, jasa transportasi sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat post industri, karena transportasi membuat seseorang mencapai tempat sekolah, kerja atau memenuhi kebutuhan lainnya. Kedua, penyedia jasa transportasi bus tidak hanya satu, sehingga terjadi persaingan dalam mencari penumpang. Ketiga, orientasi pada penghitungan uang tadi membuat sopir bus balapan dengan bus lainnya. Sehingga, bus penuh ataupun bus *nggebut* tetap dipaksa beroperasi menjadikan penumpang mabuk darat tidak lagi menjadi pertimbangan, artinya kenyamanan konsumen kurang diperhatikan. Keempat, dari orientasi mencari keuntungan tadi perawatan bus diremehkan. Asal bus dapat berjalan, tidak dilakukan peremajaan. Maka banyak ditemukan bus kota yang ringsek, asap hitam mengepul dari knalpot tetap dibiarkan beroperasi. Padahal hal tersebut tidak baik untuk lingkungan, yaitu peningkatan polusi. Contoh lainnya adalah tumbuh menjamurnya pasar modern yang secara tidak langsung dapat mematikan pasar tradisional ataupun warung kecil. Sedangkan masyarakat post industri lebih menekankan pada persoalan individualitas daripada kepentingan bersama adalah tentang merebaknya masalah individu yang didukung oleh media dan produsen sehingga seolah-olah tampak menjadi masalah besar yang harus segera ditanggulangi dan dicari solusi daripada masalah sosial itu sendiri. Maka tidak heran apabila masyarakat pada jaman ini menganggap masalah sosial seperti kasus lumpur lapindo, pengungsi Rohingya dan gelombang panas yang menyebabkan sekitar 1000 penduduk India meninggal dunia tidak lebih penting daripada persoalan jerawat di pucuk hidup, bercabang diujung rambut dan kulit yang tidak terlindung oleh UVA dan UV B sehingga dapat menyebabkan kulit gosong. Disini industri kosmetik dan kecantikan menjadi dalang utama.

Untuk itulah pada masyarakat post industri ini diterapkan apa yang dinamakan "*mode sociologizing*". Yaitu kepentingan yang diterapkan untuk umum sehingga menciptakan keadilan sosial. Misalnya saja dalam kasus pasar modern tadi, pemerintah memberikan investor membangun pasar modern tadi dengan syarat harus ada timbal balik dengan masyarakat sekitar. Seperti memberi kucuran dana atau sistem tenaga

kerja diambil dari warga sekitar. Begitu pula yang dilakukan industri lain, seperti aksi memberi beasiswa Djarum Plus yang dilakukan industri rokok. Sehingga, ketika ada perusahaan mengatas namakan dirinya memberi bantuan uang, beasiswa, penyuluhan, ataupun aksi *go green* sekalipun, bukan berarti perusahaan tersebut baik dan tidak melulu berorientasi pada keuntungan, namun hal tersebut sudah menjadi kewajiban mereka untuk bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Penjelasan masyarakat post industri ramalan Daniel Bell membuat kita berpikir bahwa masyarakat terus mengalami perubahan sosial. Dari jaman pra industri beralih kepada jaman industri dan akhirnya mencapai jaman post industri. Kondisi sosial ekonomi menjadi sumbu perubahan itu, meskipun lama prosesnya. Disinilah terjadi kesadaran bila masyarakat itu tumbuh dan berkembang. Tidak dapat diprediksi akan bagaimana kedepannya. Namun kata Bell, dapat diramalkan rintangan sehingga dapat diambil kebijakan yang adil bagi semua pihak.

E. Masyarakat Post-Industrial Dan Demokratisasi

Partai politik sebagai pilar demokrasi. Keberhasilan partai politik dalam pemilihan umum ditentukan oleh strategi politik yang terus berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan perilaku memilih sebagai wujud perkembangan masyarakat. Perubahan atau pergeseran perilaku politik dapat dilihat dalam dua periode yaitu dekade abad ke-19 dengan masyarakat industrial dan dekade abad ke-20 sebagai periode post-industrial. Pada masyarakat industrial identifikasi partai politik berdasar ideologi dan politik aliran masih sangat jelas. Lipset (Asfar:2006) pada pemilu di Amerika tahun 1984 menunjukkan bahwa penganut Katholik dan Yahudi, kulit hitam dan keturunan latin menjadi pendukung setia Partai Demokrat. Sebaliknya kelompok Protestan Anglo Saxon menjadi pendukung Partai Republik. Begitu juga studi di Eropa tahun 1970-an bahwa perempuan lebih mendukung partai borjuis daripada partai sosialis serta condong ke partai moderat. David Denver juga menyakini perilaku memilih seseorang merupakan pernyataan loyalitas ke partai politik tertentu didasarkan pengalaman individu. Begitu juga dijelaskan oleh Niem dan Wiesberg sebagai bentuk pilihan

rasional yaitu perilaku memilih lebih dipengaruhi oleh alternatif pilihan yang paling menguntungkan atau dengan resiko paling rendah.

Sedangkan periode post-industrial melahirkan masyarakat yang lebih heterogen dan lebih kompleks dalam menentukan perilaku politik. *Pertama*, berakhirnya perang ideologi semakin mengaburkan identifikasi partai sebagai wujud keterikatan ideologis terhadap partai politik tertentu. Perilaku politik cenderung moderat dan adaptif terhadap perubahan. Goldberg pada pemilu tahun 1994 di Israel menggambarkan sebagai kondisi *a decline of party identification* semakin melemahnya identifikasi partai politik untuk mendapat dukungan politik. *Kedua*, masyarakat post-industrial ditandai dengan lahirnya era-digitalisasi. Teknologi informasi diyakini berpengaruh signifikan terhadap struktur sosial. Perilaku politik tidak lagi dapat dipisahkan berdasar pendekatan klasik seperti sosiologis, psikologis dan rasional. Tetapi berkembang menjadi pendekatan jejaring sosial yang menabrak setiap batas ideologi, struktur sosial yang mapan hingga keterikatan psikologis. Perilaku memilih lebih didasarkan pada pertarungan informasi dari setiap jejaring sosial. Clay Sirky (2011) berpendapat bahwa media sosial memiliki kemampuan fenomenal dalam memicu gerakan politik karena mampu menciptakan dan mengembangkan *shared awareness* kepedulian bersama. Pandangan ini sekaligus menguatkan pendapat Castle (2000) tentang teori *network society* suatu masyarakat post-industrial ditandai dengan perkembangan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap struktur sosial, dari statis menjadi dinamis dengan terciptanya model jejaring sosial.

Harus diakui bahwa saat ini sedang terjadi “perang cyber” yang merubah informasi dunia maya menjadi fakta politik ikut menentukan kemenangan dalam pertarungan politik karena salah satunya mampu memanfaatkan masa melalui *Cyber*. *Swing voters* atau yang sering kita sebut masa mengambang yang sebelumnya pasif non-politis digerakkan melalui persepsi media menjadi bentuk dukungan riil politik maupun suara pemilih saat pemilu. Wajah perkembangan masyarakat post-industrial ditampilkan dalam piramida penduduk Indonesia yang gemuk di tengah. Melahirkan segmen politik dengan

karakteristik masyarakat post-industrial mencerminkan perilaku politik yang dinamis, adaptif, partisipatif, inovatif dan kreatif. Pada segmen politik ini juga banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Mereka yang disebut generasi millennia yaitu penduduk yang didominasi oleh usia 15-64 tahun. Data dari BPS hasil sensus penduduk antar sensus 2015 jumlahnya mencapai 70% dari total penduduk 255,18 juta jiwa. Jika diproyeksikan dalam pemilu 2019 kurang lebih 178.63 juta jiwa. Khusus untuk usia 15-19 yang pada pemilu 2019 telah memenuhi syarat sebagai pemilih (17 tahun atau sudah menikah) dan masuk kategori pemilih pemula kurang lebih 21,11 juta jiwa terdiri dari laki-laki 10,79 juta jiwa dan perempuan 10,32 juta jiwa. Segmen politik terbagi dalam beberapa karakteristik perilaku memilih. *Pertama*, masyarakat dinamis dicerminkan oleh perilaku politik yang tidak menjadikan simbol ideologis menjadi penentu pilihan politik. Bergeser menuju pertimbangan programatik sebagai penentu pilihan politik. Untuk merebutkan segmen politik ini, partai politik harus mampu meleburkan ideologi kedalam bentuk kampanye programatik sebagai salah satu daya tarik. *Kedua*, keterikatan pemilih terhadap partai politik tertentu semakin memudar. Kecenderungan perilaku politik akan semakin variatif dan melahirkan *swing voter* atau pemilih yang belum menentukan pilihan politik semakin meningkat.

Dalam segmen politik ini masyarakat cenderung menentukan pilihan pada detik terakhir pemilihan dengan mendasarkan pilihan politik pada konsep perubahan kondisi pemerintahan yang ditawarkan partai politik. *Ketiga*, pengaruh besar dari teknologi informasi akan menggeser pola-pola kampanye politik konvensional. Menuju model kampanye yang kreatif dan inovatif berbasis media sosial, jejaring sosial, bentuk visual dan menawarkan ke-baharu-an untuk menarik simpati dan dukungan pemilih. *Keempat*, karakteristik rasional tidak lagi didasarkan pada orientasi keuntungan atau kerugian ekonomi, tetapi lebih pada rekam jejak para kandidat dengan bukti nyata. Munculnya figur tokoh-tokoh daerah yang telah berhasil banyak mendapat simpati dari segmen politik ini. Dukungan politik tidak lagi mempertimbangkan identifikasi partai politik pengusung. Maka akan menjadi tantangan baru bagi partai politik untuk menciptakan strategi politik dengan

mengadaptasi perkembangan masyarakat. Dengan demikian pertarungan di “zaman *now*” harus mampu merebut segmen politik *Cyber* secara kreatif dan inovatif menjadi salah satu alternatif yang dapat menentukan keberhasilan partai politik dalam meraih dukungan dalam pemilu akan datang. Fenomena cyber merupakan kajian cukup menarik sebagai bahan perhatian dalam post-industri dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan Daniel Bell.

F. Agama di Era Post-industri

Pada masyarakat post-industrial agama cenderung dianggap sebagai penghalang terhadap kemajuan. Agama dianggap tidak sejalan dengan logika, sains dan teknologi. Bahkan sejak kebangkitan sains dan teknologi, kemudian revolusi industri, masyarakat barat menegaskan dirinya sebagai masyarakat sekuler. Hal ini menandai era baru perpisahan antara agama dan kehidupan masyarakat modern. Apa yang terkandung dalam sekularisme yang paling tampak adalah dalam institusi dan perilaku. Dalam institusi politik misalnya, jika dalam masyarakat pra-modern dihubungkan dengan Tuhan, maka dalam Negara Barat modern, Negara menjadi lepas dari hubungan semacam itu. Gereja sekarang ini terpisah dari sutruktur politik (kecuali Britania dan Skandinavia). Agama telah menjadi urusan pribadi (Charles Taylor, 2007). Dalam masyarakat industri yang sudah maju, sekularisme nampak seperti sebuah keniscayaan sosial dalam proses perkembangan masyarakat akibat kedudukan rasionalisme, sains dan teknologi yang menggantikan peranan agama. Apa yang dulu diperankan oleh agama, kini sudah bisa digantikan dengan lebih baik oleh sains dan teknologi.

Keniscayaan sekularisme dalam proses perkembangan masyarakat telah diberikan basis teorinya sejak awal oleh Auguste Comte, Nietzsche, dan Marx. Mereka menunjukkan argumen bahwa evolusi sosial pasti akan tiba pada sekularisme. Hal itu tak bisa dihindarkan. Namun menurut Barbara A. Stassberg, profesor sosiologi Aurora University, bahwa magis, agama, sains, teknologi dan etika merupakan komponen dari kebudayaan yang berkoeksistensi di setiap tahap evolusi masyarakat dan saling berkaitan serta terjalin satu sama lain dalam jaringan hubungan dengan komponen

lain dari kehidupan sosial dan budaya (Barbara A. Strassberg, 2005). Magis, agama, sains, teknologi dan etika merupakan komponen budaya yang memuaskan individu, sosial dan budaya tertentu dengan perbedaan intensitas dan perbedaan kesadaran atas wilayah operasional mereka diantara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam beberapa kasus, nampak dimana magis telah menggantikan agama, atau sains dan teknologi menggantikan magis dan agama, meskipun bila di teliti secara mendalam hal itu tidak betul-betul nyata (Strassberg). Mengutip apa yang jelaskan John Caiazza, Strassberg menyebutkan istilah *techno-secularism* yang menggambarkan digantikannya agama dari kehidupan masyarakat oleh teknologi.

Akan tetapi Strassberg mempertahankan tesis bahwa perkembangan sains dan teknologi tidak sampai menghilangkan agama atau magis. Menjelaskan *I argue that, at least so far, there is no indication that the current development of technology causes the disappearance of magic and religion* (Strassberg). Jadi, apakah peran agama akan semakin menyusut? Yang jelas peranan agama akan menghadapi tantangan yang lebih berat terutama di era post-industri. Hal ini memang telah dirasakan oleh para penganut agama-agama, tidak terkecuali umat Islam. Dalam beberapa hal mereka harus mengubah cara pandang mereka terhadap doktrin-doktrin agama agar tetap mampu beradaptasi dengan kehidupan modern. Inilah posisi dimana reinterpretasi kitab suci mendapat penekanan.

Wacana keagamaan di Indonesia, masalah agama dan kehidupan modern adalah yang paling banyak mendapatkan perhatian, seperti tertuang dalam tema-tema semacam “agama dan Negara”, “Islam dan politik”, “khilafah islamiyah”, “negara Islam”, “penegakkan syariat Islam”, sampai-sampai dari wacana tersebut menentukan tiopologi sosio-religius seperti Islam liberal, Islam moderat, Islam radikal, Islam fundamentalis dan seterusnya, dalam posisi yang tampaknya saling berlawanan. Namun terlepas dari polemik itu, bahwa peranan agama dalam kajian mengenai masyarakat post-industrial semakin terasa krusial, terutama karena masalah sekularisme tadi.

Sementara peran agama sangat penting terutama dalam membangun knowledge society, politik, ekonomi sosial dan budaya sesuai dengan yang diperankan oleh Islam dan umat Islam. Terbukti semakin mendapatkan pengakuan legal formal dari pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Salah satu contoh penerapan syariah dalam dunia perbankan hampir semua Bank konvensional berlomba mendirikan Bank Syariah.

BAB XVI INDUSTRIALISASI DAN MASYARAKAT INDONESIA

Pada bab enam belas akan dibahas tentang **Sebuah Pendekatan, Proses Industrialisasi di Indonesia, Struktur dan Perubahan Ekonomi Indonesia. Masalah Industrialisasi di Indonesia, Sumber-sumber Penghematan dan Keuntungan Industri, dan Strategi Pembangunan Sektor Industri.**

A. Sebuah Pendekatan

Proses industrialisasi dapat difahami sebagai proses perubahan struktur ekonomi yang didalamnya terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, ekspor, dan kesempatan kerja. Industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai *leading* sektor. Sejak pembangunan ekonomi dimulai secara terencana sejak 1969, pendekatan yang digunakan Indonesia adalah strategi industrialisasi. Ada dua pertimbangan penting yang melandasi penggunaan strategi industrialisasi. Pertama, pada tahun-tahun tersebut, negara-negara di seluruh dunia juga mengerjakan proyek industrialisasi di negara masing-masing dengan dukungan teori pembangunan ekonomi yang memadai. Kedua, sejarah negara yang telah berhasil memecahkan ekonominya selalu melewati tahapan industrialisasi pada proses pembangunannya. Sejarah mencatat bahwa industrialisasi di Indonesia pada akhirnya juga menggeser aktivitas ekonomi masyarakat, dari yang semula bertumpu pada sektor pertanian kemudian bersandar pada sektor industri.

Pada dekade 1980-an, pandangan mengenai pemaknaan industrialisasi di atas mendapat kritik dari Joan Robinsos (ekonom dari Cambridge University), Cohen dan Zysman (ekonom dari California University). Ketiganya mengemukakan argumentasi bahwa transformasi ekonomi hendak dipahami dan diinterpretasikan bukan hanya dalam konteks pergeseran struktural dari sektor pertanian pada sektor manufaktur kemudian sektor jasa. Pandangan terakhir ini sangat cocok dan memadai untuk melihat kasus Indonesia mengingat karakteristik sektor basis yang dimiliki, yaitu sektor pertanian, industrialisasi yang dijalankan harus distimulus dan didasarkan pada sektor

tersebut sehingga tidak akan mengganggu kondisi ketenagakerjaan.

Berdasarkan pandangan semacam itu, transformasi ekonomi dapat dikarakteristikkan dalam dua hal. Pertama, sektor pertanian harus terus mengalami dinamika internal (berupa produktivitas yang terus meningkat) dan menjadi basis bagi sektor industri yang akan dikembangkan. Kedua, sektor industri yang dikembangkan mempunyai keterkaitan dengan sektor pertanian. Dalam model konvensional tersebut, karakteristik individualisasi umumnya diukur dengan lima indikator. Pertama, pertumbuhan ekonomi meningkat melebihi pertumbuhan penduduk. Kedua, *share* sektor primer menurun. Ketiga, *share* sektor sekunder meningkat. Keempat, *share* sektor jasa lebih kurang konstan sehingga sebuah negara menjadi negara industri baru. Kelima, konsumsi pangan menurun. Implikasinya pada sisi produksi peran sektor primer berkrang dan di sudut permintaan peran faktor konsumsi berkurang. Sebagaimana kita ketahui bahwa industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang merubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi dimana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Dalam Industrialisasi ada perubahan filosofi manusia dimana manusia merubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih kepada rasionalitas (tindakan didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, tidak lagi mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan atau tradisi).

Menurut para peneliti ada faktor yang menjadi acuan modernisasi industri dan pengembangan perusahaan. Mulai dari lingkungan politik dan hukum yang menguntungkan untuk dunia industri dan perdagangan, bisa juga dengan sumber daya alam yang beragam dan melimpah, dan juga sumber daya manusia yang cenderung rendah biaya, memiliki kemampuan dan bisa beradaptasi dengan pekerjaannya. Negara pertama yang melakukan industrialisasi adalah Inggris ketika terjadi revolusi industri di abad ke 18 Pada akhir abad ke 20, Negara di Asia Timur

telah menjadi bagian dunia yang paling banyak melakukan industrialisasi.

B. Proses Industrialisasi di Indonesia

Industrialisasi di Indonesia semakin menurun semenjak krisis ekonomi tahun 1998. Kemunduran ini bukanlah berarti Indonesia tidak memiliki modal untuk melakukan investasi pada industri dalam negeri, tetapi lebih kepada penyerapan barang hasil produksi industri dalam negeri. Membuka pasar dalam negeri adalah kunci penting bagi industri Indonesia untuk bisa bangkit lagi karena saat ini pasar Indonesia dikuasai oleh produk produk asing. Menurut departemen perindustrian, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar tersebut:

1. Industri dasar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan kelompok kimia dasar (IKD).
2. Industri kecil yang meliputi industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kima dan bahan bangunan, industri galian bukan logam dan industri logam
3. Industri hilir, yaitu kelompok Aneka Industri (AI).

Adapaun menurut Biro Pusat Statistik (BPS), berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, industri dibedakan menjadi empat yaitu:

1. Perusahaan/industri besar jika memperkerjakan 100 orang atau lebih
2. Perusahaan/industri sedang jika memperkerjakan 20-99 orang
3. Perusahann/indistri kecil jika memperkerjakan 5-19 orang
4. Industri kerajinan rumah tangga jika mempekerjakan kurang dari 3 orang (termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar).

Dalam operasionalisasi yanh paling tampak, ada tiga pemikiran strategi industrialisasi yang berkembang di Indosnesia yang ketiganya pernah diaplikasikan secara tersendiri ataupun bersama-sama. Pertama, strategi industrialisasi yang mengembangkan industri-industri yang berspektrum luas (*broad-based industry*). Kedua, startegi industrialisasi yang mengutamakan industri-industri yang berteknologi canggih berbasis import (*hi-tech industry*) , seperti pesawat terbang, industri peralatan dan dan senjata militer, industri kapal, dan lain-lain. ketiga, industri hasil pertanian (agroindustri) berbasis dalam negeri dan merupakan kelanjutan pembangunan pertanian.

C. Struktur dan Perubahan Ekonomi Indonesia

Struktur ekonomi digunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Ada dua macam struktur ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. Struktur agraris, yaitu struktur ekonomi didominasi oleh sektor pertanian
2. Industri, yaitu struktur ekonomi didominasi oleh sektor industri.

Perubahan masyarakat tradisional (agraris) ke masyarakat industri (modern) akibat dari adanya proses modernisasi dengan berbagai nilai dan teknologi yang ditawarkan. Modernisasi dianggap sebagai proses transportasi nilai. Artinya untuk mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern. Akhirnya, struktur masyarakat agraris yang memiliki nilai-nilai sosial seperti gotong royong yang sangat kuat telah berubah.

Nilai *gememinschaft* antartentara kerja dalam kehidupan pertanian tradisional berubah menjadi *gesellschaft*. Hubungan antara pemilik dan pekerja (atasan dan bawahan) yang semula bersifat kekeluargaan (ataupun *patron-clien*) berubah menjadi *utilitarian komersial* (nilai kebermanfaatan atau kegunaan). Dalam perubahan sosial, terdapat dampak positifnya terutama pada perkembangan tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat pedesaan yang terkait dengan perubahan pola mata pencaharian (kesempatan kerja dan kesempatan berusaha). Dampak negatifnya adalah adanya pencemaran lingkungan (terutama air limbah yang mengalir lahan pertanian sehingga hasil pertanian menjadi kurang baik), meningkatnya kecemburuan sosial (masyarakat desa yang semula hidup apa adanya, kemudian berubah memiliki penghasilan yang akhirnya menimbulkan persaingan), munculnya kesenjangan masyarakat desa-kota (khususnya persaingan memperoleh kesempatan kerja dan pendapatan karena perbedaan produktivitas pertanian dan nonpertanian akibat makin terbatasnya lahan usaha tani, tingkat pendidikan dan keterampilan).

Disamping perubahan seperti halnya di atas, perubahan juga terjadi pada pola perilaku ekonomi, pola pikir serta gaya hidup masyarakat. Bahkan berubahnya tingkat pendapatan juga berpengaruh pada pandangan masyarakat tentang meninvestasikan

pendapatan yang diperolehnya. Begitu pun dengan pola pikir masyarakat yang mulai mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi dari pergaulan atau interaksi dengan dunia luar (kawasan pabrik dan lainnya). Semakin majunya tingkat pendidikan, semakin terspesialisasinya bidang pekerjaan dan karier, artinya ada kebutuhan untuk keahlian khusus membuat masyarakat mengikuti kursus ataupun pelatihan. Perubahan lainnya dalam hal berpakaian yang menjadi gaya hidup mereka adalah yang bermerk, terkenal, gaya dan modis.

D. Permasalahan Industri Di Indonesia

Industrialisasi di negara berkembang pada umumnya dilakukan sebagai upaya mengganti barang impor, dengan mencoba membuat sendiri komoditi-komoditi yang semula selalu diimpor. Mengalihkan permintaan impor dengan melakukan pemberdayaan produksi dari dalam negeri.

Strategi yang pertama dilakukan adalah pemberlakuan hambatan tarif terhadap impor produk-produk tertentu. Selanjutnya disusul dengan membangun industri domestik untuk memproduksi barang-barang yang biasa di impor tersebut. Ini biasanya dilaksanakan melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing yang terdorong untuk membangun industri di kawasan tertentu dan unit-unit usahanya di negara yang bersangkutan, dengan dilindungi oleh dinding proteksi berupa tarif. Selain itu, mereka juga diberi insentif-insentif seperti keringanan pajak, serta berbagai fasilitas dan rangsangan investasi lainnya. Untuk industri kecil yang baru tumbuh terutama di negara yang sedang berkembang. Industri yang baru dibangun belum memiliki kemampuan yang memadai untuk berkompetisi secara frontal dengan industri mapan dari negara-negara yang sudah maju. Industri negara maju sudah berada di jalur bisnisnya dalam waktu yang sudah lama dan sudah mampu melakukan efisiensi dalam proses-proses produksinya. Mereka mempunyai informasi dan pengetahuan yang cukup tentang optimisasi proses produksi, situasi dan karakteristik pasar, serta kondisi pasar tenaga kerja sehingga mereka mampu menjual produk yang berharga murah di pasar internasional tetapi masih tetap bisa menghasilkan keuntungan yang memadai. Pada beberapa negara, para produsen domestik mereka tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik tanpa tarif, akan tetapi juga untuk ekspor ke pasar

internasional. Hal ini bisa mereka lakukan karena mereka telah mampu menghasilkan produk tersebut dengan struktur biaya yang murah sehingga harga yang ditawarkan sangat kompetitif dan mampu bersaing di pasar luar negeri, maka banyak pemerintahan negara-negara dunia ketiga yang tertarik dan menerapkan strategi industrialisasi substitusi impor tersebut.

Perekonomian nasional memiliki berbagai permasalahan dalam kaitannya dengan sektor industri dan perdagangan yaitu:

1. Industri nasional selama ini lebih menekankan pada industri berskala luas dan industri teknologi tinggi. Adanya strategi ini mengakibatkan berkembangnya industri yang berbasis impor. Industri-industri tersebut sering terpukul oleh depresiasi mata uang rupiah yang tajam.
2. Penyebaran industri belum merata karena masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Industri yang hanya terkonsentrasi pada satu kawasan ini tentulah tidak sejalan dengan kondisi geografis Indonesia yang menyebut dirinya sebagai negara kepulauan.
3. Lemahnya kegiatan ekspor Indonesia yang tergantung pada kandungan impor bahan baku yang tinggi, juga masih tingginya tingkat suku bunga pinjaman bank di Indonesia, apalagi belum sepenuhnya Indonesia diterima di pasar internasional.
4. Komposisi komoditi ekspor Indonesia pada umumnya bukan merupakan komoditi yang berdaya saing, melainkan karena berkaitan dengan tersedianya sumber daya alam - seperti hasil perikanan, kopi, karet, dan kayu. tersedianya tenaga kerja yang murah seperti pada industri tekstil, alas kaki, dan barang elektronik.
5. Komoditi primer yang merupakan andalan ekspor Indonesia pada umumnya dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat kecil. Misalnya Indonesia mengekspor kayu dalam bentuk gelondongan, yang kemudian diimpor lagi dalam bentuk mebel karena terbatasnya penguasaan desain dan teknologi.
6. Masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan pelatihan yang cenderung masih bersifat umum dan kurang berorientasi pada perkembangan kebutuhan dunia usaha. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat dari pola penyerapan tenaga kerja di masa lalu yang

masih mementingkan pada jumlah tenaga manusia yang terserap. ketimbang kualitas tenaga manusianya.

Beberapa ahli menilai penyebab utama dari kegagalan Indonesia dalam berindustri adalah karena industri Indonesia sangat tergantung pada impor sumber-sumber teknologi dari negara lain, terutama negara-negara yang telah maju dalam berteknologi dan berindustri. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor teknologi ini merupakan salah satu faktor tersembunyi yang menjadi penyebab kegagalan dari berbagai sistem industri dan sistem ekonomi di Indonesia. Sistem industri Indonesia tidak memiliki kemampuan pertanggungjawaban dan penyesuaian yang mandiri. Karenanya sangat lemah dalam mengantisipasi perubahan dan tak mampu melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk menghadapi terjadinya perubahan tersebut. Tuntutan perubahan pasar dan persaingan antar industri secara global tidak hanya mencakup perubahan di dalam corak, sifat, kualitas, dan harga dari komoditas yang diperdagangkan, tetapi juga tuntutan lain yang muncul karena berkembangnya idealisme masyarakat dunia terhadap hak azasi manusia, pelestarian lingkungan, liberalisasi perdagangan, dan sebagainya.

Gerak ekonomi Indonesia sangat tergantung pada arus modal asing yang masuk atau keluar Indonesia serta besarnya cadangan devisa yang terhimpun melalui perdagangan dan hutang luar negeri. Kebijakan yang telah secara berkelanjutan ditempuh tersebut, teramat tidak mampu membawa ekonomi Indonesia menjadi makin mandiri, bahkan menjadi tergantung pada:

- a) Ketergantungan kepada pendapatan ekspor,
- b) Ketergantungan pada pinjaman luar negeri,
- c) Ketergantungan kepada adanya investasi asing,
- d) Ketergantungan akan impor teknologi dari negara-negara industri.

Dari jumlah penduduk Indonesia termasuk negara sedang berkembang terbesar ketiga setelah india dan cina. Namun dilihat dari segi industrialisasi Indonesia dapat dikatakan baru mulai, salah satu indikator dari industrialisasi adalah sumbangan sektor industri dalam GDP (*gross domestic product*). Dari ukuran ini sektor industri di indonesia sangat tertinggal dibandingkan dengan negara-negara utama di asia. Dua ukuran lain adalah besarnya nilai tambah yang dihasilkan sektor industri dan nilai

tambah perkapita. Dari segi ukuran mutlak sektor industri diindonesia masih sangat kecil, bahkan kalah dengan negara-negara kecil di Asia seperti Singapura, Hongkong dan Taiwan. Secara perkapita nilai tambah sektor industri termasuk yang paling rendah di Asia. Indikator lain tingkat industrialisasi adalah produksi listrik perkapita dan prosentase produksi listrik yang digunakan oleh sektor industri. Di Indonesia produksi listrik perkapita sangat rendah, dan dari tingkat yang rendah ini hanya sebagian kecil digunakan oleh konsumen industri.

Keadaan sektor industri selama tahun 1950 an dan 1960 an pada umumnya tidak menggembirakan karena iklim politik pada waktu itu yang tidak menentu. Kebijakan perindustrian selama awal tahun 1960 an mencerminkan filsafat proteksionalisme dan etatisme yang ekstrim, dengan akibat kemacetan produksi. Sehingga sektor produksi praktis tidak berkembang (*stagnasi*). Selain itu juga disebabkan karena kelangkaan modal dan tenaga kerja ahli yang memadai. Perkembangan sektor industri mengalami kemajuan yang cukup mengesankan pada masa PJP I, hal ini dapat dilihat dari jumlah unit usaha, tenaga kerja yang diserap, nilai keluaran yang dihasilkan, sumbangan devisa dan kontribusi pembentukan PDB, serta pertumbuhannya sampai terjadinya krisis ekonomi di Indonesia.

1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat Industri di Indonesia

a. Pembangkit. Ada beberapa faktor yang dapat membangkitkan perindustrian diindonesi, diantaranya adalah:

- 1) Struktur organisasi. Dilakukan inovasi dalam jaringan institusi pemerintah dan swasta yang melakukan impor. Sebagai pihak yang membawa, mengubah, mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi.
- 2) Ideologi. Perlu sikap dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan suatu teknologi apakah menganut tecno-nasionalism, techno-globalism, atau techno-hybrids.
- 3) Kepemimpinan. Pemimpin dan elit politik Indonesia harus tegas dan cermat dalam mengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

b. Penghambat. Terdapat beberapa faktor yang menghambat perkembangan perindustrian di Indonesia adalah :

1. Keterbatasan teknologi
Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi menghambat efektifitas dan kemampuan produksi.
2. Kualitas sumber daya manusia
Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi terbaru.
3. Keterbatasan dana pemerintah
Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi.

E. Sumber-sumber Penghematan dan Keuntungan Industri

1. Proteksi dan pola industrialisasi di Indonesia

Kebijakan proteksionisme di Indonesia terutama mengandalkan diri pada tarif bea masuk yang tinggi dan pembatasan kuantitatif berupa larangan total atas impor barang-barang tertentu, seperti kendaraan-kendaraan bermotor dan barang-barang elektronika. Dalam hal-hal dimana kapasitas domestik suatu industri dianggap sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah Indonesia juga cenderung mengeluarkan larangan total atas impor. Sejak neraca pembayaran Indonesia mengalami deficit yang besar dalam transaksi berjalannya, ada tahun 1982-1983, maka hambatan-hambatan atas impor barang-barang jadi telah bertambah lagi.

Apa dampaknya dari kebijakan proteksionis atas perkembangan sektor industri di Indonesia? Di satu pihak adanya hambatan impor atas berbagai barang impor telah mendorong banyak investasi, di cabang-cabang industri yang menikmati proteksi tersebut. Malahan banyak investor asing pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an justru tertarik untuk menanamkan modal mereka di Indonesia untuk menghindari diri dari hambatan-hambatan impor yang dikenakan terhadap barang-barang mereka yang sebelumnya diekspor ke Indonesia. Di berbagai cabang industri yang menikmati proteksi rupanya telah terjadi "kelebihan investasi" (*over investment*), sehingga cabang-cabang industri ini kemudian menghadapi masalah kelebihan kapasitas yang cukup gawat, yang tidak memungkinkan industri-industri ini

untuk menarik manfaat dari skala ekonomi (*economic of scale*) dimana terjadinya penurunan dalam biaya rata-rata jangka panjang jika tingkat produksi ditingkatkan. Disamping ini proteksi yang diberikan kepada berbagai cabang industri tidak memberikan dorongan kepada para industriawan untuk mencapai tingkat efisiensi operasional yang tinggi. Artinya, menekan biaya rata-rata sampai tingkat yang serendah mungkin.

Dampak lain dari kebijaksanaan proteksionistis atas perkembangan sektor industri Indonesia adalah terjadinya alokasi sumber-sumber daya produktif yang kurang efisien. Dengan ini diartikan bahwa sumber daya produktif justru mengalir ke bidang-bidang di mana Indonesia justru tidak atau belum mempunyai keunggulan komparatif, yaitu industri-industri yang menghasilkan barang-barang yang padat modal. Di lain pihak produksi-produksi barang-barang di Indonesia justru mempunyai keunggulan komparatif yang lebih besar, yaitu barang-barang padat karya tetapi kurang mendapat rangsangan yang memadai. Dengan kata lain, kebijaksanaan proteksionistis di Indonesia telah banyak mendorong produksi barang-barang yang dapat menggantikan barang-barang impor, sedangkan barang-barang jadi yang dapat diekspor kurang atau tidak mendapat rangsangan sama sekali. Dengan tingkat proteksi efektif yang akan mencapai beberapa ratus persen bagi berbagai barang konsumsi bertahan lama, seperti kendaraan bermotor, maka tidak mengherankan bahwa cabang-cabang industri yang menghasilkan jenis-jenis barang jadi ini sebenarnya menghasilkan nilai tambah yang negative jika di ukur dengan harga internasional. Hal ini berarti bahwa pembuatan barang-barang tersebut akan memerlukan banyak devisa daripada jika barang-barang tersebut diimpor dalam bentuk utuh. Dengan demikian maka timbul suatu struktur industri yang kurang efisien dan yang menghasilkan barang-barang jadi dengan biaya-biaya yang tinggi dengan mutu yang kurang memadai. Dengan pasaran dalam negeri yang dilindungi ketat terhadap saingan impor menjadikan para industriawan tidak termotivasi untuk meningkatkan produktivitas dan memperbaiki mutu barang-barang mereka.

2. Promosi Ekspor

Melonjaknya harga minyak pada tahun 1970-an memungkinkan pemerintah menerapkan tingkat bunga di bawah tingkat keseimbangan pasar dan menyalurkan kredit dengan suku bunga rendah pada sector prioritas. Di topang oleh bantuan luar negeri dan melonjaknya penerimaan negara dari minyak dan gas, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dan neraca pembayaran yang relative sehat sejak tahun 1973. Pengeluaran pemerintah yang dibiayai pendapatan migas menjadi mesin utama pertumbuhan untuk keseluruhan perekonomian. Ekspor migas pun menyumbang sebagian besar devisa. Pendapatan dari migas memungkinkan Indonesia untuk membangun dasar industri, baik industri hulu maupun industri strategis. Banyak di antaranya merupakan badan usaha milik negara seperti baja, semen, dan pupuk. Inisiatif pemerintah untuk membangun industri berat dicerminkan oleh kenaikan tajam dalam pangsa barang-barang logam dan produksi pengolahan industri berat antara tahun 1975-1980.

3. Teknologi

Indonesia sebagai negara yang berkembang harus mengejar ketertinggalan teknologi lewat industri berteknologi tinggi yang terpilih. Namun, tidak salah pula jika kita memerlukan adanya visi efisiensi dalam proses transformasi teknologi. Tekno-ekonomi merupakan suatu kemampuan memanfaatkan teknologi secara efisien dan efektif. Kemampuannya mencakup kemampuan memilih teknologi, mengoperasikan proses, menghasilkan barang dan jasa, serta mengelola perubahan. Perubahan pada paradigma teknoekonomi memunculkan sistem teknologi yang baru dan menimbulkan pengaruh yang menyeluruh pada semua sisi perekonomian. Perubahan pada paradigma teknoekonomi akan menimbulkan produk baru dan proses teknologi baru pada sebuah bentuk industri baru. Perubahan demikian menyebabkan perubahan pada struktur biaya input, produksi, serta distribusi pada perekonomian secara keseluruhan. Sehingga dengan adanya teknologi akan menghemat biaya-biaya proses produksi dalam industri. Keuntungan-keuntungan industri :

- a. Merubah keadaan yang serba bergantung pada luar negeri, untuk menjadikan ekonominya lebih self sufficient.

Sebab umumnya negara-negara tersebut masih memiliki struktur ekonomi yang berat sebelah, yaitu merupakan negara agraris, yang sekaligus merupakan ekonomi ekspor. Kekayaan-kekayaan alam yang mereka miliki dengan berbagai hasil tambangnya, kesuburan tanah yang menghasilkan berbagai hasil pertanian, sebagian besar belum mampu mengolah sendiri sehingga harus dijual ke luar negeri. Begitu pula segala kebutuhan barang-barang sampai beras yang merupakan hasil pertanian juga masih harus diimpor. Lebih-lebih peralatan-peralatan modal untuk memajukan industrinya, alat-alat transport dan sebagainya, yang belum mampu dibuat sendiri jelas harus diimpor. Dengan keadaan yang demikian negara tersebut dalam keadaan yang sangat lemah, dilihat dari segi ekspor maupun impor.

- b. Dengan industrialisasi diharapkan dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja, dengan mempergunakan teknologi yang lebih modern
- c. Menambah lapangan-lapangan kerja baru untuk memperkecil jumlah pengangguran.
- d. Dari segi neraca pembayaran, dimaksudkan agar secepatnya dapat memperbaiki neraca pembayaran yang selalu defisit. Maksudnya sekalipun dalam jangka pendek adanya industrialisasi terpaksa banyak mengimpor mesin-mesin, alat-alat transport, sehingga memerlukan devisa yang sangat besar, tetapi lama-kelamaan diharapkan adanya industry-industri substitusi impor akan mengurangi devisa yang kita butuhkan sebaliknya kita mampu memperbesar ekspor kita.

Industrialisasi di Indonesia mengalami kemunduran semenjak krisis ekonomi terjadi di tahun 1998, hal ini terjadi karna suhu politik yang tidak stabil pada saat itu. Akan tetapi kemunduran ini bukanlah berarti Indonesia tidak memiliki modal untuk melakukan investasi pada industri dalam negeri, tetapi indonesia lebih memfokuskan kepada penyerapan barang hasil produksi industri dalam negeri. Membuka pasar dalam negeri adalah kunci penting bagi industri Indonesia untuk bisa bangkit lagi karena saat ini pasar Indonesia dikuasai oleh produk produk luar.

F. Strategi Pembangunan Sektor Industri

Adapun startegi Pelaksanaan Industrialisasi dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Strategi substitusi impor (*Inward Looking*)
Bertujuan mengembangkan industri berorientasi domestic yang dapat menggantikan produk impor. Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea & Taiwan.
 2. Pertimbangan menggunakan strategi ini :
 - a) Sumber daya alam & Faktor produksi cukup tersedia
 - b) Potensi permintaan dalam negeri memadai
 - c) Sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri
 - d) Kesempatan kerja menjadi luas
 - e) Pengurangan ketergantungan impor, shg defisit berkurang'
 3. Strategi promosi ekspor (*outward Looking*)
Beorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing. Rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil :
 - a) Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang yang bisa baik pasar input maupun *output*.
 - b) Tingkat proteksi impor harus rendah.
 - c) Nilai tukar harus realistis.
 - d) Ada insentif untuk peningkatan ekspor.
 4. Unsur-Unsur Industrialisasi
 - a) Masyarakat yang melakukan proses produksi dengan menggunakan mesin
 - b) Berskala besar
 - c) Pembagian kerja teknis yang relatif kompleksBegitu juga dalam menggunakan tenaga kerja yang keterampilannya bermacam-macam industrialisasi pada suatu masyarakat berarti pergantian teknik produksi dari cara yang masih tradisional ke cara modern, yang terkandung dalam revolusi industri. Dalam hal ini terjadi proses transformasi, yaitu suatu perubahan masyarakat dalam segala segi kehidupannya. Strategi Pembangunan Sektor Industri lain dapat pula dilakukan dengan berbagai cara antara lain
1. Strategi Subtitusi Impor

- a. Lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi pada pasar domestik
- b. Strategi substitusi impor adalah *industry domestic* yang membuat barang menggantikan impor
- c. Dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri dalam negeri yang memproduksi barang pengganti impor.

Pertimbangan yang lazim digunakan dalam memilih strategi ini adalah:

- a. SDA dan faktor produksi lain (terutama tenaga kerja) cukup tersedia
- b. Potensi permintaan dalam negeri memadai
- c. Pendorong perkembangan sector industri manufaktur dalam negeri
- d. Dengan perkembangan industri dalam negeri, kesempatan kerja lebih luas
- e. Dapat mengurangi ketergantungan impor

2. Penerapan strategi substitusi impor dan hasilnya di Indonesia:

- a. Industri manufaktur nasional tidak berkembang baik selama orde baru
- b. Ekspor manufaktur Indonesia belum berkembang dengan baik
- c. Kebijakan proteksi yang berlebihan selama orde baru menimbulkan "*high cost economy*"
- d. Teknologi yang digunakan oleh industry dalam negeri, sangat diproteksi

3. Strategi Promosi Ekspor

- a. Lebih berorientasi ke pasar internasional dalam pengembangan usaha dalam negeri
- b. Tidak ada diskriminasi dalam pemberian insentif dan fasilitas kemudahan lainnya dari pemerintah
- c. Dilandasi pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai jika produk yang dibuat di dalam negeri dijual di pasar ekspor
- d. Strategi promosi ekspor mempromosikan fleksibilitas dalam pergeseran sumber daya ekonomi yang ada mengikuti perubahan pola keunggulan komparatif.
- e.

BAB XVII

BUDAYA KERJA MASYARAKAT INDUSTRI

Bab tujuh belas merupakan bab terakhir yang terdiri: Budaya Masyarakat Industri; Teologi Budaya Masyarakat Industri, Perilaku Masyarakat Industri dan Budaya Kerja dan Etos Kerja Di era industri.

A. Budaya Masyarakat Industri

Industri memberikan input kepada masyarakat sehingga membentuk sikap dan tingkah laku yang mencerminkan cara bersikap dalam bekerja. Dengan berkembangnya aspek ekonomi yaitu industrialisasi jelas akan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat walaupun secara perlahan. Masyarakat secara bertahap menerima adanya zaman baru, yaitu modernisasi. Mereka mulai belajar menerima budaya yang ditularkan negara luar karena adanya kerjasama satu sama lain dan hal itu tidak bisa dihindarkan. Mereka harus bisa menyesuaikan diri, namun hal itu tidak lantas mengharuskan masyarakat meninggalkan budaya sendiri. Secara ekonomis kini masyarakat industrialis semakin bertambah kaya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun kondisi yang membaik ini menurut Mercuse adalah keadaan yang terlihat hanya dari kulit luarnya saja. Sesuatu yang menipu karena pada kenyataannya peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan manusia hanya dirasakan secara lahiriah saja. Manusia pada masyarakat industri adalah manusia yang tidak utuh nilai-nilai kemanusiaannya. Mereka terjebak dalam budaya konsumeristik hedonisme yang dipacu oleh faktor-faktor produksi. Kemajuan dibidang material justru berbanding terbalik dengan merosotnya nilai-nilai moral, kebudayaan dan agama. Kemajuan teknologi dengan sokongan kapitalisme hadir untuk membantu manusia mengisi kekosongan dalam kehidupan pribadi manusia. Alih-alih melepas lelah setelah habis bekerja seharian, orang-orang kemudian mengabdikan uang dari hasil kerjanya ditempat-tempat yang telah disiapkan untuk menghilangkan kepenatan, baik itu tempat rekreasi, game zone, shopping dengan aneka barang pilihan dan yang pasti gelaran itu akan serta-merta mendorong masyarakat pada posisi konsumen dari apa yang mereka produksi sendiri. Mereka terjebak dalam gaya hidup (*life style*) konsumtif dan hedonis, sehingga secara tidak sadar mereka menjadi obyek pasar.

Untuk menjadi industrial, masyarakat harus disiapkan untuk menerima nilai-nilai yang bakal menunjang proses industrialisasi, dikehendaki ataupun tidak pasti melahirkan tata nilai yang kebanyakan tidak dikenal oleh suatu masyarakat pedesaan (Nurcholish Madjid, 1999:127).

Budaya Kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Terdapat beberapa manfaat dari penerapan Budaya Kerja yang baik, yaitu:

1. meningkatkan jiwa gotong royong
2. meningkatkan kebersamaan
3. saling terbuka satu sama lain
4. meningkatkan jiwa kekeluargaan
5. meningkatkan rasa kekeluargaan
6. membangun komunikasi yang lebih baik
7. meningkatkan produktivitas kerja
8. tanggap dengan perkembangan dunia luar, dll.

Keberhasilan pelaksanaan program budaya kerja antara lain dapat dilihat dari peningkatan tanggung jawab, peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan pada norma atau aturan, terjalinnya komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan semua tingkatan, peningkatan partisipasi dan kepedulian, peningkatan kesempatan untuk pemecahan masalah serta berkurangnya tingkat kemangkiran dan keluhan.

Ada empat macam fungsi budaya kerja yang sangat penting dalam membawa organisasi menuju sukses.

1. identitas organisasi (simbol dan harapan), sehingga anggota organisasi merasa bangga terhadap organisasinya dan pihak eksternal menaruh respek.
2. kestabilan organisasi sehingga secara internal seluruh karyawan merasa tenang dan yakin, demikian pula pihak eksternal yang berkepentingan.
3. alat pendorong organisasi, sehingga mampu menjadi dasar dan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi.

4. komitmen organisasi sehingga mampu sebagai katalisator dalam membentuk komitmen untuk pelaksanaan berbagai ide atau suatu rencana strategis

Budaya kerja sering juga di sebut etos kerja, namun sebenarnya terdapat perbedaan. Etos berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau sesuatu kelompok. Secara terminologis kata etos, yang mengalami perubahan makna yang meluas. Digunakan dalam tiga pengertian berbeda yaitu:

- a. Suatu aturan umum atau cara hidup.
- b. Suatu tatanan aturan perilaku.
- c. Penyelidikan tentang jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku.

Dalam pengertian lain, etos dapat diartikan sebagai thumuhath yang berkehendak atau berkemauan yang disertai semangat yang tinggi dalam rangka mencapai cita-cita yang positif. Berdasarkan keterangan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kata etos berarti watak atau karakter seorang individu atau kelompok manusia yang berupa kehendak atau kemauan yang disertai dengan semangat yang tinggi, guna mewujudkan sesuatu cita-cita.

Dapat disimpulkan bahwa “Etos kerja” adalah refleksi dari sikap hidup yang mendasar maka etos kerja pada dasarnya juga merupakan cerminan dari pandangan hidup yang berorientasi pada nilai-nilai yang berdimensi transenden. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Fungsi etos kerja adalah :

1. Pendorong timbulnya perbuatan.
2. Penggairah dalam aktivitas.
3. Penggerak.

Budaya adalah satu set nilai, penuntun, kepercayaan, pengertian, norma, falsafah, etika, dan cara berpikir. Budaya yang ada di suatu lingkungan, sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan pribadi yang berada di dalam lingkungan tersebut. Setiap lingkungan tempat tinggal

memiliki budaya yang dibuat oleh nenek moyang dan diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi untuk dianut dan dilestarikan bersama. Perusahaan adalah sebuah lembaga yang terdiri dari banyak karyawan yang merupakan individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda, yaitu lingkungan, agama, pendidikan, dll. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan terdiri dari individu dengan kultur bawaan yang berbeda-beda. Pertanyaannya sekarang adalah, mampukah mereka yang beragam tadi bersama mencapai satu tujuan perusahaan dengan cara saling memahami, membantu, dan mengerti satu sama lain? Perusahaan seperti juga halnya lingkungan tempat tinggal pasti memiliki budaya yang dirumuskan oleh para pendiri dan top management perusahaan dan dianut oleh setiap komponen perusahaan.

Keahlian, kreativitas, kecerdasan maupun motivasi yang tinggi dari karyawan memang merupakan unsur kredibilitas yang harus dimiliki oleh karyawan agar perusahaan dapat mencapai sukses. Namun unsur-unsur tadi menjadi belum maksimal manfaatnya bila setiap karyawan belum memiliki satu budaya yang sama. Satu budaya yang sama maksudnya adalah sebuah pola pikir yang membuat mereka memiliki persepsi yang sama tentang nilai, dan kepercayaan yang dapat membantu mereka untuk memahami tentang bagaimana seharusnya berperilaku kerja pada perusahaan dimana mereka bekerja sekarang.

Budaya perusahaan dapat membantu perusahaan mencapai sukses. Untuk dapat memanfaatkan budaya perusahaan dengan maksimal, maka perusahaan perlu menanamkan nilai-nilai yang sama pada setiap karyawannya. Kebersamaan dalam menganut budaya atau nilai-nilai yang sama menciptakan rasa kesatuan dan percaya dari masing-masing karyawan. Bila hal ini telah terjadi, maka akan tercipta lingkungan kerja yang baik dan sehat. Lingkungan seperti ini dapat membangun kreativitas dan komitmen yang tinggi dari para karyawan sehingga pada akhirnya mereka mampu mengakomodasi perubahan dalam perusahaan ke arah yang positif. Perusahaan-perusahaan dunia yang sukses adalah perusahaan yang memiliki budaya kerja yang kuat. Terlepas dari nilai-nilai positif dan luhur yang terkandung dalam budaya yang berlaku,

maksud budaya kerja yang kuat adalah seluruh komponen perusahaan mengamalkan nilai atau norma yang telah ditetapkan bersama sebagai sebuah budaya dengan komitmen yang tinggi, tanpa terkecuali. Namun ketiadaan kata atau kalimat yang menegaskan mengenai budaya yang dianut perusahaan, menyulitkan para karyawan memahami budaya perusahaan. Untuk itu perlu adanya sebuah pernyataan yang merupakan manifestasi dari budaya perusahaan yang mengungkapkan secara garis besar dalam pengertian spesifik mengenai tujuan perusahaan, dan cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengungkapan budaya perusahaan ke dalam sebuah pernyataan dapat dilakukan melalui perumusan pernyataan visi dan misi. Hanya dengan kalimat singkat, pernyataan visi dan misi dapat menyiratkan nilai, etika, prinsip, tujuan, dan strategi perusahaan. Menuliskan pernyataan visi dan misi perusahaan adalah cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa semua karyawan dapat memahami budaya perusahaan dan mengimplementasikannya ke dalam usaha-usaha pencapaian tujuan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pakar Harvard Business School, yaitu Prof. DR. John Kottler dan Prof. DR. Janes Heskett, ternyata terdapat korelasi positif di antara penerapan budaya perusahaan dengan prestasi bisnis yang dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Hal ini menunjukkan bahwa budaya perusahaan memiliki peranan penting dalam membangun prestasi dan produktivitas kerja para karyawan sehingga mengarahkan perusahaan kepada keberhasilan. Jadi sudah saatnya Anda menetapkan komitmen terhadap penerapan budaya perusahaan. Budaya kerja yang harus dibangun pada masyarakat Industrialisasi adalah sebagai berikut:

1. Komitmen.

Menjunjung tinggi nilai-nilai yang disepakati dan bertanggung jawab dengan sepenuh hati. Dibawah ini Panduan Perilaku sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan berupaya keras untuk mencapai target
- b. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung-jawab
- c. Dapat dipercaya dalam mengemban setiap pekerjaan dengan benar

- d. Menjalankan tugas mengikuti aturan yang berlaku
- e. Menindaklanjuti setiap masalah yang menjadi tanggung-jawab dan memastikan penyelesaiannya hingga tuntas

2. *Teamwork*

Kerjasama yang dilandasi semangat saling menghargai dan menghormati untuk mencapai hasil yang terbaik. Panduan Perilaku:

- a. Bersedia mendengar dan menghargai pendapat orang lain
- b. Tidak memaksakan kehendak atau pendapat pribadi
- c. Aktif memberi saran, pendapat untuk keberhasilan tim
- d. Berpikir positif
- e. Bersedia bekerja dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab dan dedikasi

3. *professional*

Menjalankan tugas sesuai dengan keahlian, keterampilan dan pengetahuan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik bankir. Panduan Perilaku:

- a. Bekerja efektif dan efisien
- b. Inovatif dan kreatif
- c. Selalu belajar untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan keahliannya
- d. Positif *thinking*
- e. Berwawasan luas dan pandangan jauh ke depan
- f. Bekerja berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent*)

4. *Jiwa Melayani*

Memberikan layanan terbaik kepada seluruh nasabah dengan sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati sehingga dapat memberikan kepuasan. Panduan Perilaku:

- a. Senyum Salam Sapa
- b. Mendengarkan dengan sepenuh hati untuk memahami kebutuhan nasabah
- c. Memberikan layanan dengan sigap, cepat dan akurat
- d. Siap menerima kritik dan saran untuk perbaikan layanan

5. *Disiplin*

Melaksanakan tugas secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat manfaat. Panduan Perilaku:

- a. Tepat waktu
- b. Bertindak sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku dengan penuh tanggung jawab

- c. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan
- d. Menggunakan sarana dan prasarana kantor sebagaimana mestinya

6. Kerja Keras

Melaksanakan tugas dengan segala upaya untuk mencapai hasil yang terbaik. Panduan Perilaku:

- a. Pantang menyerah untuk mencari solusi yang lebih baik
- b. Menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang terbaik
- c. Selalu bersemangat untuk memberikan hasil yang lebih baik
- d. Tidak cepat puas atas hasil yang dicapai
- e. Rela mengorbankan kepentingan pribadi demi tercapainya kepentingan perusahaan.

7. Integritas

Membangun kepercayaan dengan kejujuran, tanggung jawab, moral, serta satu kata dengan perbuatan, Panduan Perilaku:

- a. Berani menyatakan fakta apa adanya secara transparan dan jujur dengan tetap menjaga rahasia bank dan perusahaan
- b. Menjunjung tinggi kebenaran sesuai dengan kode etik bankir
- c. Melaksanakan tugas dengan ikhlas
- d. Bersikap terbuka dalam mengungkapkan gagasan dan pendapat
- e. Mencintai pekerjaan dan menjaga citra dimana tempat bekerja

Permasalahan yang timbul akan terjadi seiring dengan perjalanan waktu serta dinamika yang terjadi dalam dunia kerja industri yang penuh dengan kompetisi. Berdasarkan hasil diagnosi sekurang-kurangnya ditemukan tiga faktor penyebabnya yaitu :

1) Menurunnya Etos Kerja

Etos kerja seseorang bisa disebabkan dua hal yaitu: Pengaruh Lingkungan Fisik dan Pengaruh Lingkungan Sosial Ekonomi. Pengaruh Lingkungan Faktor lingkungan fisik juga sangat dominan mempengaruhi etos kerja seorang pegawai, sebagai suatu contoh lingkungan fisik adalah Ruang kerja, coba kita bayangkan bagaimana seandainya seorang pegawai bekerja disuatu tempat dengan lingkungan fisik yang sempit, dan tidak memadai, saranakurang, misalnya almari meja dan

kursi berdesakan dan berkas tidak tertata dengan rapi karena semuasudah penuh dengan berkas-berkas yang bertumpuk dimana-mana, computer, mesin ketik sering rusak, dan listrik sering mati, karena kurang daya, sedangkan fisik eksternal misalnya tempat kerja kita berdekatan dengan fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya misalnya jika bidang pekerjaan kita membutuhkan suasana yang tenang, yaitu bidang administrasi dan pembukuan, tetapi gedung kita berdekatan dengan bengkel yang ramai dan bising, maka seorang pegawai tidak akan bisa bekerjadengan hasil maksimal, karena merasa terganggu, begitu juga sebaliknya jika bidang pekerjaan kita itu membutuhkan kebebasan untuk mengeluarkan suara-suara yang berisik tapi berdekatan dengan rumah sakit, atau tempat bersalin maka seorang pegawai tidak akan bisa bebas melakukan pekerjaannya karena takut ditegur oleh pihak rumah sakit dan di tuduh mengganggu ketertiban dan kepentingan umum.

2) Lingkungan Sosial ekonomi.

Faktor lingkungan sosial ekonomi dapat dilihat dari dua komponen internal dan eksternal. Komponen eksternal yaitu lingkungan sosial ekonomi keluarga (Pegawai). Komponen lingkungan sosial ekonomi keluarga bisa mempengaruhi etos kerja menurun, seperti kebutuhan rumah tangga yang semakin besar, keperluan pendidikan anak-anak, membangun rumah, serta masalah keluarga, rumah tangga hubungan suami istri, kenakalan anak-anak yang sudah semakin beranjak dewasa, sehingga menyita pikiran dan tenaga di dalam jam kerja pegawai. Disisi lain insentif dari kantor tidak ada, gaji sudah tidak mencukupi. Komponen Internal, lingkungan sosial ekonomi di tempat kerja seorang pegawai akan menurunkan etos kerja jika dari lingkungan kerja tidak ada kepastian keberlangsungan kedepan, hubungan dengan teman sekerja ada masalah persaingan tidak sehat, saling menjatuhkan dan memfitnah, struktur organisasi, tupoksi, serta promosi jabatan tidak jelas, dan tidak tertib administrasi.

3) Terganggunya Disiplin Kerja

Disiplin kerja akan terganggu jika suatu kondisi seorang pemimpin tidak bisa mengendalikan pegawainya, seorang pegawai tidak bisa dikendalikan jika kondisi di suatu perusahaan atau di suatu lingkungan kerja tidak jelas aturan-

aturan yang dibuat, termasuk hak dan kewajiban para pegawai. Pegawai hanya dituntut kewajibannya saja tanpa diperhatikan hak-haknya, serta insentif dan jaminan kesejahteraan, jaminan promosi bagi mereka yang berprestasi dan hukuman atau sanksi bagi mereka yang mangkir atau melanggar dan melakukan kecerobohan-kecerobohan. Sehingga disini jelaslah bahwa kenapa disiplin kerja terganggu?. Sebagaimana telah tersebut dalam fenomena diatas, tentunya hal ini disebabkan karena pada awalnya kesadaran seorang pegawai atas tidak terpenuhinya suatu kebutuhan (hak-haknya sebagai seorang pegawai) sehingga seorang pegawai mengambil suatu keputusan untuk menentukan sikap sebagai suatu ungkapan terhadap ketidak puasan akan kebutuhannya, hal ini tentunya akan semakin menurunkan etos kerjanya, dengan sering melakukan kecerobohan-kecerobohan, tidak mentaati peraturan yang telah disepakati bersama

Pada suatu pekerjaan yang tidak terpenuhi sangat erat hubungannya dengan etos kerja yang menurun, sehinggafaktor-faktor yang mempengaruhi syarat pekerjaan tidak terpenuhi yaitu: 1) Faktor internal, dimana pengaruh lingkungan fisik dan lingkungan sosial ekonomi, 2) Faktor Ekternal, Sumberdaya manusia yang kurang, sehingga perlu beberapa pelatihan-pelatihan khusus serta pemilihanatau seleksi pegawai yang mampu di bidangnya. Serta memiliki sumberdaya manusia yang handal dibidangnya sehingga syarat pekerjaan bisa terpenuhi.

B. Teologi Budaya Masyarakat Industri

Menurut Straubhaar dan LaRose (2004), Masyarakat Industri mengacu pada terjadinya Revolusi Industri, yang umumnya dikaitkan dengan penemuan mesin uap. Namun sesungguhnya, pemicu penting menuju era industri tersebut dimulai dengan penemuan di bidang komunikasi, yakni publikasi Bible yang diproduksi dengan mesin cetak pengembangan dari Johannes Guttenberg (1455).

Manusia cenderung bersifat dinamis, selalu ada perubahan yang terjadi pada diri manusia. Semakin meningkatnya kebutuhan hidup sedangkan SDA yang tersedia semakin menipis dan lahan kerja yang tidak memadai, keterbatasan lahan perkotaan untuk migrasi, pemerataan pembangunan dan

penghematan biaya produksi menyebabkan munculnya keinginan untuk menciptakan satu hal baru yang dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik dengan mengubah pola hidupnya. Perubahan paling sederhana yang tampak secara spasial adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan kawasan perumahan yang tentu berdampak pada beralihnya profesi masyarakat petani ke profesi lain. Hal ini mempunyai pengaruh pada pola hidup, mata pencaharian, perilaku maupun cara berpikir.

Masyarakat dan kebudayaan memang saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena kebudayaan merupakan produk dari masyarakat. Pengaruh yang nantinya akan membuat perubahan umumnya terjadi karena adanya tuntutan situasi sekitar yang berkembang. Sehingga, masyarakat yang awalnya masyarakat pertanian lambat laun berubah menjadi masyarakat industri. Perubahan sosial terjadi karena adanya kondisi-kondisi sosial primer, misalnya kondisi ekonomi, teknologi, geografi dan biologi. Kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya.

Herbert Marcuse dikenal sebagai salah seorang inspirator gerakan “kiri baru” (*the new left*), doktrin Marcuse tentang sistem politik dan sistem sosial dinilai lebih radikal dari kaum komunis ortodoks. Para pengagumnya malah menjulukinya sebagai sang nabi: nabi yang menjadi inspirator revolusi mahasiswa tahun 1968. Marcuse yang dikenal juga sebagai perintis dari Mazhab Frankfurt yang juga melihat ciri perkembangan masyarakat industri saat ini. Menurutnya ada tiga ciri masyarakat industri atau teknologi modern. Pertama, masyarakat berada di bawah kekuasaan prinsip teknologi. Suatu prinsip yang semua tekanannya dikerahkan untuk memperlancar, memperluas, dan memperbesar produksi. Kemajuan manusia disamakan dengan terciptanya perluasan teknologi. Kekuasaan teknologi sudah mencakup seluruh bidang kehidupan; tidak hanya melingkupi bidang ekonomi saja, melainkan juga bidang-bidang lain: politik, pendidikan, dan budaya.

Kedua, masyarakatnya menjadi irasional secara keseluruhan, sebab terjadi kesatuan antara produktifitas dan destruktifitas.

Kekuatan produksi tidak digunakan untuk perdamaian, melainkan untuk menciptakan potensi-potensi permusuhan dan kehancuran, misalnya, untuk persenjataan. Semua pihak setuju jika anggaran senjata dan pertahanan perlu ditingkatkan, padahal ini tidak masuk akal. Namun demi kelangsungan pertahanan, anggaran militer harus terus bertambah. modern menampilkan sifat “rasional dalam detail, tetapi irasional dalam keseluruhan.”

Ketiga, masyarakatnya berdimensi satu. Inilah ciri yang paling fundamental. Segala segi kehidupannya hanya diarahkan pada satu tujuan, yaitu meningkatkan dan melangsungkan satu sistem yang telah berjalan. Manusia tidak lagi memiliki dimensi-dimensi lain, bahkan dengan satu tujuan itu, dimensi-dimensi lain disingkirkan. Sejarah telah mencatat bahwa manusia pada masyarakat industri modern memiliki kemungkinan yang objektif agar dapat merealisasikan pemuasan akan kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi, yang terjadi sesungguhnya, manusia tetap saja terhalang karena adanya suasana represif. Peran dan peluang ilmu dan teknologi memang sangat besar. Ukuran rasionalitas masyarakat adalah rasionalitas teknologi.

Manusia dan masyarakat masuk ke dalam perangkap, penguasaan, dan manipulasi teknologi. Teknologi mampu menggantikan tenaga manusia bukan saja dalam bidang industri, namun juga dalam seluruh mata rantai kehidupan. Asal manusia dan masyarakat dapat dikuasai, digunakan, diperalat, dimanipulasi, atau ditangani, berarti manusia dan masyarakat sudah terjatuh dalam sistem yang mutakhir ini. Teknologi yang pada awalnya diciptakan sebagai alat emansipasi dari kekejaman alam, kini malah dipakai untuk menindas atau merepresi manusia. Karena itu, hal yang paling menonjol dalam masyarakat industri modern adalah ‘toleransi represif,’ yaitu suatu toleransi yang memberi kesan seakan menyajikan kebebasan yang luas padahal maksudnya tidak lain daripada menindas.

Kemanusiaan, kebebasan, otonomi, kehidupan sosial, tidak diberi kesempatan, semuanya sudah menjadi alat. Masyarakat demikian, menurut Marcuse, lebih suka memertahankan *status-quo*, baik bagi penganut sistem kapitalisme maupun para penganut sistem sosialisme. Masyarakat modern juga

tidak menunjukkan adanya penghapusan kelas. Bedanya, rakyat banyak (termasuk kaum buruh) mendukung kelangsungan sistem tersebut dan sekaligus ikut dalam sistem yang sudah begitu mapan. Jika Marx mengeluh akibat pekerjaan yang berat dan membosankan, ditambah pula akibat upah kerja yang amat rendah dari kaum pemodal, maka Marcuse mengatakan kini kaum buruh tidak mengeluh lagi dengan kerja kerasnya karena pemuasan kebutuhan terpenuhi. Kaum buruh tidak lagi revolusioner, mereka sudah menjadi para pembela sistem kerja itu sendiri.

Setidaknya ada lima karakter masyarakat satu dimensi seperti dijelaskan oleh Marcuse. Pertama, Administrasi Total. Dari sejumlah kemajuan hebat dan keberhasilan terbesar yang diraih sistem kapitalis yang bertumpu pada keunggulan teknologi adalah kemampuan penguasa kapitalis mengalihkan dominasi ke dalam administrasi total. Administrasi total merupakan strategi pengaturan dan pengelolaan yang bertujuan mengharmoniskan pemusatan dan penyatuan kekuatan sosial, politik, ekonomi, militer, dan budaya ke dalam satu tangan. Sarana yang dimanfaatkan adalah menciptakan 'musuh bersama' nasional guna memaksa semua warga agar memerlukan yang tidak diperlukan dan mengorbankan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Kedua, Bahasa Fungsional. Medium utama administrasi total adalah bahasa, mengingat subjek utama yang dihadapi, diatur, dan dikelola adalah manusia. Bahasa merupakan ungkapan kemampuan berpikir dan proses perwujudan potensi individu. Karena itu, hal utama yang perlu digarap dalam upaya penaklukan total dan tuntas adalah pembentukan wacana berpikir, cara berkomunikasi, dan berwicara. Rezim kapitalis ingin mengubah wacana prateknologi dan memberikan muatan baru yang lebih sesuai dengan realitas teknologis dengan menciptakan bahasa sendiri: bahasa fungsional. Ketiga, Penghapusan Sejarah. Dalam hidup menyejarah, nalar manusia mengambil dua sikap yang berbeda. Di satu pihak, ada kontinuitas gerak dialektis nalar dalam rangka mengenal, mengerti, memahami, dan mengolah fakta, data, dan peristiwa. Kontinuitas mengacu pada karya nalar sebagai kemampuan yang otonom dan transenden. Di pihak lain, terdapat diskontinuitas sejarah nalar berada dalam kesatuan dengan badan. Dalam kesatuan ini, nalar

terikat dengan ruang dan waktu sehingga aktifitasnya tunduk pada hukum sebelum dan sesudah, di sana dan di sini, kini dan nanti. Berangkat dari pemakaian bahasa fungsional sebagai bahasa tunggal dalam masyarakat kapitalis, pernyataan Marcuse bahwa pemaksaan makna tunggal bahasa dalam semesta wacana merupakan keputusan dan tindakan politis, bukan sekadar persoalan dunia akademis, mendapat pembenarannya. Promosi dan aplikasi bahasa fungsional yang bersikap anti oposisi dan selalu alergi pada kekaburan dan perbedaan makna merupakan strategi penguasa untuk menguasai kesadaran dan menutup ruang perbedaan dalam waktu. Secara sosial, bahasa fungsional memuat kandungan ideologis, sehingga menjadi bahasa anti historis yang radikal, dan radikalitas demikian memuat dan mengalir dari rasionalitas operasional yang cenderung menafikan relasi masa lampau dan masa kini.

Keempat, Kebutuhan palsu. Kebutuhan palsu merupakan suatu keperluan yang dibebankan oleh aneka kepentingan sosial tertentu kepada semua individu dengan maksud menindas dan menggerogoti mereka. Sekarang ini, terpampang jelas propaganda sistematis dan kontinu untuk semua kebutuhan palsu yang dijejalkan. Propaganda kebutuhan palsu dilakukan lewat aneka macam promosi, pameran dan iklan mengenai merek dagang, tempat wisata, pusat perbelanjaan, mode, apartemen, lokasi perumahan, ponsel, komputer, kendaraan bermotor, dan peralatan rumah tangga, hingga beragam jenis kursus.

Kelima, Imperium Citra. Dewasa ini, citra (image) menjelma menjadi mantra gaib yang menyusup ke segala sisi kehidupan individu dan masyarakat, bahkan memainkan peranan besar dalam dunia politik dan kekuasaan. Para pemimpin negara, kandidat yang bersaing guna memerebutkan posisi sebagai presiden atau perdana menteri dan jabatan di bawahnya menaruh perhatian yang besar terhadap citra. Mereka sungguh serius merawat citra dirinya sebagai public figure dan sering berperilaku bagaikan selebritas dari dunia entertainment. Lebih parah lagi, dominasi citra merasuk pula ke wilayah praksis kekuasaan dan menjadi bahan pertimbangan utama dalam keputusan politik dan kebijakan pemerintah yang tergambar dalam istilah populis dan tidak populis.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa realitas sosial Herbert Marcuse telah memasuki tahap kontemporer. Dalam tahap kontemporer realitas sosial tidak lagi dipandang sebagai kenyataan abadi seperti tahap premodern, melainkan menghindari asumsi yang bersifat metafisik. Tahap kontemporer juga berbeda dengan tahap dinamis-historis yang memandang realitas sosial selalu berkembang secara historis, melainkan memadukan unsur teknologi, bahasa, dan unsur kebudayaan lainnya. Pandangan Marcuse tentang realitas sosial masyarakat industri seperti sekarang ini terpengaruh mulai dari aspek teknologi yang menindas manusia sampai manipulasi bahasa. Oleh karena itu realitas sosial masyarakat bagi Herbert Marcuse tak bisa lepas dari cengkraman kapitalisme yang telah berkembang menjadi *late capitalism*. Ada dua hal penting yang terjadap pada masyarakat industri, yakni:

Pertama Secara Umum:

- 1) Meluasnya produksi massa barang-barang industri dengan menggunakan mesin, yang terpusat di kota-kota besar
- 2) Migrasi massal dari pedesaan ke kota-kota (urbanisasi)
- 3) Peralihan dari pekerjaan sektor pertanian kepada pekerjaan di sektor pabrik
- 4) Jumlah penduduk kota yang melek huruf seiring kebutuhan bidang pekerjaan yang lebih komplek
- 5) Munculnya surat kabar untuk kaum urban sebagai sarana untuk mengiklankan produk-produk baru industri. Media massa mempunyai peranan penting dalam masyarakat industri
- 6) Penemuan teknologi baru seperti film, radio, dan televisi sebagai hiburan kaum urban.

Kedua Secara Khusus

Pertama, Mereka dalam menyambung kehidupan tidak melewati lahan pertanian seperti masyarakat agraris atau mengandalkan hasil peternakan, seperti masyarakat padang pasir, melainkan pada jalannya mesin-mesin pabrik, khususnya di daerah perkotaan, sedangkan pertanian dikerjakan di daerah pedesaan dalam lokalisasi yang sangat kecil, karena dengan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menciptakan panen yang cukup besar, di Amerika Serikat lokalisasi pertanian hanya 5% saja, sudah mampu memberikan

kehidupan pada masyarakat lain yang bekerja di luar sektor pertanian. Ketergantungan masyarakat industri terhadap pabrik, sama halnya bergantung dengan penguasa pabrik, tidak jarang dijumpai penguasa pabrik bersikap tidak etis atau tidak manusiawi terhadap pekerja diantaranya melarang beribadah, membuka aurat, memaksa ikut upacara agamanya, bila tidak bersedia akan dikeluarkan. Mereka yang tidak tahan menghadapi kesulitan hidup mudah melepaskan kepercayaan agamanya. Berbeda dengan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan tanah pertanian, tanah tersebut tidak mampu memaksakan orang berlaku dholim.

Kedua Potensi-potensi kehidupan terdapat pada sarana-sarana yang dapat menunjang perkembangan pabrik diantaranya ialah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan gedung misalnya pengetahuan arsitek atau sipil, yang berhubungan dengan pengaturan personalnya terdapat pada pengetahuan personalia atau manajemen untuk pengembangan produksi terdapat pada manajemen pemasaran, akuntansi untuk kegiatan administrasinya dan masih banyak lagi pengetahuan untuk bekal hidup pada Masyarakat Industri. Pengetahuan yang tidak berhubungan langsung untuk menunjang produksi kurang mendapatkan perhatian, misalkan pengetahuan keguruan, lebih dijauhkan lagi apabila bidangnya tidak berhubungan dengan produksi, misalkan bidang keagamaan, sejarah, bahasa, atau filsafat. Secara alamiah akan terjadi klas ilmu pengetahuan, pengetahuan teknik perusahaan lebih dominan daripada pengetahuan sosial. Akibatnya mereka akan cepat mendapatkan kemajuan material akan tetapi sangat ketinggalan terhadap permasalahan nilai-nilai kemanusiaan, kehidupan dan ketuhanan.

Ketiga. Kecintaan masyarakat industri terhadap kebahagiaan material sangat besar dibandingkan dengan kebahagiaan immaterial, sebagaimana kebahagiaan masyarakat agraris, yang lebih menekankan pada kerukunan, kasih sayang dan saling menghormati. Hal itu dapat dimaklumi karena bentuk-bentuk kebahagiaan material pada masyarakat industri kuantitas dan kualitasnya sangat banyak, variatif dan selalu mengalami perubahan, berkat dukungan kemajuan pengetahuan teknologi. Mereka lebih baik mengorbankan

kebahagiaan immaterial yang ruang lingkupnya lebih kecil, demi kebahagiaan material. Sehingga masyarakat industri banyak mengalami gangguan psikis, rasa ketegangan, persaingan, ketakutan terhadap ketertinggalan dan konflik, perjudian, wanita dan minuman keras sering dijadikan tempat hiburan untuk menghilangkan ketegangan.

C. Perilaku Masyarakat Industri

Masyarakat industri pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah manusia perorangan atau individu. Kesempatan kerja lebih banyak diperoleh warga kota karena sistem pembagian kerja yang tegas dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya (*profesionalisme*). Pola pemikiran yang rasional, sistematis dan objektif yang pada umumnya dianut masyarakat perkotaan menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan dari pada faktor pribadi. Begitu juga masalah faktor waktu lebih penting dan berharga, sehingga pembagian waktu yang sangat teliti sangat penting untuk mengejar kepentingan individu, para pengelola industri akan menciptakan aturan-aturan yang berlaku sesuai tuntutan dalam dunia industri yang jauh berbeda dengan aturan masyarakat agraris, aktivitas yang dilakukan masyarakat industri pun berbeda dengan masyarakat agraris. Mereka cenderung lebih menghargai waktu, hidup serba cepat, jam kerja mereka lebih jelas, kerja tersistematisasi, persaingan ketat di berbagai aspek, dan sebagainya. Mereka juga cenderung lebih menggunakan rasio dalam memutuskan sesuatu ataupun bertindak. Perubahan sosial sangat nampak dengan nyata, karena kota-kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar.

Menurut. Thayeb M. Gobel (pendiri Gobel Group) dan Mr. Konosuke Matsushita (pendiri Matsushita Electric Industrial co.,ltd-jepang) menjelaskan bahwa kemajuan masyarakat industri di Indonesia, tidak mungkin lepas dari daya kreativitas dan inovasi pelaku industri masyarakat pengguna produk industri. Karena itu, daya kreativitas dan inovasi yang menjadi sumber mata air kemajuan dan perkembangan masyarakat industri di Indonesia. Dalam masyarakat industri biasanya terdapat spesialisasi pekerjaan. Terbentuknya spesialisasi

pekerjaan tersebut disebabkan oleh semakin kompleks dan rumitnya bidang-bidang pekerjaan dalam masyarakat industri. Proses perubahan yang terjadi dalam diferensiasi pekerjaan ini mengakibatkan terjadinya hierarki prestise dan penghasilan yang kemudian menimbulkan adanya stratifikasi dalam masyarakat yang biasanya berbentuk piramida. Stratifikasi sosial inilah yang menentukan strata anggota masyarakat yang ditentukan berdasarkan sikap dan karakteristik masing-masing anggota kelompok. Di wilayah Industri sudah banyak terdapat industri. Ini menyebabkan mata pencaharian masyarakat setempat sebagai karyawan atau buruh pabrik. Hal ini disebabkan lahan pertanian sekitar desa industri telah menjadi lahan industri, menjadikan kebanyakan warga menjadikan mata pencaharian utama adalah sebagai karyawan pabrik atau sebagai buruh. Selain itu akibat wilayah mereka menjadi industri, menyebabkan dari masyarakat menjadi pedagang, baik kecil maupun menengah.

Dalam masyarakat Industri, mata pencaharian masyarakatnya secara umum dapat diklasifikasikan sebagai pengolah dan pembuat barang-barang industri. Bercocok tanam tidak lagi menjadi pekerjaan tetap mereka, karena lahan-lahan pertanian telah berubah fungsi menjadi home industri dan pabrik pabrik. Perlu digarisbawahi bahwa perubahan mata pencaharian tadi, juga sangat berpengaruh pada kemajuan perdagangan. Sehingga berdagang juga merupakan salah satu ciri mata pencaharian masyarakat industri.

D. Budaya Kerja dan Etos Kerja Di era industri

1. Budaya Kerja

Budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai “kerja” atau “bekerja”. Budaya kerja organisasi adalah manajemen yang meliputi pengembangan, perencanaan, produksi, dan pelayanan suatu produk yang berkualitas dalam arti optimal, ekonomis, dan memuaskan. Berkaitan dengan budaya kerja, terdapat beberapa Fungsi Budaya Kerja, yakni; 1) Suatu

komponen kualitas manusia yang melekat dengan identitas bangsa dan menjadi tolok ukur dasar dalam pembangunan. 2) Ikut menentukan integritas bangsa dan menjadi penyumbang utama dalam menjamin kesinambungan kehidupan bangsa. Dan 3) Terkait erat dengan nilai-nilai dan falsafah bangsa yang mendorong kinerja seseorang.

Budaya kerja suatu masyarakat akan melekat ketika seseorang dalam bekerja, tentu budaya kerja yang positif yang akan bermanfaat, adapun Manfaat Budaya Kerja: yakni :

- a. Mengubah sikap dan perilaku pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- b. Meningkatkan kepuasan kerja dan pelanggan, pengawasan fungsional, dan mengurangi pemborosan.
- c. Menjamin hasil kerja berkualitas
- d. Memperkuat jaringan kerja (*networking*)
- e. Menjamin keterbukaan (*accountable*)
- f. Membangun kebersamaan

Dalam budaya Kerja yang focus pada proses, yaitu *Focus on Process culture*, maksudnya adalah: Individu yang dihargai dalam budaya ini adalah yang mencoba untuk melindungi integritas sistem lebih dari kepentingan pribadi Di lembaga pemerintah, karyawan bahkan tak memperoleh umpan balik. Sebagai akibatnya, efektifitas pekerjaan sampai terjadi sesuatu yg membutuhkan evaluasi.

2. Etos Kerja

Menurut Gregory (2003) sejarah membuktikan negara yang dewasa ini menjadi negara maju, dan terus berpacu dengan teknologi/informasi tinggi pada dasarnya dimulai dengan suatu etos kerja yang sangat kuat untuk berhasil. Maka tidak dapat diabaikan etos kerja merupakan bagian yang patut menjadi perhatian dalam keberhasilan suatu perusahaan, perusahaan besar dan terkenal telah membuktikan bahwa etos kerja yang militan menjadi salah satu dampak keberhasilan perusahaannya. Etos kerja seseorang erat kaitannya dengan kepribadian, perilaku, dan karakternya. Setiap orang memiliki internal being yang merumuskan siapa dia. Selanjutnya internal being menetapkan respon, atau reaksi terhadap tuntutan external. Respon internal being terhadap tuntutan external dunia kerja menetapkan etos kerja seseorang (Siregar, 2000 : 25). Etos berasal dari bahasa Yunani *ethos* yakni

karakter, cara hidup, kebiasaan seseorang, motivasi atau tujuan moral seseorang serta pandangan dunia mereka, yakni gambaran, cara bertindak ataupun gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan. Dengan kata lain etos adalah aspek evaluatif sebagai sikap mendasar terhadap diri dan dunia mereka yang direfleksikan dalam kehidupannya (Khasanah, 2004:8). Menurut Geertz (1982:3) Etos adalah sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup. Sikap disini digambarkan sebagai prinsip masing-masing individu yang sudah menjadi keyakinannya dalam mengambil keputusan . Menurut kamus Webster, etos didefinisikan sebagai keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok, atau sebuah institusi (*guiding beliefs of a person, group or institution*).

Menurut Usman Pelly (1992:12), etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Dapat dilihat dari pernyataan di muka bahwa etos kerja mempunyai dasar dari nilai budaya, yang mana dari nilai budaya itulah yang membentuk etos kerja masing-masing pribadi. Etos kerja dapat diartikan sebagai konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benar yang diwujudkannyatakan melalui perilaku kerja mereka secara khas (Sinamo, 2003,2). Menurut Toto Tasmara, (2002) Etos kerja adalah totalitas kepribadian dirinya serta caranya mengekspresikan, memandang, meyakini dan memberikan makna ada sesuatu, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal sehingga pola hubungan antara manusia dengan dirinya dan antara manusia dengan makhluk lainnya dapat terjalin dengan baik. Etos kerja berhubungan dengan beberapa hal penting, antara lain:

- a. Orientasi ke masa depan, yaitu segala sesuatu direncanakan dengan baik, baik waktu, kondisi untuk ke depan agar lebih baik dari kemarin.
- b. Menghargai waktu dengan adanya disiplin waktu merupakan hal yang sangat penting guna efisien dan efektivitas bekerja.

- c. Tanggung jawab, yaitu memberikan asumsi bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan ketekunan dan kesungguhan.
- d. Hemat dan sederhana, yaitu sesuatu yang berbeda dengan hidup boros, sehingga bagaimana pengeluaran itu bermanfaat untuk kedepan.
- e. Persaingan sehat, yaitu dengan memacu diri agar pekerjaan yang dilakukan tidak mudah patah semangat dan menambah kreativitas diri.

Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu sebagai seorang pengusaha atau manajer. Menurut A. Tabrani Rusyan, (1989) fungsi etos kerja adalah:

- 1) pendorong timbulnya perbuatan
- 2) penggairah dalam aktivitas
- 3) penggerak, seperti; mesin bagi mobil, maka besar kecilnya motivasi yang akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan.

Terdapat beberapa cara untuk menumbuhkan etos kerja, antara lain:

- 1) Menumbuhkan sikap optimis
 - Mengembangkan semangat dalam diri
 - Peliharalah sikap optimis yang telah dipunyai
 - Motivasi diri untuk bekerja lebih maju
- 2) Jadilah diri anda sendiri:
 - Lepaskan impian
 - Raihlah cita-cita yang anda harapkan
- 3) Keberanian untuk memulai :
 - Jangan buang waktu dengan bermimpi
 - Jangan takut untuk gagal
 - Merubah kegagalan menjadi sukses
- 4) Kerja dan waktu :
 - Menghargai waktu (tidak akan pernah ada ulangan waktu
 - Jangan cepat merasa puas
- 5) Kosentrasikan diri pada pekerjaan :
 - Latihan berkonsentrasi
 - Perlunya beristirahat
- 6) Bekerja adalah sebuah panggilan Tuhan (Khasanah, 2004). Aspek Kecerdasan yang Perlu Dibina dalam Diri, untuk Meningkatkan Etos Kerja, meliputi:

- a. Kesadaran: keadaan mengerti akan pekerjaannya.
 - b. Semangat: keinginan untuk bekerja.
 - c. Kemauan: apa yang diinginkan atau keinginan, kehendak dalam bekerja
 - d. Komitmen: perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan (janji dalam bekerja)
 - e. Inisiatif: usaha mula-mula, prakarsa dalam bekerja.
- 7) Produktif: banyak menghasilkan sesuatu bagi perusahaan.
- 8) Peningkatan: proses, cara atau perbuatan meningkatkan usaha, kegiatan dan sebagainya dalam bekerja
- 8) Wawasan: konsepsi atau cara pandang tentang bekerja.

Terdapat pula cara Mengembangkan Etos Kerja di perusahaan, Secara umum, kehidupan di perusahaan lebih banyak dihabiskan untuk melakukan aktifitas perencanaan, operasional, pengawasan, dan evaluasi. Sangat jarang ada aktifitas pencerahan batin karyawan untuk memahami budaya perusahaan, etika kerja, visi, misi, dan nilai-nilai perjuangan perusahaan. Padahal sebagian besar kegagalan perusahaan diakibatkan oleh rendahnya etos kerja karyawan. Etos kerja yang rendah membuat semua strategi dan rencana kerja perusahaan yang hebat itu, tidak mampu dijalankan oleh karyawan dengan maksimal. Akibatnya, perusahaan akan kekurangan energi sukses dari para karyawannya. Oleh karena itu, sudah saatnya perusahaan peduli kepada pengembangan etos kerja secara berkelanjutan dalam semua aspek aktifitas perusahaan. Salah satu cara terefektif untuk pengembangan etos kerja, adalah melalui penginternalisasian budaya perusahaan ke mind set setiap karyawan. Budaya perusahaan yang wajib diwujudkan dalam berbagai macam kebijakan, aturan, sistem, dan prosedur kerja. Termasuk di dalamnya, seperti panduan etika bisnis, panduan code of conduct, dan panduan sop yang jelas. Di mana, nilai-nilai perjuangan yang ada dalam budaya perusahaan tersebut harus dieksplorasi untuk dicerahkan kepada setiap karyawan. Proses penginternalisasian nilai-nilai etos kerja ini harus dilakukan dengan sikap tegas dan konsisten, untuk menghasilkan karyawan-karyawan yang beretos kerja unggul dan berkualitas. Sikap tegas dan konsisten ini harus berkelanjutan, tak boleh terhenti di satu titik, dan bersifat terus-menerus melalui evaluasi dan perbaikan. Tidak ada salahnya bila

perusahaan mau memberikan pencerahan melalui konsep doktrin kepada setiap karyawan. Sebab, dipercaya konsep doktrin bisa lebih memaksa pikiran bawah sadar untuk menerima nilai-nilai yang diharuskan oleh perusahaan, untuk dimiliki oleh para karyawannya. Perlu diingat, tidak semua orang bisa menerima pencerahan, kadang diperlukan doktrin yang tegas untuk membangun etos kerja yang unggul.

Pengembangan etos kerja dapat dimulai dari aksi pencerahan atau pun aksi doktrinisasi terhadap mind set karyawan; untuk menjalankan rencana dan strategi bisnis perusahaan sesuai sasaran; untuk menjalankan birokrasi administrasi yang efektif dan efisien untuk melakukan *prosesing* yang teliti dan telaten; untuk melakukan efisiensi pada semua aspek biaya; untuk memanfaatkan teknologi secara efisien dan efektif; mampu melayani pelanggan dengan sikap baik dan profesional; mampu memaksimalkan kualitas aset-aset produktif untuk menjadi mesin uang; dan mampu bekerja untuk mempercepat perputaran bisnis dengan kualitas etos kerja terbaik. Etos kerja yang berkualitas tinggi harus menjadi jati diri, etika, budaya, dan moralitas perusahaan dalam relasinya dengan *stakeholder*. Tanpa adanya etos kerja berkualitas, perusahaan hanya akan menjadi beban buat *stakeholder*-nya, dan tidak pernah menjadi aset yang akan menguntungkan *stakeholder*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmawan. 1993, *Aspek-Aspek dalam Sosiologi Industri*, Bandung: Bina Cipta.
- Nurhayati, Cucu . 2015, *Sosiologi Industri*, 2015, Jakarta: Pustaka Setia.
- Parker dkk. 1992, *Sosiologi Industri*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Poloma, Margaret M. 1979. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Weintré, Johan. 2003, *Organisasi Sosial dan Kebudayaan Kelompok Minoritas Indonesia: Studi Kasus Masyarakat Orang Rimba di Sumatra (Orang Kubu Nomaden)*. Yogyakarta: Pusat Studi Kebudayaan UGM.
- Ritzer**, G. & Goodman, D.J, 2003. *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan Alimandan dari judul asli “*Modern Sociological Theory*” (McGraw-Hill). Jakarta: Kencana-Prenada Media.
- Arifin, Anwar. 2011. *Sistem Komunikasi Indonesia I*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Budiardjo, Mariam. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Jakarta. Gramedia Pustaka Umum
- Lathifah Lia, 2014. <http://latifahlia.blogspot.co.id/2014/10/pengaruh-independensi-media-massa.html> diakses 25 April 2017 pukul 10:05 WIB
- Parker, dkk. *Ciposiologi Industri*. Jakarta: Pt Rineka Cipta. 1992.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 1992
- Supardan Dadang. 2007. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Bandung. Bumi Aksara.
- Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society* (Boston: Beacon, 1971) hal.4
- Handoko, T Hani, 1991, *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, Edisi 1, BPFE Yogyakarta.
- Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society* (Boston: Beacon, 1971) hal.48
- Saeng, Velentinus. 2012. *Herbert Marcuse: Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global* Jakarta: Gramedi
- Parker, dkk. *Ciposiologi Industri*. Jakarta: Pt Rineka Cipta. 1992.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 1992.

Alvin Toffler, 1980, *The Third Wave*. William Morrow and Companies.

BPS, *Nilai Tambah Menurut Sub Sektor 2001-2008* (Statistik Industri)

Purnawan Basundoro, *Industralisasi, Perkembangan Kota dan Respon Masyarakat: Studi Kasus Kota Gersik* (Jurnal Humaniora, Volume XIII, No 2/2001), h. 133

Hal tersebut didasarkan pada UU No 22 tahun 1999 yang sekarang telah diubah menjadi UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Siti Nadroh dkk, *Indonesia Selayang Pandang*, (Jakarta: Medina Indonesia, 2003), h. 108.

[http://ratihsetya.blogspot.co.id-ruang-lingkup-sosiologi.html/2012/05](http://ratihsetya.blogspot.co.id-ruang-lingkup-sosiologi.html/2012/05/magentarosmaya.blog.fisip.uns.ac.id-sosiologi/2012/09/30Zoelyer.Blogspot.Com-Sosiologi-Industri./2012/04-Miss-Seliosa.Blogspot.Com-Pendekatan-Perspektif-Sosiologi-Industri/2012/03)
[magentarosmaya.blog.fisip.uns.ac.id-sosiologi](http://magentarosmaya.blog.fisip.uns.ac.id-sosiologi/2012/09/30Zoelyer.Blogspot.Com-Sosiologi-Industri./2012/04-Miss-Seliosa.Blogspot.Com-Pendekatan-Perspektif-Sosiologi-Industri/2012/03)
[industri/2012/09/30Zoelyer.Blogspot.Com-Sosiologi-Industri./2012/04](http://magentarosmaya.blog.fisip.uns.ac.id-sosiologi/2012/09/30Zoelyer.Blogspot.Com-Sosiologi-Industri./2012/04-Miss-Seliosa.Blogspot.Com-Pendekatan-Perspektif-Sosiologi-Industri/2012/03)
[Miss-Seliosa.Blogspot.Com-Pendekatan-Perspektif-Sosiologi-](http://magentarosmaya.blog.fisip.uns.ac.id-sosiologi/2012/09/30Zoelyer.Blogspot.Com-Sosiologi-Industri./2012/04-Miss-Seliosa.Blogspot.Com-Pendekatan-Perspektif-Sosiologi-Industri/2012/03)
[Industri/2012/03](http://magentarosmaya.blog.fisip.uns.ac.id-sosiologi/2012/09/30Zoelyer.Blogspot.Com-Sosiologi-Industri./2012/04-Miss-Seliosa.Blogspot.Com-Pendekatan-Perspektif-Sosiologi-Industri/2012/03)

Kepmenakertrans No. KEP.102/MEN/IV/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3235/keputusan-menteri-](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3235/keputusan-menteri-atas-waktu-dan-upah-kerja-lembur-)
[atas-waktu-dan-upah-kerja-lembur-](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3235/keputusan-menteri-atas-waktu-dan-upah-kerja-lembur-)

Kian Wie. 1988. *Industrialisasi Indonesia Analisis dan Catatan Kritis*. Jakarta : Pustaka

Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Latief, Dochak. 1972. *Arah Industrialisasi Di Indonesia dan Masalah Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Ikip Yogyakarta

Hikmat (2010), *Manajemen Pendidikan*, Pustaka Setia. Bandung

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh

Farid Mu'azd, 2006, *Pengadilan Hubungan Industrial*, Jakarta, Ind-Hill-Co.

Robert L. Mathis & John H. Jackson, 2001, *Manajemen SDM*, Jakarta, Salemba Empat.

Sutarto Wijono, *Psikologi Industri & Organisasi*, 2010, Jakarata, Kencana Prenada Media Group.

Yunus Shamad, *Hubungan Industrial di Indonesia*, 1995, Jakarta, Bina Sumber Daya Manusia.

Handout Antropologi Perkotaan. Urban Typologies dalam *The Origin and Evolution of Cities*. Hal 47-49

<http://studiperadaban.blogspot.com/2010/01/sosiologi-kota.html> diakses pada 29/03/2015 pukul 21.06)

Kirana, Wihana. 2008. *Ekonomi Industri Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE

Thee, Kian Wie. 1988. *Industrialisasi Indonesia Analisis dan Catatan Kritis*. Jakarta : Pustaka

Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030*. Yogyakarta:

Andi Yogyakarta Latief, Dochak. 1972. *Arah Industrialisasi Di Indonesia dan Masalah Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Ikip Yogyakarta.

Alvin Toffler, 1980, *The Third Wave*. William Morrow and Companies.

BPS, *Nilai Tambah Menurut Sub Sektor 2001-2008* (Statistik Industri).

Bryan Turner. 2003. *Teori Sosiologi Modernitas Postmodernitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Poloma, M Margaret. 1999. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

George Ritzer. 2013. *Eksplorasi dalam Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Barbara A. Strassberg, Science, Religion, and Seculairty in a Technological Society:

Magic, Religion, Science, Technology, and Ethics in the Postmodern World, dalam

Daniel Bell, *The Coming of Post-Industrial Society*, (New York: Basic Book, 1973).

David S. Alberts, Daniel S. Papp, *The Information Age: An Anthology on its Impact and Consequences*, (CCRP Publication Series, 1997).

Charles Taylor, *A Secular Age*, (The Belknap Press of Harvard University Press, 2007).

Edgar F. Borgotta, Rhonda J.V. Montgomery, *Encyclopedia of Sociology*, (New York: Mcmillan, 2000), 2nd edition, Vol.3.

Eddy Lee, Marco Vivarelli, *The Social Impact of Globalization in the Developing Countries*, (CSGR Working Paper no.199, Maret 2006).

Jacques Ellul, *The Technological Bluff*, (New York: The Continuum Publishing Corporation, 1986).

Kathy S. Stolley, *The Basics of Sociology*, (London: Greenwood Press, 2006).

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), cet-1.

Nico Stehr, *A World Made of Knowledge*, makalah yang ia ringkaskan dari bukunya *The Fragility of Modern Societies*, (London: Sage Publication, 2001) dan *Knowledge and Economic Conduct*, (Toronto: University of Toronto Press, 2002)

Niklas Luhmann, Globalization or World Society: How to Conceive of Modern Society?, (International Review of Sociology, 1997)

Parlo Singh, Globalization and Education, dalam Jurnal Educational Theory, (Univerisity of Illionis, 2004), vol.54. no.1

Paul Masson, Globalization: Facts and Figures, dalam IMF Policy Discussion Paper, (International Moneterary Fund, Peter N. Stearns, Globalization in World History, (London: Routledge, 2010).

Peter F. Drucker, The Next Information Revolution, (Forbes ASAP: www.forbes.com, 1998).

Abdurahmat, Idris., *Geografi Industri*, IKIP Bandung, Bandung, 1983.

Sandy, I Made., *Republik Indonesia, Geografi Regional Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.

Hesmondhalgh, David (2002) *The Cultural Industries*, SAGE

Howkins, John, *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*, Penguin

Florida, Richard, *The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life*, Basic Books

Bianchini, Charles, *The Creative City*, Demos

DCMS (2001), *Creative Industries Mapping Document 2001* (2 ed.), London, UK: Department of Culture, Media and Sport

Hesmondhalgh, David (2002), *The Cultural Industries*, SAGE

Howkins, John, *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*, Penguin)

UNCTAD, *Creative Economy Report 2008*, UNCTAD

Sinopsis

Berawal dari terbatasnya buku referensi bahan ajar terkait dengan mata kuliah Sosiologi Industri. sebagai dosen pengampu mata kuliah selalu membuat *hand out* sebagai bahan bacaan kepada mahasiswa yang diambil dari berbagai sumber. Dari bebeapa tulisan yang sempat penulis kumpulkan diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan hingga akhirnya buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Keinginan untuk menulis buku ini sudah cukup lama, sejak penulis aktif menjadi wartawan banyak meliput terkait dengan masyarakat insdustri, serta kebijakan-kebijakan industri. Setelah melakukan diskusi serta konsultasi dengan beberapa teman kolumnis, penulis mendapat kritik, saran dan masukan, sehingga buku ini lebih komprehesip, singkat dan padat. Sebagai penulis, mengharapkan buku ini menjadi referensi serta menambah perbendaharaan bagi dunia akademik, khususnya dalam ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan lainnya.

Sosiologi Industri merupakan cabang dari ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari tentang struktur dan dinamika sosial masyarakat industri serta berbagai permasalahan sosial yang ada di dalamnya. Sosiologi Industri mengkaji masyarakat dari sudut pandang yang berhubungan antarmanusia yang melahirkan interasionlisme simbolik pada masyarakat industri. Dengan mempelajari Sosiologi Industri diharapkan dapat memahami konsep, kedudukan dan peran manusia baik secara individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat industri, pengaruh industri terhadap lingkungan sosial, termasuk ekonomi, sistem sosial, hubungan sesama manusia, sejarah pertumbuhan industri, hubungan timbal balik antara industri dengan keluarga dalam lingkungan sosial serta potensi dan perkembangan industri pada masyarakat.

Penulis menyadari, kajian dan sajian buku “Sosiologi Industri” ini tentu tidak sempurna, namun lebih tidak sempurna jika buku ini tidak ada. *Wallohu bissowab.*

Bandung, 6 Januari 2019
Penulis.

Biografi Penulis

Penulis lahir di Garut. Awal karier penulis pernah menjadi wartawan, kemudian pada tahun 2008 sampai tahun 2010 dua kali menjadi ketua Panwaslu di kabupaten Bandung. Sekarang Dosen prodi/Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ayahanda penulis adalah seorang mantri guru dan ibunya seorang putri dari seorang ulama pimpinan pondok pesantren Koropeak-Suci yang sekarang bernama pesantren Tarbiyah Islamiyah (Tarbis) Garut.

Pendidikan formal penulis mulai dari SD, SMP, PGAP-Negeri dan MAN I di Garut. Pendidikan SI-nya mengambil jurusan Tadris IPS, dan S2 mengambil Program Studi Masyarakat Islam (Sosiologi Islam) diselesaikan tepat dua tahun di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Program doktor (S3) penulis mengambil studi pada Sekolah Pascasarjana (SPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung melalui jalur Bea Siswa, Program Studi Pengembangan Kurikulum (PK) lulus pada tahun 2013 dengan predikat sangat memuaskan.